Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024
DI TANJUNG REDEB







DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA

Nomor : 13.A/LHP/XIX.SMD/5/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPIRAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024
DI TANJUNG REDEB

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
   Laporan ini memuat:
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 yang memuat Pernyataan Tanggung Jawab Bupati Berau.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
   Laporan ini memuat:
   a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN..... ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Berau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Berau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Berau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 13.B/LHP/XIX.SMD/5/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 19 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

a.n. Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA

Register Negara Akuntan No: D-45153

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki 47 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c. Laporan Operasional (LO):
d. Laporan Arus Kas (LAK);
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari yang terdiri dari:

a. Pemeriksaan interim dilakukan 35 hari mulai tanggal 11 Februari s.d. 17 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 23/ST/XIX.SMD/02/2025 tanggal 7 Februari 2025; dan

b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 25 hari mulai tanggal 13 April s.d. 7 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 77/ST/XIX.SMD/04/2025 tanggal 8 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan- perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BERAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Redeb, 19 Mei 2025

A.N. BUPATI BERAU,
WAKIL BUPATI BERAU

BUPATI
BERAU

KHALIS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
4	**PENDAPATAN**	**5.1.1**	**6.107.982.827.838,00**	**6.193.996.172.870,29**	**101,41**	**4.700.904.175.374,78**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**303.864.396.033,00**	**343.450.025.949,60**	**113,03**	**286.669.630.661,78**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	93.558.789.845,00	91.558.760.332,00	97,86	93.382.456.473,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	110.642.378.350,00	18.110.450.696,00	16,37	14.933.984.444,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	19.600.000.000,00	17.986.298.143,26	91,77	16.119.182.280,09
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	80.063.227.838,00	215.794.516.778,34	269,53	162.234.007.464,69
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**303.864.396.033,00**	**343.450.025.949,60**	**113,03**	**286.669.630.661,78**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**5.774.413.283.269,00**	**5.774.506.770.500,00**	**100,00**	**4.406.411.710.669,00**
4.2.01.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.2.1**	**4.813.515.450.269,00**	**4.847.083.601.192,00**	**100,70**	**3.579.099.939.714,00**
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20	2.846.123.582.480,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99	565.773.403.521,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67	52.763.540.954,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90	114.439.412.759,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**4.813.515.450.269,00**	**4.847.083.601.192,00**	**100,70**	**3.579.099.939.714,00**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.1.1.2.2**	**109.441.195.000,00**	**112.337.773.000,00**	**102,65**	**93.677.389.000,00**
4.2.01.02	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	100,00	93.677.389.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.4	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	120,73	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		**109.441.195.000,00**	**112.337.773.000,00**	**102,65**	**93.677.389.000,00**
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.1.1.2.3**	**851.456.638.000,00**	**815.085.396.308,00**	**95,73**	**733.634.381.955,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66	509.121.881.955,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	5.1.1.2.3.2	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00	224.512.500.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**851.456.638.000,00**	**815.085.396.308,00**	**95,73**	**733.634.381.955,00**
	Total Pendapatan Transfer		**5.774.413.283.269,00**	**5.774.506.770.500,00**	**100,00**	**4.406.411.710.669,00**
4.3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**29.705.148.536,00**	**76.039.376.420,69**	**255,98**	**7.822.834.044,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya		29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah		**29.705.148.536,00**	**76.039.376.420,69**	**255,98**	**7.822.834.044,00**
	JUMLAH PENDAPATAN		**6.107.982.827.838,00**	**6.193.996.172.870,29**	**101,41**	**4.700.904.175.374,78**
5	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**	**6.999.194.000.000,00**	**6.411.776.301.938,05**	**91,61**	**4.608.120.868.464,26**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**2.408.731.729.824,81**	**2.111.530.856.755,59**	**87,66**	**1.818.795.262.619,26**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07	812.677.295.576,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.031.969.667.362,21	868.596.837.598,25	84,17	834.570.312.408,61
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	208.839.505.389,00	189.599.952.449,00	90,79	163.011.244.933,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47	8.536.409.701,00
	Jumlah Belanja operasi		**2.408.731.729.824,81**	**2.111.530.856.755,59**	**87,66**	**1.818.795.262.619,26**
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**4.101.893.300.300,19**	**3.828.768.208.935,46**	**93,34**	**2.345.617.541.442,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	16.566.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16	7.825.488.693,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	275.837.543.299,21	259.968.567.330,29	94,25	172.966.458.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	580.117.759.021,98	472.685.076.375,72	81,48	307.876.754.279,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85	1.848.412.488.655,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.488.940.328,00	8.338.136.101,00	98,22	8.536.351.315,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	5.588.341.350,00	4.676.717.909,00	83,69	0,00
	Jumlah Belanja Modal		**4.101.893.300.300,19**	**3.828.768.208.935,46**	**93,34**	**2.345.617.541.442,00**

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**22.640.327.875,00**	**5.774.799.583,00**	**25,51**	**1.826.837.315,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51	1.826.837.315,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		**22.640.327.875,00**	**5.774.799.583,00**	**25,51**	**1.826.837.315,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**465.928.642.000,00**	**465.702.436.664,00**	**99,95**	**441.881.227.088,00**
5.4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	11.100.000.000,00	11.024.007.000,00	99,32	9.540.281.000,00
5.4.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.2	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00	99,97	432.340.946.088,00
5.4.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Daearh Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer		**465.928.642.000,00**	**465.702.436.664,00**	**99,95**	**441.881.227.088,00**
	JUMLAH BELANJA		**6.999.194.000.000,00**	**6.411.776.301.938,05**	**91,61**	**4.608.120.868.464,26**
	SURPLUS/DEFISIT	**5.1.3**	**(891.211.172.162,00)**	**(217.780.129.067,76)**	**24,44**	**92.783.306.910,52**
6	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**893.211.172.162,00**	**893.211.172.162,04**	**100,00**	**802.427.865.251,52**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00	802.427.865.251,52
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**893.211.172.162,00**	**893.211.172.162,04**	**100,00**	**802.427.865.251,52**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO		**891.211.172.162,00**	**891.211.172.162,04**	**100,00**	**800.427.865.251,52**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.5**	**0,00**	**673.431.043.094,28**	**0,00**	**893.211.172.162,04**



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	893.211.172.162,04	802.433.738.093,52
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.2	893.211.172.162,04	802.427.865.251,52
SUBTOTAL (1-2)		0,00	5.872.842,00
SiLPA/(SiKPA)	5.2.3	673.431.043.094,28	893.211.172.162,04
SUBTOTAL (3+4)		673.431.043.094,28	893.217.045.004,04
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		0,00	(5.872.842,00)
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.2.4	673.431.043.094,28	893.211.172.162,04



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

NERACA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Per 31 Desember 2024 dan 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	644.036.295.948,04	821.259.740.624,13
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	33.906.867,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	65.628.500,00	65.356.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	24.859.854.694,32	67.648.687.298,19
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	742.867.460,16	1.226.486.066,16
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	404.086.306,76	1.651.431.753,56
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	3.311.977.785,00	1.396.754.055,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	45.578.464.831,41	44.170.326.364,91
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	4.807.662.932,00	3.940.339.164,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	55.372.169,00
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	30.728.060.808,80	27.697.212.757,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	81.333.530.845,00	61.090.578.845,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.6	0,00	47.413.035.540,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(48.053.411.608,77)	(47.759.899.075,95)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	363.442.949,18	286.547.977,50
Persediaan	5.3.1.1.5	273.248.242.463,84	181.571.905.861,09
Jumlah Aset Lancar		**1.061.460.610.782,74**	**1.211.713.875.399,74**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**		
Investasi Non Permanen	**5.3.1.2.1**	0,00	0,00
Investasi Kepada BUMN		0,00	0,00
Investasi Kepada BUMD		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
		0,00	
Jumlah Investasi Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		596.513.621.017,22	618.232.967.990,13
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		**596.513.621.017,22**	**618.232.967.990,13**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**596.513.621.017,22**	**618.232.967.990,13**
ASET TETAP	**5.3.1.3**		
Tanah	5.3.1.3.1	1.072.297.219.600,83	1.069.237.842.504,83
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.370.551.524.477,78	1.109.298.981.825,43
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.370.435.810.216,46	2.128.863.132.087,38
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	11.880.709.415.429,90	9.093.051.129.603,83
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	95.663.258.267,00	87.661.682.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	886.641.620.568,26	323.829.393.153,36
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(5.540.826.811.023,30)	(4.839.896.416.400,87)
Jumlah Aset Tetap		**12.135.472.037.536,93**	**8.972.045.745.570,96**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.4**		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	(93.397.226.531,00)	(86.067.581.887,00)
Jumlah Properti Investasi		**276.251.850.254,00**	**283.581.494.898,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		**0,00**	**0,00**

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1		
Tagihan Penjualan Angsuran		615.165.937,12	666.136.618,00
Tuntutan Ganti Rugi		4.773.546.921,80	274.217.630,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	56.236.812.306,00	41.569.394.795,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	775.825.834.590,86	1.952.448.057.982,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(29.922.257.419,24)	(23.947.064.152,72)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(219.834.433.579,33)	(213.193.323.774,33)
Jumlah Aset Lainnya		**587.694.668.757,21**	**1.757.817.419.097,95**
JUMLAH ASET		**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2**		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	22.126.952,00	35.836.120,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	1.447.515,00	1.447.515,00
Utang Belanja	5.3.2.3	12.212.185.939,75	8.911.589.717,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	33.143.011.054,49	1.105.288.003,37
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**45.378.771.461,24**	**10.054.161.356,28**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**45.378.771.461,24**	**10.054.161.356,28**
EKUITAS	**5.3.3**		
EKUITAS	5.3.3	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN OPERASIONAL
(LO)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KAB. BERAU

LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4**				
7	**PENDAPATAN**	**5.4.1**				
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**				
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	92.949.213.837,00	93.535.186.343,00	(585.972.506,00)	(0,63)
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	19.045.230.067,00	14.879.768.897,00	4.165.461.170,00	27,99
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	38.077.899.738,26	19.765.364.436,57	18.312.535.301,69	92,65
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	218.937.415.392,58	164.067.816.418,33	54.869.598.974,25	33,44
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**369.009.759.034,84**	**292.248.136.094,90**	**76.761.622.939,94**	**26,27**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.1.2**				
7.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.4.1.2.1**				
7.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil		3.470.473.547.000,00	3.402.537.199.000,00	67.936.348.000,00	2,00
7.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		588.991.002.328,00	565.773.403.521,00	23.217.598.807,00	4,10
7.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik		80.364.880.846,00	52.763.540.954,00	27.601.339.892,00	52,31
7.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		124.344.153.018,00	105.085.271.816,00	19.258.881.202,00	18,33
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**4.264.173.583.192,00**	**4.126.159.415.291,00**	**138.014.167.901,00**	**3,34**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.4.1.2.2**				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah		16.869.131.000,00	0,00	16.869.131.000,00	0,00
7.2.01.03	Dana Otinomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.04	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.05	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**16.869.131.000,00**	**0,00**	**16.869.131.000,00**	**0,00**
7.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.4.1.2.3**				
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	479.368.348.308,00	502.649.475.800,00	(23.281.127.492,00)	(4,63)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**835.328.348.308,00**	**727.161.975.800,00**	**108.166.372.508,00**	**14,88**
	Total Pendapatan Transfer		**5.116.371.062.500,00**	**4.853.321.391.091,00**	**263.049.671.409,00**	**5,42**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.1.3**				
7.3.01	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	6.076.320.302,00	8.603.171.200,00	(2.526.850.898,00)	(29,37)
7.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	28.626.340.880,69	55.235.869.584,00	(26.609.528.703,31)	(48,17)
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah		**34.702.661.182,69**	**63.839.040.784,00**	**(29.136.379.601,31)**	**(45,64)**
	JUMLAH PENDAPATAN		**5.520.083.482.717,53**	**5.209.408.567.969,90**	**310.674.914.747,63**	**5,96**
8	**BEBAN**	**5.4.2**				
8.1	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1**				
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.041.266.704.121,13	818.796.869.375,56	222.469.834.745,57	27,17
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	857.982.324.607,43	796.699.707.092,91	61.282.617.514,52	7,69
8.1.03	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.04	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.1.3	114.803.338.322,00	153.657.103.990,00	(38.853.765.668,00)	(25,29)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	293.512.532,82	999.901.752,49	(706.389.219,66)	(70,65)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	721.874.870.801,94	656.945.015.157,40	64.929.855.644,54	9,88
	Beban Lain-lain	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Operasi		**2.751.394.750.385,32**	**2.435.635.007.069,36**	**315.759.743.315,97**	**12,96**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.2**				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00	1.483.726.000,00	15,55
8.3.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.4.2.2.1	9.538.723.000,00	8.447.633.000,00	1.091.090.000,00	12,92
8.3.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.1	1.485.284.000,00	1.092.648.000,00	392.636.000,00	35,93
8.3.02	Beban Keuangan Lainnya	5.4.2.2.2	359.209.787.664,00	338.663.557.088,00	20.546.230.576,00	6,07
8.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.2	359.209.787.664,00	338.663.557.088,00	20.546.230.576,00	6,07
	Jumlah Beban Transfer		**370.233.794.664,00**	**348.203.838.088,00**	**22.029.956.576,00**	**6,33**

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**5.4.2.3**				
8.2.01	Beban Tak Terduga		5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
	Jumlah Beban Tak Terduga		**5.774.799.583,00**	**1.826.837.315,00**	**3.947.962.268,00**	**216,11**
	JUMLAH BEBAN	**5.4.2.4**	**3.127.403.344.632,32**	**2.785.665.682.472,36**	**341.737.662.159,97**	**12,27**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**2.392.680.138.085,21**	**2.423.742.885.497,54**	**(31.062.747.412,34)**	**(1,28)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.3**				
	SURPLUS NON OPERASIONAL					
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL**					
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.856.844.781,32	2.811.992.836,88	23.044.851.944,44	819,52
	Jumlah Defisit Non Operasional		**25.856.844.781,32**	**2.811.992.836,88**	**23.044.851.944,44**	**819,52**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(25.856.844.781,32)**	**(2.811.992.836,88)**	**(23.044.851.944,44)**	**819,52**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.4**	**2.366.823.293.303,89**	**2.420.930.892.660,66**	**(54.107.599.356,78)**	**(2,23)**
	POS LUAR BIASA	**5.4.5**				
8.5	**PENDAPATAN LUAR BIASA**					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa			0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.6**	**2.366.823.293.303,89**	**2.420.930.892.660,66**	**(54.107.599.356,78)**	**(2,23)**



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN ARUS KAS
(LAK)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas	**5.5.1.1**		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	91.558.760.332,00	93.382.456.473,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	18.110.450.696,00	14.933.984.444,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	17.986.298.143,26	16.119.182.280,09
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	214.149.979.161,46	161.955.118.611,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	4.053.383.565.000,00	2.846.123.582.480,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.5	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.5	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.5	124.344.153.018,00	105.085.271.816,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.6	95.468.642.000,00	93.677.389.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.6	16.869.131.000,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5.5.1.1.7	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.7	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Darurat		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	76.039.376.420,69	7.822.834.044,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**6.192.351.635.253,41**	**4.691.271.145.578,33**
Arus Keluar Kas	**5.5.1.2**		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	1.038.160.066.708,34	812.677.295.576,65
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	868.596.837.598,25	834.570.312.408,61
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.3	189.599.952.449,00	153.657.103.990,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.5	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00
Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.6	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	454.678.429.664,00	432.340.946.088,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**2.583.008.093.002,59**	**2.253.149.186.079,26**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**3.609.343.542.250,82**	**2.438.121.959.499,07**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.1**		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	1.431.875.000,00	302.060,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	212.662.616,88	278.586.793,45
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Laian yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**1.644.537.616,88**	**278.888.853,45**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.2**		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	1.352.415.463,00	7.825.488.693,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	259.968.567.330,29	172.966.458.500,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	472.685.076.375,72	307.876.754.279,00

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	3.081.747.295.756,45	1.848.412.488.655,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	8.338.136.101,00	8.536.351.315,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	4.676.717.909,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.7	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**3.830.768.208.935,46**	**2.347.617.541.442,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(3.829.123.671.318,58)**	**(2.347.338.652.588,55)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	491.827.584.194,00	370.236.107.815,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**491.827.584.194,00**	**370.236.107.815,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.4.2**		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		491.841.293.362,00	370.214.233.306,00
Koreksi Saldo BOS		0,00	5.800.000,00
Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)		0,00	72.842,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**491.841.293.362,00**	**370.220.106.148,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(13.709.168,00)**	**16.001.667,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**5.5.5**	**(219.793.838.235,76)**	**90.799.308.577,52**
Saldo Awal Kas	**5.5.6**	**893.248.455.797,04**	**802.449.147.219,52**
Saldo Akhir Kas	**5.5.7**	**673.454.617.561,28**	**893.248.455.797,04**



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 *(Audited)*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	2.366.823.293.303,89	2.420.930.892.660,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas		(588.146.618.017,53)	(7.892.020.451,03)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
DAFTAR SINGKATAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 6
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 9
2.1 Ekonomi Makro 9
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 17
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 27
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum .. 27
3.2. *Mandatory Spending* 39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 42
4.1. Entitas Pelaporan 42
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 42
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 42
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 42
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 107
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) 107
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 220
5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca 220
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO) 274
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) 316
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 328

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ..... .332

BAB VII PENUTUP 335

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau 9
Tabel 2.2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau..... 10
Tabel 2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau 10
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau 11
Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Berau..... 12
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau..... 12
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau 14
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional..... 14
Tabel 2.9 Data Informasi Terkait Penurunan *Stunting* 15
Tabel 2.10 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024 16
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan TA 2024 28
Tabel 3.2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 30
Tabel 3.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024..... 32
Tabel 3.4 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Tahun 2024 39
Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2024 39
Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2024 40
Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum 40
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2024..... 41
Tabel 4.1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak 60
Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... 60
Tabel 4.3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan 70
Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap 75
Tabel 4.5 Neraca dengan Properti Investasi..... 91
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 108
Tabel 5.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 108
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024..... 109
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 110

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 111

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023 112

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 117

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 118

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023..... 123

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 124

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024..... 124

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2024..... 125

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024..... 128

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 129

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024..... 131

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 131

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 132

Tabel 5.18 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 132

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 135

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2024..... 136

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024 137

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 138

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 139

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 139

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 140
Tabel 5.26 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 140
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024… 141
Tabel 5.28 Realisasi Transfer Antar DaerahTahun Anggaran 2024 dan 2023 141
Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024..... 141
Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 142
Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 142
Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 143
Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 143
Tabel 5.34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 143
Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 144
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 144
Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 146
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 147
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024..... 148
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 148
Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OP Tahun Angggaran 2024 149
Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pegawai Per OPDTahun Anggaran 2024 dan 2023….. 151
Tabel 5.43 Anggaran dan Realsasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.. 153
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023…….167
Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per OPD Tahun Anggaran 2024.. 180
Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah per OPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 .. 180
Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2024..... 182
Tabel 5.48 Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 182

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 183
Tabel 5.50 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 184
Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024…. 185
Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal TanahTahun Anggaran 2024 dan 2023 185
Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 186
Tabel 5.54 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 193
Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 201
Tabel 5.56 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 203
Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 205
Tabel 5.58 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 207
Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 209
Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 210
Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 212
Tabel 5.62 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023212
Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 213
Tabel 5.64 Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 213
Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 214
Tabel 5.66 Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 215
Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 216
Tabel 5.68 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ..... …216
Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 216
Tabel 5.70 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023… 217
Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 217
Tabel 5.72 Realisasi *Surplus/Defisit* Tahun Anggaran 2024 dan 2023 218

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 218
Tabel 5.74 Realisasi Penerimaan Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2024 dan 2023 219
Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 219
Tabel 5.76 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2024 dan 2023 219
Tabel 5.77 Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 221
Tabel 5.78 Nilai Aset Tahun Anggaran 2024 dan 2023 221
Tabel 5.79 Aset Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023 221
Tabel 5.80 Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023 222
Tabel 5.81 Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 223
Tabel 5.82 Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 223
Tabel 5.83 Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 225
Tabel 5.84 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 226
Tabel 5.85 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 226
Tabel 5.86 Rekening Kas di Bendahara BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 227
Tabel 5.87 Rekening Kas di Bendahara FKTP Tahun Anggaran 2024 dan 2023 227
Tabel 5.88 Rekening Kas di Bendahara BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023 .. 228
Tabel 5.89 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 229
Tabel 5.90 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 229
Tabel 5.91 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 230
Tabel 5.92 Piutang Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 231
Tabel 5.93 Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 231
Tabel 5.94 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 232
Tabel 5.95 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 233
Tabel 5.96 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.. 233
Tabel 5.97 Piutang Lainnya Menurut OPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 234
Tabel 5.98 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 235
Tabel 5.99 Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 235
Tabel 5.100 Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 dan 2023…….236
Tabel 5.101 Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur..... 236
Tabel 5.102 Beban Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 237
Tabel 5.103 Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 239

Tabel 5.104 Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 240
Tabel 5.105 Investasi Jangka PanjangTahun Anggaran 2024 dan 2023..... 242
Tabel 5.106 Investasi Non PermanenTahun Anggaran 2024 dan 2023..... 242
Tabel 5.107 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 243
Tabel 5.108 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023 247
Tabel 5.109 Rincian Mutasi Aset..... 247
Tabel 5.110 Nilai Buku Aset Tetap 254
Tabel 5.111 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 255
Tabel 5.112 Properti Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 255
Tabel 5.113 Akumulasi Properti Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 256
Tabel 5.114 Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 256
Tabel 5.115 Tagihan Jangka Panjang Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 257
Tabel 5.116 Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 257
Tabel 5.117 Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per 31 Desember 2024 .. 257
Tabel 5.118 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023 258
Tabel 5.119 Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 260
Tabel 5.120 Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 260
Tabel 5.121 Amortisasi Per OPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 263
Tabel 5.122 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023…….264
Tabel 5.123 Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 266
Tabel 5.124 Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 266
Tabel 5.125 Kewajiban Pihak Ketiga 267
Tabel 5.126 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2024 dan 2023 268
Tabel 5.127 Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 269
Tabel 5.128 Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 269
Tabel 5.129 Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023 270
Tabel 5.130 Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 271
Tabel 5.131 Rincian Utang KDP 272
Tabel 5.132 Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 274
Tabel 5.133 Realisasi Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 275
Tabel 5.134 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 276
Tabel 5.135 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 276
Tabel 5.136 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023. 278

Tabel 5.137 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 279
Tabel 5.138 Lain – lain PAD Yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 280
Tabel 5.139 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 281
Tabel 5.140 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 282
Tabel 5.141 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 282
Tabel 5.142 Transfer Antar Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 283
Tabel 5.143 Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 283
Tabel 5.144 Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 284
Tabel 5.145 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 284
Tabel 5.146 Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 285
Tabel 5.147 Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 285
Tabel 5.148 Beban – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 286
Tabel 5.149 Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 286
Tabel 5.150 Beban Pegawai – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 287
Tabel 5.151 Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 289
Tabel 5.152 Beban Persediaan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 290
Tabel 5.153 Beban Jasa – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 292
Tabel 5.154 Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 293
Tabel 5.155 Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 293
Tabel 5.156 Beban Barang dan Jasa Lainnya - L Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ..... …..294
Tabel 5.157 Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 303
Tabel 5.158 Beban Bantuan Sosial - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 304
Tabel 5.159 Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 304
Tabel 5.160 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 305
Tabel 5.161 Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 306
Tabel 5.162 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 307
Tabel 5.163 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 309
Tabel 5.164 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 310

Tabel 5.165 Beban Penyusutan Properti Investasi - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 311
Tabel 5.166 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 311
Tabel 5.167 Beban Lain - Lain – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 312
Tabel 5.168 Beban Transfer - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 312
Tabel 5.169 Beban Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 313
Tabel 5.170 Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 313
Tabel 5.171 Beban Tidak Terduga – LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 314
Tabel 5.172 Beban Keseluruhan Per OPD - LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 314
Tabel 5.173 Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2024 dan 2023 316
Tabel 5.174 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023.... 317
Tabel 5.175 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ..... ….317
Tabel 5.176 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 318
Tabel 5.177 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 319
Tabel 5.178 Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 319
Tabel 5.179 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 320
Tabel 5.180 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 320
Tabel 5.181 Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 321
Tabel 5.182 Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 321
Tabel 5.183 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 321
Tabel 5.184 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ..... ….323
Tabel 5.185 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 323
Tabel 5.186 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 324
Tabel 5.187 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023 326
Tabel 5.188 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023 326

Tabel 5.189 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023 327
Tabel 5.190 Kenaikan dan Penurunan Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 327
Tabel 5.191 Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 328
Tabel 5.192 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 329
Tabel 5.193 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar..... …329

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 32

Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 (dalam %)..... 33

Gambar 3.3 Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan Tahun 2023 33

Gambar 3.4 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..... 34

Gambar 3.5 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..... 35

Gambar 3.6 Belanja Operasi TA 2024 dan 2023..... 36

Gambar 3.7 Belanja Modal TA 2024 Dan 2023..... 37

Gambar 3.8 Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023..... 38

Gambar 3.9 Belanja Transfer TA 2024 dan 2023..... 38

Gambar 5.1 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan KabupatenBerau Tahun Anggaran 2024 108

Gambar 5.2 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau TahunAnggaran 2024 dan 2023..... 109

Gambar 5.3 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024..... 110

Gambar 5.4 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenBerau Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 110

Gambar 5.5 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 130

Gambar 5.6 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 130

Gambar 5.7 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TahunAnggaran 2024 144

Gambar 5.8 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 145

Gambar 5.9 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 146

Gambar 5.10 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 147

Gambar 5.11 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja PegawaiTahun Anggaran 2024..... 148

Gambar 5.12 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 149

Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 183

Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 184

Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TransferTahun Anggaran 2024 214

Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 215

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Penyaluran Dana Desa Per Desa TA 2024
Lampiran 2	Rincian Belanja BLUD
Lampiran 3	Rekapitulasi Retribusi Piutang Pasar Sanggam Adjidilayas
Lampiran 4	Daftar Obat / Alkes / BMHP Rusak / Kadaluarsa RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Tahun 2024
Lampiran 5	Laporan Perumdam Batiwakkal Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran 6	Laporan Auditor Independen PT Hutan Sanggam Berau Tahun yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran 7	Laporan Keuangan PT Indo Pusaka Berau Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	Rincian JJI yang dimanfaatkan Perumdam Batiwakkal Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 10	Properti Investasi SKPD dan Akumulasi Penyusutan
Lampiran 11	Rincian kurang volume atas denda pekerjaan pihak ketiga
Lampiran 12	Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud

DAFTAR SINGKATAN

A		
ADD	:	Alokasi Dana Desa
Adminduk		Administrasi Kependudukan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATK	:	Alat Tulis Kantor
B		
BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah
BAPELITBANG	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
BARJAS	:	Barang dan Jasa
BAS	:	Bagan Akun Standar
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BKPP	:	Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan
BKS	:	Bangun, Kelola, Serah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BMD	:	Barang Milik Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOKKB	:	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana
BOP PAUD	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	:	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	:	Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPBD	:	Badan Penanggunalangan Bencana Daerah
BPD Kaltimtara	:	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Utara
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
C		
CaLK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
Covid 19	:	Corona Viruses Disease 19
D		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAK-DBH	:	Dana Alokasi Khusus-Dana Bagi Hasil
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil

DED	:	Detail Engineer Design
DID	:	Dana Insentif Daerah
DISPORA	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DINAS PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISDUKCAPIL	:	Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
DISKOMINFO	:	Dinas Komunikasi dan Informasi
DPMPK	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DTU	:	Dana Transfer Umum
F		
FASOS	:	Fasilitas Sosial
FASUM	:	Fasiitas Umum
FIFO	:	First In First Out
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G		
Gn.	:	Gunung
H		
HSL	:	Harapan Lama Sekolah
I		
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
J		
JAMKESMAS	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K		
Kaltimtara	:	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
KB	:	Keluarga Berencana
KDP	:	Kontruksi Dalam Pengerjaan
KDH	:	Kepala Daerah
Kec.	:	Kecamatan
KESBANGPOL	:	Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
Koperindag	:	Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
KORPRI	:	Korps. Pegawai Republik Indonesia
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
L		
L/C	:	*Letter Of Credit*
LAK	:	Laporan Arus Kas
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangann Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas

LP SAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung
N		
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
O		
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P		
P3D	:	Personel, Pendanaan, Sarana, Prasarana Serta Dokumen
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PARPOL	:	Partai Politik
PBB	:	Pajak Bumi Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDH	:	Pakaian Dinas Harian
PDL	:	Pakaian Dinas Lapangan
PDU	:	Pakaian Dinas Upacara
PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Perbub	:	Peraturan Bupati
PERDA	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
PERUMDA	:	Perusahaan Umum Daerah
PERUMDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PFK	:	Pinjaman Fihak Ketiga
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PPh	:	Pajak Penghasilan
PK2UKM	:	Rekrutmen Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Kopeasi dan Usaha Mikro Kecil
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PKM	:	Puskesmas
PMD	:	Penyertaan Modal Daerah
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
POLRESTA	:	Kepolisian Resor Kota
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSH	:	Pakaian Sipil Harian
PSR	:	Pakaian Sipil Resmi
PSL	:	Pakaian Sipil Lengkap
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPPK	:	Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja
PT	:	Perseroan Terbatas
P3D	:	Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat

R		
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
S		
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SETWAN	:	Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah
SiLPA	:	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPT	:	Surat Keterangan Penguasaan Tanah
SKPKD	:	Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanjung Jawab Mutlak
SLTP	:	Sekolah Lanjutan tingkat Pertama
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D - LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D - TU	:	Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
	:	
	:	
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TASPEN	:	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TDF		*Treasury Deposit Facility*
TGR		Tuntutan Ganti Rugi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Transfer Ke Daerah
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
TU	:	Tambah Uang
	:	
U	:	
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
W		
WKDH	:	Wakil Kepala Daerah
WP	:	Wajib Pajak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu wajib disusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit Pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Berau sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas sumber daya; dan
h. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, Transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

1.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

v. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

dd. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);

ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024;

gg. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024;

hh. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, telah dibubah sebagian dengan Peraturan

Bupati No.22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau (Kebijakan Akuntansi Nomor 11 "Beban" dan Kebijakan Akuntansi Nomor 12 "Akuntansi Aset");

ii. Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024; dan

jj. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
- 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
- 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)
- 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 2.1.6 Inflasi
- 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau
- 2.1.8 Penanganan Stunting
- 2.1.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
- 2.2.3 Program Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum
- 3.1.1 Pendapatan Daerah

3.1.2 Belanja Daerah
3.1.3 Belanja Transfer

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang
4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap
4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
4.4.11.4 Dana Cadangan
4.4.11.5 Aset Lainnya
4.4.12 Akuntansi Kewajiban
4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan – LRA
5.1.2 Belanja Daerah
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus / Defisit
5.1.5 Pembiayaan
5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.4.1 Pendapatan – LO
5.4.2 Beban - LO
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
5.4.4 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
5.4.5 Surplus/Defisit – LO
5.5. Penjelasan Pos-Pos laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Invenstasi
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5. Kenaikan / Penurunan Kas
5.5.6. Saldo Awal Kas
5.5.7. Saldo Akhir Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus / Defisit – LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1. Domisili
6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
6.3. Struktur Organisasi

BAB VII Penutup

BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan senilai 5,08 persen
b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 5,15 persen
c. Gini Ratio senilai 0,327
d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 77,17
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 7,28 persen
f. Tingkat Inflasi senilai 3,14 persen*
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) senilai Rp. 51.280,02 (miliar).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu.

Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari Pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau (%)	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08*

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau (ribu jiwa)	12,30	13,62	13,31	13,26	12,35*
3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,64	6,54	6,31	6,11	5,51**
4	Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)	10,19	10,14	9,54	9,36	8,57**
5	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	3	3	4	4	4
6	Peringkat pada tingkat Nasional	85	90	93	73	73

Sumber : BPS Kabupaten Berau dan BPS Kaltim
**Data BPS Maret 2024*
*** Data BPS September 2024*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Berau periode Maret Tahun 2024 5,08% mengalami penurunan 0,46 dari Maret 2023. Selanjutnya angka ini diharapkan dapat berkurang pada Tahun 2024. Jika dibandingkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Berau masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Meskipun demikian, dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. 2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau	0,70	0,95	0,98	0,16	0,41
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	1,02	1,22	0,99	0,77	0,80
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,59	1,53	1,36*
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	3	3	4	4	4**
5	Peringkat pada tingkat Nasional*	86	139	157	194	157

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** Semester 2 (September 2024)*

*** diurutkan dari indeks kedalaman kemiskinan yang nilainya paling rendah*

Tabel 2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau	0,17	0,20	0,22	0,01	0,07
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,24	0,29	0,23	0,14	0,15
3	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	0,38	0,38
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	4	3	4	4	4*
5	Peringkat pada tingkat Nasional	133	136	166	2	31**

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari indeks keparahan kemiskinan yang nilainya paling rendah*
*** BPS 2024*

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i)

mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah senilai 5,15%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau (%)	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82**
4	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	4	5	4

Sumber : BPS Kabupaten Berau

** diurutkan dari tingkat pengangguran terbuka yang nilainya paling rendah*

*** BPS Agustus 2024*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 5,15 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah senilai 5,08 persen atau bertambah dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur, TPT Kabupaten Berau baik pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 memiliki angka yang lebih kecil. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, TPT Kabupaten Berau baik Tahun 2020 maupun 2024 juga masih dibawah dibandingkan TPT Indonesia.

2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau gini ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian *gini ratio* Kabupaten Berau dapat dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 *Gini Ratio* Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*Gini Ratio* Kabupaten Berau	0,300	0,377	0,352	0,327	0,317
2	*Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Timur	0,328	0,334	0,327	0,322	0,321
3	*Gini Ratio* Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Berau yang diukur melalui *gini ratio* adalah senilai 0,317. Angka ini naik jika dibandingkan dengan *gini ratio* selama 5 Tahun terakhir yakni Tahun 2020 yang senilai 0,300. Pada Tahun 2020, *gini ratio* Kabupaten Berau lebih rendah dibandingkan gini ratio Provinsi Kalimantan Timur dan pada Tahun 2024 Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* juga lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, jika dibandingkan angka *gini ratio* nasional, Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* yang lebih rendah baik pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM*)*

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah senilai 77,17 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau	74,71	75,20	75,74	76,71	77,17
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur	76,24	76,88	77,44	78,20	78,79

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02
4	Peringkat pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	4	4	4
5	Peringkat pada Tingkat Nasional*	94	94	92	101	101

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari IPM yang nilainya paling tinggi*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau pada Tahun 2024 adalah senilai 76,17 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020 yang senilai 74,71 Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tujuh tahun dimasa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pada Tahun 2024, besarnya IPM Kabupaten Berau mencapai 77,17. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Berau telah memasuki pembangunan manusia dengan status “tinggi” yang ditunjukkan oleh nilai IPM yang diatas 70. Indikator IPM ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin baiknya akses masyarakat terhadap memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin meningkat walaupun di beberapa kecamatan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Namun hal ini tidak lantas membuat Kabupaten Berau berbangga diri, harus tetap meningkatkan pembangunan yang ada.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau

No	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB atas dasar harga konstan 2010 (Miliar Rp)	27.337.086,7 miliar	28.802.649,7 miliar	29.940.780,5 miliar	31.570,05 miliar	33.870.000 miliar	570,82 triliun	22.139,0 triliun
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28	6,17	5,03

Sumber : BPS Kabupaten Berau
**Angka Sementara*

Selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024, perekonomian Kabupaten Berau mengalami fluktuasi peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Adapun besaran pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2020 sampai 2024 adalah 10,60 persen. Selama kurun waktu tersebut, besar rata-rata pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya adalah senilai 3,742% sedangkan untuk skala provinsi pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi 6,17% dan untuk skala nasional senilai 5,03%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation)*, jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, tingkat inflasi Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai 2,69 persen ,Provinsi Kalimantan Timur senilai 1,47 persen serta inflasi nasional senilai 1,57 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Inflasi Kabupaten Berau	-	-	-	-	3,14*

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47*
3	Inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

* Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Bulan Desember Tahun ke Tahun *(year on year)-November 2024*

**Dihitung berdasarkan perubahan IHK bulan Desember tahun berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya

2.1.7. Penanganan Stunting

Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ditekankan memiliki komitmen kuat untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting yang ada, ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di daerah. Data informasi terkait penurunan stunting dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Data Informasi Terkait Penurunan *Stunting*

NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.582.580.000,00	2.563.232.156,00	RSUD Dr. Abdul Rivai	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	224.100.000,00	220.104.216,00	RSUD Dr. Abdul Rivai	
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	308.553.400,00	265.684.400,00	RSUD Dr. Abdul Rivai	
4	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.801.985.000,00	2.439.884.000,00	RSUD Dr. Abdul Rivai	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.628.000,00	43.131.671,00	RSUD Dr. Abdul Rivai	
6	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	137.719.000,00	106.815.850,00	DPPKB2P	
7	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.194.000,00	36.194.000,00	DPPKB2P	
8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	382.459.000,00	302.720.500,00	DINAS KESEHATAN	
9	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	88.005.000,00	5.925.000,00	DINAS KESEHATAN	
10	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.801.718.000,00	2.698.684.390,00	DINAS KESEHATAN	
11	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	160.000.000,00	92.934.000,00	DINAS KESEHATAN	
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.889.634.654,00	41.938.981.204,00	DINAS KESEHATAN	

NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB	KET
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	568.468.000,00	546.160.460,00	DINAS KESEHATAN	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	248.565.100,00	213.112.714,00	DINAS KESEHATAN	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.334.313.000,00	3.368.438.693,00	DINAS KESEHATAN	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.875.372.000,00	1.332.331.941,00	DINAS KESEHATAN	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.504.696.000,00	1.310.443.109,00	DINAS KESEHATAN	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	737.935.000,00	598.633.041,00	DINAS KESEHATAN	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00	68.361.055,00	DINAS KESEHATAN	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	212.843.000,00	180.354.000,00	DINAS KESEHATAN	
21	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	591.677.500,00	281.014.000,00	DINAS KESEHATAN	
22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.082.425.200,00	502.823.160,00	DINAS KESEHATAN	
23	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.395.551.000,00	865.538.400,00	DINAS KESEHATAN	
24	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.000.000,00	88.437.250,00	DINAS KESEHATAN	
25	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	400.000.000,00	268.313.370,00	DINAS KESEHATAN	
26	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.000.000,00	59.724.500,00	DINAS KESEHATAN	
27	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.864.101.000,00	158.752.600,00	DINAS KESEHATAN	
28	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.000.000,00	26.101.000,00	DINAS KESEHATAN	

2.1.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Berau

Struktur perekonomian Kabupaten Berau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	11,71	11,73	9,33	11,26	12,42

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pertambangan dan Penggalian	56,28	59,68	66,98	58,27	53,08
3	Industri Pengolahan	4,78	4,32	3,49	4,33	4,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
6	Konstruksi	4,16	3,74	3,36	4,47	5,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,53	5,72	4,99	6,48	7,23
8	Transportasi dan Pergudangan	6,14	5,41	4,47	5,91	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,04	0,81	1,02	1,17
10	Informasi dan Komunikasi	1,08	0,95	0,72	0,90	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,6	0,5	0,41	0,53	0,60
12	Real Estat	0,99	0,83	0,62	0,74	0,79
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,09	0,07	0,09	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,03	0,8	1,03	1,35
15	Jasa Pendidikan	3,03	2,77	2,22	2,76	3,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,37	1,1	1,38	1,50
17	Jasa Lainnya	0,79	0,71	0,57	0,73	0,85
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	35.450.848,90	43.036.483,46	60.158.157,04	51.280,017,18	50.816.509,60
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05	33.868.49
20	PDRB Provinsi (Triliun Rupiah)	607,58	695,15	669,40	669,40	669,40

Sumber: BPS Kabupaten Berau

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Agar pencapaian pendapatan dapat terpenuhi dan senantiasa meningkat maka kebijakan di bidang pendapatan pada Tahun 2024 adalah menetapkan target pendapatan secara realistis dengan mempedomani perolehan pada tahun-tahun sebelumnya dengan senantiasa mengoptimalkan pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pengelola pendapatan daerah, strategi dalam bidang pendapatan ditekankan pada kegiatan sebagai berikut.

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan batas kemampuan

bayar masyarakat sehingga pungutan pajak dan retribusi bukan merupakan beban tapi kewajiban yang disadari untuk kemaslahatan masyarakat Berau;

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi, ekstensifikasi, potensi pajak, dan efisiensi pengelolaan perusahaan milik Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah;

c. Meningkatkan dana transfer Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang lebih besar;

d. Meningkatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar;

e. Meningkatkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar;

f. Melakukan kerjasama usaha (kemitraan) dengan pihak swasta untuk mengelola potensi unggulan sumber daya daerah;

g. Berupaya untuk memperoleh bantuan luar-negeri dalam bentuk Hibah (*Grant*); dan

h. Berupaya untuk tidak menerbitkan obligasi dan tidak melakukan pinjaman dalam dan luar negeri (*Loan*).

2.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja penyelenggara urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Untuk melaksanakan arah pengelola belanja daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengalokasikan anggaran belanja untuk program-program prioritas yang mendatangkan manfaat yang besar terhadap masyarakat sesuai dengan visi, misi dan isu strategis/masalah-masalah mendesak untuk Kabupaten Berau; dan

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk alokasi Anggaran Belanja Aparatur.

2.2.3. Program Kebijakan Keuangan Daerah

Program Kebijakan Keuangan Daerah meliputi:

a. Program Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Program Intensifikasi Peningkatan Dana Perimbangan.
c. Program Kemitraan Pemerintah Daerah-Swasta untuk Pengelolaan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah;
d. Program Kemitraan dan Hubungan Luar-Negeri;
e. Program Sosialisasi dan Implementasi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran Belanja Daerah yang Berbasis Kinerja; dan
f. Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keuangan Daerah.

2.2.4. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan investasi Pemerintah Daerah serta pembayaran pokok utang yang dialokasikan melalui pengeluaran pembayaran.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Struktur APBD akan optimal jika pencapaian seluruh komponen pendapatan dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat *output* dari suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis Penerimaan Daerah, target Pendapatan Daerah Tahun 2024 senilai Rp6.107.982.827.838,00. Sumber-sumber pendanaan anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun 2024 target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp303.864.396.033,00.

b. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat {Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa} dan Pendapatan Transfer Antar Daerah {Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan} Target Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp5.774.413.283.269,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 ditargetkan senilai Rp29.705.148.536,00.

Rencana Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp6.999.194.000.000,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2024 direncanakan senilai Rp2.408.731.729.824,81 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2024 direncanakan senilai Rp4.103.893.300.300,19 terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dialokasikan senilai Rp22.640.327.875,00.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp465.928.642.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Rp11.100.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi Rp454.828.642.000,00.

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp893.211.172.162,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman. Untuk Tahun 2024 Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00.

Pencapaian target kinerja keuangan APBD selama Tahun 2024 menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kinerja keuangan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,61% dari anggaran Rp804.200.535.722,00 terealisasi senilai Rp720.619.023.837,91.

2) Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kinerja keuangan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,95% dari anggaran Rp361.978.169.694,00 terealisasi senilai Rp321.979.629.268,94.

b) RSUD Dr. A. Rivai

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. A. Rivai. Kinerja keuangan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 86,60% dari anggaran Rp272.153.520.110,00 terealisasi senilai Rp235.673.094.762,93.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kinerja keuangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,38% dari anggaran Rp3.703.277.617.844,00 terealisasi senilai Rp3.458.175.664.418,15.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kinerja keuangan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 92,94%, dari anggaran Rp58.950.216.429,00 terealisasi senilai Rp54.790.981.647,26.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 91,68% dari anggaran Rp22.160.653.374,00 terealisasi senilai Rp20.317.501.510,00.

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,66% dari anggaran Rp31.827.451.714,00 atau terealisasi senilai Rp27.900.955.456,00.

6) Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kinerja keuangan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,52%, dari anggaran Rp21.520.152.288,00 terealisasi senilai Rp20.126.411.131,00.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kinerja keuangan urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,03%, dari anggaran Rp18.129.392.051,00 terealisasi senilai Rp16.141.284.584,00.

2) Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan yang oleh Dinas Pangan. Kinerja keuangan urusan Pangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,39%, dari anggaran Rp14.849.536.893,00 terealisasi senilai Rp13.126.049.381,00.

3) Pertanahan

Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan. Kinerja keuangan urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 33,94% dari anggaran Rp28.070.930.406,00 terealisasi senilai Rp9.527.267.808,00.

4) Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kinerja keuangan urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,71%, dari anggaran Rp61.206.049.083,00 terealisasi senilai Rp57.358.265.973,91.

5) Administrasi Kependudukan dan Capil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja keuangan urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 92,42%, dari anggaran Rp13.335.928.477,00 terealisasi senilai Rp12.324.527.342,00.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kinerja keuangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh OPD

tersebut mencapai 87,94%, dari anggaran Rp18.413.837.996,00 terealisasi senilai Rp16.192.899.520,00.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja keuangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,88%, dari anggaran Rp24.001.897.645,00 terealisasi senilai Rp21.572.041.015,53.

8) Perhubungan

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kinerja keuangan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 94,02%, dari anggaran Rp148.263.043.475,00 terealisasi senilai Rp139.397.589.430,77.

9) Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja keuangan urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 91,36% dari anggaran Rp35.181.508.823,00 terealisasi senilai Rp32.140.682.656,00.

10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja keuangan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 83,31%, dari anggaran Rp47.861.192.958,00 terealisasi senilai Rp39.873.469.885,00.

11) Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja keuangan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,80%, dari anggaran Rp16.272.945.758,00 terealisasi senilai Rp14.450.216.826,00.

12) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kinerja keuangan urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,75%, dari anggaran Rp33.178.320.051,00 terealisasi senilai Rp29.114.789.538,91.

13) Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kinerja keuangan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh

OPD tersebut mencapai 88,57%, dari anggaran Rp56.596.236.263,00 terealisasi senilai Rp50.128.743.685,81.

14) Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kinerja keuangan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 92,84%, dari anggaran Rp18.886.702.992,00 terealisasi senilai Rp17.533.964.119,00.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Kinerja keuangan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 90,91%, dari anggaran Rp22.920.611.133,00 terealisasi senilai Rp20.837.308.195,40.

2) Pertanian

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Dinas Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,60% dari anggaran Rp39.994.436.914,00 terealisasi senilai Rp35.435.025.595,00.

b) Dinas Perkebunan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,72% dari anggaran Rp18.861.733.169,00 terealisasi senilai Rp15.602.629.320,00.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Kinerja keuangan urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 83,09%, dari anggaran Rp162.744.311.822,00 terealisasi senilai Rp135.231.789.883,00.

b) Kantor Penghubung

Urusan Kantor Penghubung dilaksanakan oleh Kantor Penghubung. Kinerja keuangan urusan Kantor Penghubung yang dilaksanakan oleh

OPD tersebut mencapai 91,43%, dari anggaran Rp1.970.738.100,00 terealisasi senilai Rp1.801.931.621,00.

2) Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Kinerja Keuangan urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,08% dari anggaran Rp23.717.752.368,00 terealisasi senilai Rp20.890.016.762,00.

3) Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPLITBANG). Kinerja keuangan urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 91,48% dari anggaran Rp25.788.689.069,00 terealisasi senilai Rp23.591.927.183,00.

4) Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh beberapa OPD, yaitu:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 95,77% dari anggaran Rp52.1954.417.494,00 terealisasi senilai Rp499.888.582.942,00.

b) Badan Pendapatan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kinerja Keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 85,69% dari anggaran Rp27.625.269.870,00 terealisasi senilai Rp23.671.604.843,00.

5) Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh beberapa OPD, yaitu:

a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Kinerja keuangan urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 90,59% dari anggaran Rp25.371.260.116,00 terealisasi senilai Rp22.984.278.321,00.

b) Sekretariat KORPRI

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat KORPRI. Kinerja keuangan urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 0,00%, dari anggaran Rp0,00 terealisasi senilai Rp0,00.

6) Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Kinerja keuangan urusan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 81,44% dari anggaran Rp105.814.696.089,00 terealisasi senilai Rp86.176.356.203,00.

7) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Berau. Kinerja keuangan urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 91,87% dari anggaran Rp137.376.860.603,00 terealisasi senilai Rp126.202.440.269,00.

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas. Kinerja keuangan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 94,94% dari anggaran Rp76.708.121.307,00 terealisasi senilai Rp72.829.498.839,32.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuain sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD murni Kabupaten Berau.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan target pada perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Adanya tambahan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
2. Adanya penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
3. Adanya Prakiraan Bertambah/berkurang pada penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Adanya Sisa Bantuan Penerimaan Dana The Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Adapun beberapa hal yang menyebabkan perubahan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya perkembangan alokasi anggaran pendapatan dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan besaran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Adanya keadaan dimana saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Adanya tambahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau pada perubahan APBD 2024.
5. Adanya Sisa Bantuan Penerimaan Dana The Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Berau melakukan perubahan kebijakan dalam perubahan APBD 2024 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 **naik** senilai Rp1.480.312.949.033,00 atau senilai 31,99% menjadi Rp6.107.982.827.838,00 dengan rincian *Pendapatan Asli Daerah* mengalami **kenaikan** senilai Rp49.664.726.383,00 atau naik senilai 19,54% dari Rp254.199.669.650,00 di anggaran murni menjadi Rp303.864.396.033,00 dianggaran perubahan, *Pendapatan Transfer* mengalami **kenaikan** senilai Rp1.407.998.074.114,00 atau 32,25% dari Rp4.366.415.209.155,00 di anggaran perubahan menjadi Rp5.774.413.283.269,00 dan *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* mengalami ***kenaikan*** Rp22.650.148.536,00 atau senilai 321,05% dari Rp7.055.000.000,00 di anggara murni menjadi Rp29.705.148.536,00 di anggaran perubahan.

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	**4.627.669.878.805,00**	**6.107.982.827.838,00**	**1.480.312.949.033**	**31,99%**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**254.199.669.650,00**	**303.864.396.033,00**	**49.664.726.383**	**19,54%**
	Pajak Daerah	92.558.789.845,00	93.558.789.845,00	1.000.000.000	1,08%
	Restribusi Daerah	109.795.031.650,00	110.642.378.350,00	847.346.700	0,77%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.960.000.000,00	19.600.000.000,00	640.000.000	3,38%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.885.848.155,00	80.063.227.838,00	47.177.379.683	143,46%
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.366.415.209.155,00**	**5.774.413.283.269,00**	**1.407.998.074.114**	**32,25%**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**3.427.053.157.155,00**	**4.813.515.450.269,00**	**1.386.462.293.114**	**40,46%**
	Dana Bagi Hasil	2.618.936.992.155,00	4.005.399.285.269,00	1.386.462.293.114	52,94%
	Dana Alokasi Umum	589.047.874.000,00	589.047.874.000,00	0,00	0,00%
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	82.281.122.000,00	82.281.122.000,00	0,00	0,00%
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	136.787.169.000,00	136.787.169.000,00	0,00	0,00%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**106.589.262.000,00**	**109.441.195.000,00**	**2.851.933.000**	**2,68%**
	Dana Insentif Daerah	13.972.553.000,00	13.972.553.000,00	0,00	0,00%
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dana Desa	92.616.709.000,00	95.468.642.000,00	2.851.933.000	3,08%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**832.772.790.000,00**	**851.456.638.000,00**	**18.683.848.000**	**2,24%**
	Pendapatan Bagi Hasil	476.812.790.000,00	495.496.638.000,00	18.683.848.000	3,92%
	Bantuan keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	0,00	0,00%
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.055.000.000,00**	**29.705.148.536,00**	**22.650.148.536**	**321,05%**
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.055.000.000,00	29.705.148.536,00	22.650.148.536	321,05%

2. Belanja Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meningkat senilai Rp1.924.234.000.000,00 atau senilai 37,92% dari

Rp5.074.960.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp6.999.194.000.000,00 di anggaran perubahan 2024 dengan rincian *Belanja Operasi* mengalami **kenaikan** senilai Rp454.885.547.068,81 atau 23,28% dari Rp1.953.846.182.756,00 dianggaran murni menjadi Rp2.408.731.729.824,81 di anggaran perubahan 2024. *Belanja Modal* mengalami **kenaikan** senilai Rp1.473.856.192.056,19 atau senilai 56,08% dari Rp2.628.037.108.244,00 dianggaran murni menjadi Rp4.101.893.300.300,19 dianggaran perubahan 2024. Belanja Tidak Terduga mengalami **penurunan** senilai Rp7.359.672.125,00 atau senilai 24,53% dari Rp30.000.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp22.640.327.875,00 dianggaran perubahan 2024. dan Belanja Transfer mengalami **kenaikan** senilai Rp2.851.933.000,00 atau senilai 0,62% dari Rp463.076.709.000,00 dianggaran murni menjadi Rp465.928.642.000,00 dianggaran perubahan 2024.

Tabel 3. 2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	**5.074.960.000.000,00**	**6.999.194.000.000,00**	**1.924.234.000.000,00**	**37,92**
BELANJA OPERASI	**1.953.846.182.756,00**	**2.408.731.729.824,81**	**454.885.547.068,81**	**23,28**
Belanja Pegawai	969.290.636.349,00	1.152.667.557.073,60	183.376.920.724,60	18,92
Belanja Barang dan Jasa	811.442.839.333,00	1.031.969.667.362,21	220.526.828.029,21	27,18
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	167.353.707.074,00	208.839.505.389,00	41.485.798.315,00	24,79
Belanja Bantuan Sosial	5.759.000.000,00	15.255.000.000,00	9.496.000.000,00	164,89
BELANJA MODAL	**2.628.037.108.244,00**	**4.101.893.300.300,19**	**1.473.856.192.056,19**	**56,08**
Belanja Modal Tanah	15.470.129.500,00	16.566.742.200,00	1.096.612.700,00	7,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.934.639.901,00	275.837.543.299,21	131.902.903.398,21	91,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.567.099.606,00	580.117.759.021,98	232.550.659.415,98	66,91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.112.279.921.620,00	3.215.293.974.101,00	1.103.014.052.481,00	52,22

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.596.978.717,00	8.488.940.328,00	2.891.961.611,00	51,67
Belanja Modal Aset Lainnya	3.188.338.900,00	5.588.341.350,00	2.400.002.450,00	75,27
BELANJA TIDAK TERDUGA	**30.000.000.000,00**	**22.640.327.875,00**	**(7.359.672.125,00)**	**(24,53)**
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	22.640.327.875,00	(7.359.672.125,00)	(24,53)
BELANJA TRANSFER	**463.076.709.000,00**	**465.928.642.000,00**	**2.851.933.000,00**	**0,62**
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	451.976.709.000,00	454.828.642.000,00	2.851.933.000,00	0,63
Belanja Bantuan Keuangan Daearh Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**(447.290.121.195,00)**	**(891.211.172.162,00)**	**(443.921.050.967,00)**	**99,25**

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan dan dicatat secara defenitif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp893.211.172.162,04 mengalami **kenaikan** senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dari sebelumnya Rp0,00 pada anggaran murni.

   Selisih lebih atas proyeksi SILPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan yang bersipat spesifik grant, bersifat wajib dan mengikat seperti Program kegiatan yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan (JKN) dana BOSNAS, dana BLUD RSUD A.Rivai yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan, DAK DBH DR, DAK Non Fisik, serta Penegeluaran Pembiayaan.

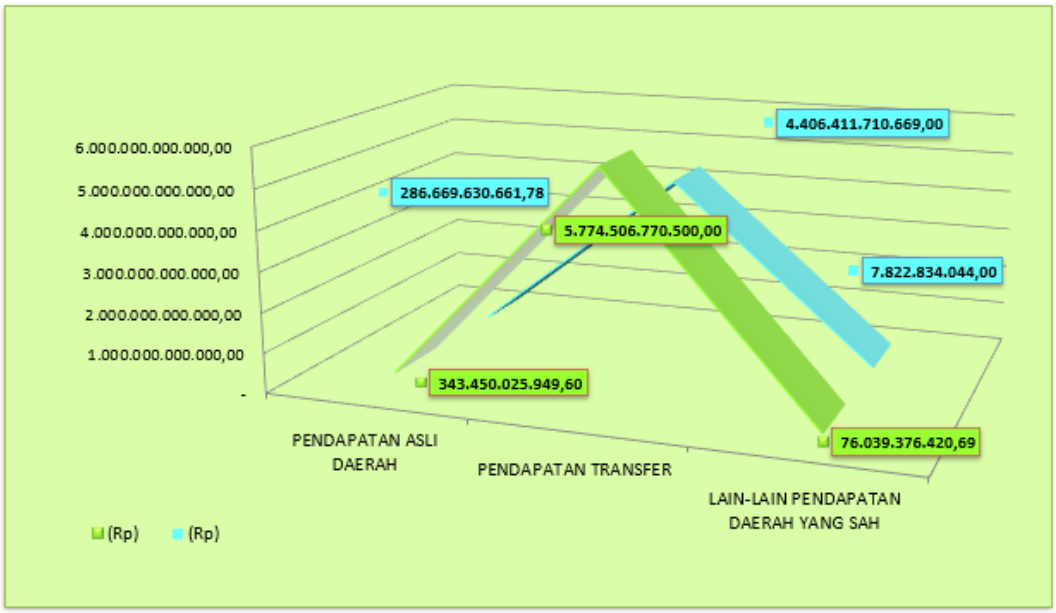
Tabel 3.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	449.290.121.195,00	893.211.172.162,00	443.921.050.967,00	98,80
	Penggunaan SILPA	449.290.121.195,00	893.211.172.162,00	443.921.050.967,00	98,80
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	447.290.121.195,00	891.211.172.162,00	443.921.050.967,00	99,25

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 Rp6.107.982.827.838,00 terealisasi sejumlah Rp6.193.996.172.870,29 atau 101,41% dari target, mengalami **kenaikan** sejumlah Rp1.493.091.997.495,51 atau 31,76% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp4.700.904.175.374,78.

Realisasi Pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD senilai Rp343.450.025.949,60, Pendapatan Transfer senilai Rp5.774.506.770.500,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp76.039.376.420,69 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

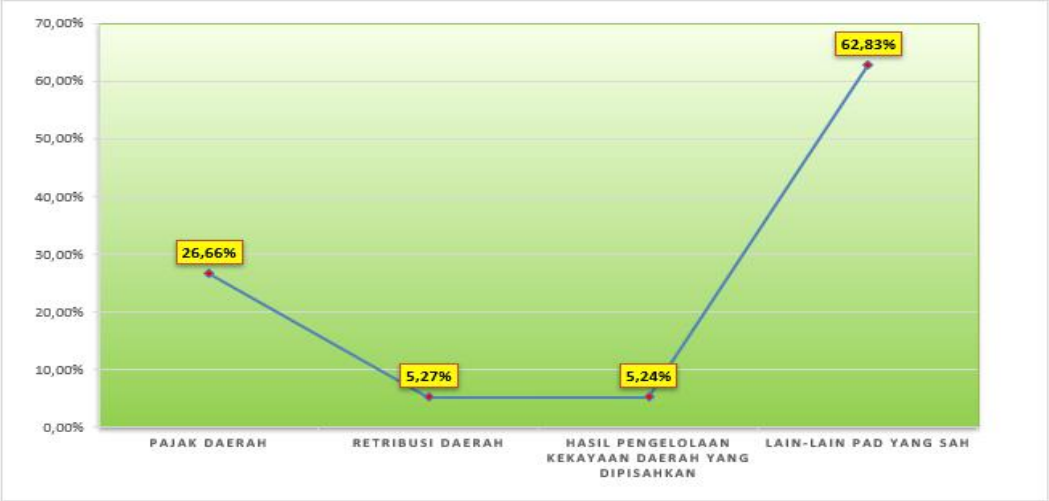


Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan 2023

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp303.864.396.033,00 terealisasi senilai Rp343.450.025.949,60 atau 113,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 senilai Rp286.669.630.661,78, maka realisasi PAD mengalami kenaikan senilai Rp56.780.395.287,82 atau 19,81%.

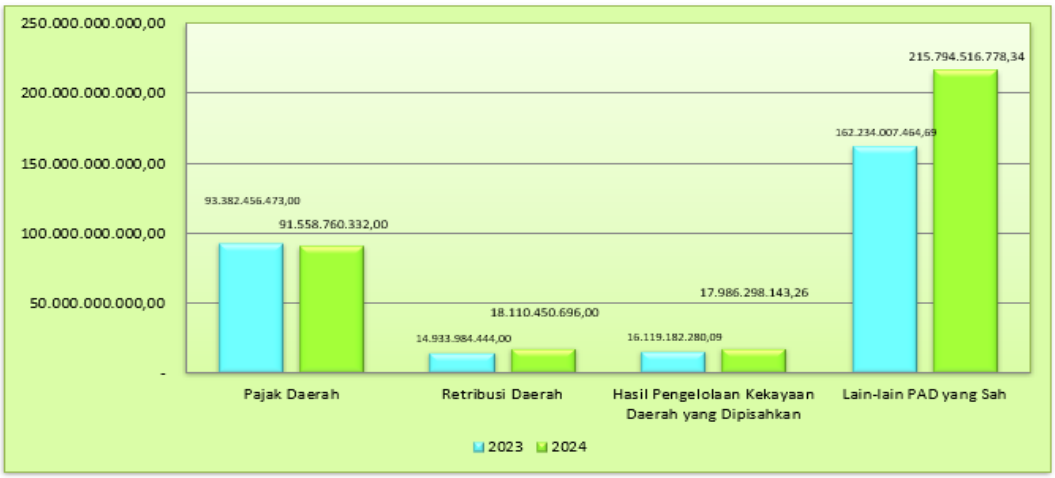
Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp91.558.760.332,00; Retribusi Daerah Rp18.110.450.696,00; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp17.986.298.143,26 dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp215.794.516.778,34 sebagaimana gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 (dalam %)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Berau selama Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 ditunjukkan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2024 maupun 2023 sumber utama PAD adalah dari Lain–Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp343.450.025.949,60 atau 113,03% mengalami **kenaikan** senilai Rp56.780.395.287,82 atau 19,81% dibandingkan pada Tahun 2023 senilai Rp286.669.630.661,78.

Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp93.558.789.845,00 terealisasi senilai Rp91.558.760.332,00 atau 97,86%,

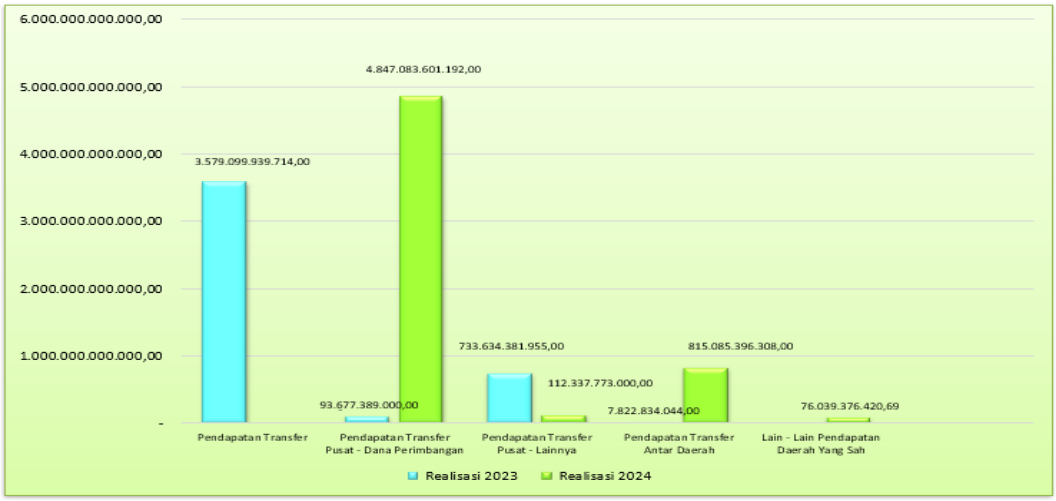
mengalami **penurunan** senilai Rp1.823.696.141,00 atau 1,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.382.456.473,00.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi Rp18.110.450.696,00 atau senilai 16,37% dari target senilai Rp110.642.378.350,00 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp3.176.466.252,00 atau 21,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp14.933.984.444,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.986.298.143,26 atau 91,77% dari target senilai Rp19.600.000.000,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.867.115.863,17 atau 11,58% sedangkan untuk Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp215.794.516.778,34 atau senilai 269,53% mengalami **kenaikan** senilai Rp53.560.509.313,65 atau 33,01% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp162.234.007.464,69.

Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Transfer senilai Rp5.774.413.283.269,00 dengan realisasi senilai Rp5.774.506.770.500,00 atau 100,00% dan Tahun 2024 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp76.039.376.420,69. Pendapatan Transfer Kabupaten Berau terdiri dari; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dengan realisasi Rp4.847.083.601.192,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan realisasi senilai Rp112.337.773.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi senilai Rp815.085.396.308,00. Sedangkan untuk Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari; Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp10.420.888.331,00; Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara Rp6.561.848.8089,69.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Transfer dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut.



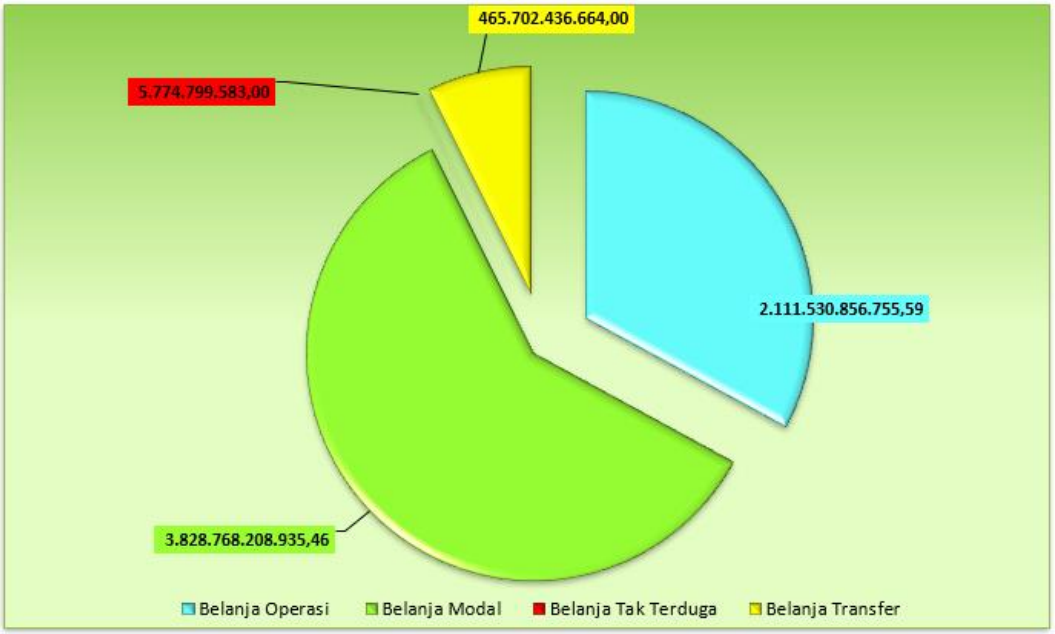
Gambar 3.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.847.083.601.192,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.579.099.939.714,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.267.983.661.478,00 atau 35,43%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya senilai Rp112.337.773.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp18.660.384.000,00 atau 19,92% dan untuk realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 senilai Rp815.085.396.308,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Rp733.634.381.955,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp81.451.014.353,00 atau 11,10%.

Realisasi Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 Rp76.039.376.420,69, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp7.822.834.044,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp68.216.542.376,69 atau 872,02%

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.5 dibawah ini, target anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp6.999.194.000.000,00 realisasinya mencapai 91,61% atau senilai Rp6.411.776.301.938,05. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Modal senilai Rp3.828.768.208.935,46 atau 93,34% dari target, sedangkan Belanja Operasi senilai Rp2.111.530.856.755,59 atau 87,66% dari target, Belanja Tidak Terduga senilai Rp5.774.799.583,00 atau 25,51% dari target dan Realisasi Belanja Transfer senilai Rp465.702.436.664,00 atau 99,95% dari target.



Gambar 3.5 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.6 dibawah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 mengalami **kenaikan** senilai Rp225.482.771.131,69 atau senilai 27,75%;

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp868.596.837.598,25 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp834.570.312.408,61 mengalami **kenaikan** senilai Rp34.026.525.189,64 atau senilai 4,08%;

Realisasi Belanja Bunga dan Belanja subsidi tidak ada dikarenakan tidak ada penanggaran.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp189.599.952.449,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp163.011.244.933,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp26.588.707.516,00 atau senilai 16,31%;

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 senilai Rp15.174.000.000,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.409.701,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.637.590.299,00 atau senilai 77,76%.



Gambar 3.6 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.7 dibawah. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.828.768.208.935,46 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.345.617.541.442,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.150.667.493,46 atau senilai 63,23%;

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.352.415.463,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2023 senilai

Rp7.825.488.693,00 mengalami **penurunan** senilai Rp6.473.073.230,00 atau senilai 82,72%;

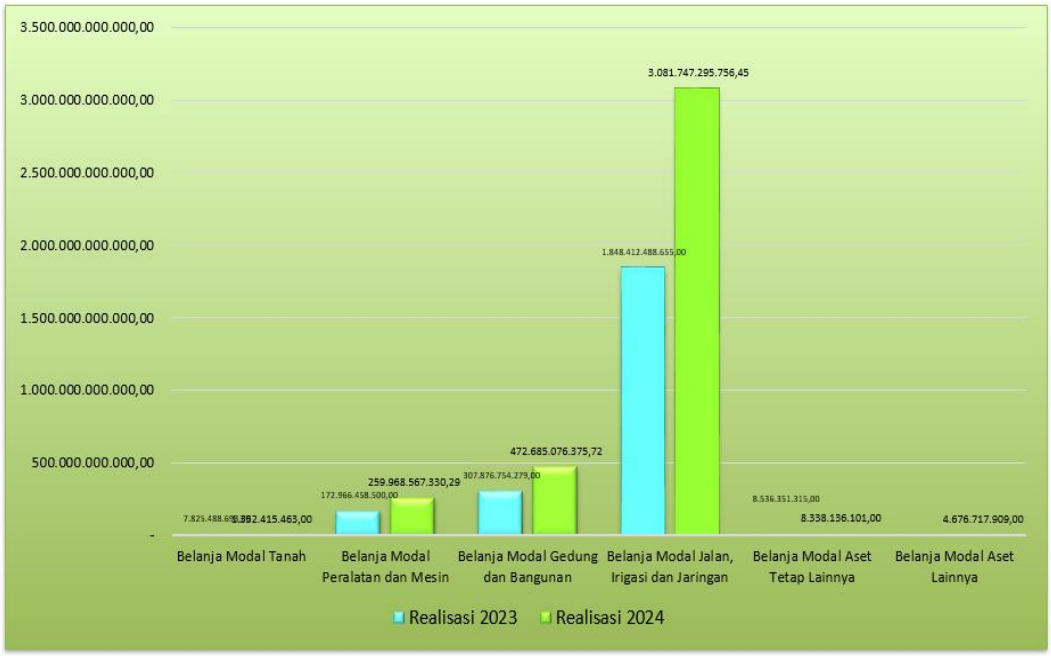
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp259.968.567.330,29 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp172.966.458.500,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp87.002.108.830,29 atau senilai 50,30%;

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp472.685.076.375,72 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp307.876.754.279,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.808.322.096,72 atau senilai 53,53%;

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.233.334.807.101,45 atau senilai 66,72%;

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.338.136.101,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.351.315,00 mengalami **penurunan** senilai Rp198.215.214,00 atau senilai 2,32%;

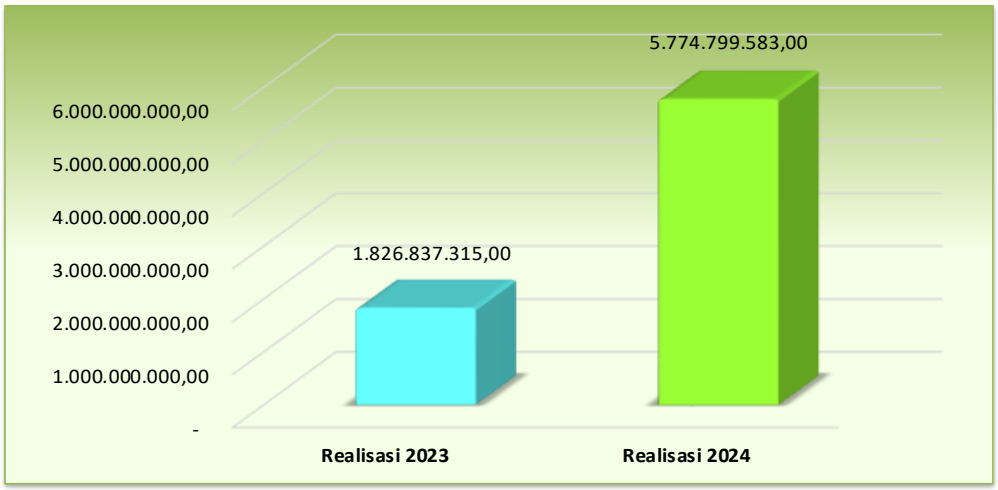
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.676.717.909,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00 mengalami **kenaikan** senilai 4.676.717.909,00 atau 0,00%.



Gambar 3.7 Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.8 dibawah. Realisasi Belanja tak Terduga Tahun

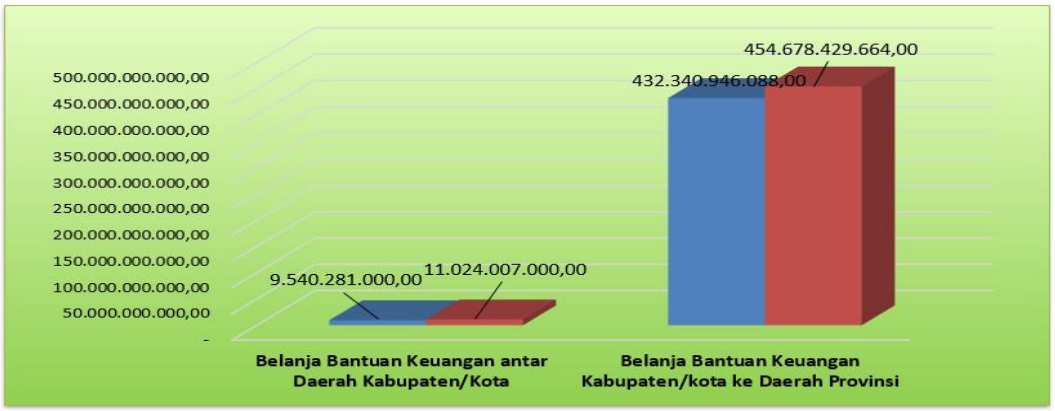
Anggaran 2024 senilai Rp5.774.799.583,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Tak terduga senilai Rp1.826.837.315,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.947.962.268,00 atau senilai 216,11%.



Gambar 3.8 Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

3.1.3. Belanja Transfer

Perbandingan kinerja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam grafik 3.9 dibawah. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 senilai Rp465.702.436.664,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp441.881.227.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp23.821.209.576,00 atau senilai 5,39%. Dengan rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 senilai Rp11.024.007.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.726.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 senilai Rp9.540.281.000,00 atau 15,55%; Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi Tahun 2024 senilai Rp454.678.429.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp22.337.483.576,00 atau 5,17% dibandingkan realisasi Tahun 2023 senilai Rp432.340.946.088,00.



Gambar 3.9 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

3.2. *Mandatory Spending*

Dalam Anggaran belanja daerah Tahun 2024 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan senilai 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

b. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);

c. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tabel 3.4 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	% SESUAI REGULASI	JUMLAH BELANJA PADA APBD	% DALAM APBD	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20	940.334.018.423,79	0,13	813.083.782.792,63	86,47
B	Belanja Fungsi Pengawasan	0,6	23.717.752.368,00	0,3	20.890.016.762,00	88,08
C	Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU	25	3.766.571.324.086,00	53,81	3.532.298.768.907,00	93,78
D	Alokasi dana Desa (ADD)	10	454.828.642.000,00	10	454.678.429.664,00	99,97
TOTAL			**5.185.451.736.877,79**		**4.820.950.998.125,63**	**92,97**

Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pada Dinas Pendidikan	**806.301.499.001,79**	**693.322.007.127,91**
	BELANJA OPERASI	**637.461.402.524,39**	**533.926.093.579,00**
	Belanja Pegawai	439.907.996.382,60	387.444.304.646,00
	Belanja Barang dan Jasa	173.573.580.701,79	124.324.905.021,00
	Belanja Hibah	23.979.825.440,00	22.156.883.912,00
	BELANJA MODAL	**168.840.096.477,40**	**159.395.913.548,91**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
	Belanja Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Menunjang Pendidikan, Antara Lain:	**134.032.519.422,00**	**119.761.775.664,72**
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.178.320.051,00	29.114.789.538,91
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.886.702.992,00	17.533.964.119,00
	Dinas Kebudayaan	56.596.236.263,00	50.128.743.685,81
	Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pada SKPD	25.371.260.116,00	22.984.278.321,00
2	**Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan**	**938.233.055.144,00**	**840.380.799.502,63**
3	**Total Belanja Daerah**	**6.999.194.000.000,00**	**6.411.776.301.938,05**
4	**Rasio Anggaran Pendidikan**	**0,13**	**0,13**

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	23.717.752.368,00	20.890.016.762,00
2	Anggaran Fungsi Pengawasan	23.717.752.368,00	20.890.016.762,00
3	Total Belanja Daerah	6.999.194.000.000,00	6.411.776.301.938,05
4	Rasio Anggaran Pengawasan	0,3%	0,3%

Tabel 3. 7 Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum Tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI
I	Belanja Modal	3.619.283.110.411,00	3.408.460.197.880,00
II	Belanja Pemeliharaan	21.907.349.734,00	19.361.564.184,00
III	Belanja Hibah	123.344.421.121,00	102.557.374.588,00
IV	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
V	Belanja Bantuan Keuangan	2.036.442.820,00	1.919.632.255,00
JUMLAH		**3.766.571.324.086,00**	**3.532.298.768.907,00**
TOTAL DANA TRANSFER UMUM		**4.594.447.159.269,00**	**4.642.374.567.328,00**
RASIO BELANJA WAJIB DTU		**81,98**	**76,09**

Tabel 3. 8 Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2024

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**Alokasi Dana Desa (ADD)**	**454.828.642.000,00**	**454.678.429.664,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00
	Alokasi Anggaran Belanja Daerah	**6.999.194.000.000,00**	**6.411.776.301.938,05**
	Alokasi Dana Perimbangan*	**4.594.447.159.269,00**	**4.642.374.567.328,00**
	Rasio Anggaran Dana Desa	**9,90**	**9,79**

**) Anggaran setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus*

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) OPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan Pendapatan dan Beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Sedangkan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas Pendapatan Tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalaam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis Kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Pendapatan-LRA;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan sampai dengan rincian obyek Pendapatan-LRA; dan
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas Pendapatan (*earned*); atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b. Ketidakpastian penerimaan Kas relatif tinggi;

c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya

pendapatan atas jasa giro;

d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);

e. Sistem atau administrasi Piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya Piutang diakhir tahun.

f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan.

   Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan Kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

   1) Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

   2) Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas

      Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan Kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran Kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah dalam jumlah dan persentase yang signifikan, kebijakan akuntansi mengenai Belanja, penjelasan sebab-sebab realisasi Belanja yang melebihi Anggaran dan pengungkapan realisasi Belanja yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun Kas belum dikeluarkan;

b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan

c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun Kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan

c. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan aset tetap/amortisasi, Beban Transfer, Beban tak terduga dan Beban Lain-lain;
b. Beban Non Operasional;
c. Beban Luar Biasa; dan
d. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran Beban tahun berkenaan;

b. Pengakuan Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/Tahun Anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transferdilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas Transfer Keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran Transfer Keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, Pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer padaTahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat senilai Kewajiban Transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya. Realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya;

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber Pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pembiayaan antara lain:

a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan; dan

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan Dana Cadangan, penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Kas Jangka Pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek harus segera dapat diubah menjadi Kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening Kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

3) Pengesahan atas Penerimaan Pendapatan.

b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat:

1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:

a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau

2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.

a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan Transfer (Transfer Masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi Kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

h. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke Kas Daerah masuk sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen Kas dan

bukan merupakan bagian dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Rincian Kas dan Setara Kas;

b. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

b. Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan

c. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

   1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan

   2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;

c. Perubahan harga pasar baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
f. Perubahan pos investasi.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas Piutang untuk penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya Piutang dibagi atas:

a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;

c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan atau dokumen yang sah dan belum dibayarkan/dilunasi; dan atau

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan
b. jumlah Piutang dapat diukur;
c. Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan telah dilaksanakan penagihan; dan
d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

a. Piutang Pajak Dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak diakui;
d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer;
e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:
    1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi daerah penerima;
    2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang Transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika

kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

g. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

a. Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.

   1) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;

   2) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan

   3) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.

b. Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

   1) Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa Barang/Jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas Barang/Jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

   2) Penjualan

      Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut.

1) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

2) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak disajikan; dan

3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran Piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1) Disajikan sebagai Aset Lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan Piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal Piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,50%
b	Kurang Lancar	10%
c	Diragukan	50%
d	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa Piutang benar benar tidak dapat ditagi, atas Piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

Apabila kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas Piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan

sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Penghapusan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapustagihan dan penghapusbukuan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
    2) Memberi gambaran Ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan Ekuitas; dan
    3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan

dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan Piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan morel lebih luas menghadapi tugas masa depan;

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/Ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; dan

c. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada Beban Persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan senilai:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.Aset Non lancar meliputi:

a. Investasi Jangka Panjang;
b. Aset Tetap;
c. Dana Cadangan; dan
d. Aset Lainnya.

4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
4) investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Terhadap investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi Jangka Panjang non permanen:

1) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;

2) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga; dan

3) Investasi Jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilaiharga perolehan.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode Ekuitas; dan

d. Kepemilikan atas Investasi Jangka Panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas;
3) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan

4) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi jalan dan jaringan senilai Rp15.000.000,00 ke atas.

Tabel 4. 3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	500.000
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	500.000
1.3.2.1.03	Alat Bantu	500.000
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	500.000
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	500.000
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	500.000
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000
1.3.2.3.03	Alat Ukur	500.000
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	500.000
1.3.2.5.01	Alat Kantor	500.000
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	500.000
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000
1.3.2.6.01	Alat Studio	500.000
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	500.000
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	500.000
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	500.000
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	500.000
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	500.000
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	500.000
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	500.000
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	500.000
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	500.000
1.3.2.9.01	Senjata Api	500.000
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	500.000
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	500.000
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	500.000
1.3.2.10.01	Komputer Unit	500.000
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	500.000
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	500.000
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	500.000
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	500.000
1.3.2.13.01	Sumur	500.000
1.3.2.13.02	Produksi	500.000
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	500.000
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	500.000
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	500.000
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	500.000
1.3.2.15.03	Alat Sar	500.000
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	500.000
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	500.000
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	500.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.000.000
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	20.000.000
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	20.000.000
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000
1.3.4.1.01	Jalan	20.000.000
1.3.4.1.02	Jembatan	20.000.000

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	20.000.000
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20.000.000
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	20.000.000
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.000.000
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	20.000.000
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.000.000
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	20.000.000
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	15.000.000
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	15.000.000
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	15.000.000
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	15.000.000
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	15.000.000
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	15.000.000
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	15.000.000
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	15.000.000
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	15.000.000
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	15.000.000
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	15.000.000
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	15.000.000
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.2.01	Bahan Perpustakaan	1
1.3.5.2.02	Barang Bercorak Kesenian	1
1.3.5.2.03	Hewan	1
1.3.5.2.04	Biota Perairan	1
1.3.5.2.05	Tanaman	1
1.3.5.2.06	Barang Koleksi Non Budaya	1
1.3.5.2.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
1.3.6	Konnstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

   Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

   Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi Dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	2	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	4
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	40
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	3	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4
1	3	5	7	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;

b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;

c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan

d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Berau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Asets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap Kas atau Setara Kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat Aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi Kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi Kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan senilai nilai yang tercatat di neraca;

2) Aset yang diterima dicatat senilai nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; dan

3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

f. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

1) Batasan minimal Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

a) pemeliharaan kontruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke atas;
b) pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke atas.

2) Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan.

4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait, dengan ruang lingkup ;

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD
2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk :
   - aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
   - hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Perngertian istilah – istilah yang digunakan dalam kebijakan ini ;

a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
f. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
g. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
h. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
   a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
   b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan.
9. konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
10. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/ penurunan dalam ekuitas.

9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Penyajian Properti Investasi

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
    a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    b. metode penyusutan yang digunakan;
    c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
f. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
g. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
h. pelepasan;
i. penyusutan;
j. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
k. perubahan lain.

2. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. tanggal efektif penilaian kembali;
   d. nilai tercatat sebelum revaluasi
   e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
   g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
   h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
   i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
   j. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
   k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
   l. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
   m. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
   n. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

o. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
p. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
q. informasi lain terkait dengan properti investasi.

Ahli Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
   a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
   b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
   c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

6. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.5 Tabel Neraca dengan Properti Investasi

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Kas di BLUD				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang PAD lainnya				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Persediaan Alat Tuis Kantor				
Persediaan Alat Listrik				
Persediaan Material/Bahan				
Persediaan Benda Pos				
Persediaan Bahan Bakar				
Persediaan Bahan Makanan Pokok				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat berat				
Alat-alat angkutan darat bermotor				
Alat-alat angkutan darat tidak bermotor				
Alat-alat angkutan di air bermotor				
Alat-alat angkutan di air tidak bermotor				
Alat-alat angkutan udara				
Alat-alat bengkel				
Alat-alat pertanian dan peternakan				
Peralatan kantor				
Perlengkapan kantorkomputer				
Mebeleir				
Peralatan dapur				
Penghias ruangan rumah tangga				
Alat-alat studio				
Alat-alat komunikasi				
Alat-alat ukur				
Alat-alat kedokteran				
Alat-alat laboratorium				

Alat-alat persenjataan/keamanan				
Gedung dan Bangunan				
Gedung kantor				
Gedung rumah jabatan				
Gedung rumah dinas				
Gedung gudang				
Bangunan bersejarah				
Bangunan monumen				
Tugu peringatan				
Jalan, Jaringan dan Instalasi				
Jalan				
Jembatan				
Jaringan air				
Penerangan jalan, taman dan hutan kota				
Instalasi listrik dan telepon				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan kepustakaan				
Barang bercorak kesenian, kebudayaan				
Hewan/ternak dan tanaman				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi penyusutan aset tetap				
Jumlah				
Properti Investasi				
Properti Investasi				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan piutang penjualan angsuran				
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah				
Kemitraan dengan pihak ketiga				
Aset tidak berwujud				
Aset lai-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang perhitungan pihak ketiga				
Utang bunga				
Utang pajak				
Bagian lancar utang jangka panjang				
Pendapatan diterima dimuka				
Utang jangka pendek lainnya				
Jumlah				

EKUITAS				
Ekuitas				
Ekuitas untuk dikonsolidasikan				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

4.4.11.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa TA untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.4.11.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Aetap, dan Dana cadangan.Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Piutang penjualan angsuran disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset yang diserahkan dalam rangka Bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

a) Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai senilai nilai

tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai senilai harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun,Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat senilainilai perolehan aset yang dibangun, yaitu senilai nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Aset Tidak Berwujud meliputi:

1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun

2) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

   Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen *master plan*, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, *Detail Engineer Design* (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

5) Aset Tidak Berwujud lainnya, termasuk Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Nilai Aset Tidak Berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan Aset Tidak Berwujud;

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke Aset Tidak Berwujud tersebut; dan

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi:

1) Biaya bahan yang digunakan dalam Aset Tidak Berwujud;
2) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
3) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
4) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Aset Tidak Berwujud, seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/narasumber.

Penilaian Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 (lima) tahun.

Penyajian Aset Tidak Berwujud

ATB disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut.

1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

e. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena dipinjamkan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

f. Aset Bersejarah (Heritage *Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran Kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai Belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

4.4.12. Akuntansi Kewajiban

Karakterisitik utama Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai Kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

   Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

   Kewajiban jangka pendek lainnya adalah Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, Utang Jangka Pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

   Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan Kewajiban Jangka Panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

   1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Jumlah setiap Kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan Laporan Keuangan membuktikan bahwa substansi Kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang hanya jika:

a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-Relatedevents*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan Kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai

kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi Kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui Kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan

2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

   Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan Kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui senilai jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

   Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan Kewajiban sebagai berikut.

   a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;

   b) Utang Bunga sebagai bagian dari Kewajiban atas pokok utang berupa Kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;

   c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat Reklasifikasi

Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga Kewajiban itu menjadi Kewajiban Jangka Pendek;

d) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;

e) Utang Beban, diakui pada saat:

(1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

(3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

f) Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

g) Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:

(1) barang yang dibeli sudah diterima; atau

(2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau

(3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

h) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

i) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang Kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal atas Kewajiban mencerminkan nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat Kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;

c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan

d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan Ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos Kewajiban adalah sebagai berikut.

a. Utang PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan;

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

c. Utang Transfer dicatat senilai nilai kekurangan transfer;

d. Utang Bunga Atas Utang Pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan;

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;

g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan

h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan Kewajiban Lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Kewajiban Lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo Kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo;
    1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        a) Pengurangan pinjaman;
        b) Modifikasi persyaratan utang;
        c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
        d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
        e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
        f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    3) Biaya pinjaman:
        a) Perlakuan biaya pinjaman;
        b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
        c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, dimana dalam prosesnya juga ditentukan oleh Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode yang bersangkutan serta koreksi kesalahan atas pembukuan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 meliputi pendapatan-LRA, belanja, Surplus/ defisit – LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Perbup Berau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan anggaran pendapatan menjadi senilai Rp6.107.982.827.838,00, dari anggaran murni senilai Rp4.627.669.878.805,00. Target belanja senilai Rp6.999.194.000.000, dari anggaran murni senilai Rp5.074.960.000.000,00 dan pembiayaan netto senilai Rp891.211.172.162,00. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebagai berikut :

5.1.1 Pendapatan-LRA

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan	6.193.996.172.870,29	4.700.904.175.374,78

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Berau, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi

menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam Tabel 5.1 dan 5.2 berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	303.864.396.033,00	343.450.025.949,60	113,03
2	Pendapatan Transfer	5.774.413.283.269,00	5.774.506.770.500,00	100,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98
	Jumlah	**6.107.982.827.838,00**	**6.193.996.172.870,29**	**101,41**

Gambaran dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp6.107.982.827.838,00 dengan Realisasi senilai Rp6.193.996.172.870,29 atau 101,41%.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	343.450.025.949,60	286.669.630.661,78	56.780.395.287,82	19,81
2	Pendapatan Transfer	5.774.506.770.500,00	4.406.411.710.669,00	1.368.095.059.831,00	31,05
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.039.376.420,69	7.822.834.044,00	68.216.542.376,69	100,00
	Jumlah	**6.193.996.172.870,29**	**4.700.904.175.374,78**	**1.493.091.997.495,51**	**31,76**

Gambaran dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp6.193.996.172.870,29 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.700.904.175.374,78, mengalami **kenaikan** senilai Rp1.493.091.997.495,51 atau 31,76%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.1 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.2 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Masing-masing anggaran dan realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	343.450.025.949,60	286.669.630.661,78

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Pajak Daerah	93.558.789.845,00	91.558.760.332,00	97,86
2	Pendapatan Retribusi Daerah	110.642.378.350,00	18.110.450.696,00	16,37
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.600.000.000,00	17.986.298.143,26	91,77
4	Lain-lain PAD Yang Sah	80.063.227.838,00	215.794.516.778,34	269,53
	Jumlah	**303.864.396.033,00**	**343.450.025.949,60**	**113,03**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp303.864.396.033,00 dengan Realisasi senilai Rp343.450.025.949,60 atau 113,03%.

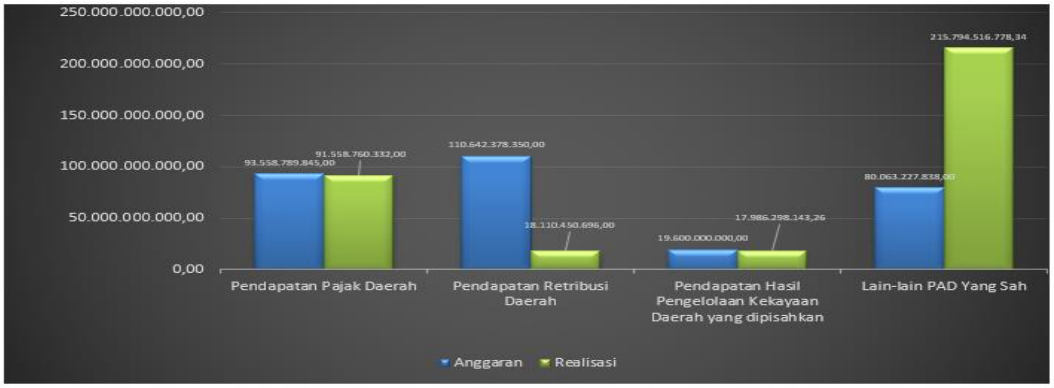
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	91.558.760.332,00	93.382.456.473,00	(1.823.696.141,00)	(1,95)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.110.450.696,00	14.933.984.444,00	3.176.466.252,00	21,27
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.986.298.143,26	16.119.182.280,09	1.867.115.863,17	11,58
4	Lain-lain PAD Yang Sah	215.794.516.778,34	162.234.007.464,69	53.560.509.313,65	33,01
	Jumlah	**343.450.025.949,60**	**286.669.630.661,78**	**56.780.395.287,82**	**19,81**

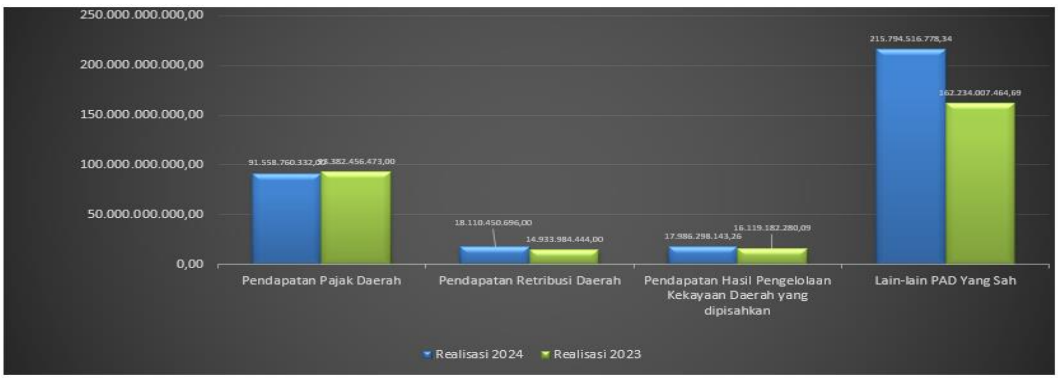
Dari penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp343.450.025.949,60 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp286.669.630.661,78, mengalami **kenaikan** senilai Rp56.780.395.287,82 atau 19,81%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.3 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.4 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Dengan melihat tabel dan gambar di atas menunjukan anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	91.558.760.332,00	93.382.456.473,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Berau.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Berau memungut Pajak Daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perbup Nomor 21 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selaku instansi pemungut dan pengelola pajak daerah selalu melakukan intensifikasi dan eksensifikasi serta menetapkan tarif berdasarkan dengan Peraturan Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*.

Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran dan realisasi pendapatan pajak mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 serta anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	600.000.000,00	290.417.433,00	48,40
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	555.240,00	0,37
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	62.532.000,00	4,17
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	608.789.845,00	194.609.268,00	31,97
10	PBB	5.500.000.000,00	4.361.315.759,00	79,30
11	BPHTB	14.500.000.000,00	15.277.432.416,00	105,36
12	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	6.444.373.122,00	161,11
13	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	28.500.000.000,00	24.291.444.311,00	85,23
14	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	29.500.000.000,00	32.162.787.773,00	109,03
15	PBJT-Hotel	8.000.000.000,00	7.815.408.122,00	97,69
16	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	251.483.570,00	62,87
17	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	300.000.000,00	406.401.318,00	135,47
	Jumlah	**93.558.789.845,00**	**91.558.760.332,00**	**97,86**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pajak Daerah senilai Rp93.558.789.845,00 dengan realisasi senilai Rp91.558.760.332,00 atau 97,86%.

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	0,00	6.881.753.285,00	(6.881.753.285,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran	0,00	30.420.852.172,00	(30.420.852.172,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	344.784.773,00	(344.784.773,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	290.417.433,00	602.184.763,00	(311.767.330,00)	(51,77)
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	28.534.831.162,00	(28.534.831.162,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir	0,00	523.283.767,00	(523.283.767,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah	555.240,00	509.520,00	45.720,00	8,97
8	Pajak Sarang Burung Walet	62.532.000,00	204.404.500,00	(141.872.500,00)	(69,41)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	194.609.268,00	622.722.080,00	(428.112.812,00)	(68,75)
10	PBBP2	4.361.315.759,00	10.410.938.473,00	(6.049.622.714,00)	(58,11)
11	BPHTB	15.277.432.416,00	14.836.191.978,00	441.240.438,00	2,97
12	PBJT-Restoran	6.444.373.122,00	0,00	6.444.373.122,00	0,00
13	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.291.444.311,00	0,00	24.291.444.311,00	0,00
14	PBJT-Tenaga Listrik	32.162.787.773,00	0,00	32.162.787.773,00	0,00
15	PBJT-Jasa Perhotelan	7.815.408.122,00	0,00	7.815.408.122,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
16	PBJT-Jasa Parkir	251483570,00	0,00	251.483.570,00	0,00
17	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	406.401.318,00	0,00	406.401.318,00	0,00
	Jumlah	**91.558.760.332,00**	**93.382.456.473,00**	**(1.823.696.141,00)**	**(1,95)**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp91,558,760,332,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.382.456.473,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.823.696.141,00 atau 1,95%.

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi ***kenaikan*** dan ***penurunan*** realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PBJT – Jasa Perhotelan

Target Pajak Hotel berganti nomenklatur PBJT-PBJT-Jasa Perhotelan di Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp8.000.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp7.815.408.122.00 atau 97,69%. Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan disebabkan oleh:

1) Regulasi Undang-Undang (UU) terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2) Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sudah semakin membaik.
3) Banyaknya wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Berau untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Kabupaten Berau sehingga berdampak pada pendapatan hotel.

Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 yang berganti nomenklatur menjadi PBJT-PBJT-Jasa Perhotelan mengalami **kenaikan** senilai Rp933,654,837,00 atau 13,57% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.881.753.285,00,00.

b. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Target Pajak Restoran berganti nomenklatur PBJT-Makanan dan/atau Minuman di Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp4.000.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp6.444.373.122,00 atau 161,11% Penerimaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp23.976.479.050,00 atau 78,82% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp30.420.852.172,00. Terjadi **penurunan** dari target yang ditetapkan disebabkan Perubahan nomenklatur Pajak Restoran dan sejenisnya dirubah menjadi Penerimaan Pajak Barang

Tertentu atau PBJT yang terbagi menjadi PBJT-Restoran dan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.

c. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp28,500,000,000,00 dan telah terealisasi senilai Rp24,291,444,311,00. Jika di bandingkan dengan realisasi Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan karena masih termasuk dalam nomenklatur Pajak Restoran di Tahun 2023.

d. PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan

Target Pajak Hiburan berganti nomenklatur menjadi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan di Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp406.401.318,00 atau 135,47%. mengalami **kenaikan** senilai Rp61.616.545,00 atau 17,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp344.784.773,00 yang masih menggunakan nomenklatur Pajak Hiburan. Terjadi **kenaikan** penerimaan pajak hiburan dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya objek pajak hiburan yang baru dibuka sehingga berdampak terhadap kenaikan pendapatan Pajak Hiburan.

e. Pajak Reklame

Target Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp600.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp290.417.433,00 atau 48,40%. Tidak tercapainya target Pajak Reklame dari yang telah direncanakan dikarenakan menurunnya pajak penarikan reklame yang insidental. Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp311.767.330,00 atau 51,77% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp602.184.763,00.

f. PBJT-Tenaga Listrik

Target Pajak Penerangan Jalan berganti nomenklatur menjadi PBJT-Tenaga Listrik di Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp29.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp32.162.787.773,00 atau 109,03%. Tercapainya target pendapatan pada Pajak PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain disebabkan karena adanya pemasangan baru pada enam perusahaan yang berada di Kabupaten Berau dengan daya 9,07 Mw. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.627.956.611,00 atau 12,71% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp28.534.831.162,00.

g. PBJT - Jasa Parkir

Target Pajak Parkir berganti nomenklatur menjadi PBJT-Jasa Parkir di Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan senilai Rp400.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp251.483.570,00 atau 62,87%. PBJT-Jasa Parkir antara lain:

1) Potensi Pajak Parkir sebagian besar bersumber dari pengelolaan parkir Bandara Kalimarau dan RSUD Kabupaten Berau.

2) Bertambahnya jadwal penerbangan di Bandara Kalimarau sehingga menyebabkan pendapatan parkir di Bandara Kalimarau bertambah.

3) Potensi pajak parkir yang didapat pada kegiatan yang bersifat insidental.

Penerimaan PBJT- Jasa Parkir Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp271.800.197,00 atau 51,94% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp523.283.767,00.

h. Pajak Air Tanah

Target Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp555.240,00 atau 0,37%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Pajak Air Bawah Tanah ada beberapa objek yang tutup sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan. Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp45.720 atau 8,97% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp509.520,00.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp62.532.000 atau 4,17%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan objek sarang burung walet alami (Goa) mengalami penurunan hasil panen yang disebabkan faktor alam, pajak sarang burung rumahan belum dipungut secara maksimal dan untuk Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat izin atau tidak ada izin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp141.872.500 atau 69,41% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp204.404.500,00.

j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp608.789.845,00 dan telah direalisasikan senilai Rp194.609.268,00 atau 31,97%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh perubahan regulasi terkait dengan perizinan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemberian izin usaha pertambangan, sehingga apabila dipungut dianggap melegalkan usaha pertambangan rakyat, Tahun 2024 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat izin atau tidak ada izin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp428,112,812,00 atau 68,75% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp622.722.080,00.

k. Pajak PBBP2

Target Pajak PBBP2 Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp5.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp4.361.315.759,00 atau 79,30%. Tercapainya target realisasi pajak dikarenakan adanya tunggakan pajak beberapa Wajib Pajak yang telah dilunasi dan telah ditindaklanjuti pada proses penagihan bersama dengan pihak Kejaksaan selaku pengacara negara dan dikarenakan PT.Kertas Nusantara telah melakukan pembayaran. Penerimaan PBBP2 Tahun Anggaran 2024 mengalami **penuruan** senilai Rp6.049.622.714,00 atau 58,11% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp10.410.938.473,00.

l. Pajak BPHTB-Pemindahan Hak

Target Pajak BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp14.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp15.277.432.416,00 atau 105,36%. Tercapainya target pajak yang melebihi angka yang telah ditetapkan tersebut karena objek pajak BPHTB-Pemindahan Hak adalah objek pajak insidental atas transaksi terjadinya peralihan hak biasa disebabkan karena jual beli, hibah dan wasiat. Penerimaan BPHTB-Pemindahan Hak.Tahun Anggaran 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp441.240.438,00 atau 2,97% dari penerimaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp14.836.191.978,00.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Retribusi Daerah	18.110.450.696,00	14.933.984.444,00

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun organisasi perangkat daerah pemungut berdasarkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
g. Dinas Perhubungan
h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
l. Kantor Penghubung (Sekretariat Daerah)
m. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
n. Badan Pendapatan Daerah
o. Dinas Perikanan.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai unit penghasil. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.021.514.700,00	6.562.891.800,00	6,43
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.000.000,00	140.928.000,00	85,41
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.800.000.000,00	3.809.459.072,00	211,64
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.835.832.000,00	2.379.568.000,00	0,00
	Subtotal Retrubusi Jasa Umum	***106.822.346.700,00***	***12.892.846.872,00***	***12,07***
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.669.081.650,00	2.326.518.250,00	139,39
10	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	22.350.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.000.000,00	70.305.000,00	334,79
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	600.000.000,00	633.700.000,00	105,62
14	Retribusi rumah potong hewan	0,00	263.313.000,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	440.700.710,00	0,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	195.000.000,00	435.620.000,00	223,39
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	158.358.000,00	0,00
18	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	9.600.000,00	0,00	0,00
19	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.000.000,00	0,00	0,00
20	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.850.000,00	0,00	0,00
21	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	264.000.000,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
22	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00
23	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.500.000,00	5.950.000,00	396,67
	Subtotal Retribusi Jasa Usaha	***3.140.031.650,00***	***4.356.814.960,00***	***138,75***
24	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
25	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00
26	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
27	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	670.066.804,00	134,01
28	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	190.722.060,00	105,96
	Subtotal Retribusi Perizinan Tertentu	***680.000.000,00***	***860.788.864,00***	**126,59**
	Jumlah	**110.642.378.350,00**	**18.110.450.696,00**	**16,37**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp110.642.378.350,00 dengan realisasi senilai Rp18.110.450.696,00 atau 16,37%.

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.562.891.800,00	6.506.654.100,00	56.237.700,00	0,86
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.379.568.000,00	1.799.438.000,00	580.130.000,00	32,24
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.928.000,00	115.204.000,00	25.724.000,00	22,33
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.809.459.072,00	1.857.949.943,00	1.951.509.129,00	105,04
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	571.532.950,00	(571.532.950,00)	(100,00)
6	Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	196.274.100,00	(196.274.100,00)	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00			
	Subtotal Retribusi Jasa Umum	***12.892.846.872,00***	***11.048.053.093,00***	***1.844.793.779,00***	***16,70***
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.326.518.250,00	2.043.595.248,00	282.923.002,00	13,84
10	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	22.350.000,00	19.200.000,00	3.150.000,00	16,41
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.305.000,00	20.653.000,00	49.652.000,00	240,41
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	633.700.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Retribusi rumah potong hewan	263.313.000,00	240.293.000,00	23.020.000,00	9,58
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	440.700.710,00	227.716.860,00	212.983.850,00	93,53
16	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	435.620.000,00	52.901.000,00	382.719.000,00	723,46
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	158.358.000,00	177.030.000,00	(18.672.000,00)	(10,55)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
18	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
	Subtotal Retrubusi Jasa Usaha	***4.356.814.960,00***	***2.781.389.108,00***	***1.575.425.852,00***	***56,64***
24	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(100,00)
26	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	670.066.804,00	880.209.643,00	(210.142.839,00)	(23,87)
28	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	190.722.060,00	220.932.600,00	(30.210.540,00)	(13,67)
	Subtotal Retrubusi Perizinan Tertentu	***860.788.864,00***	***1.104.542.243,00***	**(243.753.379,00)**	**(22,07)**
	Jumlah	**18.110.450.696,00**	**14.933.984.444,00**	**3.176.466.252,00**	**21,27**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp18.110.450.696,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp14.933.984.444,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.176.466.52,00 atau 21,27%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat **kenaikan** dan **penurunan** nilai retribusi antara Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Target Retribusi Jasa Umum dianggarkan senilai Rp106.822.346.700,00 dan telah direalisasikan senilai Rp12.892.846.872,00 atau 12,07%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

   1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
      Target Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp102.021.514.700,00 dan direalisasikan senilai Rp6.562.891.800,00 atau 6,43%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami **kenaikan** senilai Rp56.237.700 atau 0,86% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.506.654.100,00. Pemungutan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perda no 7

Tahun 2023 tentang PDRD. Adapun penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan diantaranya:

a) Tagihan BPJS Kesehatan yang boleh diklaimkan ke kantor BPJS dan telah dibayarkan oleh BPJS kesehatan.
b) Karena adanya peningkatan kunjungan pasien RSUD Talisayan.
c) Tersedianya pelayanan spesialis pada RSUD Talisayan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis bedah.

2) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp165.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp140.928.000,00 atau 85,41%. Penerimaan Retribusi Parkir mengalami **kenaikan** senilai Rp25.724.000,00 atau 22,33% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp115.204.000,00. **Kenaikan** Retribusi Pelayanan Parkir disebabkan karena MoU antara kantor Samsat dengan Dinas Perhubungan sehingga dapat melakukan kegiatan penertiban retribusi parkir secara maksimal.

3) Retribusi Pelayanan Pasar

Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.800.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp3.809.459.072,00 atau 211,64%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar mengalami **kenaikan** senilai Rp1.951.509.129,00 atau 105,04% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.857.949.943,00. **Kenaikan** Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan karena tingginya pengunjung pasar sehingga pedagang mengalami kenaikan penghasilan. Retribusi pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp2.835.832.000,00 dan direalisasikan senilai Rp2.379.568.000,00 atau 83,91%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan mengalami **kenaikan** senilai Rp580.130.000,00 atau 32,24% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.799.438.000,00. **Kenaikan** realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bekerja sama dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakal dalam pemungutan retribusinya.

b. Target Retribusi Jasa Usaha dianggarkan senilai Rp3.140.031.650,00 dan telah direalisasikan senilai Rp4.356.814.960,00 atau 138,75%. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.669.081.650,00 dan direalisasikan senilai

Rp2.326.518.250,00 atau 139,39%. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp282.923.002,00 atau 13,84% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.043.595.248,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

a) Dinas Pendidikan (SKB)
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
e) Sekretariat Daerah (Kantor Penghubung/Mess Berau)

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp21.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp70.305.000,00 atau 334,79%. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami **kenaikan** senilai Rp49.652.000,00 atau 240,41% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp20.653.000,00.

3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Target Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dianggarkan senilai Rp600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp633.700.000,00 atau 105,62%.

4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp195.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp435.620.000,00 atau 223,39%. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami **kenaikan** senilai Rp382.719.000,00 atau 723,46% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.901.000,00. Kenaikan dikarenakan banyak tempat usaha rekreasi baru.

5) Retribusi Tempat Pelelangan berubah nomenkaltur menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Target Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp9.600.000,00 dan direalisasikan senilai Rp22.350.000,00 atau 232,81%. Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan mengalami **kenaikan** senilai Rp3.150.000,00 atau 16,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp19.200.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan hanya menyewakan *cool box* dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dialihkan ke provinsi. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

6) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Target Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan senilai Rp7.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00.

7) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Retribusi rumah potong hewan berubah nomenklatur menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak. Target Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp222.850.000,00 dan direalisasikan senilai Rp263.313.000,00 atau 118,16%. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami **kenaikan** senilai Rp23.020.000,00 atau 9,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp240.293.000,00. Hal ini disebabkan oleh cukup tingginya konsumsi masyarakat terhadap hewan potong dan naik turunnyaharga hewan potong. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

8) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan berubah Nomenklatur menjadi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dengan Target Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp264.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp440.700.710,00 atau 166,93%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami **kenaikan** senilai Rp212.983.850,00 atau 93,53% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp227.716.860,00. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut oleh Dinas Perhubungan.

9) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berubah nomenklatur menjadi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp158.358.000,00 atau 105,57%. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami **penurunan** senilai Rp18.672.000,00 atau 10,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp177.030.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perikanan.

10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Target Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.500.000,00 dan direalisasikan senilai Rp5.950.000,00 atau 396,67%.

c. Target Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan senilai Rp680.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp860.788.864,00 atau 126,59%. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp670.066.804,00 atau 134,01%. Penerimaan Persetujuan Bangunan Gedung mengalami **penurunan** senilai Rp210.142.839,00 atau 23,87% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp880.209.643,00.

2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Target Retribusi TKA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp180.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp190.722.060,00 atau 105,96%. Penerimaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengalami **penurunan** senilai Rp30.210.540,00 atau 13,67% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp220.932.600,00.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Tahun 2024	Tahun 2023
	17.986.298.143,26	16.119.182.280,09

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya dikelola Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Bagian Perekonomian) yaitu berupa dividen dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dividen PT BPD Kaltimtara	14.900.000.000,00	14.981.036.885,26	100,54
2	Dividen PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	800.000.000,00	28.658.559,00	3,58
3	Dividen PT. Indo Pusaka Berau	2.000.000.000,00	1.499.991.300,00	75,00
4	Dividen Perumda Air Minum Batiwakal	1.900.000.000,00	1.476.611.399,00	77,72
5	Dividen Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**19.600.000.000,00**	**17.986.298.143,26**	**91,77**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp19.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp17.986.298.143,26 atau 91,77%.

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Deviden PT BPD Kaltimtara	14.981.036.885,26	14.636.429.316,09	344.607.569,17	2,35
2	Dividen PT HutanSanggam Labanan Lestari	28.658.559,00	614.369.197,00	(585.710.638,00)	(95,34)
3	Deviden PT. Indo Pusaka Berau	1.499.991.300,00	499.997.100,00	999.994.200,00	200,00
4	Deviden Perumda Air Minum Batiwakal	1.476.611.399,00	368.386.667,00	1.108.224.732,00	300,83
5	Deviden Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**17.986.298.143,26**	**16.119.182.280,09**	**1.867.115.863,17**	**11,58**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp17.986.298.143,26 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.119.182.280,09 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.367.118.763,17 atau 11,58%. Mengalami **kenaikan** karena naiknya realisasi pada PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal dan PT.BPD Kaltimtara.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain - Lain PAD Yang Sah	Tahun 2024	Tahun 2023
	215.794.516.778,34	162.234.007.464,69

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang terdiri dari 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Berau yaitu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	1.640.646.616,88	410,16
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	200.000.000,00	35.993.000,00	18,00
3	Penerimaan Jasa Giro	18.500.400.000,00	9.993.490.434,68	54,02
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Bunga	43.500.000.000,00	87.224.951.102,32	200,52
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	16.600.000.000,00	18.336.886.525,90	110,46
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	400.000.000,00	2.383.324.425,50	595,83

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	462.827.838,00	717.916.612,00	155,12
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	29.598.682,00	100,00
10	Pendapatan BLUD	0,00	95.399.283.552,06	0,00
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	32.425.827,00	0,00
	Jumlah	**80.063.227.838,00**	**215.794.516.778,34**	**269,53**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pendapatan Lain–Lain PAD Yang Sah senilai Rp80.063.227.838,00 dengan realisasi senilai Rp215.794.516.778,34 atau 269,53%.

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.640.646.616,88	278.888.853,45	1.361.757.763,43	488,28
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.993.000,00	12.699.000,00	23.294.000,00	183,43
3	Jasa Giro	9.993.490.434,68	20.162.740.302,79	(10.169.249.868,11)	(50,44)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	25.144.444,00	(25.144.444,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga	87.224.951.102,32	36.991.037.525,19	50.233.913.577,13	135,80
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.336.886.525,90	4.327.981.887,68	14.008.904.638,22	323,68
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.383.324.425,50	664.592.690,98	1.718.731.734,52	258,61
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	717.916.612,00	155.564.419,00	562.352.193,00	361,49
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	29.598.682,00	47.203.221,00	(17.604.539,00)	(37,30)
10	Pendapatan BLUD	95.399.283.552,06	89.860.617.262,60	5.538.666.289,46	6,16
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	2.480.239,00	(2.480.239,00)	(100,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	9.691.448.619,00	(9.691.448.619,00)	(100,00)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	32.425.827,00	13.609.000,00	18.816.827,00	138,27
	Jumlah	**215.794.516.778,34**	**162.234.007.464,69**	**53.560.509.313,65**	**33,01**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah senilai Rp215.853.385.553,13 dan Tahun Anggaran 2023 merealisasikan senilai

Rp162.234.007.464,69 mengalami **kenaikan** senilai Rp53.560.509.313,65 atau 33,01%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat kenaikan dan penurunan nilai Lain-lain PAD yang sah antara Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp400.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp1.640.646.616,88 atau 410,16% mengalami **kenaikan** senilai Rp1.361.757.763,43 atau 488,28% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp278.888.853,45.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp35.993.000,00 atau 18,00%. mengalami **kenaikan** senilai Rp23.294.000,00 atau 183,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp12.699.000,00. Kenaikan dikarenakan perubahan nomenklatur Pendapatan Hasil dari Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 menjadi pemanfaatan BMD.

c. Pendapatan Jasa Giro

Target Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp18.500.400.000,00 dan direalisasikan senilai Rp9.993.490.434,68 atau 54,02% mengalami **penurunan** senilai Rp10.169.249.868,11 atau 50,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp20.162.740.302,79. Naik turunnya Pendapatan Jasa Giro dipengaruhi jumlah dana yang ada dalam RKUD, jika anggaran dalam RKUD tinggi maka pendapatan jasa giro akan meningkat begitu pula sebaliknya.

d. Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

Target Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% mengalami **penurunan** senilai Rp25.144.444,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp25.144.444,00.

e. Pendapatan Bunga Deposito

Target Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp43.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp87.224.951.102,32 atau 200,52% mengalami **kenaikan** senilai Rp50.233.913.577,13 atau 135,80% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp36.991.037.525,19. Kenaikan terjadi dikarenakan pada tahun tersebut adanya penambahan deposito Bank Mandiri dan suku bunga kredit

mengalami kenaikan, Kenaikan bunga itu otomatis akan menambah manfaat yang bisa diperoleh.

f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Target Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp16.600.000.000,00 dan direalisasikan Rp18.336.886.525,90 atau 110,46% mengalami **kenaikan** senilai Rp14.008.904.638,22 atau 323,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.327.981.887,68 kenaikan realisasi dikarenakan adanya setoran pengembalian kelebihan volume pekerjaan dan setoran lainnya.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Target Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp400.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp2.383.324.425,50 atau 595,83% mengalami **kenaikan** senilai Rp1.718.731.734,52 atau 258,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp664.592.690,98. Kenaikan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan tidak begitu baik dan menurunnya kapasitas serta progress pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Target Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp462.827.838,00 dan direalisasikan senilai Rp717.916.612,00 atau 155,12% mengalami **kenaikan** senilai Rp562.352.193,00 atau 361,49% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp155.564.419,00. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan tunggakan pokok pajak daerah yang melebihi masa waktu pembayaran sehingganya kenaikan denda pajak juga meningkat.

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan namun ada realiasi senilai Rp29.598.682,00 mengalami **penurunan** senilai Rp17.604.539,00 atau 37,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp47.203.221,00.

j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan di Tahun 2024 namun dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp2.480.239,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.480.239,00 atau 100%.

k. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp95.399.283.552,06 atau 0,00% mengalami **kenaikan**

senilai Rp5.538.666.289,46 atau 6,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp89.860.617.262,60. Menurunnya realisasi pendapatan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pelayanan pasien di Tahun Anggaran 2024. Sehingga itu juga terjadi penurunan pendapatan pada pelayanan umum dan pendapatan lain-lainnya yang sah.

l. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp32.425.827,00 atau 0,00% mengalami **kenaikan** senilai Rp18.816.827,00 atau 138,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.609.000,00

m. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan di PEndapatan Lai-Lain PAD yang Sah karena perubahan nomenklatur namun mengalami **penurunan** senilai Rp9.691.448.619,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9.691.448.619,00. Terkait dengan perhitungan Jasa Pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan naik turunnya transfer dana tidak menetap karena berdasarkan jumlah peserta perbulannya artinya jika peserta meningkat maka pendapatan akan meningkat.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer	5.774.506.770.500,00	4.406.411.710.669,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**4.813.515.450.269,00**	**4.847.083.601.192,00**	**100,70**
-	Dana Bagi Hasil	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20
-	Dana Alokasi Umum	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99
-	Dana Alokasi Khusus - Fisik	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67
-	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90
2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**109.441.195.000,00**	**112.337.773.000,00**	**102,65**
-	Dana Insentif Daerah	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	120,73

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
-	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
-	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
-	Dana Desa	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	100,00
3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**851.456.638.000,00**	**815.085.396.308,00**	**95,73**
-	Pendapatan Bagi Hasil	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66
-	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	**5.774.413.283.269,00**	**5.774.506.770.500,00**	**100,00**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan Pendapatan Transfer senilai Rp5.774.413.283.269,00 dan direalisasikan senilai Rp5.774.506.770.500 atau 100,00%.

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**4.847.083.601.192,00**	**3.579.099.939.714,00**	**1.267.983.661.478,00**	**35,43**
-	Dana Bagi Hasil	4.053.383.565.000,00	2.846.123.582.480,00	1.207.259.982.520,00	42,42
-	Dana Alokasi Umum	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00	23.217.598.807,00	4,10
-	Dana Alokasi Khusus - Fisik	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00	27.601.339.892,00	52,31
-	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	124.344.153.018,00	114.439.412.759,00	9.904.740.259,00	8,66
2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**112.337.773.000,00**	**93.677.389.000,00**	**18.660.384.000,00**	**19,92**
-	Dana Insentif Daerah	16.869.131.000,00	0,00	(16.869.131.000,00)	0,00
-	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Desa	95.468.642.000,00	93.677.389.000,00	1.791.253.000,00	1,91
3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**815.085.396.308,00**	**733.634.381.955,00**	**81.451.014.353,00**	**11,10**
-	Pendapatan Bagi Hasil	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00	(49.996.485.647,00)	(9,82)
-	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah Pendapatan Transfer	**5.774.506.770.500,00**	**4.406.411.710.669,00**	**1.368.095.059.831,00**	**31,05**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Transfer senilai Rp5.774.506.770.500,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.406.411.710.669,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.368.095.059.831,00 atau 31,05%.

Dari tabel diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Gambar 5.5 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024



Gambar 5.6 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan disajikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Perimbangan	4.847.083.601.192,00	3.579.099.939.714,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusun (DAK) Non Fisik. Uraian Anggaran Dana Perimbangan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Berau Tahun

Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dalam mendanai kewenangannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90
	Jumlah	**4.813.515.450.269,00**	**4.847.083.601.192,00**	**100,70**

Dari penjelasan tabel diatas Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.813.515.450.269,00 dan direalisasikan senilai Rp4.847.083.601.192 atau 100,70%.

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.053.383.565.000,00	2.846.123.582.480,00	1.207.259.982.520,00	42,42
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00	23.217.598.807,00	4,10
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00	27.601.339.892,00	52,31
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	124.344.153.018,00	114.439.412.759,00	9.904.740.259,00	8,66
	Jumlah	**4.847.083.601.192,00**	**3.579.099.939.714,00**	**1.267.983.661.478,00**	**35,43**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah merealisasikan Pendapatan Transfer senilai Rp4.847.083.601.192,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.579.099.939.714,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.267.983.661.478,00 atau 35,43%.

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil

	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Bagi Hasil	4.053.383.565.000,00	2.846.123.582.480,00

Anggaran Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.005.399285.269,00 dengan Realisasi senilai Rp4.053.383.565.000,00 atau 101,20 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil

Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	67.961.204.000,00	45.872.254.465,00	67,50
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	24.421.164.600,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	41.325.425.000,00	8.763.872.200,00	21,21
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	21.000,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	39.717.237.135,00	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	56.441.928.000,00	46.954.028.600,00	83,19
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.778.507.537.269,00	3.844.519.642.750,00	101,75
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	17.846.819.000,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	17.846.819.000,00	2.520.152.250,00	14,12
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.617.478.000,00	4.617.478.000,00	100,00
12	DBH Sawit	38.698.894.000,00	18.150.895.000,00	46,90
	Jumlah	**4.005.399.285.269,00**	**4.053.383.565.000,00**	**101,20**

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.053.383.565.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.207.259.982.520,00 atau 42,42% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.846.123.582.480,00 dengan rincian perbandingan realisasi pada tabel berikut :

Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.872.254.465,00	66.987.244.000,00	(21.114.989.535,00)	(31,52)
2	DBH PPh Pasal 21	24.421.164.600,00	31.071.039.000,00	(6.649.874.400,00)	(21,40)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.763.872.200,00	1.039.363.000,00	7.724.509.200,00	743,20
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	39.717.237.135,00	25.425.748.000,00	14.291.489.135,00	56,21
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	46.954.028.600,00	43.358.806.000,00	3.595.222.600,00	8,29
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	4.962.407.000,00	(4.962.407.000,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.844.519.642.750,00	2.619.649.042.480,00	1.224.870.600.270,00	46,76
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.846.819.000,00	48.423.834.000,00	(30.577.015.000,00)	(63,14)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	2.520.152.250,00	0,00	2.520.152.250,00	0,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.617.478.000,00	5.206.099.000,00	(588.621.000,00)	(11,31)
12	DBH Sawit	18.150.895.000,00	0,00	18.150.895.000,00	0,00
	Jumlah	**4.053.383.565.000,00**	**2.846.123.582.480,00**	**1.207.259.982.520,00**	**42,42**

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil di jelaskan sebagai berikut :

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp45.872.254.465 atau 67,50% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp67.961.204.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp21.114.989.535,00 atau 31,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp66.987.244.000,00. Terjadi **penurunan** realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2024 disebabkan realisasi transfer pusat yang masuk ke daerah kurang dari target yang sudah di tetapkan.

b. DBH PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp24.421.164.600,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp6.649.874.400,00 atau 21,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp31.071.039.000,00. Penurunan dikarenakan Pengurangan nilai transfer.

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp8.763.872.200,00 atau 21,21% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp41.325.425.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.724.509.200,00 atau 743,20%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.039.363.000,00.

d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp21.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00, mengalami kenaikan 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00.

e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp39.717.237.135,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp14.291.489.135,00 atau 56,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp25.425.748.000,00. Terjadi kenaikan dikarenakan transfer pusat ke daerah melebihi target pagu Anggaran Tahun 2024.

f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp46.954.028.600,00 atau 83,19% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp56.441.928.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.595.222.600,00 atau 8,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp43.358.806.000,00. Terjadi kenaikan dikarenakan transfer pusat ke daerah melebihi target realisasi Anggaran Tahun 2023.

g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent* Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 atau 0,00%. Mengalami **penurunan** senilai Rp4.962.407.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.962.407.000,00. Terjadi penurunan dikarenakan target pagu Anggaran Tahun 2024 tidak dianggarkan.

h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty* Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp3.844.519.642.750,00 atau 101,75% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp3.778.507.537.269,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.224.870.600.270,00 atau 46,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.619.649.042.480,00. Terjadi kenaikan realisasi dikarenakan transfer pusat melebihi target pagu anggaran yang telah ditetapkan dan transfer dana TDF.

i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp17.846.819.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00, mengalami penurunan senilai Rp30.577.015.000,00 atau 63,14%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp48.423.834.000,00. Terjadi penurunan dikarenakan kurangnya transfer Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

j. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.520.152.250,00 atau 14,12% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp17.846.819.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp2.520.152.250,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.

k. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.617.478.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp4.617.478.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp588.621.000,00 atau 11,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.206.099.000,00. Terjadi **penurunan** realiasasi Tahun 2024 dikarenakan realisasi tranfser dan target anggaran kurang dari yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan perpres.

l. DBH Sawit Bagi Rata Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp38.698.894.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.150.895.000,00 atau 46,90% dan mengalami **kenaikan** senilai Rp18.150.895.000 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum	Tahun 2024	Tahun 2023
	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp588.991.002.328,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp589.047.874.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp565.773.403.521,00. Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum mengalami **kenaikan** senilai Rp23.217.598.807,00 atau 4,10%.

5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2024	Tahun 2023
	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2024 senilai Rp82.281.122.000,00 dengan realisasi senilai Rp80.364.880.846,00 atau 97,67%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%.
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Fisik				
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	268.623.000,00	268.401.000,00	99,92
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.647.193.000,00	1.645.194.000,00	99,88
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.298.296.000,00	5.191.408.680,00	97,98
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.295.851.000,00	4.184.437.540,00	97,41
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	101.409.000,00	101.409.000,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.750.950.000,00	4.695.319.180,00	98,83

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%.
		Anggaran	Realisasi	
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.261.712.000,00	1.958.974.649,00	86,61
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	14.826.110.000,00	14.433.828.072,00	97,35
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	40.696.337.000,00	39.919.421.425,00	98,09
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.973.833.000,00	6.854.311.300,00	98,29
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.160.808.000,00	1.112.176.000,00	95,81
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**82.281.122.000,00**	**80.364.880.846,00**	**97,67**

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2024 senilai Rp80.364.880.846,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp27.601.339.892,00 atau 52,31% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.763.540.954,00. Rincian realisasi DAK Fisik Tahun Anggran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%.
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Fisik					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	268.401.000,00	495.548.000,00	(227.147.000,00)	(45,84)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.645.194.000,00	1.554.779.000,00	90.415.000,00	5,82
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.191.408.680,00	3.921.024.800,00	1.270.383.880,00	32,40
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	701.575.520,00	(701.575.520,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.184.437.540,00	303.793.650,00	3.880.643.890,00	1.277,39
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	101.409.000,00	0,00	101.409.000,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	490.615.000,00	(490.615.000,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.695.319.180,00	0,00	4.695.319.180,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.958.974.649,00	0,00	1.958.974.649,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	14.433.828.072,00	1.001.360.000,00	13.432.468.072,00	1.341,42
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	40.464.710.201,00	(40.464.710.201,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%.
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	39.919.421.425,00	0,00	39.919.421.425,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.854.311.300,00	0,00	6.854.311.300,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.112.176.000,00	1.901.600.000,00	(789.424.000,00)	(41,51)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	1.928.534.783,00	(1.928.534.783,00)	(100,00)
Jumlah		**80.364.880.846,00**	**52.763.540.954,00**	**27.601.339.892,00**	**52,31**

5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	124.344.153.018,00	114.439.412.759,00

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2024 senilai Rp136.787.169.000,00 dengan realisasi senilai Rp124.344.153.018,00 atau 90,90%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.809.860.000,00	48.017.939.126,00	98,38
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.232.500.000,00	1.232.500.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.593.842.000,00	45.623.286.000,00	91,99
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.878.919.000,00	2.678.071.000,00	93,02
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.054.396.000,00	3.044.013.000,00	99,66
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.130.840.000,00	4.945.740.544,00	96,39
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.921.170.000,00	1.835.467.881,00	95,54
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.336.543.000,00	3.036.206.711,00	56,89
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.500.988.000,00	8.746.069.380,00	76,05
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.120.740.000,00	2.288.873.008,00	73,34
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	324.401.000,00	203.411.880,00	62,70
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.229.887.000,00	179.981.088,00	14,63
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	291.942.000,00	151452400,00	51,88
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141.000,00	2.286.141.000,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**136.787.169.000,00**	**124.344.153.018,00**	**90,90**

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2024 senilai Rp124.344.153.018,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp9.904.740.259,00 atau 8,66% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp114.439.412.759,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.017.939.126,00	44.922.565.040,00	3.095.374.086,00	6,89
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.232.500.000,00	1.465.000.000,00	(232.500.000,00)	(15,87)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.623.286.000,00	43.330.397.855,00	2.292.888.145,00	5,29
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.678.071.000,00	1.693.579.405,00	984.491.595,00	58,13
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.044.013.000,00	1.201.791.195,00	1.842.221.805,00	153,29
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.945.740.544,00	4.904.526.155,00	41.214.389,00	0,84
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.835.467.881,00	1.912.415.400,00	(76.947.519,00)	(4,02)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.036.206.711,00	2.598.346.370,00	437.860.341,00	16,85
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.746.069.380,00	8.337.644.000,00	408.425.380,00	4,90
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.288.873.008,00	0,00	2.288.873.008,00	0,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	203.411.880,00	0,00	203.411.880,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	179.981.088,00	686.055.864,00	(506.074.776,00)	(73,77)
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	151452400,00	0,00	151.452.400,00	0,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	2.633.217.275,00	(2.633.217.275,00)	(100,00)
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	512.471.600,00	(512.471.600,00)	(100,00)
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141.000,00	241.402.600,00	2.044.738.400,00	847,02
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**124.344.153.018,00**	**114.439.412.759,00**	**9.904.740.259,00**	**8,66**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
Pemerintah Pusat Lainnya	112.337.773.000,00	93.677.389.000,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp109.441.195.000,00 dengan realisasi senilai Rp112.337.773.000,00 atau 102,65%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Desa	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	100,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Fiskal	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	120,73
	Total	**109.441.195.000,00**	**112.337.773.000,00**	**102,65**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp112.337.773.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp18.660.384.000,00 atau 19,92% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Desa	95.468.642.000,00	93.677.389.000,00	1.791.253.000,00	1,91
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Fiskal	16.869.131.000,00	0,00	16.869.131.000,00	0,00
	Total	**112.337.773.000,00**	**93.677.389.000,00**	**18.660.384.000,00**	**19,92**

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp95.468.642.000,00 dengan realisasi senilai Rp95.468.642.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Desa	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	100,00
	Total	**95.468.642.000,00**	**95.468.642.000,00**	**100,00**

*)Rincian anggaran pendapatan Dana Desa pada **Lampiran 1**

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp95.468.642.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.791.253.000,00 atau 1,91% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.677.389.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26 Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Desa	95.468.642.000,00	93.677.389.000,00	1.791.253.000,00	1,91
	Total	**95.468.642.000,00**	**93.677.389.000,00**	**1.791.253.000,00**	**1,91**

*)Rincian realisasi pendapatan Dana Desa pada ***Lampiran 1***

5.1.1.2.2.2 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Kabupaten Berau tidak ada target maupun realisasi di Tahun 2024.

5.1.1.2.2.3 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan Kabupaten Berau tidak ada target maupun realisasi di Tahun 2024.

5.1.1.2.2.4 Insentif Fiskal

Anggaran Insetif Fiskal Tahun 2024 senilai Rp13.792.553.000,00 dengan realisasi senilai Rp16.869.131.000,00 atau 120,73%.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Antar Daerah	815.085.396.308,00	733.634.381.955,00

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp851.456.638.000,00 dengan realisasi senilai Rp815.085.396.308,00 atau 95,73%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66
2	Bantuan keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00
	Jumlah	**851.456.638.000,00**	**815.085.396.308,00**	**95,73**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp815.085.396.308,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp131.447.500.000,00 atau 11,10% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp733.634.381.955,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.28 Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00	(49.996.485.647,00)	(9,82)
2	Bantuan keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah	**815.085.396.308,00**	**733.634.381.955,00**	**81.451.014.353,00**	**11,10**

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00

Anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 senilai Rp495.496.638.000,00 dengan realiasi senilai Rp459.125.396.308,00 atau 92,66%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.471.648.000,00	28.590.282.000,00	80,60
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.815.490.000,00	38.281.610.000,00	93,79
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	400.890.649.000,00	375.153.405.000,00	93,58
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.165.306.000,00	759.297.000,00	65,16
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.153.545.000,00	16.340.802.308,00	95,26
	Jumlah	**495.496.638.000,00**	**459.125.396.308,00**	**92,66**

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 senilai Rp459.125.396.308,00 mengalami **penurunan** senilai Rp49.996.485.647,00 atau 9,82% dari Tahun Anggaran 2023 Rp509.121.881.955,00. Kenaikan realisasi terjadi karena bertambahnya pendapatan pajak bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor sesuai SK Gubernur dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.590.282.000,00	26.178.027.000,00	2.412.255.000,00	9,21
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.281.610.000,00	32.040.996.000,00	6.240.614.000,00	19,48
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	375.153.405.000,00	434.555.578.155,00	(59.402.173.155,00)	(13,67)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	759.297.000,00	635.502.000,00	123.795.000,00	19,48
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.340.802.308,00	15.711.778.800,00	629.023.508,00	4,00
	Jumlah	**459.125.396.308,00**	**509.121.881.955,00**	**(49.996.485.647,00)**	**(9,82)**

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Tahun 2024	Tahun 2023
	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00

Anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp355.960.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp355.960.000,00 atau 100,00%. Anggaran Bantuan Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00
	Jumlah	**355.960.000.000,00**	**355.960.000.000,00**	**100,00**

Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp355.960.000.000 mengalami **kenaikan** Rp131.447.500.000,00 atau 58,55% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp224.512.500.000,00. **Kenaikan** realisasi Tahun Anggaran 2024 terjadi karena sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan SK Gubernur Kalimantan Timur. Realisasi Bantuan Keuangan

untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah	**355.960.000.000,00**	**224.512.500.000,00**	**131.447.500.000,00**	**58,55**

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.039.376.420,69	7.822.834.044,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29.705.148.536,00 dengan realisasi senilai Rp76.039.376.420,69 atau 255,98% yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98
	Jumlah	**29.705.148.536,00**	**76.039.376.420,69**	**255,98**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29.705.148.536,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp68.216.542.376,69 atau 872,02% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.822.834.044,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	76.039.376.420,69	7.822.834.044,00	68.216.542.376,69	872,02
	Jumlah	**76.039.376.420,69**	**7.822.834.044,00**	**68.216.542.376,69**	**872,02**

5.1.2 BELANJA DAERAH

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Daerah	**6.411.776.301.938,05**	**4.608.120.868.464,26**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp6.999.194.000.000,00 dengan realisasi Rp6.411.776.301.938,05 atau 91,61%. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	2.408.731.729.824,81	2.111.530.856.755,59	87,74
2	Belanja Modal	4.101.893.300.300,19	3.828.768.208.935,46	93,34
3	Belanja Tak Terduga	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
4	Belanja Transfer	465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95
	Jumlah	**6.999.194.000.000,00**	**6.411.776.301.938,05**	**91,61**



Gambar 5.7 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.411.776.301.938,05 mengalami **kenaikan** Rp1.803.655.433.473,79 atau 39,14% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.608.120.868.464,26. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut :

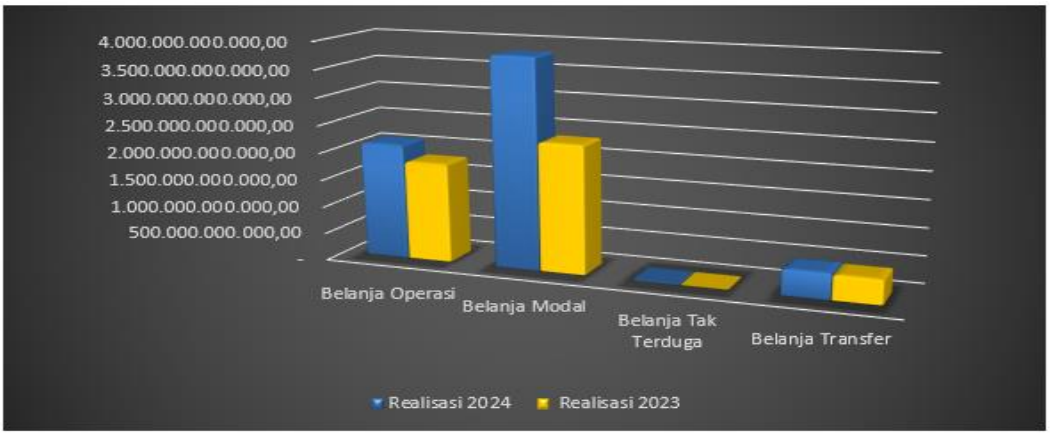
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Operasi	2.111.530.856.755,59	1.818.795.262.619,26	292.735.594.136,33	16,10
2	Belanja Modal	3.828.768.208.935,46	2.345.617.541.442,00	1.483.150.667.493,46	63,23

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
3	Belanja Tak Terduga	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
4	Belanja Transfer	465.702.436.664,00	441.881.227.088,00	23.821.209.576,00	5,39
	Jumlah	**6.411.806.512.153,84**	**4.608.120.868.464,26**	**1.803.685.643.689,58**	**39,14**



Gambar 5.8 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kenaikan terbesar terjadi pada Realisasi Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.111.530.856.755,59 mengalami **kenaikan** senilai Rp292.735.594.136,33 atau 16,10% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.818.795.262.619,26. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.828.768.208.935,46 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.150.667.493,46 atau 63,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.345.617.541.442,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.774.799.583,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.947.962.268,00 atau 216,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.826.837.315,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 senilai Rp465.702.436.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp23.821.209.576,00 atau 5,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp441.881.227.088,00. Rincian Belanja Daerah disajikan sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Operasi	2.111.530.856.755,59	1.818.795.262.619,26

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.408.731.729.824,81 dengan realisasi senilai Rp2.111.530.856.755,59 atau 87,66%. Rincian Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07
2	Belanja Barang dan Jasa	1.031.969.667.362,21	868.596.837.598,25	84,17
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	208.839.505.389,00	189.599.952.449,00	90,79
6	Belanja Bantuan Sosial	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47
	Jumlah	**2.408.731.729.824,81**	**2.111.530.856.755,59**	**87,66**



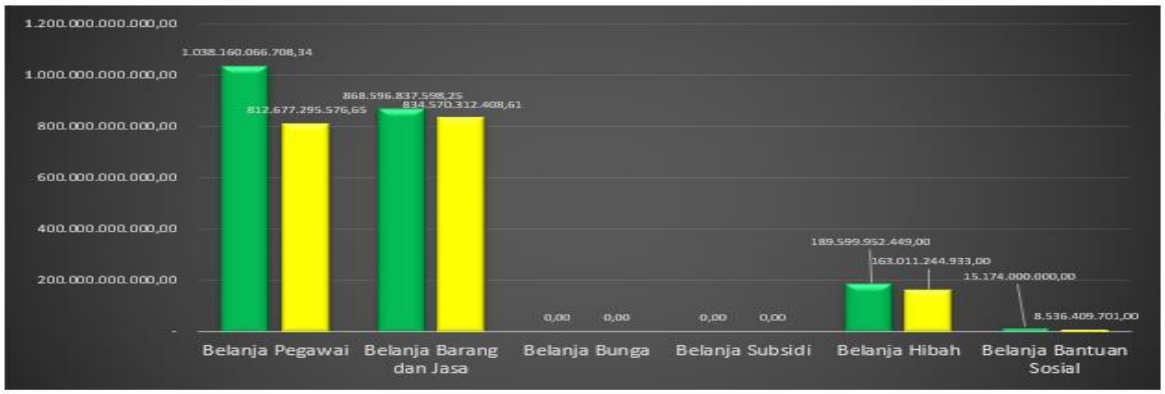
Gambar 5.9 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.111.530.856.755,59 mengalami **kenaikan** senilai Rp292.735.594.136,33 atau 16,10% dari Tahun Anggran 2023 senilai Rp1.818.795.262.619,26. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.38 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	1.038.160.066.708,34	812.677.295.576,65	225.482.771.131,69	27,75
2	Belanja Barang dan Jasa	868.596.837.598,25	834.570.312.408,61	34.026.525.189,64	4,08
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	189.599.952.449,00	163.011.244.933,00	26.588.707.516,00	16,31
6	Belanja Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76
	Jumlah	**2.111.530.856.755,59**	**1.818.795.262.619,26**	**292.735.594.136,33**	**16,10**



Gambar 5.10 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi yaitu sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
	1.038.160.066.708,34	812.677.295.576,65

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/PPPK Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Peneriman Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur. Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.152.667.557.073,00 dengan realisasi senilai Rp1.038.160.066.708,34 atau 90,07% yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	468.853.998.048,60	432.431.609.487,00	92,23
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	445.672.096.844,50	423.491.512.345,00	95,02
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.094.776.354,50	118.309.086.797,05	71,23
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.823.115.288,00	19.235.787.269,00	97,04
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.190.616.280,00	448.013.086,00	37,63
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	964.560.000,00	860.400.000,00	89,20
7	Belanja Pegawai BLUD	50.068.394.258,00	43.383.657.724,29	86,65
	Jumlah	**1.152.667.557.073,60**	**1.038.160.066.708,34**	**90,07**



Gambar 5.11 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34mengalami **kenaikan** Rp225.482.771.131,69 atau 27,75% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	432.431.609.487,00	355.920.527.971,00	76.511.081.516,00	21,50
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	423.491.512.345,00	281.100.224.750,00	142.391.287.595,00	50,65
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.309.086.797,05	108.899.525.171,87	9.409.561.625,18	8,64
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.235.787.269,00	19.830.034.174,00	(594.246.905,00)	(3,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	448.013.086,00	470.730.000,00	(22.716.914,00)	(4,83)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	860.400.000,00	912.480.000,00	(52.080.000,00)	(5,71)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
7	Belanja Pegawai BLUD	43.383.657.724,29	45.543.773.509,78	(2.160.115.785,49)	(4,74)
	Jumlah	**1.038.160.066.708,34**	**812.677.295.576,65**	**225.482.771.131,69**	**27,75**



Gambar 5.12 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.152.667.557.073,60 dengan realisasi senilai Rp1.038.160.066.708,34 atau 90,07%. Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD Tahun Angggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	439.907.996.382, 60	387.444.304.646,00	88,07
2	Dinas Kesehatan	155.966.369.401,00	147.746.894.356,05	94,73
3	RSUD Abd Rivai	141.174.952.610,00	125.803.221.377,29	89,11
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	33.034.192.023,00	29.821.959.090,00	90,28
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	9.678.849.608,00	7.177.868.546,00	74,16
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	8.838.340.876,00	8.010.056.461,00	90,63
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.222.592.176,00	7.025.016.841,00	76,17
8	Dinas Sosial	6.521.087.555,00	6.157.899.083,00	94,43
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	6.661.043.551,00	6.180.676.613,00	92,79
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	8.466.517.813,00	7.656.039.463,00	90,43
11	Dinas Pangan	7.678.780.393,00	6.698.129.682,00	87,23
12	Dinas Pertanahan	4.701.143.206,00	4.248.316.328,00	90,37
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	13.105.568.301,00	12.331.234.256,00	94,09
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	7.046.401.897,00	6.540.874.787,00	92,83
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	6.844.433.096,00	6.510.999.944,00	95,13

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
16	Dinas Perhubungan	15.544.005.301,00	14.568.557.230,00	93,72
17	Dinas Komunikasi & Informatika	7.819.835.101,00	7.338.942.030,00	93,85
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	14.736.435.538,00	10.333.235.825,00	70,12
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.662.409.606,00	5.991.096.799,00	89,92
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	7.957.480.039,00	7.162.278.718,00	90,01
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	8.860.415.081,00	8.060.267.799,00	90,97
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8.859.943.143,00	8.282.924.327,00	93,49
23	Dinas Perikanan	7.891.585.868,00	7.190.222.035,00	91,11
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	21.033.812.778,00	19.071.845.427,00	90,67
25	Dinas Perkebunan	9.955.910.969,00	8.947.868.277,00	89,87
26	Sekretariat Daerah	29.927.532.052,00	27.993.767.323,00	93,54
27	Inspektorat	12.785.751.268,00	12.070.122.367,00	94,40
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	8.892.515.353,00	8.384.571.148,00	94,29
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	12.199.288.219,00	11.560.215.779,00	94,76
30	Badan Pendapatan Daerah	14.212.787.338,00	12.018.698.424,00	84,56
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.982.431.016,00	7.468.462.670,00	93,56
32	Sekretariat DPRD	30.861.167.263,00	28.956.085.279,00	93,83
33	Kec Tg Redeb	11.758.259.262,00	11.392.606.321,00	96,89
34	Kec Gn Tabur	5.850.395.300,00	5.618.505.982,00	96,04
35	Kec Sambaliung	5.714.792.125,00	5.486.126.132,00	96,00
36	Kec Teluk Bayur	7.111.063.450,00	6.581.018.090,00	92,55
37	Kec Segah	3.316.451.150,00	3.128.398.311,00	94,33
38	Kec Kelay	2.857.824.263,00	2.679.614.748,00	93,76
39	Kec Pulau Derawan	3.274.727.025,00	2.983.536.642,00	91,11
40	Kec Talisayan	3.881.479.437,00	3.648.517.900,00	94,00
41	Kec Biduk - Biduk	3.848.324.386,00	3.681.816.461,00	95,67
42	Kec Maratua	3.994.990.863,00	3.640.314.456,00	91,12
43	Kec Tabalar	3.268.017.200,00	3.060.752.770,00	93,66
44	Kec Batu Putih	2.885.707.288,00	2.726.944.964,00	94,50
45	Kec Biatan	2.912.076.008,00	2.580.381.229,00	88,61
46	Badan Kesbang, Politik & Linmas	6.961.874.495,00	6.198.879.772,00	89,04
47	Sekretariat Korpri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.152.667.557.073,60**	**1.038.160.066.708,34**	**90,07**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34 mengalami **kenaikan** senilai Rp225.482.771.131,69 atau 27,75% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pegawai Per OPD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	387.444.304.646,00	292.322.300.309,00	95.122.004.337,00	32,54
2	Dinas Kesehatan	147.746.894.356,05	104.674.761.522,87	43.072.132.833,18	41,15
3	RSUD Abd Rivai	125.803.221.377,29	107.700.375.196,78	18.102.846.180,51	16,81
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	29.821.959.090,00	24.809.142.227,00	5.012.816.863,00	20,21
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	7.177.868.546,00	5.590.292.225,00	1.587.576.321,00	28,40
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	8.010.056.461,00	6.542.739.248,00	1.467.317.213,00	22,43
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.025.016.841,00	5.605.337.281,00	1.419.679.560,00	25,33
8	Dinas Sosial	6.157.899.083,00	5.157.325.763,00	1.000.573.320,00	19,40
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	6.180.676.613,00	5.030.663.078,00	1.150.013.535,00	22,86
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	7.656.039.463,00	6.421.702.859,00	1.234.336.604,00	19,22
11	Dinas Pangan	6.698.129.682,00	5.368.660.662,00	1.329.469.020,00	24,76
12	Dinas Pertanahan	4.248.316.328,00	3.418.662.786,00	829.653.542,00	24,27
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	12.331.234.256,00	10.139.700.260,00	2.191.533.996,00	21,61
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	6.540.874.787,00	5.075.021.894,00	1.465.852.893,00	28,88
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	6.510.999.944,00	5.168.614.512,00	1.342.385.432,00	25,97
16	Dinas Perhubungan	14.568.557.230,00	11.946.789.464,00	2.621.767.766,00	21,95
17	Dinas Komunikasi & Informatika	7.338.942.030,00	5.837.301.330,00	1.501.640.700,00	25,72
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	10.333.235.825,00	8.607.820.635,00	1.725.415.190,00	20,04
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.991.096.799,00	4.943.643.832,00	1.047.452.967,00	21,19
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	7.162.278.718,00	5.478.479.491,00	1.683.799.227,00	30,73
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	8.060.267.799,00	6.556.666.081,00	1.503.601.718,00	22,93
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8.282.924.327,00	6.840.863.676,00	1.442.060.651,00	21,08
23	Dinas Perikanan	7.190.222.035,00	6.166.878.436,00	1.023.343.599,00	16,59
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	19.071.845.427,00	14.835.404.994,00	4.236.440.433,00	28,56
25	Dinas Perkebunan	8.947.868.277,00	7.467.437.098,00	1.480.431.179,00	19,83
26	Sekretariat Daerah	27.993.767.323,00	22.444.986.524,00	5.548.780.799,00	24,72
27	Inspektorat	12.070.122.367,00	8.616.124.588,00	3.453.997.779,00	40,09
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	8.384.571.148,00	6.293.262.014,00	2.091.309.134,00	33,23
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	11.560.215.779,00	9.101.848.038,00	2.458.367.741,00	27,01
30	Badan Pendapatan Daerah	12.018.698.424,00	10.694.248.622,00	1.324.449.802,00	12,38
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.468.462.670,00	5.271.632.982,00	2.196.829.688,00	41,67

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
32	Sekretariat DPRD	28.956.085.279,00	27.958.663.873,00	997.421.406,00	3,57
33	Kec Tg Redeb	11.392.606.321,00	8.864.765.166,00	2.527.841.155,00	28,52
34	Kec Gn Tabur	5.618.505.982,00	4.505.690.207,00	1.112.815.775,00	24,70
35	Kec Sambaliung	5.486.126.132,00	4.160.724.305,00	1.325.401.827,00	31,86
36	Kec Teluk Bayur	6.581.018.090,00	5.385.343.464,00	1.195.674.626,00	22,20
37	Kec Segah	3.128.398.311,00	2.505.336.217,00	623.062.094,00	24,87
38	Kec Kelay	2.679.614.748,00	2.137.988.248,00	541.626.500,00	25,33
39	Kec Pulau Derawan	2.983.536.642,00	2.107.938.696,00	875.597.946,00	41,54
40	Kec Talisayan	3.648.517.900,00	3.118.166.055,00	530.351.845,00	17,01
41	Kec Biduk - Biduk	3.681.816.461,00	2.880.746.170,00	801.070.291,00	27,81
42	Kec Maratua	3.640.314.456,00	2.944.467.092,00	695.847.364,00	23,63
43	Kec Tabalar	3.060.752.770,00	2.454.735.887,00	606.016.883,00	24,69
44	Kec Batu Putih	2.726.944.964,00	1.949.427.374,00	777.517.590,00	39,88
45	Kec Biatan	2.580.381.229,00	2.128.500.010,00	451.881.219,00	21,23
46	Badan Kesbang, Politik & Linmas	6.198.879.772,00	5.015.336.006,00	1.183.543.766,00	23,60
47	Sekretariat Korpri	0,00	430.779.178,00	(430.779.178,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.038.160.066.708,34**	**812.677.295.576,65**	**225.482.771.131,69**	**27,75**

Data tabel diatas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.152.667.557.073,00 dan terealisasi senilai Rp1.038.160.066.708,34 atau 90,07% mengalami **kenaikan** senilai Rp225.48.771.131,69 atau 27,75% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65. Tidak tercapainya realisasi anggaran karena jumlah pengurangan dan penambahan pegawai tidak bisa diprediksi karena ada beberapa kriteria seperti teknis dan non teknis antara lain mutasi pegawai, pensiunan, meninggal dunia, dan perubahan gaji pokok.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	868.596.837.598,25	834.570.312.408,61

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari bahan habis pakai, belanja bahan/ material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, honorarium, uang yang diberikan kepada pihak ketiga, belanja barang BOS, BOSNAS, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, barang di bawah nilai kapitalisasi, Beasiswa, Tunjangan Non Pegawai.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.031.969.667.362,21 dengan realisasi senilai Rp868.596.837.598,25 atau 84,17%, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.43 Anggaran dan Realsasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
1	**(A+B+C)**	**Belanja Barang**		**179.348.465.221,42**	**147.945.200.469,75**	**82,49**
A	**Jumlah A (1 s/d 52)**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**178.036.248.626,42**	**146.788.793.219,75**	**82,45**
		1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.908.058.850,00	12.232.705.358,00	94,77
		2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.617.019.020,00	4.229.888.671,00	91,62
		3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.236.714.950,00	20.309.751.940,00	74,57
		4	Belanja Bahan-Bahan Baku	201.500.000,00	174.511.135,00	86,61
		5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	473.825.800,00	369.243.343,00	77,93
		6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.006.000,00	20.588.000,00	73,51
		7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	876.185.400,00	590.593.300,00	67,41
		8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	196.570.000,00	194.380.000,00	98,89
		9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.962.220.550,00	7.580.864.735,00	95,21
		10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	93.446.700,00	71.167.000,00	76,16
		11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	124.084.100,00	109.755.142,00	88,45
		12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	46.075.250,00	39.188.835,00	85,05
		13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.643.300,00	244.000,00	6,70
		14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.067.900,00	5.448.000,00	89,78
		15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.844.800,00	2.520.000,00	88,58
		16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.017.900,00	23.598.800,00	98,26
		17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.113.159.609,00	5.394.696.819,00	88,25
		18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.939.243.340,00	5.324.931.950,00	89,66
		19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.168.160.262,42	10.575.604.645,00	74,64
		20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	757.374.000,00	640.722.000,00	84,60
		21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.234.381.570,00	3.787.170.952,00	89,44
		22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.024.831.548,00	3.503.784.405,00	87,05

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.465.105.750,00	1.314.972.050,00	89,75
		24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.624.381.098,00	1.403.424.962,00	86,40
		25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.247.765.750,00	2.141.599.079,00	95,28
		26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.880.363.900,00	2.706.868.782,00	93,98
		27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.664.881.900,00	3.382.192.928,00	92,29
		28	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.642.695.850,00	4.321.252.669,75	93,08
		29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	763.101.600,00	237.291.114,00	31,10
		30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.918.725.379,00	5.189.101.960,00	87,67
		31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	913.641.300,00	904.523.500,00	99,00
		32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00
		33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.690.041.200,00	3.347.839.372,00	90,73
		34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	139.660.000,00	111.625.000,00	79,93
		35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.119.679.600,00	1.652.978.210,00	77,98
		36	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	23.281.000,00	17.389.250,00	74,69
		37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.067.582.250,00	17.433.733.699,00	75,58
		38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.909.385.000,00	2.877.127.762,00	73,60
		39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	601.262.500,00	147.024.420,00	24,45
		40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.220.949.500,00	3.208.656.756,00	76,02
		41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.354.555.900,00	14.214.240.400,00	77,44
		42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	179.650.000,00	114.330.000,00	63,64
		43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	267.000.000,00	183.900.000,00	68,88

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.586.000.000,00	1.487.418.210,00	93,78
		45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	881.111.000,00	851.594.666,00	96,65
		46	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	493.000.000,00	481.370.000,00	97,64
		47	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	316.358.800,00	293.572.000,00	92,80
		48	Belanja Pakaian Kerja KORPRI	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00
		49	Belanja Pakaian Adat Daerah	487.966.000,00	446.162.000,00	91,43
		50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.695.215.000,00	1.494.466.900,00	88,16
		51	Belanja Pakaian Olahraga	1.714.627.500,00	1.512.448.500,00	88,21
		52	Belanja Pakaian Paskibraka	81.030.000,00	80.530.000,00	99,38
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**		**625.471.100,00**	**618.717.550,00**	**98,92**
		1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	18.303.900,00	18.242.250,00	99,66
		2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	597.463.200,00	595.359.300,00	99,65
		3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.704.000,00	5.116.000,00	52,72
C	**Jumlah C (1 s/d 11)**	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**		**686.745.495,00**	**537.689.700,00**	**78,30**
		1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	90.733.000,00	0,00	0,00
		2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	18.768.000,00	14.900.000,00	79,39
		3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.377.200,00	0,00	0,00
		4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	85.333.495,00	83.860.000,00	98,27
		5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	0,00	0,00
		6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	47.500.000,00	46.953.000,00	98,85
		7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	11.111.940,00	10.925.000,00	98,32
		8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-	20.185.160,00	15.440.000,00	76,49

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya			
		9	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	134.050.000,00	130.720.000,00	97,52
		10	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	40.698.000,00	0,00	0,00
		11	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	234.988.700,00	234.891.700,00	99,96
2	**(A+B+C+D+E+F+G+H+I)**	**Belanja Jasa**		**451.702.337.721,00**	**394.952.774.306,00**	**87,45**
A	**Jumlah A (1 s/d 54)**	**Belanja Jasa Kantor**		**370.383.932.962,00**	**327.189.696.735,00**	**88,34**
		1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.300.298.000,00	7.425.646.337,00	65,71
		2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.934.280.000,00	16.067.509.500,00	73,25
		3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	316.200.000,00	294.600.000,00	93,17
		4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.458.300.000,00	1.322.600.000,00	90,69
		5	Honorarium Rohaniwan	13.994.344.000,00	13.885.850.000,00	99,22
		6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	149.600.000,00	92.700.000,00	61,97
		7	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00
		8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.122.400.000,00	831.040.000,00	74,04
		9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	808.800.000,00	705.900.000,00	87,28
		10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	61.377.850.000,00	52.089.516.823,00	84,87
		11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.275.269.000,00	21.529.748.341,00	81,94
		12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	603.788.500,00	307.380.200,00	50,91
		13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.080.210.000,00	6.756.906.900,00	95,43
		14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.266.700.000,00	6.244.700.000,00	99,65
		15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.649.000.000,00	2.150.100.000,00	81,17
		16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	136.600.000,00	136.600.000,00	100,00
		17	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	535.850.000,00	404.250.000,00	75,44

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.848.346.400,00	56.066.541.450,00	93,68
		19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.322.735.000,00	2.043.545.000,00	87,98
		20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	96.000.000,00	82.726.000,00	86,17
		21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.269.529.600,00	2.951.058.135,00	90,26
		22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.802.350.000,00	38.322.904.623,00	96,28
		23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.030.000.000,00	16.067.310.000,00	94,35
		24	Belanja Jasa Tenaga Caraka	119.925.000,00	100.575.000,00	83,86
		25	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.705.050.000,00	4.432.697.500,00	94,21
		26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.048.000,00	0,00	0,00
		27	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	100.000.000,00	99.250.000,00	0,00
		28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.277.731.000,00	668.500.000,00	52,32
		29	Belanja Jasa Tata Rias	222.250.000,00	164.150.000,00	73,86
		30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67
		31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	983.472.000,00	809.384.120,00	82,30
		32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	40.500.000,00	39.500.000,00	97,53
		33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	253.450.000,00	210.323.628,00	82,98
		34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	164.000.000,00	149.930.000,00	91,42
		35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.519.957.000,00	6.291.815.700,00	96,50
		36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.869.301.200,00	3.254.205.000,00	66,83
		37	Belanja Jasa Kalibrasi	563.554.400,00	459.885.089,00	81,60
		38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	737.400.000,00	439.450.000,00	59,59
		39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.461.147.508,00	1.380.773.100,00	94,50
		40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	220.340.000,00	100.200.000,00	0,00
		41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.553.195.000,00	22.151.481.921,00	98,22
		42	Belanja Tagihan Telepon	109.223.000,00	87.656.748,00	80,25
		43	Belanja Tagihan Air	2.360.894.250,00	1.783.612.321,00	75,55
		44	Belanja Tagihan Listrik	15.974.243.600,00	13.151.917.352,00	82,33
		45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.908.058.000,00	1.677.464.000,00	87,91
		46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.787.621.804,00	12.859.788.698,00	93,27
		47	Belanja Paket/Pengiriman	440.016.000,00	342.078.316,00	77,74

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		48	Belanja Penambahan Daya	90.588.700,00	53.199.490,00	58,73
		49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00
		50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.511.704.000,00	476.575.536,00	31,53
		51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.200.000.000,00	5.159.267.720,00	99,22
		52	Belanja Lembur	5.525.763.000,00	4.920.759.672,00	89,05
		53	Belanja Medical Check Up	279.049.000,00	129.622.515,00	46,45
		54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 9)**	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**		**45.813.270.735,00**	**41.446.760.681,00**	**90,47**
		1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.065.600.000,00	1.063.846.480,00	99,84
		2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	420.000.000,00	264.902.400,00	63,07
		3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.785.832.000,00	29.782.795.500,00	96,74
		4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.334.371.636,00	7.748.240.548,00	83,01
		5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.049.883.400,00	732.082.222,36	69,73
		6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.063.462.499,00	503.406.552,64	47,34
		7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	251.850.000,00	182.862.178,00	72,61
		8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.096.590.000,00	695.610.000,00	63,43
		9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	745.681.200,00	473.014.800,00	63,43
		Belanja Sewa Tanah		**124.300.000,00**	**66.800.000,00**	**53,74**
		1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	24.300.000,00	16.800.000,00	69,14
C	**Jumlah C (1 s/d 16)**	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**		**12.558.728.300,00**	**8.646.430.750,00**	**68,85**
		1	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	33.591.300,00	15.190.000,00	0,00
		3	Belanja Sewa Electric Generating Set	105.000.000,00	81.000.000,00	77,14
		4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	250.000.000,00	126.300.000,00	50,52
		5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	280.000.000,00	234.100.000,00	83,61

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		6	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	429.500.000,00	272.900.000,00	0,00
		7	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	105.000.000,00	89.500.000,00	85,24
		8	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.351.100.000,00	4.602.930.000,00	62,62
		9	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	200.750.000,00	155.847.500,00	77,63
		11	Belanja Sewa Mebel	172.000.000,00	123.656.000,00	71,89
		12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.857.592.000,00	2.319.562.250,00	81,17
		13	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	636.000.000,00	487.250.000,00	76,61
		14	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	31.635.000,00	31.635.000,00	100,00
		15	Belanja Sewa Komputer Jaringan	106.560.000,00	106.560.000,00	100,00
		16	Belanja Sewa Elektrik	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**		**4.837.770.000,00**	**4.100.682.333,00**	**84,76**
		1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	565.000.000,00	537.083.333,00	95,06
		2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	74.820.000,00	52.404.000,00	70,04
		3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.776.550.000,00	1.387.605.000,00	78,11
		4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	25.400.000,00	22.600.000,00	88,98
		5	Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		6	Belanja Sewa Asrama	398.000.000,00	261.200.000,00	65,63
		7	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	1.827.000.000,00	1.712.904.000,00	93,76
		8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	168.000.000,00	123.886.000,00	73,74
E	**Jumlah E (1 s/d 4)**	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**		**373.950.000,00**	**236.580.000,00**	**63,27**
		1	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Sewa Tanaman	373.950.000,00	236.580.000,00	63,27
F	**Jumlah F (1 s/d 11)**	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**		**3.337.174.500,00**	**2.791.506.921,00**	**83,65**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	97.569.000,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung			
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.692.500,00	28.677.000,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	65.000.000,00	63.981.000,00	98,43
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	636.820.000,00	611.106.400,00	95,96
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	700.000.000,00	676.535.010,00	0,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	452.969.500,00	103.390.800,00	22,83
		10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	1.353.692.500,00	1.210.247.711,00	0,00
		11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	0,00	0,00	0,00
G	**Jumlah G (1 s/d 8)**	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**		**3.975.916.800,00**	**2.955.027.479,00**	**74,32**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.680.000,00	100.014.000,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	848.272.000,00	811.763.200,00	95,70
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	588.052.500,00	559.560.000,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	500.000.000,00	495.772.700,00	99,15
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.880.253.000,00	929.258.279,00	49,42

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		7	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	58.659.300,00	58.659.300,00	100,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00
H	**Jumlah H (1 s/d 2)**	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**		**500.000.000,00**	**450.000.000,00**	**90,00**
		1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
		2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	465.000.000,00	415.000.000,00	89,25
I	**Jumlah I (1 s/d 4)**	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**		**7.779.498.000,00**	**5.345.844.975,00**	**68,72**
		1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.490.850.000,00	1.672.380.573,00	67,14
		2	Belanja Sosialisasi	67.500.000,00	37.995.400,00	56,29
		3	Belanja Bimbingan Teknis	5.206.148.000,00	3.620.469.002,00	69,54
		4	Belanja Diklat Kepemimpinan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
J	**Jumlah J (1 s/d 12)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**		**834.380.032,00**	**641.747.447,00**	**76,91**
		1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	24.750.000,00	22.950.004,00	92,73
		2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	148.500.000,00	61.200.010,00	41,21
		3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.237.500,00	1.147.491,00	92,73
		4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.425.000,00	1.020.004,00	13,74
		5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	111.375.000,00	103.274.995,00	92,73
		6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.650.000,00	1.530.000,00	92,73
		7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemingutan Pajak Air Tanah	3.300.000,00	0,00	0,00
		8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	11.875.000,00	0,00	0,00
		9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.022.516,00	1.034.943,00	20,61
		10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	44.000.000,00	19.800.000,00	45,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	119.625.000,00	119.625.000,00	100,00
		12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	355.620.016,00	310.165.000,00	87,22
K	**Jumlah K (1)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
L	**Jumlah L (1)**	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**		**1.182.416.392,00**	**1.081.696.985,00**	**91,48**
		1	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	10.000.000,00	1.800.000,00	18,00
		2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.172.416.392,00	1.079.896.985,00	92,11
				,		
3	**(A+B+C+D+E+F)**	**Belanja Pemeliharaan**		**52.858.340.067,00**	**48.129.553.534,56**	**91,05**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**	**Belanja Pemeliharaan Tanah**		**1.000.000.000,00**	**997.409.300,00**	**99,74**
		1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	1.000.000.000,00	997.409.300,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 34)**	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**		**16.097.801.500,00**	**13.375.029.392,00**	**83,09**
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	300.000.000,00	299.223.317,00	99,74
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	120.000.000,00	119.992.037,00	99,99
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	485.000.000,00	484.829.280,00	99,96
		4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	57.942.000,00	53.449.830,00	92,25
		6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.600.000,00	29.531.000,00	99,77
		7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.114.578.000,00	5.981.436.650,00	84,07
		8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	1.307.000.000,00	934.097.383,00	71,47

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
		9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.595.000.000,00	1.313.109.810,00	82,33
		10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	11.499.000,00	10.916.850,00	94,94
		11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	101.200.000,00	21.640.000,00	21,38
		12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	6.000.000,00	4.082.000,00	68,03
		14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00
		15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00
		16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	899.001.000,00	614.393.134,00	68,34
		17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	47.500.000,00	19.325.000,00	40,68
		18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00
		19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	602.650.000,00	521.233.551,00	86,49
		20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.055.800.000,00	911.555.950,00	86,34
		21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
		22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	63.172.000,00	56.500.000,00	89,44
		23	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			
		24	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	63.603.000,00	63.356.640,00	99,61
		25	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	671.496.500,00	659.928.690,00	98,28
		26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	80.000.000,00	79.985.340,00	99,98
		27	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	150.000.000,00	142.347.180,00	94,90
		28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	488.370.000,00	368.545.700,00	75,46
		29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	314.640.000,00	187.081.050,00	59,46
		30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	200.000.000,00	179.585.000,00	89,79
		31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.750.000,00	10.460.000,00	44,04
		32	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	310.000.000,00	308.424.000,00	99,49
		33	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00
		34	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 12)**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**11.041.516.868,00**	**10.168.922.512,56**	**92,10**
		1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.439.904.569,00	7.731.672.556,56	91,61
		2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	60.000.000,00	59.982.626,00	99,97
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.755.637.099,00	1.672.667.500,00	95,27
		5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	20.000.000,00	19.995.000,00	99,98
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	58.170.000,00	58.139.580,00	99,95
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	168.235.200,00	112.876.250,00	67,09
		8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	389.570.000,00	386.686.000,00	99,26
		10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
		11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	140.000.000,00	117.870.000,00	84,19
		12	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	10.000.000,00	9.033.000,00	90,33
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**24.039.817.199,00**	**22.967.483.330,00**	**95,54**
		1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.959.821.199,00	5.837.000.000,00	97,94
		2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	362.504.000,00	336.376.000,00	92,79
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	17.057.492.000,00	16.137.948.330,00	94,61
		5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	150.000.000,00	149.334.000,00	99,56
		6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	510.000.000,00	506.825.000,00	99,38

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
E	**Jumlah E (1 s/d 2)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00
F	**Jumlah F (1 s/d 1)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**679.204.500,00**	**620.709.000,00**	0,00
		1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	679.204.500,00	620.709.000,00	0,00
				,		
4	**(A+B)**		**Belana Perjalanan Dinas**	**222.315.010.100,00**	**177.636.934.571,30**	**79,90**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**221.815.010.100,00**	**177.428.297.775,30**	**79,99**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.577.385.100,00	124.122.383.848,30	81,89
		2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.582.390.000,00	47.445.503.927,00	74,62
		3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.833.196.000,00	5.240.565.000,00	89,84
		4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	822.039.000,00	619.845.000,00	75,40
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**500.000.000,00**	**208.636.796,00**	**41,73**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	500.000.000,00	208.636.796,00	41,73
				,		
5	**(A+B)**		**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**17.988.553.000,00**	**14.566.901.400,00**	**80,98**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**17.988.553.000,00**	**14.566.901.400,00**	**80,98**
		1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.388.553.000,00	2.232.151.400,00	65,87
		2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.133.500.000,00	1.517.750.000,00	71,14
		3	Belanja Beasiswa	12.421.500.000,00	10.783.000.000,00	86,81
		4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	34.000.000,00	75,56
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2024		%
				Anggaran	Realisasi	
				,		
6	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**28.161.448.729,79**	**26.890.102.710,00**	**95,49**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**28.161.448.729,79**	**26.890.102.710,00**	**95,49**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.161.448.729,79	26.890.102.710,00	95,49
7	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOSP**	**443.181.613,00**	**406.914.000,00**	**91,82**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	428.181.613,00	391.914.000,00	91,53
		2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
8	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**10.688.363.000,00**	**6.165.347.825,00**	**57,68**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**10.688.363.000,00**	**6.165.347.825,00**	**57,68**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.688.363.000,00	6.165.347.825,00	57,68
				,		
9	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**68.463.967.910,00**	**51.903.108.781,64**	**75,81**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**68.463.967.910,00**	**51.903.108.781,64**	**75,81**
		1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.463.967.910,00	51.903.108.781,64	75,81
JUMLAH				**1.031.969.667.362,21**	**868.596.837.598,25**	**84,17**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp868.596.837.598,25 mengalami **kenaikan** senilai Rp34.026.525.189,64 atau 4,08% dari Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan senilai Rp834.570.312.408,61, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	**(A+B+C)**	**Belanja Barang**		**147.945.200.469,75**	**128.456.366.761,00**	**19.488.833.708,75**	**15,17**
A	**Jumlah A (1 s/d 52)**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**146.788.793.219,75**	**128.110.613.761,00**	**18.678.179.458,75**	**14,58**
		1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.232.705.358,00	11.726.325.863,00	506.379.495,00	4,32
		2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.229.888.671,00	3.103.628.880,00	1.126.259.791,00	36,29
		3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.309.751.940,00	18.370.174.705,00	1.939.577.235,00	10,56
		4	Belanja Bahan-Bahan Baku	174.511.135,00	104.960.000,00	69.551.135,00	66,26

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	369.243.343,00	142.716.200,00	226.527.143,00	158,73
		6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20.588.000,00	0,00	20.588.000,00	0,00
		7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	590.593.300,00	553.218.000,00	37.375.300,00	6,76
		8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	194.380.000,00	119.995.000,00	74.385.000,00	61,99
		9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.580.864.735,00	7.905.329.884,00	(324.465.149,00)	(4,10)
		10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.167.000,00	144.259.988,00	(73.092.988,00)	(50,67)
		11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	109.755.142,00	11.910.000,00	97.845.142,00	821,54
		12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	39.188.835,00	0,00	39.188.835,00	0,00
		13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
		14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.448.000,00	22.336.700,00	(16.888.700,00)	(75,61)
		15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
		16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.598.800,00	115.900.000,00	(92.301.200,00)	(79,64)
		17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.696.819,00	10.301.086.657,00	(4.906.389.838,00)	(47,63)
		18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.324.931.950,00	881.898.867,00	4.443.033.083,00	503,80
		19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.575.604.645,00	8.607.638.032,00	1.967.966.613,00	22,86
		20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	640.722.000,00	493.237.000,00	147.485.000,00	29,90
		21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.787.170.952,00	2.980.605.964,00	806.564.988,00	27,06
		22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.503.784.405,00	2.215.208.068,00	1.288.576.337,00	58,17
		23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.314.972.050,00	1.357.520.434,00	(42.548.384,00)	(3,13)
		24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.403.424.962,00	892.717.081,00	510.707.881,00	57,21
		25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.141.599.079,00	485.785.589,00	1.655.813.490,00	340,85
		26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.706.868.782,00	921.948.200,00	1.784.920.582,00	193,60
		27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.382.192.928,00	545.247.187,00	2.836.945.741,00	520,30
		28	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.321.252.669,75	4.073.562.761,00	247.689.908,75	6,08
		29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	237.291.114,00	1.333.238.396,00	(1.095.947.282,00)	(82,20)
		30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.189.101.960,00	1.834.100.543,00	3.355.001.417,00	182,92
		31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	904.523.500,00	2.122.272.619,00	(1.217.749.119,00)	(57,38)
		32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	15.338.000,00	(15.338.000,00)	(100,00)
		33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.347.839.372,00	1.628.036.768,00	1.719.802.604,00	105,64

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan Penurunan	%
		34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	111.625.000,00	24.163.400,00	87.461.600,00	361,96
		35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.652.978.210,00	1.528.613.060,00	124.365.150,00	8,14
		36	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	17.389.250,00	1.463.000,00	15.926.250,00	1.088,60
		37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.433.733.699,00	18.453.177.131,00	(1.019.443.432,00)	(5,52)
		38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.877.127.762,00	2.158.086.928,00	719.040.834,00	33,32
		39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	147.024.420,00	703.565.250,00	(556.540.830,00)	(79,10)
		40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.208.656.756,00	2.947.194.037,00	261.462.719,00	8,87
		41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.214.240.400,00	12.649.427.950,00	1.564.812.450,00	12,37
		42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	114.330.000,00	197.318.700,00	(82.988.700,00)	(42,06)
		43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	183.900.000,00	53.085.000,00	130.815.000,00	246,43
		44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.487.418.210,00	848.608.120,00	638.810.090,00	75,28
		45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	851.594.666,00	865.609.429,00	(14.014.763,00)	(1,62)
		46	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	481.370.000,00	155.421.000,00	325.949.000,00	209,72
		47	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	293.572.000,00	336.102.000,00	(42.530.000,00)	(12,65)
		48	Belanja Pakaian Kerja KORPRI	49.800.000,00	85.800.000,00	(36.000.000,00)	(41,96)
		49	Belanja Pakaian Adat Daerah	446.162.000,00	538.900.600,00	(92.738.600,00)	(17,21)
		50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.494.466.900,00	1.789.744.890,00	(295.277.990,00)	(16,50)
		51	Belanja Pakaian Olahraga	1.512.448.500,00	1.582.636.880,00	(70.188.380,00)	(4,43)
		52	Belanja Pakaian Paskibraka	80.530.000,00	181.499.000,00	(100.969.000,00)	(55,63)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**		**618.717.550,00**	**345.753.000,00**	**272.964.550,00**	**78,95**
		1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	18.242.250,00	1.050.000,00	17.192.250,00	1.637,36
		2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	595.359.300,00	344.703.000,00	250.656.300,00	72,72
		3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 11)**	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**		**537.689.700,00**	**0,00**	**537.689.700,00**	**0,00**
		1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00
		3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	83.860.000,00	0,00	83.860.000,00	0,00
		5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-	46.953.000,00	0,00	46.953.000,00	0,00

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
			Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF				
		7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10.925.000,00	0,00	10.925.000,00	0,00
		8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00	0,00
		9	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	130.720.000,00	0,00	130.720.000,00	0,00
		10	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	234.891.700,00	0,00	234.891.700,00	0,00
2	**(A+B+C+D+E+F+G+H+I)**	**Belanja Jasa**		**394.952.774.306,00**	**384.189.800.484,00**	**10.762.973.822,00**	**2,80**
A	**Jumlah A (1 s/d 54)**	**Belanja Jasa Kantor**		**327.189.696.735,00**	**331.379.340.767,00**	**(4.189.644.032,00)**	**(1,26)**
		1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.425.646.337,00	7.184.160.000,00	241.486.337,00	3,36
		2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.067.509.500,00	27.457.318.200,00	(11.389.808.700,00)	(41,48)
		3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	294.600.000,00	322.160.000,00	(27.560.000,00)	(8,55)
		4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.322.600.000,00	984.870.000,00	337.730.000,00	34,29
		5	Honorarium Rohaniwan	13.885.850.000,00	3.524.950.000,00	10.360.900.000,00	293,93
		6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	92.700.000,00	68.800.000,00	23.900.000,00	34,74
		7	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	11.300.000,00	(11.300.000,00)	(100,00)
		8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	831.040.000,00	1.908.889.200,00	(1.077.849.200,00)	(56,46)
		9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	705.900.000,00	661.900.000,00	44.000.000,00	6,65
		10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	52.089.516.823,00	77.669.118.910,00	(25.579.602.087,00)	(32,93)
		11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.529.748.341,00	36.741.262.008,00	(15.211.513.667,00)	(41,40)
		12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	307.380.200,00	249.866.000,00	57.514.200,00	23,02
		13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.756.906.900,00	6.029.770.500,00	727.136.400,00	12,06
		14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.244.700.000,00	5.736.400.000,00	508.300.000,00	8,86
		15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.150.100.000,00	2.088.596.759,00	61.503.241,00	2,94
		16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	136.600.000,00	130.600.000,00	6.000.000,00	4,59
		17	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	404.250.000,00	443.292.000,00	(39.042.000,00)	(8,81)

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan Penurunan	%
		18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56.066.541.450,00	44.642.900.486,00	11.423.640.964,00	25,59
		19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.043.545.000,00	1.851.705.000,00	191.840.000,00	10,36
		20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	82.726.000,00	252.740.777,00	(170.014.777,00)	(67,27)
		21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.951.058.135,00	3.511.816.000,00	(560.757.865,00)	(15,97)
		22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.322.904.623,00	25.570.047.036,00	12.752.857.587,00	49,87
		23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.067.310.000,00	10.348.836.936,00	5.718.473.064,00	55,26
		24	Belanja Jasa Tenaga Caraka	100.575.000,00	102.070.000,00	(1.495.000,00)	(1,46)
		25	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.432.697.500,00	4.100.200.000,00	332.497.500,00	8,11
		26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	99.250.000,00	0,00	99.250.000,00	0,00
		28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	668.500.000,00	927.325.000,00	(258.825.000,00)	(27,91)
		29	Belanja Jasa Tata Rias	164.150.000,00	192.150.000,00	(28.000.000,00)	(14,57)
		30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
		31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	809.384.120,00	509.517.285,00	299.866.835,00	58,85
		32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.500.000,00	115.855.000,00	(76.355.000,00)	(65,91)
		33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	210.323.628,00	174.560.000,00	35.763.628,00	20,49
		34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	149.930.000,00	166.500.000,00	(16.570.000,00)	(9,95)
		35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.291.815.700,00	4.296.617.350,00	1.995.198.350,00	46,44
		36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.254.205.000,00	7.158.609.896,00	(3.904.404.896,00)	(54,54)
		37	Belanja Jasa Kalibrasi	459.885.089,00	339.762.300,00	120.122.789,00	35,35
		38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	439.450.000,00	226.790.000,00	212.660.000,00	93,77
		39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.380.773.100,00	2.188.680.790,00	(807.907.690,00)	(36,91)
		40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.200.000,00	0,00	100.200.000,00	0,00
		41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.151.481.921,00	16.046.168.520,00	6.105.313.401,00	38,05
		42	Belanja Tagihan Telepon	87.656.748,00	140.215.295,00	(52.558.547,00)	(37,48)
		43	Belanja Tagihan Air	1.783.612.321,00	1.589.571.892,00	194.040.429,00	12,21
		44	Belanja Tagihan Listrik	13.151.917.352,00	13.367.291.459,00	(215.374.107,00)	(1,61)
		45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.677.464.000,00	830.786.600,00	846.677.400,00	101,91
		46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.859.788.698,00	9.525.091.831,00	3.334.696.867,00	35,01
		47	Belanja Paket/Pengiriman	342.078.316,00	507.585.883,00	(165.507.567,00)	(32,61)
		48	Belanja Penambahan Daya	53.199.490,00	0,00	0,00	0,00
		49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
		50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	476.575.536,00	519.571.498,00	(42.995.962,00)	(8,28)
		51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.159.267.720,00	5.149.087.844,00	10.179.876,00	0,20
		52	Belanja Lembur	4.920.759.672,00	5.682.723.500,00	(761.963.828,00)	(13,41)
		53	Belanja Medical Check Up	129.622.515,00	103.669.012,00	25.953.503,00	25,03

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan Penurunan	%
		54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	21.640.000,00	(21.640.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 9)**	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**		**41.446.760.681,00**	**27.673.470.043,00**	**13.773.290.638,00**	**49,77**
		1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.063.846.480,00	974.260.536,00	89.585.944,00	9,20
		2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	264.902.400,00	379.780.800,00	(114.878.400,00)	(30,25)
		3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	29.782.795.500,00	16.426.317.000,00	13.356.478.500,00	81,31
		4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.748.240.548,00	8.689.630.605,00	(941.390.057,00)	(10,83)
		5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	732.082.222,36	488.698.427,00	243.383.795,36	49,80
		6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	503.406.552,64	551.528.162,00	(48.121.609,36)	(8,73)
		7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	182.862.178,00	163.254.513,00	19.607.665,00	12,01
		8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	695.610.000,00	0,00	695.610.000,00	0,00
		9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	473.014.800,00	0,00	473.014.800,00	0,00
		Belanja Sewa Tanah		**66.800.000,00**	**18.000.000,00**	**48.800.000,00**	**271,11**
		1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
		2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	16.800.000,00	18.000.000,00	(1.200.000,00)	(6,67)
C	**Jumlah C (1 s/d 16)**	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**		**8.646.430.750,00**	**10.163.816.613,00**	**(1.517.385.863,00)**	**(14,93)**
		1	Belanja Sewa Excavator	0,00	154.245.600,00	(154.245.600,00)	(100,00)
		2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.190.000,00	0,00	15.190.000,00	0,00
		3	Belanja Sewa Electric Generating Set	81.000.000,00	54.000.000,00	27.000.000,00	50,00
		4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	126.300.000,00	215.000.000,00	(88.700.000,00)	(41,26)
		5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	234.100.000,00	254.217.000,00	(20.117.000,00)	(7,91)
		6	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	272.900.000,00	380.833.000,00	(107.933.000,00)	(28,34)
		7	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	89.500.000,00	90.000.000,00	(500.000,00)	(0,56)
		8	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.602.930.000,00	4.646.056.014,00	(43.126.014,00)	(0,93)
		9	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
		10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	155.847.500,00	5.000.000,00	150.847.500,00	3.016,95
		11	Belanja Sewa Mebel	123.656.000,00	83.000.000,00	40.656.000,00	48,98
		12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.319.562.250,00	1.877.599.023,00	441.963.227,00	23,54
		13	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	487.250.000,00	573.942.500,00	(86.692.500,00)	(15,10)
		14	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	31.635.000,00	31.635.000,00	0,00	0,00
		15	Belanja Sewa Komputer Jaringan	106.560.000,00	1.760.788.476,00	(1.654.228.476,00)	(93,95)
		16	Belanja Sewa Elektrik	0,00	34.000.000,00	(34.000.000,00)	(100,00)
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**		**4.100.682.333,00**	**3.708.543.343,00**	**392.138.990,00**	**10,57**

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan Penurunan	%
		1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	537.083.333,00	300.925.676,00	236.157.657,00	78,48
		2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	52.404.000,00	24.000.000,00	28404000,0	118,35
		3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.387.605.000,00	1.388.950.000,00	(1.345.000,00)	(0,10)
		4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.600.000,00	35.040.000,00	(12.440.000,00)	(35,50)
		5	Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	182.894.555,00	(179.894.555,00)	(98,36)
		6	Belanja Sewa Asrama	261.200.000,00	234.500.000,00	26.700.000,00	11,39
		7	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	1.712.904.000,00	1.300.000.000,00	412.904.000,00	31,76
		8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	123.886.000,00	242.233.112,00	(118.347.112,00)	(48,86)
E	**Jumlah E (1 s/d 4)**	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**		**236.580.000,00**	**434.523.500,00**	**(197.943.500,00)**	**(45,55)**
		1	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	128.000.000,00	(128.000.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Sewa Tanaman	236.580.000,00	282.523.500,00	(45.943.500,00)	(16,26)
F	**Jumlah F (1 s/d 11)**	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**		**2.791.506.921,00**	**4.013.833.704,00**	**(1.222.326.783,00)**	**(30,45)**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	97.569.000,00	0,00	97.569.000,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	38.422.650,00	(38.422.650,00)	(100,00)
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.677.000,00	0,00	28.677.000,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	63.981.000,00	165.048.500,00	(101.067.500,00)	(61,24)
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	1.327.996.792,00	(1.327.996.792,00)	(100,00)
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	611.106.400,00	1.347.157.567,00	(736.051.167,00)	(54,64)
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	676.535.010,00	0,00	676.535.010,00	0,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	787.388.195,00	(787.388.195,00)	(100,00)
		9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	103.390.800,00	0,00	103.390.800,00	0,00
		10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	1.210.247.711,00	292.820.000,00	917.427.711,00	313,31
		11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
G	**Jumlah G (1 s/d 8)**	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**		**2.955.027.479,00**	**5.576.034.294,00**	**(2.621.006.815,00)**	**(47,00)**

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.014.000,00	362.752.000,00	(262.738.000,00)	(72,43)
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	811.763.200,00	573.445.000,00	238.318.200,00	41,56
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	559.560.000,00	159.600.022,00	399.959.978,00	250,60
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	799.131.404,00	(799.131.404,00)	(100,00)
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	495.772.700,00	148.055.468,00	347.717.232,00	234,86
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	929.258.279,00	2.039.840.500,00	(1.110.582.221,00)	(54,44)
		7	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	58.659.300,00	20.000.000,00	38.659.300,00	193,30
		8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	-	1.473.209.900,00	(1.473.209.900,00)	(100,00)
H	**Jumlah H (1 s/d 2)**	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**		**450.000.000,00**	**342.000.000,00**	**108.000.000,00**	**31,58**
		1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	29,63
		2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	415.000.000,00	315.000.000,00	100.000.000,00	31,75
I	**Jumlah I (1 s/d 4)**	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**		**5.345.844.975,00**	**108.633.447,00**	**5.237.211.528,00**	######
		1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.672.380.573,00	0,00	1.672.380.573,00	0,00
		2	Belanja Sosialisasi	37.995.400,00	0,00	37.995.400,00	0,00
		3	Belanja Bimbingan Teknis	3.620.469.002,00	108.633.447,00	3.511.835.555,00	3.232,74
		4	Belanja Diklat Kepemimpinan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
J	**Jumlah J (1 s/d 11)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**		**641.747.447,00**	**771.604.773,00**	**(129.857.326,00)**	**(16,83)**
		1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.950.004,00	47.474.996,00	(24.524.992,00)	(51,66)
		2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	61.200.010,00	226.599.982,00	(165.399.972,00)	(72,99)
		3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.147.491,00	1.773.744,00	(626.253,00)	(35,31)
		4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.020.004,00	3.547.512,00	(2.527.508,00)	(71,25)
		5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	103.274.995,00	206.251.858,00	(102.976.863,00)	(49,93)
		6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.530.000,00	3.805.000,00	(2.275.000,00)	(59,79)
		7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemingutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.034.943,00	2.924.987,00	(1.890.044,00)	(64,62)
		10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.800.000,00	33.000.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	119.625.000,00	246.226.694,00	(126.601.694,00)	(51,42)
		12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	310.165.000,00	0,00	310.165.000,00	0,00
K	**Jumlah K (1)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
L	**Jumlah L (1)**	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**		**1.081.696.985,00**	**0,00**	**1.081.696.985,00**	**0,00**
		1	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.079.896.985,00	0,00	1.079.896.985,00	0,00
						-	
3	**(A+B+C+D+E+F)**	**Belanja Pemeliharaan**		**48.129.553.534,56**	**42.636.129.353,00**	**5.493.424.181,56**	**12,88**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**	**Belanja Pemeliharaan Tanah**		**997.409.300,00**	**0,00**	**997.409.300,00**	**0,00**
		1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	997.409.300,00	0,00	997.409.300,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 34)**	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**		**13.375.029.392,00**	**14.406.183.227,00**	**(1.031.153.835,00)**	**(7,16)**
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	299.223.317,00	315.637.684,00	(16.414.367,00)	(5,20)
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	119.992.037,00	111.717.000,00	8.275.037,00	7,41
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	484.829.280,00	195.666.942,00	289.162.338,00	147,78
		4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	17.630.000,00	(17.630.000,00)	(100,00)
		5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	53.449.830,00	0,00	53.449.830,00	0,00
		6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.531.000,00	817.988.474,00	(788.457.474,00)	(96,39)
		7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.981.436.650,00	5.400.452.132,00	580.984.518,00	10,76
		8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	934.097.383,00	902.434.050,00	31.663.333,00	3,51
		9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.313.109.810,00	1.051.686.024,00	261.423.786,00	24,86
		10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	10.916.850,00	0,00	10.916.850,00	0,00

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.640.000,00	0,00	21.640.000,00	0,00
		12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	90.879.000,00	(90.879.000,00)	(100,00)
		13	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	4.082.000,00	5.709.000,00	(1.627.000,00)	(28,50)
		14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
		15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	39.155.151,00	(39.155.151,00)	(100,00)
		16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	614.393.134,00	1.669.553.447,00	(1.055.160.313,00)	(63,20)
		17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	19.325.000,00	42.300.000,00	(22.975.000,00)	(54,31)
		18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	131.720.000,00	(131.720.000,00)	(100,00)
		19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	521.233.551,00	965.186.000,00	(443.952.449,00)	(46,00)
		20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	911.555.950,00	461.468.523,00	450.087.427,00	97,53
		21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	12.345.000,00	(12.345.000,00)	(100,00)
		22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00
		23	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
		24	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	63.356.640,00	0,00	63.356.640,00	0,00
		25	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	659.928.690,00	0,00	659.928.690,00	0,00
		26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	79.985.340,00	99.964.000,00	(19.978.660,00)	(19,99)
		27	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	142.347.180,00	28.971.000,00	113.376.180,00	391,34
		28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	368.545.700,00	27.000.000,00	341.545.700,00	1.264,98

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	187.081.050,00	99.819.500,00	87.261.550,00	87,42
		30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	179.585.000,00	729.461.500,00	(549.876.500,00)	(75,38)
		31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00	0,00
		32	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	308.424.000,00	388.085.800,00	(79.661.800,00)	(20,53)
		33	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	54.623.000,00	(54.623.000,00)	(100,00)
		34	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	626.480.000,00	(626.480.000,00)	(100,00)
C	**Jumlah C (1 s/d 12)**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**10.168.922.512,56**	**7.098.353.180,00**	**3.070.569.332,56**	**43,26**
		1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.731.672.556,56	5.067.921.014,00	2.663.751.542,56	52,56
		2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	59.982.626,00	29.446.000,00	30.536.626,00	103,70
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	194.849.000,00	(194.849.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.672.667.500,00	403.496.682,00	1.269.170.818,00	314,54
		5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	19.995.000,00	39.803.000,00	(19.808.000,00)	(49,77)
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	58.139.580,00	138.206.100,00	(80.066.520,00)	(57,93)
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	112.876.250,00	632.863.122,00	(519.986.872,00)	(82,16)
		8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	65.990.100,00	(65.990.100,00)	(100,00)
		9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	386.686.000,00	0,00	386.686.000,00	0,00
		10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	209.807.750,00	(209.807.750,00)	(100,00)
		11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	117.870.000,00	309.698.412,00	(191.828.412,00)	(61,94)
		12	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	9.033.000,00	6.272.000,00	2.761.000,00	44,02

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**22.967.483.330,00**	**21.019.092.946,00**	**1.948.390.384,00**	**9,27**
		1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.837.000.000,00	0,00	5.837.000.000,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0,00	11.501.000,00	(11.501.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	336.376.000,00	4.499.164.400,00	(4.162.788.400,00)	(92,52)
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	16.137.948.330,00	16.112.045.546,00	25.902.784,00	0,16
		5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	149.334.000,00	0,00	149.334.000,00	#DIV/0!
		6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	506.825.000,00	396.382.000,00	110.443.000,00	27,86
E	**Jumlah E (1 s/d 2)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**112.500.000,00**	**(112.500.000,00)**	(100,00)
		1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
F	**Jumlah F (1 s/d 1)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**620.709.000,00**	**0,00**	**620.709.000,00**	0,00
		1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	620.709.000,00	0,00	620.709.000,00	0,00
4	**(A+B)**		**Belanja Perjalanan Dinas**	**177.636.934.571,30**	**155.335.559.077,00**	**22.301.375.494,30**	**14,36**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**177.428.297.775,30**	**155.217.342.049,00**	**22.210.955.726,30**	**14,31**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.122.383.848,30	106.485.304.697,00	17.637.079.151,30	16,56
		2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.445.503.927,00	48.543.391.352,00	(1.097.887.425,00)	(2,26)
		3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.240.565.000,00	152.646.000,00	5.087.919.000,00	3.333,15
		4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	619.845.000,00	36.000.000,00	583.845.000,00	1.621,79
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**208.636.796,00**	**118.217.028,00**	**90.419.768,00**	**76,49**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	208.636.796,00	118.217.028,00	90.419.768,00	76,49
5	**(A+B)**		**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**14.566.901.400,00**	**45.460.619.230,00**	**(30.893.717.830,00)**	**(67,96)**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**14.566.901.400,00**	**45.153.336.730,00**	**(30.586.435.330,00)**	**(67,74)**
		1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.232.151.400,00	3.542.161.730,00	(1.310.010.330,00)	(36,98)
		2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.517.750.000,00	32.088.675.000,00	(30.570.925.000,00)	(95,27)

No	Point	Uraian		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		3	Belanja Beasiswa	10.783.000.000,00	9.522.500.000,00	1.260.500.000,00	13,24
		4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**0,00**	**307.282.500,00**	**(307.282.500,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	307.282.500,00	(307.282.500,00)	(100,00)
6	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**26.890.102.710,00**	**24.838.471.280,00**	**2.051.631.430,00**	**8,26**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**26.890.102.710,00**	**24.838.471.280,00**	**2.051.631.430,00**	**8,26**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.890.102.710,00	24.838.471.280,00	2.051.631.430,00	8,26
7	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**6.165.347.825,00**	**0,00**	**6.165.347.825,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**6.165.347.825,00**	**0,00**	**6.165.347.825,00**	**100,00**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.165.347.825,00	0,00	6.165.347.825,00	100,00
7	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**51.903.108.781,64**	**53.653.366.223,61**	**(1.750.257.441,97)**	**(3,26)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**51.903.108.781,64**	**53.653.366.223,61**	**(1.750.257.441,97)**	**(3,26)**
		1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.903.108.781,64	53.653.366.223,61	(1.750.257.441,97)	(3,26)
JUMLAH				**868.596.837.598,25**	**834.570.312.408,61**	**34.026.525.189,64**	**4,08**

Data tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 868.596.837.598,25 atau 84,17% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp1.031.969.667.362,21. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp834.570.312.408,61, Belanja Barang dan Jasa mengalami **kenaikan** senilai Rp34.026.525.189,64 atau 4,08%. Tidak tercapainya realisasi anggaran dikarenakan adanya beberapa kendala seperti Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kebutuhan, belanja yang tidak terlaksana, dan pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara dalam melakukan proses belanja. Selain itu Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada ***Lampiran 2.***

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Hibah	189.599.952.449,00	163.011.244.933,00

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp208.839.505.389,00 dengan realisasi senilai Rp189.599.952.449,00 atau 90,79%. Rincian Anggaran dan Realisai Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per OPD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	23.979.825.440,00	22.156.883.912,00	92,40
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	82.589.651.035,00	74.404.397.385,00	90,09
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pangan	626.370.700,00	424.332.646,00	67,74
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	653.616.800,00	650.525.000,00	99,53
8	Dinas Sosial	74.000.000,00	73.681.800,00	99,57
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	3.354.496.137,00	2.849.252.225,00	84,94
12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.585.874.620,00	1.477.730.760,00	93,18
13	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perikanan	5.071.799.647,00	4.483.930.148,00	88,41
15	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	7.020.098.000,00	6.133.885.450,00	87,38
16	Dinas Perkebunan	1.946.622.100,00	1.695.052.550,00	87,08
17	Sekretariat Daerah	26.335.000.000,00	20.298.400.000,00	77,08
18	Kec Teluk Bayur	258.227.998,00	254.177.111,00	98,43
19	Badan Kesatuan, Politik & Linmas	54.493.922.912,00	53.847.703.462,00	98,81
20	Kec. Tanjung Redeb	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Jumlah	**208.839.505.389,00**	**189.599.952.449,00**	**90,79**

Realisasi Belanja Hibah Tahu Anggaran 2024 adalah senilai Rp189.599.952.449,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp26.588.707.516,00 atau 16,31% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp163.011.244.933,00. Rincian realisasi Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah per OPD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	22.156.883.912,00	17.871.668.643,00	4.285.215.269,00	23,98
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	700.000.000,00	50.000.000,00	7,14
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	74.404.397.385,00	55.287.353.417,00	19.117.043.968,00	34,58
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	3.319.106.227,00	(3.319.106.227,00)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	121.289.700,00	(121.289.700,00)	(100,00)
6	Dinas Pangan	424.332.646,00	882.345.240,00	(458.012.594,00)	(51,91)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	650.525.000,00	1.016.457.000,00	(365.932.000,00)	(36,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.681.800,00	0,00	73.681.800,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	1.910.000,00	(1.910.000,00)	(100,00)
10	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	0,00	273.410.760,00	(273.410.760,00)	(100,00)
11	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	2.849.252.225,00	2.550.011.573,00	299.240.652,00	11,73
12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.477.730.760,00	1.061.677.000,00	416.053.760,00	39,19
13	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	0,00	3.760.496.400,00	(3.760.496.400,00)	(100,00)
14	Dinas Perikanan	4.483.930.148,00	14.392.874.053,00	(9.908.943.905,00)	(68,85)
15	Dinas Pertanian & Peternakan	6.133.885.450,00	13.238.208.343,00	(7.104.322.893,00)	(53,67)
16	Dinas Perkebunan	1.695.052.550,00	3.436.610.100,00	(1.741.557.550,00)	(50,68)
17	Sekretariat Daerah	20.298.400.000,00	18.975.000.000,00	1.323.400.000,00	6,97
18	Kec Teluk Bayur	254.177.111,00	227.262.000,00	26.915.111,00	11,84
19	Badan Kesatuan, Politik & Linmas	53.847.703.462,00	25.895.564.477,00	27.952.138.985,00	107,94
20	Kec. Tanjung Redeb	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	Jumlah	**189.599.952.449,00**	**163.011.244.933,00**	**26.588.707.516,00**	**16,31**

Dari tabel diatas terdapat Belanja Hibah di beberapa OPD antara lain:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Dinas Perikanan;
g. Dinas Perkebunan;
h. Badan Kesbang, Politik dan Linmas;
i. Dinas Kesehatan;
j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
m. Dinas Pangan;
n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
o. Kecamatan Teluk Bayur;
p. Sekretariat Daerah;

q. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp15.255.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp15.174.000.000,00 atau 99,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Sosial	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47
JUMLAH		**15.255.000.000,00**	**15.174.000.000,00**	**9,47**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp15.174.000.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.637.590.299,00 atau 77,76% dibandingkan dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.409.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76
	JUMLAH	**15.174.000.000,00**	**8.536.409.701,00**	**6.637.590.299,00**	**77,76**

5.1.2.2. Belanja Modal

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Modal	3.828.768.208.935,46	2.345.617.541.442,00

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp4.101.893.300.300,19 dengan realisasi senilai Rp3.828.768.208.935,46 atau 93,34%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Tanah	16.566.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.837.543.299,21	259.968.567.330,29	94,25
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	580.117.759.021,98	472.685.076.375,72	81,48
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.488.940.328,00	8.338.136.101,00	98,22
6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.588.341.350,00	4.676.717.909,00	83,69
	JUMLAH	**4.101.893.300.300,19**	**3.828.768.208.935,46**	**93,34**



Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp3.828.798.419.151,25 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.180.877.709,25 atau 63,23% dibandingkan dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.345.617.541.442,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023		Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
			Murni	Pembayaran Utang			
1	Belanja Modal Tanah	1.352.415.463,00	7.825.488.693,00	0,00	7.825.488.693,00	(6.473.073.230,00)	(82,72)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.968.567.330,29	172.966.458.500,00	0,00	172.966.458.500,00	87.002.108.830,29	50,30
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	472.685.076.375,72	307.876.754.279,00	0,00	307.876.754.279,00	164.808.322.096,72	53,53
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.081.747.295.756,45	1.848.412.488.655,00	0,00	1.848.412.488.655,00	1.233.334.807.101,45	66,72
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.338.136.101,00	8.536.351.315,00	0,00	8.536.351.315,00	(198.215.214,00)	(2,32)
	Belanja Modal Aset Lainnya	4.676.717.909,00	0,00	0,00	0,00	4.676.717.909,00	0,00
	JUMLAH	**3.828.768.208.935,46**	**2.345.617.541.442,00**	**0,00**	**2.345.617.541.442,00**	**1.483.150.667.493,46**	**63,23**



Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Tahun 2024	Tahun 2023
	1.352.415.463,00	7.825.488.693,00

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp16.566.742.200,00 dengan realisasi senilai Rp1.352.415.463,00 atau 8,16%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Tanah				
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**562.000.000,00**	**361.051.000,00**	**64,24**
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	562.000.000,00	361.051.000,00	64,24
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal Tanah Non Persil**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	**Belanja Modal Lapangan**	**16.004.742.200,00**	**991.364.463,00**	**6,19**
	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	1.200.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.000.000.000,00	991.364.463,00	49,57
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	12.804.742.200,00	0,00	0,00
	Jumlah	**16.566.742.200,00**	**1.352.415.463,00**	**8,16**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.352.415.463,00 mengalami **penurunan** senilai Rp6.473.073.230,00 atau 82,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.825.488.693,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
Belanja Modal Tanah					
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**361.051.000,00**	**7.825.488.693,00**	**(7.464.437.693,00)**	**(95,39)**
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	3.569.414.693,00	(3.569.414.693,00)	100,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	361.051.000,00	4.256.074.000,00	(3.895.023.000,00)	(91,52)
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal Tanah Non Persil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Belanja Modal Lapangan**	**991.364.463,00**	**0,00**	**991.364.463,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	991.364.463,00	0,00	991.364.463,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.352.415.463,00**	**7.825.488.693,00**	**(6.473.073.230,00)**	**(82,72)**

Dari tabel diatas tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah secara maksimal disebabkan adanya kegiatan pengadaan tanah pembangunan skala kecil yang dialokasikan di APBD-Perubahan sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk merealisasikannya.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	259.968.567.330,29	172.966.458.500,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp275.837.543.299,21 dengan realisasi senilai Rp259.968.567.330,29 atau 94,25%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**275.837.543.299,21**	**259.968.567.330,29**	**94,25**
1	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Besar**	**4.512.016.520,00**	**4.143.312.274,00**	**91,83**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**4.094.816.000,00**	**3.806.399.000,00**	**92,96**
		1	Belanja Modal Tractor	44.944.300,00	44.944.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Excavator	4.049.871.700,00	3.761.455.000,00	92,88
		3	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Alat Besar Apung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Alat Bantu**	**417.200.520,00**	**336.913.274,00**	**80,76**
		1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Pompa	386.002.220,00	329.434.760,00	85,35
		3	Belanja Modal Peralatan Selam	7.835.000,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	23.363.300,00	7.478.514,00	32,01
		5	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**42.259.666.900,00**	**38.702.110.978,00**	**91,58**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
A	**Jumlah A (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**39.682.070.500,00**	**36.174.472.728,00**	**91,16**
		1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.345.470.800,00	9.517.380.014,00	92,00
		2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.242.775.600,00	7.587.500.000,00	92,05
		3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.582.478.000,00	1.357.100.000,00	85,76
		4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.702.966.700,00	4.466.095.714,00	94,96
		5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	501.946.500,00	483.520.000,00	96,33
		6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	14.306.432.900,00	12.762.877.000,00	89,21
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**32.507.000,00**	**1.050.000,00**	**3,23**
		1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	32.507.000,00	1.050.000,00	3,23
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**2.545.089.400,00**	**2.526.588.250,00**	**99,27**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	550.000.000,00	542.425.000,00	98,62
		2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.284.366.900,00	1.278.493.250,00	99,54
		3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	710.722.500,00	705.670.000,00	99,29
		4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**121.878.530,00**	**103.819.392,00**	**85,18**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**70.159.430,00**	**65.843.692,00**	**93,85**
		1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	63.519.100,00	59.243.622,00	93,27
		3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	6.640.330,00	6.600.070,00	99,39
B	**Jumlah B (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**42.006.100,00**	**34.090.500,00**	**81,16**
		1	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	6.682.500,00	3.441.000,00	51,49

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		2	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	31.627.000,00	26.952.900,00	85,22
		3	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3.696.600,00	3.696.600,00	100,00
C	**Jumlah C (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Ukur**	**9.713.000,00**	**3.885.200,00**	**40,00**
		1	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	9.713.000,00	3.885.200,00	40,00
		2	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**154.638.500,00**	**126.507.550,00**	**81,81**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**154.638.500,00**	**126.507.550,00**	**81,81**
		1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	30.304.000,00	29.437.420,00	97,14
		2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	55.171.400,00	36.910.130,00	66,90
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	54.540.000,00	53.880.000,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Pasca Panen	13.735.100,00	6.280.000,00	45,72
		5	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	888.000,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**47.414.046.236,00**	**45.851.028.127,00**	**96,70**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Kantor**	**3.273.646.256,00**	**2.827.995.120,00**	**86,39**
		1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	121.901.400,00	121.750.000,00	99,88
		3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	305.804.000,00	283.671.500,00	92,76
		4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.845.940.856,00	2.422.573.620,00	85,12
B	**Jumlah B (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**43.553.896.980,00**	**42.467.230.917,00**	**97,51**
		1	Belanja Modal Mebel	37.410.473.847,00	36.981.886.449,00	98,85
		2	Belanja Modal Alat Pembersih	277.588.766,00	203.612.900,00	73,35
		3	Belanja Modal Alat Pendingin	2.402.777.236,00	2.224.292.290,00	92,57
		4	Belanja Modal Alat Dapur	271.010.100,00	234.656.685,00	86,59
		5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.891.852.031,00	2.575.252.593,00	89,05
		6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	300.195.000,00	247.530.000,00	82,46

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
C	**Jumlah C (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**586.503.000,00**	**555.802.090,00**	**94,77**
		1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	36.451.200,00	36.451.200,00	100,00
		2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	101.233.400,00	96.120.000,00	94,95
		4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	28.975.500,00	28.975.500,00	100,00
		5	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
		6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	188.250.000,00	174.732.500,00	92,82
		7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	201.352.900,00	189.282.890,00	94,01
6	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**15.407.524.276,00**	**14.596.736.251,00**	**94,74**
A	**Jumlah A (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Alat Studio**	**12.368.936.876,00**	**11.583.911.351,00**	**93,65**
		1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	636.378.930,00	603.860.770,00	94,89
		2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.850.590.802,00	9.345.981.561,00	94,88
		3	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	433.770.700,00	234.470.500,00	54,05
		5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.448.196.444,00	1.399.598.520,00	96,64
B	**Jumlah B (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**164.587.400,00**	**142.207.700,00**	**86,40**
		1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	90.102.800,00	71.454.000,00	79,30
		2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	49.909.600,00	49.743.200,00	99,67
		3	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	10.687.000,00	8.710.500,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	13.888.000,00	12.300.000,00	88,57
		5	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**2.874.000.000,00**	**2.870.617.200,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Sumber Tenaga	2.874.000.000,00	2.870.617.200,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
7	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**10.992.603.716,00**	**10.269.880.156,00**	**93,43**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
A	**Jumlah A (1 s/d 11)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**9.577.332.816,00**	**8.997.374.666,00**	**93,94**
		1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.232.332.827,00	2.014.909.196,00	90,26
		2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	997.027.000,00	940.735.200,00	94,35
		3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	541.139.000,00	511.717.400,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.105.667.369,00	962.979.870,00	87,09
		5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	49.547.520,00	38.272.000,00	77,24
		6	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	90.713.000,00	88.476.000,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.598.460.600,00	1.566.500.000,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	539.283.800,00	459.861.000,00	0,00
		9	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	19.204.700,00	13.760.000,00	71,65
		10	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.400.245.000,00	2.396.452.000,00	99,84
		11	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.712.000,00	3.712.000,00	100,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**1.415.270.900,00**	**1.272.505.490,00**	**89,91**
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.415.270.900,00	1.272.505.490,00	89,91
8	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.266.900.360,00**	**4.015.496.170,00**	**192,79**
A	**Jumlah A (1 s/d 12)**		**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**3.600.985.760,00**	**3.368.526.170,00**	**93,54**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	66.600.000,00	66.400.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	5.228.600,00	5.200.000,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.171.339.860,00	1.053.833.734,00	89,97
		4	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	42.344.300,00	5.500.000,00	12,99
		5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	498.562.000,00	451.488.300,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	100.750.000,00	96.570.000,00	95,85
		7	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	24.350.000,00	24.280.136,00	99,71
		10	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.293.336.000,00	1.283.654.000,00	99,25
		11	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	398.475.000,00	381.600.000,00	95,77

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**264.500.000,00**	**262.508.000,00**	**99,25**
		1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	135.000.000,00	134.335.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	129.500.000,00	128.173.000,00	98,98
		4	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika**	**295.943.100,00**	**279.244.200,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal System/Power Supply	295.943.100,00	279.244.200,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**2.324.000,00**	**2.308.800,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.324.000,00	2.308.800,00	0,00
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi**	**103.147.500,00**	**102.909.000,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	103.147.500,00	102.909.000,00	0,00
9	**(A+B)**		**Belanja Modal Komputer**	**33.893.939.006,00**	**32.765.178.511,00**	**96,67**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Komputer Unit**	**28.420.192.969,00**	**27.600.416.016,00**	**97,12**
		1	Belanja Modal Komputer Jaringan	52.084.900,00	48.300.000,00	92,73
		2	Belanja Modal Personal Computer	21.907.686.019,00	21.262.336.616,00	97,05
		3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.460.422.050,00	6.289.779.400,00	97,36
B	**Jumlah B (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**5.473.746.037,00**	**5.164.762.495,00**	**94,36**
		1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.726.900,00	3.555.000,00	52,85
		3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.243.408.627,00	2.064.805.020,00	92,04
		4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.122.995.000,00	1.096.371.599,00	97,63
		5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.100.615.510,00	2.000.030.876,00	95,21
10	**(A)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00
11	**(A)**		**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Sumur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00
12	**(A)**		**Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi**	**10.535.000,00**	**10.500.000,00**	**99,67**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Bantu Produksi**	**10.535.000,00**	**10.500.000,00**	**99,67**
			Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	10.535.000,00	10.500.000,00	99,67
13	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**256.727.550,00**	**253.850.620,00**	**98,88**
A	**Jumlah A (1 + 2)**		**Belanja Modal Alat Pelindung**	**19.278.000,00**	**19.106.620,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.278.000,00	19.106.620,00	99,11
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat SAR**	**237.449.550,00**	**234.744.000,00**	**98,86**
		1	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	154.155.800,00	151.544.000,00	98,31
		2	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	83.293.750,00	83.200.000,00	99,89
14	**(A)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**96.676.869.880,00**	**92.388.565.817,29**	**95,56**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**96.676.869.880,00**	**92.388.565.817,29**	**95,56**
		1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	400.906.000,00	400.180.000,00	99,82
		2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	96.275.963.880,00	91.988.385.817,29	95,55
15	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**276.512.900,00**	**270.840.000,00**	**97,95**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**276.512.900,00**	**270.840.000,00**	**97,95**
		1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Peralatan Permainan	79.112.900,00	75.320.000,00	95,21
		3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	197.400.000,00	195.520.000,00	99,05
16	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**12.682.941.393,21**	**12.541.998.984,00**	**98,89**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**12.682.941.393,21**	**12.541.998.984,00**	**98,89**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.682.941.393,21	12.541.998.984,00	98,89
17	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**626.678.002,00**	**586.060.150,00**	**93,52**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS**	**626.678.002,00**	**586.060.150,00**	**93,52**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	626.678.002,00	586.060.150,00	93,52
18	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.284.064.530,00**	**3.342.682.350,00**	**53,19**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.284.064.530,00**	**3.342.682.350,00**	**53,19**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.284.064.530,00	3.342.682.350,00	53,19
			Jumlah	**275.837.543.299,21**	**259.968.567.330,29**	**94,25**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp259.968.567.330,29 mengalami **kenaikan** senilai Rp87.002.108.830,29 atau 50,30% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan senilai Rp172.966.458.500,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**259.968.567.330,29**	**172.966.458.500,00**	**87.002.108.830,29**	**50,30**
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Besar**	**4.143.312.274,00**	**4.264.187.780,00**	**(120.875.506,00)**	**(2,83)**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**3.806.399.000,00**	**2.869.000.000,00**	**937.399.000,00**	**32,67**
		1	Belanja Modal Tractor	44.944.000,00	495.500.000,00	(450.556.000,00)	(90,93)
		2	Belanja Modal Alat Pengangkat	3.761.455.000,00	0,00	3.761.455.000,00	0,00
		3	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	2.360.000.000,00	(2.360.000.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Besar Apung**	**0,00**	**7.310.000,00**	**(7.310.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Kapal Tarik	0,00	7.310.000,00	(7.310.000,00)	(100,00)
C	**Jumlah C (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Bantu**	**336.913.274,00**	**1.387.877.780,00**	**(1.050.964.506,00)**	**(75,72)**
		1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	143.925.000,00	(143.925.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Pompa	329.434.760,00	1.045.556.000,00	(716.121.240,00)	(68,49)
		3	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	7.478.514,00	0,00	7.478.514,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
		5	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	198.396.780,00	(198.396.780,00)	(100,00)
2	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**38.702.110.978,00**	**38.427.246.378,00**	**274.864.600,00**	**0,72**
A	**Jumlah A (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**36.174.472.728,00**	**37.655.722.678,00**	**(1.481.249.950,00)**	**(3,93)**
		1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.517.380.014,00	8.916.969.754,00	600.410.260,00	6,73
		2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	7.587.500.000,00	15.462.607.953,00	(7.875.107.953,00)	(50,93)
		3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.357.100.000,00	1.892.000.000,00	(534.900.000,00)	(28,27)
		4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.466.095.714,00	3.817.344.971,00	648.750.743,00	16,99
		5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	483.520.000,00	1.260.800.000,00	(777.280.000,00)	(61,65)
		6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	12.762.877.000,00	6.306.000.000,00	6.456.877.000,00	102,39
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**2.526.588.250,00**	**706.588.700,00**	**1.819.999.550,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	542.425.000,00	0,00	542.425.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.278.493.250,00	608.088.700,00	670.404.550,00	110,25
		3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	705.670.000,00	0,00	705.670.000,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	98.500.000,00	(98.500.000,00)	(100,00)
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**0,00**	**64.935.000,00**	**(64.935.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	64.935.000,00	(64.935.000,00)	(100,00)
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**103.819.392,00**	**2.116.554.200,00**	**(2.012.734.808,00)**	**(95,09)**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**65.843.692,00**	**55.910.700,00**	**9.932.992,00**	**17,77**
		1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	55.910.700,00	(55.910.700,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
		2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	59.243.622,00	0,00	59.243.622,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	6.600.070,00	0,00	6.600.070,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**34.090.500,00**	**6.696.500,00**	**27.394.000,00**	**409,08**
		1	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	3.441.000,00	0,00	3.441.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	26.952.900,00	0,00	26.952.900,00	0,00
		3	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	6.696.500,00	(6.696.500,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	3.696.600,00	0,00	3.696.600,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Ukur**	**3.885.200,00**	**2.053.947.000,00**	**(2.050.061.800,00)**	**(99,81)**
		1	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	3.885.200,00	0,00	3.885.200,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	2.053.947.000,00	(2.053.947.000,00)	(100,00)
4	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**126.507.550,00**	**239.163.750,00**	**(112.656.200,00)**	**(47,10)**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**126.507.550,00**	**239.163.750,00**	**(112.656.200,00)**	**(47,10)**
		1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	29.437.420,00	0,00	29.437.420,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	36.910.130,00	19.957.800,00	16.952.330,00	84,94
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	53.880.000,00	2.500.000,00	51.380.000,00	2.055,20
		4	Belanja Modal Alat Pasca Panen	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	0,00
		5	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	161.529.350,00	(161.529.350,00)	(100,00)
		7	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	55.176.600,00	(55.176.600,00)	(100,00)
5	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**45.851.028.127,00**	**29.204.567.522,00**	**16.646.460.605,00**	**57,00**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Kantor**	**2.827.995.120,00**	**1.304.079.180,00**	**1.523.915.940,00**	**116,86**
		1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	121.750.000,00	227.000.000,00	(105.250.000,00)	(46,37)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
		3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	283.671.500,00	201.011.000,00	82.660.500,00	41,12
		4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.422.573.620,00	864.068.180,00	1.558.505.440,00	180,37
B	**Jumlah B (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**42.467.230.917,00**	**27.690.911.810,00**	**14.776.319.107,00**	**53,36**
		1	Belanja Modal Mebel	36.981.886.449,00	23.270.005.445,00	13.711.881.004,00	58,93
		3	Belanja Modal Alat Pembersih	203.612.900,00	13.300.000,00	190.312.900,00	1.430,92
		4	Belanja Modal Alat Pendingin	2.224.292.290,00	1.828.963.940,00	395.328.350,00	21,61
		5	Belanja Modal Alat Dapur	234.656.685,00	6.738.500,00	227.918.185,00	3.382,33
		6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.575.252.593,00	2.398.745.445,00	176.507.148,00	7,36
		7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	247.530.000,00	173.158.480,00	74.371.520,00	42,95
C	**Jumlah C (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**555.802.090,00**	**209.576.532,00**	**346.225.558,00**	**165,20**
		1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	36.451.200,00	0,00	36.451.200,00	0,00
		2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	67.699.000,00	(67.699.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.120.000,00	25.109.000,00	71.011.000,00	282,81
		4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	28.975.500,00	0,00	28.975.500,00	0,00
		5	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.240.000,00	0,00	30.240.000,00	0,00
		6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	174.732.500,00	48.452.032,00	126.280.468,00	260,63
		7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	189.282.890,00	68.316.500,00	120.966.390,00	177,07
6	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**14.596.736.251,00**	**6.062.225.231,00**	**8.534.511.020,00**	**140,78**
A	**Jumlah A (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Studio**	**11.583.911.351,00**	**5.938.104.231,00**	**5.645.807.120,00**	**95,08**
		1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	603.860.770,00	797.863.960,00	(194.003.190,00)	(24,32)
		2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.345.981.561,00	1.468.637.950,00	7.877.343.611,00	536,37
		3	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	198.908.151,00	(198.908.151,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	234.470.500,00	803.260.000,00	(568.789.500,00)	(70,81)
		5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.399.598.520,00	2.669.434.170,00	(1.269.835.650,00)	(47,57)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**142.207.700,00**	**110.521.000,00**	**31.686.700,00**	**28,67**
		1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	71.454.000,00	12.080.000,00	59.374.000,00	491,51
		2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	49.743.200,00	0,00	49.743.200,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	8.710.500,00	0,00	8.710.500,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00
		5	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	98.441.000,00	(98.441.000,00)	(100,00)
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**2.870.617.200,00**	**0,00**	**2.870.617.200,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Sumber Tenaga	2.870.617.200,00	0,00	2.870.617.200,00	0,00
D	**Jumlah D (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**0,00**	**13.600.000,00**	**(13.600.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	13.600.000,00	(13.600.000,00)	(100,00)
7	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**10.269.880.156,00**	**5.744.608.588,00**	**4.525.271.568,00**	**78,77**
A	**Jumlah A (1 s/d 11)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**8.997.374.666,00**	**2.994.522.694,00**	**6.002.851.972,00**	**200,46**
		1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.014.909.196,00	842.465.387,00	1.172.443.809,00	139,17
		2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	940.735.200,00	843.710.100,00	97.025.100,00	11,50
		3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	511.717.400,00	0,00	511.717.400,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	962.979.870,00	884.948.907,00	78.030.963,00	8,82
		5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	38.272.000,00	6.891.300,00	31.380.700,00	455,37
		6	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	88.476.000,00	0,00	88.476.000,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.566.500.000,00	0,00	1.566.500.000,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	459.861.000,00	12.328.000,00	447.533.000,00	0,00
		9	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00	0,00
		10	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.396.452.000,00	404.179.000,00	1.992.273.000,00	492,92

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
		11	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**1.272.505.490,00**	**2.750.085.894,00**	**(1.477.580.404,00)**	**(53,73)**
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.272.505.490,00	2.750.085.894,00	(1.477.580.404,00)	(53,73)
8	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.015.496.170,00**	**1.900.362.378,00**	**2.115.133.792,00**	**111,30**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**3.368.526.170,00**	**1.190.745.378,00**	**2.177.780.792,00**	**182,89**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	66.400.000,00	0,00	66.400.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.053.833.734,00	0,00	1.053.833.734,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
		5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	451.488.300,00	0,00	451488300,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	96.570.000,00	0,00	96.570.000,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	198.169.100,00	(198.169.100,00)	(100,00)
		8	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	28.300.000,00	(28.300.000,00)	(100,00)
		9	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	24.280.136,00	0,00	24.280.136,00	0,00
		10	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.283.654.000,00	956.783.778,00	326.870.222,00	34,16
		11	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	381.600.000,00	0,00	381.600.000,00	0,00
		12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	7.492.500,00	(7.492.500,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**262.508.000,00**	**709.617.000,00**	**(447.109.000,00)**	**(63,01)**
		1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	134.335.000,00	0,00	134.335.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	410.750.000,00	(410.750.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	128.173.000,00	118.313.000,00	9.860.000,00	8,33
		4	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	180.554.000,00	(180.554.000,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika**	**279.244.200,00**	**0,00**	**279.244.200,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal System/Power Supply	279.244.200,00	0,00	279.244.200,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**2.308.800,00**	**0,00**	**2.308.800,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.308.800,00	0,00	2.308.800,00	0,00
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi**	**102.909.000,00**	0,00	102.909.000,00	0,00
			Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	102.909.000,00	0,00	102.909.000,00	0,00
9	**(A+B)**		**Belanja Modal Komputer**	**32.765.178.511,00**	**29.936.695.920,00**	**2.828.482.591,00**	**9,45**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Komputer Unit**	**27.600.416.016,00**	**19.038.729.676,00**	**8.561.686.340,00**	**44,97**
		1	Belanja Modal Komputer Jaringan	48.300.000,00	1.099.182.750,00	(1.050.882.750,00)	(95,61)
		2	Belanja Modal Personal Computer	21.262.336.616,00	15.514.406.815,00	5.747.929.801,00	37,05
		3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.289.779.400,00	2.425.140.111,00	3.864.639.289,00	159,36
B	**Jumlah B (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**5.164.762.495,00**	**10.897.966.244,00**	**(5.733.203.749,00)**	**(52,61)**
		1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	33.211.200,00	(33.211.200,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	3.555.000,00	237.871.000,00	(234.316.000,00)	(98,51)
		3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.064.805.020,00	531.326.740,00	1.533.478.280,00	288,61
		4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.096.371.599,00	749.711.700,00	346.659.899,00	46,24
		5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.000.030.876,00	9.345.845.604,00	(7.345.814.728,00)	(78,60)
10	**(A)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**0,00**	**1.121.756.500,00**	**(1.121.756.500,00)**	**(100,00)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**0,00**	**1.121.756.500,00**	**(1.121.756.500,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	1.121.756.500,00	(1.121.756.500,00)	(100,00)
11	**(A)**		**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**0,00**	**99.950.000,00**	**(99.950.000,00)**	**(100,00)**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Sumur**	**0,00**	**99.950.000,00**	**(99.950.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	99.950.000,00	(99.950.000,00)	(100,00)
12	**(A)**		**Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi**	**10.500.000,00**	**61.019.780,00**	**(50.519.780,00)**	**(82,79)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Bantu Produksi**	**10.500.000,00**	61.019.780,00	**(50.519.780,00)**	**(82,79)**
			Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	10.500.000,00	61.019.780,00	(50.519.780,00)	(82,79)
13	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**253.850.620,00**	**53.114.500,00**	**200.736.120,00**	**377,93**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Pelindung**	**19.106.620,00**	**53.114.500,00**	**(34.007.880,00)**	**(64,03)**
		1	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	31.350.000,00	(31.350.000,00)	(100,00)
			Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.106.620,00	21.764.500,00	(2.657.880,00)	(12,21)
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat SAR**	**234.744.000,00**	**0,00**	**234.744.000,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	151.544.000,00	0,00	151.544.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	83.200.000,00	0,00	83.200.000,00	0,00
14	**(A)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**92.388.565.817,29**	**32.167.651.000,00**	**60.220.914.817,29**	**187,21**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**92.388.565.817,29**	**32.167.651.000,00**	**60.220.914.817,29**	**187,21**
		1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	400.180.000,00	136.513.000,00	263.667.000,00	193,14
		2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	91.988.385.817,29	32.031.138.000,00	59.957.247.817,29	187,18
15	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**270.840.000,00**	**143.650.000,00**	**127.190.000,00**	**88,54**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**270.840.000,00**	**143.650.000,00**	**127.190.000,00**	**88,54**
		1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	9.400.000,00	(9.400.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Peralatan Permainan	75.320.000,00	20.000.000,00	55.320.000,00	276,60
		3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	195.520.000,00	114.250.000,00	81.270.000,00	71,13
16	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**12.541.998.984,00**	**14.271.650.627,00**	**(1.729.651.643,00)**	**(12,12)**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		kenaikan	%
				2024	2023	penurunan	
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**12.541.998.984,00**	**14.271.650.627,00**	**(1.729.651.643,00)**	**(12,12)**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.541.998.984,00	14.271.650.627,00	(1.729.651.643,00)	(12,12)
17	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**586.060.150,00**	0,00	**586.060.150,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS**	**586.060.150,00**	0,00	**586.060.150,00**	**0,00**
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	586.060.150,00	0,00	586.060.150,00	0,00
18	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**3.342.682.350,00**	**7.152.054.346,00**	**(3.809.371.996,00)**	**(53,26)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**3.342.682.350,00**	**7.152.054.346,00**	**(3.809.371.996,00)**	**(53,26)**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.342.682.350,00	7.152.054.346,00	(3.809.371.996,00)	(53,26)
			Jumlah	**259.968.567.330,29**	**172.966.458.500,00**	**87.002.108.830,29**	**50,30**

Dari tabel diatas tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak tersedia, barang yang dianggarkan di DPA tidak relevan dengan harga di pasaran (harga di pasaran lebih tinggi), keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanan tidak cukup dan gagal lelang karena tidak ada penyedia yang berminat.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	472.685.076.375,72	307.876.754.279,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Angaran 2024 senilai Rp580.117.759.021,00 dengan realisasi senilai Rp472.685.076.375,72 atau 81,48%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**580.117.759.021,98**	**472.685.076.375,72**	**81,48**
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**536.504.842.701,98**	**429.750.956.792,72**	**80,11**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
A	**Jumlah A (1 s/d 19)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**535.438.838.701,98**	**428.863.032.792,72**	**80,10**
		1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.452.696.387,00	58.499.852.776,51	98,40
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	32.231.277.996,00	26.607.079.130,14	82,55
		4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.284.346.000,00	2.211.853.081,35	96,83
		5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.891.668.400,00	14.346.168.310,00	96,34
		6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	92.920.653.351,40	86.464.885.023,91	93,05
		7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.756.603.700,00	1.635.149.259,00	93,09
		8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.447.045.000,00	10.019.642.985,67	95,91
		9	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	257.017.959,00	257.017.959,00	100,00
		11	Belanja Modal Bangunan Terbuka	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00
		12	Belanja Modal Bangunan Industri	4.750.950.000,00	4.695.319.180,00	98,83
		13	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	24.700.000,00	23.213.000,00	93,98
		14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.084.113.854,00	33.777.240.477,19	91,08
		15	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	276.988.330.053,58	188.047.368.418,04	67,89
		16	Belanja Modal Bangunan Parkir	123.000.000,00	109.500.000,00	89,02
		17	Belanja Modal Taman	2.195.536.001,00	2.137.843.191,91	97,37
		18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**1.066.004.000,00**	**887.924.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	858.004.000,00	681.055.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Asrama	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	208.000.000,00	206.869.000,00	99,46
2	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Monumen**	**358.859.195,00**	**358.859.195,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**358.859.195,00**	**358.859.195,00**	**100,00**
			Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	358.859.195,00	358.859.195,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
3	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Menara**	**50.000.000,00**	**49.998.000,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan**	**50.000.000,00**	**49.998.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	50.000.000,00	49.998.000,00	100,00
4	**(A)**		**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**3.549.781.825,00**	**2.966.595.088,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**3.549.781.825,00**	**2.966.595.088,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Pagar	3.512.781.825,00	2.929.595.088,00	83,40
		2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
5	**(A)**		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.654.275.300,00**	**39.558.667.300,00**	**100,00**
	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.654.275.300,00**	**39.558.667.300,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.654.275.300,00	39.558.667.300,00	99,76
Jumlah				**580.117.759.021,98**	**472.685.076.375,72**	**81,48**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp472.685.076.375,72 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.808.322.096,72 atau 53,53% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp307.876.754.279,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.56 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**472.685.076.375,72**	**307.876.754.279,00**	**164.808.322.096,72**	**53,53**
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**429.781.167.008,51**	**264.082.802.861,00**	**165.668.153.931,72**	**62,73**
A	**Jumlah A (1 s/d 19)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**428.893.243.008,51**	**260.577.619.100,00**	**168.285.413.692,72**	**64,58**
		1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	58.499.852.776,51	59.818.241.319,00	(1.318.388.542,49)	(2,20)
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	4.747.725.230,00	(4.747.725.230,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	26.607.079.130,14	16.358.634.689,00	10.248.444.441,14	100,00
		4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.211.853.081,35	263.506.679,00	1.948.346.402,35	739,39
		5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.346.168.310,00	3.736.287.878,00	10.609.880.432,00	283,97

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
		6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	86.464.885.023,91	34.292.770.006,00	52.172.115.017,91	152,14
		7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.635.149.259,00	284.979.508,00	1.350.169.751,00	473,78
		8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.019.642.985,67	14.720.773.275,00	(4.701.130.289,33)	(31,94)
		9	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	169.952.100,00	(169.952.100,00)	100,00
		10	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	257.017.959,00	4.715.444.153,00	(4.458.426.194,00)	(94,55)
		11	Belanja Modal Bangunan Terbuka	30.900.000,00	10.000.000,00	20.900.000,00	209,00
		12	Belanja Modal Bangunan Industri	4.695.319.180,00	418.916.923,00	4.276.402.257,00	1.020,82
		13	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	23.213.000,00	192.777.000,00	(169.564.000,00)	(87,96)
		14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	33.777.240.477,19	21.047.600.059,00	12.729.640.418,19	60,48
		15	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	188.047.368.418,04	78.724.335.862,00	109.323.032.556,04	138,87
		16	Belanja Modal Bangunan Parkir	109.500.000,00	47.175.000,00	62.325.000,00	132,11
		17	Belanja Modal Taman	2.137.843.191,91	20.118.234.955,00	(17.980.391.763,09)	(89,37)
		18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	910.264.464,00	(910.264.464,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**887.924.000,00**	**3.505.183.761,00**	**(2.617.259.761,00)**	**(74,67)**
		1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	681.055.000,00	0,00	681.055.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Asrama	0,00	91.145.985,00	(91.145.985,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	206.869.000,00	3.414.037.776,00	(3.207.168.776,00)	(93,94)
2	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Monumen**	**358.859.195,00**	**2.889.482.793,00**	**(2.530.623.598,00)**	**(87,58)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**358.859.195,00**	**2.889.482.793,00**	**(2.530.623.598,00)**	**(87,58)**
		1	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	358.859.195,00	2.889.482.793,00	(2.530.623.598,00)	(87,58)
3	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Menara**	**49.998.000,00**	**399.100.000,00**	**(349.102.000,00)**	**(87,47)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan**	**49.998.000,00**	**399.100.000,00**	**(349.102.000,00)**	**(87,47)**
		1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	49.998.000,00	399.100.000,00	(349.102.000,00)	(87,47)
4	**(A)**		**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**2.966.595.088,00**	**1.048.238.000,00**	**1.918.357.088,00**	**183,01**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**2.966.595.088,00**	**1.048.238.000,00**	**1.918.357.088,00**	**183,01**
		1	Belanja Modal Pagar	2.929.595.088,00	956.438.000,00	1.973.157.088,00	206,30
		2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	37.000.000,00	91.800.000,00	(54.800.000,00)	(59,69)
5	**(A)**		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.558.667.300,00**	**39.457.130.625,00**	**101.536.675,00**	**0,26**
	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.558.667.300,00**	**39.457.130.625,00**	**101.536.675,00**	**0,26**
		1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.558.667.300,00	39.457.130.625,00	101.536.675,00	0,26
Jumlah				**472.685.076.375,72**	**307.876.754.279,00**	**164.808.322.096,72**	**53,53**

Dari tabel diatas Belanja Modal Gedung dan Bangunan baik Anggaran maupun realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2023, namun belum mencapai target dari realisasi dari yang dianggarkan di masing – masing Tahun Anggaran. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan belum tuntasnya pembebasan lahan tanah (*clear dan clean*), tidak sepakatnya antara SKPD teknis dengan kepala wilayah (Camat) di dalam penempatan lokasi bangunan, tidak siapnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan, gagal lelang karena tidak ada yang berminat, keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.081.747.295.756,45	1.848.412.488.655,00

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.215.293.974.101,00 dengan realisasi senilai Rp3.081.747.295.756,45 atau 95,85% . Rincian anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
	Jumlah (1+2+3+4)		**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**3.215.293.974.101,00**	**3.081.747.295.756,45**	**95,85**
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.950.316.342.097,00**	**1.859.571.958.318,60**	**95,35**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Jalan**	**1.950.094.342.097,00**	**1.859.351.935.145,60**	**95,35**
		1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.946.184.384.997,00	1.855.541.140.642,60	95,34

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
		2	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.909.957.100,00	3.810.794.503,00	97,46
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jembatan**	**222.000.000,00**	**220.023.173,00**	**99,11**
		1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	222.000.000,00	220.023.173,00	99,11
2	**(A+B+C+D+E)**		**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.242.520.669.404,00**	**1.201.639.662.369,85**	**96,71**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**238.698.160.000,00**	**236.148.734.770,00**	**98,93**
		1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	238.698.160.000,00	236.148.734.770,00	98,93
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	**531.739.173.642,00**	**516.659.397.260,85**	**97,16**
		1	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	531.739.173.642,00	516.659.397.260,85	97,16
C	**Jumlah C (1 + 2)**		**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**260.978.179.396,00**	**241.903.747.044,00**	**92,69**
		1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.480.000,00	199.873.000,00	99,70
		2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	260.777.699.396,00	241.703.874.044,00	92,69
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**210.108.121.367,00**	**205.945.083.661,00**	**98,02**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	210.108.121.367,00	205.945.083.661,00	98,02
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**997.034.999,00**	**982.699.634,00**	**98,56**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	997.034.999,00	982.699.634,00	98,56
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Instalasi**	**22.257.462.600,00**	**20.535.675.068,00**	**92,26**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**1.950.000.000,00**	**1.942.000.000,00**	**99,59**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.950.000.000,00	1.942.000.000,00	99,59
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**20.157.462.600,00**	**18.444.325.068,00**	**91,50**
			Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	20.157.462.600,00	18.444.325.068,00	91,50
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**150.000.000,00**	**149.350.000,00**	**99,57**
		1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	150.000.000,00	149.350.000,00	99,57
4	**(A)**		**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	**(A)**		**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**199.500.000,00**	0,00	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**199.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	199.500.000,00	0,00	**0,00**
			Jumlah	**3.215.293.974.101,00**	**3.081.747.295.756,45**	**95,85**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.233.334.807.101,45 atau 66,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
	Jumlah (1+2+3+4)		**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**3.081.747.295.756,45**	**1.848.412.488.655,00**	**1.233.334.807.101,45**	**66,72**
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.859.571.958.318,60**	**1.201.499.535.012,00**	**658.072.423.306,60**	**54,77**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Jalan**	**1.859.351.935.145,60**	**1.135.319.869.412,00**	**724.032.065.733,60**	**63,77**
		1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.855.541.140.642,60	1.133.907.691.935,00	721.633.448.707,60	63,64
		2	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	359.582.000,00	(359.582.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	854.132.637,00	(854.132.637,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.810.794.503,00	198.462.840,00	3.612.331.663,00	1.820,16
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jembatan**	**220.023.173,00**	**66.179.665.600,00**	**(65.959.642.427,00)**	**(99,67)**
		1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	220.023.173,00	66.179.665.600,00	(65.959.642.427,00)	(99,67)
2	**(A+B+C+D+E)**		**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.201.639.662.369,85**	**643.717.997.979,00**	**557.921.664.390,85**	**86,67**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**236.148.734.770,00**	**84.742.400.917,00**	**151.406.333.853,00**	**178,67**
		1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	236.148.734.770,00	84.742.400.917,00	151.406.333.853,00	178,67
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	**516.659.397.260,85**	**314.747.213.487,00**	**201.912.183.773,85**	**64,15**
		1	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	516.659.397.260,85	314.747.213.487,00	201912183773,85	64,15
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**241.903.747.044,00**	**158.747.785.415,00**	**83.155.961.629,00**	**52,38**
		1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	199.873.000,00	0,00	199.873.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	241.703.874.044,00	158.747.785.415,00	82.956.088.629,00	52,26
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**205.945.083.661,00**	**85.480.598.160,00**	**120.464.485.501,00**	**140,93**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	205.945.083.661,00	85.480.598.160,00	120.464.485.501,00	140,93
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**982.699.634,00**	**0,00**	**982.699.634,00**	**0,00**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (penurunan)	%
		1	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	982.699.634,00	0,00	982.699.634,00	0,00
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Instalasi**	**20.535.675.068,00**	**2.325.155.664,00**	**18.210.519.404,00**	**783,20**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**0,00**	**199.984.783,00**	**(199.984.783,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	199.984.783,00	(199.984.783,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**1.942.000.000,00**	**1.482.003.881,00**	**459.996.119,00**	**31,04**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.942.000.000,00	1.482.003.881,00	459.996.119,00	31,04
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**18.444.325.068,00**	**0,00**	**18.444.325.068,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	18.444.325.068,00	0,00	18.444.325.068,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**149.350.000,00**	**643.167.000,00**	**(493.817.000,00)**	**(76,78)**
		1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	149.350.000,00	643.167.000,00	(493.817.000,00)	**(76,78)**
4	**(A)**		**Belanja Modal Jaringan**	**0,00**	**869.800.000,00**	**(869.800.000,00)**	**(100,00)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**0,00**	**869.800.000,00**	**(869.800.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	869.800.000,00	(869.800.000,00)	(100,00)
5	**(A)**		**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**3.081.747.295.756,45**	**1.848.412.488.655,00**	**1.233.334.807.101,45**	**66,72**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	8.338.136.101,00	8.536.351.315,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.488.940.328,00 dengan realisasi senilai Rp8.338.136.101,00 atau 98,22%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**8.488.940.328,00**	**8.338.136.101,00**	**98,21**
1	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**1.758.481.000,00**	**1.695.729.650,00**	**96,43**
A	**Jumlah A (1 s/d 8)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**1.705.309.000,00**	**1.643.729.650,00**	**96,39**
		1	Belanja Modal Buku Umum	1.704.419.000,00	1.643.729.650,00	96,44
		2	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	890.000,00	0,00	0,00
		7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**53.172.000,00**	**52.000.000,00**	**97,80**
		1	Belanja Modal Audio Visual	53.172.000,00	52.000.000,00	97,80
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Musik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**(A+B)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**5.013.000,00**	**5.013.000,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**5.013.000,00**	**5.013.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2024		%
				Anggaran	Realisasi	
4	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00
5	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**6.638.885.578,00**	**6.550.832.701,00**	**98,67**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**6.638.885.578,00**	**6.550.832.701,00**	**98,67**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.638.885.578,00	6.550.832.701,00	98,67
6	**A**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**86.560.750,00**	**86.560.750,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**	1	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS**	**86.560.750,00**	**86.560.750,00**	**100,00**
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	86.560.750,00	86.560.750,00	100,00
			Jumlah	**8.488.940.328,00**	**8.338.136.101,00**	**98,22**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.488.940.328,00 mengalami **penurunan** senilai Rp198.215.214,00 atau 2,32% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.351.315,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
				2024	2023		
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**8.338.136.101,00**	**8.536.351.315,00**	**(284.775.964,00)**	**(2,32)**
1	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**1.695.729.650,00**	**2.076.913.704,00**	**(381.184.054,00)**	**(18,35)**
A	**Jumlah A (1 s/d 8)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**1.643.729.650,00**	**2.019.913.704,00**	**(376.184.054,00)**	**(18,62)**
		1	Belanja Modal Buku Umum	1.643.729.650,00	1.569.903.704,00	73.825.946,00	4,70
		2	Belanja Modal Buku Agama	0,00	9.200.000,00	(9.200.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	104.000.000,00	(104.000.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	46.640.000,00	(46.640.000,00)	(100,00)
		5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	25.760.000,00	(25.760.000,00)	(100,00)
		6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	111.000.000,00	(111.000.000,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
				2024	2023		
		7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	57.300.000,00	(57.300.000,00)	(100,00)
		8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	96.110.000,00	(96.110.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**52.000.000,00**	**20.000.000,00**	**32.000.000,00**	**160,00**
		1	Belanja Modal Audio Visual	52.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00	160,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Musik**	**0,00**	**37.000.000,00**	**(37.000.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Musik Lainnya	0,00	37.000.000,00	(37.000.000,00)	(100,00)
2	**(A+B)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**5.013.000,00**	**108.577.366,00**	**(103.564.366,00)**	**(95,38)**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**5.013.000,00**	**13.956.991,00**	**(8.943.991,00)**	**(64,08)**
		1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	7.832.000,00	(7.832.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.013.000,00	6.124.991,00	(1.111.991,00)	(18,15)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan**	**0,00**	**94.620.375,00**	**(94.620.375,00)**	(100,00)
		1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	64.560.375,00	(64.560.375,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	17.528.000,00	(17.528.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	12.532.000,00	(12.532.000,00)	(100,00)
3	**A**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**0,00**	**80.247.591,00**	**(80.247.591,00)**	**(100,00)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**0,00**	**80.247.591,00**	**(80.247.591,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	80.247.591,00	(80.247.591,00)	(100,00)
4	**A**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**2.134.444.956,00**	**(2.134.444.956,00)**	**(100,00)**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**2.134.444.956,00**	**(2.134.444.956,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Software	0,00	591.240.506,00	(591.240.506,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Kajian	0,00	1.543.204.450,00	(1.543.204.450,00)	(100,00)
5	**A**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**6.550.832.701,00**	**4.136.167.698,00**	**2.414.665.003,00**	**58,38**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**6.550.832.701,00**	**4.136.167.698,00**	**2.414.665.003,00**	**58,38**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.550.832.701,00	4.136.167.698,00	2.414.665.003,00	58,38

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
				2024	2023		
6	A		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**86.560.750,00**	**0,00**	**86.560.750,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**	1	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS**	**86.560.750,00**	**0,00**	**86.560.750,00**	**0,00**
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	86.560.750,00	0,00	**86.560.750,00**	0,00
			Jumlah	**8.338.136.101,00**	**8.536.351.315,00**	**(198.215.214,00)**	**(2,32)**

Dari tabel diatas tidak tercapainya Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya disebabkan keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Modal Aset Lainnya	4.676.717.909,00	0,00

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.588.341.350,00 dengam realisasi senilai Rp4.676.717.909,00 atau 83,69%. Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	1.579.950.000,00	1.276.007.500,00	80,76
2	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian**	4.008.391.350,00	3.400.710.409,00	84,84
	Jumlah	**5.588.341.350,00**	**4.676.717.909,00**	**83,69**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.676.717.909,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.676.717.909,00 atau 100% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.62 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	1.276.007.500,00	0,00	1.276.007.500,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	3.400.710.409,00	0,00	3.400.710.409,00	0,00
	Jumlah	**4.676.717.909,00**	**0,00**	**4.676.717.909,00**	**0,00**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2024	Tahun 2023
	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 senilai Rp22.640.327.875,00 dengan realisasi senilai Rp5.774.799.583,00 atau 25,51% . Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Belanja Tidak Terduga**	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51
	Jumlah	**22.640.327.875,00**	**5.774.799.583,00**	**25,51**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.774.799.583,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.947.962.268,00 atau 216,11% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.826.837.315,00. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.64 Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Belanja Tidak Terduga**	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
	Jumlah	**5.774.799.583,00**	**1.826.837.315,00**	**3.947.962.268,00**	**216,11**

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah.

5.1.2.4. Belanja Transfer

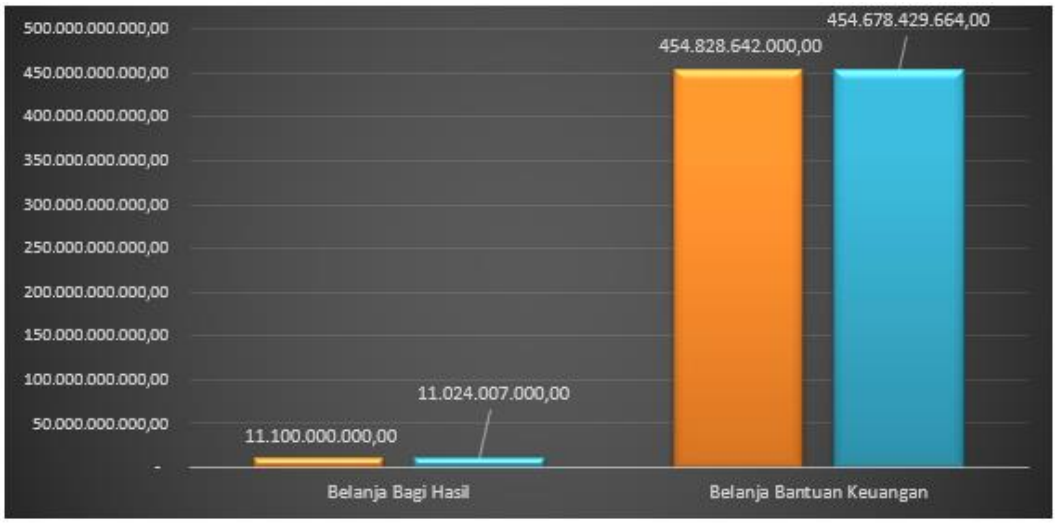
Belanja Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
	465.702.436.664,00	441.881.227.088,00

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp465.928.642.000,00 dengan realisasi senilai Rp465.702.436.664,00 atau 99,95%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Belanja Bagi Hasil**	**11.100.000.000,00**	**11.024.007.000,00**	**99,32**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.600.000.000,00	9.538.723.000,00	99,36
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.500.000.000,00	1.485.284.000,00	99,02
2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**454.828.642.000,00**	**454.678.429.664,00**	**99,97**
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.473.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	454.696.169.000,00	454.678.429.664,00	100,00
	Jumlah	**465.928.642.000,00**	**465.702.436.664,00**	**99,95**



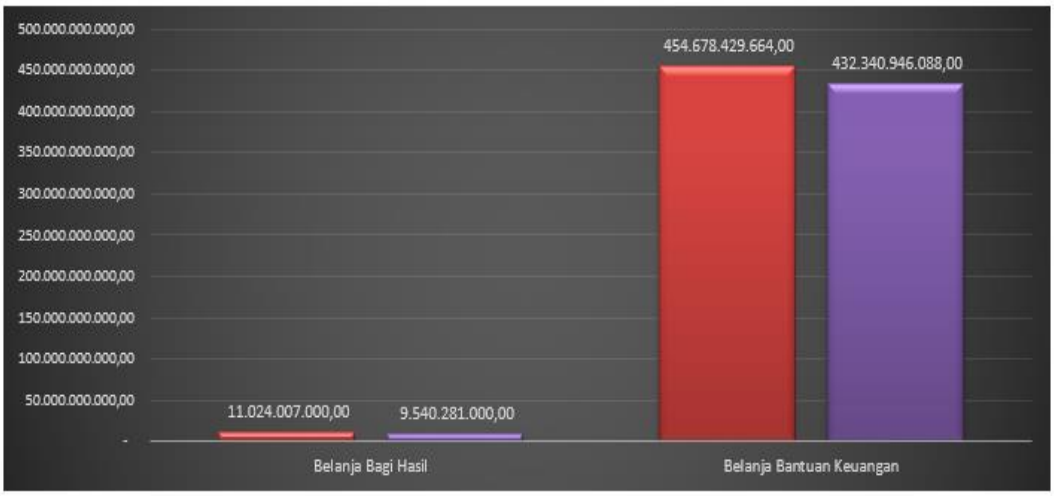
Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp465.702.436.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp23.821.209.576,00 atau 162,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan senilai Rp441.881.227.088,00. Rincian Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.66 Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan penurunan	%
1	**Belanja Bagi Hasil**	**11.024.007.000,00**	**9.540.281.000,00**	**1.483.726.000,00**	**15,55**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.538.723.000,00	8.447.633.000,00	1.091.090.000,00	88,56
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.485.284.000,00	1.092.648.000,00	392.636.000,00	73,56
2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**454.678.429.664,00**	**432.340.946.088,00**	**22.337.483.576,00**	**0,59**
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	429.640.946.088,00	(429.640.946.088,00)	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	454.678.429.664,00	2.700.000.000,00	451.978.429.664,00	0,59
	Jumlah	**465.702.436.664,00**	**441.881.227.088,00**	**23.821.209.576,00**	**5,39**



Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Antar Pemda Kab/Kota	Tahun 2024	Tahun 2023
	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan transfer kepada Pemerintahan Desa sebagai Bantuan Keuangan pendapatan pajak daerah. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp11.100.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp11.024.007.000,00 atau 99,32%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%.
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Bagi Hasil	**11.100.000.000,00**	**11.024.007.000,00**	**99,32**
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.600.000.000,00	9.538.723.000,00	99,36
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.500.000.000,00	1.485.284.000,00	99,02
	Jumlah	**11.100.000.000,00**	**11.024.007.000,00**	**99,32**

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp11.024.007.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.726.000,00 atau 15,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan senilai Rp9.540.281.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan penurunan	%.
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**11.024.007.000,00**	**9.540.281.000,00**	**1.483.726.000,00**	**15,55**
1	Belanja Bantuan Keuangan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.538.723.000,00	8.447.633.000,00	1.091.090.000,00	12,92
2	Belanja Bantuan Keuangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.485.284.000,00	1.092.648.000,00	392.636.000,00	35,93
	Jumlah	**11.024.007.000,00**	**9.540.281.000,00**	**1.483.726.000,00**	**15,55**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

	Tahun 2024	Tahun 2023
Bantuan Keuangan Pemprov	454.678.429.664,00	432.340.946.088,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp454.828.642.000,00 dengan realisasi senilai Rp454.678.429.664,00 atau 99,97% . Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Bantuan Keuangan	**454.828.642.000,00**	**454.678.429.664,00**	**99,97**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	132.473.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	454.696.169.000,00	454.678.429.664,00	100,00
	Jumlah	**454.828.642.000,00**	**454.678.429.664,00**	**99,97**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp454.678.429.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp22.337.483.576,00 atau 5,17% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan senilai Rp432.340.946.088,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.70 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
	Belanja Bantuan Keuangan	**454.678.429.664,00**	**432.340.946.088,00**	**22.337.483.576,00**	**5,17**
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	454.678.429.664,00	432.340.946.088,00	22.337.483.576,00	5,17
	Jumlah	**454.678.429.664,00**	**432.340.946.088,00**	**22.337.483.576,00**	**5,17**

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja. Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran *Surplus/Defisit* Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp891.211.172.162,00 dengan realisasi senilai Rp217.780.129.067,76 atau 24,44% , dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024		%.
		Anggaran	Realisasi	
1	SURPLUS / DEFISIT	(891.211.172.162,00)	(217.780.129.067,76)	24,44
	Jumlah	**(891.211.172.162,00)**	**(217.780.129.067,76)**	**24,44**

Realisasi *surplus/defisit* Tahun Anggaran 2024 senilai Rp217.780.129.067,76 mengalami **penurunan** senilai Rp310.563.435.978,28 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp92.783.306.910,52, dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.72 Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan penurunan	%
1	SURPLUS / DEFISIT	(217.780.129.067,76)	92.783.306.910,52	(310.563.435.978,28)	(334,72)
	Jumlah	**(217.780.129.067,76)**	**92.783.306.910,52**	**(310.563.435.978,28)**	**(334,72)**

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Berau mengalami **defisit** senilai Rp217.780.129.067,76 dengan demikian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 lebih besar dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	893.211.172.162,04	802.427.865.251,52

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp893.211.172.162,00 dengan realisasi senilai Rp893.211.172.162,04 atau 100,00%. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penggunaan SILPA	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00
	Jumlah	**893.211.172.162,00**	**893.211.172.162,04**	**100,00**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp893.211.172.162,04 mengalami **kenaikan** senilai Rp90.783.306.910,52 atau 11,31% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan senilai Rp802.427.865.251,52. Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.74 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Penggunaan SILPA	893.211.172.162,04	802.427.865.251,52	90.783.306.910,52	11,31
	Jumlah	**893.211.172.162,04**	**802.427.865.251,52**	**90.783.306.910,52**	**11,31**

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100,00%. Tabel rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.000.000.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.000.000.000,00 atau 0,00%, dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	kenaikan penurunan	%
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Bhakti Praja. Ketentuan besarnya nilai penyertaan modal daerah pada setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun Anggaran 2024 senilai Rp673.431.043.094,28 merupakan selisih lebih antara Surplus dan Defisit dengan Pembiayaan Netto.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal SiLPA/SiKPA. Koreksi SAL Akhir dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2024. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 senilai Rp893.211.172.162,04 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan senilai Rp893.211.172.162,04 merupakan penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2023 pada Tahun Anggaran 2024.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan senilai Rp673.431.043.094,28.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp673.431.043.094,28 . Saldo akhir mengalami **penurunan** senilai Rp219.780.129.067,76 atau 24,61% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Tahun Anggaan 2023 senilai Rp893.211.172.162,04.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.77 Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET	**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**	**1.814.001.285.391,40**	**14,12**
KEWAJIBAN	**45.378.771.461,24**	**10.054.161.356,28**	**35.324.610.104,96**	**351,34**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.378.771.461,24	10.054.161.356,28	35.324.610.104,96	351,34
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	**14.612.014.016.886,86**	**12.833.337.341.600,50**	**1.778.676.675.286,23**	**13,86**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**	**1.814.001.285.391,40**	**14,12**

5.3.1 Aset

Posisi Keuangan Aset per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset senilai Rp14.657.392.788.348,10 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.814.001.285.391,40 atau 14,12% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp12.843.391.502.956,78 yang dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.78 Nilai Aset
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset	14.657.392.788.348,10	12.843.391.502.956,78	1.814.001.285.391,40	14,12
Jumlah	**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**	**1.814.001.285.391,40**	**14,12**

Total Aset Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.657.392.788.348,10 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.814.001.285.391,40 dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp12.843.391.502.956,78 atau 14,12%. Total Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79 Aset Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

	ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan (penurunan)	%
a.	Aset Lancar	1.061.460.610.782,74	1.211.713.875.399,74	(150.253.264.617,01)	(12,40)
b.	Investasi Jangka Panjang	596.513.621.017,22	618.232.967.990,13	(21.719.346.972,91)	(3,51)
c.	Aset Tetap	12.135.472.037.536,90	8.972.045.745.570,96	3.163.426.291.965,93	35,26
d.	Properti Investasi	276.251.850.254,00	283.581.494.898,00	(7.329.644.644,00)	(2,58)
e	Aset lainnya	587.694.668.757,21	1.757.817.419.097,95	(1.170.122.750.340,74)	(66,57)
	Jumlah	**14.657.392.788.348,10**	**12.843.391.502.956,78**	**1.814.001.285.391,37**	**14,12**

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	1.061.460.610.782,74	1.211.713.875.399,74

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 senilai Rp1.061.460.610.782,74 mengalami **penurunan** senilai Rp150.253.264.617,01 atau 12,40% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.211.713.875.399,74. Saldo Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.80 Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	ASET LANCAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas dan Setara Kas	673.454.617.561,28	893.248.455.797,04	(219.793.838.235,76)	(24,61)
2	Piutang Pajak Daerah	45.578.464.831,41	44.170.326.364,91	1.408.138.466,50	3,19
3	Piutang Retribusi Daerah	4.807.662.932,00	3.940.339.164,00	867.323.768,00	22,01
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	55.372.169,00	(55.372.169,00)	(100,00)
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.728.060.808,80	27.697.212.757,15	3.030.848.051,65	10,94
6	Piutang Transfer Antar Daerah	81.333.530.845,00	61.090.578.845,00	20.242.952.000,00	33,14
7	Piutang Lainnya	0,00	47.413.035.540,00	(47.413.035.540,00)	(100,00)
8	Penyisihan Piutang	(48.053.411.608,77)	(47.759.899.075,95)	(293.512.532,82)	0,61
9	Beban Dibayar Dimuka	363.442.949,18	286.547.977,50	76.894.971,68	26,83
10	Persediaan	273.248.242.463,84	181.571.905.861,09	91.676.336.602,75	50,49
	Jumlah	**1.061.460.610.782,74**	**1.211.713.875.399,74**	**(150.253.264.617,01)**	**(12,40)**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas dan Setara Kas	673.454.617.561,28	893.248.455.797,04

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp673.454.617.561,28 mengalami **penurunan** senilai Rp219.793.838.235,76 atau 24,61% dibandingkan dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp893.248.455.797,04. Rincian jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.81 Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	KAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	644.036.295.948,04	821.259.740.624,13	(177.223.444.676,09)	(21,58)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	65.628.500,00	65.356.000,00	272.500,00	0,42
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	33.906.867,00	0,00	33.906.867,00	0,00
4	Kas di BLUD	24.859.854.694,32	67.648.687.298,19	(42.788.832.603,87)	(63,25)
5	Kas Dana BOS	742.867.460,16	1.226.486.066,16	(483.618.606,00)	(39,43)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	404.086.306,76	1.651.431.753,56	(1.247.345.446,80)	(75,53)
7	Kas Lainnya	3.311.977.785,00	1.396.754.055,00	1.915.223.730,00	137,12
8	Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**673.454.617.561,28**	**893.248.455.797,04**	**(219.793.838.235,76)**	**(24,61)**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Kas Daerah	644.036.295.948,04	821.259.740.624,13

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp644.036.295.948,04 mengalami **penurunan** senilai Rp177.223.444.676,09 atau 21,58% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp821.259.740.624,13. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari rekening giro dan deposito pada Bank BPD Kaltimtara, giro dan deposito pada Bank BNI dan deposito padaBank Danamon, serta deposito pada Bank BRI. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.82 Rekening Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

	KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
	BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb				
1	Giro -0061300014	644.036.766.638,04	821.259.740.624,13	(177.222.973.986,09)	(21,58)
2	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BPD	**644.036.766.638,04**	**821.259.740.624,13**	**(177.222.973.986,09)**	**(21,58)**
	BNI 1946				
1	Giro- 02104813388	0,00	0,00	0,00	0,00

	KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
2	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BRI				
1	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rekening Titipan Bunga Deposito-0213.0100940.99.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BRI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bank Danamon				
1	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Danamon	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo Bank keseluruhan	**644.036.766.638,04**	**821.259.740.624,13**	**(177.222.973.986,09)**	**(21,58)**
	Koreksi kesalahan Bank/ Bank kurang posting	470.690,00	0,00	470.690,00	0,00
	Saldo Kas Daerah	**644.036.295.948,04**	**821.259.740.624,13**	**(177.223.444.676,09)**	**(21,58)**

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Rekening Giro

Penggunaan masing-masing rekening giro tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Rekening giro Nomor – 0061300014 pada BPD Kaltimtara merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan PAD serta transfer dari provinsi dan dana pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 senilai Rp644.036.766.638,04 mengalami **penurunan** senilai Rp177.222.973.986,09 atau 21,58% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp821.259.740.624,13;

b) Rekening Giro Nomor – 021048133388 pada BNI Cabang Berau merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Berau, menampung Pajak Daerah BPHTB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 tidak ada perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00;

2) Rekening Deposito

Rekening Deposito adalah rekening Pemerintah Kabupaten Berau yang penempatan rekeningnya pada empat Bank, dengan rincian:

a) Penempatan deposito pada BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan

kas. Nominal deposito per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00;

b) Penempatan deposito pada BNI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00;

c) Penempatan deposito pada BRI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00; selain itu juga terdapat saldo Titipan Bunga Deposito (0213.0100940.99.8) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

d) Penempatan deposito pada Bank Danamon Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Dari saldo Bank keseluruhan per 31 Desember 2024 terdapat koreksi kesalahan posting Bank BPD senilai Rp470.690,00 yaitu nilai penerimaan retribusi perizinan yang kurang posting sehingga total Saldo Kas Daerah senilai Rp644.036.295.948,04 dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp821.259.740.624,13.

Disamping itu, terdapat sisa dana alokasi khusus non fisik senilai Rp4.935.581.441,00 yang dibatasi penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS	953.842.177,00
2	DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)	492.063.989,00
3	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM)	24.845.000,00
4	DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (PK2SIKM)	788.695.279,00
5	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL (PK2UMK)	15.984.757,00
6	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN (PARIWISATA)	424.321.650,00
7	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU ASN DAERAH	1.295.845.784,00
8	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU ASN DAERAH	5.732.400,00
9	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU ASN DAERAH	934.250.405,00
	JUMLAH	**4.935.581.441,00**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	33.906.867,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp33.906.867,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp33.906.867,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	33.906.867,00	0,00	33.906.867,00	0,00
Jumlah		**33.906.867,00**	**0,00**	**33.906.867,00**	**0,00**

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	65.628.500,00	65.356.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan kas akhir tahun yang masih berada pada Bendahara Penerimaan OPD. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 ada pada Dinas Kesehatan berupa penerimaan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp65.628.500,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp272.500,00 atau 0,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp65.356.000,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.85 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Dinas Kesehatan (Retribusi pelayanan)	65.628.500,00	65.356.000,00	272.500,00	0,42
Jumlah		**65.628.500,00**	**65.356.000,00**	**272.500,00**	**0,42**

5.3.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	24.859.854.694,32	67.648.687.298,19

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Abdul Rivai per 31 Desember 2024 senilai Rp24.859.854.694,32,19 mengalami **penurunan** senilai Rp42.788.832.603,87 atau 63,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp67.648.687.298,19. Rincian saldo Kas di BLUD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.86 Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
	Kas BLUD				
1	Kas Tunai dan Surat berharga	33.355.993,00	52.582.279,00	(19.226.286,00)	(36,56)
2	BPD 0061435697	24.823.318.249,32	61.668.808.196,19	(36.845.489.946,87)	(59,75)
3	BNI 0360133440	3.180.452,00	1.927.296.823,00	(1.924.116.371,00)	(99,83)
4	Deposito	0,00	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**24.859.854.694,32**	**67.648.687.298,19**	**(42.788.832.603,87)**	**(63,25)**

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara BOS	742.867.460,16	1.226.486.066,16

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 senilai Rp742.867.460,16 mengalami **penurunan** senilai Rp1.226.486.066,16 atau 39,43% dibandingkan Per 31 Desember 2023 senilai Rp1.226.486.066,16.

Saldo Kas di Bendahara BOS adalah dana yang masih berada ditangan Bendahara Dana BOS pada TK, SD dan SLTP yang merupakan dana non APBD yang disalurkan langsung ke sekolah. Rincian saldo Kas di Bendahara BOS disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.87 Rekening Kas di Bendahara BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas di Bendahara BOS	742.867.460,16	1.226.486.066,16	(483.618.606,00)	(39,43)
	Jumlah	**742.867.460,16**	**1.226.486.066,16**	**(483.618.606,00)**	**(39,43)**

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara FKTP	404.086.306,76	1.651.431.753,56

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2024 senilai Rp404.086.306,76 mengalami **penurunan** senilai Rp1.247.345.446,80 atau 75,53% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.651.431.753,56. Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rekening Kas di Bendahara FKTP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Unit Kerja FKTP JKN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Puskesmas Kel. Bugis	128.905,67	83.144.581,67	(83.015.676,00)	(99,84)
2	Puskesmas Tanjung Redeb	27.480.426,65	195.358.462,65	(167.878.036,00)	(85,93)
3	Puskesmas Teluk Bayur	0,00	122.517.730,68	(122.517.730,68)	(100,00)
4	Puskesmas Labanan	0,00	162.627.010,12	(162.627.010,12)	(100,00)
5	Puskesmas Sambaliung	1.862.930,20	202.502.746,20	(200.639.816,00)	(99,08)
6	Puskesmas Suaran	50.000,77	19.631.432,77	(19.581.432,00)	(99,75)
7	Puskesmas GN. Tabur	578.361,31	367.262.041,31	(366.683.680,00)	(99,84)
8	Puskesmas Merancang Ulu	483.871,46	26.775.455,46	(26.291.584,00)	(98,19)
9	Puskesmas Tanjung Batu	16.683.181,54	74.387.824,84	(57.704.643,30)	(77,57)
10	Puskesmas Pl. Derawan	99.315,74	5.096.557,54	(4.997.241,80)	(98,05)
11	Puskesmas Maratua	880.178,89	25.154.159,89	(24.273.981,00)	(96,50)
12	Puskesmas Tubaan	4.976.048,19	23.974.734,19	(18.998.686,00)	(79,24)
13	Puskesmas Biatan Lempake	177.972.035,24	6.104.732,94	171.867.302,30	2.815,31
14	Puskesmas Talisayan	9.376.233,19	239.990.135,19	(230.613.902,00)	(96,09)
15	Puskesmas Batu Putih	49.007.747,21	628.018,21	48.379.729,00	7.703,56
16	Puskesmas Biduk-Biduk	8.759.124,01	64.220.391,01	(55.461.267,00)	(86,36)
17	Puskesmas Kelay	13.808.432,38	2.344.689,38	11.463.743,00	488,92
18	Puskesmas Tepian Buah	56.461.862,23	23.438.754,48	33.023.107,75	140,89
19	Puskesmas Long La'ai	10.674.200,08	6.177.521,08	4.496.679,00	72,79
20	Merapun	15.575.452,00	78.973,95	15.496.478,05	19.622,27
21	Long Boy	9.228.000,00	15.800,00	9.212.200,00	58.305,06
Jumlah		**404.086.306,76**	**1.651.431.753,56**	**(1.247.345.446,80)**	**(75,53)**

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya	3.311.977.785,00	1.396.754.055,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp3.311.977.785,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.915.223.730,00 atau 137,12% dibandingkan

per 31 Desember 2023 senilai Rp1.396.754.055,00. Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya pada Silpa Dana BOK Puskesmas senilai Rp3.288.403.318,00; Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp23.574.467,00 (BAPENDA senilai Rp1.084.473,00, DPUPR senilai Rp19.463.959,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.006.947,00, Dispusip senilai Rp571.573,00); Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp1.447.515,00. Rincian saldo Kas Lainnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.89 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas Lainnya	3.311.977.785,00	1.396.754.055,00	1.915.223.730,00	137,12
	Jumlah	**3.311.977.785,00**	**1.396.754.055,00**	**1.915.223.730,00**	**137,12**

Dengan rincian tabel SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.90 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	KETERANGAN	JUMLAH SILPA BOK
1	Batu Putih	222.894.169,00
2	Biatan Lempake	73.935.128,00
3	Biduk-Biduk	273.164.102,00
4	Gunung Tabur	210.624.728,00
5	Kampung Bugis	88.031.018,00
6	Muara Lesan/Kelay	125.307.148,00
7	Labanan	175.452.141,00
8	Long Boy	117.361.097,00
9	Long Laai	77.690.280,00
10	Maratua	215.225.711,00
11	Merancang Ulu	186.585.055,00
12	Merapun	121.857.912,00
13	Pulau Derawan	108.878.979,00
14	Sambaliung	54.629.073,00
15	Suaran	157.591.751,00
16	Talisayan	269.306.168,00
17	Tanjung Batu	135.633.810,00
18	Tanjung Redeb	109.995.472,00
19	Teluk Bayur	148.977.482,00
20	Tepian Buah/Segah	234.395.067,00
21	Tubaan	180.867.027,00

(dalam rupiah)

NO	KETERANGAN	JUMLAH SILPA BOK
SUB TOTAL		**3.288.403.318,00**
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	**JUMLAH**
22	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.084.473,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**JUMLAH**
23	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.463.959,00
	DINAS KESEHATAN	**JUMLAH**
24	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.006.947,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**JUMLAH**
25	Pendapatan Diterima Dimuka	571.573,00
	RSUD	**JUMLAH**
26	Pendapatan Diterima Dimuka	1.447.515,00
TOTAL		**3.311.977.785,00**

5.3.1.1.1.8 Setara Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Setara Kas	0,00	0,00

Setara Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00. Tabel rincian Setara Kas disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.91 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.1.2 Piutang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang	162.447.719.417,21	184.366.864.840,06

Piutang Daerah merupakan hak pemerintah Kabupaten Berau berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 senilai Rp162.447.719.417,21 mengalami **penurunan** senilai Rp21.919.145.422,85 atau 11,89% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai

Rp184.366.864.840,06. Rincian Saldo Piutang Pendapatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.92 Piutang Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	JENIS PIUTANG	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) TA 2023	Penambahan Piutang Baru Selama Tahun 2024	Pembayaran/ Penghapusan Piutang Selama Tahun 2024	Nilai Piutang Brutto (Sebelum Penyisihan) TA 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Daerah	44.170.326.364,91	9.864.755.861,50	8.456.617.395,00	45.578.464.831,41	1.408.138.466,50	3,19
2	Piutang Retribusi Daerah	3.940.339.164,00	2.401.771.515,00	1.534.447.747,00	4.807.662.932,00	867.323.768,00	22,01
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.372.169,00	0,00	55.372.169,00	0,00	(55.372.169,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.697.212.757,15	14.873.480.852,66	11.842.632.801,01	30.728.060.808,80	3.030.848.051,65	10,94
5	Piutang Transfer Antar Daerah	61.090.578.845,00	39.693.641.000,00	19.450.689.000,00	81.333.530.845,00	20.242.952.000,00	33,14
6	Piutang Lainnya	47.413.035.540,00	0,00	47.413.035.540,00	0,00	(47.413.035.540,00)	(100,00)
	Jumlah	**184.366.864.840,06**	**66.833.649.229,16**	**88.752.794.652,01**	**162.447.719.417,21**	**(21.919.145.422,85)**	**(11,89)**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Pajak	45.578.464.831,41	44.170.326.364,91

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp45.578.464.831,41 dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp44.170.326.364,91 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.408.138.466,50 atau 3,19%. Terkait *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak daerah adalah selain melakukan penagihan rutin dengan menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak Bapenda juga melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan selaku pengacara negara dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah. Disamping hal tersebut *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak adalah memberikan keringanan pembayaran piutang dengan cara diangsur dengan membuat perjanjian pembayaran secara angsuran kepada wajib pajak yang menunggak. Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.93 Piutang Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang 31 Desember 2023	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang/ Koreksi	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	852.718.819,97	173.035.804,50	210.538.987,00	815.215.637,47	(37.503.182,50)	(4,40)
2	Pajak Restoran	3.918.276.795,00	2.745.239.805,00	3.339.642.003,00	3.323.874.597,00	(594.402.198,00)	(15,17)
3	Pajak Hiburan	500.000,00	56.663.390,00		57.163.390,00	56.663.390,00	11.332,68
4	Pajak Reklame	91.281.747,00	21.842.080,00	28.396.813,00	84.727.014,00	(6.554.733,00)	(7,18)
5	Pajak Penerangan Jalan	3.104.346.968,94	2.729.548.936,00	3.099.237.578,00	2.734.658.326,94	(369.688.642,00)	(11,91)
6	Pajak Parkir	33.014.769,00	495.400,00	32.381.769,00	1.128.400,00	(31.886.369,00)	(96,58)
7	Pajak Air Tanah	976.648,00	0,00	0,00	976.648,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang 31 Desember 2023	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang/ Koreksi	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Pajak Sarang Burung Walet	504.596.000,00	0,00	47.787.000,00	456.809.000,00	(47.787.000,00)	(9,47)
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.297.692.434,00	2.576.000,00	30.562.500,00	1.269.705.934,00	(27.986.500,00)	(2,16)
10	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	34.366.922.183,00	4.135.354.446,00	1.668.070.745,00	36.834.205.884,00	2.467.283.701,00	7,18
Jumlah		**44.170.326.364,91**	**9.864.755.861,50**	**8.456.617.395,00**	**45.578.464.831,41**	**1.408.138.466,50**	**3,19**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Retribusi	4.807.662.932,00	3.940.339.164,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak pemerintah daerah melalui OPD terkait, yang belum dilunasi sampai dengan akhir per 31 Desember oleh Wajib Retribusi Daerah. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp4.807.662.932,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp867.323.768,00 atau 22,01% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.940.339.164,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.94 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2023	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	3.512.453.064,00	2.400.269.515,00	1.534.177.747,00	4.378.544.832,00	866.091.768,00	24,66
2	Badan Pendapatan Daerah	427.886.100,00	990.000,00	270.000,00	428.606.100,00	720.000,00	0,17
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00
Jumlah		**3.940.339.164,00**	**2.401.771.515,00**	**1.534.447.747,00**	**4.807.662.932,00**	**867.323.768,00**	**22,01**

Piutang Retribusi Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan yang terdiri dari Retribusi Pasar Sanggam Adji Dilayas dan Retribusi Pasar Teluk serta Kios 4x6 dengan jumlah total Rp4.378.544.832,00 terdiri dari Kios Pasar Sanggam Adjidilayas senilai Rp2.079.842.748,00, Los Pasar Sanggam Adjidilayas senilai Rp1.243.007.084,00, Kios Pasar Teluk Bayur senilai Rp2.975.000,00 Los Pasar Teluk Bayur senilai Rp 11.820.000,00 dan Kios 4x6 senilai Rp1.040.900.000,00. Terkhusus untuk Kios dan Los Pasar Sanggam Adjidilayas senilai Rp3.332.849.832,00 masih belum diyakini kebenarannya karena setelah dilakukan perhitungan kembali hanya senilai Rp1.880.437.250,00 yang terdapat pada penjelasan ***Lampiran 3***.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	55.372.169,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau atas piutang dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp55.372.169,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp55.372.169,00. Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.95 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Piutang 31 Desember 2023	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau (Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD)	55.372.169,00	0,00	55.372.169,00	0,00	(55.372.169,00)	(100,00)
	Jumlah	**55.372.169,00**	**0,00**	**55.372.169,00**	**0,00**	**(55.372.169,00)**	**(100,00)**

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	30.728.060.808,80	27.697.212.757,15

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau dari pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp30.728.060.808,80 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.030.848.051,65 atau 10,94% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp27.697.212.757,15. Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.96 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lainnya	Piutang 31 Desember 2023	Koreksi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang BLUD	9.796.628.345,19	1.130.027.345,60	10.926.655.690,79	12.851.135.332,00	9.428.474.957,00	14.349.316.065,79	4.552.687.720,60	46,47
2	Piutang Angsuran Rumah Dinas	3.095.970.699,02		3.095.970.699,02	0,00	155.165.021,00	2.940.805.678,02	(155.165.021,00)	(5,01)

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lainnya	Piutang 31 Desember 2023	Koreksi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Piutang Denda Pajak	12.590.595.470,30	407.699.189,54	12.998.294.659,84	409.063.985,52	523.322.358,40	12.884.036.286,96	293.440.816,66	2,33
4	Piutang Denda Retribusi	1.873.376.242,64	(1.700.747.778,61)	172.628.464,03	0,00	29.274.686,00	143.353.778,03	(1.730.022.464,61)	(92,35)
5	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	340.642.000,00	0,00	340.642.000,00	75.555.000,00	5.648.000,00	410.549.000,00	69.907.000,00	20,52
	Jumlah	**27.697.212.757,15**	**(163.021.243,47)**	**27.534.191.513,68**	**13.335.754.317,52**	**10.141.885.022,40**	**30.728.060.808,80**	**3.030.848.051,65**	**10,94**

Rincian Piutang Lainnya menurut OPD pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.97 Piutang Lainnya Menurut OPD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2023	Koreksi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**RSUD A. Rivai**								
	Piutang BLUD	9.796.628.345,19	1.130.027.345,60	10.926.655.690,79	12.851.135.332,00	9.428.474.957,00	14.349.316.065,79	4.552.687.720,60	46,47
2	**Badan Pendapatan Daerah**								
	Piutang Angsuran Rumah Dinas	3.095.970.699,02	0,00	3.095.970.699,02	0,00	155.165.021,00	2.940.805.678,02	(155.165.021,00)	(5,01)
	Piutang Denda Pajak	12.590.595.470,30	407.699.189,54	12.998.294.659,84	409.063.985,52	523.322.358,40	12.884.036.286,96	293.440.816,66	2,33
3	**Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan**								
	Piutang Denda Retribusi	1.873.376.242,64	(1.700.747.778,61)	172.628.464,03	0,00	29.274.686,00	143.353.778,03	(1.730.022.464,61)	(92,35)
4	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	340.642.000,00	0,00	340.642.000,00	75.555.000,00	5.648.000,00	410.549.000,00	69.907.000,00	0,00
	Jumlah	**27.697.212.757,15**	**(163.021.243,47)**	**27.534.191.513,68**	**13.335.754.317,52**	**10.141.885.022,40**	**30.728.060.808,80**	**3.030.848.051,65**	**10,94**

Atas piutang lainnya tersebut nilai Piutang Angsuran Rumah Dinas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya akibat pencatatan nilai sisa Angsuran belum dapat di andalkan, surat perjanjian yang tidak lengkap, pembayaran tagihan tidak sesuai perjanjian, angsuran telah lunas namun belum didukung SK pelepasan, denda yang tidak dicatat sebagai piutang.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Transfer Antar Daerah	81.333.530.845,00	61.090.578.845,00

Piutang Transfer Antar Daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan nilai kurang salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/ kota se-Kalimantan Timur Tahun 2024. Piutang Transfer per 31 Desember 2024 senilai Rp81.333.530.845,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp20.242.952.000,00 atau 33,14% dibandingkan per 31

Desember 2023 senilai Rp61.090.578.845,00. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.98 Piutang Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.871.402.000,00	3.064.371.000,00	2.871.402.000,00	3.064.371.000,00	192.969.000,00	6,72
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.102.882.000,00	3.531.112.000,00	5.102.882.000,00	3.531.112.000,00	(1.571.770.000,00)	(30,80)
3	PBB-KB	53.013.027.845,00	33.030.658.000,00	11.373.138.000,00	74.670.547.845,00	21.657.520.000,00	40,85
4	AP	103.267.000,00	67.500.000,00	103.267.000,00	67.500.000,00	(35.767.000,00)	(34,64)
Jumlah		**61.090.578.845,00**	**39.693.641.000,00**	**19.450.689.000,00**	**81.333.530.845,00**	**20.242.952.000,00**	**33,14**

5.3.1.1.2.6 Piutang Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Lainnya	0,00	47.413.035.540,00

Piutang Lainnya merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau terhadap pihak ketiga diluar piutang pajak dan retribusi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 terjadi **penurunan** senilai Rp47.413.035.540,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp47.413.035.540,00 karena tidak ada realisasi. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.99 Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Lainnya	0,00	47.413.035.540,00	(47.413.035.540,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**47.413.035.540,00**	**(47.413.035.540,00)**	**(100,00)**

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang	(48.053.411.608,77)	(47.759.899.075,95)

Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Berau bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp48.049.755.338,26 mengalami **kenaikan** senilai Rp293.512.532,82 atau 0,61% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp47.759.899.075,95. Penyisihan Piutang pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.100 Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	PENYISIHAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Daerah	(30.562.122.695,37)	(29.456.030.906,85)	(1.106.091.788,52)	3,76
2	Piutang Retribusi Daerah	(3.799.601.299,13)	(3.626.937.784,92)	(172.663.514,21)	4,76
3	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	(13.691.687.614,27)	(14.676.930.384,18)	985.242.769,91	(6,71)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**(48.053.411.608,77)**	**(47.759.899.075,95)**	**(293.512.532,82)**	**0,61**

Rincian perhitungan penyisihan Piutang sesuai umur pada tabel berikut :

Tabel 5.101 Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
I	**Piutang Pajak daerah**		**9.733.908.252,00**	**3.101.407.297,00**	**5.079.673.716,00**	**27.663.475.566,41**	**45.578.464.831,41**
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		**48.669.541,26**	**310.140.729,70**	**2.539.836.858,00**	**27.663.475.566,41**	**30.562.122.695,37**
	Piutang Pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	9.733.908.252,00	3.101.407.297,00	5.079.673.716,00	27.663.475.566,41	45.578.464.831,41
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		48.669.541,26	310.140.729,70	2.539.836.858,00	27.663.475.566,41	30.562.122.695,37
II	**Piutang Retribusi Daerah**		**120.165.926,00**	**466.135.275,00**	**937.949.556,00**	**3.283.412.164,00**	**4.807.662.921,00**
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		**598.269,63**	**46.613.527,50**	**468.974.778,00**	**3.283.412.164,00**	**3.799.601.299,13**
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	990.000,00	427.616.100,00	428.606.100,00
	Penyisihan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	0,00	495.000,00	427.616.100,00	428.111.100,00
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha		2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	119.653.926,00	466.135.275,00	936.959.556,00	2.855.796.064,00	4.378.544.821,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		598.269,63	46.613.527,50	468.479.778,00	2.855.796.064,00	3.371.487.639,13
III	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**		**13.350.444.209,52**	**1.311.886.551,32**	**3.812.065.563,75**	**11.587.713.956,22**	**30.728.060.807,81**
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**66.752.221,05**	**131.188.655,13**	**1.906.032.781,87**	**11.587.713.956,22**	**13.691.687.614,27**
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD	0,00	62.647.584,00	1.318.117.102,82	894.090.464,20	2.274.855.151,02
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2024 yang belum disisihkan		0,00	0,00	0,00	0,00	665.950.527,00

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	6.264.758,40	659.058.551,41	894.090.464,20	1.559.413.774,01
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	BPKAD	75.555.000,00	196.262.000,00	138.732.000,00	0,00	410.549.000,00
	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		377.775,00	19.626.200,00	69.366.000,00	0,00	89.369.975,00
	Piutang Denda Pajak	Badan Pendapatan Daerah	409.063.985,52	961.606.550,32	1.756.525.889,02	9.756.839.860,86	12.884.036.285,72
	Penyisihan Piutang Denda Pajak		2.045.319,93	96.160.655,03	878.262.944,51	9.756.839.860,86	10.733.308.780,33
	Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	12.851.135.332,00	56.752.743,00	561.760.280,91	879.667.709,88	14.349.316.065,79
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		64.255.676,66	5.675.274,30	280.880.140,46	879.667.709,88	1.230.478.801,30
	Piutang Denda Retribusi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14.689.892,00	34.617.674,00	36.930.291,00	57.115.921,28	143.353.778,28
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi		73.449,46	3.461.767,40	18.465.145,50	57.115.921,28	79.116.283,64
IV	**Piutang Transfer Antara Daerah**		**81.333.530.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.333.530.845,00**
	Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Piutang Transfer Antara Daerah	BPKAD	81.333.530.845,00	0,00	0,00	0,00	81.333.530.845,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang		**104.538.049.232,52**	**4.879.429.123,32**	**9.829.688.835,75**	**42.534.601.686,63**	**162.447.719.405,22**
	Nilai Penyisihan		**116.022.591,94**	**487.942.912,33**	**4.914.844.417,88**	**42.534.601.686,63**	**48.053.411.608,77**

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	363.442.949,18	286.547.977,50

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2024 yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp363.442.949,18 mengalami **kenaikan** senilai Rp76.894.971,68 atau 26,83% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp286.547.977,50. Tabel rincian Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.102 Beban Dibayar Dimuka
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Dibayar Dimuka	363.442.949,18	286.547.977,50	76.894.971,68	26,83

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	Jumlah	**363.442.949,18**	**286.547.977,50**	**76.894.971,68**	**26,83**

Beban dibayar dimuka terdapat pada di beberapa SKPD yaitu :

a. Sekretariat DPRD

Atas pemeriksaan premi asuransi BMD dengan nilai SP2D senilai Rp148.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp33.249.315,07 dan sisa polis asuransi senilai Rp114.750.684,93.

b. Dinas Perikanan

Atas pemeriksaan premi asuransi nelayan dengan nilai SP2D sesuai surat Keputusan Bupati Berau Nomor 676 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 senilai Rp159.264.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp119.993.100,00 dan sisa polis asuransi senilai Rp39.270.900,00.

c. Sekretariat Daerah

Atas pemeriksaan terdapat belanja sewa asrama dan asuransi barang milik daerah senilai Rp209.421.364,25 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/644/VIII/Umum/2024 Tanggal 15 Agustus 2024. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000369/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2024 senilai Rp60.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp22.849.315,07 dan sisa polis asuransi senilai Rp37.150.684,93;
- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putra Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/876/XI/Umum/2024 Tanggal 29 Nopember 2024. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000650/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 senilai Rp61.700.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp5.071.232,88 dan sisa polis asuransi senilai Rp56.628.767,12;
- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Makasar dengan No surat Perjanjian 900/527/IX/Umum/2024 Tanggal 23 September 2024. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000427/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024 senilai Rp139.500.000,00,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp53.124.657,53 dan sisa polis asuransi senilai Rp86.375.342,47;
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Dengan No SPK 021/897/SPK/Um-/XII/2024 an. Rekanan PT Asuransi Jasa Indonesia Tanggal 2 Desember 2024.Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000816/LS/ Rp31.982.928,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp2.716.358,27 dan sisa polis asuransi senilai Rp29.266.569,73;

5.3.1.1.5 Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	273.248.242.463,84	181.571.905.861,09

Persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp273.248.242.463,84 mengalami **kenaikan** senilai Rp91.676.336.602,75 atau 50,49% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp181.571.905.861,09. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.103 Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Persediaan Bahan Habis Pakai**				
	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	443.425.600,00	25.441.900,00	417.983.700,00	0,00
	Persediaan Bahan Kimia	1.679.344.208,36	1.858.756.319,50	(179.412.111,14)	(9,65)
	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	2.377.000,00	777.000,00	1.600.000,00	205,92
	Persediaan Bahan Baku	48.581.970,00	49.174.816,00	(592.846,00)	(1,21)
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	594.094.500,00	221.500.800,00	372.593.700,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.663.460,00	13.230.000,00	8.433.460,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Gas	8.060.000,00	700.000,00	7.360.000,00	0,00
	Persediaan Bahan Lainnya	815.405.239,59	987.638.776,94	(172.233.537,35)	(17,44)
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	3.064.849.725,26	1.902.523.207,08	1.162.326.518,18	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	588.328.246,65	127.954.128,60	460.374.118,05	359,80
	Persediaan Alat Tulis Kantor	845.445.851,11	758.632.204,47	86.813.646,64	11,44
	Persediaan Kertas dan Cover	306.210.483,30	233.371.221,00	72.839.262,30	31,21
	Persediaan Bahan Cetak	835.286.400,00	620.769.000,00	214.517.400,00	34,56
	Persediaan Benda Pos	8.556.000,00	1.132.000,00	7.424.000,00	655,83
	Persediaan Bahan Komputer	204.356.600,00	136.018.100,00	68.338.500,00	0,00
	Persediaan Perabot Kantor	650.985.284,81	433.078.271,68	217.907.013,13	50,32
	Persediaan Alat Listrik	201.068.958,26	830.715.948,96	(629.646.990,70)	(75,80)
	Persediaan Perlengkapan Dinas	1.717.359.701,20	1.347.942.448,50	369.417.252,70	27,41
	Persediaan Suvenir/Cendera Mata	499.371.000,00	296.842.150,00	202.528.850,00	68,23
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	148.397.000,00	0,00	148.397.000,00	100,00
	Persediaan Obat	17.701.111.448,19	15.942.387.400,48	1.758.724.047,71	11,03
	Persediaan Obat-Obatan Lainnya	392.100,00	0,00	392.100,00	100,00
	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	223.423.009.641,60	144.368.750.249,00	79.054.259.392,60	54,76
	Persediaan Natura	180.171.172,46	42.292.114,48	137.879.057,98	326,02

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	Persediaan Pakan	57.945.020,00	7.590.000,00	50.355.020,00	663,44
	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	0,00	2.020.000,00	(2.020.000,00)	(100,00)
	Persediaan Komponen Jembatan Baja	19.202.445.853,05	11.362.667.804,40	7.839.778.048,65	69,00
	TOTAL	**273.248.242.463,84**	**181.571.905.861,09**	**91.676.336.602,75**	**50,49**

Selain persediaan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut terdapat Persediaan berupa obat-obatan yang sudah kadaluarsa pada RSUD dr. Abdul Rivai yang sudah dihapuskan dengan rincian pada **Lampiran 4**. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 pada SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.104 Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	5.755.600,00	2.278.000,00	3.477.600,00	152,66
2	Dinas Kesehatan	11.765.461.105,82	9.577.985.796,51	2.187.475.309,31	22,84
3	Rsud Abdul Rivai	12.310.111.414,77	10.552.772.264,18	1.757.339.150,59	16,65
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	239.252.725.712,05	153.975.890.605,40	85.276.835.106,65	55,38
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	1.478.402.069,00	0,00	1.478.402.069,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	747.592.000,00	746.510.000,00	1.082.000,00	0,14
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	18.495.000,00	197.492.980,00	(178.997.980,00)	(90,64)
8	Dinas Sosial	463.320.000,00	463.320.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	7.561.900,00	10.171.000,00	(2.609.100,00)	(25,65)
10	Dinas Pangan	852.896.631,60	342.003.500,00	510.893.131,60	149,38
11	Dinas Pertanahan	7.003.000,00	0,00	7.003.000,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.979.789.315,00	1.717.314.960,00	262.474.355,00	15,28
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	1.149.523.464,00	960.445.215,00	189.078.249,00	19,69
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	4.741.200,00	7.323.400,00	(2.582.200,00)	(35,26)
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97.297.210,00	152.984.346,00	(55.687.136,00)	(36,40)
16	Dinas Perhubungan	38.301.000,00	626.480.000,00	(588.179.000,00)	(93,89)
17	Dinas Komunikasi & Informatika	3.095.300,00	0,00	3.095.300,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	198.089.180,00	61.061.400,00	137.027.780,00	224,41
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.837.000,00	18.615.500,00	(3.778.500,00)	(20,30)
20	Dinas Kepemudaan & Olahraga	1.529.694.982,00	824.051.030,00	705.643.952,00	85,63
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	201.594.000,00	228.104.500,00	(26.510.500,00)	(11,62)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.636.400,00	183.125.468,00	(179.489.068,00)	(98,01)
23	Dinas Perikanan	83.748.340,00	22.867.634,00	60.880.706,00	266,23

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	103.524.614,60	88.165.066,00	15.359.548,60	17,42
25	Dinas Perkebunan	11.231.600,00	33.801.000,00	(22.569.400,00)	(66,77)
26	Sekretariat Daerah	420.208.245,00	348.317.700,00	71.890.545,00	20,64
27	Kantor Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Inspektorat	33.949.600,00	5.244.000,00	28.705.600,00	547,40
29	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	15.278.000,00	24.529.800,00	(9.251.800,00)	(37,72)
30	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	175.218.970,00	56.482.816,00	118.736.154,00	210,22
31	Badan Pendapatan Daerah	54.616.000,00	154.318.000,00	(99.702.000,00)	(64,61)
32	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.226.110,00	3.260.000,00	3.966.110,00	121,66
33	Sekretariat DPRD	114.356.200,00	135.594.380,00	(21.238.180,00)	(15,66)
34	Kec Tg Redeb	2.856.000,00	2.767.300,00	88.700,00	3,21
35	Kec Gunung Tabur	8.063.000,00	2.436.000,00	5.627.000,00	230,99
36	Kec Sambaliung	648.000,00	3.970.000,00	(3.322.000,00)	(83,68)
37	Kec Teluk Bayur	1.635.000,00	560.000,00	1.075.000,00	191,96
38	Kec Segah	2.660.000,00	1.450.000,00	1.210.000,00	83,45
39	Kec Kelay	3.208.000,00	1.871.000,00	1.337.000,00	71,46
40	Kec Talisayan	6.640.000,00	3.550.000,00	3.090.000,00	87,04
41	Kec Biduk-Biduk	1.237.800,00	108.000,00	1.129.800,00	1.046,11
42	Kec Maratua	12.811.500,00	516.000,00	12.295.500,00	2.382,85
43	Kecamatan Pulau Derawan	8.457.700,00	0,00	8.457.700,00	0,00
44	Kec Tabalar	2.801.000,00	2.388.000,00	413.000,00	17,29
45	Kec Batu Putih	7.482.000,00	0,00	7.482.000,00	0,00
46	Kec Biatan	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
47	Badan Kesbang, Politik & Linmas	40.166.300,00	31.779.200,00	8.387.100,00	26,39
TOTAL PERSEDIAAN		**273.248.242.463,84**	**181.571.905.861,09**	**91.676.336.602,75**	**50,49**

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, metode pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik, sedangkan metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*).

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi Jangka Panjang	596.513.621.017,22	618.232.967.990,13

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp596.513.621.017,22 mengalami **penurunan** senilai Rp21.719.346.972,91 atau 3,51% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp618.232.967.990,13. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.105 Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	596.513.621.017,22	618.232.967.990,13	(21.719.346.972,90)	(3,51)
TOTAL PERSEDIAAN		**596.513.621.017,22**	**618.232.967.990,13**	**(21.719.346.972,90)**	**(3,51)**

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Investasi Non Permanen merupakan dana bergulir Pemerintah Kabupaten Berau telah disisihkan seluruhnya (100%) sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau yang berada pada Dinas Koperindag dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sejak tahun 2002 yang bekerja sama dengan BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb yang berfungsi sebagai bank penyalur. Dana bergulir yang diterima masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan bunga sebesar 2% yang digunakan untuk operasional BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb. Penyajian pada laporan keuangan sebesar nilai yang belum tertagih. Jumlah Dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan beberapa kondisi diantaranya debitur telah meninggal dunia; alamat tidak ditemukan/berbeda dan masa jatuh tempo dana bergulir 5 tahun.

Tabel 5.106 Investasi Non Permanen
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	Penerimaan Dana Bergulir	Sisa Dana Begulir	Penyisihan Dana Bergulir	31 Desember 2024	%
1	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada Dinas Perindagkop	1.225.868.034,44	10.953.604,00	1.214.914.430,44	1.214.914.430,44	0,00	0,00
2	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada bagian perekonomian Sekertariat Daerah	1.350.342.862,00	21.472.223,00	1.328.870.639,00	1.328.870.639,00	0,00	0,00
Total		**2.576.210.896,44**	**32.425.827,00**	**2.543.785.069,44**	**2.543.785.069,44**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Investasi Permanen	596.513.621.017,22	618.232.967.990,35

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp596.513.621.017,22 mengalami **kenaikan** senilai Rp21.719.346.972,90 atau 3,51% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp618.096.020.678,13. Investasi Permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Rincian Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.107 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan/ Penurunan)	%
1	PT BPD Kaltimtara	304.165.000.000,00	3,97	304.165.000.000,00	304.165.000.000,00	0,00	0,00
2	Perumda Air Minum Batiwakkal	171.320.860.000,00	100,00	206.674.022.312,79	196.464.784.479,00	10.209.237.833,79	5,20
3	PT Hutansanggam Labanan Lestari	6.000.000.000,00	50,00	2.082.295.820,50	2.128.653.593,00	(46.357.772,50)	(2,18)
4	PT Indo Pusaka Berau	65.890.000.000,00	49,00	79.701.471.052,93	113.588.543.113,13	(33.887.072.060,19)	(29,83)
5	Perumda Bhakti Praja	4.000.000.000,00	100,00	3.890.831.831,00	1.885.986.805,00	2.004.845.026,00	106,30
	JUMLAH	**551.375.860.000,00**		**596.513.621.017,22**	**618.232.967.990,13**	**(21.719.346.972,90)**	**(3,51)**

Uraian lebih lanjut Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

a. PT BPD Kaltimtara

Investasi dalam Saham pada PT BPD Kaltimtara per 31 Desember 2024 sebesar Rp304.165.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara. Pemerintah Kabupaten Berau tidak menambah penyertaan modal pada BPD Kaltim pada Tahun Anggaran 2024. Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPD Kaltimtara disajikan berdasarkan metode biaya.

b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal (PERUMDAM Batiwakkal) Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp206.674.022.312,79, mengalami **kenaikan** senilai Rp10.209.237.833,79 LAatau 5,20% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp196.464.784.479,00. Investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Batiwakkal disajikan dengan metode ekuitas karena modal PERUMDAM Batiwakkal Kabupaten Berau seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Penyajian investasi Pemerintah Kabupaten Berau atas PERUMDAM Batiwakkal per 31

Desember 2024 didasarkan atas laporan keuangan per 31 Desember 2024 ***(Audited)*** **Lampiran 5**.

c. PT Hutan Sanggam Berau

Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I, dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera dengan Nomor 127/V/Inh/2003 tanggal 4 Februari 2003, disepakati pembentukan usaha patungan dalam areal Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten Berau dengan Nama PT Hutansanggam Berau. Komposisi Pemerintah Kabupaten Berau sebesar 50%,PT Inhutani I sebesar 30%, dan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera sebesar 20%.

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Hutansanggam Labanan Lestari diakui berdasarkan metode Ekuitas yaitu senilai Rp2.082.295.820,50 yang dihitung berdasarkan kepemilikan sebesar 50% dari nilai Ekuitas Perusda Hutan Sanggam Labanan Lestari per 31 Desember 2024 ***(Audited)*** sebesar Rp4.164.591.641,00 **Lampiran 6**.

d. PT Indo Pusaka Berau

PT Indo Pusaka Berau adalah perusahaan *joint venture* yang melanjutkan usaha Konsorsium Indo Pusaka Berau yang dibentuk oleh PT Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau, dan PT Pusaka Jaya Baru. Konsorsium tersebut dibentuk sesuai Surat Perjanjian Konsorsium Nomor 015/2088/UM-I/IX/2002 tanggal 23 September 2002 dalam rangka pembangunan PLTU Mulut Tambang (2 x 7 MW) di Lati - Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Sejak Desember 2015 perusahaan PLTU telah menambah satu unit pembangkit dengan membangun turbin Generator berkapasitas 7 MW untuk melengkapi boiler unit 3 yang telah beroperasi sebelumnya sehingga total kapasitas terpasang PLTU Lati mencapai 3 x 7 MW.

Investasi pada PLTU Mulut Tambang pada Tahun 2017 mengalami kenaikan karena adanya Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT Indo Pusaka Berau berupa Tanah seluas 129.662m^2 senilai Rp777.972.000,00. Adanya penambahan investasi tersebut mempengaruhi porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Berau menjadi 49,48%. Penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Pembagian saham sesuai surat Dewan Eksekutif Proyek PLTU Mulut Tambang Nomor 002.K/010/RUPS-IPB/2017, adalah sebagai berikut.

1. PT. Indonesia Power (46,53%)	Rp	61.950.000.000,00
2. Pemkab Berau (49,48%)	Rp	65.890.000.000,00
3. PT. Pusaka Jaya Baru (3,99%)	Rp	5.310.000.000,00
Jumlah	Rp	133.150.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau diperhitungkan dengan metode Ekuitas. Dalam laporan keuangan 2024 ***Unaudited*** (**Lampiran 7**), PT Indo Pusaka Berau membukukan Ekuitas sebesar Rp161.078.154.788,00 Sehingga Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau diakui sebesar Rp79.701.471.052,94 atau 49,48% dari total Ekuitas perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemkab Berau sampai dengan 31 Desember 2020 telah menetapkan penyertaan modal pada PT. IPB dengan menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

a. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp53.364.792.235,00 terdiri dari penyertaan modal Tahun 2005 sebesar Rp43.365.000.000,00 dan Tahun 2009 sebesar Rp9.999.792.235,00;

b. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2011 sebesar Rp17.500.000.000,00. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005, 2009, dan 2011 keseluruhan berjumlah Rp70.864.792.235,00;

c. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2014 sebesar Rp777.972.000,00 berupa tanah. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005,2009, 2011, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 96 dan 2014 keseluruhan berjumlah Rp71.533.014.235,00 .

e. Perumda Bhakti Praja

1. Pendirian

Perumda Bhakti Praja didirikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Daerah Tingkat II Berau No.05 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 5 Perda 14/2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut :

a. Kehutanan,
b. Pertanian tanaman pangan,
c. Perkebunan,
d. Peternakan,
e. Perikanan,
f. Pariwisata,
g. Pertambangan dan penggalian,
h. Minyak dan gas bumi,
i. Ketenagalistrikan,
j. Perhubungan/kepelabuhanan,
k. Industri pengolahan dan,
l. Pergudangan

Disamping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untul mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/2020, sebagaimana disebutkan diatas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada Tahun 2023, yang meliputi :

a. Pengangkutan CPO
b. Perdagangan TBS Kelapa Sawit
c. Perdagangan Cangkang Kelapa Sawit
d. Perdagangan Karet
e. Supplier Industri

3. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal senilai Rp50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Perumda Bhakti Praja meneirma setoran modal Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp4.000.000.000,00. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja dan diakui dengan motode Ekuitas di Tahun 2024 senilai Rp3.890.831.831,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 8 (Audited)***.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap	12.135.472.037.536,93	8.972.045.745.570,96

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal dan/atau lainnya yang dikapitalisasi dalam nilai Aset Tetap tahun berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp12.135.472.037.536,93 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp3.163.426.291.965,93 atau 35,26% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.972.045.745.570,96. Dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.108 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Permendagri 108/2016			
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%
Tanah	1.072.297.219.600,83	1.069.237.842.504,83	3.059.377.096,00	0,29
Peralatan dan Mesin	1.370.551.524.477,78	1.109.298.981.825,43	261.252.542.652,35	23,55
Gedung dan Bangunan	2.370.435.810.216,46	2.128.863.132.087,38	241.572.678.129,08	11,35
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.880.709.415.429,90	9.093.051.129.603,83	2.787.658.285.826,03	30,66
Aset Tetap Lainnya	95.663.258.267,00	87.661.682.797,00	8.001.575.470,00	9,13
Konstruksi Dalam Pengerjaan	886.641.620.568,26	323.829.393.153,36	562.812.227.414,90	173,80
Akumulasi Penyusutan	**(5.540.826.811.023,30)**	**(4.839.896.416.400,87)**	**(700.930.394.622,43)**	**14,48**
Jumlah	**12.135.472.037.536,93**	**8.972.045.745.570,96**	**3.163.426.291.965,93**	**35,26**

Ringkasan mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Mutasi Aset

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	JUMLAH
Saldo Awal	**1.069.237.842.504,83**	**1.109.298.981.825,43**	**2.128.863.132.087,38**	**9.093.051.129.603,83**	**87.661.682.797,00**	**323.829.393.153,36**	**13.811.942.161.971,80**
PENAMBAHAN							
LRA	1.352.415.463,00	259.968.567.330,29	472.715.286.591,51	3.081.747.295.756,45	8.338.136.101,00	0,00	**3.824.121.701.241,25**
Hutang + Hibah	1.719.656.250,00	821.912.750,00	3.054.615.900,00	45.167.740.230,87	26.470.000,00	25288177550,46	**76.078.572.681,33**
Reklas + Koreksi	159.149.383,00	7.671.274.469,00	96.994.239.377,00	38.357.769.089,03	1.714.287.450,00	673.551.858.041,31	**818.448.577.809,31**
TOTAL MUTASI TAMBAH	**3.231.221.096,00**	**268.461.754.549,29**	**572.764.141.868,51**	**3.165.272.805.076,32**	**10.078.893.551,00**	**698.840.035.591,77**	**4.718.648.851.732,89**
PENGURANGAN							
SK PENGHAPUSAN/ Hibah	0,00	998528464,00	0,00	0,00	6.295.000,00	0,00	**1.004.823.464,00**
HUTANG PIHAK KE_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Reklas + Koreksi	171.844.000,00	5.895.066.351,94	331.131.365.739,43	377.614.519.250,31	2.071.023.081,00	136.027.808.176,87	**852.911.626.599,55**
NILAI DIBAWAH KAPITALISASI	0,00	315.617.081,00	60.098.000,00	0,00	0,00	0,00	**375.715.081,00**
TOTAL MUTASI KURANG	**171.844.000,00**	**7.209.211.896,94**	**331.191.463.739,43**	**377.614.519.250,31**	**2.077.318.081,00**	**136.027.808.176,87**	**854.292.165.144,55**
SALDO AKHIR	**1.072.297.219.600,83**	**1.370.551.524.477,78**	**2.370.435.810.216,46**	**11.880.709.415.429,90**	**95.663.258.267,00**	**886.641.620.568,26**	**17.676.298.848.560,23**

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.069.237.842.504,83**
Mutasi Tambah	**Rp**	**3.231.221.096,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**171.844.000,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**1.072.297.219.600,83**

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp1.072.297.219.600,83 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.059.377.096,00 atau 0,29% dibandingkan dengan nilai perolehan aset Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.069.237.842.504,83.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal Tanah Ta 2024		
DINAS PERTANAHAN	**Rp**	**1.352.415.463,00**
Reklasifikasi :		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Hasil Inventarisasi Aset Tanah	Rp	7.500.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Tanah	Rp	151.649.383,00
Jumlah Penambahan Aset Tanah (Reklasifikasi)	**Rp**	**159.149.383,00**
Hibah :		
Hibah Tanah pada Dinas Pendidikan		
Hibah masuk lahan pembangunan sekolah SMPN 3 Gunung Tabur di Maluang seluas 5 hektar dari PT Berau Coal Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
Hibah Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
Hibah Tanah Sarana Perumahan dari PT Riga Cipta Prestasi dan PT Agung Buana	Rp	702.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Hibah masuk tanah dari masyarakat	Rp	13.220.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		
Hibah Tanah dari Sahdan kampung Buyung-buyung berdasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No: 151/BB/II/2018 ukuran 75 x 65 M	Rp	4.436.250,00
Jumlah Penambahan Aset Tanah (Hibah)	**Rp**	**1.719.656.250,00**

Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**3.231.221.096,00**

Rincian mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :

Dinas Perhubungan

Pencatatan Ganda pada Aset Tanah Dinas perhubungan yang juga tercatat di dinas Perikanan Berdasarkan Surat Nomor 550/026/Dishub - 1.2 /2022 (Luas 2.477 M2)	Rp	171.844.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tanah (Reklasifikasi)	**Rp**	**171.844.000,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.109.298.981.825,43**
Mutasi Tambah	**Rp**	**268.461.754.549,29**
Mutasi Kurang	**Rp**	**7.209.211.896,94**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**1.370.551.524.477,78**

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 per 31 Desember 2024 senilai Rp1.370.551.524.477,78 mengalami **kenaikan** senilai Rp261.252.542.652,35 atau 23,55% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.109.298.981.825,43.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal peralatan & mesin Ta 2024	**Rp**	**259.968.567.330,29**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Peralatan & Mesin	Rp	4.306.373.505,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin	Rp	657.442.881,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin	Rp	790.300.013,00
Reklasifikasi dari Barang & Jasa ke Peralatan & Mesin	Rp	324.673.800,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Peralatan & Mesin	Rp	1.592.484.270,00
Jumlah Penambahan Peralatan & Mesin (Reklasifikasi)	**Rp**	**7.671.274.469,00**
Hibah :		
Jumlah Penambahan Peralatan & Mesin (Hibah)	**Rp**	**821.912.750,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**268.461.754.549,29**

Rincian mutasi kurang peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	237.323.350,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Gedung & Bangunan	Rp	973.280.520,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Barang & Jasa	Rp	483.424.676,00

Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Lainnya - ARB	Rp	2.569.310.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Lainnya - TGR	Rp	208.628.116,94
Mutasi Keluar antar OPD pada Peralatan & Mesin	Rp	1.592.484.270,00
Barang diserahkan ke masyarakat	Rp	146.232.500,00
Jumlah Pengurangan Peralatan & Mesin (Reklasifikasi)	**Rp**	**6.210.683.432,94**
Penghapusan :		
Jumlah Penghapusan		**998.528.464,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**7.209.211.896,94**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**2.128.863.132.087,38**
Mutasi Tambah	**Rp**	**572.764.141.868,51**
Mutasi Kurang	**Rp**	**331.191.463.739,43**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**2.370.435.810.216,46**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.370.435.810.216,46 mengalami **kenaikan** senilai Rp241.572.678.129,08 atau 11,35%. dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.128.863.132.087,38.

Rincian mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal gedung & bangunan Ta 2024	**Rp**	**472.715.286.591,51**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan	Rp	93.632.831.876,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Gedung & Bangunan	Rp	973.280.520,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan da Irigasi ke Gedung & Bangunan	Rp	274.971.000,00
Reklasifikasi dari Barang & Jasa ke Gedung & Bangunan	Rp	700.230.981,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	1.412.925.000,00
Jumlah Penambahan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi)	**Rp**	**96.994.239.377,00**
Hibah :		
Jumlah Penambahan Hibah		**3.004.943.400,00**
Utang :		
Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Gedung & Bangunan		**49.672.500,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**572.764.141.868,51**

Adapun pengurangan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	315.258.599.781,48
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin	Rp	790.300.013,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	74.991.600,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya - ARB	Rp	11.023.351.800,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya - TGR	Rp	48.267.351,16
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Barang & Jasa	Rp	233.451.000,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Persediaan	Rp	2.167.717.595,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Tanah	Rp	151.649.383,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	1.412.925.000,00
Reklasifikasi dari Gedung & Lain-Lain PAD yang sah	Rp	30.210.215,79
Jumlah Pengurangan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi)	**Rp**	**331.191.463.739,43**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**331.191.463.739,43**

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**9.093.051.129.603,83**
Mutasi Tambah	**Rp**	**3.165.272.805.076,32**
Mutasi Kurang	**Rp**	**377.614.519.250,31**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**11.880.709.415.429,90**

Nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 senilai Rp11.880.709.415.429,90 dan mengalami **kenaikan** senilai Rp2.787.658.285.826,03 atau 30,66%. Dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9.093.051.129.603,83.

Dari nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM Batiwakkal senilai Rp304.647.279.784,81 (Rincian nilai JJI aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM dan dilihat pada **Lampiran 8**).

Rincian mutasi Tambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut.

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Ta 2024	**Rp**	**3.081.747.295.756,45**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	38.357.769.089,03
Jumlah Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi (Reklasifikasi)	**Rp**	**38.357.769.089,03**
Hibah :		
Jumlah Penambahan Hibah	**Rp**	**38.264.270.355,00**

Utang :		
Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	**Rp**	**6.903.469.875,87**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**3.165.272.805.076,32**

Rincian mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	358.293.258.259,83
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	9.990.699.602,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Barang & Jasa	Rp	1.172.699.723,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Peralatan & Mesin	Rp	4.306.373.505,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Gedung & Bangunan	Rp	274.971.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Persediaan	Rp	2.347.345.464,92
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Aset Lainnya - TGR	Rp	1.229.171.695,56
Jumlah Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi (Reklasifikasi)	**Rp**	**377.614.519.250,31**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**377.614.519.250,31**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**87.661.682.797,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**10.078.893.551,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**2.077.318.081,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**95.663.258.267,00**

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 Rp95.663.258.267,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp8.001.575.470,00 atau 9,13% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp87.661.682.797,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Ta 2024	**Rp**	**8.338.136.101,00**

Rincian mutasi kurang aset tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	237.323.350,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	74.991.600,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Aset Tetap Lainnya	Rp	1.401.972.500,00

Jumlah Penambahan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	**Rp**	**1.714.287.450,00**
Hibah :		
Jumlah Penambahan Hibah		**26.470.000,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**10.078.893.551,00**

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin	Rp	657.442.881,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Barang & Jasa	Rp	11.607.700,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Aset Tetap Lainnya	Rp	1.401.972.500,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	**Rp**	**2.071.023.081,00**
Penghapusan :		
Jumlah Penghapusan		**6.295.000,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**2.077.318.081,00**

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Per 31 Desember 2023	**Rp**	**323.829.393.153,36**
Mutasi Tambah	**Rp**	**698.840.035.591,77**
Mutasi Kurang	**Rp**	**136.027.808.176,87**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**Rp**	**886.641.620.568,26**

Nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp886.641.620.568,26 mengalami **kenaikan** senilai Rp562.812.227.414,90 atau 173,80% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp323.829.393.153,36.

Rincian Mutasi Tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi:		
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	315.258.599.781,48
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	358.293.258.259,83
Jumlah Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi)	**Rp**	**673.551.858.041,31**
Utang :		

Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	**Rp**	**25.288.177.550,46**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**698.840.035.591,77**

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	93.632.831.876,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp	38.357.769.089,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Persediaan	Rp	1.023.945.083,73
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lainnya - TGR	Rp	3.013.262.128,14
Jumlah Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi)	**Rp**	**136.027.808.176,87**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**136.027.808.176,87**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 20234	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(5.540.826.811.023,30)	(4.839.896.416.400,87)

Akumulasi Penyusutan merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan tanggal neraca, sedangkan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp5.540.826.811.023,30 mengalami **kenaikan** senilai Rp700.930.394.622,43 atau 14,48% dibandingkan dengan nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp4.839.896.416.400,87.

Nilai buku Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.110 Nilai Buku Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Nilai Buku (per 31-Des-2023)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	TANAH	1.072.297.219.600,83	0,00	1.072.297.219.600,83	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN MESIN	1.370.551.524.477,78	(848.123.363.873,13)	522.428.160.604,65	(729.863.686.437,96)	(118.259.677.435,17)	16,20
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.370.435.810.216,46	(466.754.156.502,06)	1.903.681.653.714,41	(424.215.396.291,27)	(42.538.760.210,77)	10,03
4	JALAN. JARINGAN. DAN IRIGASI	11.880.709.415.429,90	(4.223.919.776.044,11)	7.656.789.639.385,75	(3.684.256.757.976,64)	(539.663.018.067,47)	14,65
5	ASET TETAP LAINNYA	95.663.258.267,00	(2.029.514.604,00)	93.633.743.663,00	(1.560.575.695,00)	(468.938.909,00)	30,05
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	886.641.620.568,26	0,00	886.641.620.568,26	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**17.676.298.848.560,23**	**(5.540.826.811.023,30)**	**12.135.472.037.536,90**	**(4.839.896.416.400,87)**	**(700.930.394.622,41)**	**14,48**

5.3.1.4. Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	276.251.850.254,00	283.581.494.898,00

Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp276.251.850.254,00 dan untuk per 31 Desember 2023 senilai Rp283.581.494.898,00, mengalami **penurunan** senilai Rp7.329.644.644,00 atau 2,58% dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.111 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Properti Investasi	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(93.397.226.531,00)	(86.067.581.887,00)	(7.329.644.644,00)	8,52
Jumlah		**276.251.850.254,00**	**283.581.494.898,00**	**(7.329.644.644,00)**	**(2,58)**

5.3.1.4.1. Properti Investasi

Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00

Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp369.649.076.785,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp369.649.076.785,00 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Penyajian informasi Properti Investasi ini sudah didukung dengan Kebijakan Akuntansi. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Tabel 5.112 Properti Investasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	BPKAD	Tanah	3.161.844.520,00	3.161.844.520,00	0,00	0,00
2	DPUPR	Gedung dan Bangunan	364.165.232.265,00	364.165.232.265,00	0,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	2.322.000.000,00	2.322.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah			**369.649.076.785,00**	**369.649.076.785,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	Tahun 2024	Tahun 2023
Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(93.397.226.531,00)	(86.067.581.887,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember2024 dengan nilai Rp93.397.226.531,00 dan senilai Rp86.067.581.887,00 per 31 Desember 2023. Mengalami **kenaikan** senilai Rp7.329.644.644,00 atau 8,52%. Rincian Akumulasi penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Tabel 5.113 Akumulasi Properti Investasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	(93.397.226.531,00)	(86.067.581.887,00)	(7.329.644.644)	0,00
	Jumlah	**(93.397.226.531,00)**	**(86.067.581.887,00)**	**(7.329.644.644,00)**	**8,52**

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	587.694.668.757,21	1.757.817.419.097,95

Nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp587.694.668.757,21 mengalami **penurunan** senilai Rp1.170.122.750.340,74 atau 66,57% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp1.757.817.419.097,95. Rincian Aset lainnya dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.114 Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	5.388.712.858,92	940.354.248,00	4.448.358.610,92	473,05
2	Aset Tidak Berwujud	56.236.812.306,00	41.569.394.795,00	14.667.417.511,00	35,28
3	Aset lain-lain	775.825.834.590,86	1.952.448.057.982,00	(1.176.622.223.391,14)	(60,26)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.922.257.419,24)	(23.947.064.152,72)	(5.975.193.266,52)	24,95
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(219.834.433.579,33)	(213.193.323.774,33)	(6.641.109.805,00)	3,12
	Jumlah	**587.694.668.757,21**	**1.757.817.419.097,95**	**(1.170.122.750.340,74)**	**(66,57)**

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tagihan Jangka Panjang	5.388.712.858,92	940.354.248,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp5.388.712.858,92 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.448.358.610,92 atau 473,05% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp940.354.248,00.

Tagihan Jangka Panjang berupa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan tagihan penjualan angsuran rumah dinas yang dikelola BPKAD dan jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan rincian berikut.

Tabel 5.115 Tagihan Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	615.165.937,12	666.136.618,00	(50.970.680,88)	(7,65)
2	Tuntutan Ganti Rugi	4.773.546.921,80	274.217.630,00	4.499.329.291,80	1.640,79
Jumlah		**5.388.712.858,92**	**940.354.248,00**	**4.448.358.610,92**	**473,05**

Tabel 5.116 Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun Kejadian	Tgl. SKTJM	Saldo 31 Desember 2023	Pembayaran Selama 2024	Saldo 31 Desember 2024
1	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Tabur	2011	21 September 2011	67.380.150,00	0,00	67.380.150,00
2	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau	2012	Desember 2012	138.197.480,00	0,00	138.197.480,00
3	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau	2012	10 Desember 2012	68.640.000,00	0,00	68.640.000,00
4	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Ketahanan Pangandan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Berau	2012	18 April 2012	0,00	0,00	0,00
5	TP/TGR pada Pihak ketiga atas denda pekerjaan kurang volume*	2024		0,00	0,00	4.499.329.291,80
JUMLAH				**274.217.630,00**	**0,00**	**4.773.546.922,80**

*Rincian kurang volume atas denda pekerjaan pihak ketiga senilai Rp4.499.329.291,80 terdapat pada ***Lampiran 11.***

Tabel 5.117 Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	N A M A	NO.& TGL.SK BUPATI PENJUALAN ASET	NO.& TGL.PERJANJIAN JUAL BELI	JATUH TEMPO PELUNASAN	KETETAPAN	Aset Tetap - Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 2024
1	2	3	4	5	6	13
1	DRS. ABIDINSYAH SANUSI	184 TGL.16 APRIL 2008	030/213/BPKAD-F/2017 TGL.18-4-2017	10 DESEMBER 2027	68.993.200,00	25.446.847,00
2	JUNAIDI. (Alm)	535 TGL 6 JULI 2015	030/36/BPKAD-F/2016 TGL.21-3-2016	10 SEPTEMBER 2026	40.448.000,00	3.541.176,00
3	SABRANSYAH, A.MA,PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/007/BPKAD-E/2017 TGL.14-09-2017	10 MARET 2035	194.162.000,00	93.149.170,00
4	DRS.HARNO	452 TGL.06 JULI 2017	030/ /BPKAD-E/2019 TGL.02-09-2019	10 SEPTEMBER 2039	203.500.000,00	146.604.782,00
5	ROHANA, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/033/BPKAD-E/2018 TGL.15-02-2018	10 JANUARI 2038	104.765.400,00	60.496.140,12

(dalam rupiah)

NO	N A M A	NO.& TGL.SK BUPATI PENJUALAN ASET	NO.& TGL.PERJANJIAN JUAL BELI	JATUH TEMPO PELUNASAN	KETETAPAN	Aset Tetap - Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 2024
1	2	3	4	5	6	13
6	HJ.CHAIRUNNISAH, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017		06 JULI 2027	97.528.000,00	15.615.256,00
7	H.SUKIRMAN(TANAH)	452 TGL.06 JULI 2017	030/005/BPKAD-E/2017 TGL.22-08-2017	10 AGUSTUS 2037	45.000.000,00	14.606.250,00
8	H.M. RUSLIE DJAFAR	452 TGL.06 JULI 2017	030/010/BPKAD-E/2018 TGL.04-01-2018	10 JANUARI 2038	145.941.000,00	79.551.479,00
9	HJ.SERI TUTI HANDAYANI,S.PD.SD	452 TGL.06 JULI 2017	030/001/BPKAD-E/2017 TGL.24-08-2017	10 AGUSTUS 2027	81.061.000,00	59.032.325,00
10	RITA HARYANTI	452 TGL.06 JULI 2017	030/669/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	57.175.025,00
11	ELYANA	452 TGL.06 JULI 2017	030/670/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	59.947.487,00
NILAI TOTAL						**615.165.937,12**

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	56.236.812.306,00	41.569.394.795,00

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp56.236.812.306,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp14.667.417.511,00 atau 35,28% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp41.569.394.795,00 Aset Tidak Berwujud tersebut berupa perangkat lunak sistem operasi dan hasil kajian. Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD disajikan pada tabel berikut;

Tabel 5.118 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	432.400.000,00	541.450.000,00	0,00	973.850.000,00	541.450.000,00	125,22
2	Dinas Kesehatan	369.757.400,00	0,00	0,00	369.757.400,00	0,00	0,00
3	RSUD Dr. Rivai	2.273.102.700,00	0,00	0,00	2.273.102.700,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24.874.662.688,00	11.248.363.562,00	0,00	36.123.026.250,00	11.248.363.562,00	45,22
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	148.690.000,00	99.800.000,00	0,00	248.490.000,00	99.800.000,00	67,12
6	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	225.239.000,00	0,00	0,00	225.239.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Pertanahan	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	220.369.000,00	0,00	0,00	220.369.000,00	0,00	0,00
9	Badan Lingkungan Hidup	2.070.801.573,00	0,00	0,00	2.070.801.573,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
10	Dinas Komunikasi & Informatika	2.657.745.650,00	221.334.000,00	0,00	2.879.079.650,00	221.334.000,00	8,33
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	352.050.220,00	99.567.000,00	0,00	451.617.220,00	99.567.000,00	28,28
12	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	169.427.500,00	33.1536.800,00	0,00	500.964.300,00	331.536.800,00	195,68
13	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	49.950.000,00	249.220.549,00	0,00	299.170.549,00	249.220.549,00	498,94
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	109.280.000,00	35.000.000,00	0,00	144.280.000,00	35.000.000,00	32,03
15	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.407.441.300,00	624.880.000,00	0,00	2.032.321.300,00	624.880.000,00	44,40
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	309.987.350,00	158.781.000,00	0,00	468.768.350,00	158.781.000,00	51,22
18	Sekretariat DPRD	220.550.114,00	35.000.000,00	0,00	255.550.114,00	35.000.000,00	15,87
19	Kantor Penghubung	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Tanjung Redeb	50.834.300,00	0,00	0,00	50.834.300,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Biatan	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	34.410.000,00	0,00	0,00	34.410.000,00	0,00	0,00
23	Dinas Perkebunan	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	528.030.000,00	197.579.000,00	0,00	725.609.000,00	197.579.000,00	37,42
25	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluaraga Berencana	92.880.000,00	0,00	0,00	92.880.000,00	0,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	2.821.600.000,00	475.000.000,00	0,00	3.296.600.000,00	475.000.000,00	16,83
27	BPKAD	947.650.000,00	0,00	0,00	947.650.000,00	0,00	0,00
28	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	702.236.000,00	49.905.600,00	0,00	752.141.600,00	49.905.600,00	7,11
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	332.350.000,00	0,00	0,00	332.350.000,00	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	JUMLAH	**41.569.394.795,00**	**14.667.417.511,00**	**0,00**	**56.236.812.306,00**	**14.667.417.511,00**	**35,28**

Untuk rekap item-item rincian kenaikan Pos Aset Tak Berwujud terdapat pada ***Lampiran 12***.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	775.825.834.590,86	1.952.448.057.982,00

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp775.825.834.590,86 mengalami **penurunan** senilai Rp1.176.622.223.391,14 atau 60,26% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.952.448.057.982,00. Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.119 Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 20223	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset rusak berat	234.352.419.384,49	220.759.757.584,49	13.592.661.800,00	6,16
2	Aset Perusda Bhakti Praja	288.371.844,42	288.371.844,42	0,00	0,00
3	Jaminan Reklamasi & Jaminan Kesungguhan	374.884.051,61	373.943.242,75	940.808,86	0,25
4	Aset Lancar yang direncanakan untuk dihapus (Piutang)	6.982.067.000,00	6.982.067.000,00	0,00	0,00
5	Perpindahan kewenangan Kabupaten Keprovinsi	269.050.025.310,34	269.050.025.310,34	0,00	0,00
6	TDF/TKD	264.778.067.000,00	1.454.993.893.000,00	(1.190.215.826.000,00)	(81,80)
Jumlah		**775.825.834.590,86**	**1.952.448.057.982,00**	**(1.176.622.223.391,14)**	**(60,26)**

Rincian Aset Lain-lain sebagai berikut :

a. Aset Rusak berat

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 senilai Rp234.352.419.384,49 mengalami **kenaikan** Rp13.592.661.800,00 atau 16,16% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp220.759.757.584,49 merupakan reklasifikasi Aset Tetap yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum dihapusbukukan. Rincian aset rusak berat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.120 Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	23.867.661.184,99	0,00	0,00	23.867.661.184,99	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	51.807.180.948,00	9.327.407.800,00	0,00	61.134.588.748,00	9.327.407.800,00	18,00
3	RSUD Dr A. Rivai	15.563.448.280,00	0,00	0,00	15.563.448.280,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	59.596.847.677,50	165.000.000,00	0,00	59.761.847.677,50	165.000.000,00	0,28
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	870.350.300,00	0,00	0,00	870.350.300,00	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik & Linmas	427.860.000,00	0,00	0,00	427.860.000,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.341.488.291,00	0,00	0,00	2.341.488.291,00	0,00	0,00
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	385.589.500,00	224.400.000,00	0,00	609.989.500,00	224.400.000,00	58,20

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
9	Dinas Sosial	688.772.000,00	0,00	0,00	688.772.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga & Transmigrasi	392.775.000,00	0,00	0,00	392.775.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	258.540.000,00	0,00	0,00	258.540.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	1.838.365.600,00	0,00	0,00	1.838.365.600,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	371.386.350,00	0,00	0,00	371.386.350,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	2.288.459.600,00	0,00	0,00	2.288.459.600,00	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.119.807.600,00	0,00	0,00	1.119.807.600,00	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	451.429.500,00	0,00	0,00	451.429.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	10.410.698.675,00	0,00	0,00	10.410.698.675,00	0,00	0,00
18	Dinas Komunikasi & Informatika	2.193.403.250,00	0,00	0,00	2.193.403.250,00	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	2.705.351.150,00	0,00	0,00	2.705.351.150,00	0,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.556.012.203,00	0,00	0,00	1.556.012.203,00	0,00	0,00
21	Dinas Kepemudaan & Olahraga	481.710.340,00	0,00	0,00	481.710.340,00	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.889.426.500,00	0,00	0,00	1.889.426.500,00	0,00	0,00
23	Kantor Perpustakaan & Kearsipan	1.174.600.667,00	0,00	0,00	1.174.600.667,00	0,00	0,00
24	Dinas Kelautan & Perikanan	3.193.326.900,00	0,00	0,00	3.193.326.900,00	0,00	0,00
25	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	2.821.085.490,00	0,00	0,00	2.821.085.490,00	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	512.478.300,00	0,00	0,00	512.478.300,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	5.352.039.150,00	1.961.360.000,00	0,00	7.313.399.150,00	1.961.360.000,00	36,65
28	Sekretariat DPRD	6.599.605.360,00	0,00	0,00	6.599.605.360,00	0,00	0,00
29	Kec. Tanjung Redeb	2.772.039.516,00	0,00	0,00	2.772.039.516,00	0,00	0,00
30	Kec. Gunung Tabur	604.203.050,00	1.695.944.000,00	0,00	2.300.147.050,00	1.695.944.000,00	280,69
31	Kec. Sambaliung	1.964.801.489,00	0,00	0,00	1.964.801.489,00	0,00	0,00
32	Kec. Teluk Bayur	734.268.100,00	0,00	0,00	734.268.100,00	0,00	0,00
33	Kec. Segah	2.560.389.300,00	0,00	0,00	2.560.389.300,00	0,00	0,00
34	Kec. Kelay	348.085.193,00	0,00	0,00	348.085.193,00	0,00	0,00
35	Kec. Talisayan	586.225.250,00	0,00	0,00	586.225.250,00	0,00	0,00
36	Kec. Biduk-biduk	1.288.550.601,00	0,00	0,00	1.288.550.601,00	0,00	0,00
37	Kec. Maratua	615.127.700,00	0,00	0,00	615.127.700,00	0,00	0,00
38	Kec. Tabalar	211.000.850,00	0,00	0,00	211.000.850,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
39	Kec. Batu Putih	912.186.088,00	0,00	0,00	912.186.088,00	0,00	0,00
40	Kec. Biatan	479.433.750,00	0,00	0,00	479.433.750,00	0,00	0,00
41	Sekretariat KORPRI	60.045.000,00	0,00	60.045.000,00	0,00	(60.045.000,00)	(100,00)
42	Inspektorat	737.697.208,00	175.000.000,00	0,00	912.697.208,00	175.000.000,00	23,72
43	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	2.588.320.361,00	0,00	0,00	2.588.320.361,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2.702.871.063,00	43.550.000,00	0,00	2.746.421.063,00	43.550.000,00	1,61
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	434.813.249,00	60.045.000,00	0,00	494.858.249,00	60.045.000,00	13,81
	JUMLAH	**220.759.757.584,49**	**13.652.706.800,00**	**60.045.000,00**	**234.352.419.384,49**	**13.592.661.800,00**	**6,16**

b. Investasi pada Perusahaan Daerah Bhakti Praja senilai Rp288.371.844,42. Tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, aset-aset yang dimiliki Perusda Bhakti Praja untuk sementara diamankan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 428 Tahun 2007 tentang Pembekuan Sementara Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau. Penyebab berhentinya operasi Perusda Bhakti Praja karena belum pernah membukukan keuntungan dan aktifitas perusahaan yang pasif mengakibatkan beban anggaran Pemerintah Daerah selaku pemilik modal. Reklasifikasi Perusda Bhakti Praja dari investasi permanen ke aset lainnya pada Tahun 2013. Aset yang masih dikuasai Pemda adalah Tanah;

c. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan senilai Rp374.884.051,61 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan;

d. Aset yang direncanakan untuk dihapus (Piutang) senilai Rp6.982.067.000,0 yaitu senilai Rp46.950.000,00 merupakan kesalahan transfer Pendapatan Retribusi Daerah ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi pada Tahun 2009 yang sudah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan yang menyatakan Piutang tersebut tidak dapat dikembalikan dan Piutang Retribusi atas Ijin Pertambangan senilai Rp6.935.117.000,00 yang tidak dapat dipungut lagi karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; dan

e. Aset yang akan diserahkan kepada Pemprov Kaltim akibat perpindahan kewenangan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltim senilai Rp269.050.025.310,34 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Aset SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan yang tersebar berupa di wilayah Kabupaten Berau senilai Rp12.683.123.350,01;

2) Aset pada Dinas Perhubungan berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanensenilai Rp48.480.000,00;

3) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp635.160.000,00 yang terdiri atas Tanah SMAN 04 Berau senilai Rp472.640.000,00, Buku Laporan Lain-lain senilai Rp75.400.000,00, dan Kontur Zonasi Kecamatan Teluk Bayur (Dinas Kehutanan) senilai Rp87.120.000,00.

4) Aset P3D Senilai Rp255.322.585.723,33 terdiri atas Gedung dan Bangunan senilai Rp248.492.354.190,33 dan Peralatan dan Mesin senilai Rp6.830.231.533,00

5) Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan sebesar Rp360.676.237,00 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan.

f. *Treasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai senilai Rp264.778.067.000,00

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi amortisasi	(29.922.257.419,24)	(23.947.064.152,72)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada per 31 Desember 2024 senilai Rp29.992.257.419,24 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.975.193.266,53 atau 24,95% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp23.947.064.152,72. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.121 Amortisasi Per OPD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Beban Amortisasi 2024	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(432.400.000,00)	(19.465.833,33)	(451.865.833,33)	(19.465.833,33)	4,50
2	Dinas Kesehatan	(257.373.233,33)	(37.766.000,00)	(295.139.233,33)	(37.766.000,00)	14,67
3	RSUD Dr. Rivai	(360.602.700,00)	(450.000.000,00)	(810.602.700,00)	(450.000.000,00)	124,79
4	Dnas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(16.807.598.315,30)	(3.276.969.368,30)	(20.084.567.683,60)	(3.276.969.368,30)	19,50
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(24.348.333,33)	(31.216.666,67)	(55.565.000,00)	(31.216.666,67)	128,21
6	Dinas Perhubungan	(99.797.533,33)	(39.190.100,00)	(138.987.633,33)	(39.190.100,00)	39,27
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(556.233.424,88)	(356.861.314,60)	(913.094.739,48)	(356.861.314,60)	64,16
8	Dinas Komunikasi & Informatika	(1.224.465.950,83)	(359.652.246,67)	(1.584.118.197,50)	(359.652.246,68)	29,37
9	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(57.985.340,67)	(55.727.450,00)	(113.712.790,67)	(55.727.450,00)	96,11
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(96.518.666,67)	(13.091.333,33)	(109.610.000,00)	(13.091.333,33)	13,56
11	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(107.773.875,00)	(39.663.405,00)	(147.437.280,00)	(39.663.405,00)	36,80
12	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(12.487.500,00)	(14.143.675,82)	(26.631.175,82)	(14.143.675,82)	113,26

(dalam rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	Beban Amortisasi 2024	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(614.985.598,33)	(270.419.426,67)	(885.405.025,00)	(270.419.426,67)	43,97
14	Sekretariat Daerah	(160.262.092,50)	(45.032.486,67)	(205.294.579,17)	(45.032.486,67)	28,10
15	Sekretariat DPRD	(48.027.835,23)	(38.944.022,80)	(86.971.858,03)	(38.944.022,80)	81,09
16	Kantor Penghubung	(45.000.000,00)	0,00	(45.000.000,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(50.000.000,00)	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
18	Dinas Perikanan	(8.602.500,00)	(6.882.000,00)	(15.484.500,00)	(6.882.000,00)	80,00
19	Dinas Perkebunan	(19.500.000,00)	0,00	(19.500.000,00)	0,00	0,00
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	(221.033.666,66)	(96.550.916,67)	(317.584.583,32)	(96.550.916,67)	43,68
21	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	(92.880.000,00)	0,00	(92.880.000,00)	0,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	(1.194.426.666,66)	(441.036.666,67)	(1.635.463.333,33)	(441.036.666,67)	36,92
23	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	(566.205.233,34)	(128.649.193,33)	(694.854.426,67)	(128.649.193,33)	22,72
24	BPKAD	(430.646.666,67)	(163.146.666,67)	(593.793.333,34)	(163.146.666,67)	37,88
25	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(86.797.516,67)	(36.067.800,00)	(122.865.316,67)	(36.067.800,00)	41,55
26	Dinas Pertanahan	(49.500.000,00)		(49.500.000,00)	0,00	0,00
27	Kecamatan Tanjung Redeb	(11.861.336,67)	(10.166.860,00)	(22.028.196,67)	(10.166.860,00)	85,71
28	Kecamatan Biatan	(3.884.166,66)	(65.833,33)	(3.950.000,00)	(65.833,33)	1,69
29	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	(305.866.000,01)	(26.484.000,00)	(332.350.000,01)	(26.484.000,00)	8,66
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	**(23.947.064.152,74)**	**(5.975.193.266,52)**	**(29.922.257.419,24)**	**(5.975.193.266,53)**	**24,95**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(219.834.433.579,33)	(213.193.323.774,33)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada per 31 Desember 2024 senilai Rp219.834.433.579.33 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.641.109.805,00 atau 3,12% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp213.193.323.774,33. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(77.787.632.748,33)	0,00	0,00	(77.787.632.748,33)	0,00	1,16
2	Dinas Kesehatan	(36.850.639.304,00)	(3.981.096.855,00)	0,00	(40.831.736.159,00)	(3.981.096.855,00)	10,80
3	RSUD Dr. Rivai	(13.856.244.734,00)	0,00	0,00	(13.856.244.734,00)	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(13.255.699.140,00)	(165.000.000,00)	0,00	(13.420.699.140,00)	(165.000.000,00)	1,24
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(817.497.992,00)	0,00	0,00	(817.497.992,00)	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	(188.322.708,00)	0,00	0,00	(188.322.708,00)	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.211.234.145,00)	0,00	0,00	(2.211.234.145,00)	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	(383.930.333,00)	(224.400.000,00)	0,00	(608.330.333,00)	(224.400.000,00)	58,45
9	Dinas Sosial	(665.448.520,00)	0,00	0,00	(665.448.520,00)	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(389.383.333,00)	0,00	0,00	(389.383.333,00)	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(243.771.613,00)	0,00	0,00	(243.771.613,00)	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	(343.835.151,00)	0,00	0,00	(343.835.151,00)	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(1.101.924.582,00)	0,00	0,00	(1.101.924.582,00)	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	(324.743.084,00)	0,00	0,00	(324.743.084,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	(9.663.396.255,00)	0,00	0,00	(9.663.396.255,00)	0,00	0,00
18	Dinas Komunikasi & Informatika	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(2.607.209.958,00)	0,00	0,00	(2.607.209.958,00)	0,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(792.523.118,00)	0,00	0,00	(792.523.118,00)	0,00	0,00
21	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(386.918.755,00)	0,00	0,00	(386.918.755,00)	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(1.154.845.145,00)	0,00	0,00	(1.154.845.145,00)	0,00	0,00
24	Dinas Perikanan	(2.726.885.031,00)	0,00	0,00	(2.726.885.031,00)	0,00	0,00
25	Dinas Pertanian & Peternakan	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	(511.744.622,00)	0,00	0,00	(511.744.622,00)	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	(4.941.414.908,00)	(1.450.080.238,00)	0,00	(6.391.495.146,00)	(1.450.080.238,00)	29,35
28	Sekretariat DPRD	(6.161.472.218,00)	0,00	0,00	(6.161.472.218,00)	0,00	0,00
29	Sekretariat Korpri	(59.476.250,00)	0,00	59.476.250,00	(118.952.500,00)	(59.476.250,00)	100,00
30	Kec. Tanjung Redeb	(2.752.033.234,00)	0,00	0,00	(2.752.033.234,00)	0,00	0,00
31	Kec. Gunung Tabur	(777.047.615,00)	(601.982.712,00)	0,00	(1.379.030.327,00)	(601.982.712,00)	77,47
32	Kec. Sambaliung	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00
33	Kec. Teluk Bayur	(709.389.145,00)	0,00	0,00	(709.389.145,00)	0,00	0,00
34	Kec. Segah	(2.545.898.325,00)	0,00	0,00	(2.545.898.325,00)	0,00	0,00
35	Kec. Kelay	(314.999.604,00)	0,00	0,00	(314.999.604,00)	0,00	0,00
36	Kec. Talisayan	(560.744.273,00)	0,00	0,00	(560.744.273,00)	0,00	0,00
37	Kec. Biduk-Biduk	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00
38	Kec. Maratua	(587.889.552,00)	0,00	0,00	(587.889.552,00)	0,00	0,00
39	Kec. Tabalar	(158.730.350,00)	0,00	0,00	(158.730.350,00)	0,00	0,00
40	Kec. Batu Putih	(888.329.576,00)	0,00	0,00	(888.329.576,00)	0,00	0,00
41	Kec. Biatan	(468.850.598,00)	0,00	0,00	(468.850.598,00)	0,00	0,00
42	Inspektorat	(693.588.630,00)	(175.000.000,00)	0,00	(868.588.630,00)	(175.000.000,00)	25,23
43	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	(3.039.857.876,00)	(43.550.000,00)	0,00	(3.083.407.876,00)	(43.550.000,00)	1,43
45	Badan Pendapatan Daerah	(6.982.067.000,00)	0,00	0,00	(6.982.067.000,00)	0,00	0,00
46	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(427.962.207,00)	59.476.250,00	0,00	(368.485.957,00)	59.476.250,00	(13,90)
	JUMLAH	**(213.193.323.774,33)**	**(6.581.633.555,00)**	**59.476.250,00**	**(219.834.433.579,33)**	**(6.641.109.805,00)**	**3,12**

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	45.378.771.461,24	10.054.161.356,28

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang beban, Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Transfer. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp45.378.771.461,24 mengalami **kenaikan** senilai Rp35.324.610.104,96 atau 351,34% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp10.054.161.356,28. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.123 Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
Utang PFK	35.836.120,00	35.836.120,00	22.126.952,00	22.126.952,00	(13.709.168,00)	(38,26)
Pendapatan di terima dimuka	1.447.515,00	0,00	0,00	1.447.515,00	0,00	0,00
Utang Belanja	8.911.589.717,91	8.911.589.717,91	12.212.185.939,75	12.212.185.939,75	3.300.596.221,84	37,04
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.105.288.003,37	731.344.760,07	32.769.067.811,19	33.143.011.054,49	32.037.723.051,12	2.898,59
JUMLAH	**10.054.161.356,28**	**9.678.770.597,98**	**45.003.380.702,94**	**45.378.771.461,24**	**35.324.610.104,96**	**351,34**

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	22.126.952,00	35.836.120,00

PFK Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2024 senilai Rp22.126.952,00 mengalami **penurunan** senilai Rp13.709.168,0000 atau 38,26% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp35.836.120,00. Perhitungan Fihak Ketiga oleh Bendahara Pengeluaran (pajak) belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian :

Tabel 5.124 Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Utang PFK	35.836.120,00	35.836.120,00	22.126.952,00	22.126.952,00	(13.709.168,00)	(38,26)
	JUMLAH	**35.836.120,00**	**35.836.120,00**	**22.126.952,00**	**22.126.952,00**	**(13.709.168,00)**	**(38,26)**

Tabel 5.125 Kewajiban Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

NO	UTANG PFK 2024					
	NAMA OPD	NPWP	KETERANGAN	TANGGAL		NOMINAL
				BUKU	SETOR	
1	BAPENDA	00.275.569.2-727.000	PPH 22	14/01/2025	14/01/2025	29.878,00
2	BAPENDA	00.275.569.2-727.000	PPH 21	09/01/2025	09/01/2025	470.000,00
3	BAPENDA	00.275.569.2-727.000	PPH 22	09/01/2025	09/01/2025	54.595,00
4	BAPENDA	00.275.569.2-727.000	PPH 21	09/01/2025	09/01/2025	530.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	22/01/2025	22/01/2025	1.879.117,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	256.243,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	1.534.054,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	22/01/2025	22/01/2025	209.189,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	1.792.405,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	244.419,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	1.783.784,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	243.243,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	693.694,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	94.595,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	1.300.676,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	177.365,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	21/01/2025	21/01/2025	1.222.506,00
18	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	21/01/2025	21/01/2025	166.705,00
19	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	21/01/2025	21/01/2025	580.523,00
20	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	21/01/2025	21/01/2025	79.162,00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	21/01/2025	21/01/2025	242.793,00
22	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	21/01/2025	21/01/2025	33.108,00
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	21/01/2025	21/01/2025	1.817.477,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	21/01/2025	21/01/2025	247.838,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	21/01/2025	21/01/2025	624.324,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	21/01/2025	21/01/2025	85.135,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	249.730,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	34.054,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	1.650.000,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 4(2)	23/01/2025	23/01/2025	262.500,00
31	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPN	23/01/2025	23/01/2025	708.559,00
32	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 22	23/01/2025	23/01/2025	96.622,00
33	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 23	23/01/2025	23/01/2025	229.550,00
34	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 23	23/01/2025	23/01/2025	252.337,00
35	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 23	23/01/2025	23/01/2025	344.324,00

(dalam rupiah)

NO	UTANG PFK 2024					
	NAMA OPD	NPWP	KETERANGAN	TANGGAL		NOMINAL
				BUKU	SETOR	
36	DINAS PEKERJAAN UMUM	00.293.419.8-727.000	PPH 23	23/01/2025	23/01/2025	327.928,00
37	DINAS KESEHATAN	00.293.418.0-727.000		06/01/2025	06/01/2025	279.162,00
38	DINAS KESEHATAN	00.293.418.0-727.000		06/01/2025	06/01/2025	226.541,00
39	DINAS KESEHATAN	00.293.418.0-727.000		06/01/2025	06/01/2025	248.541,00
40	DINAS KESEHATAN	00.293.418.0-727.000		06/01/2025	06/01/2025	252.703,00
41	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	24.120,00
42	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	15.678,00
43	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	433.063,00
44	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	15.678,00
45	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	18.000,00
46	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	24.120,00
47	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	22.914,00
48	DINAS KEARSIPAN	00.292.932.1-727.000		12/01/2025	12/01/2025	18.000,00
TOTAL						**22.126.952,00**

5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimua

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2024	Tahun 2023
	1.447.515,00	1.447.515,00

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2024 senilai Rp1.447.515,00 tidak ada perbedaan dengan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp1.447.515,00. Pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.447.515,00 yaitu saldo pada BRI atas dana Jamkesmas dari pusat yang tidak dapat dipergunakan sebelum ada verifikasi tagihan.

Tabel 5.126 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.447.515,00	1.447.515,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.447.515,00**	**1.447.515,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	12.212.185.939,75	8.911.589.717,91

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2024 senilai Rp12.212.182.939,75 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.300.596.221

,84 atau 37,04% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.911.589.717,91. Utang Belanja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127 Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Utang Beban Pegawai	7.014.868.087,91	7.000.484.087,91	10.121.505.500,70	10.121.505.500,70	3.106.637.412,79	44,29
2	Utang Beban Jasa Kantor	1.896.721.630,00	1.896.721.630,00	2.090.680.439,05	2.090.680.439,05	193.958.809,05	10,23
Jumlah		**8.911.589.717,91**	**8.897.205.717,91**	**12.212.185.939,75**	**12.212.185.939,75**	**3.300.596.221,84**	**37,04**

5.3.2.3.1 Utang Beban Pegawai

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Belanja (Beban Pegawai)	10.121.505.500,70	7.014.868.087,91

Utang Belanja (Beban Pegawai) adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi akibat perikatan dengan pegawai, utang belanja (beban pegawai) ini terdiri dari Utang pegawai belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi daerah, utang jasa pelayanan kesehatan asn, dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pppk dan utang belanja iuran jaminan kesehatan pppk. Utang Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2024 senilai Rp10.121.505.500,70, mengalami **kenaikan** senilai Rp3.106.637.412,79 atau 44,29% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.014.868.087,91. Dengan rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.128 Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	91.817.800,00	77.433.800,00	74.262.000,00	74.262.000,00	(17.555.800,00)	(19,12)
2	RSUD Abd Rivai	6.920.221.487,91	6.920.221.487,91	10.047.243.500,70	10.047.243.500,70	3.127.022.012,79	45,19
3	Inspektorat	2.828.800,00	2.828.800,00	0,00	0,00	(2.828.800,00)	(100,00)
Jumlah		**7.014.868.087,91**	**7.000.484.087,91**	**10.121.505.500,70**	**10.121.505.500,70**	**3.106.637.412,79**	**(44,29)**

5.3.2.3.2 Utang Jasa Kantor

	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang Jasa Kantor	2.090.680.439,05	1.896.721.630,00

Utang Jasa Kantor (Air, Listrik, telepon, Internet) dari beberapa OPD yang belum melakukan realisasi pembayaran sampai tanggal per 31 Desember 2024. Adapun saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.090.680.439,05. Terjadi **kenaikan**

senilai Rp193.958.809,05 atau 10,23% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp1.896.721.630,00. Rincian utang jasa kantor dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.129 Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	2.455.900,00	2.455.900,00	733.400,00	733.400,00	(1.722.500,00)	(70,14)
2	Dinas Kesehatan	477.485.989,00	477.485.989,00	192.461.000,00	192.461.000,00	(285.024.989,00)	(59,69)
3	RSUD Abd Rivai	165.881.660,00	165.881.660,00	651.381.027,05	651.381.027,05	485.499.367,05	292,68
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	0,00	0,00	71.096.037,00	71.096.037,00	71.096.037,00	0,00
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	197.500,00	197.500,00	208.500,00	208.500,00	11.000,00	5,57
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	884.500,00	884.500,00	884.500,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.459.957,00	15.459.957,00	0,00	0,00	(15.459.957,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	420.520,00	420.520,00	420.520,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	19.225.622,00	19.225.622,00	21.258.815,00	21.258.815,00	2.033.193,00	10,58
10	Dinas Pangan	379.900,00	379.900,00	5.484.550,00	5.484.550,00	5.104.650,00	1.343,68
11	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	3.119.000,00	3.119.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00	2.449.000,00	78,52
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	450.000,00	450.000,00	4.381.765,00	4.381.765,00	3.931.765,00	873,73
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	3.501.850,00	3.501.850,00	4.031.950,00	4.031.950,00	530.100,00	15,14
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	31.005.502,00	31.005.502,00	3.636.116,00	3.636.116,00	(27.369.386,00)	(88,27)
15	Dinas Perhubungan	25.846.267,00	25.846.267,00	26.656.975,00	26.656.975,00	810.708,00	3,14
16	Dinas Komunikasi & Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	266.591.629,00	266.591.629,00	208.511.827,00	208.511.827,00	(58.079.802,00)	(21,79)
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.387.404,00	15.387.404,00	12.989.575,00	12.989.575,00	(2.397.829,00)	(15,58)
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	67.723.614,00	67.723.614,00	75.183.275,00	75.183.275,00	7.459.661,00	11,01
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.712.700,00	1.712.700,00	8.532.587,00	8.532.587,00	6.819.887,00	398,20
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	991.600,00	991.600,00	21.944.965,00	21.944.965,00	20.953.365,00	2.113,09
22	Dinas Perikanan	35.166.419,00	35.166.419,00	20.793.444,00	20.793.444,00	(14.372.975,00)	(40,87)
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	17.842.577,00	17.842.577,00	22.938.407,00	22.938.407,00	5.095.830,00	28,56
24	Dinas Perkebunan	13.560.097,00	13.560.097,00	13.917.934,00	13.917.934,00	357.837,00	2,64
25	Sekretariat Daerah	602.931.781,00	602.931.781,00	592.687.543,00	592.687.543,00	(10.244.238,00)	(1,70)
26	Kantor Penghubung	23.128.599,00	23.128.599,00	1.486.028,00	1.486.028,00	(21.642.571,00)	(93,57)
27	Inspektorat	36.089.281,00	36.089.281,00	15.972.957,00	15.972.957,00	(20.116.324,00)	(55,74)
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	325.100,00	325.100,00	919.200,00	919.200,00	594.100,00	182,74
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	2.607.000,00	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
31	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.914.517,00	11.914.517,00	13.959.127,00	13.959.127,00	2.044.610,00	17,16
32	Sekretariat DPRD	36.866.817,00	36.866.817,00	49.186.567,00	49.186.567,00	12.319.750,00	33,42
33	Kecamatan Tanjung Redeb	0,00	0,00	14.247.168,00	14.247.168,00	14.247.168,00	0,00
34	Kecamatan Gunung Tabur	560.200,00	560.200,00	0,00	0,00	(560.200,00)	(100,00)
35	Kecamatan Sambaliung	0,00	0,00	12.740.369,00	12.740.369,00	12.740.369,00	0,00
36	Kecamatan Teluk Bayur	752.900,00	752.900,00	0,00	0,00	(752.900,00)	(100,00)
37	Kecamatan Segah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Maratua	1.664.720,00	1.664.720,00	2.949.223,00	2.949.223,00	1.284.503,00	77,16
39	Kecamatan Batu Putih	1.365.240,00	1.365.240,00	804.500,00	804.500,00	(560.740,00)	0,00
39	Kecamatan Biatan	3.090.340,00	3.090.340,00	10.105.588,00	10.105.588,00	7.015.248,00	227,01
40	Badan Kesbang, Politik & Linmas	14.046.948,00	14.046.948,00	0,00	0,00	(14.046.948,00)	(100,00)
Jumlah		**1.896.721.630,00**	**1.896.721.630,00**	**2.090.680.439,05**	**2.090.680.439,05**	**193.958.809,05**	**10,23**

5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang Jangka Pendek Lainnya	33.143.011.054,49	1.105.288.003,37

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2024 senilai Rp33.143.011.054,49 mengalami **kenaikan** senilai Rp32.037.723.051,12 atau 2.898,59% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.105.288.003,37, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.130 Utang Jangka Pendek Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2024	kenaikan penurunan	%
1	RSUD Abd Rivai	731.344.760,07	731.344.760,07	0,00	0,00	(731.344.760,07)	(100,00)
2	Dinas Kepemudaan dan olahraga	0,00	0,00	153.161.498,00	153.161.498,00	153.161.498,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	373.943.242,75	0,00	940.808,86	374.884.051,61	940.808,86	0,25
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	0,55	0,00	32.614.965.504,33	32.614.965.504,33	32.614.965.504,88	0,00
JUMLAH		**1.105.288.003,37**	**731.344.760,07**	**32.769.067.811,19**	**33.143.011.054,94**	**32.037.723.051,12**	**2.898,59**

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 kewajiban Pemerintah kabupaten Berau kepada pihak Ketiga sesuai reviu Inspektorat nomor: 700/21/LHP-REV/Wil.I/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 atas paket pekerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp153.161.498,00 di Tahun 2024 Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2024. PelunasanUtang Barjas RSUD Abdul Rivai Rp731.344.760,07 dan Penambahan Jamrek BPKAD

senilai Rp940.808,86, serta Koreksi Reklas Aset Tetap JJI senilai Rp32.614.965.504,33 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.131 Rincian Utang KDP

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	UTANG JPL 2023	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	UTANG JPL 2024
1	**Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah**	**373.943.242,75**	**0,00**	**940.808,86**	**374.884.051,61**
	BNI 0140845262	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
	BNI 0139158051	36.510.000,00	0,00	0,00	36.510.000,00
	BNI 0130207618 / 0140207610	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
	BPD	231.985.534,11	0,00	797.655,43	232.783.189,54
	BPD	68.697.708,64	0,00	143.153,43	68.840.862,07
2	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**0,00**	**0,00**	**153.161.498,00**	**153.161.498,00**
	Hutang Pembayaran Pengawasan Pemagaran Lap Bola Kampung Biatan Lempake	0,00	0,00	8.769.000,00	8.769.000,00
	Hutang Pengawasan Pembayaran Rehab Pendopo Lap Pemuda	0,00	0,00	9.879.000,00	9.879.000,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Pembuatan Lanjutan Kanopi Lahan Parkir Kolam Renang	0,00	0,00	9.879.000,00	9.879.000,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Renovasi Kolam Renang Kakaban Aquatic	0,00	0,00	11.377.500,00	11.377.500,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Rehab Ruang WC Lap Bola Batiwakal	0,00	0,00	9.768.000,00	9.768.000,00
	Pembangunan Lapangan Bola Labanan Makarti	0,00	0,00	103.488.998,00	103.488.998,00
3	**Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang KOREKSI REKLAS ASET TETAP JJI KE KDP**	**0,00**	**0,00**	**32.614.965.504,33**	**32.614.965.504,33**
	Revitalisasi Jalan Dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pulau Derawan Kec. Tanjung Redeb	0,00	0,00	1.424.999.500,00	1.424.999.500,00
	Penataan Tepian Kalimarau	0,00	0,00	211.303.021,80	211.303.021,80
	Peningkatan Jalan Poros Muara Lesan	0,00	0,00	1.198.747.507,45	1.198.747.507,45
	Peningkatan Jalan Kawasan Pendidikan - JI. Gunung Agung Kel. Gunung Panjang (APBD-P)	0,00	0,00	731.227.285,00	731.227.285,00
	Pembangunan TPA Baru	0,00	0,00	779.169.335,83	779.169.335,83
	Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO A)	0,00	0,00	7.668,48	7.668,48
	Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO B)	0,00	0,00	7.864.237,44	7.864.237,44
	Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Batu Putih	0,00	0,00	257.632.118,50	257.632.118,50
	Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Raja Alam (Samburakat - Sambakungan)	0,00	0,00	449.755.442,56	449.755.442,56

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	UTANG JPL 2023	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	UTANG JPL 2024
	Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kampung Maluang	0,00	0,00	227.939.625,83	227.939.625,83
	Pembangunan Reservoar Batu Batu Kampung Batumbuk	0,00	0,00	137.107.165,29	137.107.165,29
	Pembangunan Turap Sambaliung	0,00	0,00	1.451.030.927,00	1.451.030.927,00
	Pembangunan Turap Sheet Pile Belakang Kantor Bupati	0,00	0,00	1.973.197.255,76	1.973.197.255,76
	Pembangunan Embung Air Baku Maratua	0,00	0,00	-	-
	Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Cut Nya Dien - Jl. Raja Alam Kel. Rinding Dan Sekitarnya	0,00	0,00	447.782.130,00	447.782.130,00
	Pembangunan Saluran Pembuang Gang Elang Kel. Rinding Dan Sekitarnya	0,00	0,00	683.722.315,00	683.722.315,00
	Normalisasi Sungai Kampung Campur Sari Kec. Talisayan (APBD-P)	0,00	0,00	177.124.618,13	177.124.618,13
	Pembangunan Drainase Kawasan Jalan Cemara RT 09 Kel. Rinding (APBD-P)	0,00	0,00	450.532.616,00	450.532.616,00
	pembangunan jembatan Muara Lesan	0,00	0,00	285.280.180,39	285.280.180,39
	pembangunan Jalan Mantaritip-Buyung-Buyung	0,00	0,00	693.971.430,00	693.971.430,00
	pembangunan Jalan Kampung Maluang (Jalan Poros Tanjung Batu)-Paribau (Jalan Poros Tanjung Selor)	0,00	0,00	291.062.070,00	291.062.070,00
	Pembangunan Jalan Buah PURI RT. 11 Kampung Maluang Poros Bulungan	0,00	0,00	79.595.819,00	79.595.819,00
	Pembangunan Jalan Buyung-Buyung - Semurut Jalur 2	0,00	0,00	1.095.910.400,00	1.095.910.400,00
	pembangunan Jalan Kampung Jagung Samburakat dan sekitarnya	0,00	0,00	676.685.750,00	676.685.750,00
	Pembangunan Gedung RSUD Tanjung Redeb Kabupaten Berau (MYC)	0,00	0,00	11.475.125.035,00	11.475.125.035,00
	Pembangunan Taman makam Pahlawan	0,00	0,00	81.404.096,00	81.404.096,00
	Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Kelurahan Rinding dan Sekitarnya (APBD-P)	0,00	0,00	447.507.315,00	447.507.315,00
	Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam Kec. Teluk Bayur dan Sekitarnya (APBD-P)	0,00	0,00	825.350.680,04	825.350.680,04
	Lanjutan Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Kampung Baru - Stasiun Kec. Teluk Bayur (APBD-P)	0,00	0,00	703.377.641,05	703.377.641,05
	Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam 1 Sambaliung dan Sekitarnya (APBD-P)	0,00	0,00	683.874.600,00	683.874.600,00
	Lanjutan Peningkatan Jalan Rahmat Hidayat Kec. Gunung Tabur (APBD-P)	0,00	0,00	161.717.883,00	161.717.883,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Tabalar Muara	0,00	0,00	905.396.310,00	905.396.310,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Makam Datu Si Panaik	0,00	0,00	194.712.430,48	194.712.430,48
	Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Semurut	0,00	0,00	1.166.669.132,20	1.166.669.132,20

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	UTANG JPL 2023	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	UTANG JPL 2024
	Lanjutan pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang	0,00	0,00	1.594.086.797,85	1.594.086.797,85
	Lanjutan pembangunan Jalan Kawasan Kampung Sukan Tengah	0,00	0,00	220.777.086,25	220.777.086,25
	Pemagaran dan Gapura Kodim	0,00	0,00	91.596.864,00	91.596.864,00
	Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) beserta Meubelair Sat Reskrim dan SatbNarkoba Mako Polres Km5	0,00	0,00	266.997.639,00	266.997.639,00
	Lanjutan Pembangunan Masjid Mapolres	0,00	0,00	64.723.575,00	64.723.575,00
TOTAL		**373.943.242,75**	**0,00**	**32.769.067.811,19**	**33.143.011.053,49**

5.3.2.5 Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki kasus hukum yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2024
EKUITAS	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Berau pada kondisi tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.612.014.016.886,86 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.778.676.675.286,30 atau 13,86% dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp12.833.337.341.600,50.

Tabel 5.132 Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	EKUITAS	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50	1.778.676.675.286,30	13,86
	JUMLAH	**14.612.014.016.886,86**	**12.833.337.341.600,50**	**1.778.676.675.286,30**	**13,86**

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	5.520.083.482.717,53	5.209.408.567.969,90

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO Tahun 2024 adalah senilai Rp5.520.083.482.717,53 mengalami **kenaikan** senilai Rp310.674.914.747,63 atau 5,96% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp5.209.408.567.969,90. Rincian pendapatan-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.133 Realisasi Pendapatan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)	Proporsi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	369.009.759.034,84	292.248.136.094,90	76.761.622.939,94	26,27	6,68
2	Pendapatan Transfer - LO	5.116.371.062.500,00	4.853.321.391.091,00	263.049.671.409,00	5,42	92,69
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	34.702.661.182,69	63.839.040.784,00	(29.136.379.601,31)	(45,64)	0,63
	JUMLAH	**5.520.083.482.717,53**	**5.209.408.567.969,90**	**310.674.914.747,63**	**5,96**	

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	369.009.759.034,84	292.248.136.094,90

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp369.009.759.034,84 mengalami **kenaikan** senilai Rp76.761.622.939,94 atau 26,27% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp292.248.136.094,90. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.134 Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	92.949.213.837,00	93.535.186.343,00	(585.972.506,00)	(0,63)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.045.230.067,00	14.879.768.897,00	4.165.461.170,00	27,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	38.077.899.738,26	19.765.364.436,57	18.312.535.301,69	92,65
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	218.937.415.392,58	164.067.816.418,33	54.869.599.174,25	33,44
	JUMLAH	**369.009.759.034,84**	**292.248.136.094,90**	**76.761.623.139,94**	**26,27**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	92.949.213.837,00	93.535.186.343,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp92.949.213.837,00 mengalami **penurunan** senilai Rp585.972.506,00 atau 0,63% dibanding dengan Tahun 2023 senilai Rp93.535.186.343,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135 Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel - LO	0,00	6.782.984.551,00	(6.782.984.551,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran - LO	0,00	30.693.215.360,00	(30.693.215.360,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan - LO	0,00	344.184.773,00	(344.184.773,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame - LO	283.862.700,00	594.227.406,00	(310.364.706,00)	(52,23)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	31.620.074.132,00	(31.620.074.132,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir - LO	0,00	538.591.286,00	(538.591.286,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah - LO	555.240,00	509.520,00	45.720,00	8,97
8	Pajak Sarang Burung Walet LO	14.745.000,00	335.653.000,00	(320.908.000,00)	(95,61)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	166.622.768,00	653.284.580,00	(486.661.812,00)	(74,49)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	6.874.212.505,00	7.136.269.757,00	(262.057.252,00)	(3,67)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	15.277.432.416,00	14.836.191.978,00	441.240.438,00	2,97
12	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	30.117.286.511,00	0,00	30.117.286.511,00	0,00
13	PBJT-Tenaga Listrik-LO	31.793.099.131,00	0,00	31.793.099.131,00	0,00
14	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	7.738.735.657,00	0,00	7.738.735.657,00	0,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
15	PBJT-Jasa Parkir-LO	219.597.201,00	0,00	219.597.201,00	0,00
16	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	463.064.708,00	0,00	463.064.708,00	0,00
	JUMLAH	**92.949.213.837,00**	**93.535.186.343,00**	**(585.972.506,00)**	**(0,63)**

Tercapainya target pajak daerah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah banyak potensi–potensi pajak daerah mengalami kenaikan/bertambah.

Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LRA		**91.558.760.332,00**
Mutasi Tambah :		
Penambahan Piutang pada Badan Pendapatan Daerah		
Pajak Hotel/ PBJT- Jasa Perhotelan	133.866.522,00	
Pajak Restoran/ PBJT-Makanan dan/ atau Minuman	2.713.000.561,00	
Pajak Hiburan/ PBJT-Jasa Kesenian & Hiburan	56.663.390,00	
Pajak Penerangan Jalan/ PBJT-Tenaga Listrik	2.729.548.936,00	
Pajak Parkir/ PBJT- Jasa Parkir	495.400,00	
Pajak Reklame	21.842.080,00	
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	2.576.000,00	
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.075.915.363,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**9.733.908.252,00**
Pengurangan Penerimaan Pembayaran Piutang pada Badan Pendapatan Daerah		
Mutasi Kurang :		
Pajak Hotel/ PBJT- Jasa Perhotelan	210.538.987,00	
Pajak Restoran/ PBJT-Makanan dan/ atau Minuman	3.331.531.483,00	
Pajak Penerangan Jalan/ PBJT-Tenaga Listrik	3.099.237.578,00	
Pajak Parkir/ PBJT- Jasa Parkir	32.381.769,00	
Pajak Reklame	28.396.813,00	
Pajak Sarang Burung Walet	47.787.000,00	
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	30.562.500,00	
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.563.018.617,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**8.343.454.747,00**
Total Pendapatan Pajak Daerah - LO		**92.949.213.837,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	19.045.230.067,00	14.879.768.897,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dipungut dan dikelola oleh beberapa OPD penghasil antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penghubung serta Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp19.045.230.067,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.165.461.170,00 atau 27,99% dibanding dengan Tahun 2023 senilai Rp14.879.768.897,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000,00	26.400.000,00	6.600.000,00	25,00
2	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.562.891.800,00	6.506.654.100,00	56.237.700,00	0,86
3	DPUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.210.150,00	712.067.950,00	338.142.200,00	47,49
4	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	190.722.060,00	220.932.600,00	(30.210.540,00)	(13,67)
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan & Pelindung	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	179.250.000,00	154.000.000,00	25.250.000,00	16,40
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyediaan Penyedot Kakus	2.390.498.000,00	1.807.108.448,00	583.389.552,00	32,28
7	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Ret. Pelayanan Pasar, Ret. Pelayanan Tera/Tera ulang dan Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	5.277.656.443,00	2.390.583.696,00	2.887.072.747,00	120,77
8	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, PKB, Pelayanan Kepelabuhan, dan Pelayanan Tempat Khusus Parkir	618.186.710,00	494.584.860,00	123.601.850,00	24,99
9	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	670.066.804,00	880.209.643,00	(210.142.839,00)	(23,87)
10	Dinas Kepemudaan & Olahraga	Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan, Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Penyewaan Tanah, Penyewaan Bangunan	505.176.500,00	667.131.000,00	(161.954.500,00)	(24,28)
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	435.620.000,00	52.901.000,00	382.719.000,00	723,46
12	Dinas Perikanan	Retribusi Penyewaan Banguanan, Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih & Ret. Penyediaan Tempat Pelelangan	174.208.000,00	177.730.000,00	(3.522.000,00)	(1,98)
13	Dinas Pertanian & Peternakan	Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	288.313.000,00	265.293.000,00	23.020.000,00	8,68
14	Sekertariat Daerah/Kantor Penghubung	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	633.700.000,00	465.500.000,00	168.200.000,00	36,13
15	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.730.600,00	58.672.600,00	(22.942.000,00)	(39,10)
JUMLAH			**19.045.230.067,00**	**14.879.768.897,00**	**4.165.461.170,00**	**27,99**

Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi - LRA		**18.110.450.696,00**
Mutasi Tambah :		
Penyewaan Tanah & Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah & Dinas Kepemudaan & Olahraga	1.502.000,00	
Penyewaan Kios, Los dan Pelataran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.526.666.168,00	
Jumlah Mutasi Tambah :		1.528.168.168,00
Mutasi Kurang :		
Penyewaan Tanah & Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah	270.000,00	
Penyewaan Kios, Los dan Pelataran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	593.118.797,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		593.388.797,00
Total Pendapatan Retribusi - LO		**19.045.230.067,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	38.077.899.738,26	19.765.364.436,57

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemkab Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 senilai Rp38.077.899.738,26 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada Perusda pada Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp18.312.535.301,69 atau 92,65% dibanding dengan Tahun 2023 senilai Rp19.765.364.436,57, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.137 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1	Dividen BPD Kaltim	14.981.036.885,26	14.636.429.316,09	344.607.569,17	2,35
2	Laba PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	28.658.559,00	28.658.558,00	1,00	0,00
3	Perumda Air Minum Batiwakal	21.563.367.968,00	1.727.823.301,00	19.835.544.667,00	1.148,01
4	PT. Indo Pusaka Berau	1.499.991.300,00	3.372.453.261,48	(1.872.461.961,48)	(55,52)
5	Perumda Bhakti Praja	4.845.026,00	0,00	4.845.026,00	0,00
	Jumlah	**17.991.143.169,26**	**19.765.364.436,57**	**18.312.535.301,69**	**92,65**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO, dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		**17.986.298.143,26**
Mutasi Tambah :		
Laba/rugi tahun berjalan pada Perumda Bhakti Praja	4.845.026,00	
Laba/rugi tahun berjalan pada Perumda Air Minum Batiwakal	20.086.756.569,00	
Jumlah Mutasi Tambah :		**20.091.601.595,00**
Total Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		**38.077.899.738,26**

5.4.1.1.4 Lain - Lain PAD Yang Sah- LO

Lain-lain PAD Yang Sah -LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	218.937.415.392,58	164.067.816.418,33

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 senilai Rp218.937.415.392,58 mengalami **kenaikan** senilai Rp54.869.598.974,25 atau 33,44% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp164.067.816.418,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138 Lain – lain PAD Yang Sah - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	9.691.448.619,00	(9.691.448.619,00)	(100,00)
2	RSUD Abdul Rivai	Pendapatan BLUD	98.821.943.927,06	91.291.661.646,60	7.530.282.280,46	8,25
3	Dinas Perhubungan	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	18.607.400,00	(18.607.400,00)	(100,00)
3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	35.124.530,64	(35.124.530,64)	(100,00)
4	BPKAD (SKPKD)	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	116.243.492.088,40	61.864.750.838,07	54.378.741.250,33	87,90
5	Bapenda	Pendapatan Denda Retribusi & Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak	3.871.795.937,12	1.159.789.288,02	2.712.006.649,10	233,84
6	Dispora	Pendapatan Denda Retribusi	183.440,00	6.434.096,00	(6.250.656,00)	(97,15)
		Jumlah	**218.937.415.392,58**	**164.067.816.418,33**	**54.869.598.974,25**	**33,44**

Penjelasan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dijelaskan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA		**215.794.516.778,34**
Mutasi Tambah :		
Penambahan Piutang pada RSUD Abd Rivai	12.851.135.332,00	

Penambahan Piutang Denda Pajak pada Badan Pendapatan Daerah	409.063.985,52	
Penambahan Piutang Wisma Altit pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75.555.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah :		**13.335.754.317,52**
Mutasi Kurang :		
Pembayaran Piutang pada RSUD Abd Rivai	9.428.474.957,00	
Pengurangan Piutang Denda Pajak pada Badan Pendapatan Daerah	523.322.358,40	
Pembayaran Tagihan Penjualan Angsuran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	206.135.701,88	
Pembayaran Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	29.274.686,00	
Penambahan Piutang Wisma Altit pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.648.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		**10.192.855.703,28**
Total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO		**218.937.415.392,58**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	5.116.371.062.500,00	4.853.321.391.091,00

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima dan telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Transfer – LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 adalah senilai Rp5.116.371.062.500,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp263.049.671.409,00 atau 5,42% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.853.321.391.091,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.139 Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	4.264.173.583.192,00	4.126.159.415.291,00	138.014.167.901,00	3,34
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	16.869.131.000,00	0,00	16.869.131.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	835.328.348.308,00	727.161.975.800,00	108.166.372.508,00	14,88
	Jumlah	**5.116.371.062.500,00**	**4.853.321.391.091,00**	**263.049.671.409,00**	**5,42**

5.4.1.2.1 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	4.264.173.583.192,00	4.126.159.415.291,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 senilai Rp4.847.083.601.192,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp138.014.167.901,00

atau 3,34% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp4.126.159.415.291,00. Rincian transfer pemerintah pusat - LO sebagai berikut:

Tabel 5.140 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil	3.470.473.547.000,00	3.402.537.199.000,00	67.936.348.000,00	2,00
2	Dana Alokasi Umum	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00	23.217.598.807,00	4,10
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00	27.601.339.892,00	52,31
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	124.344.153.018,00	105.085.271.816,00	19.258.881.202,00	18,33
	Jumlah	**4.264.173.583.192,00**	**4.126.159.415.291,00**	**138.014.167.901,00**	**3,34**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	16.869.131.000,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO Tahun 2024 senilai Rp16.869.131.000,00, mengalami kenaikan senilai 16.869.131.000,00 atau 0,00,% dari realisasi Tahun 2023. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut;

Tabel 5.141 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat Lainnya - LO				
1	Dana Insentif Daerah	16.869.131.000,00	0,00	16.869.131.000,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**16.869.131.000,00**	**0,00**	**16.869.131.000,00**	**0,00**

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	835.328.348.308,00	727.161.975.800,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 senilai Rp835.328.348.308,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp108.166.372.508,00 atau 14,88% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp727.161.975.800,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah –LO tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.142 Transfer Antar Daerah – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO				
1	Pendapatan Bagi Hasil	479.368.348.308,00	502.649.475.800,00	(23.281.127.492,00)	(4,63)
2	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah	**835.328.348.308,00**	**727.161.975.800,00**	**108.166.372.508,00**	**14,88**

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LO	479.368.348.308,00	502.649.475.800,00

Bagi Hasil Tahun 2024 adalah senilai Rp479.368.348.308,00 mengalami **penurunan** senilai Rp23.281.127.492,00 atau 4,63% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp502.649.475.800,00. Pendapatan bagi hasil mencatat beberapa akun pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.143 Bagi Hasil - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Bagi Hasil - LO				
1	Pendapatan Bagi Hasil	479.368.348.308,00	502.649.475.800,00	(23.281.127.492,00)	(4,63)
	Jumlah	**479.368.348.308,00**	**502.649.475.800,00**	**(23.281.127.492,00)**	**(4,63)**

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

	Tahun 2024	Tahun 2023
Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00

Bantuan Keuangan Tahun 2024 adalah senilai Rp355.960.000.000,00 , mengalami **kenaikan** senilai Rp131.447.500.000,00 atau 58,55% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp224.512.500.000,00. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sarana pembangunan nasional, daerah, dan

kabupaten/kota; mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat serta untuk kegiatan yang mendukung hal yang berkaitan dengan tanggungjawab atau kesepakatan yang dibangun antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.144 Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (penurunan)	%
	Bantuan Keuangan				
1	Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Jumlah	**355.960.000.000,00**	**224.512.500.000,00**	**131.447.500.000,00**	**58,55**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34.702.661.182,69	63.839.040.784,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya senilai Rp34.702.661.182,69. Kondisi ini mengalami **penurunan** senilai Rp29.136.379.601,31 atau 45,64% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp63.839.040.784,00. Dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.145 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah	6.076.320.302,00	8.603.171.200,0	(2.526.850.898,00)	(29,37)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	28.626.340.880,69	55.235.869.584,00	(26.609.528.703,31)	(48,17)
JUMLAH		**34.702.661.182,69**	**63.839.040.784,00**	**(29.136.379.601,31)**	**(45,64)**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah	6.076.320.302,00	8.603.171.200,00

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp6.076.320.302,00 mengalami **penurunan** senilai 2.526.850.898,00 atau 29,37% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp8.603.171.200,00. Dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.146 Pendapatan Hibah - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Teluk Bayur	0,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)	(100,00)
2	Pendapatan Hibah Dinas Perkebunan	0,00	252.685.465,00	(252.685.465,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah pada Dinas Perhubungan	0,00	1.196.023.365,00	(1.196.023.365,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah pada KOMINFO	13.220.000,00	318.900.000,00	(305.680.000,00)	(95,85)
5	Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan	0,00	1.180.000.000,00	(1.180.000.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan Hibah pada Kecamatan Teluk Bayur	0,00	174.237.500,00	(174.237.500,00)	(100,00)
7	Pendapatan Hibah pada BPBD	0,00	190.000.000,00	(190.000.000,00)	(100,00)
8	Pendapatan Hibah pada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	0,00	546.321.000,00	(546.321.000,00)	(100,00)
9	Pendapatan Hibah pada Dinas Koperasi, perindustrian & Perdagangan	4.436.250,00	0,00	4.436.250,00	100,00
10	Pendapatan Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.050.077.330,00	(4.050.077.330,00)	(100,00)
11	Pendapatan Hibah pada Dinas Perpustakaan & Kearsipan	0,00	172.500.000,00	(172.500.000,00)	(100,00)
12	Pendapatan Hibah pada DPPKBP3A	0,00	505.426.540,00	(505.426.540,00)	(100,00)
13	Pendapatan Hibah Kecamatan Maratua	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Hibah DPMPTSP	141.950.000,00	0,00	141.950.000,00	100,00
15	Pendapatan Hibah Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	5.916.714.052,00	0,00	5.916.714.052,00	100,00
JUMLAH		**6.076.320.302,00**	**8.603.171.200,00**	**(2.526.850.898,00)**	**(29,37)**

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	28.626.340.880,69	55.235.869.584,00

Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp28.626.340.880,69 mengalami **penurunan** senilai Rp26.609.528.703,31 atau 48,17% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp55.235.869.584,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.147 Pendapatan Lainnya - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Lainnya	28.626.340.880,69	55.235.869.584,00	(26.609.528.703,31)	(48,17)
JUMLAH		**28.626.340.880,69**	**55.235.869.584,00**	**(26.609.528.703,31)**	**(48,17)**

Pendapatan Lainnya – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total Pendapatan Lainnya - LRA		**76.039.376.420,69**
Mutasi Kurang :		
Realisasi Piutang Bagi Hasil Pemegang IUPK (KPC)	47.413.035.540,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		**47.413.035.540,00**
Total Pendapatan Lainnya - LO		**28.626.340.880,69**

5.4.2 Beban - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban - LO	3.127.403.344.632,32	2.785.665.682.472,36

Beban – LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Tahun 2024 senilai Rp3.127.403.344.632,32 mengalami **kenaikan** senilai Rp341.737.662.159,96 atau 12,27% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp2.785.665.682.472,36. Rincian Beban – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.148 Beban – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	BEBAN - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	BEBAN OPERASI	2.751.394.750.385,32	2.435.635.007.069,36	315.759.743.315,96	12,96
2	BEBAN TRANSFER	370.233.794.664,00	348.203.838.088,00	22.029.956.576,00	6,33
3	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
JUMLAH		**3.127.403.344.632,32**	**2.785.665.682.472,36**	**341.737.662.159,96**	**12,27**

5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp2.751.394.750.385,32 mengalami **kenaikan** senilai Rp315.759.743.315,97 atau 12,96% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp2.435.635.007.069,36 Beban Operasi – LO terdiri dari ; Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain – Lain. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.149 Beban Operasi – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	BEBAN OPERASI - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	1.041.266.704.121,13	818.796.869.375,56	222.469.834.745,57	27,17
2	Beban Barang dan Jasa	857.982.324.607,43	796.699.707.092,91	61.282.617.514,52	7,69
3	Beban Hibah	114.803.338.322,00	153.657.103.990,00	(38.853.765.668,00)	(25,29)
4	Beban Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76
5	Beban Penyisihan Piutang	293.512.532,82	999.901.752,49	(706.389.219,66)	(70,65)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	721.874.870.801,94	656.945.015.157,40	64.929.855.644,54	0,00
7	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**2.751.394.750.385,32**	**2.435.635.007.069,36**	**315.759.743.315,97**	**12,96**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
	1.041.266.704.121,13	818.796.869.375,56

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang ataupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai Imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi senilai Rp1.041.266.704.121,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp222.469.834.745,57 atau 27,17% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp818.796.869.375,56. Rincian Beban Pegawai sebagai berikut :

Tabel 5.150 Beban Pegawai – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	319.667.130.155,00	262.448.741.263,00	57.218.388.892,00	21,80
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	29.018.359.403,00	24.286.571.382,00	4.731.788.021,00	19,48
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.345.019.000,00	8.325.288.650,00	(1.980.269.650,00)	(23,79)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	25.560.431.700,00	15.914.048.791,00	9.646.382.909,00	60,62
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.599.935.000,00	4.081.432.500,00	(481.497.500,00)	(11,80)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	17.523.901.920,00	15.544.953.000,00	1.978.948.920,00	12,73
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	786.978.465,00	478.311.421,00	308.667.044,00	64,53
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.274.013,00	3.682.015,00	591.998,00	16,08
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.295.087.726,00	22.665.260.530,00	4.629.827.196,00	20,43
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	656.658.479,00	551.544.343,00	105.114.136,00	19,06
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.973.724.826,00	1.620.802.876,00	352.921.950,00	21,77
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	319.723.731.109,00	216.651.493.979,00	103.072.237.130,00	47,58
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	74.421.369.400,00	46.360.450.271,00	28.060.919.129,00	60,53
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	29.343.691.836,00	18.091.000.500,00	11.252.691.336,00	62,20
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.828.373.159,00	2.913.691.446,00	(85.318.287,00)	0,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.983.593.833,00	2.498.168.997,00	(514.575.164,00)	(20,60)
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.641.820.016,00	39.985.439.400,00	656.380.616,00	1,64
18	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.896.246.600,00	1.801.985.800,00	94.260.800,00	5,23
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.170.750.000,00	1.284.000.000,00	(113.250.000,00)	(8,82)
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.457.709.245,84	10.647.723.388,87	809.985.856,97	7,61

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
21	Beban Honorarium	50.683.667.356,00	48.554.830.900,00	2.128.836.456,00	4,38
22	Beban Jasa Pengelolaan BMD	2.471.400.000,00	2.420.630.000,00	50.770.000,00	100,00
23	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	6.221.391.200,00	2.601.720.000,00	3.619.671.200,00	0,00
24	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.232.601.600,00	284.784.000,00	947.817.600,00	332,82
25	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	831.000.000,00	886.500.000,00	(55.500.000,00)	0,00
26	Beban Uang Representasi DPRD	666.435.000,00	667.065.000,00	(630.000,00)	0,00
27	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	85.035.300,00	85.745.100,00	(709.800,00)	0,00
28	Beban Tunjangan Beras DPRD	92.045.820,00	92.697.600,00	(651.780,00)	(0,70)
29	Beban Uang Paket DPRD	57.046.500,00	57.424.500,00	(378.000,00)	(0,66)
30	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	966.330.750,00	967.244.250,00	(913.500,00)	(0,09)
31	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.207.325,00	94.729.950,00	(23.522.625,00)	(24,83)
32	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.262.600.000,00	5.277.300.000,00	(14.700.000,00)	(0,28)
33	Beban Tunjangan Reses DPRD	837.900.000,00	1.278.900.000,00	(441.000.000,00)	(34,48)
34	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.271.646.574,00	6.272.877.774,00	(1.231.200,00)	(0,02)
35	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.643.930.000,00	5.036.050.000,00	(392.120.000,00)	(7,79)
36	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	281.610.000,00	0,00	281.610.000,00	0,00
37	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	100,00
38	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	100,00
39	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	100,00
40	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	0,00	5.069.400,00	0,00
41	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.320.246,00	0,00	1.320.246,00	100,00
42	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.060,00	0,00	1.060,00	100,00
43	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.362.560,00	0,00	5.362.560,00	100,00
44	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	112.320,00	100,00
45	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	336.960,00	100,00
46	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	279.402.540,00	470.730.000,00	(191.327.460,00)	100,00
47	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	260.400.000,00	312.480.000,00	(52.080.000,00)	0,00
48	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
49	Beban Pegawai BLUD	43.383.657.724,29	46.680.569.748,69	(3.296.912.024,40)	100,00
	JUMLAH	**1.041.266.704.121,13**	**818.796.869.375,56**	**222.469.834.745,57**	**27,17**

Penjelasan Beban Pegawai – LO dapat dilihat sebagai berikut:

Belanja Pegawai - LRA		1.038.160.066.708,34
Mutasi Kurang :		
Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2023		
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	91.817.800,00	
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RSUD Abd Rivai	6.920.221.487,91	

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - Inspektorat	2.720.000,00	
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - Inspektorat	108.800,00	
Jumlah Mutasi Kurang		7.014.868.087,91
Mutasi Tambah :		
Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2024		
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan		59.878.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan TA 2023 - Dinas Kesehatan		14.384.000,00
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RSUD Abd Rivai		10.047.243.500,70
Jumlah Mutasi Tambah		10.121.505.500,70
Total Beban Pegawai - LO		**1.041.266.704.121,13**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang dan Jasa	857.982.324.607,43	796.699.707.092,91

Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 terealisasi senilai Rp857.982.324.607,43 mengalami **kenaikan** senilai Rp61.282.617.514,52 atau 7,69% dibandingkan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp796.699.707.092,91. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 termasuk realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak menghasilkan aset.

Akun Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.151 Barang dan Jasa - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	141.813.511.255,93	98.123.490.293,01	43.690.020.962,92	44,53
2	Beban Jasa	396.643.164.598,32	380.287.802.520,82	16.355.362.077,50	4,30
3	Beban Pemeliharaan	44.650.405.911,54	40.626.430.704,00	4.023.975.207,54	9,90
4	Beban Perjalanan Dinas	177.302.434.571,30	155.635.289.077,00	21.667.145.494,30	13,92
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.566.901.400,00	45.460.619.230,00	(30.893.717.830,00)	(67,96)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	27.297.016.710,00	24.838.471.280,00	2.458.545.430,00	9,90
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.166.040.825,00	0,00	6.166.040.825,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	49.542.849.335,34	51.727.603.988,08	(2.184.754.652,74)	(4,22)
	Jumlah	**857.982.324.607,43**	**796.699.707.092,91**	**61.282.617.514,52**	**7,69**

Rincian Beban Barang dan Jasa – LO di rincikan sebagai berikut:

a. Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	141.813.511.255,93	98.123.490.293,01

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp141.813.511.255,93 mengalami **kenaikan** senilai Rp43.690.020.962,92 atau 44,53% dibandingkan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp98.123.490.293,01.

Tabel 5.152 Beban Persediaan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.814.721.658,00	11.730.437.643,00	84.284.015,00	0,72
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.481.630.032,14	3.208.005.686,00	1.273.624.346,14	39,70
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.683.992.157,00	17.444.060.688,00	2.239.931.469,00	12,84
4	Beban Bahan-Bahan Baku	175.103.981,00	142.893.969,00	32.210.012,00	22,54
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	590.744.143,00	142.716.200,00	448.027.943,00	313,93
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.888.000,00	0,00	19.888.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	589.983.300,00	552.918.000,00	37.065.300,00	6,70
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	194.380.000,00	119.995.000,00	74.385.000,00	61,99
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.720.746.962,35	5.916.270.430,64	1.804.476.531,71	30,50
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.167.000,00	148.153.988,00	(76.986.988,00)	(51,96)
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	9.930.000,00	(9.930.000,00)	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	109.755.142,00	810.000,00	108.945.142,00	13.450,02
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	161.591.474,71	0,00	161.591.474,71	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.448.000,00	22.336.700,00	(16.888.700,00)	(75,61)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.912.000,00	519.000,00	2.393.000,00	461,08
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.918.800,00	45.099.571,40	(20.180.771,40)	(44,75)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.933.195.172,36	10.842.991.739,83	(4.909.796.567,47)	(45,28)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.250.772.687,70	748.432.314,00	4.502.340.373,70	601,57
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.349.903.536,87	8.480.812.132,00	1.869.091.404,87	22,04
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	634.436.000,00	495.369.600,00	139.066.400,00	28,07
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.716.076.652,00	2.976.874.814,00	739.201.838,00	24,83
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.402.397.800,00	2.713.815.674,00	688.582.126,00	25,37
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.293.830.040,70	1.397.116.025,40	(103.285.984,70)	(7,39)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.069.210.004,30	1.253.135.086,00	(183.925.081,70)	(14,68)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.868.015.104,00	477.550.589,00	1.390.464.515,00	291,17

(dalam rupiah)

No	BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.504.339.932,00	997.777.000,00	1.506.562.932,00	150,99
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.008.904.048,00	538.866.187,00	2.470.037.861,00	458,38
28	Beban Obat-Obatan-Obat	2.562.528.622,04	5.157.696.363,07	(2.595.167.741,03)	(50,32)
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	697.530.062,34	1.304.072.129,75	(606.542.067,41)	(46,51)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.629.496.270,40	5.631.512.893,00	(4.002.016.622,60)	(71,06)
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	904.523.500,00	(28.946.693.334,00)	29.851.216.834,00	(103,12)
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	410.000,00	15.338.000,00	(14.928.000,00)	(97,33)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.210.750.314,02	1.633.019.786,00	1.577.730.528,02	96,61
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	61.269.980,00	13.681.400,00	47.588.580,00	347,83
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.654.998.210,00	1.198.838.760,00	456.159.450,00	38,05
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	17.389.250,00	1.463.000,00	15.926.250,00	1.088,60
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.433.459.699,00	18.437.177.131,00	(1.003.717.432,00)	(5,44)
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.877.127.762,00	2.158.086.928,00	719.040.834,00	33,32
39	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	147.024.420,00	703.565.250,00	(556.540.830,00)	(79,10)
40	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.188.419.756,00	1.146.103.829,92	2.042.315.926,08	178,20
41	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.213.547.400,00	12.610.433.950,00	1.603.113.450,00	12,71
42	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	114.330.000,00	197.318.700,00	(82.988.700,00)	(42,06)
43	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	183.900.000,00	53.085.000,00	130.815.000,00	246,43
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.487.418.210,00	848.608.120,00	638.810.090,00	75,28
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	851.594.666,00	865.609.429,00	(14.014.763,00)	(1,62)
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	481.370.000,00	155.421.000,00	325.949.000,00	209,72
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	293.572.000,00	336.102.000,00	(42.530.000,00)	(12,65)
48	Beban Pakaian KORPRI	49.800.000,00	85.800.000,00	(36.000.000,00)	(41,96)
49	Beban Pakaian Adat Daerah	446.162.000,00	339.628.600,00	106.533.400,00	31,37
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.494.466.900,00	1.789.744.890,00	(295.277.990,00)	(16,50)
51	Beban Pakaian Olahraga	1.512.448.500,00	1.453.736.430,00	58.712.070,00	4,04
52	Beban Pakaian Paskibraka	80.530.000,00	181.499.000,00	(100.969.000,00)	(55,63)
54	Beban Komponen-Komponen Peralatan	18.242.250,00	1.050.000,00	17.192.250,00	1.637,36
55	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	595.359.300,00	344.703.000,00	250.656.300,00	72,72
56	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00	0,00
57	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
58	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00
59	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	552.241.856,00	0,00	552.241.856,00	0,00
60	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
62	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10.925.000,00	0,00	10.925.000,00	0,00
64	BebanPeralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15.440.000,00	0,00	15.440.000,00	0,00
65	BebanPeralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	83.920.000,00	0,00	83.920.000,00	0,00
66	BebanGedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00
67	BebanGedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	234.891.700,00	0,00	234.891.700,00	0,00
	Jumlah	**141.813.511.255,93**	**98.123.490.293,01**	**43.690.020.962,92**	**44,53**

b. Beban Jasa - LO

Beban Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	396.643.164.598,32	380.287.802.520,82

Beban Jasa yang sudah diterima selama Tahun 2024 terealisasi senilai Rp396.643.164.598,32 mengalami **kenaikan** senilai Rp16.355.362.077,50 atau 4,30% dibandingkan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp380.287.802.520,82.

Tabel 5.153 Beban Jasa – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	BEBAN JASA	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	326.791.150.446,00	331.009.418.291,00	(4.218.267.845,00)	(1,27)
2	Beban Iuran Jaminan Asuransi	41.394.011.431,22	27.563.856.990,17	13.830.154.441,05	50,17
3	Beban Sewa Tanah	66.800.000,00	18.000.000,00	48.800.000,00	271,11
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.642.830.750,00	10.223.561.613,00	(1.580.730.863,00)	(15,46)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.078.250.569,10	3.578.314.424,65	499.936.144,45	13,97
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	236.580.000,00	434.523.500,00	(197.943.500,00)	(45,55)
7	Beban Jasa Konsultansi Kontruksi	4.959.224.516,00	1.068.907.188,00	3.890.317.328,00	363,95
8	Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi	2.955.027.479,00	5.307.482.294,00	(2.352.454.815,00)	(44,32)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	450.000.000,00	342.000.000,00	108.000.000,00	31,58
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.345.844.975,00	108.633.447,00	5.237.211.528,00	4.820,99
11	Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	641.747.447,00	633.104.773,00	8.642.674,00	1,37
12	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.081.696.985,00	0,00	1.081.696.985,00	0,00
	Jumlah	**396.643.164.598,32**	**380.287.802.520,82**	**16.355.362.077,50**	**4,30**

c. Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	44.650.405.911,54	40.626.430.704,00

Beban Pemeliharaan meliputi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 terealisasi senilai Rp44.650.405.911,54 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.023.975.207,54 atau 9,90% dibandingkan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp40.626.430.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154 Beban Pemeliharaan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PEMELIHARAAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	997.409.300,00	0,00	997.409.300,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.375.029.392,00	13.599.704.227,00	(224.674.835,00)	(1,65)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.985.562.666,56	5.795.260.171,00	4.190.302.495,56	72,31
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.671.695.552,98	21.118.966.306,00	(1.447.270.753,02)	(6,85)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	112.500.000,00	(112.500.000,00)	(100,00)
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	620.709.000,00	0,00	620.709.000,00	0,00
	Jumlah	**44.650.405.911,54**	**40.626.430.704,00**	**4.023.975.207,54**	**9,90**

d. Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024	Tahun 2023
	177.302.434.571,30	155.323.527.177,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 terealisasi senilai Rp177.302.434.571,30 mengalami **kenaikan** senilai Rp21.978.907.394,30 atau 14,15% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp155.323.527.177,00, Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.155 Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PERJALANAN DINAS	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	177.093.797.775,30	155.517.072.049,00	21.576.725.726,30	**14,10**
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	208.636.796,00	118.217.028,00	90.419.768,00	**76,49**
	Jumlah	**177.302.434.571,30**	**155.635.289.077,00**	**21.667.145.494,30**	**14,15**

e. Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO

Beban Barang dan Jasa Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	97.572.808.270,34	122.847.977.658,15

Beban Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2024 terealisasi senilai Rp97.572.808.270,34 mengalami **penurunan** senilai Rp25.275.169.387,81 atau

20,57% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp122.847.977.658,15.

Tabel 5.156 Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Beban Barang Dan Jasa Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.566.901.400,00	45.153.336.730,00	(30.586.435.330,00)	(67,74)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	307.282.500,00	(307.282.500,000)	(100,00)
3	Beban Barang dan Jasa BOS	27.297.016.710,00	24.845.245.680,00	2.451.771.030,00	9,87
4	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.166.040.825,00	0,00	6.166.040.825,00	100,00
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	49.542.849.335,34	52.542.112.748,15	(2.999.263.412,81)	(5,71)
	Jumlah	**97.572.808.270,34**	**122.847.977.658,15**	**(25.275.169.387,81)**	**(20,57)**

Penjelasan Beban Barang dan Jasa – LO dapat dilihat sebagai berikut:

	Belanja Persediaan - LRA			**Rp**	**147.944.507.469,75**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2023	Rp	168.209.007.921,01		
b.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	533.103.788,05		
c.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa				
	Reklas ke Barjas Belanja alat laboratorium Pertanian. Bahan Uji Tanah Sawah (PUTS) barang berupa cairan dan barang pakai habis (Peralatan & Mesin)	Rp	53.880.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/Kabel speaker Sigtnaure 30 unit @Rp.36.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	1.080.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/kabel koneksi ashley 8 buah @Rp.112.500 (Peralatan & Mesin)	Rp	900.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/Jack Spikon Ashley 8 unit @Rp.37.500 (Peralatan & Mesin)	Rp	300.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/Kabel jack ashley rainbow 10 unit @Rp.21.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	210.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/Jack Canon Female 2 unit @Rp.45.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	90.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Belanja peralatan sound system/Jack Canon Male 2 unit @Rp.45.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	90.000,00		
	Reklas ke Barjas Alat Rumah tangga Lainnya yang Tidak Masuk Aset Tetap No Kontrak 027/10.08.03.34/SPK-TP/X/2024 TANGGAL 08 - 10- 2024 BASTB 027/10.08.03.34/BA-STB-TP/X/2024 (Tupperware)	Rp	34.003.000,00		
	Reklasifikasi ke Barjas Kain Latar Perekaman E-KTP 2 unit @Rp.295.260 (Peralatan & Mesin)	Rp	590.520,00		
	Reklas ke Barjas diserahkan ke Masyarakat RT 10 Kelurahan Karang Ambun Bangunan Taman Bacaan NO: BAST/208/KA-TR/XI/2024	Rp	25.000.000,00		
	Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Muslich Ketua RT. 05 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 20 buah X 475.500	Rp	9.510.000,00		
	Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Syaripudin B Ketua RT. 02 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 20 buah X 475.500	Rp	9.510.000,00		
	Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Erwin Juli Ketua RT. 04 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 20 buah X 475.500	Rp	9.510.000,00		
	Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Ruslan AM Ketua RT. 03 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 20 buah X 475.500	Rp	9.510.000,00		

Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Darmili Ketua RT. 01 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 20 buah X 475.500	Rp	9.510.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Mastum, S Ketua RT. 06 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003/Kel-Gun/III/2024 sebanyak 12 buah X 475.500	Rp	5.706.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Marthen Bakka Ketua RT. 11 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Hasamin Ketua RT. 13 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Umar Said Ketua RT. 14 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Rudiansyah Ketua RT. 10 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Abdul Rahman Ketua RT. 15 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Yulis SP Ketua RT. 12 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Rudolfo Ketua RT. 16 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 10 buah X 475.500	Rp	4.755.000,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Drs. Agung Triadi Ketua RT. 08 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 9 buah X 475.500	Rp	4.279.500,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Surateman Ketua RT. 09 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 9 buah X 475.500	Rp	4.279.500,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Rusyadi Ketua RT. 07 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 9 buah X 475.500	Rp	4.279.500,00
Kursi Plastik Diserahkan ke Bapak Mastum, S Ketua RT. 06 Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR: BASTB/003.4/Kel-Gun/V/2024 sebanyak 6 buah X 475.500	Rp	2.853.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Semangka an. Julia Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Lavender an. Kasmawati Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 11/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Cempaka an. Rusliana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 16/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Sehat Sentosa an. Linda Kusmilawati Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Keluarga Sehat an. Masniah Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 14/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Tunas Harapan an. Hj. Zuifah Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00

Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Al-Hijrah an. Mardiana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 13/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Anggur an. Winda.A Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Mutiara Kasih an. Jawaria Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 17/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Maju Tak Gentar an. Armi Hastiani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 18/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Loadspeaker sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 4.000.000 diserahkan kepada Posyandu Sehat Sejahtera an. Hasniah Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20/BAST/DAUSG/K-SBL-I/XI/2024	Rp	4.000.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Belanja BOSP SD	Rp	174.322.333,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Belanja BOSP SMP	Rp	12.417.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan Pelampung Life Jacket Nomor Kontrak 01/PPK.PPB-PAS/PGDN-MT-PRH/SDN01PGB/2024 Sebanyak 18 Buah x @Rp. 245000 SMPN 5 Sambaliung	Rp	4.410.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan Pelampung Life Jacket Nomor Kontrak 01/PPK.PPB-PAS/PGDN-MT-PRH/SDN02BYG/2024 Sebanyak 18 Buah x @Rp. 240000 SMPN 2 Biduk - Biduk	Rp	4.320.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan Timbangan Badan 2 x @450.000 SMPN 3 Pulau Derawan & SMPN 2 Biduk-Biduk	Rp	900.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 291000 SDN 002 Pesayan	Rp	873.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 291000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	873.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Belanja BOSP TK	Rp	800.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 228000 SMPN 1 Biatan	Rp	684.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 228000 SDN 002 Pesayan	Rp	684.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 199000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	597.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 199000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	597.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 192000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	576.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 192000 SDN 002 Pesayan	Rp	576.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 271000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	542.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 271000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	542.000,00

Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 258500 SDN 001 Kayu Indah	Rp	517.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 258500 SDN 002 Pesayan	Rp	517.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 158000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	474.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 158000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	474.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 439500 SDN 002 Pesayan	Rp	439.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 439500 SDN 002 Pesayan	Rp	439.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 209500 SDN 001 Kayu Indah	Rp	419.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 209500 SDN 002 Pesayan	Rp	419.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 138500 SDN 001 Kayu Indah	Rp	415.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 138500 SDN 002 Pesayan	Rp	415.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 200000 SDN 002 Pesayan	Rp	400.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 200000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	400.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 132500 SDN 001 Kayu Indah	Rp	397.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 3 Buah x @Rp. 132500 SDN 001 Kayu Indah	Rp	397.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 132000 SDN 002 Pesayan	Rp	264.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 2 Buah x @Rp. 132000 SDN 002 Pesayan	Rp	264.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 256500 SDN 002 Pesayan	Rp	256.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan alat peraga paud/tk lainnya (dst) Nomor Kontrak 01/KPA.APE.DAK/PAUD/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 256500 SDN 002 Pesayan	Rp	256.500,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan Connectors Nomor Kontrak 01/PPK/PPSH-PRLKPN-DAK-TIK/SDN-BRU/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 253000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	253.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi Pengadaan Connectors Nomor Kontrak 01/PPK/PPSH-PRLKPN-DAK-TIK/SDN-BRU/2024 Sebanyak 1 Buah x @Rp. 253000 SDN 001 Kayu Indah	Rp	253.000,00

Reklas Ke Barjas Pembangunan WC SD MIN TANJUNG REDEB No. Kontrak : 02/PPK-PSPUS/PMBGN.WCMINTR/2024 (Gedung & Bangunan)	Rp	119.855.000,00
Reklas Ke Barjas Perencanaan Pembangunan WC SD MIN Tanjung Redeb No. Kontrak : 03/Prc/PPK/PSPUS/PNT-HLM-WC SDNBRU/2024	Rp	45.195.000,00
Reklasifikasi Belanja Laptop Acer TMP214 1 Buah @Rp. 15.065.000 SD Muhammadiyah	Rp	15.345.000,00
Reklas Ke Barjas Pengawasan Pembangunan WC SD MIN Tanjung Redeb No. Kontrak : 02.Pw/PPK/PSPUS/UTILITAS.SDN/BRU/2024	Rp	15.065.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 013 Tanjung Redeb Belanja Sapu Lantai Ijuk (Perkotaan)-Clean Matic Grass Broom @72.000 x 60 = 4.320.000	Rp	13.153.000,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Kelay Belanja Pipa Tembaga 1/2 Pipa Tembaga 1/2 @188.000x 20 = 3.760.000	Rp	4.320.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 001 Tunggal Bumi Belanja Pel Dorong Air (Perkotaan)-Destec @115.000 x 21 = 2.415.000 (ATL)	Rp	3.760.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 001 Tunggal Bumi Belanja Sapu Lantai Plastik (Kepulauan)-Nagoya @45.000 x 50 =2.250.000	Rp	2.415.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 013 Tanjung Redeb Belanja Pel Lantai (Perkotaan)-Golden Hen @61.000 x 28 = 1.708.000	Rp	2.250.000,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Sapu Lantai Ijuk (Perkotaan)-Clean Matic Grass Broom @71.040x20 = 1.420.800	Rp	1.708.000,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Sapu Lantai Ijuk (Perkotaan)-Clean Matic Grass Broom @71.040x20 = 1.420.800 (ATL)	Rp	1.420.800,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Pel Lantai (Pesisir)-Nagoya 4 Action @61.050x20 = 1.221.000 (ATL)	Rp	1.420.800,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Pel Lantai (Pesisir)-Nagoya 4 Action @61.050x20 = 1.221.000 (ATL)	Rp	1.221.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @37.000 x 30 = 1.110.000 (ATL)	Rp	1.221.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 001 Tunggal Bumi Belanja Sikat Lantai Gagang Panjang (Pesisir)-Nagoya @55.500 x 15 = 832.500	Rp	1.110.000,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @36.630x20 = 732.600	Rp	832.500,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @36.630x20 = 732.600 (ATL)	Rp	732.600,00
Reklasifikasi Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota, Pembayaran Perjadian TK Negeri Biduk-biduk dalam rangka Sosialisasi anggaran BopNas Thn. 2024 Keg. 03. 0011 (ATL)	Rp	732.600,00
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @36.963 x 15 = 554.445	Rp	670.000,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Pel Lantai (Pesisir)-Dragon Besar @183.150x3 = 549.450	Rp	554.445,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 2 Talisayan Belanja Pel Lantai (Pesisir)-Dragon Besar @183.150x3 = 549.450 (ATL)	Rp	549.450,00
Reklasifikasi BOSP SMPN 4 Kelay Belanja Tinta-003 Hitam @135.000 x 4 = 540.000 (ATL)	Rp	549.450,00
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Pel Dorong Air (Perkotaan)-Destec @115.995 x 4 = 463.980	Rp	540.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 013 Tanjung Redeb Belanja Sprei Katun-Kain Katun, sprei, sarung guling dan bantal @189.000 x 2 = 378.000	Rp	463.980,00
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @37.000 x 10 = 370.000	Rp	378.000,00
Reklasifikasi BOSP SDN 003 Sambaliung Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @37.000 x 10 = 370.000	Rp	370.000,00

Reklasifikasi BOSP SDN 001 Harapan Maju Belanja Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya-Jaguar Star 70 L @120.000 x 3 = 360.000	Rp	370.000,00	
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @31.075 x 15 = 62.150	Rp	360.000,00	
Reklasifikasi BOSP SDN 002 Tanjung Perangat Belanja Sapu Lantai Plastik (Perkotaan)-Dragon @31.075 x 15 = 62.150	Rp	62.150,00	
Di bawah Nilai Kapitalisasi Tempat Sampah Pedal 10 buah harga satua Rp.406.140 PKM Tanjung Redeb Dana JKN TA.2024	Rp	4.061.400,00	
(Di bawah Nilai Kapitalisasi)Manset Tensimeter -6 buah harga satuan Rp.366.000 (Puskesmas Tanjung Batu) Dana JKN TA.2024.	Rp	2.196.000,00	
Di bawah nilai kapitalisasi (Termometer 2 buah harga satuan 460.000(Puskesmas Suaran) Dana JKN TA.2024.)	Rp	920.000,00	
(Di bawah Nilai Kapitalisasi)'Regulator Oksigen-2 buah harga satuan Rp.430.000(Puskesmas Biduk Biduk R.UGD) Dana JKN TA.2024.	Rp	860.000,00	
Nilai di bawah Kapitalisasi belanja Alat kesehatan Umum berupa Urinal 21 Pcs @Rp.477.000, 8 Psc @Rp.476.000, 1 Psc @Rp.475.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	14.300.000,00	
Nilai di bawah Kapitalisasi belanja Peralatan Mesin berupa Termometer Govermen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C 4 Unit @Rp.487.013 (Peralatan & Mesin)	Rp	1.948.052,00	
Nilai di bawah Kapitalisasi PM ember 2 buah harga satuan Rp. 396.000 Nomor BAST : ..... (Peralatan & Mesin)	Rp	792.000,00	
Nilai di bawah kapitalisasi belanja Kipas Angin 1 unit @Rp.450.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	450.000,00	
Belanja Karpet 24 unit @Rp.312.554 (Peralatan & Mesin)	Rp	7.501.296,00	
Nilai di bawah kapitalisasi PM Teko dengan no.SPB 40/SPB/Skrt/Diskominfo/01.0030-0036/XI/202 (Peralatan & Mesin)	Rp	425.000,00	
Nilai di bawah kapitalisasi PM Gas Regulator 1 buah Rp.388.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	388.500,00	
Nilai di bawah kapitalisasi belanja Keyboard 3 unit @Rp.260.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	780.000,00	
Nilai di bawah Kapitalisasi PM peralatan permainan lainnya (Mobil-Mobilan) 1 buah (Peralatan & Mesin)	Rp	370.000,00	
Nilai di bawah kapitalisasi Meja Kerja 1 buah (Peralatan & Mesin)	Rp	470.000,00	
Nilai di bawah kapitalisasi belanja Kursi Rapat 150 unit harga satuan Rp.450.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	67.500.000,00	
Nilai di bawah kapitalisasi PM Bracket Standing Peralatan 2 buah @Rp.408.750 (Peralatan & Mesin)	Rp	817.500,00	
Nilai di bawah kapitalisasi PM Kipas Angin 1 buah merk No BAST :900/138/BAST/LS-BM/BTP/2024 Tgl 6 Desember 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	452.000,00	
Nilai di bawah Kapitalisasi GB Menara Bangunan Penampung Air No. 01/SPK/KNP-TDN/DPMK-I/II?2024 (Gedung & Bangunan)	Rp	10.100.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah			**Rp 169.566.829.585,06**
Mutasi Kurang :			
a. Penyesuaian Persediaan TA 2024	Rp	175.302.066.215,88	
b. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023	Rp	75.605.783,00	
c Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap			
Reklas dari barjas ke PM 1 buah white board ukuran : 2x2 meter no BASTTPB 87/ BASTPB/DPMK-I/01.09/I/2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	776.000,00	
Reklas dari barjas ke PM 2 Buah Hardisk Eksternal 1 TB no BASTTPB 16/BASTP/DPMK-I/XI/2024 @Rp.1.502.400 (Peralatan & Mesin)	Rp	3.004.800,00	

	Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pembuatan Kerangka Baleho (Gedung & Bangunan)	Rp	31.000.000,00		
	Reklas dari barang & jasa ke PM (10 Bauah) Bak sampah harga satuan Rp. 549.000,- No. & tgl. BASTP : 130.2/29/BASTP/Dispora/IV/2024 / 23 April 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	5.490.000,00		
	Reklas dari barang & jasa ke PM (1 Buah)SSD External Merk RX7 Cyclops Tipe: 10X SSD. No. & tgl. BASTP : 130.2/29/BASTP/Dispora/IV/2024 / 23 April 2024, Digunakan Andri, SE Umpeg (Peralatan & Mesin)	Rp	1.188.000,00		
	Reklas dari barang ke PM (1 Buah) Adaftor Charger Laptop (Peralatan & Mesin)	Rp	523.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM Hardist external 2 Buah harga satuan Rp. 1.700.000 Nomor BAST : 001/BAST.2/III/2024/25 Maret 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	3.400.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Meja Rapat 1 Meja Rapat Utama Rp. 3.900.700 dan 9 Meja Rapat Biasa @ Rp. 1.877.700 dengan BAST Nomor : 82/BASHP/Kesbangpol-II/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	20.800.000,00		
	Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Meja Model L BAST Nomor: BASTP/790/BKPSDM/2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	2.200.000,00		
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik (Mesin jet Cleaner) Penyemprot mesin (Peralatan & Mesin)	Rp	2.387.000,00		
	Reklasifikasi belanja barang jasa ke aset tetap berupa Genset 1 Unit Kelurahan Teluk Bayur (Peralatan & Mesin)	Rp	21.922.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Pelampung (Life Jacket) 65 Buah BAST BA.STB-022/PELAMPUNG/BPBD-II/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	33.800.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Box Panel 40 x 50 dan isinya Harga Rp. 11.700.000 BAST No. 455/127/Keg - TKRS / V/2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	11.700.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Traker 3 kaki Harga Rp. 1.050.000 BAST No. 455/127/Keg - TKRS / V/2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	1.050.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Box MDF 30 pair Harga n Rp. 690.000 BAST No. 455/127/Keg - TKRS / V/2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	690.000,00		
	Reklas dari Barjas 3 buah Pompa air harga satuan Rp. 870.000 (Peralatan & Mesin)	Rp	2.610.000,00		
	Reklas dari Barjas PM -alat kantor & Rumah Tangga (Belanja ALAT TENUN) No. BAST : BAST/116/DKPP-Perin Tanggal 3 Desember 2024 berupa : 1. ALAT TENUN GEDOKAN 10 buah x @ Rp.4.134.700,- = Rp.41.347.000,- 2. MESIN HANI TEKSTIL 1 Buah = Rp 42.513.000,-	Rp	83.860.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Pemasangan Radio Link,Spesifikasi : Antena VHF/UHF,Kabel 5D,Pipa 5 Set BAST BA.STB-016/RADIO/BPBD-II/XII/2024 Tanggal 2 desember 2024 (Peralatan & Mesin)	Rp	46.953.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke BM Belanja Tablet PC Apple IPad Pro Harga Satuan Rp 23.400.000 digunakan oleh SEKDA dan ASS 3 (Peralatan & Mesin)	Rp	46.800.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**175.697.825.798,88**
	Jumlah Saldo Beban Persediaan - LO			**Rp**	**141.813.511.255,93**
	Belanja Jasa - LRA			**Rp**	**394.952.774.306,00**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	1.502.346.651,00		
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa	Rp			
	Reklas ke barjas utang pemda konsultan perencana rehab ruang mapolres berau (Gedung & Bangunan)	Rp	19.948.032,00		

	Reklas ke barjas utang Pemda Lanjutan Pembangunan Polres Kabupaten Berau (Gedung & Bangunan)	Rp	1.669.462.994,00		
	Reklas ke barjas utang Pemda Lanjutan Pembangunan Kantor Kodim (APBD-P) (Gedung & Bangunan)	Rp	478.306.569,00		
c.	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2023	Rp	286.547.977,50		
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**3.956.612.223,50**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023	Rp	1.431.385.847,00		
b.	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2024	Rp	363.442.949,18		
c.	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp			
	Reklas dari Barjas Konsultan Pengawasan Rumah Tenun Sukan Tengah (Gedung & Bangunan)	Rp	258.713.805,00		
	Reklas dari Barjas Konsultan Perencanaan Rumah Tenun Sukan Tengah (Gedung & Bangunan)	Rp	212.679.330,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**2.266.221.931,18**
	Jumlah Saldo Beban Jasa - LO			**Rp**	**396.643.164.598,32**
	Beban Pemeliharaan - LRA			**Rp**	**48.129.553.534,56**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2023	Rp	11.362.667.804,40		
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa	Rp			
	Reklasifikasi Belanja jasa pemasangan Instalasi Tower Triangle Internet di Teluk Alulu (Barang/Jasa) 1 paket Biaya Angkut dan Instalasi (Gedung & Bangunan)	Rp	49.998.000,00		
	Reklas JIJ ke Barjas Pemasangan Jembatan Bailey (APBD-P) nomor kontrak 04/PPK-RH JBT/BAILEY/PRJJ/APBD-P/XII/2024 tgl 3/12/2024 (JIJ)	Rp	199.622.400,00		
	Reklas JIJ ke Barjas Pemasangan jembatan Bailey TA 2024 nomor kontrak 04/PPK-RUTIN JLN/BAILAY/PRJJ/VI/2024 tgl 1/6/2024 (JIJ)	Rp	99.755.700,00		
c.	Koreksi Reklas dari JIJ ke beban operasional Normalisasi Parit GG Gotong Royong RT 22 Tg Redeb akum susut : 4.709.597	Rp	188.383.864,00		
	Koreksi Reklas dari JIJ ke beban operasional Normalisasi saluran drainase gg Salak 1 & sekitarnya Tg Redeb akum susut : 15.112.497	Rp	181.349.959,00		
	Koreksi Reklas dari JIJ ke beban operasional Normalisasi Drainase Jl Anyelir Murjani 3 RT 12 Korpri Blok A Tg Redeb akum susut : 18.144.900	Rp	181.449.000,00		
	Koreksi Reklas dari JIJ ke beban operasional Normalisasi Drainase RT 11 Gunung Panjang Tg Redeb akum susut : 7.824.200	Rp	134.129.150,00		
	Koreksi Reklas dari JIJ ke beban operasional Normalisasi Drainase Gg Lestari RT 12 Tg Redeb akum susut : 7.833.735	Rp	188.009.649,98		
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**12.585.365.527,38**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2024	Rp	15.831.155.304,40		

b.	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp			
	Reklas dari Barjas Pemasangan Kanopi Luas 31 M2 di Samping kiri Kantor Disdukcapil (Gedung & Bangunan)	Rp	23.922.700,00		
	Pemagaran Lapangan Sepak Bola Kampung Biatan Lempake No. BAST: 05/BAST-KPA/PAGAR.LAP.BOL/2024 (Gedung & Bangunan)	Rp	173.915.146,00		
	Reklas dari Barjas ke PM , AC Split 2 buah merk Daikin 1 PK harga satuan Rp.8.214.000 No Bast : 02/BASTP/KPA/GEDUNG GRAHA-TJR/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 (Gedung & Bangunan)	Rp	16.428.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM , AC Split 2 buah merk Daikin 1.5 PK harga satuan Rp.9.546.000 No Bast : 02/BASTP/KPA/GEDUNG GRAHA-TJR/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 (Gedung & Bangunan)	Rp	19.092.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**16.064.513.150,40**
	Jumlah Saldo Beban Pemeliharaan - LO			**Rp**	**44.650.405.911,54**
	Belanja Perjalanan Dinas - LRA			**Rp**	**177.636.934.571,30**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	55.230.000,00		
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**55.230.000,00**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023	Rp	389.730.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**389.730.000,00**
	Jumlah Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO			**Rp**	**177.302.434.571,30**
	Belanja Barang dan Jasa Lainnya - LRA			**Rp**	**99.933.067.716,64**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2023	Rp	2.000.230.135,68		
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**2.000.230.135,68**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2024	Rp	3.629.144.821,91		
b	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023	Rp	731.344.760,07		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**4.360.489.581,98**
	Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO			**Rp**	**97.572.808.270,34**
	TOTAL BEBAN LO				**857.982.324.607,43**

5.4.2.1.3 Beban Hibah - LO

Beban Hibah	Tahun 2024	Tahun 2023
	114.803.338.322,00	153.657.103.990,00

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada Tahun 2024. Beban Hibah Tahun 2024 terealisasi senilai Rp114.803.338.322,00 mengalami **penurunan** senilai Rp38.853.765.668,00 atau 25,29% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp153.657.103.990,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.157 Beban Hibah - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Dinas Pendidikan	22.156.883.912,00	8.517.527.700,00	13.639.356.212,00	160,13
2	Beban Hibah Dinas Kesehatan	750.000.000,00	700.000.000,00	50.000.000,00	7,14
3	Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	0,00	55.287.353.417,00	(55.287.353.417,00)	(100,00)
4	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	3.319.106.227,00	(3.319.106.227,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	121.289.700,00	(121.289.700,00))	(100,00)
6	Beban Hibah Pangan	424.332.646,00	882.345.240,00	(458.012.594,00)	(51,91)
7	Beban Hibah Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	650.525.000,00	1.016.457.000,00	(365.932.000,00)	(36,00)
8	Beban Hibah Dinas Pemberdayaan Kampung	0,00	1.910.000,00	(1.910.000,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	0,00	273.410.760,00	(273.410.760,00)	(100,00)
10	Beban Hibah Dinas Kepemudaan & Olah Raga	2.457.035.483,00	2.550.011.573,00	(92.976.090,00)	(3,65)
11	Beban Hibah Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.477.730.760,00	1.061.677.000,00	416.053.760,00	39,19
12	Beban Hibah Perpustakaan & Kearsipan	0,00	3.760.496.400,00	(3.760.496.400,00)	(100,00)
13	Beban Hibah Dinas Perikanan	4.483.930.148,00	14.392.874.053,00	(9.908.943.905,00)	(68,85)
14	Beban Hibah Pertanian & Peternakan	6.133.885.450,00	13.238.208.343,00	(7.104.322.893,00)	(53,67)
15	Beban Hibah Perkebunan	1.695.052.550,00	3.436.610.100,00	(1.741.557.550,00)	(50,68)
16	Beban Hibah Sekretariat Daerah	20.298.400.000,00	18.975.000.000,00	1.323.400.000,00	6,97
17	Beban Hibah Kec Tg Redeb	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
18	Beban Hibah Kec Gn Tabur	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Hibah Kec Teluk Bayur	254.177.111,00	227.262.000,00	26.915.111,00	11,84
20	Beban Hibah Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Hibah Badan Kesbang, Politik dan Linmas	53.847.703.462,00	25.895.564.477,00	27.952.138.985,00	107,94
22	Beban Hibah Dinas Sosial	73.681.800,00	0,00	73.681.800,00	100,00
J u m l a h		**114.803.338.322,00**	**153.657.103.990,00**	**(38.853.765.668,00)**	**(25,29)**

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024	Tahun 2023
	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 terealisasi senilai Rp15.174.000.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.637.590.299,00 atau 77,76%. dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp8.536.409.701,00. Beban Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat biaya – biaya yang sudah digunakan untuk Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana, Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, serta tunjangan yatim piatu, lansia, kebakaran dan kematian. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 terdapat pada SKPD ; Dinas Sosial senilai Rp6.426.000.000,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp8.748.000.000,00. Tabel Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.158 Beban Bantuan Sosial - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76
J u m l a h		**15.174.000.000,00**	**8.536.409.701,00**	**6.637.590.299,00**	**77,76**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
	293.512.532,83	999.901.752,49

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 terealisasi senilai Rp293.512.532,83 mengalami **penurunan** senilai Rp710.045.490,17 atau 70,65% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang senilai Rp999.901.752,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.159 Beban Penyisihan Piutang - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
I	**Beban Penyisihan Piutang Pajak**		**1.106.091.788,52**	**755.169.522,88**	**350.922.265,64**	**46,47**
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak daerah	Bapenda	1.106.091.788,52	755.169.522,88	350.922.265,64	46,47
II	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi daerah**		**172.663.514,22**	**(890.936.213,85)**	**1.063.599.728,07**	**(119,38)**
1	Beban Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bapenda	426.600,00	(152.112.280,00)	152.538.880,00	(100,28)
		Koperindag	172.234.354,22	(737.287.933,85)	909.522.288,07	(123,36)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
		Dispora	2.560,00	(1.536.000,00)	1.538.560,00	(100,17)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Koperindag	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**		**(985.242.769,91)**	**1.135.668.443,46**	**(2.120.911.213,37)**	**(186,75)**
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD	278.180,67	255.439.106,71	(255.160.926,04)	(99,89)
2	Beban Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	BPKAD	44.826.060,00	0,00	44.826.060,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	Bapenda	630.325.917,86	623.119.236,50	7.206.681,36	1,16
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	130.455.033,02	74.128.084,13	56.326.948,89	75,99
5	Beban Penyisihan Piutang Denda retribusi	Koperindag	(1.791.127.961,46)	182.982.016,12	(1.974.109.977,58)	(1.078,85)
IV	**Beban Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang			**293.512.532,83**	**999.901.752,49**	**(706.389.219,66)**	**(70,65)**

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 terealisasi senilai Rp721.874.870.801,94 mengalami **kenaikan** senilai Rp64.929.855.644,53 atau 9,88% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp656.945.015.157,40. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.160 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.316.236.137,17	90.620.149.308,12	30.696.086.829,05	33,87
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.121.839.777,78	38.534.596.096,60	8.587.243.681,18	22,28
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	539.663.018.067,47	521.072.086.759,52	18.590.931.307,95	3,57
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	468.938.909,00	589.110.693,00	(120.171.784,00)	(20,40)
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	7.329.644.644,00	1.628.096.384,00	5.701.548.260,00	350,20
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Amortisasi Tak Berwujud	5.975.193.266,52	4.500.975.916,16	1.474.217.350,35	32,75
J u m l a h		**721.874.870.801,94**	**656.945.015.157,40**	**64.929.855.644,53**	**9,88**

5.4.2.1.6.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	121.316.236.137,17	90.620.149.308,12

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2024 terealisasi senilai Rp121.316.236.137,17 mengalami **kenaikan** senilai Rp30.696.086.829,05 atau 33,87% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp90.620.149.308,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	36.291.641.621,00	25.542.026.238,20	10.749.615.382,80	42,09
2	Dinas Kesehatan	13.216.273.480,50	12.113.294.919,00	1.102.978.561,50	9,11
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	12.501.110.580,00	12.739.960.711,00	(238.850.131,00)	(1,87)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.205.056.791,40	4.157.790.763,92	47.266.027,48	1,14
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	292.826.194,00	264.303.840,00	28.522.354,00	10,79
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	599.099.695,00	509.526.353,00	89.573.342,00	17,58
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.245.049.219,00	9.476.881.167,00	(231.831.948,00)	(2,45)
8	Dinas Sosial	303.006.394,00	195.684.434,00	107.321.960,00	54,84
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	314.059.377,00	214.317.554,00	99.741.823,00	46,54
10	Dinas Pangan	286.862.170,00	206.925.260,00	79.936.910,00	38,63
11	Dinas Pertanahan	452.155.931,00	374.776.326,00	77.379.605,00	20,65
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.006.960.110,00	3.595.112.781,00	411.847.329,00	11,46
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	856.744.278,00	769.116.841,00	87.627.437,00	11,39
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	300.274.913,00	238.411.979,00	61.862.934,00	25,95
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.984.182,00	400.439.437,00	100.544.745,00	25,11
16	Dinas Perhubungan	16.150.807.851,27	3.909.202.963,00	12.241.604.888,27	313,15
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.922.153.363,00	958.107.790,00	964.045.573,00	100,62
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	775.525.905,00	588.177.551,00	187.348.354,00	31,85
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	409.095.443,00	317.193.420,00	91.902.023,00	28,97
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	505.444.587,00	425.415.969,00	80.028.618,00	18,81
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	688.962.870,00	512.610.932,00	176.351.938,00	34,40
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	588.395.097,00	453.708.780,00	134.686.317,00	29,69
23	Dinas Perikanan	491.478.207,00	332.217.789,00	159.260.418,00	47,94
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	740.147.553,00	631.890.338,00	108.257.215,00	17,13
25	Dinas Perkebunan	569.612.155,00	468.506.775,00	101.105.380,00	21,58
26	Sekretariat Daerah	3.885.263.475,00	2.448.148.007,00	1.437.115.468,00	58,70
27	Inspektorat	1.174.513.017,00	913.808.026,00	260.704.991,00	28,53
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.038.031.340,00	706.213.166,00	331.818.174,00	46,99
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.911.389.434,00	1.593.955.593,00	317.433.841,00	19,91
30	Badan Pendapatan Daerah	554.910.803,00	438.174.318,00	116.736.485,00	26,64

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	341.608.365,00	311.883.887,00	29.724.478,00	9,53
32	Sekretariat Korpri	0,00	13.881.042,00	(13.881.042,00)	(100,00)
33	Sekretariat DPRD	2.871.441.169,00	2.074.914.896,00	796.526.273,00	38,39
34	Kecamatan Tanjung Redeb	810.709.301,00	471.430.423,00	339.278.878,00	71,97
35	Kecamatan Gunung Tabur	183.555.636,00	124.155.388,00	59.400.248,00	47,84
36	Kecamatan Sambaling	119.364.611,00	97.302.002,00	22.062.609,00	22,67
37	Kecamatan Teluk Bayur	245.213.763	147.316.399	97.897.364,00	66,45
38	Kecamatan Segah	290.206.695	382.717.877	(92.511.182,00)	(24,17)
39	Kecamatan Kelay	255.521.856	177.300.869	78.220.987,00	44,12
40	Kecamatan Pulau Derawan	95.745.581	221.060.253	(125.314.672,00)	(56,69)
41	Kecamatan Talisayan	160.625.405	46.168.815	114.456.590,00	247,91
42	Kecamatan Biduk-Biduk	195.688.708	122.666.971	73.021.737,00	59,53
43	Kecamatan Maratua	337.559.728	270.524.766	67.034.962,00	24,78
44	Kecamatan Tabalar	215.936.987	359.400.223	(143.463.236,00)	(39,92)
45	Kecamatan Batu Putih	182.427.615	105.524.980	76.902.635,00	72,88
46	Kecamatan Biatan	161.064.733	145.540.848	15.523.885,00	10,67
47	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	71.729.948,00	52.459.648,00	19.270.300,00	36,73
	Jumlah	**121.316.236.137,17**	**90.620.149.308,12**	**30.696.086.829,05**	**33,87**

5.4.2.1.6.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	47.121.839.777,78	38.534.596.096,60

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp47.121.839.777,78 mengalami **kenaikan** senilai Rp8.587.243.681,18 atau 22,28% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp38.534.596.096,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.162 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	15.860.480.014,00	14.923.760.503,60	936.719.510,40	6,28
2	Dinas Kesehatan	6.232.823.549,00	3.838.773.026,00	2.394.050.523,00	62,36
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	1.476.779.853,00	1.440.026.742,00	36.753.111,00	2,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.442.937.329,42	11.353.284.092,00	4.089.653.237,42	36,02
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	177.865.395,00	84.806.953,00	93.058.442,00	109,73
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	31.130.860,00	2.872.360,00	28258500,00	983,81
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	637.503.632,00	544.402.220,00	93.101.412,00	17,10
8	Dinas Sosial	64.668.490,00	64.668.492,00	(2,00)	(0,00)

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.015.675,00	45.992.720,00	1022955,00	2,22
10	Dinas Pangan	132.770.110,00	126.875.294,00	5.894.816,00	4,65
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	865.208.786,00	489.739.667,00	375.469.119,00	76,67
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22.439.161,00	22.319.548,00	119.613,00	0,54
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	3.799.060,00	2.699.060,00	1.100.000,00	40,75
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.310.965,00	64.580.580,00	730.385,00	1,13
15	Dinas Perhubungan	674.635.644,00	649.914.041,00	24.721.603,00	3,80
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.877.500,00	3.394.375,00	7.483.125,00	220,46
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	540.496.579,00	522.798.604,00	17.697.975,00	3,39
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.413.866,00	1.413.866,00	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	575.742.166,00	557.589.281,00	18.152.885,00	3,26
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	714.628.018,36	208.976.733,00	505.651.285,36	241,97
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.494.225,00	9.143.244,00	5.350.981,00	58,52
22	Dinas Perikanan	243.444.269,00	231.259.620,00	12.184.649,00	5,27
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	234.402.100,00	229.613.061,00	4.789.039,00	2,09
24	Dinas Perkebunan	115.961.079,00	109.545.879,00	6.415.200,00	5,86
25	Sekretariat Daerah	721.333.510,00	751.290.245,00	(29.956.735,00)	(3,99)
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4.758.190,00	1.324.577,00	3.433.613,00	259,22
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	518.078.570,00	510.090.646,00	7.987.924,00	1,57
28	Badan Pendapatan Daerah	3.647.380,00	3.647.380,00	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	18.311.028,00	15.361.241,00	2.949.787,00	19,20
30	Sekretariat Korpri	0,00	28.258.500,00	(28.258.500,00)	(100,00)
31	Sekretariat DPRD	745.325.272,00	745.325.272,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Tanjung Redeb	66.007.734,00	65.685.540,00	322.194,00	0,49
33	Kecamatan Gunung Tabur	13.834.138,00	48.295.842,00	(34.461.704,00)	(71,36)
34	Kecamatan Sambaling	8.484.320,00	8.484.320,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Bayur	62.776.148,00	62.561.990,00	214.158,00	0,34
36	Kecamatan Segah	70.518.590,00	70.518.590,00	0,00	-
37	Kecamatan Kelay	84.159.998,00	84.159.998,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Pulau Derawan	50.380.000,00	50.380.000,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Talisayan	115.018.260,00	115.018.260,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Biduk-Biduk	80.627.220,00	80.627.220,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Maratua	68.601.581,00	67.219.420,00	1.382.161,00	2,06

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
42	Kecamatan Tabalar	100.104.996,00	99.407.800,00	697196,00	0,70
43	Kecamatan Batu Putih	79.969.139,00	79.680.000,00	289139,00	0,36
44	Kecamatan Biatan	91.988.430,00	90.146.135,00	1.842.295,00	2,04
45	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	31.086.948,00	28.663.159,00	2.423.789,00	0,00
	Jumlah	**47.121.839.777,78**	**38.534.596.096,60**	**8.587.243.681,18**	**22,28**

5.4.2.1.6.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	539.663.018.067,47	521.072.086.759,52

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 terealisasi senilai Rp539.663.018.067,47 mengalami **kenaikan** senilai Rp18.590.931.307,95 atau 3,57% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp521.072.086.759,52. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.163 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	283.444.304,00	283.019.305,00	424.999,00	0,15
2	Dinas Kesehatan	414.667.580,00	372.670.737,00	41.996.843,00	11,27
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	96.823.032,00	91.892.967,00	4.930.065,00	5,37
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.440.735.594,47	500.525.909.171,52	19.914.826.422,95	3,98
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.201.498.690,00	7.932.717.021,00	(1.731.218.331,00)	(21,82)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.124.400,00	132.124.400,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	14.556.920,00	14.556.920,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pangan	1.900.150,00	1.900.150,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	120.486.779,00	209.593.827,00	(89.107.048,00)	(42,51)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.203.840,00	1.203.840,00	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	10.530.887.175,00	10.732.297.061,00	(201.409.886,00)	(1,88)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.369.100,00	12.369.100,00	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10.426.206,00	15.808.550,00	(5.382.344,00)	(34,05)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.284.500,00	4.284.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	660.375,00	13.768.708,00	(13.108.333,00)	(95,20)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.704.830,00	60.704.830,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	517.435.977,00	107.004.097,00	410.431.880,00	383,57
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	321.104.562,00	123.647.656,00	197.456.906,00	159,69
21	Dinas Perkebunan	25.016.700,00	25.016.700,00	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	12.022.625,00	12.822.625,00	(800.000,00)	(6,24)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	150.830.700,00	150.830.700,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	491.675,00	491.675,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	36.174.104,00	36.174.104,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Tanjung Redeb	196.373.865,00	136.483.731,00	59.890.134,00	43,88
28	Kecamatan Gunung Tabur	23.603.800,00	23.603.800,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Teluk Bayur	49.357.250,00	49.357.250,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Kelay	833.334,00	833.334,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Biatan	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
	Jumlah	**539.663.018.067,47**	**521.072.086.759,52**	**18.590.931.307,95**	**3,57**

5.4.2.1.6.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	468.938.909,00	589.110.693,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 terealisasi senilai Rp468.938.909,00 mengalami **penurunan** senilai Rp120.171.784,00 atau 20,40% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp589.110.693,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.164 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	460.677.283,00	580.953.505,00	(120.276.222,00)	(20,70)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.157.188,00	8.157.188,00	0,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	104.438,00	0,00	104.438,00	100,00
	Jumlah	**468.938.909,00**	**589.110.693,00**	**(120.171.784,00)**	**(20,40)**

5.4.2.1.6.5 Beban Penyusutan Properti Investasi – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Properti Investasi	7.329.644.644,00	1.628.096.384,00

Beban Penyusutan Properti investasi Tahun 2024 terdapat nilai penyusutan senilai Rp7.329.644.644,00 , mengalami **kenaikan** senilai Rp5.701.548.260,00 atau 350,20% dibanding Tahun 2023 senilai Rp1.628.096.384,00.

Tabel 5.165 Beban Penyusutan Properti Investasi - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akun	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	DPUPR	Gedung dan Bangunan	7.283.204.644,00	1.581.656.384,00	5.701.548.260,00	360,48
2	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00	0,00
Jumlah			**7.329.644.644,00**	**1.628.096.384,00**	**5.701.548.260,00**	**350,20**

5.4.2.1.6.6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.975.193.266,53	4.500.975.916,16

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 terealisasi senilai Rp5.975.193.266,53 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.474.217.350,36 atau 32,75% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp4.500.975.916,16. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan pada tabel rincian berikut :

Tabel 5.166 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	19.465.833,33	20.000.000,00	(534.166,67)	(2,67)
2	Dinas Kesehatan	37.766.000,00	37.349.333,33	416.666,67	1,12
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	359.652.246,67	240.185.190,83	119.467.055,84	49,74
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	13.091.333,33	9.674.666,67	3.416.666,66	35,32
5	Dinas Perhubungan	39.190.100,00	31.223.200,00	7.966.900,00	25,52
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.067.800,00	44.299.466,67	(8.231.666,67)	(18,58)
7	Dinas Pertanahan	0,00	9.075.000,00	(9.075.000,00)	(100,00)
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.216.666,67	15.108.333,33	16.108.333,33	106,62
9	Badan Pendapatan Daerah	441.036.666,67	367.360.000,00	73.676.666,67	20,06
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	163.146.666,67	165.630.000,00	(2.483.333,33)	(1,50)
11	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	128.649.193,33	139.427.200,00	(10.778.006,67)	(7,73)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.484.000,00	48.878.666,67	(22.394.666,67)	(45,82)
13	Kecamatan Biatan	65.833,33	658.333,33	(592.500,00)	(90,00)
14	Kecamatan Tanjung Redeb	10.166.860,00	10.166.860,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.663.405,00	33.885.500,00	5.777.905,00	17,05
16	Sekretariat DPRD	38.944.022,80	12.710.501,90	26.233.520,90	206,39
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.276.969.368,30	2.373.265.840,38	903.703.527,92	38,08
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	55.727.450,00	35.918.000,00	19.809.450,00	55,15

(dalam rupiah)

NO	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan Penurunan	%
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	14.143.675,82	9.990.000,00	4.153.675,82	41,58
20	Dinas Perikanan	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	96550916,67	80.086.000,00	16.464.916,67	20,56
22	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	356.861.314,60	249.738.426,38	107.122.888,22	42,89
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	270.419.426,67	186.367.260,00	84.052.166,67	45,10
24	Sekretariat Daerah	45.032.486,67	35.596.136,67	9.436.350,00	26,51
25	RSUD Dr. Rivai	450.000.000,00	337.500.000,00	112.500.000,00	33,33
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
JUMLAH		**5.975.193.266,53**	**4.500.975.916,16**	**1.474.217.350,36**	**32,75**

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain - LO

Beban lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	0,00	0,00

Beban Lain-lain Tahun 2024 senilai Rp0,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp0,00. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.167 Beban Lain - Lain – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Lain - Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.4.2.2 Beban Transfer - LO

Beban Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
	370.233.794.664,00	348.203.838.088,00

Beban Transfer Tahun 2024 terealisasi senilai Rp370.233.794.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp22.029.956.576,00 atau 6,33% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp348.203.838.088,00. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.168 Beban Transfer - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00	1.483.726.000,00	15,55
2	Beban Bantuan Keuangan	359.209.787.664,00	338.663.557.088,00	20.546.230.576,00	6,07

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Jumlah	**370.233.794.664,00**	**348.203.838.088,00**	**22.029.956.576,00**	**6,33**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil - LO

Beban Bagi Hasil	Tahun 2024	Tahun 2023
	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00

Beban Bagi Hasil Tahun 2024 terealisasi senilai Rp11.024.007.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.726.000,00 atau 15,55% dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp9.540.281.000. Beban Bagi Hasil disajikan pada rincian tabel berikut :

Tabel 5.169 Beban Bagi Hasil - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Bagi Hasil				
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	9.538.723.000,00	8.447.633.000,00	1.091.090.000,00	12,92
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.485.284.000,00	1.092.648.000,00	392.636.000,00	35,93
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**11.024.007.000,00**	**9.540.281.000,00**	**1.483.726.000,00**	**15,55**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan - LO

Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2024	Tahun 2023
	359.209.787.664,00	338.663.557.088,00

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp359.209.787.664,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp20.546.230.576,00 atau 6,07% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp338.663.557.088,00. Rincian Realisasi Beban Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.170 Beban Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Bantuan Keuangan Lainnya	**359.209.787.664,00**	**338.663.557.088,00**	**20.546.230.576,00**	**6,07**
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	359.209.787.664,00	338.663.557.088,00	20.546.230.576,00	6,07
	Jumlah	**359.209.787.664,00**	**338.663.557.088,00**	**20.546.230.576,00**	**6,07**

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Tak Terduga -LO	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00

Beban Tidak Terduga - LO Tahun 2024 terealisasi senilai Rp5.774.799.583,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.947.962.268,00 atau 216,11% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp1.826.837.315,00. Beban Tidak Terduga terdapat pada dinas BPKAD di peruntukan untuk pembayaran ganti rugi Pemerintah Daerah atas putusan Pengadilan Negeri, pembayaran restitusi rumah dinas, bantuan sosial santunan kematian, bantuan sosial bencana alam, dan bantuan tak terduga lainnya.

Tabel 5.171 Beban Tidak Terduga – LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Tidak Terduga				
1	- Beban Tidak Terduga	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
	Jumlah	**5.774.799.583,00**	**1.826.837.315,00**	**3.947.962.268,00**	**216,11**

5.4.2.4 Jumlah Beban Keseluruhan per OPD - LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Keseluruhan Per OPD	3.127.403.344.632,32	2.785.665.682.472,36

Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Berau pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp3.172.403.344.632,32 mengalami **kenaikan** senilai Rp341.737.662.159,96 atau 12,27% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp2.785.665.682.472,36. Rincian Beban per OPD Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.172 Beban Keseluruhan Per OPD - LO
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	(%)
1	Dinas Pendidikan	614.581.629.352,34	487.752.772.165,80	126.828.857.186,54	26,00
2	Dinas Kesehatan	291.528.107.962,99	227.102.314.793,23	64.425.793.169,76	28,37
3	RSUD Abd Rivai	205.208.109.282,13	195.054.802.846,88	10.153.306.435,25	5,21
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	613.659.186.220,55	617.488.862.257,82	(3.829.676.037,28)	(0,62)
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	27.875.016.215,65	20.989.743.471,33	6.885.272.744,32	32,80
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.053.844.138,00	27.775.490.830,00	(1.721.646.692,00)	(6,20)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	21.031.114.545,00	24.097.013.935,00	(3.065.899.390,00)	(12,72)
8	Dinas Sosial	20.220.316.375,00	20.129.543.584,00	90.772.791,00	0,45

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	(%)
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	14.875.847.729,00	11.168.577.627,67	3.707.270.101,33	33,19
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	20.611.362.708,00	18.004.034.602,00	2.607.328.106,00	14,48
11	Dinas Pangan	12.552.664.329,40	10.860.005.564,00	1.692.658.765,40	15,59
12	Dinas Pertanahan	7.965.771.926,00	10.636.126.231,00	(2.670.354.305,00)	(25,11)
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	51.129.015.034,60	40.276.691.339,38	10.852.323.695,22	26,94
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	12.183.163.870,33	10.818.632.215,67	1.364.531.654,66	12,61
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	15.910.207.231,00	17.356.104.515,00	(1.445.897.284,00)	(8,33)
16	Dinas Perhubungan	53.118.162.327,00	37.128.982.667,00	15.989.179.660,00	43,06
17	Dinas Komunikasi & Informatika	25.188.938.218,67	18.706.715.071,83	6.482.223.146,84	34,65
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	31.566.474.690,76	25.713.795.068,27	5.852.679.622,49	22,76
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.844.612.911,00	12.945.920.209,00	898.692.702,00	6,94
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	25.970.934.187,38	51.438.489.689,00	(25.467.555.501,62)	(49,51)
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	26.762.100.131,01	25.747.578.136,00	1.014.521.995,01	3,94
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15.739.895.801,00	18.140.540.296,00	(2.400.644.495,00)	(13,23)
23	Dinas Perikanan	19.383.954.335,00	28.009.398.074,00	(8.625.443.739,00)	(30,79)
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	34.198.062.360,07	36.978.597.269,00	(2.780.534.908,93)	(7,52)
25	Dinas Perkebunan	15.915.025.491,00	17.635.211.477,00	(1.720.185.986,00)	(9,75)
26	Sekretariat Daerah	130.346.773.879,77	112.577.314.506,32	17.769.459.373,45	15,78
27	Inspektorat	20.953.529.055,00	19.538.336.704,00	1.415.192.351,00	7,24
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	22.351.938.644,33	18.645.005.247,00	3.706.933.397,33	19,88
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	412.041.447.692,68	370.823.244.462,71	41.218.203.229,97	11,12
30	Badan Pendapatan Daerah	25.187.071.999,05	21.829.982.998,38	3.357.089.000,67	15,38
31	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.550.096.862,00	16.764.015.227,67	5.786.081.634,33	34,51
32	Set Dewan Pengurus KORPRI		1.864.414.482,00	(1.864.414.482,00)	(100,00)
33	Sekretariat DPRD	82.602.577.918,02	72.908.817.784,07	9.693.760.133,95	13,30
34	Kec Tg Redeb	30.416.765.452,00	25.250.845.562,00	5.165.919.890,00	20,46
35	Kec Gn Tabur	11.001.382.226,00	9.165.623.773,00	1.835.758.453,00	20,03
36	Kec Sambaliung	11.109.950.935,00	8.805.590.553,00	2.304.360.382,00	26,17
37	Kec Teluk Bayur	14.309.122.198,00	12.052.526.878,00	2.256.595.320,00	18,72
38	Kec Segah	6.545.077.756,00	5.365.883.132,00	1.179.194.624,00	21,98
39	Kec Kelay	6.204.967.496,00	5.019.109.720,00	1.185.857.776,00	23,63
40	Kec Pulau Derawan	5.023.124.085,00	3.875.123.494,00	1.148.000.591,00	29,62
41	Kec Talisayan	6.930.554.727,00	5.372.568.373,00	1.557.986.354,00	29,00
42	Kec Biduk - Biduk	6.406.994.333,00	4.883.029.967,00	1.523.964.366,00	31,21
43	Kec Maratua	7.043.358.782,00	5.574.034.317,00	1.469.324.465,00	26,36
44	Kec Tabalar	5.749.754.976,00	4.794.581.197,00	955.173.779,00	19,92
45	Kec Batu Putih	6.091.049.995,00	6.526.766.201,00	(435.716.206,00)	(6,68)
46	Kec Biatan	4.861.294.702,00	3.948.882.444,33	912.412.257,67	23,11
47	Badan Kesbang, Politik, dan Linmas	72.605.055.387,32	38.124.041.513,00	34.481.013.874,32	90,44
JUMLAH		**3.127.403.344.632,32**	**2.785.665.682.472,36**	**341.737.662.159,96**	**12,27**

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus Defisit Non Operasional merupakan Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 adalah Rp25.856.844.781,32, mengalami kenaikan senilai Rp23.044.851.944,44 atau 819,52% dari Tahun 2023 senilai Rp2.811.992.836,88.

5.4.4 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 senilai Rp2.366.823.293.303,89 mengalami **penurunan** senilai Rp54.107.599.356,78 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp2.420.930.892.660,66.

5.4.5 Pos Luar Biasa - LO

Pos Luar Biasa - LO Tahun 2024 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp0,00. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan *surplus/defisit* dari kegitan non operasional dan pos luar biasa. *Surplus/Defisit* pada Laporan Operasional Tahun 2024 senilai Rp2.366.823.293.303,89 mengalami **penurunan** senilai Rp54.107.599.356,78 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp2.420.930.892.660,66.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pendanaan, dan Transitoris. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta setara kas selama Tahun 2024 dan saldo Tahun 2023. Arus kas bersih pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan Tahun 2023 terinci dalam tabel berikut.

Tabel 5.173 Arus Kas Bersih
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Arus Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.609.343.542.250,82	2.438.121.959.499,07	1.171.221.582.751,75	48,04
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.829.123.671.318,58)	(2.347.338.652.588,55)	(1.481.785.018.730,03)	63,13
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(13.709.168,00)	16.001.667,00	(29.710.835,00)	(185,67)

(dalam rupiah)

NO	Arus Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Arus Kas Bersih	**(219.793.838.235,76)**	**90.799.308.577,52**	**(310.593.146.813,28)**	**(342,07)**

Data tabel pada Realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2024 senilai Rp219.793.838.235,76 dan Tahun 2023 senilai Rp90.799.308.577,52. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Arus Kas Bersih mengalami **kenaikan** senilai Rp310.593.146.813,28 atau 342,07%. Realisasi Arus Kas Bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2024 senilai Rp3.609.343.542.250,82 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.174 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Masuk Kas	6.192.351.635.253,41	4.691.271.145.578,33	1.501.080.489.675,08	32,00
2	Arus Keluar Kas	2.583.008.093.002,59	2.253.149.186.079,26	329.858.906.923,33	14,64
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**3.609.343.542.250,82**	**2.438.121.959.499,07**	**1.171.221.582.751,75**	**48,04**

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 dan Tahun 2023 senilai Rp6.192.351.635.253,41 dan Rp4.691.271.145.578,33. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Masuk Kas Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.501.080.489.675,08 atau 32,00% yang terdiri dari :

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 senilai Rp91.558.760.332,00 dan Tahun 2023 senilai Rp93.382.456.473,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp1.823.696.141,00 atau 1,95%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.175 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	0,00	6.881.753.285,00	(6.881.753.285,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
2	Pajak Restoran	0,00	30.420.852.172,00	(30.420.852.172,00)	(100,00)
3	Pajak HIburan	0,00	344.784.773,00	(344.784.773,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	290.417.433,00	602.184.763,00	(311.767.330,00)	(51,77)
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	28.534.831.162,00	(28.534.831.162,00)	(100,00)
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	0,00	523.283.767,00	(523.283.767,00)	(100,00)
8	Pajak Air Bawah Tanah	555.240,00	509.520,00	45.720,00	8,97
9	Pajak Sarang Burung Walet	62.532.000,00	204.404.500,00	(141.872.500,00)	(69,41)
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	194.609.268,00	622.722.080,00	(428.112.812,00)	(68,75)
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.361.315.759,00	10.410.938.473,00	(6.049.622.714,00)	(58,11)
12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.277.432.416,00	14.836.191.978,00	441.240.438,00	2,97
13	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	71.371.898.216,00	0,00	71.371.898.216,00	0,00
	Peneimaan Pajak Daerah	**91.558.760.332,00**	**93.382.456.473,00**	**(1.823.696.141,00)**	**(1,95)**

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 senilai Rp18.110.450.696,00 dan Tahun 2023 senilai Rp14.933.984.444,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.176.466.252,00 atau 21,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.176 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum	12.892.846.872,00	11.048.053.093,00	1.844.793.779,00	16,70
2	Retribusi Jasa Usaha	4.356.814.960,00	2.781.389.108,00	1.575.425.852,00	56,64
3	Retribusi Perijinan Tertentu	860.788.864,00	1.104.542.243,00	(243.753.379,00)	(22,07)
	Penerimaan Retribusi Daerah	**18.110.450.696,00**	**14.933.984.444,00**	**3.176.466.252,00**	**21,27**

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Saldo Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Tahun 2024 senilai Rp17.986.298.143,26 dan Tahun 2023 senilai Rp16.119.182.280,09. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.867.115.863,17 atau 11,58% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.177 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	499.997.100,00	0,00	499.997.100,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT BPD Kaltimtara	14.981.036.885,26	14.636.429.316,09	344.607.569,17	2,35
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	28.658.559,00	0,00	28.658.559,00	0,00
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Indo Pusaka Berau	999.994.200,00	1.114.366.297,00	(114.372.097,00)	(10,26)
6	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - Perumda Air Minum Batiwakal	1.476.611.399,00	368.386.667,00	1.108.224.732,00	300,83
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**17.986.298.143,26**	**16.119.182.280,09**	**1.867.115.863,17**	**11,58**

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Realisasi Penerimaan Lain-lain Yang Sah Tahun 2024 senilai Rp214.149.979.161,46 dan Tahun 2023 senilai Rp161.955.118.611,24. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Lain-lain Yang Sah Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp52.194.860.550,22 atau 32,23% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.178 Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	9.993.490.434,68	20.162.740.302,79	(10.169.249.868,11)	(50,44)
3	Penerimaan Bunga Deposito	87.224.951.102,32	36.364.480.049,19	50.860.471.053,13	139,86
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.383.324.425,50	664.592.690,98	1.718.731.734,52	258,61
5	Pendapatan Denda Pajak	717.916.612,00	155.564.419,00	562.352.193,00	361,49
6	Pendapatan Denda Retribusi	29.598.682,00	47.203.221,00	(17.604.539,00)	(37,30)
7	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	32.102.000,00	12.699.000,00	19.403.000,00	152,79
9	Pendapatan BLUD	95.399.283.552,06	89.860.617.262,60	5.538.666.289,46	6,16
10	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	32.425.827,00	38.753.444,00	(6.327.617,00)	(16,33)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.336.886.525,90	4.954.539.363,68	13.382.347.162,22	270,10
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	9.691.448.619,00	(9.691.448.619,00)	(100,00)
14	Pendapatan Denda pengakhiran Sewa BMD	0,00	2.480.239,00	(2.480.239,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
15	Penerimaan Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah	**214.149.979.161,46**	**161.955.118.611,24**	**52.194.860.550,22**	**32,23**

5.5.1.1.5 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 senilai Rp4.847.083.601.192,00 dan Tahun 2023 senilai Rp3.569.745.798.771,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.277.337.802.421,00 atau 35,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.179 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil	4.053.383.565.000,00	2.846.123.582.480,00	1.207.259.982.520,00	42,42
2	Penerimaan Dana Alokasi Umum	588.991.002.328,00	565.773.403.521,00	23.217.598.807,00	4,10
3	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	80.364.880.846,00	52.763.540.954,00	27.601.339.892,00	52,31
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	124.344.153.018,00	105.085.271.816,00	19.258.881.202,00	18,33
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**4.847.083.601.192,00**	**3.569.745.798.771,00**	**1.277.337.802.421,00**	**35,78**

5.5.1.1.6 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 senilai Rp112.337.773.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp18.660.384.000,00 atau 19,92% dengan rincian sebgai berikut :

Tabel 5.180 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Dana Desa	95.468.642.000,00	93.677.389.000,00	1.791.253.000,00	1,91
5	Insentif Fiskal	16.869.131.000,00		16.869.131.000,00	0,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**112.337.773.000,00**	**93.677.389.000,00**	**18.660.384.000,00**	**19,92**

5.5.1.1.7 Penerimaan Transfer Antar Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer antar Daerah Tahun 2024 senilai Rp815.085.396.308,00 dan Tahun 2023 senilai Rp733.634.381.955,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp81.451.014.353,00 atau 11,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.181 Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	459.125.396.308,00	509.121.881.955,00	(49.996.485.647,00)	(9,82)
2	Penerimaan Bantuan Keuangan	355.960.000.000,00	224.512.500.000,00	131.447.500.000,00	58,55
	Penerimaan Transfer Antar Daerah	**815.085.396.308,00**	**733.634.381.955,00**	**81.451.014.353,00**	**11,10**

5.5.1.1.8 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk periode Tahun 2024 senilai Rp76.039.376.420,69 dan Tahun 2023 senilai Rp7.822.834.044,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp68.216.542.376,69, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.182 Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	76.039.376.420,69	7.822.834.044,00	68.216.542.376,69	872,02
	Jumlah	**76.039.376.420,69**	**7.822.834.044,00**	**68.216.542.376,69**	**872,02**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 senilai Rp2.583.008.093.002,59 dan Tahun 2023 senilai Rp2.253.149.186.079,26. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Keluar Kas Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp329.858.906.923,33 atau 14,64% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.183 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	1.038.160.066.708,34	812.677.295.576,65	225.482.771.131,69	27,75
2	Pembayaran Barang dan Jasa	868.596.837.598,25	834.570.312.408,61	34.026.525.189,64	4,08
3	Pembayaran Hibah	189.599.952.449,00	153.657.103.990,00	35.942.848.459,00	23,39
4	Pembayaran Bantuan Sosial	15.174.000.000,00	8.536.409.701,00	6.637.590.299,00	77,76

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
5	Pembayaran Tak Terduga	5.774.799.583,00	1.826.837.315,00	3.947.962.268,00	216,11
6	Pembayaran Bagi Hasil	11.024.007.000,00	9.540.281.000,00	1.483.726.000,00	15,55
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	454.678.429.664,00	432.340.946.088,00	22.337.483.576,00	5,17
	Jumlah Arus Kas Keluar	**2.583.008.093.002,59**	**2.253.149.186.079,26**	**329.858.906.923,33**	**14,64**

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Saldo Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34 dan Tahun 2023 senilai Rp812.677.295.576,65. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp225.482.771.131,69 atau 27,75%.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Saldo Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2024 senilai Rp868.596.837.598,25 dan Tahun 2023 senilai Rp834.570.312.408,61. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp34.026.525.189,64 atau 4,08%.

5.5.1.2.3 Pembayaran Belanja Hibah

Saldo Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2024 senilai Rp189.599.952.449,00 dan Tahun 2023 senilai Rp153.657.103.990,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp35.942.848.459,00 atau 23,39%.

5.5.1.2.4 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2024 senilai Rp15.174.000.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp8.536.409.701,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.637.590.299,00 atau 77,76%.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Saldo Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2024 senilai Rp5.774.799.583,00 dan Tahun 2023 senilai Rp1.826.837.315,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.947.962.268,00 atau 216,11%.

5.5.1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil

Saldo Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2024 senilai Rp11.024.007.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp9.540.281.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.726.000,00 atau 15,55%.

5.5.1.2.7 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2024 senilai Rp454.678.429.664,00 dan Tahun 2023 senilai Rp432.340.946.088,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2024 mengalami **kenaikan** senilai Rp22.337.483.576,00 atau 5,17%.

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 defisit senilai Rp3.829.152.671.318,58 dan Tahun 2023 defisit senilai Rp2.347.338.652.588,55. Jika dibandingakan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mengalami **kenaikan** senilai Rp1.481.815.228.945,82 atau 63,13% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.184 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Masuk	1.644.537.616,88	278.888.853,45	1.365.648.763,43	489,67
2	Arus Kas Keluar	3.830.768.208.935,46	2.347.617.541.442,00	1.483.150.667.493,46	63,18
	Arus Kas Bersih	**(3.829.123.671.318,58)**	**(2.347.338.652.588,55)**	**(1.481.785.018.730,03)**	63,13

Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2024 dan Tahun 2023 senilai Rp1.644.537.616,88 dan Rp278.888.853,45. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Arus Kas Masuk mengalami **kenaikan** senilai Rp1.365.648.763,43 atau 489,67%.

Tabel 5.185 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.431.875.000,00	302.060,00	1.431.572.940,00	473.936,62

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	212.662.616,88	278.586.793,45	(65.924.176,57)	(23,66)
	Jumlah Arus Keluar	**1.644.537.616,88**	**278.888.853,45**	**1.365.648.763,43**	**489,67**

5.5.2.1.1 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Saldo Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp1.431.875.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp302.060,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin mengalami **kenaikan** senilai Rp1.431.572.940,00 atau 473.936,62%.

5.5.2.1.2 Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Saldo Realisasi Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp212.662.616,88 dan Tahun 2023 senilai Rp278.586.793,45. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan Gedung dan Bangunan mengalami **penurunan** senilai Rp65.924.176,57 atau 23,66%.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2024 dan Tahun 2023 senilai Rp3.830.768.208.935,46 dan Rp2.347.617.541.442,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi mengalami **kenaikan** senilai Rp1.483.150.667.493,46 atau 63,18%, dengan dirincian sebagai berikut:

Tabel 5.186 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Perolehan Tanah	1.352.415.463,00	7.825.488.693,00	(6.473.073.230,00)	(82,72)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	259.968.567.330,29	172.966.458.500,00	87.002.108.830,29	50,30
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	472.685.076.375,72	307.876.754.279,00	164.808.322.096,72	53,53
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.081.747.295.756,45	1.848.412.488.655,00	1.233.334.807.101,45	66,72
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.338.136.101,00	8.536.351.315,00	(198.215.214,00)	(2,32)
6	Perolehan Aset Lainnya	4.676.717.909,00	0,00	4.676.717.909,00	100,00
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar	**3.830.768.208.935,46**	**2.347.617.541.442,00**	**1.483.150.667.493,46**	**63,18**

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Saldo Realisasi Perolehan Tanah Tahun 2024 senilai Rp1.352.415.463,00 dan Tahun 2023 senilai Rp7.825.488.693,00. Jika dibandingkan dengan

Tahun sebelumnya, Perolehan Tanah mengalami **penurunan** senilai Rp6.473.073.230,00 atau 82,72%.

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Saldo Realisasi Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 senilai Rp259.968.567.330,29 dan Tahun 2023 senilai Rp172.966.458.500,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Peralatan dan Mesin mengalami **kenaikan** senilai Rp87.002.108.830,29 atau 50,30%.

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Saldo Realisasi Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp472.685.076.375,72 dan Tahun 2023 senilai Rp307.876.754.279,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Gedung dan Bangunan mengalami **kenaikan** senilai Rp164.808.322.096,72 atau 53,53%.

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Realisasi Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45 dan Tahun 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami **kenaikan** senilai Rp1.233.334.807.101,45 atau 66,72%.

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Saldo Realisasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 senilai Rp8.338.136.101,00 dan Tahun 2023 senilai Rp8.536.351.315,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Aset Tetap Lainnya mengalami **penurunan** senilai Rp198.215.214,00 atau 2,32%.

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Saldo Realisasi Perolehan Aset Lainnya Tahun 2024 senilai Rp.4.676.717.909,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Aset Lainnya mengalami kenaikan senilai Rp4.676.717.909,00 atau 100,00%.

5.5.2.2.7 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Saldo Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 senilai Rp2.000.000.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah mengalami tidak kenaikan ataupun penurunan.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00, sehingga tidak terdapat kenaikan dan penurunan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas transitoris Tahun 2024 senilai minus Rp13.709.168,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.187 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 20234	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Masuk	491.827.584.194,00	370.236.107.815,00	121.591.476.379,00	32,84
2	Arus Kas Keluar	491.841.293.362,00	370.220.106.148,00	121.621.187.214,00	32,85
	Arus Kas Bersih	**(13.709.168,00)**	**16.001.667,00**	**(29.710.835,00)**	**(185,67)**

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 senilai Rp491.827.584.194,00 dan Tahun 2023 senilai Rp370.236.107.815,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami **kenaikan** senilai Rp121.591.476.379,00 atau 32,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.188 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	491.827.584.194,00	370.236.107.815,00	121.591.476.379,00	32,84
2	Koreksi Saldo Awal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Saldo Awal BOSNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Saldo Awal JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TDF-TKD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk	**491.827.584.194,00**	**370.236.107.815,00**	**121.591.476.379,00**	**32,84**

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Kas Masuk Tahun 2024 senilai Rp491.827.584.194,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh BUD yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai serta Saldo Rekening Bank Bendahara pengeluaran OPD atas transaksi yang belum disalurkan kepada penerima. Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023 senilai

Rp370.236.107.815,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp121.591.476.379,00 atau 32,84% dari Tahun 2024.

5.5.4.1.2 Koreksi Saldo Awal BLUD

Arus Kas Masuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 sementara Tahun 2023 senilai Rp0,00 adalah pembayaran atas Piutang Pegawai BLUD yang merupakan bagian dari SILPA BLUD.

5.5.4.1.3 Koreksi Saldo Awal BOSNAS

Arus kas masuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.5.4.1.4 Koreksi Saldo Awal JKN

Arus Kas Masuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.5.4.1.5 Remunerasi

Arus kas masuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.5.4.1.6 TDF-TKD

Arus kas masuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 senilai Rp491.841.293.362,00 dan Tahun 2023 senilai Rp370.220.106.148,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami **kenaikan** senilai Rp121.621.187.214,00 atau 32,85%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.189 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	491.841.293.362,00	370.214.233.306,00	121.627.060.056,00	32,85
2	Koreksi Saldo BOS	0,00	5.800.000,00	(5.800.000,00)	(100,00)
3	Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)	0,00	72.842,00	(72.842,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Keluar	**491.841.293.362,00**	**370.220.106.148,00**	**121.621.187.214,00**	**32,85**

5.5.5 Kenaikan/ Penurunan Kas

Kas selama Tahun 2024 senilai Rp219.793.838.235,76 dan Tahun 2023 senilai Rp90.799.308.577,52 mengalami **kenaikan** kas senilai Rp310.593.146.813,28 atau 342,07%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.190 Kenaikan dan Penurunan Kas
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.609.373.752.466,61	2.438.121.959.499,07	1.171.251.792.967,54	48,04

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.829.153.881.534,37)	(2.347.338.652.588,55)	(1.481.815.228.945,82)	63,13
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(13.709.168,00)	16.001.667,00	(29.710.835,00)	(185,67)
	Kenaikan (Penurunan) Kas	**(219.793.838.235,76)**	**90.799.308.577,52**	**(310.593.146.813,28)**	**(342,07)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp893.248.455.797,04 dan Rp802.449.147.219,52. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Awal Kas mengalami **kenaikan** senilai Rp90.799.308.577,52 atau 11,32%.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp673.454.617.561,28 dan Rp893.248.455.797,04. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Akhir Kas mengalami **penurunan** senilai Rp219.793.838.235,76 atau 24,61%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.191 Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	644.036.295.948,04	821.259.740.624,13	(177.223.444.676,09)	(21,58)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	65.628.500,00	65.356.000,00	272.500,00	0,42
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	33.906.867,00	0,00	33.906.867,00	0,00
4	Kas di BLUD	24.859.854.694,32	67.648.687.298,19	(42.788.832.603,87)	(63,25)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP (JKN)	404.086.306,76	1.651.431.753,56	(1.247.345.446,80)	(75,53)
6	Kas di Bendahara BOS	742.867.460,16	1.226.486.066,16	(483.618.606,00)	(39,43)
7	Kas Di Bendahara Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya (PFK, Pendapatan Diterima Dimuka)	3.311.977.785,00	1.396.754.055,00	1.915.223.730,00	137,12
	Saldo Akhir Kas	**673.454.617.561,28**	**893.248.455.797,04**	**(219.793.838.235,76)**	**(24,61)**

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023, dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.192 Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
EKUITAS AWAL	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,80
SURPLUS/DEFISIT - LO	2.366.823.293.303,89	2.420.930.892.660,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(588.146.618.017,53)	(7.892.020.451,03)
Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	(212.791.884,97)	0,00
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	(208.835.630,00)	757.482.116,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	(18.009.475.955,59)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	37.760.932.453,03	(8.649.502.567,03)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(607.476.447.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**14.612.014.016.886,86**	**12.833.337.341.600,50**

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp12.833.337.341.600,50 merupakan saldo Ekuitas akhir Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Audited.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Penambahan Ekuitas Tahun 2024 bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp2.366.823.293.303,89 yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada LPE terdapat koreksi Ekuitas senilai Rp588.146.618.017,53. Hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar.

Tabel 5.193 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
1	**Badan Pendapatan Daerah;**			
	Pajak Hotel/ PBJT- Jasa Perhotelan	**39.169.282,50**		
	Sanggam Hotel/Effendy D	0,50		0,50
	Losmen Kartika/H.Hafied Khan	60.579,00		60.579,50

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
	PT. TIARA SANTIKA / HOTEL	39.108.703,00		39.169.282,50
	Pajak Restoran/ PBJT-Makanan dan/ atau Minuman	32.239.244,00	8.110.520,00	63.298.006,50
	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	59.439.083,00	105.052.128,00	17.684.961,50
	Piutang Denda Pajak	407.699.189,54		425.384.151,04
	Piutang Denda Retribusi		1.700.747.778,61	(1.275.363.627,57)
2	**Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan**			
	Piutang Retribusi		67.455.603,00	(1.342.819.230,57)
3	**RSUD Abdul Rivai**			
	Piutang BLUD, selisih pada tagihan BPJS sesuai berita acara dan atas pembulatan.	1.130.027.345,60		(212.791.884,97)
4	**BPKAD**			
	Double saji Piutang Perusda Hutan Sanggam Berau		55.372.169,00	(268.164.053,97)
	Koreksi lebih saji saat Penyajian persentase kepemilikan Pemda Berau pada PT IPB		17.954.103.786,59	(18.222.267.840,56)
	Pembebasan Lahan Tanggal 20 Maret 1999 dari Bpk. Abd . Razak untuk Keperluan Instalasi Air Bersih Di Kecamatan Gunung Tabur dengan Luas. (2.000 M2)	7.500.000,00		(18.214.767.840,56)
	Koreksi Aset Lainnya (TDF)		607.305.808.000,00	(625.520.575.840,56)
5	**Dinas Perikanan**			
	Pencatatan Ganda pada Aset Tanah Dinas perhubungan yang juga tercatat di dinas Perikanan Berdasarkan Surat Nomor 550/026/Dishub - 1.2 /2022 (Luas 2.477 M2)		171.844.000,00	(625.692.419.840,56)
7	**Dinas Pendidikan**			
	Usulan Ubah Kondisi dan Penghapusan KIB B, SMPN 1 Segah sesuai Surat Persetujuan Bupati Berau No. 030/345.A/BPKAD-E/2024		633.387.464,00	(626.325.807.304,56)
	Usulan Ubah Kondisi dan Penghapusan KIB B, SDN 019 Tg Redeb sesuai Surat Persetujuan Bupati Berau No. 030/345.A/BPKAD-E/2024		271.480.750,00	(626.597.288.054,56)
	Usulan Ubah Kondisi dan Penghapusan KIB E, SDN 019 Tg Redeb sesuai Surat Persetujuan Bupati Berau No. 030/345.A/BPKAD-E/2024		6.295.000,00	(626.603.583.054,56)
	Koreksi pendapatan aset tetap peralatan dan mesin	1.000.000.000,00		(625.603.583.054,56)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
8	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
	Koreksi Ak Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dihapuskan	904.868.214,00		(624.698.714.840,56)
9	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**			
	Koreksi Persediaan Bahan Kimia	72.329.250,00		(624.626.385.590,56)
10	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**			
	Koreksi persediaan Bahan/Bibit tanaman, perabot kantor & perlengkapan dinas		281.164.880,00	(624.907.550.470,56)
11	**Kecamatan Maratua**			
	Koreksi pendapatan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp596,062,750,00 & aset tetap lainnya sebesar Rp26,470,000,00	622.532.750,00		(624.285.017.720,56)
12	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**			
	Koreksi pendapatan aset tetap peralatan dan mesin	83.900.000,00		(624.201.117.720,56)
13	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
	Koreksi pendapatan aset tetap tanah sebesar Rp702.000.000,00 gedung & bangunan sebesar Rp531.000.000,00, jalan jaringan & irigasi sebesar Rp34.821.499.703,00	36.054.499.703,00		(588.146.618.017,56)
14	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
	Koreksi pendapatan aset tetap tanah sebesar Rp702.000.000,00 gedung & bangunan sebesar Rp531.000.000,00, jalan jaringan & irigasi sebesar Rp34.821.499.703,00	0,03		(588.146.618.017,53)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2024 senilai Rp14.612.014.016.886,83 yang terdiri dari Ekuitas awal senilai Rp12.833.337.341.600,50 ditambah *Surplus/Defisit LO* senilai Rp2.366.823.293.303,89 dan dikurangi koreksi Ekuitas senilai Rp588.146.618.017,53 .

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili

Kabupaten Berau secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Utara Pulau Kalimantan, antar Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Berau terletak pada posisi antara 1160 sampai dengan 1190 bujur timur dan 10 sampai dengan 20 33' lintang utara.

Kabupaten Berau di bentuk berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); dan

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Berau.

Luas wilayah Kabupaten Berau 34.127,47 Km^2, terdiri dari luas laut 11.962,42 Km^2 dan luas daratan 21.951,71 Km^2. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Berau mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

a.	Sebelah Utara	:	Kabupaten Bulungan
b.	Sebelah Timur	:	Laut Sulawesi
c.	Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kutai Timur
d.	Sebelah Barat	:	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau

6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Berau;

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024;

c. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024;

d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024; dan

e. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024.

6.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024, ditunjang dengan susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

a. Sekretariat

1) Sekretariat Daerah
2) Sekretariat DPRD

b. Badan

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
3) Badan Pendapatan Daerah
4) Badan Kesbang, Politik dan Linmas
5) Badan Satuan Polisi Pamong Praja
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7) RSUD Dr. A. Rivai
8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
10) Inspektorat

c. Dinas

1) Dinas Perhubungan
2) Dinas Komunikasi dan Informatika
3) Dinas Kesehatan
4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5) Dinas Pangan
6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8) Dinas Pertanahan
9) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
10) Dinas Perkebunan
11) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13) Dinas Pendidikan
14) Dinas Perikanan
15) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
18) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19) Dinas Sosial

20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

d. Kantor
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

e. Perangkat Daerah lainnya

1) Kecamatan Tanjung Redeb
2) Kecamatan Tabalar
3) Kecamatan Talisayan
4) Kecamatan Teluk Bayur
5) Kecamatan Batu Putih
6) Kecamatan Biatan
7) Kecamatan Biduk-Biduk
8) Kecamatan Gunung Tabur
9) Kecamatan Kelay
10) Kecamatan Maratua
11) Kecamatan Pulau Derawan
12) Kecamatan Sambaliung
13) Kecamatan Segah

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun periode pelaporan, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peran antara lain akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. LKPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Berau selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi Laporan Keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna meskipun upaya telah kami lakukan.

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Berau mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Kabupaten Berau di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat atas segala upaya yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Berau yang lebih baik.



PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

DAFTAR LAMPIRAN LKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)



LAMPIRAN 1

Penyaluran Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2024

REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2024

Lampiran 1

KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	TOTALPENYALURAN	%
6403122005	Ampen Medang	Batu Putih	BERKEMBANG	855.546.000	855.546.000	100
6403122006	Balikukup	Batu Putih	BERKEMBANG	736.548.000	736.548.000	100
6403122003	Batu Putih	Batu Putih	MANDIRI	1.266.576.000	1.266.576.000	112
6403042012	Batu Rajang	Segah	BERKEMBANG	702.812.000	702.812.000	100
6403062011	Batu-Batu	Gunung Tabur	BERKEMBANG	668.996.000	668.996.000	100
6403032015	Bena Baru	Sambaliung	MAJU	900.006.000	900.006.000	117
6403132006	Biatan Bapinang	Biatan	BERKEMBANG	723.772.000	723.772.000	100
6403132007	Biatan Baru	Biatan	BERKEMBANG	674.556.000	674.556.000	100
6403132002	Biatan Ilir	Biatan	MAJU	738.179.000	738.179.000	100
6403132004	Biatan Lempake	Biatan	MAJU	750.121.000	750.121.000	100
6403132001	Biatan Ulu	Biatan	BERKEMBANG	765.733.000	765.733.000	100
6403082001	Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	MANDIRI	1.067.176.000	1.067.176.000	100
6403062002	Birang	Gunung Tabur	BERKEMBANG	684.207.000	684.207.000	100
6403112001	Bohe Silian	Maratua	BERKEMBANG	732.949.000	732.949.000	100
6403042009	Bukit Makmur	Segah	MAJU	960.506.000	960.506.000	100
6403132008	Bukit Makmur Jaya	Biatan	BERKEMBANG	817.226.000	817.226.000	119
6403022015	Bumi Jaya	Talisayan	MAJU	946.180.000	946.180.000	116
6403102006	Buyung-Buyung	Tabalar	MAJU	850.932.000	850.932.000	100
6403022014	Campur Sari	Talisayan	MAJU	1.226.000.000	1.226.000.000	112
6403022023	Capuak	Talisayan	MAJU	1.180.974.000	1.180.974.000	100
6403022002	Dumaring	Talisayan	MAJU	1.819.556.000	1.819.556.000	100
6403022021	Eka Sapta	Talisayan	MANDIRI	1.227.401.000	1.227.401.000	100
6403082009	Giring-Giring	Biduk-Biduk	MAJU	738.402.000	738.402.000	100
6403042007	Gunung Sari	Segah	MAJU	1.097.992.000	1.097.992.000	100
6403032011	Gurimbang	Sambaliung	MANDIRI	744.852.000	744.852.000	100
6403042010	Harapan Jaya	Segah	MAJU	897.703.000	897.703.000	100
6403102007	Harapan Maju	Tabalar	MAJU	771.450.000	771.450.000	100
6403032004	Inaran	Sambaliung	MAJU	683.551.000	683.551.000	100
6403132003	Karangan	Biatan	BERKEMBANG	731.429.000	731.429.000	100
6403072009	Kasai	Pulau Derawan	MAJU	1.643.061.000	1.643.061.000	100
6403122002	Kayu Indah	Batu Putih	BERKEMBANG	771.445.000	771.445.000	100
6403092004	Labanan Jaya	Teluk Bayur	MANDIRI	1.032.549.000	1.032.549.000	100
6403092006	Labanan Makarti	Teluk Bayur	MANDIRI	1.174.634.000	1.174.634.000	117
6403092005	Labanan Makmur	Teluk Bayur	MANDIRI	877.549.000	877.549.000	100
6403012006	Lesan Dayak	Kelay	BERKEMBANG	606.765.000	606.765.000	100
6403122004	Lobang Kelatak	Batu Putih	BERKEMBANG	804.498.000	804.498.000	120
6403042004	Long Ayan	Segah	BERKEMBANG	1.451.310.000	1.451.310.000	100
6403042003	Long Ayap	Segah	BERKEMBANG	694.135.000	694.135.000	100
6403012007	Long Beliu	Kelay	MAJU	683.809.000	683.809.000	100
6403012008	Long Duhung	Kelay	BERKEMBANG	618.048.000	618.048.000	100
6403012010	Long Keluh	Kelay	BERKEMBANG	613.251.000	613.251.000	100
6403042001	Long La'ai	Segah	BERKEMBANG	786.130.000	786.130.000	100
6403012009	Long Lamcin	Kelay	BERKEMBANG	623.211.000	623.211.000	100
6403032001	Long Lanuk	Sambaliung	BERKEMBANG	955.870.000	955.870.000	100
6403012011	Long Pelay	Kelay	BERKEMBANG	671.736.000	671.736.000	100
6403012013	Long Sului	Kelay	BERKEMBANG	624.738.000	624.738.000	100
6403062004	Maluang	Gunung Tabur	MANDIRI	1.389.246.000	1.389.246.000	100
6403132005	Manunggal Jaya	Biatan	BERKEMBANG	728.648.000	728.648.000	100
6403012012	Mapulu	Kelay	TERTINGGAL	613.986.000	613.986.000	100
6403062010	Melati Jaya	Gunung Tabur	BERKEMBANG	921.106.000	921.106.000	100
6403012001	Merabu	Kelay	MAJU	669.813.000	669.813.000	100
6403062008	Merancang Ilir	Gunung Tabur	BERKEMBANG	811.933.000	811.933.000	100
6403062007	Merancang Ulu	Gunung Tabur	MANDIRI	832.260.000	832.260.000	100
6403012003	Merapun	Kelay	MAJU	735.895.000	735.895.000	100
6403012005	Merasa	Kelay	MAJU	732.937.000	732.937.000	100
6403012004	Muara Lesan	Kelay	MAJU	821.284.000	821.284.000	119
6403012002	Panaan	Kelay	BERKEMBANG	669.909.000	669.909.000	100
6403042008	Pandan Sari	Segah	BERKEMBANG	759.453.000	759.453.000	100
6403082002	Pantai Harapan	Biduk-Biduk	MAJU	1.148.289.000	1.148.289.000	100
6403112002	Payung-Payung	Maratua	BERKEMBANG	696.673.000	696.673.000	100
6403072001	Pegat Batumbuk	Pulau Derawan	BERKEMBANG	1.474.376.000	1.474.376.000	100
6403032005	Pegat Bukur	Sambaliung	MANDIRI	1.210.385.000	1.210.385.000	112
6403032009	Pesayan	Sambaliung	BERKEMBANG	880.971.000	880.971.000	100
6403032008	Pilanjau	Sambaliung	MAJU	950.628.000	950.628.000	116
6403062009	Pulau Besing	Gunung Tabur	BERKEMBANG	744.975.000	744.975.000	122
6403072004	Pulau Derawan	Pulau Derawan	MANDIRI	1.416.380.000	1.416.380.000	110
6403042006	Punan Mahkam	Segah	BERKEMBANG	1.409.992.000	1.409.992.000	100

KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	TOTALPENYALURAN	%
6403042005	Punan Malinau	Segah	MAJU	1.612.573.000	1.612.573.000	100
6403042002	Punan Segah	Segah	BERKEMBANG	1.270.029.000	1.270.029.000	100
6403022019	Purna Sari Jaya	Talisayan	BERKEMBANG	1.112.825.000	1.112.825.000	114
6403032006	Rantau Panjang	Sambaliung	MAJU	698.088.000	698.088.000	100
6403062006	Sambakungan	Gunung Tabur	MAJU	763.624.000	763.624.000	100
6403062005	Samburakat	Gunung Tabur	BERKEMBANG	829.944.000	829.944.000	100
6403032010	Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	MANDIRI	1.022.726.000	1.022.726.000	115
6403102005	Semurut	Tabalar	BERKEMBANG	710.030.000	710.030.000	100
6403012014	Sido Bangen	Kelay	MAJU	658.203.000	658.203.000	100
6403042013	Siduung Indah	Segah	BERKEMBANG	846.351.000	846.351.000	100
6403032007	Suaran	Sambaliung	MAJU	954.799.000	954.799.000	100
6403022018	Suka Murya	Talisayan	MAJU	1.095.625.000	1.095.625.000	100
6403032012	Sukan Tengah	Sambaliung	MANDIRI	840.114.000	840.114.000	100
6403122007	Sumber Agung	Batu Putih	MAJU	764.438.000	764.438.000	105
6403022017	Sumber Mulya	Talisayan	MAJU	2.041.893.000	2.041.893.000	107
6403102002	Tabalar Muara	Tabalar	MAJU	734.751.000	734.751.000	100
6403102004	Tabalar Ulu	Tabalar	BERKEMBANG	886.379.000	886.379.000	118
6403022003	Talisayan	Talisayan	MANDIRI	1.993.690.000	1.993.690.000	100
6403072003	Tanjung Batu	Pulau Derawan	MANDIRI	2.501.165.000	2.501.165.000	100
6403032014	Tanjung Perangat	Sambaliung	MAJU	759.871.000	759.871.000	100
6403082003	Tanjung Prepat	Biduk-Biduk	MAJU	772.403.000	772.403.000	100
6403062001	Tasuk	Gunung Tabur	MAJU	1.176.582.000	1.176.582.000	113
6403112003	Teluk Alulu	Maratua	BERKEMBANG	797.085.000	797.085.000	100
6403112004	Teluk Harapan	Maratua	MAJU	940.585.000	940.585.000	100
6403072002	Teluk Semanting	Pulau Derawan	MAJU	846.673.000	846.673.000	100
6403082008	Teluk Sulaiman	Biduk-Biduk	MAJU	992.587.000	992.587.000	115
6403082004	Teluk Sumbang	Biduk-Biduk	BERKEMBANG	806.940.000	806.940.000	100
6403122001	Tembudan	Batu Putih	MANDIRI	893.922.000	893.922.000	100
6403042011	Tepian Buah	Segah	MAJU	720.165.000	720.165.000	100
6403102003	Tubaan	Tabalar	MAJU	1.158.251.000	1.158.251.000	113
6403032002	Tumbit Dayak	Sambaliung	MANDIRI	1.103.205.000	1.103.205.000	114
6403092001	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	BERKEMBANG	962.249.000	962.249.000	100
6403022016	Tunggal Bumi	Talisayan	BERKEMBANG	1.987.668.000	1.987.668.000	107
				95.468.642.000	**95.468.642.000**	



LAMPIRAN 2

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024

Lampiran 2

NO	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.319.241.900,00	68.463.967.910,00	51.903.108.781,64	75,81%	16.560.859.128,36
1	Biaya Perlengkapan Ruangan Pelayanan (BLUD)	533.400.000,00	484.900.000,00	285.432.500,00	58,86%	199.467.500,00
2	Biaya Linen (BLUD)			-		-
3	Biaya Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD)	10.678.643.990,00	30.562.500.000,00	27.299.946.857,64	89,32%	3.262.553.142,36
4	Biaya Bahan Kerja Pelayanan (BLUD)	318.250.000,00	376.250.000,00	140.160.171,00	37,25%	236.089.829,00
5	Biaya Bahan dan Alat Laboratorium (BLUD)	1.210.000.000,00	2.910.000.000,00	2.018.095.676,00	69,35%	891.904.324,00
6	Biaya Bahan dan Alat Radiologi (BLUD)	660.000.000,00	1.160.000.000,00	788.420.000,00	67,97%	371.580.000,00
7	Biaya Bahan Makanan Pasien (BLUD)	1.200.000.000,00	500.000.000,00	456.757.423,00	91,35%	43.242.577,00
8	Biaya Makan Minum Kegiatan (BLUD)	754.920.000,00	988.540.000,00	749.602.000,00	75,83%	238.938.000,00
9	Biaya Makan minum petugas jaga (BLUD)			-		-
10	Biaya makan minum rapat (BLUD)	190.900.000,00	220.900.000,00	142.941.000,00	64,71%	77.959.000,00
11	Biaya Gas Medik (Pengisian O2) (BLUD)	330.000.000,00	1.968.000.000,00	1.590.300.000,00	80,81%	377.700.000,00
12	Biaya Bahan dan Alat Kedokteran Gigi (BLUD)	220.000.000,00	720.000.000,00	325.623.959,00	45,23%	394.376.041,00
13	Biaya Bahan dan Alat PMI (BLUD)	770.000.000,00	2.000.000.000,00	1.642.920.000,00	82,15%	357.080.000,00
14	Biaya Atat Tulis Kantor (BLUD)	305.500.000,00	466.820.000,00	431.067.670,00	92,34%	35.752.330,00
15	Biaya Cetak (BLUD)	410.000.000,00	1.110.000.000,00	770.831.750,00	69,44%	339.168.250,00
16	Biaya Penggandaan (BLUD)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
17	Biaya Penjilidan (BLUD)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
18	Biaya Benda Pos (BLUD)	10.000.000,00	10.750.000,00	6.744.000,00	62,73%	4.006.000,00
19	Biaya Pengiriman Dokumen dan Sampel Pemeriksaan (BLUD)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.283.600,00	9,17%	12.716.400,00
20	Biaya Bahan Peralatan dan Perlengkapan (BLUD)	16.807.910,00	21.987.910,00	15.564.000,00	70,78%	6.423.910,00
21	Biaya Bahan / Alat Peralatan Lainnya (BLUD)	341.400.000,00	246.400.000,00	32.702.405,00	13,27%	213.697.595,00
22	Biaya Bahan Alat Listrik / Elektronik (BLUD)	150.000.000,00	350.000.000,00	156.792.000,00	44,80%	193.208.000,00
23	Biaya Bahan / Alat Kebersihan dan Bahan Habis Pakai (BLUD)	570.000.000,00	500.000.000,00	301.562.161,00	60,31%	198.437.839,00
24	Biaya Bahan Bakar dan Pelumas incenerator serta genset (BLUD)	200.000.000,00	250.000.000,00	220.379.200,00	88,15%	29.620.800,00
25	Biaya bahan bakar gas / minyak tanah (BLUD)	100.000.000,00	-	-		-
26	Biaya Isi Ulang Gas LPG(BLUD)	100.000.000,00	115.000.000,00	114.480.000,00	99,55%	520.000,00
27	Biaya Bahan/Alat Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga (BLUD)	275.000.000,00	100.000.000,00	6.849.366,00	6,85%	93.150.634,00
28	Biaya Pengeluaran untuk Sarana dan Prasarana Lainnya (BLUD)	132.000.000,00	132.000.000,00	60.050.000,00	45,49%	71.950.000,00
29	Biaya Pengadaan alat Kesehatan /Kedokteran (instrumen Pengganti) (BLUD)	414.120.000,00	414.120.000,00	-	0,00%	414.120.000,00
30	Biaya Bahan/ alat/ peralatan/perlengkapan apotik lainnya (BLUD)	66.000.000,00	66.000.000,00	44.496.792,00	67,42%	21.503.208,00
31	Biaya Filter Hepa Filter (BLUD)	75.000.000,00	75.000.000,00	56.999.610,00	76,00%	18.000.390,00
32	Biaya Peralatan Olahraga /baju olahraga (BLUD)	20.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	26,67%	22.000.000,00
33	Biaya Bahan/Alat Peralatan/Perlengkapan Kesling /PPI (BLUD)			-		-
34	Biaya Bahan bahan Alat Dapur/ Pantry (BLUD)	115.300.000,00	115.300.000,00	54.156.900,00	46,97%	61.143.100,00
35	Biaya Bahan Pemulasaraan Jenazah (COVID-19) (BLUD)	90.000.000,00	-	-		-
36	Biaya Pengadaan Peti Jenazah+Nisan Pasien COVID-19 (BLUD)	20.000.000,00	-	-		-
37	Biaya Dokumentasi (BLUD)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
38	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya (BLUD)	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000,00	0,40%	14.940.000,00
39	Biaya Administrasi Bank (BLUD)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%	2.000.000,00
40	Biaya Return Billing Pasien Pembayaran Rawat Jalan dan Rawat Inap (BLUD)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00%	75.000.000,00
41	Biaya Pakaian Dinas Pegawai dan Id-Card Pegawai Rumah Sakit (BLUD)	480.000.000,00	330.000.000,00	-	0,00%	330.000.000,00
42	Biaya Perjalanan Dalam Daerah (BLUD)	150.000.000,00	150.000.000,00	4.535.000,00	3,02%	145.465.000,00
43	Biaya Perjalanan Luar Daerah (BLUD)	1.642.000.000,00	2.075.000.000,00	1.341.389.834,00	64,65%	733.610.166,00
44	In House Training Tenaga Kesehatan RS (BLUD)	400.000.000,00	400.000.000,00	175.000.000,00	43,75%	225.000.000,00
45	Biaya Pembuatan Penerbitan Izin Radiologi (BLUD)	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
46	Biaya Pembuatan Izin Incenerator (BLUD)	100.000.000,00	-	-		-

NO	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.319.241.900,00	68.463.967.910,00	51.903.108.781,64	75,81%	16.560.859.128,36
47	Biaya Transportasi dan Akomodasi (BLUD)			-		-
48	Biaya Pelaksanaan Akreditasi (BLUD)			-		-
49	Biaya Jasa Telepon (BLUD)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00%	40.000.000,00
50	Biaya Jasa Air (BLUD)	100.000.000,00	140.000.000,00	127.242.700,00	90,89%	12.757.300,00
51	Biaya Jasa Listrik (BLUD)	150.000.000,00	260.000.000,00	139.404.969,00	53,62%	120.595.031,00
52	Biaya Barang dan Jasa Pengembangan SIM RS (BLUD)	675.000.000,00	675.000.000,00	508.581.816,00	75,35%	166.418.184,00
53	Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (BLUD)			-		-
54	Biaya Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli Pem.Emisi Incenerator (BLUD)	83.000.000,00	-	-		-
55	Biaya Jasa Konsultan Perencanaan /Pengawasan Bangunan (BLUD)			-		-
56	Biaya Jasa Konsultan Penyusunan Remunerasi (BLUD)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
57	Biaya Jasa Konsultan Evaluasi Struktur Tarip (BLUD)			-		-
58	Jasa Konsultan Pendampingan Penyusunan RENSTRA	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
59	Jasa Konsultan Akreditasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
60	Konsultan Appraisal Bangunan (pendesainan, pemberian angka, serta penilaian dari analisa yang nyata)			-		-
61	Biaya Jasa Penyusunan PPLH RS (Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup)	100.000.000,00	-	-		-
62	Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD			-		-
63	Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi BLUD			-		-
64	Jasa Konsultan pembuatan Feasibility Study (FS) study kajian pengembangan RS			-		-
65	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas (BLUD)	-	110.000.000,00	50.171.000,00	45,61%	59.829.000,00
66	Biaya Jasa Pemeriksaan Film Badge (BLUD)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.300.000,00	82,00%	2.700.000,00
67	Jasa Instruktur Senam/Olahraga lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	10.000.000,00
68	Biaya Jasa Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium (BLUD)	15.000.000,00	15.000.000,00	14.575.000,00	97,17%	425.000,00
69	Biaya pemeriksaan alat instrumen dan linen untuk uji mikrobiologi usap (kultur-identifikasi bakteri)	-	12.500.000,00	10.000.000,00	80,00%	2.500.000,00
70	Uji kesesuaian alat kesehatan radiologi	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
71	Biaya Jasa Sertifikasi Pemeriksaan Endotoxin (BLUD)			-		-
72	Biaya Sertifikasi Pemeriksaan Emisi Incenerator (BLUD)	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	11.500.000,00
73	Biaya Sertifikasi Alat-alat K3 (BLUD)	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
74	Biaya Sertifikasi Pemeriksaan Kualitas Limbah (BLUD)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
75	Biaya Sertifikasi Kalibrasi RS (BLUD)	330.000.000,00	330.000.000,00	285.472.464,00	86,51%	44.527.536,00
76	Biaya Sertifikasi ISO-15189 2012 ISO Laboratorium Medik	110.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	90,91%	10.000.000,00
77	Sertifikasi ISO K3 Faskes ISO 45001:2018 (BLUD)	110.000.000,00	110.000.000,00	-	0,00%	110.000.000,00
78	Biaya Sertifikasi ISO Managemen Mutu RS (BLUD)	110.000.000,00	110.000.000,00	-	0,00%	110.000.000,00
79	Biaya Honor dokter spesialis Jantung, syaraf, bedah, rehab medik dll (BLUD)	297.000.000,00	297.000.000,00	256.300.000,00	86,30%	40.700.000,00
80	Biaya Honor Dokter Spesialis Pathologi Klinis (BLUD)			-		-
81	Honor Tenaga Pembimbingan kerohanian (BLUD)			-		-
82	Honor Tenaga Pengamanan dari TNI AD (BLUD)			-		-
83	Biaya Operasional Ruang Haemodialisa (BLUD)	50.000.000,00	50.000.000,00	21.052.632,00	42,11%	28.947.368,00
84	Biaya Honor Fisikawan Medik Radiologi (BLUD)	48.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	87,50%	6.000.000,00
85	Pembiayaan Pelaksanaan Program Pelayanan DH (visitasi,honorarium,Akomodasi dan transportasi)	250.000.000,00	250.000.000,00	190.800.000,00	76,32%	59.200.000,00
86	Biaya Honorarium Narasumber Pendampingan Penyusun RSB/RBA (BLUD)			-		-
87	Biaya Honor Rohaniawan Jenazah Covid-19/ Jenazah Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
88	Honor Ustad dalam rangka siraman rohani / ceramah agama	60.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
89	Honor narasumber pendampingan penyusunan Sistem Akuntansi /Kebijakan Akuntansi			-		-
90	Honor / Jasa Pendampingan Hukum	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
91	Konsultan Hukum / Pendampingan Hukum Advokat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
92	honor tim pendampingan hukum Pengembangan RS		120.000.000,00	90.000.000,00	75,00%	30.000.000,00
93	Honor narasumber percepatan Perbub (6 orang)		10.800.000,00	-	-	10.800.000,00
94	Narasumber (Pendampingan Tim Kejaksaan)			-		-

NO	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.319.241.900,00	68.463.967.910,00	51.903.108.781,64	75,81%	16.560.859.128,36
95	Biaya Pengadaan Vaccin Karyawan RS (BLUD)	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00
96	Biaya Honor Tim Auditor (BLUD)	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	80,00%	20.000.000,00
97	Biaya Jasa Pembuangan sampah ke TPA (BLUD)	25.000.000,00	35.000.000,00	32.190.000,00	91,97%	2.810.000,00
98	Biaya Jasa Penyerahan Limbah B3 (BLUD)	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	820.808.000,00	60,80%	529.192.000,00
99	Biaya Dana Sosial Pendidikandan Promosi (BLUD)			-		-
100	Biaya publikasi dan promosi (BLUD)	100.000.000,00	100.000.000,00	67.769.000,00	67,77%	32.231.000,00
101	Biaya Kunjungan Persahabatan Untuk Kegiatan Olah Raga (BLUD)	25.000.000,00	50.000.000,00	36.000.000,00	72,00%	14.000.000,00
102	Biaya penanggulangan krisis kesehatan (BLUD)	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00
103	Biaya Pengisian Tabung Damkar (BLUD)	30.000.000,00	30.000.000,00	20.963.460,00	69,88%	9.036.540,00
104	Biaya Jasa Sewa Rumah (BLUD)	250.000.000,00	250.000.000,00	191.204.000,00	76,48%	58.796.000,00
105	Biaya Jasa Sewa Tempat (BLUD)	72.000.000,00	92.000.000,00	34.770.000,00	37,79%	57.230.000,00
106	Biaya Jasa Sewa Genset (BLUD)			-		-
107	Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah (BLUD)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.320.000,00	28,80%	10.680.000,00
108	Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Cleaning Service 2024 (BLUD)	4.100.000.000,00	6.000.000.000,00	4.155.904.996,00	69,27%	1.844.095.004,00
109	Pengadaan Pekerjaan Barang dan Satuan Pengamanan 2024 (BLUD)	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.397.000.004,00	69,85%	602.999.996,00
110	Biaya Jasa Langganan TV Kabel (BLUD)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.200.000,00	88,00%	1.800.000,00
111	Biaya Jasa Komunikasi Cepat Petugas Radiologi, Ruangan, dll (BLUD)	55.000.000,00	5.000.000,00	2.952.520,00	59,05%	2.047.480,00
112	Biaya Paket Internet Corporate 10 MBPS (BLUD)	140.000.000,00	140.000.000,00	113.220.000,00	80,87%	26.780.000,00
113	Perpanjangan Hosting + Webside (BLUD)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	-
114	Langganan Akun Zoom (BLUD)			-		-
115	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Karyawan RS (BLUD)			-		-
116	Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Karyawan BLUD RS (BLUD)	300.000.000,00	800.000.000,00	794.135.936,00	99,27%	5.864.064,00
117	Biaya Kontribusi/Kepesertaan (BLUD)	735.000.000,00	810.000.000,00	471.045.000,00	58,15%	338.955.000,00
118	Biaya pemeriksaan Berkala Kesehatan Karyawan RSUD yang rentan terhadap penularan penyakit (BLUD)	50.000.000,00	150.000.000,00	119.025.160,00	79,35%	30.974.840,00
119	Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Mesin Lainnya (BLUD)	350.000.000,00	350.000.000,00	349.805.000,00	99,94%	195.000,00
120	Pemeliharaan Peralatan Kerja (BLUD)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00%	50.000.000,00
121	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (BLUD)	200.000.000,00	200.000.000,00	94.710.000,00	47,36%	105.290.000,00
122	Pemeliharaan IPAL (BLUD)	150.000.000,00	150.000.000,00	80.375.313,00	53,58%	69.624.687,00
123	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga (BLUD)	100.000.000,00	100.000.000,00	39.484.000,00	39,48%	60.516.000,00
124	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung RS (BLUD)	1.000.000.000,00	1.739.200.000,00	1.360.676.000,00	78,24%	378.524.000,00
125	Biaya Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit (BLUD)	150.000.000,00	-	-		-
126	Biaya pemeliharaan Mesin Pengering Loundry BLUD)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
127	Biaya Pemeliharaan Mesin GSS dan Washer Disinfector S46 (BLUD)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
128	Biaya Pemeliharaan Genset Rumah Sakit (BLUD)	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
129	Biaya Pemeliharaan / Pengadaan Kabel LAN dan Perangkat Pendukung Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	32.400.000,00	92,57%	2.600.000,00
130	Pemeliharaan Fisik Lainnya (BLUD)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00%	50.000.000,00
131	Biaya Pemeliharaan/perbaikan Alat Kedokteran/Penunjang RS(Uji Kesesuaian Alat X-ray dan CT Scan) serta Biaya SLO, Penyalur Petir, Genset) (BLUD)	100.000.000,00	100.000.000,00	81.841.437,00	81,84%	18.158.563,00
132	Biaya Pemeliharaan /perbaikan sparepart dan assesoris alat kedokteran /kesehatan RS (BLUD)	425.000.000,00	925.000.000,00	415.264.500,00	44,89%	509.735.500,00
						-



LAMPIRAN 3

Rekapitulasi Tunggakan Retribusi Kios/Los PSAD
Tahun 2023 & 2024

Rekapitulasi Tunggakan Retribusi Kios/Los
PSAD Tahun 2023 & 2024

Lampiran 3

No	Saldo		Jumlah
	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Pokok	Pokok	
	Rp 688.542.350	Rp 1.191.894.900	Rp 1.880.437.250

DATA PEDAGANG MENUNGGAK PER 31 Desember 2023

Lampiran 2

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2023		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
1	RISMAN	SAYUR	E.359	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
2	RISMAN	SAYUR	E.360	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
3	NURSIAH	SAYUR	E.361	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
4	SUARDI	SAYUR	E.362	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
5	RUSDI ARAS	SAYUR	E.364	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
6	FATMAWATI JUNAID	SAYUR	E.365	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
7	IDA ROYANI	SAYUR	G.524	37.650	80.000	Agustus 2018 - Desember 2023	2.447.250	48.945	2.496.195
8	SITI FARIDA	SAYUR	H.671	37.650	80.000	Oktober 2019 - Desember 2023	1.920.150	38.403	1.958.553
9	SITTI KARTINI	SAYUR	F.433	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
10	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.450	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
11	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.451	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
12	Hj. SINAR	SAYUR	F.456	37.650	80.000	Juli 2021 - Desember 2023	1.129.500	22.590	1.152.090
13	ATIKAH	SAYUR	F.457	37.650	80.000	Juli 2021 - Desember 2023	1.129.500	22.590	1.152.090
14	MARIATUN	SAYUR	F.460	37.650	80.000	Agustus 2021 - Desember 2023	1.091.850	21.837	1.113.687
15	SUARDI	SAYUR	F.461	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
16	M.AJIS MUJAHIRIN	SAYUR	F.464	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
17	RUSLI	SAYUR	F.465	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
18	WAKIJEM	SAYUR	F.472	37.650	80.000	Juni 2023 - Desember 2023	263.550	5.271	268.821
19	HJ.HASIRAH	SAYUR	F.473	37.650	80.000	Juni 2023 - Desember 2023	263.550	5.271	268.821
20	SUKINI	SAYUR	F.482	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
21	PONIYEM	SAYUR	F.483	37.650	80.000	Desember 2021 - Desember 2023	941.250	18.825	960.075
22	HJ. RUMINTEN	SAYUR	F.484	37.650	80.000	Desember 2021 - Desember 2023	941.250	18.825	960.075
23	INDO LUNGE	SAYUR	F.486	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
24	MUSNI	SAYUR	F.490	37.650	80.000	Februari 2022 - Desember 2023	865.950	17.319	883.269
25	ABDUL RASYID,A	SAYUR	F.491	37.650	80.000	Februari 2022 - Desember 2023	865.950	17.319	883.269
26	NURHAYATI	SAYUR	F.503	37.650	80.000	Desember 2019 - Desember 2023	1.844.850	36.897	1.881.747
27	M.YUSUF	SAYUR	F.504	37.650	80.000	Desember 2019 - Desember 2023	1.844.850	36.897	1.881.747
28	MARIANA	SAYUR	F.506	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
29	TUKINAH	SAYUR	F.509	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
30	ZAINAL	SAYUR	F.510	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
31	SIAMAH	SAYUR	G.517	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2023	978.900	19.578	998.478
32	Hj. KURNIA JINNE	SAYUR	G.518	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2023	978.900	19.578	998.478
33	SADARIAH	SAYUR	G.531	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
34	RUSLI	SAYUR	G.538	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
35	KACONG	SAYUR	G.542	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
36	SUTIATI	SAYUR	G.544	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
37	ZUBAIR	SAYUR	G.548	37.650	80.000	Desember 2020 - Desember 2023	1.393.050	27.861	1.420.911
38	H.HANAPING	SAYUR	G.551	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.393.050	27.861	1.420.911
39	Hj. SATRIANA	SAYUR	G.552	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
40	SUTINI	SAYUR	G.553	37.650	80.000	November 2022 - Desember 2023	527.100	10.542	537.642
41	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.554	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
42	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.555	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
43	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.556	37.650	80.000	Mei 2023 - Desember 2023	301.200	6.024	307.224
44	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.557	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2023	188.250	3.765	192.015
45	HJ. SUTIYEM	SAYUR	G.558	37.650	80.000	Agustus 2022 - Desember 2023	640.050	12.801	652.851
46	WAGIANTI	SAYUR	G.562	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
47	IRAWATI	SAYUR	G.563	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
48	SUMARLIN	SAYUR	G.564	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2023	978.900	19.578	998.478
49	ISMIATI	SAYUR	G.565	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2023	978.900	19.578	998.478
50	LUS ARFIANTI	SAYUR	G.569	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
51	YUSUF PANAMBA	SAYUR	G.584	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
52	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.594	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
53	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.595	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
54	PAIMAN	SAYUR	G.599	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
55	HARIS	SAYUR	H.600	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
56	MUHAYYAR	SAYUR	H.602	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
57	MUHAMMAD	SAYUR	H.603	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
58	MISTIKA.R	SAYUR	H.605	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
59	SYARIFUDDIN/ HARIYANI HAMID	SAYUR	H.606	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
60	SAHARUDDIN LINGKA	SAYUR	H.627	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
61	HARTATI PATI	SAYUR	H.628	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
62	ROHMAWATI	SAYUR	H.629	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
63	ASDAR AZIZ	SAYUR	H.636	37.650	80.000	Maret 2018 - Desember 2023	2.635.500	52.710	2.688.210
64	HASBIAH BAJI	SAYUR	H.638	37.650	80.000	Januari 2019 - Desember 2023	2.259.000	45.180	2.304.180
65	MUAL POHAN	SAYUR	H.645	37.650	80.000	November 2023 - Desember 2023	75.300	1.506	76.806
66	MANSYUR,S	SAYUR	H.648	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
67	HARTATI RANNU	SAYUR	H.649	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
68	SAINEM / SUHADA	SAYUR	H.651	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
69	DJABAR	SAYUR	H.657	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
70	MARTEN TAPPI	SAYUR	H.658	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
71	HABIBA DG. LINO	SAYUR	H.659	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
72	YASNI	SAYUR	H.660	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
73	YASNI	SAYUR	H.661	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
74	ACHMAD PAUZAN	SAYUR	H.681	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
75	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.682	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
76	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.683	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2023	903.600	18.072	921.672
76					**JUMLAH**		**Rp 84.385.050**	**Rp 1.687.701**	**Rp 86.072.751**
1	HAS DANIA	SANDAL/SEPATU	II. 03	60.150	120.300	Juli 2023 - Desember 2023	360.900	7.218	368.118
2	ROSMANI	ASSESORIS	II. 10	60.150	120.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.203.000	24.060	1.227.060
3	AYU DARIANI OTOLUWA	KAIN	II. 43	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2023	3.609.000	72.180	3.681.180
4	SUGIMI	SANDAL/SEPATU	II. 49	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
5	HJ. SITI ALANG	KAIN	II. 50	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2023	3.609.000	72.180	3.681.180
6	ABDUL CHALIK	ASSESORIS	II. 55	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
7	ASLAMIAH	MAINAN	II. 56	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
8	HERIYANTO	MAINAN	II. 61	60.150	120.300	Mei 2023 - Desember 2023	481.200	9.624	490.824
9	MULYADI	KAIN	II. 62	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2023	3.609.000	72.180	3.681.180
10	ENI KUSRINI (RONI R)	ASSESORIS	II. 68	60.150	120.300	Januari - Desember 2023	721.800	14.436	736.236
11	HERAWATI	SOVENIR	II. 69	60.150	120.300	Oktober 2022 - Desember 2023	902.250	18.045	920.295
11					**JUMLAH**		**Rp 20.992.350**	**Rp 419.847**	**Rp 21.412.197**
1	ABDUL MUIS	IKAN BASAH	A.15	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2023	148.350	2.967	151.317
2	HALIMUDDIN	IKAN BASAH	A.16	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2023	148.350	2.967	151.317
3	SOHOR	IKAN BASAH	A.18	49.450	100.900	Februari 2022 - Desember 2023	1.137.350	22.747	1.160.097
4	SARINAH	IKAN BASAH	A.22	49.450	100.900	Desember 2023 -Desember 2023	49.450	989	50.439
5	DAHLAN	IKAN BASAH	A.32	49.450	100.900	November 2023 - Desember 2023	98.900	1.978	100.878
6	NURHAYATI	IKAN BASAH	C.190	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634
7	ALDI SUNARYA	IKAN BASAH	C.191	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634
8	IKHSAN	IKAN BASAH	C.199	49.450	100.900	September 2023 - Desember 2023	197.800	3.956	201.756
9	MARDAN	IKAN BASAH	C.200	49.450	100.900	Januari 2023 - Desember 2023	593.400	11.868	605.268
10	ABU BAKAR SIDDIK	IKAN BASAH	C.215	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634
11	RAHMATIA	IKAN BASAH	C.220	49.450	100.900	Januari 2023 - Desember 2023	593.400	11.868	605.268
12	SANUDDIN Dg. NGAPO	IKAN BASAH	C.221	49.450	100.900	Oktober 2022 - Desember 2023	741.750	14.835	756.585
13	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	C.222	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2023		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
14	JONIANSYAH	IKAN BASAH	C.227	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2023	148.350	2.967	151.317
15	MUHAMMAD ADIL	IKAN BASAH	C.235	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2023	148.350	2.967	151.317
16	SURIANTI	IKAN BASAH	C.237	49.450	100.900	Februari 2021 - Desember 2023	1.730.750	34.615	1.765.365
17	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.242	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2023	890.100	17.802	907.902
18	HJ.SIANG	IKAN BASAH	C.253	49.450	100.900	Januari 2018 - Desember 2023	3.560.400	71.208	3.631.608
19	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.257	49.450	100.900	Januari 2022 - Desember 2023	1.186.800	23.736	1.210.536
20	HASIAH.M	IKAN BASAH	D.266	47.950	100.000	Desember 2016 - Desember 2023	4.075.750	81.515	4.157.265
21	ABDUL RAJAB	IKAN BASAH	D.272	47.950	100.000	November 2023 - Desember 2023	95.900	1.918	97.818
22	SARINTAN / SITI RAJIYAH	IKAN BASAH	D.276	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
23	BADAR	IKAN BASAH	D.278	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
24	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	D.279	47.950	100.000	Juni 2023 - Desember 2023	335.650	6.713	342.363
25	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.286	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
26	M. SYARIF	IKAN BASAH	D.288	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
27	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.289	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
28	ANDI JAMALUDDIN	IKAN BASAH	D.290	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
29	HAMZAH	IKAN BASAH	D.295	47.950	100.000	September 2020 - Desember 2023	1.918.000	38.360	1.956.360
30	ZULKIFLI	IKAN BASAH	D.297	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
31	SUMARNI	IKAN BASAH	D.298	47.950	100.000	September 2023 - Desember 2023	191.800	3.836	195.636
32	MUHAMMAD NUR	IKAN BASAH	D.301	47.950	100.000	Mei 2020 - Desember 2023	2.109.800	42.196	2.151.996
33	KAMARIA	IKAN BASAH	D.310	47.950	100.000	Juli 2020 - Desember 2023	2.013.900	40.278	2.054.178
34	USMAN	IKAN BASAH	D.312	47.950	100.000	Juni 2023 - Desember 2023	335.650	6.713	342.363
35	ISMAIL IDRUS	IKAN BASAH	D.319	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
36	DARNING	IKAN BASAH	D.320	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
37	BAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.333	47.950	100.000	Juli 2021 - Desember 2023	1.438.500	28.770	1.467.270
38	Hj. WAHIDAH	IKAN BASAH	D.334	47.950	100.000	Juli 2022 - Desember 2023	863.100	17.262	880.362
39	SAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.335	47.950	100.000	Desember 2023 - Desember 2023	47.950	959	48.909
40	M.ARIFIN	IKAN BASAH	E.363	47.950	100.000	Januari 2022 - Desember 2023	1.150.800	23.016	1.173.816
41	MUHAMMAD S	IKAN BASAH	C. 206	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2023	890.100	17.802	907.902
42	MUNIR	IKAN BASAH	C. 248	49.450	100.900	November 2020 - Desember 2023	1.879.100	37.582	1.916.682
42					**JUMLAH**		**Rp 35.084.900**	**Rp 701.698**	**Rp 35.786.598**
1	SARBIDIN	AYAM PTG	B.112	49.450	100.900	Januari 2022 - Desember 2023	1.186.800	23.736	1.210.536
2	ABDURRAHMAN	AYAM PTG	B.132	49.450	100.900	April 2023 - Desember 2023	445.050	8.901	453.951
3	SUMARYONO	AYAM PTG	B.146	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
4	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.147	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
5	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.148	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
6	HJ.CAMARE	AYAM PTG	B.153	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
7	SUMARYONO	AYAM PTG	B.154	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
8	JUMIATI	AYAM PTG	B.176	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2023	543.950	10.879	554.829
9	SYAFARUDDIN	AYAM PTG	B.178	49.450	100.900	April 2021 - Desember 2023	1.631.850	32.637	1.664.487
10	SYAPARUDDIN	AYAM PTG	B.179	49.450	100.900	Januari 2021 - Desember 2023	1.780.200	35.604	1.815.804
10					**JUMLAH**		**Rp 8.307.600**	**Rp 166.152**	**Rp 8.473.752**
1	TIMANG	PISANG	L711	37.650	80.000	Maret 2023 - Desember 2023	376.500	7.530	384.030
2	TIMANG	PISANG	L713	37.650	80.000	Maret 2023 - Desember 2023	376.500	7.530	384.030
3	NURSIAH	PISANG	L719	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2023	451.800	9.036	460.836
4	LAHA	PISANG	L725	37.650	80.000	Juni 2022 - Desember 2023	715.350	14.307	729.657
5	CHAIRIL JAFAR,SE	PISANG	L726	37.650	80.000	Juni 2022 - Desember 2023	715.350	14.307	729.657
6	ASTINA	PISANG	L738	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2023	225.900	4.518	230.418
7	SITTI	PISANG	L742	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2023	188.250	3.765	192.015
8	SITTI	PISANG	L745	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2023	188.250	3.765	192.015
8					**JUMLAH**		**Rp 3.237.900**	**Rp 64.758**	**Rp 3.302.658**
1	NURLIAH	LOS KAIN	86	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2023	135.000	2.700	137.700
2	RATNI YUNITA	LOS KAIN	1.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
3	HERMAN	MAINAN	2.A	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2023	270.000	5.400	275.400
4	RATNI YUNITA	ASESORIS	2.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
5	HERMAN	ASESORIS	3.A	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2023	270.000	5.400	275.400
6	RATNI YUNITA	ASESORIS	3.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
7	HAMKA	COUNTER HP	7.A	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2023	135.000	2.700	137.700
8	PENDI	ASESORIS	12.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
9	DIANA	ASESORIS	13.B	22.500	45.000	Januari 2021 - Desember 2023	810.000	16.200	826.200
10	WAHIDAH	MAINAN	16.B	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2023	270.000	5.400	275.400
11	SAMSUL ALAM	KASET	17.A	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
12	SALAMA	KASET	17.B	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
13	NUR ALAM	ASESORIS	25.C	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
14	YUSUF	ASESORIS	26.C	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
15	SHOLIHUL HARI	ASESORIS	29.B	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2023	135.000	2.700	137.700
16	SUMIATI	KAIN	33.A	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2023	135.000	2.700	137.700
17	LUTHFIA RAHMI	KAIN	52.B	22.500	45.000	Juli 2021 - Desember 2023	675.000	13.500	688.500
18	STANLEY IRAWAN	KAIN	88	22.500	45.000	Juli 2021 - Desember 2023	675.000	13.500	688.500
19	IRFAN	KAIN	56.A	22.500	45.000	Januari 2021 - Desember 2023	810.000	16.200	826.200
20	HERI MAHMUDI	KAIN	63.A	22.500	45.000	April 2023 - Desember 2023	202.500	4.050	206.550
21	LA SARDI	ASESORIS	81.A	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
22	SITI MAIDAH	KAIN	81.B	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
23	JAITUN	TAS	83.A	22.500	45.000	September 2023 - Desember 2023	90.000	1.800	91.800
24	IRWANTO	KAIN	84.B	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
25	MUTINGAH	KAIN	92.A	22.500	45.000	Februari 2020 - Desember 2023	1.057.500	21.150	1.078.650
26	HERI MAHMUDI	KAIN	93.A	22.500	45.000	April 2023 - Desember 2023	202.500	4.050	206.550
27	HERI MAHMUDI	KAIN	94.A	22.500	45.000	April 2023 - Desember 2023	202.500	4.050	206.550
28	H. MUH TROBUS	KAIN	95.A	22.500	45.000	Januari 2021 - Desember 2023	810.000	16.200	826.200
29	ISMAIL	KAIN	L.96	22.500	45.000	Oktober 2022 - Desember 2023	337.500	6.750	344.250
30	SAIDIL HAMID	KAIN	L.101	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2023	135.000	2.700	137.700
31	MUTINGAH	KAIN	L.102	22.500	45.000	Maret 2020- Desember 2023	1.035.000	20.700	1.055.700
32	ASWIN	KAIN	L.112	22.500	45.000	Februari 2020 - Desember 2023	1.057.500	21.150	1.078.650
33	PUTRI ALAEYDIA ZAHRA	KAIN	L.113	22.500	45.000	Februari 2020 - Desember 2023	1.057.500	21.150	1.078.650
34	HASNI	KAIN	L.114	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2023	540.000	10.800	550.800
35	BUNIATI	KAIN	L.99	22.500	45.000	Mei - Desember 2023	67.500	1.350	68.850
36	BUNIATI / SAHIBDUDDIN	KAIN	L.100	22.500	45.000	Mei - Desember 2023	67.500	1.350	68.850
37	NURSIAH	KASET	L.120	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
38	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.121	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2023	45.000	900	45.900
39	MANSYUR	KAIN	L.122	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
40	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	L.123	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
41	HASANUDDIN	KAIN	L.124	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
42	SAIPULA	KAIN	L.126	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2023	45.000	900	45.900
43	AGUS ARDIANSYAH	KAIN	L.127	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2023	45.000	900	45.900
44	SYAMSUL BAHRI	KASET	L.128	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2023	450.000	9.000	459.000
45	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.129	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2023	45.000	900	45.900
46	SUPARDI S	KAIN	L.132	22.500	45.000	Januari 2019 - Desember 2023	1.350.000	27.000	1.377.000
46					**JUMLAH**		**Rp 20.452.500**	**Rp 409.050**	**Rp 20.861.550**
1	MUHAMMAD SARDI	DAGING	A.25	49.450	100.900	September 2023 - Desember 2023	197.800	3.956	201.756
2	SUGITAN	DAGING	A.43	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634
3	SUGITAN	DAGING	A.44	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2023	296.700	5.934	302.634
4	SUGIANI	DAGING	A.45	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2023	890.100	17.802	907.902
4					**JUMLAH**		**Rp 1.681.300**	**Rp 33.626**	**Rp 1.714.926**
1	APRIADI	KELAPA	A.05	105.150	210.300	Desember 2023 - Desember 2023	105.150	2.103	107.253
2	SHINTA	KELAPA	B.13	75.150	150.300	Maret 2022- Desember 2023	1.653.300	33.066	1.686.366

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2023		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
3	FAISAL	KELAPA	B.14	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.523.600	50.472	2.574.072
4	YUSUF	KELAPA	B.16	105.150	210.300	September 2020 - Desember 2023	4.206.000	84.120	4.290.120
5	HERSAN	KELAPA	D.31	105.150	210.300	Februari 2021 - Desember 2023	3.680.250	73.605	3.753.855
6	HERSAN	KELAPA	D.32	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
7	SRI WAHYUNI	KELAPA	D.33	105.150	210.300	Februari 2023 - Desember 2023	1.156.650	23.133	1.179.783
8	HJ.HASNAH	KELAPA	D.35	105.150	210.300	Mei 2018 - Desember 2023	7.150.200	143.004	7.293.204
9	NUR HAENI	KELAPA	G.58	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
10	MARDIANA	KELAPA	G.59	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
10			**JUMLAH**				**Rp 24.742.950**	**Rp 494.859**	**Rp 25.237.809**
1	HJ. SALMIAH	WARUNG MAKAN	4	64.600	129.200	Juli 2020 - Desember 2023	2.713.200	54.264	2.767.464
2	LUSIATUN	WARUNG MAKAN	11	64.600	129.200	Maret 2022- Desember 2023	1.421.200	28.424	1.449.624
3	SITI HALIJAH	WARUNG MAKAN	13	64.600	129.200	Februari 2020 - Desember 2023	3.036.200	60.724	3.096.924
4	TIMANG	WARUNG MAKAN	14	64.600	129.200	Maret 2023 - Desember 2023	646.000	12.920	658.920
4			**JUMLAH**				**Rp 7.816.600**	**Rp 156.332**	**Rp 7.972.932**
1	HJ.MARHUMAH	IKAN ASIN	A.07	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
2	YUSUF	IKAN ASIN	E.42	75.150	150.300	Juli 2021 - Desember 2023	2.254.500	45.090	2.299.590
3	SAHARTINA	IKAN ASIN	F.46	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
4	M. RUSLI / NURHAENI	IKAN ASIN	G.64	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
5	SATRAWATI	IKAN ASIN	G.66	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
6	HASMAWATI	IKAN ASIN	H.70	105.150	210.300	Mei 2022 - Desember 2023	2.103.000	42.060	2.145.060
7	HJ. ANDI YULI	IKAN ASIN	H.72	75.150	150.300	Februari 2022 - Desember 2023	1.728.450	34.569	1.763.019
8	NUR HAINI	IKAN ASIN	H.73	105.150	210.300	November 2020 - Desember 2023	3.995.700	79.914	4.075.614
9	HJ.TAMARIN	IKAN ASIN	H.74	105.150	210.300	Maret 2022 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
10	TENNI	IKAN ASIN	I.94	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
11	SERLIANA	IKAN ASIN	I.95	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
12	HASNI	IKAN ASIN	J.105	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
13	HASNI	IKAN ASIN	J.108	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
14	NOR DIANA	IKAN ASIN	K.137	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2023	150.300	3.006	153.306
15	H. USMAN G	IKAN ASIN	K.139	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2023	150.300	3.006	153.306
16	H. SYAMSUDDIN/NUR LAILA	IKAN ASIN	D.36	105.150	210.300	Mei 2019 - Desember 2023	5.888.400	117.768	6.006.168
16					**JUMLAH**		**Rp 23.243.850**	**Rp 464.877**	**Rp 23.708.727**
1	SURIANA	KUE	J.810	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
2	NURYANAH K	KUE	J.811	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
3	LINDAWATI	KUE	J.812	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
4	GATOT SUBROTO,S.Ag	KUE	J.813	37.650	80.000	Januari 2018 - Desember 2023	2.710.800	54.216	2.765.016
5	IRA WATI	KUE	J.816	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
6	MARIANA	KUE	J.817	37.650	80.000	Desember 2018 - Desember 2023	2.296.650	45.933	2.342.583
7	MARIANA BERAU	KUE	J.818	37.650	80.000	Oktober 2023 - Desember 2023	112.950	2.259	115.209
8	YULI RIHWANA	KUE	J.819	37.650	80.000	Desember 2018 - Desember 2023	2.296.650	45.933	2.342.583
9	NUR'AIN	KUE	J.820	37.650	80.000	Mei 2019 - Desember 2023	2.108.400	42.168	2.150.568
10	SITI FATIMAH/ZAINAL ABIDIN	KUE	J.822	37.650	80.000	Mei 2019 - Desember 2023	2.108.400	42.168	2.150.568
11	SURATMI	KUE	J.823	37.650	80.000	Februari 2018 - Desember 2023	2.673.150	53.463	2.726.613
12	SURATMI	KUE	J.824	37.650	80.000	April 2020 - Desember 2023	1.694.250	33.885	1.728.135
13	LINDAWATI	KUE	J.839	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
13					**JUMLAH**		**Rp 22.778.250**	**Rp 455.565**	**Rp 23.233.815**
1	Hj. MARHANAH	EMAS	II. 52	60.150	120.300	Oktober 2023 - Desember 2023	180.450	3.609	184.059
2	HJ.NOR HAYATI	EMAS	II.86	60.150	120.300	Juli 2023 - Desember 2023	360.900	7.218	368.118
3	NASRUDDIN	EMAS	II. 92	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
4	SITI	EMAS	II. 95	60.150	120.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.082.700	21.654	1.104.354
5	CONGGENG DARMAWAN / SULYADI	EMAS	II. 98	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
6	HASAN / THAMRIN	EMAS	II. 101	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
7	SYAIFUL	EMAS	II. 102	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
8	ALAMSYAH	EMAS	II.106	82.150	164.300	November 2023 - Desember 2023	164.300	3.286	167.586
9	SYAMSIAR / SUWARNI	EMAS	II. 111	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
10	ACHMAD, MD	EMAS	II. 119	60.150	120.300	Januari 2023 - Desember 2023	721.800	14.436	736.236
11	ZAINUDDIN DAENG SIRUA	EMAS	II. 122	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.165.400	43.308	2.208.708
12	HJ.RAHMAYATI	EMAS	II.124	82.650	165.300	November 2022 - Desember 2023	1.157.100	23.142	1.180.242
13	NAIMAH	EMAS	II.125	60.150	120.300	April 2023 - Desember 2023	541.350	10.827	552.177
14	MUNAWIR	EMAS	II.126	60.150	120.300	Desember 2023 - Desember 2023	60.150	1.203	61.353
15	H.MASDAR	EMAS	II.127	60.150	120.300	Desember 2023 - Desember 2023	120.300	2.406	122.706
16	ASDAR AKHMAD	EMAS	II. 130	60.150	120.300	Januari - Desember 2023	721.800	14.436	736.236
17	ROSMIATI HS	EMAS	II. 133	82.650	165.300	Januari 2023 - Desember 2023	991.800	19.836	1.011.636
18	MARWATI	EMAS	II. 135	82.650	165.300	Agustus 2022 - Desember 2023	1.405.050	28.101	1.433.151
19	KARYAWAN YOGYANTORO	EMAS	II. 136	60.150	120.300	Juli 2021 - Desember 2023	1.804.500	36.090	1.840.590
20	H. ABDUL KHOLIL BIN M	EMAS	II. 140	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
21	HERAWATI	EMAS	II. 141	60.150	120.300	Oktober 2022 - Desember 2023	902.250	18.045	920.295
22	SUPIANI	EMAS	II.142	82.650	165.300	Oktober 2022 - Desember 2023	1.239.750	24.795	1.264.545
22					**JUMLAH**		**Rp 23.724.800**	**Rp 474.496**	**Rp 24.199.296**
1	RATIH WINDAYANIE (CAFE ALIKHA)	FOOD COURT	1	99.600	199.200	Januari 2022 - Desember 2023	2.390.400	47.808	2.438.208
2	YUTIE LARASHATIE (ES BUAH)	FOOD COURT	2	99.600	199.200	April 2019 - Desember 2023	5.677.200	113.544	5.790.744
3	INTAN SURYANI (MALAGA)	FOOD COURT	15	99.600	199.200	Februari 2022 - Desember 2023	2.290.800	45.816	2.336.616
4	Hj. JAMILAH (CAFE NIKMAT'AULIA)	FOOD COURT	16	99.600	199.200	Februari 2022 - Desember 2023	2.290.800	45.816	2.336.616
5	SUCIYATI/CAFE MDS	FOOD COURT	20	113.600	227.200	Oktober 2019 - Desember 2023	5.793.600	115.872	5.909.472
6	MARIANI (RM.MANDA)	FOOD COURT	21	113.600	227.200	Januari 2018 - Desember 2023	8.179.200	163.584	8.342.784
7	CAFE TEPIAN KELAY / ERNAWATI H.HS	FOOD COURT	24	113.600	227.200	Oktober 2019 - Desember 2023	5.793.600	115.872	5.909.472
8	SURTI (RM.DWI RAHAYU)	FOOD COURT	25	113.600	227.200	Juli 2018 - Desember 2023	7.497.600	149.952	7.647.552
9	ERWIMIN	FOOD COURT	29	113.600	227.200	Oktober 2023 - Desember 2023	340.800	6.816	347.616
10	SULKARNAIN (CAFE MAKASAR)	FOOD COURT	35	113.600	227.200	Mei 2019 - Desember 2023	6.361.600	127.232	6.488.832
11	SOFYAN	FOOD COURT	36	113.600	227.200	Mei 2023 - Desember 2023	908.800	18.176	926.976
12	ETI KUMALA DEWI (RORA CAFÉ)	FOOD COURT	37	113.600	227.200	Januari 2018 - Desember 2023	8.179.200	163.584	8.342.784
13	CAFE INDAH	FOOD COURT	40	113.600	227.200	Juli 2022 - Desember 2023	2.044.800	40.896	2.085.696
13					**JUMLAH**		**Rp 57.748.400**	**Rp 1.154.968**	**Rp 58.903.368**
1	BADRI KANDAR	KELONTONGAN	E.40	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.523.600	50.472	2.574.072
2	NUR FARIKAH	KELONTONGAN	H.76	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
3	SYARIFUDDIN	KELONTONGAN	L.159	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.705.400	54.108	2.759.508
4	SUMARNO BADERUN	KELONTONGAN	M.168	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
5	ROFIKUDDIN	KELONTONGAN	M.169	105.150	210.300	Oktober 2023 - Desember 2023	315.450	6.309	321.759
6	NUR ROZAK	KELONTONGAN	M.170	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
7	SRI WAHYUNI	KELONTONGAN	M.171	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
8	SUPANDI	KELONTONGAN	M.172	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
9	ZULKARNAIN	KELONTONGAN	M.176	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2023	1.578.150	31.563	1.609.713
10	SYAMSUDDIN	KELONTONGAN	N.180	105.150	210.300	Januari - Desember 2023	630.900	12.618	643.518
11	AHMADI	KELONTONGAN	N.181	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
12	AHMAD RIFAI	KELONTONGAN	N.182	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
13	ABU SAIRI BIN MAT KUDI	KELONTONGAN	N.185	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2023	1.578.150	31.563	1.609.713
14	SUPARNO	KELONTONGAN	N.190	75.150	150.300	Agustus 2021 - Desember 2023	2.179.350	43.587	2.222.937
15	ALDI SUNARYA	KELONTONGAN	Q.226	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2023	2.104.200	42.084	2.146.284
16	DARUS SALAM	KELONTONGAN	S.238	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
16					**JUMLAH**		**Rp 18.258.750**	**Rp 365.175**	**Rp 18.623.925**
1	SAHARIA	LOS KELONTONGAN	L690	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
2		LOS KELONTONGAN	L691	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
3	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	L767	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
4	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	L768	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
5	ROSMIATI	LOS KELONTONGAN	L687	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2023		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
6	[illegible]	LOS KELONTONGAN	L.688	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
7	NURLINA	LOS KELONTONGAN	J.856	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.355.400	27.108	1.382.508
7			**JUMLAH**				**Rp 9.487.800**	**Rp 189.756**	**Rp 9.677.556**
1	AGUSTINA DG.RATU	BUAH	E.378	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2023	2.301.600	46.032	2.347.632
2	HASNAH	BUAH	E.386	47.950	100.000	Oktober 2023 - Desember 2023	143.850	2.877	146.727
3	ABDUL RAUF	BUAH	E.388	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
4	ABDUL RAUF	BUAH	E.389	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2023	575.400	11.508	586.908
5	ABD. MUIS	BUAH	E.397	47.950	100.000	Januari 2019 - Desember 2023	2.877.000	57.540	2.934.540
6	ISTIKHNA	BUAH	E.411	47.950	100.000	Desember 2022 - Desember 2023	623.350	12.467	635.817
7	ISTIKHNA	BUAH	E.412	47.950	100.000	November 2021 - Desember 2023	1.198.750	23.975	1.222.725
8	DAENG NGAI	BUAH	E.426	47.950	100.000	Januari 2021 - Desember 2023	1.726.200	34.524	1.760.724
9	DAENG NGAI	BUAH	E.427	47.950	100.000	Desember 2020 - Desember 2023	1.774.150	35.483	1.809.633
9			**JUMLAH**				**Rp 11.795.700**	**Rp 235.914**	**Rp 12.031.614**
1	H. M. AS EDY ASIS	SEMBAKO	A.01	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.523.600	50.472	2.574.072
2	JULIAH. P	SEMBAKO	J.116	75.150	150.300	Agustus 2022- Desember 2023	1.277.550	25.551	1.303.101
3	MAWAR	SEMBAKO	K.130	105.150	210.300	Agustus 2021 - Desember 2023	3.049.350	60.987	3.110.337
4	SANIASA	SEMBAKO	L.146	75.150	150.300	Februari 2022 - Desember 2023	1.728.450	34.569	1.763.019
5	SURIANTO	SEMBAKO	L.149	75.150	150.300	Janusri 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
6	TOUPIK ROKI	SEMBAKO	N.189	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
7	HASRIA	SEMBAKO	N.195	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
8	SYAMSIAH	SEMBAKO	N.196	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
9	RIKA AYUNINGTYAS	SEMBAKO	N.197	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
10	HJ. RAHMAH	SEMBAKO	N.201	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
11	KASNIARTI ROSADI UTAMI	SEMBAKO	O.202	105.150	210.300	Juli 2023 - Desember 2023	630.900	12.618	643.518
12	LALA	SEMBAKO	O.210	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
13	ANWAR G	SEMBAKO	O.211	75.150	150.300	Juli 2023 - Desember 2023	450.900	9.018	459.918
14	SUHARTINA	SEMBAKO	P.212	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
15	HJ. HAJRAH	SEMBAKO	P.213	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
16	H.ARIFIN DG. NAPING	SEMBAKO	P.216	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
17	HJ. SRI WAHYUNI	SEMBAKO	Q.225	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
18	NURHAYATI	SEMBAKO	R.231	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2023	2.104.200	42.084	2.146.284
19	KADDAS	SEMBAKO	S.241	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
20	SAMSUDDIN	SEMBAKO	S.242	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
21	H.M. SETTA	SEMBAKO	T.245	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
22	EKA SAVITRI	SEMBAKO	T.248	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2023	1.578.150	31.563	1.609.713
23	H.M. SAING	SEMBAKO	U.259	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2023	1.578.150	31.563	1.609.713
24	EVA RAMDHANIATI	SEMBAKO	U.260	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.705.400	54.108	2.759.508
25	AMBO ASSE	SEMBAKO	U.261	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2023	2.104.200	42.084	2.146.284
26	M. SYAIFUL	SEMBAKO	U.262	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2023	2.104.200	42.084	2.146.284
27	EDY EDWIN HARIJANTO	SEMBAKO	V.264	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.705.400	54.108	2.759.508
28	ROSLI ROSMAWATI	SEMBAKO	V.265	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2023	2.104.200	42.084	2.146.284
29	ABDUL KADIR	SEMBAKO	V.267	75.150	150.300	Juni 2023 - Desember 2023	526.050	10.521	536.571
30	MUHAMMAD RIFAL	SEMBAKO	V.273	105.150	210.300	Maret 2023 - Desember 2023	1.051.500	21.030	1.072.530
31	HASNI	SEMBAKO	W.275	75.150	150.300	Juni 2019 - Desember 2023	4.133.250	82.665	4.215.915
32	ARLINA	SEMBAKO	W.276	75.150	150.300	Januari 2020 - Desember 2023	3.607.200	72.144	3.679.344
33	RABI	SEMBAKO	W.277	75.150	150.300	Mei 2021 - Desember 2023	2.404.800	48.096	2.452.896
34	TARLIAH	SEMBAKO	W.278	75.150	150.300	Juni 2020 - Desember 2023	3.231.450	64.629	3.296.079
35	M. MUID	SEMBAKO	W.281	75.150	150.300	Juli 2021 - Desember 2023	2.254.500	45.090	2.299.590
36	H.MUH.AS EDY	SEMBAKO	W.286	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
37	ENY SUPRATIWI	SEMBAKO	W.288	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
38	HASMA	SEMBAKO	W.291	75.150	150.300	Desember 2021 - Desember 2023	1.878.750	37.575	1.916.325
39	SUMARDI	SEMBAKO	W.292	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
40	HJ. SRI WAHYUNI	SEMBAKO	X.296	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
41	M. TAUFIQ	SEMBAKO	X.297	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.352.700	27.054	1.379.754
42	H. H. AS EDY ASIS	SEMBAKO	X.298	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
43	ENY SUPRATIWI	SEMBAKO	X.299	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
44	SRI WAHYUNI	SEMBAKO	X.302	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
45	WIWIN ROSLAN	SEMBAKO	X.305	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
46	SUMARDI	SEMBAKO	X.307	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
47	SARIFAH INTAN	SEMBAKO	X.310	105.150	210.300	Oktober 2023 - Desember 2023	315.450	6.309	321.759
48	TAUPIK ROKI	SEMBAKO	Y.325	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
49	NURHANA	SEMBAKO	Y.329	75.150	150.300	September 2022 - Desember 2023	1.202.400	24.048	1.226.448
50	HASMA	SEMBAKO	Y.330	75.150	150.300	September 2022 - Desember 2023	1.202.400	24.048	1.226.448
51	AGUSTINA, PL	SEMBAKO	Z.340	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.705.400	54.108	2.759.508
52	HILDA	SEMBAKO	Z.346	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
53	HJ. ROSANA	SEMBAKO	Z.347	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
54	ABDUL GANI	SEMBAKO	Z.352	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2023	901.800	18.036	919.836
55	H.RAHMAH	SEMBAKO	AA.359	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
56	HAJRAH	SEMBAKO	AA.361	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
57	HARYATI	SEMBAKO	AA.365	75.150	150.300	Juli 2021 - Desember 2023	2.254.500	45.090	2.299.590
58	ALI FAUZI	SEMBAKO	AA.368	75.150	150.300	Juli 2023 - Desember 2023	450.900	9.018	459.918
59	KHAMDAN	SEMBAKO	AB.380	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2023	225.450	4.509	229.959
60	AMRIZAL	SEMBAKO	AB.383	75.150	150.300	September 2019 - Desember 2023	3.907.800	78.156	3.985.956
61	NURSANTI	SEMBAKO	AC.403	75.150	150.300	Maret 2023 - Desember 2023	751.500	15.030	766.530
62	H. HENDRA CIPTA	SEMBAKO	AC.405	105.150	210.300	Agustus 2022 - Desember 2023	1.787.550	35.751	1.823.301
63	IRAWATI	SEMBAKO	AD.411	75.150	150.300	November 2021 - Desember 2023	1.953.900	39.078	1.992.978
64	ABDUL LATIF	SEMBAKO	AD.415	75.150	150.300	November 2022 - Desember 2023	1.052.100	21.042	1.073.142
65	SUHIRMAN	SEMBAKO	AD.417	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.503.000	30.060	1.533.060
66	AMBO ASSE	SEMBAKO	AE.419	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2023	150.300	3.006	153.306
67	MUHTAR	SEMBAKO	AE.422	75.150	150.300	Januari 2020 - Desember 2023	3.607.200	72.144	3.679.344
68	HASANUDDIN	SEMBAKO	AE.423	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
69	UMI SURYATI	SEMBAKO	AE.427	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.803.600	36.072	1.839.672
70	DARMANI	SEMBAKO	AH.446	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.523.600	50.472	2.574.072
71	ABDUL SAMAD	SEMBAKO	AJ.468	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
72	KAMARUDDIN	SEMBAKO	AJ.473	105.150	210.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.892.700	37.854	1.930.554
73	LINA	SEMBAKO	AJ.474	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.261.800	25.236	1.287.036
73			**JUMLAH**				**Rp 117.825.900**	**Rp 2.356.518**	**Rp 120.182.418**
1	SYAMSUL BAHRI	KAIN	I. 152	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2023	2.373.000	47.460	2.420.460
2	HJ.RAMLAWATI	KAIN	I. 164	118.650	237.300	Maret 2020 - Desember 2023	5.457.900	109.158	5.567.058
3	HJ. RABIAH	KAIN	I. 166	118.650	237.300	Agustus 2023 - Desember 2023	593.250	11.865	605.115
4	RUSNAINI	KAIN	I. 167	118.650	237.300	Juli 2023 - Desember 2023	711.900	14.238	726.138
5	SUARDI	KAIN	I.170	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.423.800	28.476	1.452.276
6	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 175	118.650	237.300	April 2023 - Desember 2023	1.067.850	21.357	1.089.207
7	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 178	118.650	237.300	April 2023 - Desember 2023	1.067.850	21.357	1.089.207
8	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 179	118.650	237.300	Desember 2022 - Desember 2023	1.542.450	30.849	1.573.299
9	H. MAS'UD / HAMKA	KAIN	I. 182	118.650	237.300	Desember 2020 - Desember 2023	4.390.050	87.801	4.477.851
10	H. SULEMAN	KAIN	I. 183	118.650	237.300	Desember 2020 - Desember 2023	4.390.050	87.801	4.477.851
11	WAHID ISMAIL	KAIN	I. 190	118.650	237.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.847.600	56.952	2.904.552
12	H. SUDIRMAN	KAIN	I.192	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
13	PATMAWATI	KAIN	I. 193	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2023	2.373.000	47.460	2.420.460
14	SUARDI	KAIN	I.194	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.009.800	20.196	1.029.996
15	ILLANG	KAIN	I. 195	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
16	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	I. 196	84.150	168.300	Maret 2023 - Desember 2023	841.500	16.830	858.330
17	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	I. 197	84.150	168.300	Maret 2023 - Desember 2023	841.500	16.830	858.330
18	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 198	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2023		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
19	MUHAMMAD SAING	KAIN	I. 199	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
20	HJ. YANTI DARMILA SARI	KAIN	I.200	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
21	MARIAMA HS	KAIN	I. 201	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
22	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 203	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2023	4.271.400	85.428	4.356.828
23	H. ALIMING PADDA	KAIN	I. 205	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2023	4.271.400	85.428	4.356.828
24	DAENG NISIAN	KAIN	I. 207	84.150	168.300	Agustus 2022 - Desember 2023	1.430.550	28.611	1.459.161
25	SISWANDI	KAIN	I. 218	118.650	237.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.847.600	56.952	2.904.552
26	ASRIL	KAIN	I. 224	118.650	237.300	Agustus 2023 - Desember 2023	593.250	11.865	605.115
27	ARDIANSYAH	KAIN	I. 226	118.650	237.300	Agustus 2022 - Desember 2023	2.017.050	40.341	2.057.391
28	HJ. SITI SAWIAH	KAIN	I. 228	118.650	237.300	April 2021 - Desember 2023	3.915.450	78.309	3.993.759
29	H. TANGGILING	KAIN	I.233	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
30	SAIPUL ALAM	KAIN	I.234	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
31	NURSIAH	KAIN	I.235	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
32	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	I.236	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
33	NAHARENG	KAIN	I.237	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
34	HARIS.P	KAIN	I.238	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2023	2.373.000	47.460	2.420.460
35	HJ. JUMIATI	KAIN	I. 241	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
36	RAMLAH	KAIN	I. 242	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
37	HJ. MUSTIKA	KAIN	I. 243	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
38	SALAMAT	KAIN	I. 244	84.150	168.300	Januari 2020 - Desember 2023	4.039.200	80.784	4.119.984
39	SITI ZAKIAH A.Md	KAIN	I. 245	84.150	168.300	Februari 2023 - Desember 2023	925.650	18.513	944.163
40	ARLIN	KAIN	I. 247	84.150	168.300	Juli 2023 - Desember 2023	504.900	10.098	514.998
41	MURDIANSYAH	KAIN	I. 248	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
42	ULIYANTI	KAIN	I. 253	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.009.800	20.196	1.029.996
43	HJ. HATIJAH	KAIN	I. 255	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.009.800	20.196	1.029.996
44	BAMBANG	KAIN	I.256	84.150	168.300	Februari 2020 - Desember 2023	3.955.050	79.101	4.034.151
45	HASANUDDIN, SE	KAIN	I. 257	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2023	1.683.000	33.660	1.716.660
46	H. ABDUL KADIR	KAIN	I. 259	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
47	MUH. SALIM	KAIN	I. 260	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
48	SUCITRA	KAIN	I. 261	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
49	SUCITRA	KAIN	I. 262	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2023	3.029.400	60.588	3.089.988
50	ABDUL AZIS	KAIN	I. 268	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.423.800	28.476	1.452.276
51	MASRUR, S.Ag	KAIN	I. 270	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.423.800	28.476	1.452.276
52	Hj. DAHLIA	KAIN	I. 273	118.650	237.300	September 2021 - Desember 2023	3.322.200	66.444	3.388.644
53	KAMARUDDIN	KAIN	I. 282	111.750	223.500	Juli 2023 - Desember 2023	670.500	13.410	683.910
54	HJ.JULIANA	KAIN	I.284	111.750	223.500	April 2022 - Desember 2023	2.346.750	46.935	2.393.685
55	MUHAMMAD ATANG	KAIN	I.285	118.650	237.300	Mei 2023 - Desember 2023	949.200	18.984	968.184
56	MASITA	KAIN	I. 287	111.750	223.500	Februari 2020 - Desember 2023	5.252.250	105.045	5.357.295
57	HJ. HASNAH	KAIN	I. 288	111.750	223.500	April 2023 - Desember 2023	894.000	17.880	911.880
58	MUH.RUSLAN	KAIN	I. 289	111.750	223.500	April 2023 - Desember 2023	894.000	17.880	911.880
59	ISMAIL	KAIN	I. 290	152.000	304.000	Juli 2023 - Desember 2023	912.000	18.240	930.240
60	NURLIN. K	KAIN	I. 297	118.650	237.300	Oktober 2022 - Desember 2023	1.779.750	35.595	1.815.345
61	H.MUCHRING	KAIN	I. 300	118.650	237.300	Oktober 2021 - Desember 2023	3.203.550	64.071	3.267.621
62	HJ.NURHAIDA	KAIN	I. 301	118.650	237.300	April 2021 - Desember 2023	3.915.450	78.309	3.993.759
63	AHMAD AKBAR	KAIN	I.311	84.150	168.300	Juli 2021 - Desember 2023	2.524.500	50.490	2.574.990
64	AHMAD AKBAR	KAIN	I.312	84.150	168.300	Juli 2021 - Desember 2023	2.524.500	50.490	2.574.990
65	NURLIN. K	KAIN	I. 321	84.150	168.300	Juli 2022 - Desember 2023	1.514.700	30.294	1.544.994
66	HAIDIR ADHA	KAIN	I. 327	111.750	223.500	Februari 2023 - Desember 2023	1.229.250	24.585	1.253.835
67	H. M. RAFIQ	KAIN	I. 328	111.750	223.500	Juni 2022 - Desember 2023	2.123.250	42.465	2.165.715
68	HJ. PATMAWAT, SE,MM	KAIN	I. 334	111.750	223.500	Januari 2021 - Desember 2023	4.023.000	80.460	4.103.460
69	DARMAWATI	KAIN	I. 336	84.150	168.300	Agustus 2021 - Desember 2023	2.440.350	48.807	2.489.157
70	ANITA S	KAIN	I. 338	84.150	168.300	September 2021 - Desember 2023	2.356.200	47.124	2.403.324
71	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 344	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2023	4.271.400	85.428	4.356.828
72	H. NAWIR MD. NATIRO	KAIN	I. 346	84.150	168.300	Juni 2021 - Desember 2023	2.608.650	52.173	2.660.823
73	H. ABDULLAH	KAIN	I. 349	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.019.600	40.392	2.059.992
74	SAIDIL HAMID	KAIN	I. 356	84.150	168.300	Juli 2023 - Desember 2023	504.900	10.098	514.998
75	SAIDIL HAMID	KAIN	I. 357	84.150	168.300	Juli 2023 - Desember 2023	504.900	10.098	514.998
76	ANSIAR	KAIN	I. 358	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.019.600	40.392	2.059.992
77	MAHARIDIR WAHID	KAIN	I. 359	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.009.800	20.196	1.029.996
78	BADARIA	KAIN	I. 360	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2023	2.019.600	40.392	2.059.992
79	MARWATI	KAIN	I. 372	84.150	168.300	Oktober 2022 - Desember 2023	1.262.250	25.245	1.287.495
80	ANITA S	KAIN	I. 378	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2023	1.009.800	20.196	1.029.996
81	NUHRIAH	KAIN	II. 09	129.900	259.800	Mei 2022 - Desember 2023	2.598.000	51.960	2.649.960
82	ALBAR	KAIN	II. 11	60.150	120.300	Agustus 2022- Desember 2023	1.022.550	20.451	1.043.001
83	SUKRI	KAIN	II. 12	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2023	3.609.000	72.180	3.681.180
84	M. AIDIL	KAIN	II. 15	82.650	165.300	Januari 2023 - Desember 2023	991.800	19.836	1.011.636
85	AMIR	KAIN	II. 16	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
86	TRI RIVI ARIANTI	KAIN	II. 19	129.900	259.800	Januari 2023 - Desember 2023	1.558.800	31.176	1.589.976
87	NURBAYA	KAIN	II. 20	82.650	165.300	Agustus 2023 - Desember 2023	413.250	8.265	421.515
88	MASIPAH	KAIN	II. 21	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
89	MAULANA	KAIN	II. 22	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
90	ADI SUNARYA	KAIN	II. 25	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2023	1.443.600	28.872	1.472.472
91	M. EKO WAHYUDI	KAIN	II. 34	82.650	165.300	Januari 2021 - Desember 2023	2.975.400	59.508	3.034.908
92	EFO HARTONO	KAIN	II.35	82.650	165.300	September 2020 - Desember 2023	3.306.000	66.120	3.372.120
93	EFO HARTONO	KAIN	II. 36	60.150	120.300	Maret 2022 - Desember 2023	1.323.300	26.466	1.349.766
94	MARHANA	KAIN	II.143	82.650	165.300	Juni 2023 - Desember 2023	578.550	11.571	590.121
205			**JUMLAH**				**Rp 196.977.750**	**Rp 3.939.555**	**Rp 200.917.305**
585			**TOTAL**				**Rp 688.542.350**	**Rp 13.770.847**	**Rp 702.313.197**

Mengetahui :
Kepala UPT. Pasar Sanggam Adji Dilayas

SYAIDINOOR,SE
NIP. 19800301 200701 1 006

DATA PEDAGANG MENUNGGAK PER 31 Desember 2024

Lampiran 2

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
1	RISMAN	SAYUR	E.359	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
2	RISMAN	SAYUR	E.360	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
3	NURSIAH	SAYUR	E.361	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
4	SUARDI	SAYUR	E.362	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
5	RUSDI ARAS	SAYUR	E.364	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
6	FATMAWATI JUNAID	SAYUR	E.365	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
7	IDA ROYANI	SAYUR	G.524	37.650	80.000	Agustus 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
8	SITI FARIDA	SAYUR	H.671	37.650	80.000	Oktober 2019 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
9	SITTI KARTINI	SAYUR	F.433	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
10	JUMINEM	SAYUR	F.437	37.650	80.000	September - Desember 2024	320.000	6.400	326.400
11	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.450	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
12	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.451	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
13	HJ.SITTI LAWIYAH	SAYUR	F.454	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
14	HJ.AMSUNA	SAYUR	F.455	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
15	Hj. SINAR	SAYUR	F.456	37.650	80.000	Juli 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
16	ATIKAH	SAYUR	F.457	37.650	80.000	Juli 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
17	MARIATUN	SAYUR	F.460	37.650	80.000	Agustus 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
18	SUARDI	SAYUR	F.461	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
19	M.AJIS MUJAHIRIN	SAYUR	F.464	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
20	RUSLI	SAYUR	F.465	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
21	MUSIRAH	SAYUR	F.466	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
22	RUSLI	SAYUR	F.467	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
23	WAKIJEM	SAYUR	F.472	37.650	80.000	Juni 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
24	HJ.HASIRAH	SAYUR	F.473	37.650	80.000	Juni 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
25	BURHAN	SAYUR	F.474	37.650	80.000	Mei - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
26	ISIANA	SAYUR	F.477	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
27	MUJIATI	SAYUR	F.478	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
28	TUKINAH	SAYUR	F.479	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
29	MUHAMMAD TAUFIQ	SAYUR	F.480	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
30	ARDIANSYAH	SAYUR	F.481	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
31	SUKINI	SAYUR	F.482	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
32	PONIYEM	SAYUR	F.483	37.650	80.000	Desember 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
33	HJ. RUMINTEN	SAYUR	F.484	37.650	80.000	Desember 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
34	DEVI NOVALITA NINGTYAS	SAYUR	F.485	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
35	INDO LUNGE	SAYUR	F.486	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
36	MUSNI	SAYUR	F.490	37.650	80.000	Februari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
37	ABDUL RASYID,A	SAYUR	F.491	37.650	80.000	Februari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
38	WAHYUDI	SAYUR	F.492	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
39	GISAH	SAYUR	F.500	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
40	ALIMUDDIN	SAYUR	F.502	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
41	NURHAYATI	SAYUR	F.503	37.650	80.000	Desember 2019 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
42	M.YUSUF	SAYUR	F.504	37.650	80.000	Desember 2019 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
43	MARIANA	SAYUR	F.506	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
44	TUKINAH	SAYUR	F.509	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
45	ZAINAL	SAYUR	F.510	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
46	RIRIN	SAYUR	F.512	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
47	HASNAH	SAYUR	F.516	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
48	SIAMAH	SAYUR	G.517	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
49	Hj. KURNIA JINNE	SAYUR	G.518	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
50	SADARIAH	SAYUR	G.531	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
51	HERMAS JAKUT PRATAMA	SAYUR	G.535	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400
52	RUSLI	SAYUR	G.538	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
53	KACONG	SAYUR	G.542	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
54	SUTIATI	SAYUR	G.544	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
55	ZUBAIR	SAYUR	G.548	37.650	80.000	Desember 2020 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
56	H.HANAPING	SAYUR	G.551	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
57	Hj. SATRIANA	SAYUR	G.552	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
58	SUTINI	SAYUR	G.553	37.650	80.000	November 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
59	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.554	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
60	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.555	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
61	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.556	37.650	80.000	Mei 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
62	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.557	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
63	HJ. SUTIYEM	SAYUR	G.558	37.650	80.000	Agustus 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
64	LILIS JUMASTUTIK	SAYUR	G.559	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
65	SAMINI	SAYUR	G.560	37.650	80.000	Agustus - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
66	BIKAI	SAYUR	G.561	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
67	WAGIANTI	SAYUR	G.562	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
68	IRAWATI	SAYUR	G.563	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
69	SUMARLIN	SAYUR	G.564	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
70	ISMIATI	SAYUR	G.565	37.650	80.000	November 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
71	LUS ARFIANTI	SAYUR	G.569	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
72	PURNIAWATI	SAYUR	G.571	37.650	80.000	September - Desember 2024	320.000	6.400	326.400
73	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.580	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
74	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.581	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
75	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.582	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
76	ARSYAD	SAYUR	G.583	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
77	YUSUF PANAMBA	SAYUR	G.584	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
78	MISRA	SAYUR	G.587	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
79	HASMAWATI	SAYUR	G.588	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
80	SALEHAH	SAYUR	G.589	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
81	SUMARSIH	SAYUR	G.590	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
82	MUH.HABIR	SAYUR	G.591	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
83	HASMAWATI	SAYUR	G.592	37.650	80.000	Agustus - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
84	HASMAWATI	SAYUR	G.593	37.650	80.000	Agustus - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
85	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.594	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
86	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.595	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
87	H.MAMMA/H.AHMAD	SAYUR	G.596	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
88	ZUBAIR	SAYUR	G.597	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
89	HJ.RUSMAWATI	SAYUR	G.598	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
90	PAIMAN	SAYUR	G.599	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
91	HARIS	SAYUR	H.600	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
92	MUHAYYAR	SAYUR	H.602	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
93	MUHAMMAD	SAYUR	H.603	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
94	MISTIKA.R	SAYUR	H.605	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
95	SYARIFUDDIN/ HARIYANI HAMID	SAYUR	H.606	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
96	SURIANI KAMARUDDIN	SAYUR	H.612	37.650	80.000	Mei - Desember 2024	640.000	12.800	652.800
97	SURIANI KAMARUDDIN	SAYUR	H.613	37.650	80.000	Mei - Desember 2024	640.000	12.800	652.800
98	RUSMI	SAYUR	H.614	37.650	80.000	Mei - Desember 2024	640.000	12.800	652.800
99	SAHARUDDIN LINGKA	SAYUR	H.627	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
100	HARTATI PATI	SAYUR	H.628	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
101	ROHMAWATI	SAYUR	H.629	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
102	ASDAR AZIZ	SAYUR	H.636	37.650	80.000	Maret 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
103	HASBIAH BAJI	SAYUR	H.638	37.650	80.000	Januari 2019 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
104	MUAL POHAN	SAYUR	H.645	37.650	80.000	November 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
105	MANSYUR,S	SAYUR	H.648	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
106	HARTATI RANNU	SAYUR	H.649	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
107	SAINEM / SUHADA	SAYUR	H.651	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
108	DJABAR	SAYUR	H.657	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
109	MARTEN TAPPI	SAYUR	H.658	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
110	HABIBA DG. LINO	SAYUR	H.659	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
111	YASNI	SAYUR	H.660	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
112	YASNI	SAYUR	H.661	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
113	NARISA	SAYUR	H.670	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
114	MUH.HABIR	SAYUR	H.672	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
115	DANIEL KA'BAK AB	SAYUR	H.678	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
116	ANDI YUSRAN	SAYUR	H.679	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
117	KASMILAH	SAYUR	H.680	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
118	ACHMAD PAUZAN	SAYUR	H.681	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
119	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.682	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
120	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.683	37.650	80.000	Januari 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
120					**JUMLAH**		**Rp 105.600.000**	**Rp 2.112.000**	**Rp 107.712.000**
1	HAS DANIA	SANDAL/SEPATU	II. 03	60.150	120.300	Juli 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
2	ROSMANI	ASSESORIS	II. 10	60.150	120.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
3	AHMAD ARIFIN	MAINAN	II. 13	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
4	MISRA	ASSESORIS	II. 14	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	991.800	19.836	1.011.636
5	M.ISMAIL MAPPIASE	MAINAN	II. 18	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
6	ANUGRAHWATI	CAMPURAN	II. 23	60.150	120.300	Oktober - Desember 2024	360.900	7.218	368.118
7	MASDUKI	SANDAL/SEPATU	II. 24	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
8	ZAINAL HAKIM	KAIN	II. 27	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
9	M. HATTA AMRULLAH	ASSESORIS	II. 26	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
10	JUMISI	SEPATU/SANDAL	II.29	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
11	HASMAWI	KAIN	II. 31	60.150	120.300	Juni - Desember 2024	842.100	16.842	858.942
12	TUDDING	KAIN	II. 32	60.150	120.300	Desember 2024	120.300	2.406	122.706
13	NOR ALAM	MAINAN	II. 38	60.150	120.300	Februari - Desember 2024	1.323.300	26.466	1.349.766
14	AYU DARIANI OTOLUWA	KAIN	II. 43	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
15	SUGIMI	SANDAL/SEPATU	II. 49	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
16	HJ. SITI ALANG	KAIN	II. 50	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
17	SRI RAHAYU NINGSIH	KOMPUTER	II. 54	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
18	ABDUL CHALIK	ASSESORIS	II. 55	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
19	ASLAMIAH	MAINAN	II. 56	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
20	UMI NURUL HABIBA	C HP & PULSA	II. 57	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
21	HERIYANTO	MAINAN	II. 61	60.150	120.300	Mei 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
22	MULYADI	KAIN	II. 62	60.150	120.300	Januari 2019 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
23	ZAINAL ARIFIN	KAIN	II. 63	60.150	120.300	Agustus - Desember 2024	601.500	12.030	613.530
24	NUR AMIN	KAIN	II. 64	60.150	120.300	September - Desember 2024	481.200	9.624	490.824
25	HAIDIR	ASSESORIS	II. 65	82.650	165.300	Maret - Desember 2024	1.653.000	33.060	1.686.060
26	ENI KUSRINI (RONI R)	ASSESORIS	II. 68	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
27	HERAWATI	SOVENIR	II. 69	60.150	120.300	Oktober 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
28	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II. 70	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
29	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II. 71	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
30	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II. 72	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
31	KARIYATI	OBAT-OBATAN	II. 73	60.150	120.300	April - Desember 2024	1.082.700	21.654	1.104.354
32	SUBAKRI	SANDAL/SEPATU	II. 74	129.900	259.800	April - Desember 2024	2.338.200	46.764	2.384.964
33	FATMAR	KAIN	II.77	82.650	165.300	Juni - Desember 2024	1.157.100	23.142	1.180.242
34	ERMA DAMAYANTI	KAIN	II.79	60.150	120.300	Juni - Desember 2024	842.100	16.842	858.942
35	SITI MUALAFAH	SANDAL/SEPATU	II. 82	60.150	120.300	April - Desember 2024	1.082.700	21.654	1.104.354
36	M.RIFAI	SANDAL/SEPATU	II. 83	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
37	NURHASYIM	TOPI	II. 84	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
38	FATMAR	SANDAL/SEPATU	II.117	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
39	SITI MUSDALIFAH	SANDAL/SEPATU	II.144	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
40	H.SURADI	SANDAL/SEPATU	II.145	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
41	ABD.RAHMAN	KAIN	II.147	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
41					**JUMLAH**		**Rp 49.207.500**	**Rp 984.150**	**Rp 50.191.650**
1	M. AZIZ	IKAN BASAH	A.01	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
2	M. AZIZ	IKAN BASAH	A.02	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
3	H.AMREN	IKAN BASAH	A.04	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
4	ABUSTAN	IKAN BASAH	A.11	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
5	ABUSTAN	IKAN BASAH	A.12	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
6	FITRIANI	IKAN BASAH	A.13	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
7	HAMILUDDIN	IKAN BASAH	A.14	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
8	ABDUL MUIS	IKAN BASAH	A.15	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
9	HALIMUDDIN	IKAN BASAH	A.16	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
10	ARMUNIS	IKAN BASAH	A.17	49.450	100.900	April - Desember 2024	908.100	18.162	926.262
11	SOHOR	IKAN BASAH	A.18	49.450	100.900	Februari 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
12	ALAMSYAH	IKAN BASAH	A.19	49.450	100.900	April - Desember 2024	908.100	18.162	926.262
13	SARINAH	IKAN BASAH	A.22	49.450	100.900	Desember 2023 -Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
14	ULIAWINARTI	IKAN BASAH	A.23	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	605.400	12.108	617.508
15	MUHNIA	IKAN BASAH	A.24	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
16	NOOR BAIZURA	IKAN BASAH	A.27	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
17	DAHLAN	IKAN BASAH	A.31	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
18	DAHLAN	IKAN BASAH	A.32	49.450	100.900	November 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
19	ROSDIANA	IKAN BASAH	A.33	49.450	100.900	November - Desember 2024	201.800	4.036	205.836
20	H.AMREN	IKAN BASAH	A.80	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
21	NURHAYATI	IKAN BASAH	C.190	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
22	ALDI SUNARYA	IKAN BASAH	C.191	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
23	ISMAIL (PIPOS)	IKAN BASAH	C.193	49.450	100.900	April - Desember 2024	908.100	18.162	926.262
24	MUHNIA	IKAN BASAH	C.194	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
25	SUARDI	IKAN BASAH	C.196	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
26	IKHSAN	IKAN BASAH	C.197	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
27	IKHSAN	IKAN BASAH	C.198	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
28	IKHSAN	IKAN BASAH	C.199	49.450	100.900	September 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
29	MARDAN	IKAN BASAH	C.200	49.450	100.900	Januari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
30	RUDI	IKAN BASAH	C.201	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
31	YUNUS	IKAN BASAH	C.205	49.450	100.900	Juli - Desember 2024	605.400	12.108	617.508
32	RUSDIN	IKAN BASAH	C.209	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
33	SANAWIYAH	IKAN BASAH	C.210	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
34	SANAWIYAH	IKAN BASAH	C.211	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
35	RIDWAN	IKAN BASAH	C.212	49.450	100.900	Juli - Desember 2024	605.400	12.108	617.508
36	AMUAS.U	IKAN BASAH	C.213	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
37	HASIAH MONGGO BILU	IKAN BASAH	C.214	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
38	ABU BAKAR SIDDIK	IKAN BASAH	C.215	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
39	HALIMUDDIN	IKAN BASAH	C.216	49.450	100.900	Mei - Desember 2024	807.200	16.144	823.344
40	RAHMATIA	IKAN BASAH	C.220	49.450	100.900	Januari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
41	SANUDDIN Dg. NGAPO	IKAN BASAH	C.221	49.450	100.900	Oktober 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
42	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	C.222	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
43	H. ILHAM	IKAN BASAH	C.223	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
44	JONIANSYAH	IKAN BASAH	C.227	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
45	KAMARUDDIN KUMIS	IKAN BASAH	C.228	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
46	ANWAR	IKAN BASAH	C.229	49.450	100.900	Juli - Desember 2024	605.400	12.108	617.508
47	RISWAN	IKAN BASAH	C.231	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
48	ABDURRAHMAN	IKAN BASAH	C.232	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
49	MUHAMMAD ADIL	IKAN BASAH	C.235	49.450	100.900	Oktober 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
50	RAMLAN	IKAN BASAH	C.236	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
51	SURIANTI	IKAN BASAH	C.237	49.450	100.900	Februari 2021 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
52	ZUMRIYAH	IKAN BASAH	C.238	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
53	JAMES	IKAN BASAH	C.239	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
54	ISHAQ	IKAN BASAH	C.240	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
55	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.242	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
56	MUHAMMAD SUPIANDI	IKAN BASAH	C.244	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
57	HJ.SIANG	IKAN BASAH	C.253	49.450	100.900	Januari 2018 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
58	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.257	49.450	100.900	Januari 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
59	WANDIARTA.S	IKAN BASAH	C.258	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
60	UPE	IKAN BASAH	C.259	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
61	HASIAH.M	IKAN BASAH	D.266	47.950	100.000	Desember 2016 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
62	ABDUL RAJAB	IKAN BASAH	D.272	47.950	100.000	November 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
63	SARINTAN / SITI RAJIYAH	IKAN BASAH	D.276	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
64	BADAR	IKAN BASAH	D.278	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
65	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	D.279	47.950	100.000	Juni 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
66	IWAN SAUDE	IKAN BASAH	D.281	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
67	ABDUL HALIM	IKAN BASAH	D.285	47.950	100.000	Juli - Desember 2024	600.000	12.000	612.000
68	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.286	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
69	M. SYARIF	IKAN BASAH	D.288	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
70	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.289	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
71	ANDI JAMALUDDIN	IKAN BASAH	D.290	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
72	DONO	IKAN BASAH	D.292	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
73	AMUAS U	IKAN BASAH	D.293	47.950	100.000	Agustus - Desember 2024	500.000	10.000	510.000
74	AMUAS U	IKAN BASAH	D.294	47.950	100.000	Agustus - Desember 2024	500.000	10.000	510.000
75	HAMZAH	IKAN BASAH	D.295	47.950	100.000	September 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
76	ZULKIFLI	IKAN BASAH	D.297	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
77	SUMARNI	IKAN BASAH	D.298	47.950	100.000	September 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
78	IBRAHIM	IKAN BASAH	D.299	47.950	100.000	Juni - Desember 2024	700.000	14.000	714.000
79	SYAHDAN	IKAN BASAH	D.300	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
80	MUHAMMAD NUR	IKAN BASAH	D.301	47.950	100.000	Mei 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
81	RAMLI	IKAN BASAH	D.302	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
82	MULI SANGING	IKAN BASAH	D.303	47.950	100.000	Mei - Desember 2024	800.000	16.000	816.000
83	MUKSIN MUHDIN	IKAN BASAH	D.304	47.950	100.000	Oktober - Desember 2024	300.000	6.000	306.000
84	H. TAUFIQ, SE	IKAN BASAH	D.305	47.950	100.000	Desember 2024	100.000	2.000	102.000
85	H.MUH NASIR	IKAN BASAH	D.306	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
86	HENDRA	IKAN BASAH	D.307	47.950	100.000	Juni - Desember 2024	700.000	14.000	714.000
87	RAKBAH	IKAN BASAH	D.308	47.950	100.000	Juli - Desember 2024	600.000	12.000	612.000
88	KAMARIA	IKAN BASAH	D.310	47.950	100.000	Juli 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
89	DETI HARTIANI	IKAN BASAH	D.311	47.950	100.000	September - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
90	USMAN	IKAN BASAH	D.312	47.950	100.000	Juni 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
91	REHAN SAPUTRA	IKAN BASAH	D.313	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
92	ISMAIL IDRUS	IKAN BASAH	D.319	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
93	DARNING	IKAN BASAH	D.320	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
94	ABDU RAHMAN	IKAN BASAH	D.321	47.950	100.000	September - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
95	ABDU RAHMAN	IKAN BASAH	D.322	47.950	100.000	September - Desember 2024	400.000	8.000	408.000
96	SAMSUDDIN	IKAN BASAH	D.323	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
97	TIARA MONIKA	IKAN BASAH	D.325	47.950	100.000	Juli - Desember 2024	600.000	12.000	612.000
98	BAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.333	47.950	100.000	Juli 2021 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
99	Hj. WAHIDAH	IKAN BASAH	D.334	47.950	100.000	Juli 2022 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
100	SOKU	IKAN BASAH	D.345	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
101	INTAN	IKAN BASAH	D.346	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
102	NAPIAH	IKAN BASAH	D.347	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
103	HJ.NURHEDAH	IKAN BASAH	D.348	47.950	100.000	Januari - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
104	M.ARIFIN	IKAN BASAH	E.363	47.950	100.000	Januari 2022 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
105	MUHAMMAD S	IKAN BASAH	C. 206	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
106	MUNIR	IKAN BASAH	C. 248	49.450	100.900	November 2020 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
106					**JUMLAH**		**Rp 95.259.000**	**Rp 1.905.180**	**Rp 97.164.180**
1	MAWARDI	AYAM KPNG	B.98	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
2	MAWARDI	AYAM KPNG	B.108	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
3	MUHAMMAD JAMIL	AYAM KPNG	B.109	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
4	AFFANDI	AYAM KPNG	B.111	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
5	SARBIDIN	AYAM PTG	B.112	49.450	100.900	Januari 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
6	WAHYUDDIN	AYAM PTG	B.113	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
7	IBRAHIM	AYAM PTG	B.114	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
8	MUHNIA	AYAM PTG	B.115	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
9	IBRAHIM	AYAM PTG	B.116	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
10	WAHYUDDIN	AYAM PTG	B.117	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
11	SYAHRONI	AYAM PTG	B.118	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
12	SLAMET RIYADI	AYAM PTG	B.119	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
13	SYAHRONI	AYAM PTG	B.121	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
14	MUH.ROMI.S	AYAM PTG	B.122	49.450	100.900	Desember 2024	100.900	2.018	102.918
15	ISMAIL	AYAM PTG	B.125	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
16	AMRIATI	AYAM PTG	B.126	49.450	100.900	Oktober - Desember 2024	302.700	6.054	308.754
17	SANDI	AYAM PTG	B.127	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
18	ABDURRAHMAN	AYAM PTG	B.132	49.450	100.900	April 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
19	MAHMUD	AYAM PTG	B.134	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
20	AMIR L	AYAM PTG	B.139	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
21	SYAHDAN lunas	AYAM PTG	B.141	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
22	SUMARYONO	AYAM PTG	B.146	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
23	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.147	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
24	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.148	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
25	HJ.CAMARE	AYAM PTG	B.153	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
26	SUMARYONO	AYAM PTG	B.154	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
27	TARMINI	AYAM PTG	B.155	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
28	TARMINI	AYAM PTG	B.156	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
29	TARMINI	AYAM PTG	B.157	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
30	JUMIATI	AYAM PTG	B.176	49.450	100.900	Februari 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
31	DEPOT SITOHANG	AYAM PTG	B.177	49.450	100.900	Juni - Desember 2024	706.300	14.126	720.426
32	SYAFARUDDIN	AYAM PTG	B.178	49.450	100.900	April 2021 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
33	SYAPARUDDIN	AYAM PTG	B.179	49.450	100.900	Januari 2021 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
33					**JUMLAH**		**Rp 26.334.900**	**Rp 526.698**	**Rp 26.861.598**
1	SURYANI	PISANG	I.709	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400
2	JOHARENG	PISANG	I.710	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400
3	NURSIAH	PISANG	I.719	37.650	80.000	Januari 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
4	NURHANI	PISANG	I.721	37.650	80.000	Februari - Desember 2024	880.000	17.600	897.600
5	NURHANI	PISANG	I.722	37.650	80.000	Februari - Desember 2024	880.000	17.600	897.600
6	SAHARUDDIN	PISANG	I.725	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
7	LAHA	PISANG	I.725	37.650	80.000	Juni 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
8	CHAIRIL JAFAR,SE	PISANG	I.726	37.650	80.000	Juni 2022 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
9	HAMSIAH	PISANG	I.727	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
10	ASTINA	PISANG	I.728	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
11	DARMANI	PISANG	I.729	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
12	SATRIA	PISANG	I.730	37.650	80.000	Oktober - Desember 2024	240.000	4.800	244.800
13	JOHARENG	PISANG	I.733	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400
14	SURYANI	PISANG	I.734	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
15	ASTINA	PISANG	L738	37.650	80.000	Juli 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
16	SITTI	PISANG	L742	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
17	ASTINA	PISANG	L743	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
18	SITTI	PISANG	L745	37.650	80.000	Agustus 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
18					**JUMLAH**		**Rp 15.440.000**	**Rp 308.800**	**Rp 15.748.800**
1	NURLIAH	LOS KAIN	86	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
2	MEGAWATI	KAIN	1.A	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
3	RATNI YUNITA	LOS KAIN	1.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
4	HERMAN	MAINAN	2.A	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
5	RATNI YUNITA	ASESORIS	2.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
6	HERMAN	ASESORIS	3.A	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
7	RATNI YUNITA	ASESORIS	3.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
8	ABDULLAH	ASESORIS	4.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
9	ABDULLAH	ASESORIS	5.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
10	SUPRI	KASET	6.B	22.500	45.000	April - Desember 2024	405.000	8.100	413.100
11	HAMKA	COUNTER HP	7.A	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
12	SAM	JAM	7.B	22.500	45.000	April - Desember 2024	405.000	8.100	413.100
13	NURHASYIM	ASESORIS	11.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
14	NURHASYIM	ASESORIS	11.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
15	JAKORNI	JAM	12.A	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
16	PENDI	ASESORIS	12.B	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
17	NURHASYIM	ASESORIS	13.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
18	DIANA	ASESORIS	13.B	22.500	45.000	Januari 2021 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
19	AISYAH/M.RIFAI	ASESORIS	14.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
20	AISYAH/M.RIFAI	ASESORIS	15.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
21	KARIATI	MAINAN	16.A	22.500	45.000	April - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
22	WAHIDAH	MAINAN	16.B	22.500	45.000	Januari 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
23	SAMSUL ALAM	KASET	17.A	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
24	SALAMA	KASET	17.B	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
25	FITRI RAHMAN	LOS (ASS)	23	22.500	45.000	Maret - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
26	SIRAJUDDIN	LOS (ASS)	24.C	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
27	NUR HIKMA	SANDAL	25.A	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
28	SUARDI	SANDAL	25.B	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
29	NUR ALAM	ASESORIS	25.C	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
30	SURATMAN	ASESORIS	26.A	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
31	YUSUF	ASESORIS	26.C	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
32	YULIANA/SLAMAT	SANDAL	27.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
33	SARI	LOS (KAOS KAKI)	28.A	22.500	45.000	Maret - Desember 2024	450.000	9.000	459.000
34	NORMALISA	LOS KAIN	28.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
35	PIPIT	LOS (JAM)	29.A	22.500	45.000	Maret - Desember 2024	450.000	9.000	459.000
36	SHOLIHUL HARI	ASESORIS	29.B	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
37	NASRUDIN	ASSESORIS	32.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
38	NASRUDIN	ASSESORIS	32.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
39	SUMIATI	KAIN	33.A	22.500	45.000	Juli 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
40	MUSTAK FIRIN	ASESORIS	34.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
41	NURJANAH	ASESORIS	35.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
42	AHMAD ARIFIN	ASESORIS	35.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
43	MEGAWATI	MAINAN	36.A	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
44	ACHMAD ARIFIN	KAIN	36.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
45	SAHRONI	MAINAN	38.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
46	ZAENAL ARIFIN	ASSESORIS	38.B	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
47	ISA LIKANI	KAIN	44.A	22.500	45.000	Juni - Desember 2024	315.000	6.300	321.300
48	ANUARI	KAIN	45.A	22.500	45.000	Juni - Desember 2024	315.000	6.300	321.300
49	HAERIAH	LOS KAIN	46.A	22.500	45.000	Juni - Desember 2024	315.000	6.300	321.300
50	MUH. FADLI RAMADHAN	KAIN	51.A	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
51	NURUL HIKMAH	KAIN	51.B	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
52	FATMAWATI	KAIN	52.A	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
53	LUTHFIA RAHMI	KAIN	52.B	22.500	45.000	Juli 2021 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
54	ELSYA HIKMAH	KAIN	53.A	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
55	ELSYA HIKMAH	KAIN	53.B	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
56	MUHAMMAD ARYANTO	KAIN	54.A	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
57	ZAINAL HAKIM	KAIN	54.B	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
58	IRPAN	KAIN	55.A	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
59	MASPIAH	KAIN	55.B	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
60	STANLEY IRAWAN	KAIN	88	22.500	45.000	Juli 2021 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
61	SAHRIANA	KAIN	89	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
62	MARIYANA	ASESORIS	90	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
63	IRFAN	KAIN	56.A	22.500	45.000	Januari 2021 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
64	EDI MULIYADI	SANDAL	79.A	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
65	SUMARNI	ASESORIS	79.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
66	ADRIS	KAIN	80.B	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
67	MARIYANA	ASESORIS	84.A	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
68	IRWANTO	KAIN	84.B	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
69	MARIYANA	ASESORIS	85.A	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
70	SEMMA	ASSESORIS	87	22.500	45.000	Oktober - Desember 2024	135.000	2.700	137.700
71	ISMAIL	KAIN	L.96	22.500	45.000	Oktober 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
72	FIRMAN	KAIN	L.97	22.500	45.000	Februari - Desember 2024	495.000	9.900	504.900
73	NUR ALANG	KAIN	L.98	22.500	45.000	Februari - Desember 2024	495.000	9.900	504.900
74	SAIDA	KAIN	99.A	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
75	MEISA	KAIN	100.A	22.500	45.000	Juli - Desember 2024	270.000	5.400	275.400
76	MUTINGAH	KAIN	L.102	22.500	45.000	Maret 2020- Desember 2024	540.000	10.800	550.800
77	H. MUH RUSLI	KAIN	L.107	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
78	HJ.SURIANI	KAIN	L.108	22.500	45.000	November - Desember 2024	90.000	1.800	91.800
79	FATMAWATI	KAIN	L.109	22.500	45.000	Agustus - Desember 2024	225.000	4.500	229.500
80	SURYANI	KAIN	L.110	22.500	45.000	November - Desember 2024	90.000	1.800	91.800
81	ASWIN	KAIN	L.112	22.500	45.000	Februari 2020 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
82	PUTRI ALAEYDIA ZAHRA	KAIN	L.113	22.500	45.000	Februari 2020 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
83	HASNI	KAIN	L.114	22.500	45.000	Januari 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
84	BUNIATI	KAIN	L.99	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
85	BUNIATI / SAHIBDUDDIN	KAIN	L.100	22.500	45.000	Mei - Desember 2024	360.000	7.200	367.200
86	HASARUDDIN	KAIN	L.119	22.500	45.000	Januari - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
87	NURSIAH	KASET	L.120	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
88	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.121	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
89	MANSYUR	KAIN	L.122	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
90	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	L.123	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
91	HASANUDDIN	KAIN	L.124	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
92	SAIPULA	KAIN	L.126	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
93	AGUS ARDIANSYAH	KAIN	L.127	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
94	SYAMSUL BAHRI	KASET	L.128	22.500	45.000	Mei 2022 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
95	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.129	22.500	45.000	November 2023 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
96	SUPARDI S	KAIN	L.132	22.500	45.000	Januari 2019 - Desember 2024	540.000	10.800	550.800
96					**JUMLAH**		**Rp 43.020.000**	**Rp 860.400**	**Rp 43.880.400**
1	MUHAMMAD SARDI	DAGING	A.25	49.450	100.900	September 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
2	SYAM'ANI	DAGING	A.34	49.450	100.900	September - Desember 2024	403.600	8.072	411.672
3	DEWI RACHMAWATI	DAGING	A.41	49.450	100.900	Juni - 'Desember 2024	706.300	14.126	720.426
4	MAHESA AQNI	DAGING	A.42	49.450	100.900	September - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
5	SUGITAN	DAGING	A.43	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
6	SUGITAN	DAGING	A.44	49.450	100.900	Juli 2023 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
7	SUGIANI	DAGING	A.45	49.450	100.900	Juli 2022 - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
8	CAHYADI	DAGING	A.46	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
9	MUHAMMAD MAULANA	DAGING	A.47	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
10	ARJUN	DAGING	A.48	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
11	ASRIANSYAH.B	DAGING	A.55	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
12	JULAYHA WULANDARI	DAGING	A.56	49.450	100.900	Juni - 'Desember 2024	706.300	14.126	720.426
13	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.61	49.450	100.900	Mei - Desember 2024	807.200	16.144	823.344
14	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.62	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
15	TAMJIDILLAH	DAGING	A.63	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
16	ADNI FITRI SURYADI	DAGING	A.64	49.450	100.900	Agustus - Desember 2024	504.500	10.090	514.590
17	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.70	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
18	HENDRA/RAWON	DAGING	A.71	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
19	DARYANTO	DAGING	A.72	49.450	100.900	Januari - Desember 2024	1.210.800	24.216	1.235.016
19					**JUMLAH**		**Rp 17.960.200**	**Rp 359.204**	**Rp 18.319.404**
1	AHMADI	KELAPA	A.02	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
2	MAMMA	KELAPA	A.03	105.150	210.300	Februari - Desember 2024	2.313.300	46.266	2.359.566
3	APRIADI	KELAPA	A.05	105.150	210.300	Desember 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
4	JAMALUDDIN	KELAPA	B.09	105.150	210.300	Oktober - Desember 2024	630.900	12.618	643.518
5	SHINTA	KELAPA	B.13	75.150	150.300	Maret 2022- Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
6	FAISAL	KELAPA	B.14	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
7	KAHARUDDIN	KELAPA	B.15	105.150	210.300	'Oktober - Desember 2024	630.900	12.618	643.518
8	YUSUF	KELAPA	B.16	105.150	210.300	September 2020 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
9	AMIR	KELAPA	B.17	105.150	210.300	Mei - Desember 2024	1.682.400	33.648	1.716.048
10	M.RUSLI	KELAPA	C.19	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
11	MARWIAH	KELAPA	C.24	75.150	150.300	April - Desember 2024	1.352.700	27.054	1.379.754
12	ROSDIANA	KELAPA	C.25	105.150	210.300	November - Desember 2024	420.600	8.412	429.012
13	RIDWAN	KELAPA	C.26	105.150	210.300	November - Desember 2024	420.600	8.412	429.012
14	HJ.RUKIAH	KELAPA	C.29	105.150	210.300	Mei - Desember 2024	640.000	12.800	652.800
15	HJ. ROSNAINI	KELAPA	D.30	105.150	210.300	Mei - Desember 2024	640.000	12.800	652.800
16	HERSAN	KELAPA	D.31	105.150	210.300	Februari 2021 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
17	HERSAN	KELAPA	D.32	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
18	SRI WAHYUNI	KELAPA	D.33	105.150	210.300	Februari 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
19	HJ.HASNAH	KELAPA	D.35	105.150	210.300	Mei 2018 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
20	M.HUTAGALUNG	KELAPA	E.41	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
21	NUR HAENI	KELAPA	G.58	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
22	MARDIANA	KELAPA	G.59	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
22					**JUMLAH**		**Rp 37.004.900**	**Rp 740.098**	**Rp 37.744.998**
1	ENDAH SUTARSIH	WARUNG MAKAN	2	64.600	129.200	September - Desember 2024	516.800	10.336	527.136
2	HJ. SALMIAH	WARUNG MAKAN	4	64.600	129.200	Juli 2020 - Desember 2024	1.550.400	31.008	1.581.408
3	ROSMAN	WARUNG MAKAN	7	64.600	129.200	Januari - Desember 2024	1.550.400	31.008	1.581.408
3	LUSIATUN	WARUNG MAKAN	11	64.600	129.200	Maret 2022- Desember 2024	1.550.400	31.008	1.581.408
4	ROSNAWATI	WARUNG MAKAN	12	64.600	129.200	Februari - Desember 2024	1.421.200	28.424	1.449.624
5	SITI HALIJAH	WARUNG MAKAN	13	64.600	129.200	Februari 2020 - Desember 2024	1.550.400	31.008	1.581.408
6	TIMANG	WARUNG MAKAN	14	64.600	129.200	Maret 2023 - Desember 2024	1.550.400	31.008	1.581.408
7	ARMINAH	WARUNG MAKAN	15	64.600	129.200	Mei - Desember 2024	1.033.600	20.672	1.054.272
8	EKA YANTI	WARUNG MAKAN	17	64.600	129.200	Mei - Desember 2024	1.033.600	20.672	1.054.272
9	MIKO DG.SIANG	WARUNG MAKAN	18	64.600	129.200	Desember 2024	129.200	2.584	131.784
10	HJ.NURSIAH	WARUNG MAKAN	20	64.600	129.200	Agustus - Desember 2024	646.000	12.920	658.920
11	SANTI	WARUNG MAKAN	21	64.600	129.200	Agustus - Desember 2024	646.000	12.920	658.920
12	MANSYUR	WARUNG MAKAN	22	64.600	129.200	Agustus - Desember 2024	646.000	12.920	658.920
13	EVI	WARUNG MAKAN	23	64.600	129.200	Agustus - Desember 2024	646.000	12.920	658.920
13					**JUMLAH**		**Rp 14.470.400**	**Rp 289.408**	**Rp 14.759.808**
1	HJ.MARHUMAH	IKAN ASIN	A.07	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
2	YUSUF	IKAN ASIN	E.42	75.150	150.300	Juli 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
3	BURHANUDDIN	IKAN ASIN	E.43	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
4	AKHMADI	IKAN ASIN	F.48	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
5	HJ.ISIYAH	IKAN ASIN	F.50	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
6	HJ.HETTY SUSANTI	IKAN ASIN	F.51	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
7	SAHARTINA	IKAN ASIN	F.46	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
8	KAMARUDDIN	IKAN ASIN	G.63	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	1.052.100	21.042	1.073.142
9	M. RUSLI / NURHAENI	IKAN ASIN	G.64	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
10	SATRAWATI	IKAN ASIN	G.66	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
11	NURDIANA	IKAN ASIN	G.67	75.150	150.300	Mei - Desember 2024	1.202.400	24.048	1.226.448
12	MARDIANA	IKAN ASIN	G.68	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
13	HJ.HABBARENG	IKAN ASIN	G.69	75.150	150.300	Mei - Desember 2024	1.202.400	24.048	1.226.448
14	HASMAWATI	IKAN ASIN	H.70	105.150	210.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
15	HJ. ANDI YULI	IKAN ASIN	H.72	75.150	150.300	Februari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
16	NUR HAINI	IKAN ASIN	H.73	105.150	210.300	November 2020 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
17	HJ.TAMARIN	IKAN ASIN	H.74	105.150	210.300	Maret 2022 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
18	HJ.WAHIDAH	IKAN ASIN	I.90	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
19	KASMAWATI	IKAN ASIN	I.91	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
20	TENNI	IKAN ASIN	I.94	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
21	SERLIANA	IKAN ASIN	I.95	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
22	ERNAWATI	IKAN ASIN	I.96	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
23	ERNAWATI	IKAN ASIN	I.97	105.150	210.300	Desember 2024	210.300	4.206	214.506
24	HJ.NURHEDAH	IKAN ASIN	J.98	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
25	RUDI RISMAWAN	IKAN ASIN	J.99	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
26	AHMAD RIDWAN/H.M.SETTA	IKAN ASIN	J.102	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
27	HASNI	IKAN ASIN	J.105	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
28	HAWATIAH	IKAN ASIN	J.106	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
29	HJ.NAIMAH	IKAN ASIN	J.107	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
30	HASNI	IKAN ASIN	J.108	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
31	UPE	IKAN ASIN	J.119	105.150	210.300	Juli - Desember 2024	1.261.800	25.236	1.287.036
32	BALSIMAH	IKAN ASIN	K.120	75.150	150.300	Mei - Desember 2024	1.202.400	24.048	1.226.448
33	ENJONG SUTARJO	IKAN ASIN	K.132	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
34	NOR DIANA	IKAN ASIN	K.137	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
35	SITI RAJIYAH	IKAN ASIN	K.138	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
36	H. USMAN G	IKAN ASIN	K.139	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
37	BELMA	IKAN ASIN	K.140	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
38	BELMA	IKAN ASIN	K.141	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
39	HJ.ROSIDAH	IKAN ASIN	L.142	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
40	FAHRUN NISA	IKAN ASIN	L.152	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
41	H. SYAMSUDDIN/NUR LAILA	IKAN ASIN	D.36	105.150	210.300	Mei 2019 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
41					**JUMLAH**		**Rp 57.556.500**	**Rp 1.151.130**	**Rp 58.707.630**
1	SURIANA	KUE	J.810	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
2	NURYANAH K	KUE	J.811	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
3	GATOT SUBROTO,S.Ag	KUE	J.813	37.650	80.000	Januari 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
4	MARIANA	KUE	J.817	37.650	80.000	Desember 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
5	MARIANA BERAU	KUE	J.818	37.650	80.000	Oktober 2023 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
6	YULI RIHWANA	KUE	J.819	37.650	80.000	Desember 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
7	SITI FATIMAH/ZAINAL ABIDIN	KUE	J.822	37.650	80.000	Mei 2019 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
8	SURATMI	KUE	J.823	37.650	80.000	Februari 2018 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
9	SURATMI	KUE	J.824	37.650	80.000	April 2020 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
10	SURYANI	KUE	J.832	37.650	80.000	April - Desember 2024	720.000	14.400	734.400
11	RABANIA	KUE	J.835	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
12	RABANIA	KUE	J.836	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
13	LINDAWATI	KUE	J.839	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
14	MUHAMMAD TAHER	KUE	J.846	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
15	RIZKY ANDRIANI	KUE	J. 841	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
15					**JUMLAH**		**Rp 13.680.000**	**Rp 273.600**	**Rp 13.953.600**
1	SUPIANI	EMAS	II. 34	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	991.800	19.836	1.011.636
2	Hj. MARHANAH	EMAS	II. 52	60.150	120.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
3	M.ASDAR	EMAS	II.59	60.150	120.300	September - Desember 2024	481.200	9.624	490.824
4	TUTE	EMAS	II. 67	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
5	HJ.NOR HAYATI	EMAS	II.86	60.150	120.300	Juli 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
6	HAMKA	EMAS	II.89	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
7	NASRUDDIN	EMAS	II. 92	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
8	ADHI ACHMAD H	EMAS	II. 93	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
9	FARIDA	EMAS	II. 94	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	991.800	19.836	1.011.636
10	SITI	EMAS	II. 95	60.150	120.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
11	MUCHTAR	EMAS	II. 96	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
12	CONGGENG DARMAWAN / SULYADI	EMAS	II. 98	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
13	JUNAIDI	EMAS	II. 99	60.150	120.300	Mei - Desember 2024	962.400	19.248	981.648
14	HASAN / THAMRIN	EMAS	II. 101	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
15	SYAIFUL	EMAS	II. 102	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
16	KARTINI	EMAS	II. 103	60.150	120.300	Agustus - Desember 2024	601.500	12.030	613.530
17	ABDUL RAHIM	EMAS	II. 104	60.150	120.300	Agustus - Desember 2024	601.500	12.030	613.530
18	SUDIRMAN	EMAS	II. 105	60.150	120.300	Oktober - Desember 2024	360.900	7.218	368.118
19	ALAMSYAH	EMAS	II.106	82.150	164.300	November 2023 - Desember 2024	1.971.600	39.432	2.011.032
20	SUDIRMAN	EMAS	II.107	60.150	120.300	Oktober - Desember 2024	360.900	7.218	368.118
21	LUKMAN	EMAS	II.108	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	991.800	19.836	1.011.636
22	SUDIRMAN	EMAS	II.109	60.150	120.300	April - Desember 2024	1.082.700	21.654	1.104.354
23	SYAMSIAR / SUWARNI	EMAS	II. 111	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
24	H.ALIMUDDIN.M.D	EMAS	II. 112	60.150	120.300	September - Desember 2024	481.200	9.624	490.824
25	WAHYUDDIN	EMAS	II. 113	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
26	HASRUL	EMAS	II.115	82.650	165.300	Januari - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
27	ACHMAD, MD	EMAS	II. 119	60.150	120.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
28	ZAINUDDIN DAENG SIRUA	EMAS	II. 122	60.150	120.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
29	HJ.RAHMAYATI	EMAS	II.124	82.650	165.300	November 2022 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
30	NAIMAH	EMAS	II.125	60.150	120.300	April 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
31	MUNAWIR	EMAS	II.126	60.150	120.300	Desember 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
32	H.MASDAR	EMAS	II.127	60.150	120.300	Desember 2023 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
33	FIRMAAN	EMAS	II.128	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
34	ABDULLAH	EMAS	II. 129	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
35	ASDAR AKHMAD	EMAS	II. 130	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
36	RUDI	EMAS	II. 131	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
37	LINA	EMAS	II. 132	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
38	ROSMIATI HS	EMAS	II. 133	82.650	165.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
39	MARWATI	EMAS	II. 135	82.650	165.300	Agustus 2022 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
40	KARYAWAN YOGYANTORO	EMAS	II. 136	60.150	120.300	Juli 2021 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
41	H. ABDUL KHOLIL BIN M	EMAS	II. 140	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
42	HERAWATI	EMAS	II. 141	60.150	120.300	Oktober 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
43	SUPIANI	EMAS	II.142	82.650	165.300	Oktober 2022 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
43					**JUMLAH**		**Rp 56.127.900**	**Rp 1.122.558**	**Rp 57.250.458**
1	RATIH WINDAYANIE (CAFE ALIKHA)	FOOD COURT	1	99.600	199.200	Januari 2022 - Desember 2024	2.390.400	47.808	2.438.208
2	YUTIE LARASHATIE (ES BUAH)	FOOD COURT	2	99.600	199.200	April 2019 - Desember 2024	2.390.400	47.808	2.438.208
3	INTAN SURYANI (MALAGA)	FOOD COURT	15	99.600	199.200	Februari 2022 - Desember 2024	2.390.400	47.808	2.438.208
4	SURTI (RM.DWI RAHAYU)	FOOD COURT	25	113.600	227.200	Juli 2018 - Desember 2024	2.726.400	54.528	2.780.928
5	ERWIMIN	FOOD COURT	29	113.600	227.200	Oktober 2023 - Desember 2024	2.726.400	54.528	2.780.928
6	SULKARNAIN (CAFE MAKASAR)	FOOD COURT	35	113.600	227.200	Mei 2019 - Desember 2024	2.726.400	54.528	2.780.928
7	ETI KUMALA DEWI (RORA CAFÉ)	FOOD COURT	37	113.600	227.200	Januari 2018 - Desember 2024	2.726.400	54.528	2.780.928
8	CAFE INDAH	FOOD COURT	40	113.600	227.200	Juli 2022 - Desember 2024	2.726.400	54.528	2.780.928
8					**JUMLAH**		**Rp 20.803.200**	**Rp 416.064**	**Rp 21.219.264**
1	BAIHAKI	KELONTONGAN	F.56	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
2	SUMIATI	KELONTONGAN	G.62	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
3	NUR FARIKAH	KELONTONGAN	H.76	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
4	M.HAIDIR	KELONTONGAN	I.82	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
5	FERY JUNAIDI	KELONTONGAN	I.85	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
6	AKHMADI	KELONTONGAN	J.109	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
7	AKHMADI	KELONTONGAN	J.110	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
8	SUROTO	KELONTONGAN	L.156	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.261.800	25.236	1.287.036
9	SITI MASRUKHAH	KELONTONGAN	L.157	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
10	SYARIFUDDIN	KELONTONGAN	L.159	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
11	NUR FAISYAH	KELONTONGAN	L.160	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
12	KARNIATI	KELONTONGAN	M.162	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
13	SUKARI	KELONTONGAN	M.164	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
14	ASRIATUN	KELONTONGAN	M.165	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
15	SUMARNO BADERUN	KELONTONGAN	M.168	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
16	ROFIKUDDIN	KELONTONGAN	M.169	105.150	210.300	Oktober 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
17	NUR ROZAK	KELONTONGAN	M.170	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
18	SRI WAHYUNI	KELONTONGAN	M.171	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
19	SUPANDI	KELONTONGAN	M.172	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
20	AHMADI	KELONTONGAN	N.181	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
21	AHMAD RIFAI	KELONTONGAN	N.182	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
22	BAIHAKI	KELONTONGAN	N.183	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
23	PURWATI	KELONTONGAN	M.174	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
24	HASIM AS'ARI	KELONTONGAN	M.175	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
25	SUARDI	KELONTONGAN	N.187	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
26	MAWAR TORALANGI	KELONTONGAN	O.207	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
27	MAWAR TORALANGI	KELONTONGAN	O.209	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
28	JAZERI BIN SUWARNO	KELONTONGAN	P.218	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
29	RABANG	KELONTONGAN	Q.227	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
30	H. HABBARENG	KELONTONGAN	Q.230	75.150	150.300	Mei - Desember 2024	1.202.400	24.048	1.226.448
31	HJ.SITI ALANG	KELONTONGAN	R.234	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	1.052.100	21.042	1.073.142
32	DARUS SALAM	KELONTONGAN	S.238	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
33	SARIADI	KELONTONGAN	Z.355	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
34	H.NOR SAHID	KELONTONGAN	AB.393	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
35	H.MANAWWING	KELONTONGAN	AC.397	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	1.052.100	21.042	1.073.142
36	SITI MAIMUNAH	KELONTONGAN	AI.460	105.150	210.300	Maret - Desember 2024	2.103.000	42.060	2.145.060
36					**JUMLAH**		**Rp 60.165.000**	**Rp 1.203.300**	**Rp 61.368.300**
1	SAHARIA	LOS KELONTONGAN	L690	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
2		LOS KELONTONGAN	L691	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
3	MAWAR ERVIANA	LOS KELONTONGAN	L692	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
4		LOS KELONTONGAN	L693	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
5		LOS KELONTONGAN	L694	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
6	ALIANNUR	LOS KELONTONGAN	L704	37.650	80.000	September - Desember 2024	320.000	6.400	326.400
7		LOS KELONTONGAN	L705	37.650	80.000	September - Desember 2024	320.000	6.400	326.400
8	HJ.HASNAH	LOS KELONTONGAN	L757	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
9		LOS KELONTONGAN	L758	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
10		LOS KELONTONGAN	L759	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
11	NOVIA HAYATI	LOS KELONTONGAN	L762	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
12		LOS KELONTONGAN	L763	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
13	SUARDI	LOS KELONTONGAN	L764	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
14	KARSINI	LOS KELONTONGAN	L765	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
15	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	L767	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
16	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	L768	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
17	AMBO ASSE	LOS KELONTONGAN	L770	37.650	80.000	Desember 2024	80.000	1.600	81.600
18	NURAMINAH/MIRANDA	LOS KELONTONGAN	L771	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
19	NURAMINAH/MIRANDA	LOS KELONTONGAN	L772	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
20	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	L773	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
21	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	L774	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
22	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	L775	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
23	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	L776	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
24	HAIDIR	LOS KELONTONGAN	J.777	37.650	80.000	Maret - Desember 2024	800.000	16.000	816.000
25		LOS KELONTONGAN	J.778	37.650	80.000	Maret - Desember 2024	800.000	16.000	816.000
26	ROSMIATI	LOS KELONTONGAN	L687	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
27		LOS KELONTONGAN	L688	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
28	NURLINA	LOS KELONTONGAN	J.856	37.650	80.000	Januari 2021 - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
29	EDI SAENURI,SH	LOS KELONTONGAN	J.857	37.650	80.000	Oktober - Desember 2024	240.000	4.800	244.800
30	SITI AMINAH	LOS KELONTONGAN	J.860	37.650	80.000	Januari - Desember 2024	960.000	19.200	979.200
31	ZUBAIR	LOS KELONTONGAN	J.863	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
32		LOS KELONTONGAN	J.864	37.650	80.000	Juli - Desember 2024	480.000	9.600	489.600
32					**JUMLAH**		**Rp 16.480.000**	**Rp 329.600**	**Rp 16.809.600**
1	SUJIYATI	BUAH	E.356	47.950	100.000	Mei - Desember 2024	800.000	16.000	816.000
2	AGUSTINA DG.RATU	BUAH	E.378	47.950	100.000	Januari 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
3	HASNAH	BUAH	E.386	47.950	100.000	Oktober 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
4	ABDUL RAUF	BUAH	E.388	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
5	ABDUL RAUF	BUAH	E.389	47.950	100.000	Januari 2023 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
6	RIDWAN	BUAH	E.390	47.950	100.000	Juli - Desember 2024	600.000	12.000	612.000
7	ABD. MUIS	BUAH	E.397	47.950	100.000	Januari 2019 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
8	ISTIKHNA	BUAH	E.411	47.950	100.000	Desember 2022 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
9	ISTIKHNA	BUAH	E.412	47.950	100.000	November 2021 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
10	AMRAH SYAMSUDDIN	BUAH	E.425	47.950	100.000	Juli - Desember 2024	600.000	12.000	612.000
11	DAENG NGAI	BUAH	E.426	47.950	100.000	Januari 2021 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
12	DAENG NGAI	BUAH	E.427	47.950	100.000	Desember 2020 - Desember 2024	1.200.000	24.000	1.224.000
12					**JUMLAH**		**Rp 12.800.000**	**Rp 256.000**	**Rp 13.056.000**
1	H. M. AS EDY ASIS	SEMBAKO	A.01	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.313.300	46.266	2.359.566
2	SYARIFUDDIN	SEMBAKO	J.113	75.150	150.300	September - Desember 2024	601.200	12.024	613.224
3	H. RAHMAN	SEMBAKO	K.121	75.150	150.300	Mei - Desember 2024	1.202.400	24.048	1.226.448
4	M. TAHER	SEMBAKO	K.124	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
5	INDO UNGA	SEMBAKO	K.129	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
6	MAWAR	SEMBAKO	K.130	105.150	210.300	Agustus 2021 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
7	ROSMELI	SEMBAKO	L.151	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
8	SAIDATUL WILDANIYAH	SEMBAKO	N.191	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
9	AHMAD RIDWAN	SEMBAKO	N.192	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
10	H.BAHARUDDIN	SEMBAKO	N.193	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
11	HASRIA	SEMBAKO	N.195	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
12	SYAMSIAH	SEMBAKO	N.196	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
13	RIKA AYUNINGTYAS	SEMBAKO	N.197	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
14	HJ. RAHMAH	SEMBAKO	N.201	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
15	MAPPEASE	SEMBAKO	O.206	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
16	LALA	SEMBAKO	O.210	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
17	NURHAYATI	SEMBAKO	R.231	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
18	MUHAMMAD TAHER	SEMBAKO	R.232	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
19	KADDAS	SEMBAKO	S.241	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
20	SAMSUDDIN	SEMBAKO	S.242	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
21	H.M. SETTA	SEMBAKO	T.245	75.150	150.300	Juli 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
22	EKA SAVITRI	SEMBAKO	T.248	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
23	SUBANDI	SEMBAKO	T.250	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
24	HARIANI HAMID	SEMBAKO	T.254	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
25	HJ.MARIANA	SEMBAKO	U.255	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
26	RATNA	SEMBAKO	U.256	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
27	H.M. SAING	SEMBAKO	U.259	75.150	150.300	April 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
28	EVA RAMDHANIATI	SEMBAKO	U.260	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
29	AMBO ASSE	SEMBAKO	U.261	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
30	M. SYAIFUL	SEMBAKO	U.262	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
31	AKHMAD SURYAS MARO,SP	SEMBAKO	U.263	105.150	210.300	Oktober - Desember 2024	630.900	12.618	643.518
32	EDY EDWIN HARIJANTO	SEMBAKO	V.264	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
33	ROSLI ROSMAWATI	SEMBAKO	V.265	75.150	150.300	September 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
34	MURDAWIAH	SEMBAKO	V.266	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
35	HJ.DAIYAH	SEMBAKO	V.269	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
36	ANDI AGUS SURIANTO	SEMBAKO	V.270	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
37	SARIADI	SEMBAKO	V.271	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
38	MUHAMMAD RIFAL	SEMBAKO	V.273	105.150	210.300	Maret 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
39	HASNI	SEMBAKO	W.275	75.150	150.300	Juni 2019 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
40	ARLINA	SEMBAKO	W.276	75.150	150.300	Januari 2020 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
41	RABI	SEMBAKO	W.277	75.150	150.300	Mei 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
42	TARLIAH	SEMBAKO	W.278	75.150	150.300	Juni 2020 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
43	M.ILHAM	SEMBAKO	W.283	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
44	SAMIRUDDIN	SEMBAKO	W.285	75.150	150.300	November - Desember 2024	300.600	6.012	306.612
45	H.MUH.AS EDY	SEMBAKO	W.286	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
46	HJ. HANAFIAH	SEMBAKO	W.287	75.150	150.300	September - Desember 2024	601.200	12.024	613.224
47	HJ. SRI WAHYUNI	SEMBAKO	X.296	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
48	H. H. AS EDY ASIS	SEMBAKO	X.298	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
49	ENY SUPRATIWI	SEMBAKO	X.299	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
50	MARYATI	SEMBAKO	X.301	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
51	SRI WAHYUNI	SEMBAKO	X.302	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
52	H.SITTI	SEMBAKO	X.306	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
53	MANISI	SEMBAKO	X.309	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
54	SARIFAH INTAN	SEMBAKO	X.310	105.150	210.300	Oktober 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
55	HARTONO	SEMBAKO	X.311	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
56	MURNAH	SEMBAKO	X.312	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
57	MURNAH	SEMBAKO	X.313	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
58	ABD.GANI	SEMBAKO	Y.315	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
59	JUMADI	SEMBAKO	Y.317	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
60	MUSTAFA	SEMBAKO	Y.318	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
61	ABDUL RAHMAN	SEMBAKO	Y.320	105.150	210.300	Oktober - Desember 2024	630.900	12.618	643.518
62	HJ.RAHYA LIWANG	SEMBAKO	Y.321	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.472.100	29.442	1.501.542
63	SELFITRI REGISTRIAWATI	SEMBAKO	Y.322	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	1.052.100	21.042	1.073.142
64	YULIA PURWATI	SEMBAKO	Y.323	105.150	210.300	Agustus - Desember 2024	1.051.500	21.030	1.072.530
65	HADRIA INTAN	SEMBAKO	Y.324	75.150	150.300	Februari - Desember 2024	1.653.300	33.066	1.686.366
66	DARMIATI	SEMBAKO	Y.332	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
67	ABDUL KARIM	SEMBAKO	Z.334	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
68	H. BANDU	SEMBAKO	Z.335	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
69	WARDIONO	SEMBAKO	Z.336	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
70	ASMARANI	SEMBAKO	Z.339	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
71	AGUSTINA, PL	SEMBAKO	Z.340	75.150	150.300	Januari 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
72	SRI WAHYUNI	SEMBAKO	Z.344	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
73	HILDA	SEMBAKO	Z.346	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
74	HJ. ROSANA	SEMBAKO	Z.347	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
75	H. RAHMAN REDDE	SEMBAKO	Z.348	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
76	MEGAWATI	SEMBAKO	Z.350	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
77	TRI PUJIANTO	SEMBAKO	Z.351	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
78	ABDUL GANI	SEMBAKO	Z.352	75.150	150.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
79	TAMASIAH	SEMBAKO	Z.353	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
80	H.RAHMAH	SEMBAKO	AA.359	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
81	HAJRAH	SEMBAKO	AA.361	75.150	150.300	Oktober 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
82	MURNI	SEMBAKO	AA.362	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
83	MUCHLIS	SEMBAKO	AA.363	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
84	HJ.HESTI	SEMBAKO	AA.364	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
85	HARYATI	SEMBAKO	AA.365	75.150	150.300	Juli 2021 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
86	HJ.KHODIJAH	SEMBAKO	AA.366	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
87	NUR AISYAH	SEMBAKO	AA.367	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
88	ALI FAUZI	SEMBAKO	AA.368	75.150	150.300	Juli 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
89	ABD.RASYID	SEMBAKO	AB.379	75.150	150.300	Agustus - Desember 2024	751.500	15.030	766.530
90	M. TAUFIQ	SEMBAKO	AB.381	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
91	MARIYATI	SEMBAKO	AB.387	75.150	150.300	Oktober - Desember 2024	450.900	9.018	459.918
92	SYAHRONI	SEMBAKO	AB.388	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
93	AHMAD	SEMBAKO	AC.399	105.150	210.300	Desember 2024	210.300	4.206	214.506
94	H.PINDI	SEMBAKO	AE.400	120.150	240.300	Desember 2024	240.300	4.806	245.106
95	BAHRI	SEMBAKO	AC.404	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
96	HASMA	SEMBAKO	AD.412	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
97	HASRIWATI	SEMBAKO	AD.413	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
98	IBRAHIM	SEMBAKO	AD.414	75.150	150.300	Maret - Desember 2024	1.503.000	30.060	1.533.060
99	ABDUL LATIF	SEMBAKO	AD.415	75.150	150.300	November 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
100	HASMA	SEMBAKO	AD.416	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
101	SUHIRMAN	SEMBAKO	AD.417	75.150	150.300	Mei 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
102	AMBO ASSE	SEMBAKO	AE.419	75.150	150.300	November 2023 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
103	H.PINDI	SEMBAKO	AE.420	75.150	150.300	Juli - Desember 2024	901.800	18.036	919.836
104	MUHTAR	SEMBAKO	AE.422	75.150	150.300	Januari 2020 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
105	HASANUDDIN	SEMBAKO	AE.423	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
106	ARDIANTO	SEMBAKO	AE.425	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
107	UMI SURYATI	SEMBAKO	AE.427	75.150	150.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
108	RUDIYANTO	SEMBAKO	AF.430	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
109	ANDI MUNIARTY AMY	SEMBAKO	AF.432	75.150	150.300	Desember 2024	150.300	3.006	153.306
110	HJ.SITI AMINAH	SEMBAKO	AF.431	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
111	HJ. AGUSTINA	SEMBAKO	AF.437	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
112	AMINAH	SEMBAKO	AF.438	210.300	420.600	September - Desember 2024	1.682.400	33.648	1.716.048
113	TAKBIR	SEMBAKO	AG.439	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
114	NURUL ARIFAH	SEMBAKO	AG.441	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.472.100	29.442	1.501.542
115	SYARIFUDDIN M	SEMBAKO	AH.444	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.472.100	29.442	1.501.542
116	RAHMATUL ZUHRIAH	SEMBAKO	AH.445	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.472.100	29.442	1.501.542
117	DARMANI	SEMBAKO	AH.446	105.150	210.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
118	KARSINI	SEMBAKO	AH.447	105.150	210.300	Juli - Desember 2024	1.261.800	25.236	1.287.036
119	ARBAIN	SEMBAKO	AH.448	105.150	210.300	Februari - Desember 2024	2.313.300	46.266	2.359.566
120	HUBAIBAH MADUNG	SEMBAKO	AH.450	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
121	ALI AKBAR	SEMBAKO	AH.451	75.150	150.300	Juni - Desember 2024	1.052.100	21.042	1.073.142
122	HJ.SITI PAHIRA	SEMBAKO	AH.456	75.150	150.300	Oktober - Desember 2024	450.900	9.018	459.918
123	HERMANSYAH	SEMBAKO	AI.458	105.150	210.300	Juni - Desember 2024	1.472.100	29.442	1.501.542
124	DARMAWATI	SEMBAKO	AI.459	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
125	AISYAH	SEMBAKO	AI.462	75.150	150.300	Januari - Desember 2024	1.803.600	36.072	1.839.672
126	KAMARUDDIN	SEMBAKO	AI.463	105.150	210.300	Januari - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
127	HJ.HAMDANA	SEMBAKO	AI.465	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
128	JIMMI INDRAWAN	SEMBAKO	AI.467	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
129	ABDUL SAMAD	SEMBAKO	AJ.468	105.150	210.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.523.600	50.472	2.574.072
130	EDY RAHMAN	SEMBAKO	AJ.471	105.150	210.300	September - Desember 2024	841.200	16.824	858.024
130					**JUMLAH**		**Rp 200.848.200**	**Rp 4.016.964**	**Rp 204.865.164**
1	SYAMSUL BAHRI	KAIN	I. 152	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
2	HJ.BABA	KAIN	I.158	118.650	237.300	November - Desember 2024	474.600	9.492	484.092
3	MURNI	KAIN	I. 161	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
4	M. RUSLAN	KAIN	I. 162	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
5	SURIANI	KAIN	I. 163	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
6	HJ.RAMLAWATI	KAIN	I. 164	118.650	237.300	Maret 2020 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
7	H.KAMSIAH	KAIN	I. 165	118.650	237.300	Juni - Desember 2024	1.661.100	33.222	1.694.322
8	HJ. RABIAH	KAIN	I. 166	118.650	237.300	Agustus 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
9	RUSNAINI	KAIN	I. 167	118.650	237.300	Juli 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
10	SITI AISYAH	KAIN	I. 168	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
11	SUARDI	KAIN	I.170	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
12	FARIDA	KAIN	I. 171	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
13	H.IMRON	KAIN	I. 172	118.650	237.300	Desember 2024	237.300	4.746	242.046
14	RIZKY AULIA RAHMAN	KAIN	I.173	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
15	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 175	118.650	237.300	April 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
16	RENI SUMARNI	KAIN	I. 176	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
17	H.M.TAHER	KAIN	I. 177	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
18	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 178	118.650	237.300	April 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
19	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 179	118.650	237.300	Desember 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
20	PANDEF RUDIANTO	KAIN	I. 180	118.650	237.300	September - Desember 2024	949.200	18.984	968.184
21	H. MAS'UD / HAMKA	KAIN	I. 182	118.650	237.300	Desember 2020 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
22	H. SULEMAN	KAIN	I. 183	118.650	237.300	Desember 2020 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
23	HJ.RABIA	KAIN	I. 184	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
24	H.ALIAS	KAIN	I. 185	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
25	WAHID ISMAIL	KAIN	I. 190	118.650	237.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
26	RASIDAH	KAIN	I. 191	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
27	H. SUDIRMAN	KAIN	I.192	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
28	PATMAWATI	KAIN	I. 193	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
29	SUARDI	KAIN	I.194	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
30	ILLANG	KAIN	I. 195	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
31	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	I. 196	84.150	168.300	Maret 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
32	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	I. 197	84.150	168.300	Maret 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
33	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 198	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
34	MUHAMMAD SAING	KAIN	I. 199	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
35	HJ. YANTI DARMILA SARI	KAIN	I.200	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
36	MARIAMA HS	KAIN	I. 201	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
37	ZAINUDDIN	KAIN	I. 202	84.150	168.300	Juli - Desember 2024	1.009.800	20.196	1.029.996
38	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 203	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
39	H.ALIAS	KAIN	I. 204	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
40	H. ALIMING PADDA	KAIN	I. 205	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
41	SUPARWANTO	KAIN	I. 206	118.650	237.300	Januari - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
42	DAENG NISIAN	KAIN	I. 207	84.150	168.300	Agustus 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
43	H.MANSYUR	KAIN	I. 216	118.650	237.300	Januari - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
44	H.ALIMUDDIN	KAIN	I. 217	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
45	SISWANDI	KAIN	I. 218	118.650	237.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
46	NURHASANAH	KAIN	I. 219	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
47	RAHIM	KAIN	I. 220	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
48	ASRIL	KAIN	I. 224	118.650	237.300	Agustus 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
49	ARDIANSYAH	KAIN	I. 226	118.650	237.300	Agustus 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
50	RISNAWATI	KAIN	I. 229	84.150	168.300	Desember 2024	168.300	3.366	171.666

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
51	RISNAWATI	KAIN	I.230	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
52	LINDA	KAIN	I.232	84.150	168.300	Oktober - Desember 2024	504.900	10.098	514.998
53	H. TANGGILING	KAIN	I.233	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
54	SAIPUL ALAM	KAIN	I.234	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
55	NURSIAH	KAIN	I.235	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
56	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	I.236	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
57	NAHARENG	KAIN	I.237	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
58	HARIS.P	KAIN	I.238	118.650	237.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
59	HAJRAH	KAIN	I.239	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
60	HJ. JUMIATI	KAIN	I. 241	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
61	RAMLAH	KAIN	I. 242	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
62	HJ. MUSTIKA	KAIN	I. 243	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
63	SITI ZAKIAH A.Md	KAIN	I. 245	84.150	168.300	Februari 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
64	ARLIN	KAIN	I. 247	84.150	168.300	Juli 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
65	MURDIANSYAH	KAIN	I. 248	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
66	HJ.SUHE	KAIN	I.251	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
67	HJ.SUHE	KAIN	I.252	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
68	AMRI	KAIN	I. 254	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
69	HASANUDDIN, SE	KAIN	I. 257	84.150	168.300	Mei 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
70	H. ABDUL KADIR	KAIN	I. 259	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
71	MUH. SALIM	KAIN	I. 260	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
72	SUCITRA	KAIN	I. 261	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
73	SUCITRA	KAIN	I. 262	84.150	168.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
74	RUMAWATI	KAIN	I. 263	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
75	RAHIMI	KAIN	I. 267	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
76	ABDUL AZIS	KAIN	I. 268	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
77	MASRUR, S.Ag	KAIN	I. 270	118.650	237.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
78	PINI ERMAYADI	KAIN	I. 271	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
79	Hj. DAHLIA	KAIN	I. 273	118.650	237.300	September 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
80	NURASIAH	KAIN	I. 276	118.650	237.300	Mei - Desember 2024	1.898.400	37.968	1.936.368
81	SABRAN EFENDI	KAIN	I. 277	118.650	237.300	April - Desember 2024	2.135.700	42.714	2.178.414
82	ABDUL SAMAD	KAIN	I. 278	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
83	DARMAWATI	ATM	I. 279	118.650	237.300	Januari - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
84	MURNI	KAIN	I. 280	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
85	H.ACHMAD	KAIN	I. 281	152.000	304.000	Juli - Desember 2024	1.824.000	36.480	1.860.480
86	KAMARUDDIN	KAIN	I. 282	111.750	223.500	Juli 2023 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
87	M. RAFIQ / BUNIATI	KAIN	I.283	111.750	223.500	Mei - Desember 2024	1.788.000	35.760	1.823.760
88	HJ.JULIANA	KAIN	I.284	111.750	223.500	April 2022 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
89	MUHAMMAD ATANG	KAIN	I.285	118.650	237.300	Mei 2023 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
90	NIRWANA	KAIN	I. 286	111.750	223.500	April - Desember 2024	2.011.500	40.230	2.051.730
91	MASITA	KAIN	I. 287	111.750	223.500	Februari 2020 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
92	HJ. HASNAH	KAIN	I. 288	111.750	223.500	April 2023 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
93	MUH.RUSLAN	KAIN	I. 289	111.750	223.500	April 2023 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
94	ISMAIL	KAIN	I. 290	152.000	304.000	Juli 2023 - Desember 2024	3.648.000	72.960	3.720.960
95	RIAN HIDAYAT	KAIN	I.291	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
96	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I. 295	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
97	MUTIARA QALBI MURSYID	KAIN	I. 296	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
98	NURLIN. K	KAIN	I. 297	118.650	237.300	Oktober 2022 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
99	HJ.ASTATI	KAIN	I. 298	118.650	237.300	April - Desember 2024	2.135.700	42.714	2.178.414
100	HJ. HARDIANA	KAIN	I. 299	118.650	237.300	April - Desember 2024	2.135.700	42.714	2.178.414
101	H.MUCHRING	KAIN	I. 300	118.650	237.300	Oktober 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
102	HJ.NURHAIDA	KAIN	I. 301	118.650	237.300	April 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
103	HJ.RUSMIATI	KAIN	I. 302	118.650	237.300	April - Desember 2024	2.135.700	42.714	2.178.414
104	HJ.DARMATASIA	KAIN	I.304	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
105	AHMAD AKBAR	KAIN	I.311	84.150	168.300	Juli 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
106	AHMAD AKBAR	KAIN	I.312	84.150	168.300	Juli 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
107	H.M. RUSLI	KAIN	I.313	84.150	168.300	November - Desember 2024	336.600	6.732	343.332
108	H.M. RUSLI	KAIN	I.314	84.150	168.300	November - Desember 2024	336.600	6.732	343.332
109	BAYU ALAMSYAH	KAIN	I.315	84.150	168.300	November - Desember 2024	336.600	6.732	343.332
110	IRWAN TAHER	KAIN	I.316	84.150	168.300	April - Desember 2024	1.514.700	30.294	1.544.994
111	TOLLA	KAIN	I.317	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
112	TOLLA	KAIN	I. 318	118.650	237.300	Agustus - Desember 2024	1.186.500	23.730	1.210.230
113		KAIN	I. 319	84.150	168.300	Oktober - Desember 2024	504.900	10.098	514.998
114	HASMAH	KAIN	I. 320	84.150	168.300	Juli - Desember 2024	1.009.800	20.196	1.029.996
115	NURLIN. K	KAIN	I. 321	84.150	168.300	Juli 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
116	NORMAWATI	KAIN	I. 322	118.650	237.300	April - Desember 2024	2.135.700	42.714	2.178.414
117	HASANUDDIN	KAIN	I. 323	84.150	168.300	April - Desember 2024	1.514.700	30.294	1.544.994
118	NUR ALANG / FIRMAN	KAIN	I. 326	111.750	223.500	Februari - Desember 2024	2.458.500	49.170	2.507.670
119	HAIDIR ADHA	KAIN	I. 327	111.750	223.500	Februari 2023 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
120	H. M. RAFIQ	KAIN	I. 328	111.750	223.500	Juni 2022 - Desember 2024	2.682.000	53.640	2.735.640
121	HJ.HAYATI	KAIN	I. 329	111.750	223.500	Agustus - Desember 2024	1.117.500	22.350	1.139.850
122	HJ.NORHAYATI	KAIN	I.330	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
123	AISYAH	KAIN	I.331	118.650	237.300	Mei - Desember 2024	1.898.400	37.968	1.936.368
124	H.SUDIRMAN	KAIN	I. 335	152.000	304.000	November - Desember 2024	608.000	12.160	620.160
125	RABASIAH	KAIN	I. 337	84.150	168.300	April - Desember 2024	1.514.700	30.294	1.544.994
126	HJ.HASNAH	KAIN	I. 340	84.150	168.300	Desember 2024	168.300	3.366	171.666
127	H.ALIMING	KAIN	I. 341	84.150	168.300	April - Desember 2024	1.514.700	30.294	1.544.994
128	MUHAMMAD ARIS	KAIN	I. 343	118.650	237.300	Juli - Desember 2024	1.423.800	28.476	1.452.276
129	HJ. SALMAWATI	KAIN	I. 344	118.650	237.300	Januari 2021 - Desember 2024	2.847.600	56.952	2.904.552
130	H. NAWIR MD. NATIRO	KAIN	I. 346	84.150	168.300	Juni 2021 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
131	ATIN WARSI WIDIASTUTI	KAIN	I. 347	84.150	168.300	September - Desember 2024	673.200	13.464	686.664
132	ATIN WARSI WIDIASTUTI	KAIN	I. 348	84.150	168.300	September - Desember 2024	673.200	13.464	686.664
133	H. ABDULLAH	KAIN	I. 349	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
134	HARDIANSYAH	KAIN	I. 351	118.650	237.300	Maret - Desember 2024	2.373.000	47.460	2.420.460
135	MARIAMAH	KAIN	I. 352	84.150	168.300	Maret - Desember 2024	1.683.000	33.660	1.716.660
136	NOVI LOVI YANTI	KAIN	I. 353	84.150	168.300	Maret - Desember 2024	1.683.000	33.660	1.716.660
137	ANSIAR	KAIN	I. 358	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
138	MAHARIDIR WAHID	KAIN	I. 359	84.150	168.300	Januari 2023 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
139	BADARIA	KAIN	I. 360	84.150	168.300	Januari 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
140	HAMDANA	KAIN	I. 362	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
141	RUSMAN	KAIN	I. 363	84.150	168.300	Juli - Desember 2024	1.009.800	20.196	1.029.996
142	M.ARIS	KAIN	I.364	84.150	168.300	Juli - Desember 2024	1.009.800	20.196	1.029.996
143	ZUBAIDAH`	KAIN	I.365	84.150	168.300	Juli - Desember 2024	1.009.800	20.196	1.029.996
144	ANDI WAHE DG. PASORE	KAIN	I. 370	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
145	HJ. SANABONG	KAIN	I. 371	84.150	168.300	Januari - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
146	MARWATI	KAIN	I. 372	84.150	168.300	Oktober 2022 - Desember 2024	2.019.600	40.392	2.059.992
147	MADUNG	KAIN	I. 373	84.150	168.300	April - Desember 2024	1.514.700	30.294	1.544.994
148	ALIFUDDIN	KAIN	I. 374	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
149	FATMAWATI	KAIN	I. 375	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
150	ABDUL RAHIM	KAIN	I. 376	84.150	168.300	Agustus - Desember 2024	841.500	16.830	858.330
151	SAHARIA	KAIN	I. 377	84.150	168.300	Maret - Desember 2024	1.683.000	33.660	1.716.660
152	HAMIDA	KAIN	I. 379	84.150	168.300	Juni - Desember 2024	1.178.100	23.562	1.201.662
153	NUHRIAH	KAIN	II. 09	129.900	259.800	Mei 2022 - Desember 2024	3.117.600	62.352	3.179.952
154	ALBAR	KAIN	II. 11	60.150	120.300	Agustus 2022- Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
155	M. AIDIL	KAIN	II. 15	82.650	165.300	Januari 2023 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
156	MASIPAH	KAIN	II. 17	60.150	120.300	Januari - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
157	TRI RIVI ARIANTI	KAIN	II. 19	129.900	259.800	Januari 2023 - Desember 2024	3.117.600	62.352	3.179.952

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	TARIF / BULAN 2023	TARIF / BULAN 2024	BULAN	2024		JUMLAH
							POKOK	DENDA	
158	NURBAYA	KAIN	II. 20	82.650	165.300	Agustus 2023 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
159	MASIPAH	KAIN	II. 21	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
160	MAULANA	KAIN	II. 22	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
161	ADI SUNARYA	KAIN	II. 25	60.150	120.300	Januari 2022 - Desember 2024	1.443.600	28.872	1.472.472
162	FIRMAN	KAIN	II. 39	82.650	165.300	Februari - Desember 2024	1.818.300	36.366	1.854.666
163	FIRMAN	KAIN	II. 40	82.650	165.300	Februari - Desember 2024	1.818.300	36.366	1.854.666
164	FIRMAN	KAIN	II. 42	60.150	120.300	Februari - Desember 2024	1.323.300	26.466	1.349.766
165	HASLINDAWARI	KAIN	II.44	60.150	120.300	Agustus - Desember 2024	601.500	12.030	613.530
166	SITI MUALAFAH	KAIN	II. 75	60.150	120.300	April - Desember 2024	1.082.700	21.654	1.104.354
167	H. TANGGILING	KAIN	II.76	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
168	HJ.MURNI	KAIN	II.81	60.150	120.300	Juni - Desember 2024	842.100	16.842	858.942
169	MARHANA	KAIN	II.143	82.650	165.300	Juni 2023 - Desember 2024	1.983.600	39.672	2.023.272
170	KHOIRUL ANAM	KAIN	II. 146	60.150	120.300	Juli - Desember 2024	721.800	14.436	736.236
171	ABDUL RAHMAN	KAIN	II. 147	60.150	120.300	Maret - Desember 2024	1.203.000	24.060	1.227.060
172	SUPARNO	KAIN	II. 148	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	1.157.100	23.142	1.180.242
173	SUPARNO	KAIN	II. 149	82.650	165.300	Juli - Desember 2024	1.157.100	23.142	1.180.242
173					**JUMLAH**		**Rp 316.542.200**	**Rp 6.330.844**	**Rp 322.873.044**
1	HJ.YULIANA	RETAIL	05	1.629.750	3.259.500	September - Desember 2024	13.038.000	260.760	13.298.760
2	MUHAMMAD MUHLISIN	RETAIL	08	1.629.750	3.259.500	Juli - Desember 2024	19.557.000	391.140	19.948.140
2					**JUMLAH**		**Rp 32.595.000**	**Rp 651.900**	**Rp 33.246.900**
960					**TOTAL**		**Rp 1.191.894.900**	**Rp 23.837.898**	**Rp 1.215.732.798**

Mengetahui :
Kepala UPT. Pasar Sanggam Adji Dilayas

SYAIDINOOR,SE
NIP. 19800301 200701 1 006

KETERANGAN :
- Pindahan dari Segel
- Bermasalah - Oknum
- Pemutihan
- Pindahan dari Lunas



LAMPIRAN 4

BA PEMUSNAHAN OBAT, ALKES DAN BMHP – Kadaluarsa RSUD DR. Abdul Rivai

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Tlp/Fax (0554) 21098
Website : http://rsuddrabdulrivai.co.id / Email : rsuddrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB

BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT DAN BMHP

No. 445/ 002 /Pan-PBF/IF-RSU/XII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Nama Apoteker Pengelola Apotek	: apt. Syamsinar Mile, S.Si
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/48/XI/2022
Nama Ketua Tim Penghapusan	: apt. Wahyu Armadiyanti, S.Farm
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/30/VIII/2022
Nama Apotek	: Instalasi Farmasi RSUD Dr. Abdul Rivai
Alamat Apotek	: Jl. Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Kab. Berau

Dengan disaksikan oleh :

1.	Nama	: apt. Rima Yuliyanti, S.Farm, M.Sc
	NIP	: 19850726 201101 2 008
	Jabatan	: Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kab. Berau
2.	Nama	: apt. Arif Rudi Hermawan, S.Si, M.Si
	NIP	: 19731010 200312 1 014
	Jabatan	: Kepala Bidang Penunjang
3.	Nama	: Rudi Hatta, SKM
	NIP	: 19851211 201001 2 012
	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum RSUD Dr. Abdul Rivai
4.	Nama	: Arifuddin, Amd. TEM
	NIP	: 19860901 201001 1 004
	Jabatan	: Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Abdul Rivai
5.	Nama	: apt. Anisa Rahmasari, S. Farm
	Jabatan	: Apoteker Fungsional
6.	Nama	: apt. Jessie Elviasari, S. Farm
	NIP	: 19931209 202321 2 008
	Jabatan	: Administrasi Gudang Instalasi Farmasi

Telah melakukan pemusnahan Obat, Alat Kesehatan dan BMHP sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Tempat dilakukan pemusnahan: RSUD dr. Abdul Rivai, diserahkan kepada pihak Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak ketiga (PT. Limbah Bina Sejahtera) untuk dimusnahkan sebagai limbah farmasi.
Alasan melakukan pemusnahan: Obat Kadaluarsa dan rusak.

Demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.
Berita acara ini dibuat 4 (empat) dan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
2. Kepala Instalasi Pengolahan Air Limbah
3. Pihak ketiga (PT. Limbah Bina Sejahtera)
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Tlp/Fax (0554) 21098
Website : http://rsuddrabdulrivai.co.id / Email : rsuddrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB

Tanjung Redeb, 18 Desember 2024

Saksi-saksi

apt. Rima Yuliyanti, S.Farm, M.Sc
NIP. 19850726 201101 2 008

apt. Arif Rudi Hermawan, S.Si, M.Si
NIP. 197310102003121014

Rudi Hatta, SKM
NIP. 19851211 201001 2 012

Arifuddin, Amd. TEM
NIP. 19860901 201001 1 004

apt. Anisa Rahmasari, S. Farm

apt. Jessie Elviasari, S. Farm
NIP. 19931209 202321 2 008

Yang membuat berita acara

apt. Syamsinar Mile, S.Si
SIPA . 503/DPMPTSP/SIPA/48/XI/2022

Ketua Tim Penghapusan

apt. Wahyu Armadiyanti, S.Farm
SIPA. 503/DPMPTSP/SIPA/30/VIII/2022

DAFTAR OBAT / ALKES / BMHP RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2024

No	Nama Obat	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Harga Satuan	Total Harga
1	Epinefrin Inj	02-Mar-18	1	Ampul	97LF0006	Juni 2020	3.885,00	3.885,00
TOTAL								3.885,00
2	Assucryl 0	04-Nov-19	1	Pieces	804263	Apr-23	90.098,70	90.098,70
TOTAL								90.098,70
1	Digoxin	PO Depo	10	Tablet	0	Feb-23	130,00	1.300,00
2	Asam asetilsalisilat	PO Depo	2	Tablet	0	0	333,00	666,00
3	Asam Folat	PO Depo	2	Tablet	0	0	130,26	260,52
4	Candesartan 16 mg	PO Depo	8	Tablet	0	0	495,00	3.960,00
5	Furosemid	PO Depo	2	Tablet	0	0	221,00	442,00
6	Salbutamol 4 mg	PO Depo	7	Tablet	0	0	150,00	1.050,00
7	Simvastatin 20 mg	PO Depo	6	Tablet	0	0	205,33	1.232,01
TOTAL								8.910,53
1	Bisturi 15	23-Jul-19	15	Pieces	2291	28-Jan-24	4.440,00	66.600,00
2	Silk 2	23-Sep-19	60	Pieces	1906112	Jul-24	4.358,60	261.516,00
3	ETT 5.5	06-Nov-19	19	Pieces	Agu-31	Jul-24	27.246,06	517.675,14
4	FC 24 3Way	12-Des-19	3	Pieces	19J03	Maret 2024	105.467,00	316.401,00
5	FC 24 3Way	12-Des-19	1	Pieces	19G04	Juli 2024	105.467,00	105.467,00
TOTAL								1.267.659,14
1	Bisturi 11	20-Jan-20	34	Pieces	6863	Apr-24	4.195,80	142.657,20
1	NGT 8	26-Jun-20	2	Pieces	2204168	Jan-23	9.185,25	18.370,50
1	NGT 14	20-Apr-20	2	Pieces	2303472	Jul-22	9.292,90	18.585,80
2	Condom cath L	20-Apr-20	8	Pieces	9091988	Agu-24	5.500,00	44.000,00
3	Suction Catheter 12	20-Jan-20	4	Pieces	8101988	Sep-24	4.997,30	19.989,20
4	Suction Catheter 12	20-Jan-20	2	Pieces	23101988	Sep-24	4.997,30	9.994,60
5	Venosmil	26-Feb-20	4	Tablet	3349	Apr-24	10.378,50	41.514,00
6	Venosmil	20-Okt-20	6	Tablet	3383	Agu-24	10.378,50	62.271,00
TOTAL								357.382,30
1	Folley Catheteher 20 2 way	14-Jan-21	4	Pieces	19129	Jul-24	15.729,80	62.919,20
2	Folley Catheteher 24 3 way	19-Jan-21	4	Pieces	19-G-04K	Sep-24	105.467,00	421.868,00
3	Dimenhidrinate	06-Mei-21	660	Tablet	L21018N	Apr-24	159,00	104.940,00
4	Masker oxygen dewasa	12-Agu-21	8	Pieces	FY1907022	Agu-24	16.200,45	129.603,60
5	NGT 5	13-Sep-21	2	Pieces	2105286	Apr-24	9.185,25	18.370,50
6	Atropin Sulfat Inj	03-Des-21	2	Ampul	9621H0203A	Agustus 2024	3.778,02	7.556,04
TOTAL								745.257,34

DAFTAR OBAT / ALKES / BMHP RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2024

No	Nama Obat	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Harga Satuan	Total Harga
1	Euthyrox	27-Jan-22	25	Tablet	B60144K	Mar-24	728,56	18.213,98
2	Arixtra	31-Jan-22	1	Syringe	3017A	Mei 2024	246.750,00	246.750,00
3	Cetirizin	14-Mar-22	10	Tablet	00	Jan-24	77,28	772,80
4	Maxiflow Adult	16-Mar-22	17	Pieces	FY1907042	Jul-24	16.200,45	275.407,65
5	Folley Catheter 18 3 way	11-Jul-22	2	Pieces	19J06	Sep-24	105.467,00	210.934,00
6	MgSO4 20%	19-Agu-22	63	Colf	B73FS2A	Juni 2024	4.120,32	259.580,16
7	Valsartan tab	07-Sep-22	30	Tablet	F20163N	Juni 2024	776,00	23.280,00
8	Cefazolin Inj	15-Sep-22	80	Vial	53D0084	Maret 2024	9.490,00	759.200,00
9	Amiodaron inj	20-Sep-22	6	Ampul	NX02E101	Februari 2024	4.878,59	29.271,53
10	Valisanbe inj	26-Sep-22	3	Ampul	CG3404	Jul-24	20.979,00	62.937,00
11	Valisanbe inj	26-Sep-22	1	Ampul	CG3403	Jul-24	20.979,00	20.979,00
12	Vaclo	24-Okt-22	24	Tablet	5361156	Mei-24	11.686,80	280.483,20
13	Acarbose 100 mg	01-Nov-22	40	Tablet	5361148	Jun-24	928,00	37.119,98
14	Amiodaron inj	14-Nov-22	52	Ampul	NX02E104	April 2024	4.878,59	253.686,55
15	Etil Chlorida	24-Nov-22	1	Botol	25689	Rusak	205.649,70	205.649,70
16	Carbamazepin tab	09-Nov-22	165	Tablet	A21125	Juni 2024	706,00	116.490,71
17	Polynel Minidose	22 Agustus 2022	15	Strip	2PL60317	Sep-24	18.849,19	282.737,85
18	Acarbose 100 mg	28-Sep-22	140	Tablet	53F1005	Mei-24	928,00	129.919,93
TOTAL								3.213.414,04

1	KCL	06-Feb-23	1	Flacon	B98E52A	Mei 2024	3.789,53	3.789,53
2	Epinefrin Inj	09-Feb-23	10	Ampul	463440132	Oktober 2024	3.885,00	38.850,00
3	Vit B complex	09-Feb-23	100	Tablet	620269N	Jul-24	69,00	6.900,00
4	V-bloc	09-Mar-23	53	Tablet	KTVDCK2042	Agu-24	1.225,77	64.965,81
5	Glibenclamide 5 mg	20-Mar-23	400	Tablet	52426003	Feb-24	177,60	71.040,00
6	Dextrose 40%	27-Mar-23	1	Flacon	B80352A	November 2024	7.770,00	7.770,00
7	Neurotam 200mg/ml inj	04-Apr-23	2	Ampul	INRTB20049	April 2024	71.733,75	143.467,50
8	Orinox 120mg	09-Mei-23	53	Tablet	53J0396	Sep-24	10.326,91	547.326,23
9	Digoxin Tab	11-Mei-23	13.092	Tablet	A08621	Sep-24	130,00	1.701.960,00
10	Folamil Genio	23-Mei-23	5	Tablet	53K0066	Okt-24	3.838,38	19.191,90
11	Propilthiouracil	25-Mei-23	32	Tablet	51F0109	Jun-24	495,00	15.840,00
12	Bonefill Ortho	14-Jun-23	5	Box		Mei-24	908.182,00	4.540.910,00
13	Dopamin Inj	26-Jun-23	4	Ampul	5021922	Oktober 2024	4.264,00	17.056,00
14	Antiten 0,4 mL	27-Jun-23	8	Syringe	110222	April 2024	192.307,50	1.538.460,00
15	Antasida Doen	05-Jul-23	31	Tablet	210501109	Nov-24	154,24	4.781,44
16	Morfin Injeksi 10 mg/mL	17-Jul-23	20	Ampul	B30110J	Feb-24	34.385,05	687.701,00
17	KCl	21-Agu-23	1	Flacon	B71D54B	Rusak	3.789,53	3.789,53
18	Zinc Sulfat	29-Agu-23	7	Tablet	46496068	Nov-24	333,00	2.331,00
19	Gluvigen	07-Sep-23	1	Botol	D1A0102	Rusak	244.200,00	244.200,00
20	Trypan Blue	08-Nov-23	15	Pieces	RHB-095	Agustus 2024	66.600,00	999.000,00
21	Guedel airway 80 mm	22-Feb-22	1	Pieces	4071888	Jun-23	15.089,34	15.089,34
22	Kapsul 0	02-Nov-23	1000	Pieces		Rusak	91,02	91.020,00
23	Ibuprofen 200 mg	16-Nov-23	1413	Tablet	220809177	Agu-24	210,00	296.730,00
TOTAL								11.062.169,29

1	Hyperhep inj	12-Apr-23	85	Ampul	HJMAF00063	Maret 2024	1.389.350,26	118.094.772,10
TOTAL								118.094.772,10

2	Ofloxacin Tetes Telinga	20-Agu-24	3	Botol	TL0FCA32006	Rusak	24.750,23	74.250,68
TOTAL								74.250,68

DAFTAR OBAT / ALKES / BMHP RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2024

No	Nama Obat	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Harga Satuan	Total Harga
1	Fentanyl inj	21-Mar-24	1	Ampul	IJ23050	Pecah	29.500,47	29.500,47
2	Pethidin inj	10-Jun-24	1	Ampul	A40239J	Pecah	13.522	13.521,80
TOTAL								**43.022,27**

Tanjung Redeb, 18 Desember 2024

Diketahui,
Kepala Instalasi Farmasi

Syamsinar Mile, S.Si.,Apt
NIP. 19710820 200502 2 005

Kepala Gudang Farmasi

apt. Wahyu Armadiyanti, S. Farm
NIP. 19961205 202203 2 001

LAMPIRAN 5

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

DAN

LAPORAN AUDIT

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KEUANGAN	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 25

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
NERACA
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2f, 3	17,747,870,091	22,262,149,162
Piutang usaha	2g, 4	7,505,949,672	9,233,266,579
Persediaan	2h, 5	7,063,168,508	8,022,497,819
Pajak dibayar dimuka		3,881,889,316	-
Jumlah Aset Lancar		**36,198,877,587**	**39,517,913,560**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	2i, 6	164,242,818,669	169,278,872,838
Aset lain-lain	2j, 7	7,288,859,000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		**171,531,677,669**	**169,278,872,838**
JUMLAH ASET		**207,730,555,256**	**208,796,786,398**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2l, 8	8,340,000	13,470,900
Utang pajak	2m, 9	448,897,026	1,663,568,531
Beban yang masih harus dibayar	2n, 10	195,879,022	82,653,488
Utang lain-lain	2l, 11	403,416,894	56,096,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1,056,532,942**	**1,815,788,919**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang imbalan kerja	2p, 12	-	10,516,213,000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**-**	**10,516,213,000**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1,056,532,942**	**12,332,001,919**
EKUITAS	13		
Laba dari Imbalan Pasca Kerja	2p, 12	18,194,081,000	-
Kekayaan pemda yang dipisahkan		171,320,860,000	171,320,860,000
Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya		4,676,266,000	4,676,266,000
Tambahan modal disetor		528,460,000	528,460,000
Modal hibah		14,760,000	14,760,000
Dana cadangan		6,240,006,885	4,709,893,182
Penyisihan laba		4,887,159,842	4,465,270,871
Saldo laba (rugi)		812,428,587	10,749,274,426
Jumlah Ekuitas		**206,674,022,314**	**196,464,784,479**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**207,730,555,256**	**208,796,786,398**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	2q, 14	76,372,476,762	75,469,517,964
BEBAN USAHA	2q, 15	81,316,479,149	72,565,899,291
LABA (RUGI) USAHA		**(4,944,002,387)**	**2,903,618,673**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	2q, 16	1,033,015,739	3,687,540,945
Beban lain-lain	2q, 17	(752,247,053)	(83,055,100)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		**280,768,686**	**3,604,485,845**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**(4,663,233,701)**	**6,508,104,518**
Beban pajak penghasilan		-	1,234,492,380
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**(4,663,233,701)**	**5,273,612,138**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Laba dari Imbalan Pasca Kerja	Kekayaan pemda yang dipisahkan	Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Tambahan modal disetor	Modal hibah	Dana cadangan	Penyisihan Laba	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	**-**	**171,320,860,000**	**4,676,266,000**	**528,460,000**	**14,760,000**	**4,849,540,006**	**4,465,270,871**	**10,146,857,666**	**196,002,014,543**
Dana sosial pendidikan	-	-	-	-	-	(139,646,824)	-	-	(139,646,824)
Pajak asli daerah (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	(460,483,333)	(460,483,333)
Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	-	(394,700,000)	(394,700,000)
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	(3,816,012,044)	(3,816,012,044)
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	5,273,612,138	5,273,612,138
Saldo 31 Desember 2023	**-**	**171,320,860,000**	**4,676,266,000**	**528,460,000**	**14,760,000**	**4,709,893,182**	**4,465,270,871**	**10,749,274,426**	**196,464,784,479**
Laba dari Imbalan Pasca Kerja	**18,194,081,000**								18,194,081,000
Dana sosial pendidikan	-	-	-	-	-	421,888,971	-	-	421,888,971
Dana Pesiun						421,888,971			421,888,971
Pajak asli daerah (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Produksi						-		-	-
Cadangan Tujuan						210,944,485			210,944,485
Cadangan Umum						475,391,276			475,391,276
Penyisihan Laba							421,888,971		421,888,971
Pembagian Laba 2023	-	-	-	-	-	-	-	(5,273,612,138)	(5,273,612,138)
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	(4,663,233,701)	(4,663,233,701)
Saldo 31 Desember 2024	**18,194,081,000**	**171,320,860,000**	**4,676,266,000**	**528,460,000**	**14,760,000**	**6,240,006,885**	**4,887,159,842**	**812,428,587**	**206,674,022,314**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba (Rugi) Usaha	**(4,663,233,701)**	**5,273,612,138**
Koreksi atas pos-pos yang tidak mempengaruhi Kas dari kegiatan operasi :	-	
Penyusutan aset tetap	10,733,927,644	10,525,139,833
Koreksi Laba Ditahan	(5,273,612,138)	(2,214,418,233)
PERUBAHAN MODAL KERJA		
Kenaikan / Penurunan Aset Lancar		
(Kenaikan) / Penurunan piutang usaha	1,727,316,907	(1,437,378,889)
(Kenaikan) / Penurunan persediaan	959,329,311	3,111,919,375
(Kenaikan) / Penurunan pajak dibayar dimuka	(3,881,889,316)	-
Kenaikan / (Penurunan) utang usaha	(5,130,900)	13,470,900
Kenaikan / (Penurunan) beban yang masih harus dibayar	113,225,534	49,543,850
Kenaikan / (Penurunan) utang pajak	(1,214,671,505)	1,538,135,822
Kenaikan / (Penurunan) utang lainnya	347,320,894	(527,749,689)
Kenaikan / (Penurunan) utang sewa guna usaha	-	(266,684,991)
Kenaikan / (Penurunan) utang imbalan kerja	(10,516,213,000)	(3,281,878,000)
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Operasi	**(11,673,630,270)**	**12,783,712,116**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Pembelian (pengadaan) aset tetap	(5,697,873,475)	(10,002,944,506)
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Investasi	**(5,697,873,475)**	**(10,002,944,506)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Aset Imbalan Pasca Kerja	(7,288,859,000)	
Laba Imbalan Pasca Kerja	18,194,081,000	-
Kenaikan tambahan modal	-	(12,806,205)
Dana jasa produksi	421,888,971	(375,330,008)
Pajak asli daerah (PAD)	-	(368,386,667)
Cadangan dana	1,108,224,732	(139,646,824)
Penyisihan laba	421,888,971	-
Koreksi lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Pendanaan	**12,857,224,674**	**(896,169,704)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	(4,514,279,071)	1,884,597,905
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE	22,262,149,162	20,377,551,257
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERODE	**17,747,870,091**	**22,262,149,162**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pada awalnya merupakan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Berau yang didirikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 171/KPTS/CK/XII/1982 tanggal 4 Desember 1982 berkedudukan di Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Dengan Pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masa kini, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mengembangkan kemasa depan, Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Berau disesuaikan namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 41 Tahun 1993 tanggal 15 Maret 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tingkat II No.7 Tahun 1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pembentukan/Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Berau. PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau. Perusahaan merupakan perangkat dari Pemerintah Kabupaten Berau dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Kepala Daerah (Kuasa Pemilik Modal).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 ayat (2) dan ayat (4) peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melaksanakan perubahan entitas hukum maka peraturan daerah No. 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum tirta segah Kabupaten Berau Perlu diganti. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau terdiri dari:

- KPM;
- Dewan Pengawas; dan
- Direksi.

Sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 500/388/KPM/PSDA/2023 Tahun 2023 Periode 2023 -2027 Tanggal 27 November 2023 dan Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau, Surat Keputusan Bupati Nomor 500/417/KPM/PSDA/2023 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Periode 2024-2028 dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 39/DP-PERUMDAM/BRU/XII/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator dan Staf Administrasi Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, susunan pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja (lanjutan)

Dewan Pengawas

Ketua	:	Drh Mustakim Suharjana
Direktur	:	Saipul Rahman, S. Hut., M, ENVN.MAN,SC
Kabag. Keuangan & Adm	:	Syaipul Kasni Satiawan,SH
Kabag. Teknik	:	Syahril, SE., M.Si
Kabag. Hublang	:	Yan AT, SE
Kabag. Satuan Pengawas	:	Asra,ST

Karyawan

Bidang Umum	:	24 Orang
Bidang Teknik	:	39 Orang
Bidang Hublang	:	16 Orang
Karyawan/Pegawai Kontı	:	22 Orang
Outsorsing	:	23 Orang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian laporan keuangan

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas pubik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2011.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

b. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK ETAP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2023 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

c. Dasar penyusunan laporan keuangan

Perusahaan menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

c. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

d. Mata uang pelaporan, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oIeh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate)* pada saat terjadinya transaksi.

e. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
   a) Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow* subsidiaries);
   b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas;atau
   c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
iii Pihak tersebut adalah *joint ventures* di mana entitas tersebut merupakan *venture* ;
iv Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

e. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)

v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v);atau

vi Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu Jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai “Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa yang dilakukan atau barang dagangan yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Piutang lain-lain terutama merupakan pinjaman dan penggantian yang diberikan kepada pihak ketiga.

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah dan pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan dikelompokan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :
- Persediaan bahan kimia
- Persediaan bahan lainnya

Pembebanan pemakaian bahan kimia dan bahan instalasi kedalam pos biaya dicatat dengan metode FIFO.

i. Aset tetap

Aset tetap dibukukan menurut harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Perpajakan yakni sesuai SK Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1994 dengan penggolongan penyusutan sebagai berikut:

Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan presentase saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomisnya, kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* .

	Masa Manfaat
Tanah	-
Bangunan	20 Tahun
Instalasi Sumber Air	8 Tahun
Instalasi Pompa	8 Tahun
Instalasi Pengolahan Air	8 Tahun
Peralatan/Perlengkapan	8 Tahun
Kendaraan	8 Tahun
Inventaris/Perabot Kantor	4 Tahun

Aset tetap yang telah berakhir masa manfaatnya, maka pada tahun tersebut seluruh nilai buku yang tersisa akan disusutkan sekaligus .

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat di atribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK-ETAP.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

j. Aset tidak berfungsi

Aset tidak berfungsi merupakan aset tetap yang umur ekonomisnya (masa manfaatnya) telah habis. Namun beberapa aset tidak berfungsi tersebut masih digunakan dalam operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

k. Penurunan nilai aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dan informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

l. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

m. Pajak penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perseroan tidak mengakui pajak tangguhan.

n. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh Perusahaan karena diterimanya jasa selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

o. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Imbalan kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 (”PP 35/2021”). Sebelum PP 35/2021 diberlakukan, imbalan pascakerja dihitung dan dibayarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 (“UU 13/2003”) tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan ketentuan tersebut adalah program imbalan pasti.

Perusahaan mampu untuk menggunakan metode *projected unit credit* untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perusahaan dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi. Perusahaan tidak menyelenggarakan aset program imbalan pasti.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

q. Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate)* .

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

i. Penjualan barang
Penjualan barang dakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

b). Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas barang yang terjual;

c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
d). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan jasa
Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:
a). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
b). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
d). Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal;dan
e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Pendapatan penjualan air yang disajikan dalam laporan laba rugi diakui/dicatat dan dilaporkan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan sebagai berikut :
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara tunai, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara angsuran, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat dokumen tagihan diterbitkan atau pada saat kontrak sambungan baru ditandatangani.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda diterima.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

q. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

- Pendapatan yang berasal dari usaha kerjasama dengan pihak ketiga berupa royalti, *revenue sharing* , *production sharing* diakui atas dasar akrual. Sedang pendapatan berupa pembagian keuntungan dan deviden diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*basis akrual*). Pembebanan beban yang bersifat periodik seperti gaji, sewa, asuransi, harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka. Kecuali untuk listrik dan telepon dibukukan atas dasar *cash basis* .

r. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus di evaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dan peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan diterapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perusahaan mereviu umur manfaat nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

r. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan Pascakerja

Perusahaan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 ("UU 11/2020") mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut, Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja, Perusahaan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan - kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perusahaan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Kas		
Kas kecil	120,784,102	398,006,647
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	825,000
PT Bank Pembangunan Daerah Syariah	728,153	1,203,176
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,589,308,875	3,634,610,198
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,878,181,335	9,493,969,304
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	10,158,867,626	8,733,534,837
Jumlah	**17,747,870,091**	**22,262,149,162**

4. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang penjualan air	25,274,563,417	26,886,226,627
Piutang penjualan non air	560,273,500	560,273,500
Piutang Kemitraan	1,320,138,090	-
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(19,649,025,335)	(18,213,233,548)
Jumlah Piutang Usaha	**7,505,949,672**	**9,233,266,579**

Jumlah perincian piutang usaha bersih adalah sebagai berikut :

	Piutang Usaha 31 Desember	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	Jumlah Piutang Usaha Bersih
Piutang Usaha 2024	**27,154,975,007**	**(19,649,025,335)**	**7,505,949,672**
Piutang Usaha 2023	**27,446,500,127**	**(18,213,233,548)**	**9,233,266,579**

5. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan saldo persediaan dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Persediaan Bahan Operasi Kimia		
Persediaan Bahan Kimia Kaporit	71,078,240	35,447,971
Persediaan Bahan Kimia PAC	2,034,015,844	242,745,821
Persediaan Bahan Kimia Soda Ash	251,509,370	125,986,300
Persediaan Bahan Kimia Soda Caustic	2,640,000	2,640,000

5. PERSEDIAAN (LANJUTAN)

Akun ini merupakan saldo persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Bahan Operasi Lainnya		
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	225,149,144	678,815,744
Persediaan Suku Cadang Pompa	148,740,000	-
Persediaan Bahan Instalasi		
Persediaan Pipa-Pipa	1,106,920,921	1,149,701,413
Persediaan Water Meter	588,506,602	2,144,198,645
Persediaan Accessories	2,634,608,387	3,642,961,925
Jumlah	**7,063,168,508**	**8,022,497,819**

6. ASET TETAP

Akun ini merupakan saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Nilai Perolehan				
Tanah	54,752,618,910	-	-	54,752,618,910
Bangunan dan gedung	15,940,677,707	836,040,980	-	16,776,718,687
Instalasi sumber air	16,089,564,760	190,365,000	-	16,279,929,760
Instalasi pengolahan air	49,313,091,564	250,527,092	-	49,563,618,656
Transmisi dan distribusi	75,460,510,638	2,545,136,750	-	78,005,647,388
Peralatan/perlengkapan	1,188,662,726	39,055,998	-	1,227,718,724
Kendaraan/alat pengangkutan	3,521,346,000	878,565,000	-	4,399,911,000
Inventaris/perabot kantor	8,419,137,542	958,182,655	-	9,377,320,197
Jumlah	**224,685,609,847**	**5,697,873,475**	**-**	**230,383,483,322**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan gedung	2,754,220,006	803,754,872	-	3,557,974,878
Instalasi sumber air	4,856,905,140	652,760,505	-	5,509,665,645
Instalasi pengolahan air	13,411,552,070	2,288,278,389	-	15,699,830,459
Transmisi dan distribusi	25,975,034,712	5,523,515,383	-	31,498,550,095
Peralatan/perlengkapan	1,141,377,507	30,257,292	-	1,171,634,799
Kendaraan/alat pengangkutan	2,427,762,903	401,519,837	-	2,829,282,740
Inventaris/perabot kantor	4,839,884,671	1,033,841,366	-	5,873,726,037
Jumlah	**55,406,737,009**	**10,733,927,644**	**-**	**66,140,664,653**
Nilai Buku	**169,278,872,838**			**164,242,818,669**

6. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2023			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Nilai Perolehan				
Tanah	54,722,618,910	30,000,000	-	54,752,618,910
Bangunan dan gedung	14,278,853,354	1,661,824,353	-	15,940,677,707
Instalasi sumber air	15,024,459,478	1,065,105,282	-	16,089,564,760
Instalasi pengolahan air	48,384,827,472	928,264,092	-	49,313,091,564
Transmisi dan distribusi	72,009,976,121	3,450,534,517	-	75,460,510,638
Peralatan/perlengkapan	1,165,962,726	22,700,000	-	1,188,662,726
Kendaraan/alat pengangkutan	3,340,994,000	180,352,000	-	3,521,346,000
Inventaris/perabot kantor	5,754,973,280	2,664,164,262	-	8,419,137,542
Jumlah	**214,682,665,341**	**10,002,944,506**	**-**	**224,685,609,847**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan gedung	2,140,745,078	613,474,928	-	2,754,220,006
Instalasi sumber air	4,272,713,911	584,191,229	-	4,856,905,140
Instalasi pengolahan air	10,709,991,311	2,701,560,759	-	13,411,552,070
Transmisi dan distribusi	20,354,723,986	5,620,310,726	-	25,975,034,712
Peralatan/perlengkapan	1,103,928,139	37,449,368	-	1,141,377,507
Kendaraan/alat pengangkutan	2,093,293,871	334,469,032	-	2,427,762,903
Inventaris/perabot kantor	4,206,200,880	633,683,791	-	4,839,884,671
Jumlah	**44,881,597,176**	**10,525,139,833**	**-**	**55,406,737,009**
Nilai Buku	**169,801,068,165**			**169,278,872,838**

7. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo aset tetap tidak berfungsi dengan rincian sebagai berikut:

	2024	**2023**
Harga perolehan aktiva tetap tidak dimanfaatkan	2,653,645,006	2,653,645,006
Harga perolehan aktiva tetap yang rusak	270,548,318	270,548,318
Akumulasi penyusutan	(2,924,193,324)	(2,924,193,324)
Aset Imbalan Pasca Kerja	7,288,859,000	-
Nilai Buku	**7,288,859,000**	**-**

8. UTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo utang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2024	**2023**
Utang Usaha	8,340,000	13,470,900
Nilai Buku	**8,340,000**	**13,470,900**

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan saldo pajak dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pajak dimuka Pasal 25	542,600,301	-
PPN lebih bayar	3,339,289,015	-
Jumlah	**3,881,889,316**	**-**

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan saldo utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Utang PPh Pasal 21	-	249,578,714
Utang PPh Pasal 23	2,427,678	25,080
Utang PPh Pasal 25	446,469,348	-
Utang PPh Pasal 29	-	932,320,950
PPN Masukan Yang Ditahan	-	481,643,787
Jumlah	**448,897,026**	**1,663,568,531**

b. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	**(4,663,233,701)**	**6,508,104,518**
Koreksi fiskal		
Perbedaan Temporer:		
- Beban (Manfaat) Imbalan Pasca Kerja	(307,307,000)	(2,909,652,000)
- Beban Penyisihan Piutang	1,435,791,787	2,381,662,734
- Iuran Pensiun Dapenma	-	-
- Pembayaran Manfaat Pensiun	343,793,000	(372,226,000)
Jumlah Perbedaan Temporer	**1,472,277,787**	**(900,215,266)**
Perbedaan Tetap		
- Beban Olahraga	97,803,400	50,771,300
- Bantuan Dan Sumbangan	213,614,096	258,917,000
- Beban Pajak		18,261,999
- Beban Pajak Jasa Giro	52,547,177	81,132,600
Jumlah Perbedaan Tetap	**363,964,673**	**607,799,389**

9. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Penghasilan yang dikenakan pajak final :		
- Pendapatan Jasa Giro	**(262,470,839)**	**(405,662,945)**
Laba (Rugi) menurut fiskal	(3,089,462,080)	5,611,329,206
Penghasilan kena pajak dibulatkan	**(3,089,463,000)**	**5,611,329,000**
Beban Pajak penghasilan badan	**-**	**1,234,492,380**
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(542,600,301)	(302,171,430)
Pajak penghasilan badan (lebih) kurang bayar - PPh Pasal 29	**(542,600,301)**	**932,320,950**

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Hutang Non Usaha	195,879,022	82,653,488
Jumlah	**195,879,022**	**82,653,488**

11. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan saldo utang lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Titipan materai	11,057,100	-
Jaminan masa pemeliharaan	77,334,594	-
Titipan retribusi kebersihan	315,025,200	56,096,000
Jumlah	**403,416,894**	**56,096,000**

12. UTANG IMBALAN KERJA

Pencatatan Liabilitas imbalan kerja untuk tahun 2024 didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Budi Ramdani dengan No. 436/ETAP/KKA-BRI/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang didalam laporannya menggunakan metode ”Projected Unit Credit” dan asumsi utama sebagai berikut :

	2024	2023
- Kenaikan gaji	7,10 % per tahun	7,00 % per tahun
- Tingkat diskonto	6,97% % pertahun	6,62 % pertahun
- Rata-rata usia pegawai	43,28 tahun	42,74 tahun
- Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
- Jumlah karyawan	80	83

Tabel berikut menyajikan komponen imbalan paska kerja karyawan yang diakui di dalam neraca dan beban-beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi.

12. UTANG IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

a. Kewajiban dan (Kekayan) yang diakui di neraca

	2024	2023
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	10,905,222,000	10,516,213,000
Nilai Wajar Aset Program	(18,194,081,000)	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui - Vested	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui - Non Vested	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang belum diakui	-	-
Liabilitas yang diakui dalam Neraca	**(7,288,859,000)**	**10,516,213,000**

b. Rekonsiliasi Jumlah yang diakui dalam Neraca

	2024	2023
Liabilitas (Kekayaan) pada awal tahun	10,516,213,000	13,798,091,000
Beban (Pendapatan)	(307,307,000)	(2,909,652,000)
Aset Program/ investasi	1,208,601,000	-
Keuntungan (Kerugian) nilai aset program	(168,492,000)	-
Realisasi pembayaran manfaat	(343,793,000)	(372,226,000)
Liabilitas (Kekayaan) pada akhir tahun	**10,905,222,000**	**10,516,213,000**

c. Beban (Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi

	2024	2023
Beban Jasa Kini	804,399,000	785,052,000
Harapan Dari Hasil Investasi	(1,208,601,000)	-
Beban Bunga	696,415,000	973,524,000
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	(599,520,000)	(4,668,228,000)
Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca Kerja	**(307,307,000)**	**(2,909,652,000)**

13. EKUITAS

a. Kekayaan Pemda yang dipisahkan

	2024	2023
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2011	2,000,000,000	2,000,000,000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2009	2,700,000,000	2,700,000,000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2010	1,000,000,000	1,000,000,000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2001,2002	9,000,000,000	9,000,000,000
Penyertaan Modal tahun 2018	149,460,860,000	149,460,860,000
Penyertaan Modal tahun 2020	5,900,000,000	5,900,000,000
Penyertaan Modal tahun 2021	1,260,000,000	1,260,000,000
Jumlah	**171,320,860,000**	**171,320,860,000**

13. EKUITAS (LANJUTAN)

b. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya

	2024	2023
Bantuan penyertaan modal tahun 2011	4,676,266,000	4,676,266,000
Jumlah	**4,676,266,000**	**4,676,266,000**

c. Tambahan modal disetor

	2024	2023
Tambahan modal disetor (Tax Amnesty)	528,460,000	528,460,000
Jumlah	**528,460,000**	**528,460,000**

d. Modal hibah

	2024	2023
Computer	3,500,000	3,500,000
Printer	450,000	450,000
Mesin Pack	1,800,000	1,800,000
Computer	3,500,000	3,500,000
Kursi Putar	850,000	850,000
Kursi Lipat	80,000	80,000
Kursi Lipat	80,000	80,000
TV 20 "	1,500,000	1,500,000
Digital GS. 2500 Parabola	3,000,000	3,000,000
Jumlah	**14,760,000**	**14,760,000**

e. Dana cadangan

	2024	2023
Dana Cadangan Umum	3,452,238,524	2,976,847,248
Dana Cadangan Tujuan	210,944,485	-
Dana Pensiun	421,888,971	-
Dana Sosial Pendidikan	2,154,934,905	1,733,045,934
Jumlah	**6,240,006,885**	**4,709,893,182**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (b) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

13. EKUITAS (LANJUTAN)

e. Dana cadangan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (b) dan Juncto Peraturan Bupati Berau No. 13 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau bahwa laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

Seiring dengan peraturan yang berlaku, terdapat perubahan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2021 Bab VI pasal 56 mengenai Tata Cara Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau. Berdasarkan poin nomor 2 pada peraturan tersebut, pembagian laba yang telah dikurangi dengan Dana Cadangan Umum sebesar 20%, akan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

a. bagian laba, untuk APBD sebesar 35%
b. jasa produksi sebesar 30%
c. dana sosial dan pendidikan sebesar 10%
d. dana penyisihan laba sebesar 10%
e. cadangan sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 10%
f. tantiem dan bonus sebesar 5%

Pembagian ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan laba dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sosial dan pembangunan daerah serta kesejahteraan karyawan.

f. Penyisihan laba

	2024	2023
Penyisihan laba	4,887,159,842	4,465,270,871
Jumlah	**4,887,159,842**	**4,465,270,871**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (e) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penyisihan laba. Penyisihan laba dialokasikan untuk dana cadangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (b) dan Juncto Peraturan Bupati Berau No. 13 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau bahwa laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

g. Laba dari Imbalan Pasca Kerja

	2024	2023
	18,194,081,000	--
Jumlah	**18,194,081,000**	**-**

14. PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan saldo pendapatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan penjualan air		
Harga Air	67,913,415,350	65,431,658,850
Jasa Administrasi	2,077,545,000	1,945,250,000
Penjualan Air Mobil Tangki	4,800,000	1,683,000
Pendapatan non air		
Pendapatan Sambungan Baru	5,105,453,385	7,169,865,460
Pendapatan Penyambungan Kemball	314,474,300	133,270,800
Pendapatan Denda	781,492,000	575,882,120
Pendapatan Balik Nama	4,100,000	4,200,000
Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	-	16,000
Pendapatan Pemindahan Jaringan /Meter	171,196,727	207,691,734
Jumlah	**76,372,476,762**	**75,469,517,964**

15. BEBAN USAHA

Akun ini merupakan saldo beban usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Sumber Air		
Beban Operasi Sumber Air	7,752,609,819	5,353,211,499
Beban Pemeliharaan Sumber Air	226,958,300	357,073,762
Beban Air Baku	219,005,833	265,613,228
Beban Penyusutan Sumber Air	652,760,505	584,191,229
Beban Pengolahan Air		
Beban Operasi Pengolahan Air	25,066,190,825	20,971,630,273
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	528,550,216	783,377,966
Beban Penyusutan Pengolahan Air	2,288,278,389	2,701,560,759
Beban Transmisi dan Distribusi		
Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	2,448,939,112	654,424,328
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	2,081,912,074	4,432,817,386
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	5,523,515,383	5,620,310,726
Jumlah	**46,788,720,456**	**41,724,211,156**

15. BEBAN USAHA (LANJUTAN)

	2024	2023
Jumlah sebelumnya	***46,788,720,456***	***41,724,211,156***
Beban Umum dan Administrasi		
Beban Pegawai	16,203,969,377	14,422,568,407
Beban Dana Representatif Direksi	350,000,000	255,000,000
Beban Kantor	4,207,927,595	3,138,860,613
Beban Hubungan Langganan	1,448,215,936	969,234,939
Beban Penelitian dan Pengembangan	594,430,384	577,851,384
Beban Keuangan	-	26,985,009
Beban Pemeliharaan	1,205,875,076	1,355,644,812
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	1,435,791,787	2,381,682,734
Beban (manfaat) Imbalan Kerja	804,399,000	-
Rupa-Rupa Beban Umum	6,007,776,171	6,094,783,118
Beban Penyusutan	2,269,373,367	1,619,077,119
Jumlah	**81,316,479,149**	**72,565,899,291**

Beban pegawai termasuk Honor Dewan Pengawas dan Beban Gaji serta Tunjangan Direksi, masing-masing dalam setahun sebagai berikut:
Beban Gaji dan Tunjangan Direksi Rp602.329.910,-
Beban Honorarium Dewan Pengawaas Rp635.402.566,-

Beban Reprensentasi sebesar Rp350.000.000,- adalah beban untuk pengeluaran entertiment relasi Perusahaan dan operasional direksi dalam rangka kepentingan Perusahaan.

16. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo pendapatan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Jasa Giro	262,470,839	405,662,945
Pendapatan Lainnya	2,532,900	-
Keuntungan/Kerugian Aktuaria	768,012,000	3,281,878,000
Jumlah	**1,033,015,739**	**3,687,540,945**

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2024	2023
Beban Administrasi Bank	1,978,376	830,000
Pajak Jasa Giro	52,547,177	81,132,600
Beban Cek	825,000	550,000
Beban Payroll	481,500	542,500
Beban Bunga Imbalan Kerja	696,415,000	-
Jumlah	**752,247,053**	**83,055,100**

18. KOREKSI LABA DITAHAN

Koreksi laba ditahan adalah penyesuaian saldo piutang yaitu dengan mengurangi saldo piutang atas uang retribusi, denda, dan angsuran sambungan rumah (biaya pasang baru). Manajamen melakukan penyesuaian atas saldo tersebut dikarenakan:

a. Uang retribusi dan denda bukan merupakan hak Perusahaan;
b. Pengakuan pendapatan atas angsuran sambungan rumah diakui sesuai dengan progress pembayaran.

19. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Peraturan Bupati Berau nomor 10 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau menetapkan tarif penyesuaian atas Peraturan Bupati Berau nomor 713 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Penyesuaian tarif ini dilakukan karena adanya ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat atas perubahan tarif yang ada, meskipun sudah dilakukan sosialisasi pada tanggal 2 Januari 2025. Maka dari itu, DPRD Kabupaten Berau mengundang pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau untuk menghendaki tarif tersebut kembali menggunakan tarif yang lama. Pada 14 Januari 2025, Bupati Berau menerbitkan SK Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2025 dan mencabut SK Bupati Berau Nomor 713 Tahun 2024. Dengan diterbitkannya SK tersebut, maka tarif kembali menggunakan tarif tahun 2011.

20. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 26 Maret 2025.

LAMPIRAN 6

LAPORAN KEUANGAN PT HUTAN SANGGAM BERAU TAHUN ANGGARAN 2024

PT HUTAN SANGGAM BERAU

LAPORAN KEUANGAN

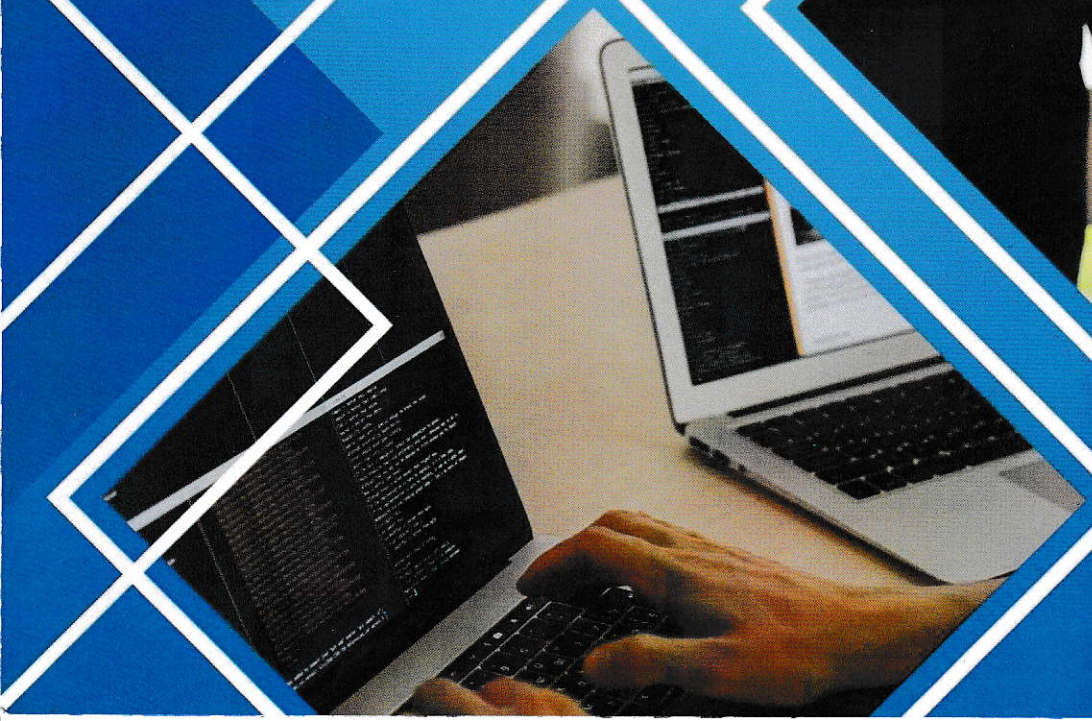
UNTUK TAHUN

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2024

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN





Daftar isi

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN:

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1

LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 4

LAPORAN ARUS KAS 5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 6

PT. HUTAN SANGGAM BERAU
Jl. Padat Karya RT. 01 Kel. Gn. Panjang Telp. (0554) 2022865
TANJUNG REDEB – KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT HUTAN SANGGAM BERAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	Roby Maula, S.Hut
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. Teuku Umar Komp Pengayoman No. 13 RT. 013 Tanjung Redeb – Berau
	No. Tlpn / Hp	:	0813 1655 5783
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Adi Dhatta Arief
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. AW Syahranie Perum Villa Tamara RT 033 Samarinda Ulu – Samarinda
	No. Tlpn / Hp	:	0811 584 845
	Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Hutan Sanggam Berau
5. Laporan keuangan tahun 2024 hanya diaudit KAP Thoufan dan Rosyid dan tidak ada akuntan publik lain yang mengaudit tahun buku 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 10 Februari 2025

Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Umum
Roby Maula, S.Hut	Adi Dhatta Arief



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00003/3.0307/AU.1/01/1974-1/1/II/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Hutan Sanggam Berau
Jl. Padat Karya RT 01 Kel. Gunung Panjang
Tanjung Redeb, Kalimantan Timur

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hal Lain
Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau tanggal 31 Desember 2023 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Auditor Independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 07 Februari 2024.

KAP. THOUFAN DAN ROSYID



Tenni Ginting, SE., Ak., CA., CPA., ACPA
Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 1974.

00003

10 Februari 2025



Kantor Pusat :
Address Dinoyo Permai Timur, Kav. 7 A-4 Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :
Address Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. Dl. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 771 769
Fax +62541 771 769
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024	2023
		Rp	Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2g.4	1.129.261.124	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	2h.5	-	208.102.277
Piutang Pajak	2n.6	715.993.433	575.795.425
Piutang Lain-lain	2h.7		
Pihak Berelasi		88.083.971	59.235.472
Pihak Ketiga		2.668.865.242	660.363.126
Biaya Dibayar Dimuka	2i.8	14.583.333	14.802.083
Uang Muka	2i.9	55.687.000	188.490.170
Persediaan	2j.10	-	7.562.522
Jumlah Aset Lancar		**4.672.474.103**	**3.364.042.834**
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi - setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp. 466.504.256,- Tahun 2024			
Rp. 409.958.285,- Tahun 2023	2k.11	664.415.161	720.961.131
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp 3.223.002.885,- Tahun 2024			
Rp 2.955.105.869,- Tahun 2023	2l.12	2.435.181.917	2.547.664.594
Aset Pajak Tangguhan	13	194.706.263	154.153.008
Aset Lain-lain	14	2.691.205.484	3.034.183.939
Jumlah Aset Tidak Lancar		**5.985.508.825**	**6.456.962.674**
TOTAL ASET		**10.657.982.928**	**9.821.005.507**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024	2023
		Rp	Rp
KEWAJIBAN & EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	-	-
Utang Pajak	2n.16	224.627.401	104.484.231
Beban Akrual	17	3.219.667.678	2.281.071.613
Utang Lain - lain	18	67.169.319	116.408.277
Jumlah Kewajiban Lancar		**3.511.464.398**	**2.501.964.121**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	1.312.619.246	1.467.754.160
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	19	1.669.307.644	1.593.980.040
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		**2.981.926.890**	**3.061.734.200**
Total Kewajiban		**6.493.391.287**	**5.563.698.321**
EKUITAS			
Modal Dasar - 6.000 Lembar Saham, Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1.500 Lembar Saham	20	1.500.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Komprehensip Lainnya		239.794.510	232.369.400
Cadangan Umum		2.369.090.977	2.467.620.669
Saldo Laba		55.706.153	57.317.117
Jumlah Ekuitas		**4.164.591.641**	**4.257.307.186**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**10.657.982.928**	**9.821.005.507**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Roby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024	2023
		Rp	Rp
PENDAPATAN	2o.21	8.255.193.300	8.525.585.656
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	2o.22	(3.995.433.408)	(4.459.557.418)
Laba (Rugi) Kotor Usaha		**4.259.759.892**	**4.066.028.238**
BEBAN USAHA	2o.23		
Beban Personalia		(2.775.102.707)	(2.815.402.279)
Beban Administrasi dan Umum		(1.588.114.693)	(1.397.267.502)
		(4.363.217.400)	**(4.212.669.781)**
Laba (Rugi) Usaha		**(103.457.508)**	**(146.641.542)**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	2o.24		
Pendapatan Non Operasional		169.459.046	230.075.505
Beban Non Operasional		(15.500.105)	(28.681.763)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**153.958.941**	**201.393.742**
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	25	**50.501.433**	**54.752.200**
BEBAN PAJAK	2o.26		
Beban Pajak Kini		(37.442.797)	(38.440.112)
Beban PajakTangguhan		42.647.517	41.005.029
Jumlah Beban Pajak		**5.204.720**	**2.564.917**
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	27	**55.706.153**	**57.317.117**
Penghasilan Komprehensif Lainnya :			
Pengakuan Kembali Atas Program Imbalan Pasca Kerja		(35.222.407)	(139.022.545)
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		2.094.262	133.853.109
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya, Setelah Pajak		**(33.128.145)**	**(5.169.436)**
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		**22.578.009**	**52.147.681**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Roby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	Modal Saham	Laba Komprehensif Lain	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo, 31 Desember 2022		**1.500.000.000**	**237.538.836**	**1.237.787.010**	**2.457.476.790**	**5.432.802.636**
Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2022		-	-	1.228.738.395	(1.228.738.395)	-
Deviden	28	-	-	-	(1.228.738.395)	(1.228.738.395)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	57.317.117	57.317.117
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	1.095.264	-	1.095.264
Laba (Rugi) Aktuaria Yang Belum Diakui		-	(139.022.545)	-	-	(139.022.545)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	133.853.109	-	-	133.853.109
Saldo, 31 Desember 2023		**1.500.000.000**	**232.369.400**	**2.467.620.669**	**57.317.117**	**4.257.307.186**
Koreksi Pembayaran Denda PBB Tahun 2023		-	-	(98.529.693)	-	(98.529.693)
Deviden Tahun 2023	28	-	-	-	(57.317.117)	(57.317.117)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	55.706.153	55.706.153
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	0	-	0
Laba (Rugi) Aktuaria Yang Belum Diakui		-	(35.222.407)	-	-	(35.222.407)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	42.647.517	-	-	42.647.517
Saldo, 31 Desember 2024		**1.500.000.000**	**239.794.510**	**2.369.090.977**	**55.706.153**	**4.164.591.641**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan Kas Dari Pelanggan	6.665.707.046	8.623.730.499
- Penerimaan Bunga Bank	4.439.051	30.590.379
- Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Agen	(3.140.480.461)	(6.284.299.210)
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(3.837.287.314)	(4.055.979.457)
- Pembayaran Pajak Penghasilan	-	(599.876.460)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**(307.621.678)**	**(2.285.834.249)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(155.414.339)	(604.606.075)
Arus Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Investasi	**(155.414.339)**	**(604.606.075)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembagian Deviden	(57.317.117)	(1.228.738.395)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(57.317.117)**	**(1.228.738.395)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(520.353.134)**	**(4.119.178.719)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.649.691.758	5.768.870.477
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.129.338.624**	**1.649.691.758**
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Terdiri Dari :		
Kas	292.426.956	267.106.637
Bank	836.834.168	1.382.585.121
Jumlah	**1.129.261.124**	**1.649.691.758**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Hutan Sanggam Berau (Perusahaan) yang semula bernama PT. Hutansanggam Laban Lestari didirikan dengan akta Nomor 02 tanggal 03 April 2003 yang dikeluarkan oleh Tn. Sony Thio, S.H. Notaris di Berau dan disahkan berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-12138.HT.01.01.TH 2003 ditetapkan tanggal 02 Juni 2003 dan dipublikasikan pada suplemen No. 64 dalam Lembaran Berita Negara Indonesia No. 6684 tanggal 12 Agustus 2003.
Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Hutan Sanggam Berau Nomor 59 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh M. Fahmi Azis, SH., M.Kn. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Notaris di Berau. Akta perubahan pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0147236.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 19 Juli 2024.

Rekomendasi dan Perizinan

- Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.250.996.2-725.000 terdaftar sejak 19 Juni 2003
- Nomor Induk Berusaha	:	0108220037819 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2022
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	No: S-56KT/WPJ.14/KP.0503/2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh KKP Madya Balikpapan

b. Bidang Usaha

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 22 Juli 2022 maksud dan tujuan Perseroan ini adalah, menjelankan usaha-usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perusahaan bertujuan untuk turut melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pertanian
   - Pertanian Raman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan meliputi perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan ayam lokal dan persilangannya, pembibitan dan budidaya Itik dan atau bebek, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya
   - Pengolahan Kehutanan dan Penebangan, meliputi pemanfaatan kayu hutan, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, perkebunan karet dan tanam penghasil getah lainnya.

2. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
   - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, meliputi perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket atau supermarket atau hypermarket, dan perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik

3. Bidang Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum
   - Penyedia Makanan dan Minuman, meliputi jasa boga untuk suatu *event* tertentu *(Event Catering)*

4. Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
   - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, meliputi aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya

1. GAMBARAN UMUM

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 Juni 2024 dan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Juni 2023 susunan pengurus perusahaan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

		Tahun 2024	Tahun 2023
Dewan Komisaris			
- Komisaris Utama	:	Moch. Farid Januardi	Joko Rianto, S.Hut
- Komisaris	:	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si
Dewan Direksi			
- Direktur Utama	:	Roby Maula, S.Hut	Roby Maula, S.Hut
- Direktur Operasional	:	Ir. Gunawan Setiyani	Ir. Gunawan Setiyani
- Direktur Keuangan Umum	:	Adi Dhatta Arief, SH	Adi Dhatta Arief, SH

Dalam menjalankan kegiatan usaha, dewan direksi mengangkat staf dan karyawan sesuai dengan kebutuhan.

d. Karyawan

Jumlah karyawan rata-rata perusahaan adalah sebanyak 24 orang tahun 2024 dan *25* orang untuk tahun 2023.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan menggunakan metode langsung *(direct method)* .

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Amandemen PSAK 207 "Laporan arus kas"
Amandemen ini mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode.

Amandemen PSAK 240 "Properti investasi"
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 228 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran investasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap asosiasi atau ventura bersama saat pengakuan awal.

Amandemen PSAK 216 "Aset tetap"
Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

Amandemen PSAK 212 "Pajak penghasilan"
Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas aset tersebut. Amandemen tersebut dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

Amandemen PSAK 102 "Pembayaran berbasis saham"
Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrument ekuitas. Amandemen ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 102 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

Amandemen PSAK 112 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"
Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas lain yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

PSAK 241 "Agrikultur"
Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK 104 "Kontrak asuransi"
Amandemen ini merupakan amandemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamandemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan"
PSAK 109 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.

Sementara ini perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk aset-aset tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" (Lanjutan)
Aset keuangan lainnya yang dimiliki mencakup:

a. Instrumen ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya tersedia
b. Investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 109, dan
c. Instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 109.

Oleh karena itu, perusahaan tidak mengharapkan pedoman baru tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya.
Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut.

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntasi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 109. Dengan demikian, perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktifitas lindung nilai.

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 109. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 115 Pendapatan dari kontrak pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

PSAK 115 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini sebelumnya dikenal dengan PSAK 72 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau

Entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut.

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi :

a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
e. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 116 "Sewa"
Amandemen ini disahkan di 16 Desember 2020 dan berlaku efektif 1 Januari 2022. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas uang telah menerapkan PSAK 116. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya. Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan perusahaan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kerugian akibat selisih kurs yang disebabkan karena devaluasi atau kondisi yang tidak normal, maka kerugian tersebut dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp	Rp
Kurs USD 1	16.162	15.439

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan
Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

iii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi;
b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor).

(a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaanya.

h. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 360 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang telah turun nilainya. Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka Pembelian diperhitungkan sesuai pembayaran dimuka dengan harga pembelian/nilai kontrak yang diperjanjikan pada saat penerimaan barang/jasa. Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Persediaan

Persediaan dinilai dengan biaya perolehannya, atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah *(the lower of cost or net realizable value)* . Biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan harga pembelian.

k. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh penyewa melalui sewa operasional untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dinyatakan berdasarkan model harga perolehan yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

l. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset Tetap dinilai dengan harga perolehan dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan dengan taksiran masa manfaat masing-masing kelompok, yaitu sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Prosentase
Tanah	-	Tidak Disusutkan
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun	10%
Kendaraan	4 / 8 Tahun	25% / 50%
Inventaris Kantor	4 / 8 Tahun	25% / 50%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.

m. Liabilitas yang Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasca Kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No.219 tentang, "Imbalan Kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal menundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.
Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

o. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dicatat berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak kedua yang jumlah kubikasinya m³ diperhitungkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan penerbitan *invoice* .

Beban-beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dinyatakan dalam periode diakuinya pendapatan. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dialokasikan secara sistematis sepanjang periode diperoleh manfaatnya. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual* basis).

p. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2024 pada tanggal 10 Februari 2025

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 (Revisi 2017) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 29a.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto aset tetap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan pada Catatan 12.

	2024	2023
	Rp	Rp
4. Kas dan Setara Kas		
Terdiri dari :		
- **Kas**		
- Kas Tanjung	292.426.956	267.106.637
Jumlah	**292.426.956**	**267.106.637**
- **Bank**		
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Rek. No. 148-00-04119536	713.718.542	911.928.090
- Bank Muamalat Rek. No. 6070014732	123.115.626	470.657.031
Jumlah	**836.834.168**	**1.382.585.121**
Total	**1.129.261.124**	**1.649.691.758**
5. Piutang Usaha		
Piutang Usaha Pihak Ketiga		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	-	208.102.277
Jumlah	**-**	**208.102.277**
6. Piutang Pajak		
- PPh Pasal 28 Tahun 2023	575.795.425	575.795.425
- PPh Pasal 28 Tahun 2024	140.198.008	-
Jumlah	**715.993.433**	**575.795.425**
7. Piutang Lain-lain		
Terdiri dari :		
Pihak Berelasi		
- Pegawai	73.083.971	59.235.472
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	15.000.000	-
Jumlah	**88.083.971**	**59.235.472**
Pihak Ketiga		
- PT Agung Kharisma Santoso Abadi	2.044.775.078	89.300.000
- PT Wana Nusa Perkasa	508.890.164	364.685.575
- Alimuddin Merancang	53.500.000	53.500.000
- Marpai	44.000.000	44.000.000
- PT Berkah Utama Pontianak	11.200.000	11.200.000
- Agustinus	6.500.000	6.500.000
- PT Wijaya SS - Dana Talangan Dokumen dan Kompenmas	-	91.177.551
Jumlah	**2.668.865.242**	**660.363.126**
Total	**2.756.949.213**	**719.598.598**
8. Biaya Dibayar Dimuka		
Terdiri dari :		
- Sewa Mess Direksi	11.458.333	11.458.333
- Sewa Tanah Untuk Kandang Ayam	3.125.000	3.125.000
- Sewa Tanah	-	218.750
Jumlah	**14.583.333**	**14.802.083**
9. Uang Muka		
Terdiri dari :		
- Uang Muka Rapat RUPS LB	55.687.000	178.790.170
- Uang Muka Pengurusan Dokumen RKT 2024	-	7.500.000
- Uang Muka Pembelian Spare Part Mobil Estrada Triton	-	2.200.000
Jumlah	**55.687.000**	**188.490.170**

	2024	2023
	Rp	Rp
10. Persediaan		
Terdiri dari :		
- Label (PVC Tag)	-	6.169.426
- Ribbon	-	1.393.096
Jumlah	**-**	**7.562.522**

11. Properti Investasi

	31 DESEMBER 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	409.958.286	56.545.971	-	466.504.256
	409.958.286	**56.545.971**	**-**	**466.504.256**
Nilai Buku	**720.961.131**			**664.415.160**

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	353.412.315	56.545.971	-	409.958.286
	353.412.315	**56.545.971**	**-**	**409.958.286**
Nilai Buku	**777.507.102**			**720.961.131**

12. Aset Tetap

	31 DESEMBER 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.460.514.035	-	-	2.460.514.035
Kendaraan	1.795.115.072	-	-	1.795.115.072
Inventaris Kantor	705.178.856	155.414.339	-	860.593.195
	5.502.770.463	**155.414.339**	**-**	**5.658.184.802**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	951.288.603	139.166.543	-	1.090.455.145
Kendaraan	1.384.314.846	102.700.056	-	1.487.014.903
Inventaris Kantor	619.502.420	26.030.417	-	645.532.837
	2.955.105.869	**267.897.016**	**-**	**3.223.002.885**
Nilai Buku	**2.547.664.595**			**2.435.181.917**

12. Aset Tetap (Lanjutan)

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.651.279.152	73.890.000	264.655.117	2.460.514.035
Kendaraan	1.612.827.636	472.287.436	290.000.000	1.795.115.072
Inventaris Kantor	1.061.909.216	58.428.639	415.158.999	705.178.856
	5.867.978.504	**604.606.075**	**969.814.116**	**5.502.770.463**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.085.397.677	130.546.043	264.655.117	951.288.603
Kendaraan	1.537.381.438	136.933.409	290.000.000	1.384.314.846
Inventaris Kantor	1.001.407.201	33.254.217	415.158.999	619.502.420
	3.624.186.316	**300.733.669**	**969.814.116**	**2.955.105.869**
Nilai Buku	**2.243.792.189**			**2.547.664.594**

13. Aset Pajak Tangguhan

	31 DESEMBER 2024			
	Saldo Awal	Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	154.153.008	42.647.517	2.094.262	194.706.263
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	**154.153.008**	**42.647.517**	**2.094.262**	**194.706.263**

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	247.001.088	41.005.029	133.853.109	154.153.008
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	**247.001.088**	**41.005.029**	**133.853.109**	**154.153.008**

	2024	2023
	Rp	**Rp**
14. Aset Lain-lain		
Harga Perolehan		
Perizinan IUPHHK	5.614.299.000	5.614.299.000
Revisi RKU-IUPHHK	236.868.000	236.868.000
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	199.677.000	199.677.000
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	283.132.100	283.132.100
Piutang Macet	79.469.400	79.469.400
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2021-2031	215.640.880	215.640.880
Jumlah	**8.383.475.520**	**8.383.475.520**

	2024	2023
	Rp	Rp
14. Aset Lain-lain (Lanjutan)		
Amortisasi		
Perizinan IUPHHK	3.342.379.332	3.157.107.465
Revisi RKU-IUPHHK	193.442.200	169.755.400
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	119.806.200	79.870.800
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	169.879.260	113.252.840
Piutang Macet	47.681.640	31.787.760
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2021-2031	64.692.264	43.128.176
Jumlah	**5.692.270.035**	**5.349.291.581**
Nilai Buku	**2.691.205.484**	**3.034.183.939**
15. Utang Usaha Pihak Ketiga		
Terdiri dari :		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	1.312.619.246	1.467.754.160
Jumlah	**1.312.619.246**	**1.467.754.160**
Bagian Jangka Pendek		
Pihak Ketiga	-	-
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi		
Bagian Jangka Pendek - Pihak Ketiga	**1.312.619.246**	**1.467.754.160**
16. Utang Pajak		
Terdiri dari :		
- PPN Keluaran	195.093.723	7.452.252
- PPh Pasal 21	25.342.709	39.082.767
- PPh Pasal 4 Ayat 2 Final	4.190.969	4.749.997
- PPh Pasal 25	-	53.199.215
Jumlah	**224.627.401**	**104.484.231**
17. Biaya Akrual		
Terdiri dari:		
- PT Inhutani I	2.903.291.773	1.750.085.440
- Iuran Dana Pensiun	112.576.624	112.576.624
- Iuran APHI	85.907.885	73.154.810
- Kompensasi Masyarakat	76.123.850	160.045.700
- Beban Operasional	41.767.546	60.278.556
- Tunjangan Cuti Tahunan	-	124.930.484
Jumlah	**3.219.667.678**	**2.281.071.613**

	2024	2023
	Rp	Rp
18. Utang Lain-lain		
Terdiri dari:		
Pihak Berelasi		
- Uang Penghargaan Masa Kerja	55.154.569	102.626.810
- Lebih Potong PPh 21	12.014.750	13.781.467
Jumlah	**67.169.319**	**116.408.277**

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada Tanggal 25 Maret 2003, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila karyawan mencapai usia pensiun, terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam Undang - Undang tersebut. Uang penghargaan dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut dihitung sendiri oleh manajemen perusahaan.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut adalah :

Jumlah Karyawan	18 orang	18 orang
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Kenaikan Gaji	0%	0%
Tingkat Bunga	6,25%	6,00%

Beban imbalan kerja yang dibebankan di laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan jumlah neto dari :

Beban Jasa Kini	95.657.783	96.161.212
Beban Bunga	98.194.567	90.225.285
Jumlah	**193.852.351**	**186.386.497**

Liabilitas neto diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas	1.669.307.644	1.593.980.041
Jumlah	**1.669.307.644**	**1.593.980.041**

Mutasi nilai kini liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.593.980.041	1.654.073.463
Beban tahun berjalan	193.852.351	186.386.497
Amortisasi rugi yang belum direalisasi	(9.519.372)	(133.853.109)
Pembayaran imbalan kerja	(109.005.375)	(112.626.810)
Jumlah	**1.669.307.644**	**1.593.980.041**

20. Ekuitas

Terdiri dari:		
- Modal Saham	1.500.000.000	1.500.000.000
- Penghasilan Komprehensif Lain	239.794.510	232.369.400
- Cadangan Umum	2.369.090.977	2.467.620.669
- Saldo Laba	55.706.153	57.317.117
Jumlah	**4.164.591.640**	**4.257.307.186**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
- Pemerintah Kabupaten Berau	750	50%	750.000.000
- PT Inhutani I	450	30%	450.000.000
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	300	20%	300.000.000
Jumlah	**1500**	**100%**	**1.500.000.000**

	2024	2023
	Rp	Rp
20. Ekuitas (Lanjutan)		
Cadangan Umum		
- Saldo Awal Cadangan Umum	2.467.620.669	1.237.787.010
- Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2023	-	1.228.738.395
- Koreksi Pembayaran Denda PBB Tahun 2023	(98.529.693)	-
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	4	1.095.268
- Koreksi Amortisasi Aset Lain-lain	(4)	(4)
Jumlah	**2.369.090.977**	**2.467.620.669**
21. Pendapatan		
Terdiri dari :		
- Pendapatan IUPHHK	8.255.193.300	3.120.180.250
- Penggantian Biaya Investasi	-	5.405.405.406
Jumlah	**8.255.193.300**	**8.525.585.656**
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung		
Terdiri dari :		
- Perencanaan		
- Beban Overhead	289.629.681	282.536.794
- ITSP URKT 2025	225.241.725	213.493.975
- Amortisasi Iuran IUPHHK	185.271.867	185.271.867
- Survailance PHPL 2023	42.330.633	54.740.376
- Pembuatan Trace Jalan URKT 2025	32.779.100	30.386.450
- Penataan Areal Kerja URKT 2024	29.351.150	24.450.150
- Amortisasi Penyusunan dan Pengesahan RKUPHHK	23.686.800	23.686.800
- Amortisasi IHMB Konsesi IUPHHK	21.564.088	21.564.088
- Pengurusan dan Pengesahan RKT - IUPHHK Self Approval	7.500.000	41.475.000
- Biaya GIS (Pembuatan Peta Kerja Dll)	1.930.680	5.899.742
- Ceking Pengawasan (Dishut Prop & Kab RKT, SPORC Dephut)	1.806.150	-
- Amortisasi Orientasi Potensi dan Lokasi RKT 2017-2021, 18.000 Ha	-	490.125
- Amortisasi Re-Sertifikasi Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (F	-	65.707.560
- Monitoring Evaluasi RKT Self Approval	-	3.582.295
Jumlah	**861.091.874**	**953.285.222**
- Pembinaan Hutan		
- Beban Overhead	98.464.727	121.562.164
- Pembutan Petak KPPN	62.451.600	-
- Produksi Bibit dan Pemelihraan Bibit di Persemaian KM 37 dan KM35	2.650.900	61.760.000
- Checking Dishut Kabupaten	1.950.000	4.500.000
- Penanaman Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	-	26.674.150
- Pemeliharaan Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	-	9.875.000
- Penanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	-	27.012.150
- Pemeliharaan tanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	-	9.875.000
- Pembuatan dan Pengukuran Erosi Sedimentasi 1 Unit	-	8.465.500
- Perapihan Pasca Panen	-	32.410.000
- Pembebasan Pohon Binaan	-	32.410.000
- Checking Dishut Provinsi kaltim	-	817.572
- Pembuatan Sempadan Sungai Siduung	-	9.561.900
Jumlah	**165.517.227**	**344.923.436**

	2024	2023
	Rp	Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Pengendalian Kebakaran dan Pamhut		
- Beban Overhead	288.405.732	318.085.255
- Perlindungan Hutan / Patroli Pengamanan Hutan	22.263.300	68.676.000
- Perlengkapan Kerja	775.380	11.682.834
Jumlah	**311.444.412**	**398.444.089**
- Pemanfaatan Hasil Hutan		
- Beban Overhead	448.131.651	428.899.581
- Register Penerbitan LHP & SKSHHK	32.231.447	20.356.498
- Biaya Rekonsiliasi PSDH DR Per Triwulan	18.810.000	18.247.500
- Iuran APHI	12.753.075	4.571.345
- Koordinasi Pengurusan LHP	8.517.000	3.750.000
- Bahan Makan & Obat-obatan (bulan)	8.145.000	6.792.500
- Pengurusan SKSHHK Sei Agung	8.001.899	2.742.807
- Beban Perlengkapan Kerja Lapangan (set)	1.622.914	2.425.852
- Sewa TPK/Tpn/Logpon	243.055	5.833.333
- Monitoring RKT 2021 self approvel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim	-	3.000.000
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Kabupaten	-	3.212.700
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) BPHP Wil. XI Samarinda	-	5.679.145
Jumlah	**538.456.041**	**505.511.261**
- Kelola Sosial		
- Beban Overhead	317.929.764	302.171.710
- Sosial Budaya	32.150.000	45.200.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana	4.000.000	10.250.000
Jumlah	**354.079.764**	**357.621.710**
- Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara		
- PBB Areal IUPHHK	1.017.577.190	985.293.543
Jumlah	**1.017.577.190**	**985.293.543**
- Beban Camp dan Administrasi		
- Beban Overhead	359.278.911	443.546.497
- Lain-Lain	128.790.332	114.255.026
- Penyusutan & Amortisasi	111.549.049	141.067.014
- BBM, Pelumas Kendaraan & Inventaris	83.776.036	135.939.613
- Spare Parts Kendaraan & Inventaris	46.892.632	65.973.000
- PKB dan Perijinan	11.121.400	5.686.794
- ATK, Foto Copy, Cetakan	5.858.540	6.914.950
- Material Bangunan Camp	-	1.095.263
Jumlah	**747.266.900**	**914.478.157**
Total	**3.995.433.408**	**4.459.557.418**

	2024	2023
	Rp	Rp
23. Beban Usaha		
Terdiri dari :		
Beban Personalia		
- Beban Gaji Direksi dan Karyawan	1.749.576.807	1.752.295.470
- Beban Honorarium Komisaris	441.000.000	441.000.000
- Beban Tunjangan Hari Raya (THR)	182.541.290	182.041.290
- Beban Asuransi Jiwa	108.000.000	108.000.000
- Beban Tunjangan Cuti	81.359.054	37.484.054
- Beban Imbalan Pasca Kerja	76.120.911	69.020.904
- Beban Tunjangan Purna Jabatan	37.187.500	-
- Beban Premi Produksi	35.379.871	16.045.423
- Beban BPJS Tenagakerjaan Perusahaan	20.969.400	20.571.242
- Beban Olahraga dan Rekreasi	17.678.280	111.752.094
- Beban Pengobatan	10.054.512	9.829.260
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	9.023.382	-
- Beban Jamuan Makan Minum	5.857.700	23.012.562
- Beban Rapat Internal Komisaris	354.000	35.250.000
- Beban Diklat/Seminar/Loka Kerja	-	2.145.000
- Tunjangan Pajak Penghasilan	-	6.954.980
Jumlah	**2.775.102.707**	**2.815.402.279**
Beban Administrasi dan Umum		
- Beban Perjalanan Dinas	350.077.800	221.400.000
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	325.349.638	328.668.326
- Beban Lain-lain	236.912.375	163.372.671
- Beban Rapat	195.029.870	124.045.800
- Beban Rumah Tangga Kantor dan Mess	116.571.500	62.345.860
- Beban BBM dan Pelumas	61.805.890	79.180.027
- Beban Representasi	50.893.083	109.978.754
- Beban Jasa Profesional	50.000.000	40.000.000
- Beban Listrik	43.288.273	42.468.294
- Beban Spare Parts	34.133.000	43.630.360
- Beban Media Sosial, Branding, Surat Kabar dan Majalah	30.070.477	60.727.388
- Beban Sewa Mess	27.777.776	27.777.776
- Beban Perizinan	19.332.000	19.968.400
- Beban Telekomunikasi	14.120.552	12.250.107
- Beban ATK, Fotocopy dan Cetakan	10.505.440	12.112.364
- Beban Air PDAM	10.412.590	7.107.470
- Beban Perlengkapan Kantor dan Mess	7.724.979	10.036.625
- Beban Pos dan Pengiriman Dokumen	4.109.450	4.781.280
- Beban Pakaian Seragam Karyawan	-	27.416.000
Jumlah	**1.588.114.693**	**1.397.267.502**
24. Pendapatan (Beban) Non Operasional		
- **Pendapatan Non Operasional**		
- Jasa Koridor Jalan	150.000.000	-
- Usaha Lain-lain	15.019.995	131.016.657
- Pendapatan Jasa Giro	4.439.051	30.590.379
- Laba Penjualan Aset Tetap	-	68.468.469
Jumlah	**169.459.046**	**230.075.505**

	2024	2023
	Rp	Rp
24. Pendapatan (Beban) Non Operasional (Lanjutan)		
- **Beban Non Operasional**		
- Beban Usaha Lainnya	13.888.888	26.418.888
- Beban Administrasi Bank	1.569.396	1.287.200
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	41.821	975.675
Jumlah	**15.500.105**	**28.681.763**
Total	**153.958.941**	**201.393.742**
25. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	50.501.433	54.752.200
Jumlah	**50.501.433**	**54.752.200**
26. Beban Pajak		
- Pajak Kini	(37.442.797)	(38.440.112)
- Pajak Tangguhan	42.647.517	41.005.029
Jumlah	**5.204.720**	**2.564.917**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan seperti disajikan pada laporan laba (rugi) dan akumulasi laba fiskal perusahaan sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	50.501.433	54.752.200
Kompensasi kerugian fiskal tahun lalu	-	-
Perbedaan Temporer		
- Imbalan pasca kerja	193.852.351	186.386.497
- Tantiem	-	-
Perbedaan Tetap		
- Jasa giro	(4.439.051)	(30.590.379)
- Denda pajak	41.821	975.675
- Beban jamuan makan minum	-	31.662.862
Jumlah	**189.455.121**	**188.434.655**
Laba Kena Pajak (Pembulatan)	**239.956.000**	**243.186.000**
Perhitungan pajak penghasilan		
- Tarif 11%	15.347.523	15.060.808
- Tarif 22%	22.095.274	23.379.304
Beban Pajak Kini	**37.442.797**	**38.440.112**
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 22	16.240.618	-
- PPh Pasal 23	1.802.542	108.108.108
- PPh Pasal 25	159.597.645	506.127.429
Jumlah	**177.640.805**	**614.235.537**
Jumlah penghasilan pajak (lebih) / kurang bayar	**(140.198.008)**	**(575.795.425)**

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain	50.501.433	54.752.200
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(11.110.193)	(12.045.296)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	967.391	(450.595)
Penyesuaian tarif pajak	15.347.523	15.060.808
Beban / (manfaat) pajak penghasilan	**5.204.720**	**2.564.917**

	2024	2023
	Rp	Rp
27. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	55.706.153	57.317.117
Jumlah	**55.706.153**	**57.317.117**

28. Deviden Tunai

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Hutan Sanggam Berau tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham menyetujui pembagian deviden tunai final untuk tahun buku 2023 sebesar 100% atau sebesar Rp 57.317.117. Deviden sebesar Rp 28.658.559 telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 04 Juni 2024 dan kepada PT Inhutani I sebesar Rp 17.195.135 tanggal 04 Juni 2024 dan dibayarkan kepada Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera sebesar Rp 11.463.423 tanggal 04 Juni 2024.

29. Ikatan

PT Hutan Sanggam Berau mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT Wana Nusa Perkasa dengan Akta nomor 01/KSO/HSB-WNP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas areal 78.436 Ha.

Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2025, setelah masa kerja 6 (enam) bulan kedua belah pihak akan meninjau kembali kenaikan fee tegakan kayu, dengan acuan sebagai berikut:

- Rp 330.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.

PT Hutan Sanggam Berau mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT Agung Kharisma Santoso Abadi dengan Akta nomor 02/KSO/HSB-AKSA/XI/2024 tanggal 12 November 2024 untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, luasan areal yang akan dikerjasamakan adalah areal blok RKT 2024 dengan luas areal 1.088 Ha.

Jangka waktu perjanjian dimulai dimulai sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan fee tegakan kayu sebagai berikut:

- Rp 330.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

(i) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko dimana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan jatuh tempo :

	31 Desember 2024		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	1.129.261.124	-	1.129.261.124
Piutang Usaha Pihak Ketiga	-	-	-
Piutang Lain-lain	2.756.949.213	-	2.756.949.213
Aset Keuangan Lainnya	14.583.333	-	14.583.333
Jumlah	**3.900.793.670**	**-**	**3.900.793.670**

	31 Desember 2023		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	-	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	-	208.102.277
Piutang Lain-lain	719.598.598	-	719.598.598
Aset Keuangan Lainnya	14.802.083	-	14.802.083
Jumlah	**2.592.194.717**	**-**	**2.592.194.717**

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	2024	**2023**
	Rp	**Rp**
Kas dan Setara Kas	1.129.261.124	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	-	208.102.277
Piutang Lain-lain	2.756.949.213	719.598.598
Aset Keuangan Lainnya	14.583.333	14.802.083
Jumlah	**3.900.793.670**	**2.592.194.717**

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

(ii) Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Desember 2024		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	67.169.319	-	67.169.319
Utang Pajak	224.627.401	-	224.627.401
Beban Akrual	3.219.667.678	-	3.219.667.678
Utang Usaha Jangka Panjang	1.312.619.246	-	1.312.619.246
Jumlah	**4.824.083.644**	**-**	**4.824.083.644**

	31 Desember 2023		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	116.408.277	-	116.408.277
Utang Pajak	104.484.231	-	104.484.231
Beban Akrual	2.281.071.613	-	2.281.071.613
Utang Usaha Jangka Panjang	1.467.754.160	-	1.467.754.160
Jumlah	**3.969.718.281**	**-**	**3.969.718.281**

b. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik(tingkat 1);
b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat di observasi) (tingkat

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan peseroan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.129.261.124	1.129.261.124
Piutang Usaha Pihak Ketiga	-	-
Piutang Lain-lain	2.756.949.213	2.756.949.213
Biaya Dibayar Dimuka	14.583.333	14.583.333
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	224.627.401	224.627.401
Utang Lain-Lain	67.169.319	67.169.319
Beban Akrual	3.219.667.678	3.219.667.678

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

b. Estimasi Nilai Wajar (Lanjutan)

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara kas	1.649.691.758	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	208.102.277
Piutang Lain-Lain	719.598.598	719.598.598
Biaya Dibayar Dimuka	14.802.083	14.802.083
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	104.484.231	104.484.231
Utang Lain-Lain	116.408.277	116.408.277
Beban Akrual	2.281.071.613	2.281.071.613

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024		31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
I.	**TANAH**													
	Tanah	999 M2	01-Jan-02		541.962.500	-	-	541.962.500	541.962.500	-	-	-	-	541.962.500
	Jumlah Tanah				541.962.500	-		541.962.500	541.962.500	-	-	-	-	541.962.500
II.	**BANGUNAN NON PERMANEN**													
	Kantor Camp Produksi SP6	1	2003	10%	47.300.000	-	-	47.300.000	-	47.300.000	-	-	47.300.000	-
	Rumah Pelayan Dapur	1	2003	10%	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-	2.400.000	-
	Bedeng Semai (KM 7) Siduung	50	2008	10%	6.145.500	-	-	6.145.500	-	6.145.500	-	-	6.145.500	-
	Bedeng SPH/Tiang	1	2008	10%	23.635.500	-	-	23.635.500	-	23.635.500	-	-	23.635.500	-
	Jembatan & Parit PT. HLL	1	Nov-16	20%	43.263.230	-	-	43.263.230	-	43.263.230	-	-	43.263.230	-
	Sekat Ruangan Arsip	1	Nov-16	20%	6.060.500	-	-	6.060.500	-	6.060.500	-	-	6.060.500	-
	Bangunan Kandang Ayam	1	Jun-20	10%	229.951.550	-	-	229.951.550	147.552.243	82.399.307	22.995.155	-	105.394.462	124.557.088
	Pintu Pagar & Pengecocan Lantai	1	Aug-23	20%	73.890.000	-	-	73.890.000	67.732.500	6.157.500	14.778.000	-	20.935.500	52.954.500
	Jumlah Bangunan Non Permanen				432.646.280	-	-	432.646.280	215.284.743	217.361.537	37.773.155	-	255.134.692	177.511.588
	BANGUNAN PERMANEN													
	Kantor Tanjung Redeb Lantai II Luas 366,74 M2	1	Sep-16	5%	1.574.793.586	-	-	1.574.793.586	1.003.930.911	570.862.675	78.739.679	-	649.602.354	925.191.232
	Kantor Tanjung Redeb Lantai I Luas 103,37 M2	1	Sep-16	5%	443.874.169	-	-	443.874.169	282.969.779	160.904.390	22.193.708	-	183.098.099	260.776.071
	Pintu Geser Aluminium	1 Set	Oct-16	5%	4.800.000	-	-	4.800.000	3.080.000	1.720.000	240.000	-	1.960.000	2.840.000
	Sekat Ruangan Direksi	1 Unit	Jan-22	5%	4.400.000	-	-	4.400.000	3.960.000	440.000	220.000	-	660.000	3.740.000
	Jumlah Bangunan Permanen				2.027.867.755	-	-	2.027.867.755	1.293.940.690	733.927.065	101.393.388	-	835.320.453	1.192.547.302
	Jumlah Bangunan Non Permanen & Bangunan Permanen				**2.460.514.035**	**-**	**-**	**2.460.514.035**	**1.509.225.433**	**951.288.603**	**139.166.543**	**-**	**1.090.455.146**	**1.370.058.890**
III.	**KENDARAAN**													
	KENDARAAN KELOMPOK I													
	Honda Mega Pro D 160 CC (Binhut) KT. 4813 GO	1 unit	2008	50%	18.040.000	-	-	18.040.000	-	18.040.000	-	-	18.040.000	-
	Honda Supra X 125 TD-HRD & GA	1 unit	2010	50%	15.060.000	-	-	15.060.000	-	15.060.000	-	-	15.060.000	-
	Honda New Mega Pro D 160 CC (Pamhut)	1 unit	May-11	50%	19.845.000	-	-	19.845.000	-	19.845.000	-	-	19.845.000	-
	Kawasaki Trail KLX 150S U (Produksi)	1 unit	Nov-14	50%	27.700.000	-	-	27.700.000	-	27.700.000	-	-	27.700.000	-
	Honda Mega Pro D 160 CC (Revaluasi)	1 unit	Des-14	50%	7.000.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-
	Honda Supra X 125 TD-HRD & GA (Revaluasi)	1 unit	Des-14	50%	6.000.000	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-
	Jumlah Kendaraan Kelompok I				93.645.000	-	-	93.645.000	-	93.645.000	-	-	93.645.000	-

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024		31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	KENDARAAN KELOMPOK II													
	Strada Triton 2,7 (Dounle Cabin LGS)	1 Unit	2010	25%	375.000.000	-	-	375.000.000	-	375.000.000	-	-	375.000.000	-
	Kendaraan Toyota Fortuner DV A/T Lux TRD	1 Unit	Feb-14	25%	265.313.636	-	-	265.313.636	21.581.072	243.732.564	5.395.268	-	249.127.832	16.185.804
	Toyota Kijang Inova seri G	1 Unit	Apr-15	25%	588.869.000	-	-	588.869.000	35.003.577	553.865.423	8.750.894	-	562.616.318	26.252.682
	Triton DC Exceed MT 4 x 4 Tahun 2022	1 Unit	Jan-23	25%	472.287.436	-	-	472.287.436	354.215.577	118.071.859	88.553.894	-	206.625.753	265.661.683
	Jumlah Kendaraan Kelompok II				1.701.470.072	-	-	1.701.470.072	410.800.226	1.290.669.846	102.700.056	-	1.393.369.903	308.100.169
	Jumlah Kendaraan Kelompok I & II				**1.795.115.072**	**-**	**-**	**1.795.115.072**	**410.800.226**	**1.384.314.846**	**102.700.056**	**-**	**1.487.014.903**	**308.100.169**
IV.	**INVENTARIS KANTOR**													
	INVENTARIS KELOMPOK I													
	Almari Lokal 2 Pintu	3 Unit	2003	50%	3.537.600	-	-	3.537.600	-	3.537.600	-	-	3.537.600	-
	Almari Lokal 1 Pintu	3 Unit	2003	50%	2.442.000	-	-	2.442.000	-	2.442.000	-	-	2.442.000	-
	Kalkulator Casio MJ 120	2 Unit	2003	50%	286.000	-	-	286.000	-	286.000	-	-	286.000	-
	Meja File	2 Unit	2003	50%	2.334.000	-	-	2.334.000	-	2.334.000	-	-	2.334.000	-
	Stick Golf	2 Unit	2003	50%	3.500.000	-	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	3.500.000	-
	CPU Intel Pentium 4	1 Unit	2005	50%	4.200.000	-	-	4.200.000	-	4.200.000	-	-	4.200.000	-
	Software Akuntansi	1 Unit	2005	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
	Almari Pakaian 2 Pintu	1 Unit	2006	50%	350.000	-	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-
	Spring Bad Dir. Opr&Keu	2 Unit	Jul-07	50%	1.900.000	-	-	1.900.000	-	1.900.000	-	-	1.900.000	-
	Almari Arsip 3 Pintu - Can	1 Unit	Jul-07	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	Kursi Chitos - Can	2 Unit	Aug-07	50%	230.000	-	-	230.000	-	230.000	-	-	230.000	-
	Almari 2 Pintu GA	1 Unit	Oct-07	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-
	Kursi Lipat Chitos - Legal	2 Unit	Oct-07	50%	230.000	-	-	230.000	-	230.000	-	-	230.000	-
	Lemari Activ Furniture	1 Unit	Feb-08	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-
	Lemari Solod Furnitue	1 Unit	Feb-08	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-
	Komputer Bid Produksi	1 Unit	May-08	50%	4.650.000	-	-	4.650.000	-	4.650.000	-	-	4.650.000	-
	Kursi Lipat Chitos - Legal	1 Unit	Jul-08	50%	280.000	-	-	280.000	-	280.000	-	-	280.000	-
	Komputer Pentium Dual Core	1 Unit	Dec-08	50%	3.750.000	-	-	3.750.000	-	3.750.000	-	-	3.750.000	-
	Upgrade Komputer + Power Supply 30 Ah	1 Unit	Mar-09	50%	1.490.000	-	-	1.490.000	-	1.490.000	-	-	1.490.000	-
	Lemari Kecil 2 Pintu	1 Unit	Apr-09	50%	450.000	-	-	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-
	Upgrade Software Program Akuntansi	1 Unit	Apr-09	50%	12.500.000	-	-	12.500.000	-	12.500.000	-	-	12.500.000	-
	Clinometer Shunto	2 Unit	Apr-09	50%	1.680.000	-	-	1.680.000	-	1.680.000	-	-	1.680.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				51.509.600	-	-	51.509.600	-	51.509.600	-	-	51.509.600	-
	Jumlah Dipindahkan				4.849.101.207	-	-	4.849.101.207	2.461.988.158	2.387.113.049	241.866.599	-	2.628.979.648	2.220.121.559

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	Jumlah Pindahan				4.849.101.207	-	-	4.849.101.207	2.461.988.158	2.387.113.049	241.866.599	-	2.628.979.648	2.220.121.559
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				51.509.600	-	-	51.509.600	-	51.509.600	-	-	51.509.600	-
	Priband HP	2 Unit	Apr-09	50%	320.000	-	-	320.000	-	320.000	-	-	320.000	-
	Telpon Panasonic KX-TS 505 MX	1 Unit	Apr-09	50%	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-
	Komputer Intel Atom P4	1 Unit	Apr-09	50%	4.905.000	-	-	4.905.000	-	4.905.000	-	-	4.905.000	-
	Meja 1/2 Biro Lokal	1 Unit	May-09	50%	325.000	-	-	325.000	-	325.000	-	-	325.000	-
	TV Sharp 21" GXF 250	1 Unit	Jun-09	50%	1.450.000	-	-	1.450.000	-	1.450.000	-	-	1.450.000	-
	Lemari Arsip Kayu Lokal	1 Unit	Sep-09	50%	1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
	Kursi Lipat Chitos	2 Unit	Nov-09	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-
	Peralatan Sipuh Online	1 Unit	Jan-10	50%	8.649.512	-	-	8.649.512	-	8.649.512	-	-	8.649.512	-
	Lemari Arsip - Can	1 Unit	May-10	50%	1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
	Komputer	1 Unit	Jul-10	50%	4.800.000	-	-	4.800.000	-	4.800.000	-	-	4.800.000	-
	Dispenser Uchida + Refrigerator - Camp	2 Unit	Oct-10	50%	800.000	-	-	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-
	Komputer Intel Pentium Dual Core	1 Unit	Nov-10	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
	Tangga Alumunium Uk. 3 Meter	1 Unit	Dec-10	50%	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-
	Monitor LCD LG 15,6"	1 Unit	Dec-10	50%	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-
	Lemari Rak Lokal	1 Unit	Dec-10	50%	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	1.700.000	-
	TV Sharp 29"	1 Unit	Dec-10	50%	2.800.000	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-
	Kursi Lipat Chitose-Kantor Tanjung	6 Unit	Feb-11	50%	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	1.650.000	-
	Lemari Gantungan untuk File-Manajer HRD	1 Unit	Apr-11	50%	875.000	-	-	875.000	-	875.000	-	-	875.000	-
	Lemari Rak Piring 2 Pintu-Kantor Tanjung	1 Unit	Jun-11	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	Laptop Sony Vaio VPC-EG18FG-Produksi	1 Unit	Aug-11	50%	7.000.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-
	Camera Nikon D5100 VR	1 Unit	Aug-11	50%	13.350.000	-	-	13.350.000	-	13.350.000	-	-	13.350.000	-
	Kursi Putar Bakuda-HRD/GA	6 Unit	Sep-11	50%	3.300.000	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-	3.300.000	-
	Kursi Putar Tiger-Binsos	1 Unit	Sep-11	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	TV LG 21" u/ Perse. KM. 37-Binhut	1 Unit	Oct-11	50%	1.150.000	-	-	1.150.000	-	1.150.000	-	-	1.150.000	-
	Ranjang Olympic - Mess Direksi	1 Unit	Jan-12	50%	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000	-	-	3.050.000	-
	Meja Makan + Kursi - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	Rak Piring Kaca - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	850.000	-	-	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-
	Magic Com Maspion - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	325.000	-	-	325.000	-	325.000	-	-	325.000	-
	Kursi Putar Olimpia Manager Produksi	1 Unit	Feb-12	50%	850.000	-	-	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-
	Skat Ruang - Mess Direksi	2 Unit	Feb-12	50%	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	1.700.000	-
	Meja Kerja 1/2 Biro - HRD	1 Unit	Mar-12	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				126.259.112	-	-	126.259.112	-	126.259.112	-	-	126.259.112	-
	Jumlah Dipindahkan				4.923.850.719	-	-	4.923.850.719	2.461.988.158	2.461.862.561	241.866.599	-	2.703.729.160	2.220.121.559

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	Jumlah Pindahan				4.923.850.719	-	-	4.923.850.719	2.461.988.158	2.461.862.561	241.866.599	-	2.703.729.160	2.220.121.559
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				126.259.112	-	-	126.259.112	-	126.259.112	-	-	126.259.112	-
	Meja Kerja 1 Biro - Binsos	1 Unit	Mar-12	50%	950.000	-	-	950.000	-	950.000	-	-	950.000	-
	Lemari Arsip 1 Pintu - Can	1 Unit	Apr-12	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	Kompor Gas Rinai - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	650.000	-	-	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-
	Meja Piring Stainless - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	1.600.000	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	-	1.600.000	-
	Meja Kompor Gas Stainless - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	1.500.000	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
	Printer Canon Mp 287 + Infus - Produksi	1 Unit	Jun-12	50%	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-
	Lemari Es Sharp 1 Pintu - Mess Direksi	1 Unit	Aug-12	50%	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-
	Kompas Sunto - Produksi	1 Unit	Jun-14	50%	1.121.250	-	-	1.121.250	-	1.121.250	-	-	1.121.250	-
	Printer Canon - Binhut	1 Unit	Sep-14	50%	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	TV Samsung LED 32 " - R. Dirut	1 Unit	Oct-14	50%	3.200.000	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-	3.200.000	-
	Nozzle Pemadam - Pamhut	1 Unit	Nov-14	50%	600.000	-	-	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-
	Roll Selang Pemadam - Pamhut	2 Roll	Dec-14	50%	2.800.000	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-
	Pakain Pemadam - Pamhut	6 Stell	Dec-14	50%	1.560.000	-	-	1.560.000	-	1.560.000	-	-	1.560.000	-
	Penutup Telinga EM62- Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	450.000	-	-	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-
	Masker NP305- Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	390.000	-	-	390.000	-	390.000	-	-	390.000	-
	Jas Hujan Soleil - Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	1.320.000	-	-	1.320.000	-	1.320.000	-	-	1.320.000	-
	P3K - Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	960.000	-	-	960.000	-	960.000	-	-	960.000	-
	Layar Projektor Sony 70 " - HRD	1 Unit	Dec-14	50%	985.000	-	-	985.000	-	985.000	-	-	985.000	-
	Kursi Olympic - R. Dirut	1 Set	Dec-14	50%	3.250.000	-	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-
	Mesin Penghitung Uang LD-26 M	1 Unit	Mar-14	50%	2.208.250	-	-	2.208.250	-	2.208.250	-	-	2.208.250	-
	Printer Canon Pixma MP 237 + Infus	1 Unit	Mar-14	50%	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-
	Laptop Sony Viao SVF 1421 CWW	1 Unit	May-14	50%	6.850.000	-	-	6.850.000	-	6.850.000	-	-	6.850.000	-
	Kursi Puter Merk Brother	1 Unit	May-14	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-
	Genset PO 3200	1 Unit	Aug-14	50%	3.200.000	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-	3.200.000	-
	Water Pump National 200	1 Unit	Aug-14	50%	780.000	-	-	780.000	-	780.000	-	-	780.000	-
	Profile Tank Uk. 1.100 Ltr	1 Pcs	Oct-14	50%	1.157.500	-	-	1.157.500	-	1.157.500	-	-	1.157.500	-
	Kompor Gas Rinai	1 Pcs	Oct-14	50%	500.000	-	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-
	Kipas Angin Maspion	1 Unit	Jan-15	50%	500.000	-	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-
	Meja 1 Biro	1 Unit	Jan-15	50%	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	Scaner Alfalink As 1213	1 Unit	Jan-15	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	AC Sharp 3/4 PK	1 Unit	Jan-15	50%	4.000.000	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				175.541.112	-	-	175.541.112	-	175.541.112	-	-	175.541.112	-
	Jumlah Dipindahkan				4.973.132.719	-	-	4.973.132.719	2.461.988.158	2.511.144.561	241.866.599	-	2.753.011.160	2.220.121.559

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	Jumlah Pindahan				4.973.132.719	-	-	4.973.132.719	2.461.988.158	2.511.144.561	241.866.599	-	2.753.011.160	2.220.121.559
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				175.541.112	-	-	175.541.112	-	175.541.112	-	-	175.541.112	-
	Printer Canon 237 MP	1 Unit	Jul-15	50%	1.080.000	-	-	1.080.000	-	1.080.000	-	-	1.080.000	-
	Monitor LG Flat 15" - Sipuh	1 Unit	Aug-15	50%	950.000	-	-	950.000	-	950.000	-	-	950.000	-
	Kursi Lipat Palaris	8 Unit	Oct-15	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	Meja Resepsionis	4,29 M	Mar-16	50%	22.308.000	-	-	22.308.000	-	22.308.000	-	-	22.308.000	-
	Pintu Coboy	1 Set	Mar-16	50%	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-
	Sofa	5 Set	Mar-16	50%	19.000.000	-	-	19.000.000	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-
	Coffe Table	3 Unit	Mar-16	50%	8.100.000	-	-	8.100.000	-	8.100.000	-	-	8.100.000	-
	Partisi (1 Set)	114,75 M	Mar-16	50%	43.031.250	-	-	43.031.250	-	43.031.250	-	-	43.031.250	-
	List Lantai	359 M	Mar-16	50%	30.515.000	-	-	30.515.000	-	30.515.000	-	-	30.515.000	-
	UPS Pro Link 700 SFC (Manager HRD & GA)	1 Unit	Mar-16	50%	580.000	-	-	580.000	-	580.000	-	-	580.000	-
	Grand Meja 1/2 Biro NB 502 + Laci Beech	22 Pcs	Jun-16	50%	44.440.000	-	-	44.440.000	-	44.440.000	-	-	44.440.000	-
	Grand Meja 1 Biro NB 503 + Laci Beech	6 Pcs	Jun-16	50%	16.080.000	-	-	16.080.000	-	16.080.000	-	-	16.080.000	-
	Grand Meja Lexus 120 x 80 x 72 LC 1280	2 Pcs	Jun-16	50%	5.060.000	-	-	5.060.000	-	5.060.000	-	-	5.060.000	-
	Grand Meja Lexus 150 x 80 x 72 LC 1580	4 Pcs	Jun-16	50%	11.420.000	-	-	11.420.000	-	11.420.000	-	-	11.420.000	-
	Grand Meja Sudut Lexus LX 90 D	4 Pcs	Jun-16	50%	3.860.000	-	-	3.860.000	-	3.860.000	-	-	3.860.000	-
	Meja Kerja Tipe ED (Ruang Kerja Dirut)	1 Pcs	Aug-16	50%	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
	Lemari Kaca Uk. 1/2 Kaca (Ruang Kerja Dirut)	1 Pcs	Aug-16	50%	2.200.000	-	-	2.200.000	-	2.200.000	-	-	2.200.000	-
	Meja Kerja Tipe ED 2010 (Ruang Kerja Direktur Oprs)	1 Pcs	Aug-16	50%	6.500.000	-	-	6.500.000	-	6.500.000	-	-	6.500.000	-
	Sofa (Teras Ruang Tunggu Tamu Kantor Tanjung)	1 Set	Sep-16	50%	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-
	TV LED LG 29 MT 48 + Bracket	1 Unit	Oct-16	50%	2.550.000	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-	-	2.550.000	-
	Speaker Polytron 21 s/n 0380	1 Set	Oct-16	50%	675.000	-	-	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-
	Kursi Lipat (Ruang Dirkeu & Dirops)	3 Pcs	Oct-16	50%	990.000	-	-	990.000	-	990.000	-	-	990.000	-
	Meja Kerja (Ruang Direktur Keuangan)	1 Unit	Oct-16	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
	Lemari Arsip (Ruang Direktur Keuangan)	1 Unit	Oct-16	50%	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-
	Lemari Arsip (Bidang Umum)	6 Unit	Aug-16	50%	5.508.000	-	-	5.508.000	-	5.508.000	-	-	5.508.000	-
	Lemari Arsip (Bidang Personalia)	1 Unit	Nov-16	50%	490.000	-	-	490.000	-	490.000	-	-	490.000	-
	Kipas Angin Merek Panasonic	1 Unit	Dec-16	50%	540.000	-	-	540.000	-	540.000	-	-	540.000	-
	Hardish Eksternal 1 Tera (Bidang Keuangan)	1 Unit	Jan-17	50%	875.000	-	-	875.000	-	875.000	-	-	875.000	-
	Lemari Pakaian 3 Pintu (Mess Direksi)	1 Unit	Jun-17	50%	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-
	Kursi Susun Merek Polaris (Direktur Operasional)	2 Unit	Mar-17	50%	1.029.000	-	-	1.029.000	-	1.029.000	-	-	1.029.000	-
	Printer Canon Pixma MP 287 (Manager HRD)	1 Unit	Aug-17	50%	1.470.000	-	-	1.470.000	-	1.470.000	-	-	1.470.000	-
	Spring Bed Air Land (Mess Direksi)	1 Unit	Oct-17	50%	8.000.000	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	8.000.000	-
	GPS Garmin MAP 78s (Pamhut)	1 Unit	Aug-19	50%	4.280.000	-	-	4.280.000	-	4.280.000	-	-	4.280.000	-
	Jumlah Inventais Kelompok I				439.072.362	-	-	439.072.362	-	439.072.362	-	-	439.072.362	-

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	INVENTARIS KELOMPOK II													
	Kursi Putar	1 Unit	May-03	25%	475.200	-	-	475.200	-	475.200	-	-	475.200	-
	Kursi Direktur	3 Unit	May-03	25%	3.207.600	-	-	3.207.600	-	3.207.600	-	-	3.207.600	-
	Cash Box	2 Unit	Aug-03	25%	310.000	-	-	310.000	-	310.000	-	-	310.000	-
	Kursi Putar	2 Unit	Oct-03	25%	2.138.400	-	-	2.138.400	-	2.138.400	-	-	2.138.400	-
	AC Split LG 1/2 PK	2 Unit	Jul-07	25%	2.450.000	-	-	2.450.000	-	2.450.000	-	-	2.450.000	0
	GPS Garmin MAP 76 CSX	5 Unit	Apr-10	25%	17.600.000	-	-	17.600.000	-	17.600.000	-	-	17.600.000	(0)
	Klinometer Shunto PM 5 - Can	4 Unit	Apr-10	25%	6.400.000	-	-	6.400.000	(0)	6.400.000	(0)	-	6.400.000	(0)
	Phiband 10 Mtr - Can	3 Unit	Apr-10	25%	1.200.000	-	-	1.200.000	(0)	1.200.000	(0)	-	1.200.000	(0)
	Generator Diesel 5 KVA ATS YLW	1 Unit	Jul-10	25%	14.454.364	-	-	14.454.364	(0)	14.454.364	(0)	-	14.454.364	(0)
	AC LG 3/4 PK - Camp	1 Unit	Oct-10	25%	3.700.000	-	-	3.700.000	(0)	3.700.000	(0)	-	3.700.000	(0)
	AC LG 3/4 PK - Camp	1 Unit	Oct-10	25%	3.700.000	-	-	3.700.000	(0)	3.700.000	(0)	-	3.700.000	(0)
	Mesin Alkon Robin 5 PK	1 Unit	Nov-10	25%	3.120.000	-	-	3.120.000	0	3.120.000	0	-	3.120.000	0
	AC Panasonic 3/4 PK-Dirops	1 Unit	Feb-11	25%	3.250.000	-	-	3.250.000	(0)	3.250.000	(0)	-	3.250.000	(0)
	Lemari Besi Brother-Keuangan	1 Unit	Sep-11	25%	2.500.000	-	-	2.500.000	(0)	2.500.000	(0)	-	2.500.000	(0)
	AC Kamar Tidur Direktur Operasional	1 Unit	Jul-11	25%	1.750.000	-	-	1.750.000	(0)	1.750.000	(0)	-	1.750.000	(0)
	Almari Arsip Besi 2 pintu merk brother (Keuangan)	1 Unit	Aug-15	25%	2.800.000	-	-	2.800.000	251.117	2.548.883	62.779	-	2.611.663	188.337
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang Kerja Dirut	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	609.855	4.490.145	152.464	-	4.642.609	457.391
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang HRD & GA	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	609.855	4.490.145	152.464	-	4.642.609	457.391
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang Meeting	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	609.855	4.490.145	152.464	-	4.642.609	457.391
	Selang Hisap (Spiral) Untuk Mesin Alcon	5 M	May-16	25%	405.000	-	-	405.000	46.177	358.823	11.544	-	370.367	34.633
	Selang Biasa Uk. 1,5 Untuk Mesin Alcon	50 M	May-16	25%	1.890.000	-	-	1.890.000	215.493	1.674.507	53.873	-	1.728.380	161.620
	Kompas Suunto KB 14/360 R (Perencanaan Hutan)	2 Bh	Oct-16	25%	2.773.000	-	-	2.773.000	347.016	2.425.984	86.754	-	2.512.738	260.262
	Clinometer Suunto PM-5/360 PC (Perencanaan Hutan)	2 Bh	Oct-16	25%	3.384.000	-	-	3.384.000	423.478	2.960.522	105.869	-	3.066.392	317.608
	Alat Ukur Curah Hujan	1 Unit	Apr-18	25%	1.995.000	-	-	1.995.000	394.519	1.600.481	98.630	-	1.699.111	295.889
	Printer HP Designjet T795 = 44 Inc	1 Unit	Feb-18	25%	40.909.091	-	-	40.909.091	7.483.188	33.425.903	1.870.797	-	35.296.700	5.612.391
	AC Merek Panasonic Eco Smart 1 PK	1 Unit	Apr-18	25%	4.148.000	-	-	4.148.000	799.776	3.348.224	199.944	-	3.548.168	599.832
	Laptop Asus X441UA Core i3	1 Unit	May-18	25%	5.700.000	-	-	5.700.000	1.155.377	4.544.623	288.844	-	4.833.467	866.533
	Laptop Lenovo Ideapad 320 Core i5	1 Unit	May-18	25%	7.450.000	-	-	7.450.000	1.510.098	5.939.902	377.525	-	6.317.426	1.132.574
	Kompas Sunto KB-14/36 CR	2 Unit	Jul-18	25%	3.478.000	-	-	3.478.000	739.372	2.738.628	184.843	-	2.923.471	554.529
	AC Merek Panasonic KN5 TKJ (Mess Direksi)	1 Unit	Aug-18	25%	4.325.000	-	-	4.325.000	919.432	3.405.568	229.858	-	3.635.426	689.574
	Kipas Angin Panasonic Fep. 405	1 Unit	Sep-18	25%	550.000	-	-	550.000	122.360	427.640	30.590	-	458.230	91.770
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				161.362.655	-	-	161.362.655	16.236.966	145.125.689	4.059.242	-	149.184.931	12.177.724
	Jumlah Dipindahkan				5.398.026.624	-	-	5.398.026.624	2.478.225.124	2.919.801.500	245.925.841	-	3.165.727.341	2.232.299.284

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	Jumlah Pindahan				5.398.026.624	-	-	5.398.026.624	2.478.225.124	2.919.801.500	245.925.841	-	3.165.727.341	2.232.299.284
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				161.362.655	-	-	161.362.655	16.236.966	145.125.689	4.059.242	-	149.184.931	12.177.724
	Printer Merek Epson (Binsos)	1 Unit	Sep-18	25%	2.266.000	-	-	2.266.000	504.124	1.761.876	126.031	-	1.887.907	378.093
	UPS Prolink	1 Unit	Sep-18	25%	1.287.500	-	-	1.287.500	286.434	1.001.066	71.609	-	1.072.674	214.826
	Tanki Semprot Malaysia (Binhut)	1 Unit	Sep-18	25%	630.000	-	-	630.000	140.158	489.842	35.040	-	524.881	105.119
	Dongkrak + Engkol Ban Untuk Mobil Kijang Innova KT. 112(	1 Set	Oct-18	25%	500.000	-	-	500.000	113.708	386.292	28.427	-	414.719	85.281
	Kulkas Polytron PR 173 G	1 Unit	Feb-19	25%	1.950.000	-	-	1.950.000	488.452	1.461.548	122.113	-	1.583.661	366.339
	AC Sharp Osucy (Mess Direksi)	1 Unit	Jun-19	25%	3.450.000	-	-	3.450.000	955.151	2.494.849	238.788	-	2.733.636	716.364
	Laptop HP 14"	1 Unit	Aug-19	25%	5.850.000	-	-	5.850.000	1.696.729	4.153.271	424.182	-	4.577.454	1.272.546
	Gerobak Dorong (Binhut)	1 Unit	Feb-20	25%	770.000	-	-	770.000	147.480	622.520	36.870	-	659.390	110.610
	UPS ICA CN 1300 (Bidang Produksi)	1 Unit	Mar-20	25%	1.250.000	-	-	1.250.000	520.400	729.600	130.100	-	859.700	390.300
	Mesin Chainsaw Yamaha GX50 (Pamhut)	1 Unit	Jul-20	25%	1.600.000	-	-	1.600.000	590.625	1.009.375	147.656	-	1.157.031	442.969
	UPS ICA CN 1200 (Bidang Canhut)	1 Unit	Jul-20	25%	1.337.500	-	-	1.337.500	493.726	843.774	123.431	-	967.206	370.294
	UPS ICA CN 700 (Bidang Pamhut)	1 Unit	Jul-20	25%	909.500	-	-	909.500	335.733	573.767	83.933	-	657.700	251.800
	Gorden	1 Paket	Aug-21	25%	1.900.000	-	-	1.900.000	957.422	942.578	239.355	-	1.181.934	718.066
	Printer Epson L1110	1 Unit	Sep-21	25%	2.135.000	-	-	2.135.000	1.100.859	1.034.141	275.215	-	1.309.355	825.645
	Monitor Computer Merek SPC (Manager HRD & GA)	1 Unit	Nov-21	25%	1.400.000	-	-	1.400.000	754.688	645.313	188.672	-	833.984	566.016
	Printer Epson (Sekretaris Direksi & Dekom)	1 Unit	Jan-22	25%	2.650.000	-	-	2.650.000	1.490.625	1.159.375	372.656	-	1.532.031	1.117.969
	AC Panasonic CS-4MG7 KJ	1 Unit	Apr-22	25%	2.000.000	-	-	2.000.000	1.218.750	781.250	304.688	-	1.085.938	914.063
	HP Android Samasung Galaxy A32	1 Unit	Jun-22	25%	1.079.700	-	-	1.079.700	691.683	388.017	172.921	-	560.938	518.762
	Kulkas Merek Sharp SJ-X165	1 Unit	Jul-22	25%	1.500.000	-	-	1.500.000	984.375	515.625	246.094	-	761.719	738.281
	Kursi Merek Matrix Warna Coklat Untuk Ruang Rapat	10 Unit	Sep-22	25%	3.000.000	-	-	3.000.000	2.062.500	937.500	515.625	-	1.453.125	1.546.875
	Meja Kaca Untuk Ruang Musholla Kantor	1 Unit	Sep-22	25%	1.350.000	-	-	1.350.000	928.125	421.875	232.031	-	653.906	696.094
	Semprotan Rumput	1 Unit	Sep-22	25%	700.000	-	-	700.000	481.250	218.750	120.313	-	339.063	360.938
	Kursi Susun Merek Matrix Warna Coklat	10 Unit	Oct-22	25%	3.000.000	-	-	3.000.000	2.109.375	890.625	527.344	-	1.417.969	1.582.031
	Kursi Putar Merek Ardent	2 Unit	Oct-22	25%	3.800.000	-	-	3.800.000	2.671.875	1.128.125	667.969	-	1.796.094	2.003.906
	Gerobak Dorong (Kantor)	1 Unit	Jan-23	25%	700.000	-	-	700.000	525.000	175.000	131.250	-	306.250	393.750
	Kompor Gas Merek Hitachi (Mess Direksi / Dirkeu)	1 Unit	Jan-23	25%	650.000	-	-	650.000	487.500	162.500	121.875	-	284.375	365.625
	HT Rig Icom 2300 + Braket	1 Set	Jan-23	25%	3.180.000	-	-	3.180.000	2.385.000	795.000	596.250	-	1.391.250	1.788.750
	HP Oppo A775 (Pamhut)	1 Unit	Jan-23	25%	3.500.000	-	-	3.500.000	2.625.000	875.000	656.250	-	1.531.250	1.968.750
	Mesin Absensi	3 Unit	Jan-23	25%	1.480.000	-	-	1.480.000	1.110.000	370.000	277.500	-	647.500	832.500
	Infokus Merek Epson EBE500	1 Unit	Feb-23	25%	5.550.000	-	-	5.550.000	4.278.125	1.271.875	1.069.531	-	2.341.406	3.208.594
	Prolink Pro 1.200	1 Unit	Mar-23	25%	1.240.200	-	-	1.240.200	981.825	258.375	245.456	-	503.831	736.369
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				223.978.055	-	-	223.978.055	50.353.665	173.624.391	12.588.416	-	186.212.807	37.765.248
	Jumlah Dipindahkan				5.460.642.024	-	-	5.460.642.024	2.512.341.823	2.948.300.202	254.455.015	-	3.202.755.217	2.257.886.807

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D	MUTASI TAHUN 2024		S/D		S/D	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D	
					31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	TAHUN 2023	31 - 12 - 2023	DEBET	KREDIT	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2024
	Jumlah Pindahan				5.460.642.024	-	-	5.460.642.024	2.512.341.823	2.948.300.202	254.455.015	-	3.202.755.217	2.257.886.807
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				223.978.055	-	-	223.978.055	50.353.665	173.624.391	12.588.416	-	186.212.807	37.765.248
	Kursi Tunggu 3 Baris	1 Unit	Mar-23	25%	1.500.000	-	-	1.500.000	1.187.500	312.500	296.875	-	609.375	890.625
	CCTV Untuk Kantor	1 Unit	Mar-23	25%	8.200.000	-	-	8.200.000	6.491.667	1.708.333	1.622.917	-	3.331.250	4.868.750
	Tandon Air Merek My Tank Untuk Persemaian KM. 35	1 Unit	Mar-23	25%	1.785.000	-	-	1.785.000	1.413.125	371.875	353.281	-	725.156	1.059.844
	Pump Jet Krisbow	1 Unit	Mar-23	25%	1.415.500	-	-	1.415.500	1.120.604	294.896	280.151	-	575.047	840.453
	Printer Epson L3210	1 Unit	Mar-23	25%	2.500.000	-	-	2.500.000	1.979.167	520.833	494.792	-	1.015.625	1.484.375
	Speaker Miting Wireles Durand 10	1 Unit	Mar-23	25%	1.800.000	-	-	1.800.000	1.425.000	375.000	356.250	-	731.250	1.068.750
	Kipas Angin Merek Matsumichi	2 Unit	Mar-23	25%	1.080.000	-	-	1.080.000	855.000	225.000	213.750	-	438.750	641.250
	Mesin Pompa National MDL OP200	1 Unit	Mar-23	25%	690.000	-	-	690.000	546.250	143.750	136.563	-	280.313	409.688
	UPS Prolink Pro 1200	1 Unit	May-23	25%	1.240.200	-	-	1.240.200	1.033.500	206.700	258.375	-	465.075	775.125
	Print Head Zebra XIII Plus 203 dpi	1 Unit	Jun-23	25%	3.789.000	-	-	3.789.000	3.236.438	552.563	809.109	-	1.361.672	2.427.328
	Generator 5.500 W 1 PH Open KRP 55 (Mesin Genzet) Me	1 Unit	Jul-23	25%	9.238.739	-	-	9.238.739	8.083.897	1.154.842	2.020.974	-	3.175.817	6.062.922
	Gerobak Arco	1 Unit	Jul-23	25%	640.000	-	-	640.000	560.000	80.000	140.000	-	220.000	420.000
	Rice Cooker 6L MMC4015	1 Unit	Aug-23	25%	1.550.000	-	-	1.550.000	1.388.542	161.458	347.135	-	508.594	1.041.406
	Dispenser Merek Sanken	1 Unit	Aug-23	25%	2.800.000	-	-	2.800.000	2.508.333	291.667	627.083	-	918.750	1.881.250
	Semprotan Rumput Untuk Bidang Pamhut	2 Unit	Aug-23	25%	1.600.000	-	-	1.600.000	1.433.333	166.667	358.333	-	525.000	1.075.000
	Selang Pemadam 30 M Untuk Pamhut	1 Set	Aug-23	25%	1.050.000	-	-	1.050.000	940.625	109.375	235.156	-	344.531	705.469
	Tangki Air Segi 4 Untuk Pamhut	1 Unit	Aug-23	25%	1.250.000	-	-	1.250.000	1.119.792	130.208	279.948	-	410.156	839.844
	UPS ICA 02-CT-1082B VA 1000 Watt (Canhut)	1 Unit	Jun-24	25%	-	1.165.500		1.165.500	-	-	169.969	-	169.969	995.531
	HP Android Redmi Note 12 Ram 8/256 = 3 Unit dan Ram 6/	4 Unit	Jun-24	25%	-	3.585.000		3.585.000	-	-	522.813	-	522.813	3.062.188
	UPS ICA 5005 - GKA CV - 1400 (Barcode)	1 Unit	Jul-24	25%	-	494.100		494.100	-	-	61.763	-	61.763	432.338
	Laptop Asus E1504FA R5-7250 (Perencanaan)	1 Unit	Aug-24	25%	-	8.738.739		8.738.739	-	-	910.285	-	910.285	7.828.454
	Peralatan Dalkarhutla (Pamhut)	1 Paket	Dec-24	25%	-	133.810.000		133.810.000	-	-	2.787.708	-	2.787.708	131.022.292
	Kompas Sunto	6 Unit	Dec-24	25%	-	7.270.000		7.270.000	-	-	151.458	-	151.458	7.118.542
	Kipas Angin Cosmos	1 Unit	Dec-24	25%	-	351.000		351.000	-	-	7.313	-	7.313	343.688
	Jumlah Inventais Kelompok II				266.106.494	155.414.339	-	421.520.833	85.676.436	180.430.058	26.030.417	-	206.460.475	215.060.358
	Jumlah Inventaris Kantor Kelompok I & II				**705.178.856**	**155.414.339**	**-**	**860.593.195**	**85.676.436**	**619.502.420**	**26.030.417**	**-**	**645.532.837**	**215.060.358**
	GRAND TOTAL				**5.502.770.463**	**155.414.339**	**-**	**5.658.184.802**	**2.547.664.594**	**2.955.105.869**	**267.897.016**	**-**	**3.223.002.886**	**2.435.181.917**

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR PROPERTI INVESTASI DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2024

Lampiran II

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2024
					S/D 31 - 12 - 2023	MUTASI TAHUN 2024 DEBET	MUTASI TAHUN 2024 KREDIT	S/D 31 - 12 - 2024		S/D 31 - 12 - 2023	PENYUSUTAN TAHUN 2024 DEBET	PENYUSUTAN TAHUN 2024 KREDIT	S/D 31 - 12 - 2024	
I.	**BANGUNAN**													
	Lantai I Wing Kanan 80 M2	1 Unit	Sep-16	5%	343.522.623	-	-	343.522.623	218.977.671	124.544.952	17.176.131	-	141.721.083	201.801.540
	Lantai I Wing Kiri 183,37 M2	1 Unit	Sep-16	5%	787.396.793	-	-	787.396.793	501.983.460	285.413.333	39.369.840	-	324.783.173	462.613.620
	TOTAL				1.130.919.417	-	-	1.130.919.417	720.961.131	409.958.285	56.545.971	-	466.504.256	664.415.161

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET LAIN - LAIN DAN AKUMULASI AMORTISASI
31 DESEMBER 2024

Lampiran III

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO-LEHAN	% PENYU-SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2024
					S/D 31 - 12 - 2023	MUTASI TAHUN 2024		S/D 31 - 12 - 2024		S/D 31 - 12 - 2023	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D 31 - 12 - 2024	
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
I.	**PERIJINAN JANGKA PANJANG**													
1	Beban Pra Operasi		May-03	25%	28.842.850	-	-	28.842.850	-	28.842.850	-	-	28.842.850	-
2	Beban Ditangguhkan		May-03	13%	443.345.523	-	-	443.345.523	-	443.345.523	-	-	443.345.523	-
3	Perijinan JKP/RKPH		Jan-07	3%	5.614.299.000	-	-	5.614.299.000	2.457.191.535	3.157.107.465	185.271.867	-	3.342.379.332	2.271.919.668
4	Penyusunan RKUPH2K		Apr-07	10%	162.731.109	-	-	162.731.109	-	162.731.109	-	-	162.731.109	-
5	Pelaksanaan IHMB		Dec-10	10%	453.134.285	-	-	453.134.285	-	453.134.285	-	-	453.134.285	-
6	Pelaksanaan Penilaian PHPL		Oct-14	20%	242.418.020	-	-	242.418.020	0	242.418.020	-	-	242.418.020	0
7	Perubahan Anggaran Dasar		Sep-12	33%	9.000.000	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-
8	Penyusunan RKUPHHK Brbasis IHMB-HA		2014	11%	49.012.504	-	-	49.012.504	-	49.012.504	-	-	49.012.504	-
9	Perubahan Anggaran Dasar		Nov-16	33%	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
10	Revisi RKU-IUPHHK		Oct-16	10%	236.868.000	-	-	236.868.000	67.112.600	169.755.400	23.686.800	-	193.442.200	43.425.800
11	Pelaksanaan Penilaian PHPL (Resertifikasi) Tahun 2018		Dec-18	20%	358.404.849	-	-	358.404.849	-	358.404.849	-	-	358.404.849	-
12	Pelaksanaan IHMB Tahun 2020		Dec-21	10%	215.640.880	-	-	215.640.880	172.512.704	43.128.176	21.564.088	-	64.692.264	150.948.616
13	Usaha Perkebunan Karet Dalam Pengembangan		2022	20%	283.132.100	-	-	283.132.100	169.879.260	113.252.840	56.626.420	-	169.879.260	113.252.840
14	Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan		2022	20%	199.677.000	-	-	199.677.000	119.806.200	79.870.800	39.935.400	-	119.806.200	79.870.800
15	Piutang Macet		2022	20%	79.469.400	-	-	79.469.400	47.681.640	31.787.760	15.893.880	-	47.681.640	31.787.760
	TOTAL				8.383.475.520	-	-	8.383.475.520	3.034.183.939	5.349.291.581	342.978.455	-	5.692.270.036	2.691.205.484



LAMPIRAN 7

LAPORAN KEUANGAN PT INDO PUSAKA BERAU TAHUN ANGGARAN 2024

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

LAPORAN LABA / RUGI PER UNSUR

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

K E T E R A N G A N	Catatan	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
PENDAPATAN USAHA	11	**139.081.796.007**	**125.465.025.508**
- Penjualan Tenaga listrik	11.1	139.081.796.007	125.465.025.508
- Penjualan Tenaga listrik PT. PLN		71.644.854.865	65.790.213.549
- Penjualan Tenaga listrik PT. Berau Coal		67.384.276.754	59.619.651.089
- Penjualan Tenaga listrik PT. Smart Telecom		52.664.388	55.160.870
BEBAN USAHA	12	**180.284.305.651**	**156.195.594.507**
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	12.2	117.059.562.630	92.903.747.589
- Solar		1.158.016.386	1.126.101.737
- Batu bara		105.616.968.472	82.550.309.086
- Campuran Bahan Bakar dll.		10.284.577.772	9.227.336.766
- Pemeliharaan	12.3	17.670.979.384	17.577.322.315
- Pemakaian Material		4.476.303.716	4.611.507.441
- Jasa Borongan		13.194.675.668	12.965.814.874
- Kepegawaian	12.4	19.696.908.697	20.628.797.303
- Penyusutan Aktiva Tetap		17.237.910.433	15.803.958.943
- Administrasi	12.5	8.618.944.507	9.281.768.357
LABA (RUGI) USAHA		**(41.202.509.644)**	**(30.730.568.999)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		**(113.963.627)**	**(1.693.719.082)**
- Pendapatan Bunga	13	58.687.575	152.813.263
- Beban Pajak Bunga	14	(11.737.519)	(30.562.657)
- Beban Pinjaman Bank ( )	15	-	(118.259.885)
- Beban Lain-Lain (TJSR)	16	(224.593.930)	(311.177.650)
- Pendapatan Lainnya	17	63.676.178	(1.386.531.162)
- Pendapatan / Beban Selisih Kurs	18	4.069	(991)
LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		**(41.316.473.271)**	**(32.424.288.081)**
BEBAN PAJAK	20	**9.424.705.764**	**7.160.238.484**
Beban Pajak Kini		9.251.145.101	1
Beban Pajak Tangguhan		173.560.663	7.160.238.483
LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS		**(31.891.767.507)**	**(25.264.049.597)**
Pendapatan Komprehensif lainnya		-	360.938.901
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(31.891.767.507)**	**(24.903.110.696)**

-

DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

M. TEGUH SATRIA

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

LAPORAN LABA / RUGI PER FUNGSI

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

KETERANGAN	Catatan	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024	UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
A. PENDAPATAN USAHA		**139.081.796.007**	**125.465.025.508**
B. BEBAN USAHA		**180.284.305.651**	**156.195.594.507**
		-	-
- Pembangkitan PLTU		180.284.305.651	156.195.594.507
Sub Jumlah		**180.284.305.651**	**156.195.594.507**
Fungsi Transmisi :			
- Sistim Transmisi			
Sub Jumlah		**-**	**-**
Fungsi Distribusi :			
- Sistim Distribusi			
Sub Jumlah		**-**	**-**
Fungsi Tata Usaha Langganan			
Fungsi Pendukung :			
- Tata Usaha		-	-
- Gudang dan Persediaan Bahan		-	-
Sub Jumlah		**-**	**-**
C. LABA USAHA		**(41.202.509.644)**	**(30.730.568.999)**
D. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		**(113.963.627)**	**(1.693.719.082)**
E. LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(41.316.473.271)**	**(32.424.288.081)**
LABA (RUGI) LUAR BIASA		-	-
F. LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN		**(41.316.473.271)**	**(32.424.288.081)**
BEBAN PAJAK		**9.424.705.764**	**7.160.238.484**
Beban Pajak Kini		9.251.145.101	1
Beban Pajak Tangguhan		173.560.663	7.160.238.483
G. LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS		**(31.891.767.507)**	**(25.264.049.597)**
Pendapatan Komprehensif lainnya		-	360.938.901
H. LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(31.891.767.507)**	**(24.903.110.696)**
		-	-

DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

M. TEGUH SATRIA

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Lampiran 7

KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2024	PER 31 DESEMBER 2023
A S E T			**EKUITAS DAN KEWAJIBAN**		
ASET TETAP (NETTO)	**195.819.670.666**	**211.401.369.245**	**E K U I T A S**	**161.078.154.788**	**193.278.979.919**
Aset Tetap (Bruto)	374.199.664.586	373.483.717.656	**Modal Saham**	**133.150.000.000**	**133.150.000.000**
Akumulasi Penyusutan	(178.379.993.920)	(162.082.348.411)	**Tambahan Modal**	**2.543.000.000**	**2.543.000.000**
			Saldo Laba	**25.385.154.788**	**57.585.979.919**
			HAK MINORITAS ANAK PERSAHAAN	**-**	**-**
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN	**871.004.520**	**21.295.989**	**AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI**	**-**	**-**
PROPERTI INVESTASI	**-**	**-**	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**493.755.530**	**3.525.883.418**
P E N Y E R T A A N	**-**	**-**	**PENDAPATAN DITANGGUHKAN**	**-**	**-**
			KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	**1.023.920.104**	**1.197.480.767**
ASET LAIN-LAIN	**16.750.551.140**	**17.690.816.064**	**Pinjaman Jangka Panjang :**		
Aset Tidak Beroperasi	**16.750.551.140**	**17.690.816.064**	**- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**	**2**	**2.911.123.841**
Piutang Lain-Lain (Jk. Panjang)	**-**	**-**	Penerusan Pinjaman	2	1.411.123.841
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	-	Hutang Kepada Pemerintah	-	1.500.000.000
- Pihak Ketiga	-	-	**Hutang Lain-lain (Jk. Panjang)**	**493.755.528**	**614.759.577**
			- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	493.755.528	614.759.577
			Kewajiban Manfaat Pekerja (Jk. Panjang)	**13.545.003.665**	**11.974.187.614**
ASET LANCAR	**156.460.193.521**	**82.391.860.975**			
Kas dan Setara Kas	**8.727.453.466**	**2.346.439.478**	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**196.565.434.965**	**104.333.674.391**
Investasi Sementara	**-**	**-**	**Hutang Usaha**	**196.068.220.369**	**95.406.930.712**
Piutang Usaha (Netto)	**132.662.950.010**	**69.611.457.425**	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	-
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bruto)	5.654.679.466	6.042.427.007	- Pihak Ketiga	196.068.220.369	95.406.930.712
Penyisihan (Hubungan Istimewa) ()	-	-	**Hutang Dana Pensiun**	**-**	**-**
	5.654.679.466	**6.042.427.007**	**Hutang Pajak**	**(9.105.083.634)**	**522.670.430**
- Pihak Ketiga (Bruto)	127.008.270.544	63.569.030.418	**Hutang Lain-Lain**	**2.344.905.158**	**2.892.692.116**
Penyisihan (Pihak ketiga) ()	-	-	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2.344.905.158	2.892.692.116
	127.008.270.544	**63.569.030.418**	- Pihak Ketiga	-	-
P e r s e d i a a n (Netto)	**11.763.789.962**	**8.282.109.363**	***Biaya Yang Masih Harus Dibayar***	**7.257.393.072**	**5.511.381.133**
- P e r s e d i a a n (Bruto)	11.763.789.962	8.282.109.363	**Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo**	-	-
P e n y i s i h a n ( )	-	-	**- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**	-	-
Uang Muka Pajak	**3.259.929.113**	**2.094.524.191**	Penerusan Pinjaman	**-**	**-**
Piutang Lain-Lain (Jangka Pendek)	**2.261.822**	**2.261.822**	Hutang Kepada Pemerintah	**-**	**-**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2.261.822	2.261.822	Hutang Bank	-	-
- Pihak Ketiga	-	-	**- Pihak Ketiga**	-	-
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Pendek)	**43.809.148**	**55.068.696**		-	-
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	-	Hutang Obligasi	**-**	**-**
- Pihak Ketiga	43.809.148	55.068.696	**Hutang Promes**		
			Kewajiban Manfaat Pekerja (Jk. Pendek)	-	-
J U M L A H A S E T	**372.706.269.052**	**314.310.206.109**	**JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN**	**372.706.269.052**	**314.310.206.109**
	-	-		-	-

DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

M. TEGUH SATRIA

Lampiran 7

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		A S S E T			
		ASSET TETAP (BRUTO)	**L1A1, L1A2**		
		Pembangkitan			
	1 11 1 00 000	- Pembangkitan PLTA		-	-
	1 12 1 00 000	- Pembangkitan PLTU		374.319.499.784	371.717.875.274
	1 13 1 00 000	- Pembangkitan PLTD		-	-
	1 14 1 00 000	- Pembangkitan PLTG		-	-
	1 15 1 00 000	- Pembangkitan PLTP		-	-
	1 16 1 00 000	- Pembangkitan PLTGU		-	-
		Sub Jumlah.....		**374.319.499.784**	**371.717.875.274**
		Transmisi			
	1 20 1 00 000	- Sistem Transmisi		-	-
	1 30 1 00 000	- Sistem Teleinformasi Data		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
		Distribusi			
	1 40 1 00 000	- Sistem Distribusi		-	-
	1 50 1 00 000	- Unit Pengatur Distribusi		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
	1 60 1 00 000	**Tata Usaha Langganan**		-	-
		U m u m			
	1 71 1 00 000	- Tata Usaha		-	-
	1 72 1 00 000	- Gudang & Persediaan Bahan		-	-
	1 73 1 00 000	- B e n g k e l		-	-
	1 74 1 00 000	- Laboratorium		-	-
	1 75 1 00 000	- Jasa-jasa Teknik		-	-
	1 76 1 00 000	- Wisma & Rumah Dinas		-	-
	1 77 1 00 000	- Sistem Telekomunikasi		-	-
	1 78 1 00 000	- Rupa-rupa Jasa Umum		-	-
	1 79 1 00 000	- Pendidikan dan Latihan		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
	1 60 1 00 000	**ASET HAK GUNA**		(119.835.198)	1.765.842.382
		Sub Jumlah.....		**(119.835.198)**	**1.765.842.382**
		JUMLAH ASSET TETAP (BRUTO)		**374.199.664.586**	**373.483.717.656**
		AKUMULASI PENYUSUTAN ( )	**L1B1,L1B2**		
		Pembangkitan			
	1 11 2 00 000	- Pembangkitan PLTA		-	-
	1 12 2 00 000	- Pembangkitan PLTU		(178.379.993.920)	(162.082.348.411)
	1 13 2 00 000	- Pembangkitan PLTD		-	-
	1 14 2 00 000	- Pembangkitan PLTG		-	-
	1 15 2 00 000	- Pembangkitan PLTP		-	-
	1 16 2 00 000	- Pembangkitan PLTGU		-	-
		Sub Jumlah.....		**(178.379.993.920)**	**(162.082.348.411)**
		Transmisi			
	1 20 2 00 000	- Sistem Transmisi		-	-
	1 30 2 00 000	- Sistem Teleinformasi Data		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
		Distribusi			
	1 40 2 00 000	- Sistem Distribusi		-	-
	1 50 2 00 000	- Unit Pengatur Distribusi		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
	1 60 2 00 000	**Tata Usaha Langganan**		-	-
		U m u m			
	1 71 2 00 000	- Tata Usaha		-	-
	1 72 2 00 000	- Gudang & Persediaan Bahan		-	-
	1 73 2 00 000	- B e n g k e l		-	-
	1 74 2 00 000	- Laboratorium		-	-
	1 75 2 00 000	- Jasa-jasa Teknik		-	-
	1 79 2 00 000	- Pendidikan dan Latihan		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
		JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN		**(178.379.993.920)**	**(162.082.348.411)**
		JUMLAH ASSET TETAP (NETTO)	**1**	**195.819.670.666**	**211.401.369.245**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN	**L2A.2B,2C**		
		Pembangkitan			
	1 11 3 00 000	- Pembangkitan PLTA			
	1 12 3 00 000	- Pembangkitan PLTU		871.004.520	21.295.989
	1 13 3 00 000	- Pembangkitan PLTD			-
	1 14 3 00 000	- Pembangkitan PLTG		-	-
	1 15 3 00 000	- Pembangkitan PLTP		-	-
	1 16 3 00 000	- Pembangkitan PLTGU		-	-
		Sub Jumlah		**871.004.520**	**21.295.989**
		Transmisi			
	1 20 3 00 000	- Sistem Transmisi		-	-
	1 30 3 00 000	- Sistem Teleinformasi Data		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Distribusi			
	1 40 3 00 000	- Sistem Distribusi		-	-
	1 50 3 00 000	- Unit Pengatur Distribusi		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
	1 60 3 00 000	**Tata Usaha Langganan**		-	-
		U m u m			
	1 71 3 00 000	- Tata Usaha		-	-
	1 72 3 00 000	- Gudang & Persediaan Bahan		-	-
	1 73 3 00 000	- B e n g k e l		-	-
	1 74 3 00 000	- Laboratorium		-	-
	1 75 3 00 000	- Jasa-jasa Teknik		-	-
	1 79 3 00 000	- Pendidikan dan Latihan		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		JUMLAH P D P	**2**	**871.004.520**	**21.295.989**
	1 xx 1 00 000	**PROPERTI INVESTASI**	**L1F**	-	-
		PENYERTAAN / PENANAMAN	**L3A**		
	1 00 4 11 000	**Penyertaan Pada Anak Perusahaan :**		-	-
	1 00 4 11 102	Penyertaan pada PT. Cogindo Daya Bersama		-	-
	1 00 4 11 104	Penyertaan pada PT. Artha Daya Coalindo		-	-
	1 00 4 11 105	Penyertaan pada PT. Indo Pusaka Berau		-	-
	1 00 4 11 xxx	Penyertaan lainnya		-	-
		Sub Jumlah Penyertaan Pada Anak Perusahaan		**-**	**-**
	1 00 4 11 103	Penanaman (Surat Saham) / Dieng Patuha / Unindo		-	-
	1 00 4 11 106	Penanaman (Surat Obligasi) / Dieng Patuha		-	-
	1 00 4 11 199	Penanaman (Surat Berharga Lainnya)		-	-
		Sub Jumlah Penanaman		**-**	**-**
		JUMLAH PENYERTAAN DAN PENANAMAN	**3**	**-**	**-**
		ASSET LAIN-LAIN	**4**		
	1 00 4 05 000	**ASSET TIDAK BEROPERASI :**			
	1 00 4 05 111	Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus		60.386.184.286	60.386.184.286
	1 00 4 05 211	Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi		-	-
	1 00 4 05 221	Aktiva Tetap Yang Akan Diperbaiki		-	-
		Sub Jumlah Harga Perolehan ATTB	**L4A1,L4A2**	**60.386.184.286**	**60.386.184.286**
	1 00 4 05 112	Akum. Peny. Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus ( )		(43.895.124.965)	(43.154.358.809)
	1 00 4 05 212	Akum. Peny. Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi ( )		-	-
	1 00 4 05 222	Akum. Peny. Aktiva Tetap Yang Akan Diperbaiki ( )		-	-
		Sub Jumlah Akum Penyusutan ATTB ..... ( )	**L4B1,L4B2**	**(43.895.124.965)**	**(43.154.358.809)**
		Nilai Buku Asset Tetap Tidak Beroperasi		**16.491.059.321**	**17.231.825.477**
	1 00 4 05 121	Material Yang Akan Dihapus (Mat. Har & Mat. PDP)		125.000.000	125.000.000
	1 00 4 05 122	Penyisihan Material Yang Akan Dihapus ( )		-	-
		Nilai Buku Material Yg. Akan Dihapus		**125.000.000**	**125.000.000**
		Aktiva Tidak Berwujud		3.731.191.759	3.731.191.759
		Akum. Peny. Aktiva Tidak Berwujud ( )		(3.596.699.940)	(3.397.201.172)
	1 00 4 05 141	Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus		-	-
	1 00 4 05 231	Material PDP Yang Akan Direlokasi		-	-
		Sub Jumlah Aktiva Tidak Berwujud ...		**134.491.819**	**333.990.587**
		Material belum dimanfaatkan		-	-
	1 00 4 06 000	**Asset Tetap Belum Dimanfaatkan**	**L4D1,L4D2**		
		Jumlah Asset Tidak Beroperasi	**4.1**	**16.750.551.140**	**17.690.816.064**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		PIUTANG LAIN-LAIN (Jangka Panjang) :			
		- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa :			
	1 00 4 13 100	Piutang Pegawai PUMP KPR/BPRP (Holding)		-	-
	1 00 4 13 200	Piutang Tuntutan Ganti Rugi		-	-
	1 00 4 13 300	Pinjaman Pegawai Jangka Panjang - Lainnya		-	-
	1 00 4 14 001	Piutang Jangka Panjang Lainnya	**L4E**	-	-
	1 00 4 18 100	Piutang Jk. Panjang Kepada PT. Indonesia Power		-	-
	1 00 4 18 200	Piutang Jk. Panjang kepada PT. PJB		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		- Pihak Ketiga :			
	1 00 4 24 001	Piutang Jangka Panjang Lainnya	**L4E**	2.804.849.205	2.804.863.836
		Jumlah Piutang Lain-Lain (Jk.Panjang).....	**4.2**	**2.804.849.205**	**2.804.863.836**
	1 00 4 x2 000	**BIAYA DITANGGUHKAN - PIHAK ISTIMEWA**	**L4F**	-	-
	1 00 4 12 200	Biaya yg Ditangguhkan (Penelitian & Pengembangan)		-	-
	1 00 4 12 299	Biaya yg Ditangguhkan Lainnya		-	-
	1 00 4 12 300	Biaya Emisi Obligasi		-	-
	1 00 4 12 400	Biaya yg Ditangguhkan (Biaya Iuran Masa Kerja Lampau)		-	-
		Jumlah Biaya Ditangguhkan Pihak Istimewa ...		**-**	**-**
		BIAYA DITANGGUHKAN PIHAK KETIGA	**L4F**		
	1 00 4 22 200	Biaya yg Ditangguhkan (Penelitian & Pengembangan)		-	-
	1 00 4 22 299	Biaya yg Ditangguhkan Lainnya		-	-
	1 00 4 22 300	Biaya Emisi Obligasi		-	-
		Jumlah Biaya Ditangguhkan Pihak Ke Tiga		**-**	**-**
		Jumlah Biaya Ditangguhkan	**4.3**	**-**	**-**
		BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA :			
	1 00 4 12 101	Biaya Dibayar Dimuka Sewa Tanah		-	-
	1 00 4 12 102	Biaya Dibayar Dimuka Sewa Gedung		-	-
	1 00 4 12 103	Pembayaran Dimuka Gas Make Up		-	-
	1 00 4 12 109	Biaya Dibayar Dimuka "Manfaat Pekerja"		-	-
	1 00 4 12 199	Biaya dibayar dimuka lainnya	**L4G**	-	-
		Sub Jumlah - Hubungan Istimewa		**-**	**-**
		- PIHAK KETIGA:			
	1 00 4 22 101	Biaya Dibayar Dimuka Sewa Tanah		-	-
	1 00 4 22 102	Biaya Dibayar Dimuka Sewa Gedung		-	-
	1 00 4 22 103	Pembayaran Dimuka Gas Make Up		-	-
	1 00 4 22 199	Biaya dibayar dimuka lainnya	**L4G**	-	-
		Sub Jumlah - Pihak Ketiga		**-**	**-**
		Jumlah Biaya Dibayar Dimuka & Uang Muka.....	**4.4**	**-**	**-**
		JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN.....	**4**	**19.555.400.345**	**20.495.679.900**
	1 00 5 00 000	**DANA PELUNASAN OBLIGASI**		-	-
	1 00 4 03 000	**ASSET PAJAK TANGGUHAN**	**L20**	-	-
		ASSET LANCAR	**5**		
		KAS DAN SETARA KAS :			
	1 00 6 01 000	**K A S :**	**L5A**	-	-
	1 00 6 01 001	Kas Pendapatan		-	-
	1 00 6 01 002	Kas Pembiayaan		16.748.400	11.625.000
	1 00 6 01 004	Kas Kecil		-	-
	1 00 6 01 005	Kas			
		JUMLAH KAS		**16.748.400**	**11.625.000**
		B A N K			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :	**L5A,L5A3**		
	1 00 6 12 100	**Bank Pendapatan :**			
	1 00 6 12 103	Bank Penerimaan - BNI 46		-	-
	1 00 6 12 105	Bank Penerimaan - BPD Syariah		-	-
	1 00 6 12 119	Bank Pembangunan Daerah		-	-
		Jumlah Bank Pendapatan		**-**	**-**
	1 00 6 12 200	**Bank Pembiayaan :**			
	1 00 6 12 203	Bank Pembayaran - BNI		-	-
	1 00 6 12 219	Bank Garansi		-	-
		Jumlah Bank Pembiayaan		**-**	**-**
		Sub Jumlah Bank - Hubungan Istimewa ..		**-**	**-**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		- PIHAK KETIGA :	**L5A,L5A3**		
	1 00 6 22 100	**Bank Pendapatan :**		-	-
	1 00 6 22 121	Bank Central Asia		-	-
	1 00 6 22 123	Pan Indonesia Bank		-	-
	1 00 6 22 125	Bank Century (CIC)		-	-
	1 00 6 22 127	Bank Niaga		-	-
	1 00 6 22 129	Bank Permata d.h Bali		-	-
	1 00 6 22 199	Bank Swasta Lainnya	**L 5 A 4**	-	-
		Jumlah Bank Penerimaan		**-**	**-**
	1 00 6 22 200	**Bank Pembiayaan :**		-	-
	1 00 6 22 221	Bank Penerimaan - BNI 46		8.710.705.066	2.334.814.478
	1 00 6 22 223	Bank Penerimaan - BPD Syariah		-	-
	1 00 6 22 225	Bank Penerimaan - Mandiri		-	-
	1 00 6 22 227			-	-
	1 00 6 22 229	Bank Permata d.h Bali		-	-
	1 00 6 22 231	Bank Buana Indonesia		-	-
	1 00 6 22 233	Bank Artha Graha		-	-
	1 00 6 22 237	Lippo Bank		-	-
	1 00 6 22 241	Bank BUKOPIN		-	-
	1 00 6 22 243	Bank International Indonesia		-	-
	1 00 6 22 245	Bank Muamalat		-	-
	1 00 6 22 249	Bank Danamon (Inc Ex Bank Duta, Jaya, Angkasa Pura dll)		-	-
	1 00 6 22 299	Bank Swasta Lainnya	**L 5 A 4**	-	-
		Jumlah Bank Pembiayaan		**8.710.705.066**	**2.334.814.478**
		Sub Jumlah Bank - Pihak Ketiga		**8.710.705.066**	**2.334.814.478**
	1 00 6 01 003	Kas Dalam perjalanan		-	-
		JUMLAH BANK		**8.710.705.066**	**2.334.814.478**
	1 00 6 x1 010	**DEPOSITO JK. PENDEK (< 3 BULAN) TIDAK DIJAMINKAN:**	**L 5 A 1**		
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	1 00 6 13 101	Deposito Bank Kaltim Syariah		-	-
	1 00 6 13 103	Deposito Bank - BNI 46		-	-
	1 00 6 13 105	Deposito Bank - Mega		-	-
	1 00 6 13 107	Deposito Bank - Mandiri		-	-
	1 00 6 13 117	Deposito Bank Kaltim (BPD)		-	-
		Sub Jumlah - Hubungan Istimewa		**-**	**-**
		- PIHAK KETIGA :			
	1 00 6 22 121	Deposito Bank Central Asia		-	-
	1 00 6 22 123	Deposito Pan Indonesia Bank		-	-
	1 00 6 22 125	Deposito Bank Century (CIC)		-	-
	1 00 6 22 127	Deposito Bank Niaga		-	-
	1 00 6 22 129	Deposito Bank Permata d.h Bali		-	-
	1 00 6 22 131	Deposito Bank Buana Indonesia		-	-
	1 00 6 22 133	Deposito Bank Artha Graha		-	-
	1 00 6 23 199	Deposito Bank Swasta Lainnya		-	-
		Sub Jumlah - Pihak Ketiga		**-**	**-**
		Jumlah Deposito		**-**	**-**
		JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	**5.1**	**8.727.453.466**	**2.346.439.478**
		INVESTASI SEMENTARA			
		DEPOSITO <3 BULAN DIJAMINKAN DAN DEPOSITO 3-12 BULAN	**L 5 A 2**		
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	1 00 6 13 203	Deposito Bank - BNI 46		-	-
	1 00 6 13 205	Deposito Bank - BRI		-	-
	1 00 6 13 207	Deposito Bank - Mandiri		-	-
	1 00 6 13 217	Deposito Bank Pembangunan Daerah (Kaltim Syariah)		-	-
		Sub Jumlah - Hubungan Istimewa		**-**	**-**
		- PIHAK KETIGA :			
	1 00 6 23 221	Deposito Bank Central Asia		-	-
	1 00 6 23 223	Deposito Pan Indonesia Bank		-	-
	1 00 6 23 229	Deposito Bank Permata d.h Bali		-	-
	1 00 6 23 231	Deposito Bank Buana Indonesia		-	-
	1 00 6 23 299	Deposito Bank Swasta Lainnya		-	-
		Sub Jumlah - Pihak Ketiga		**-**	**-**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		INVESTASI SEMENTARA LAINNYA	**L5A2**		
	1 00 6 13 301	Saham		-	-
	1 00 6 13 302	Wesel Tagih		-	-
	1 00 6 13 399	Investasi Sementara Lainnya		-	-
		SUB JUMLAH INVESTASI SEMENTARA LAINNYA		**-**	**-**
		JUMLAH INVESTASI SEMENTARA	**5.2**	**-**	**-**
	1 00 6 x4 000	**PIUTANG USAHA**	**L5B**		
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	1 00 6 14 105	Piutang Langganan - PT PLN (Persero)	**L5B1,5B2**	5.654.679.466	6.042.427.007
	1 00 6 14 400	Piutang Macam - macam (Afiliasi)	**L5C**	-	-
	1 00 6 14 500	Piutang Ragu - ragu (Afiliasi)		-	-
		Jumlah Piutang - Hub. Istimewa (bruto)		**5.654.679.466**	**6.042.427.007**
	1 00 6 14 900	Penyisihan Piutang ( )- Hub. Istimewa		-	-
		Jumlah Piutang - Hub. Istimewa (bersih).....		**5.654.679.466**	**6.042.427.007**
		- PIHAK KETIGA :			
	1 00 6 24 101	Piutang Langganan - Umum	**L5B1,5B2**	-	-
	1 00 6 24 102	Piutang Langganan - A B R I (TNI & POLRI)		-	-
	1 00 6 24 103	Piutang Langganan - Non ABRI (Departemen)		-	-
	1 00 6 24 104	Piutang Langganan - PEMDA		-	-
	1 00 6 24 400	Piutang Macam - macam (Non Afiliasi)			
	1 00 6 24 400	Piutang Macam - macam (Non Afiliasi)	**L5C**	127.008.270.544	63.569.030.418
		Piutang Lainnya			
		Jumlah Piutang - Pihak Ketiga (bruto)		**127.008.270.544**	**63.569.030.418**
	1 00 6 24 400	Penyisihan Piutang ( ) - Pihak Ketiga			
		Jumlah Piutang - Pihak Ketiga (bersih).....		**127.008.270.544**	**63.569.030.418**
		JUMLAH PIUTANG USAHA (Bersih).....	**5.3**	**132.662.950.010**	**69.611.457.425**
	1 00 6 05 000	**PERSEDIAAN :**	**L5D**		
	1 00 6 05 100	Bahan Bakar dan Minyak Pelumas		264.102.650	337.907.253
	1 00 6 05 202	Spare Parts		8.226.983.381	4.953.507.862
	1 00 6 05 203	Material Umum		2.579.013.906	1.083.208.016
	1 00 6 05 204	Batu Bara		614.575.182	1.789.712.714
	1 00 6 05 205	Alat Ukur Pembatas dan Kontrol		-	-
	1 00 6 05 206	Menara dan Tiang		-	-
	1 00 6 05 207	Persediaan Umum (Supplies)		79.114.843	117.773.517
	1 00 6 05 208	Material pada Pihak Ketiga		-	-
	1 00 6 05 209	Material yang Dititipkan		-	-
	1 00 6 05 211	Material Swakelola		-	-
	1 00 6 05 212	Material Dalam Perjalanan antar satuan		-	-
	1 00 6 05 213	Material Impor Dalam Perjalanan		-	-
		Jumlah Persediaan (bruto)		**11.763.789.962**	**8.282.109.363**
	1 00 6 05 900	Penyisihan Persediaan ( )	**L 5 D 1**	-	-
		JUMLAH PERSEDIAAN (bersih) ...	**5.4**	**11.763.789.962**	**8.282.109.363**
	1 00 6 07 000	**PEMBAYARAN DIMUKA PAJAK :**	**L 5 H**	-	-
	1 00 6 07 001	Setoran PPh ps.22		989.771.887	(0)
	1 00 6 07 002	Setoran PPh ps.23			
	1 00 6 07 003	Setoran PPh ps.25		175.633.035	-
	1 00 6 07 004	Setoran Pajak Fiskal ps.24			
	1 00 6 07 006	PPh karyawan ps.21 yg lebih disetor		-	-
	1 00 6 07 008	PPN Masukan			
	1 00 6 07 099	PPh Badan Lebih Setor		2.094.524.191	2.094.524.191
		JUMLAH PEMBAYARAN DIMUKA PAJAK	**5.5**	**3.259.929.113**	**2.094.524.191**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	1 00 6 19 100	**Persekot Pegawai :**			
	1 00 6 19 101	PUMP & KPR Penggantian yg akan diterima			
	1 00 6 19 103	Pinjaman Pemegang Saham			
	1 00 6 19 103	Pinjaman Lainnya		-	-
	1 00 6 19 104	Pinjaman Pegawai lain-lain		2.261.822	2.261.822
	1 00 6 19 105	Persekot Karyawan dan Pensiun		-	-
	1 00 6 19 106	Uang Muka Jasa Produksi		-	-
	1 00 6 19 107	Persekot Perawatan Kesehatan		-	-
		Bank Garansi /LC			
		Sub Jumlah.....		**2.261.822**	**2.261.822**
	1 00 6 09 902	PDP Jasa Intern PLN		-	-
		Sub Jumlah.....		**2.261.822**	**2.261.822**
	1 00 6 18 000	**Piutang Jgk Pendek Antar Perushaan Induk dgn Anak Perush. :**	**L7B**		
	1 00 6 18 100	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. Indonesia Power		-	-
	1 00 6 18 200	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. PJB		-	-
	1 00 6 18 300	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. PLN Batam		-	-
	1 00 6 18 400	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. Indonesia Comnet Plus		-	-
	1 00 6 18 600	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. Prima Layanan Nasional Enjinering		-	-
	1 00 6 18 700	Piutang Jangka Pendek Kepada PT. Tarakan		-	-
	1 00 6 18 901	Piutang Jangka Pendek Kepada Induk dan Unit2nya		-	-
	1 00 6 18 902	PUMP KPR/BPRP & Lainnya Kpd Induk dan Unit2nya		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
	1 00 6 16 500	**Pembayaran Dimuka Beban YDP-PLN :**			
	1 00 6 16 501	Pembayaran Dimuka Manfaat Pensiun		-	-
	1 00 6 16 502	Pembayaran Pensiun Beban YPD PLN		-	-
	1 00 6 16 503	Pembayaran Dimuka JHT Lainnya Beban YDP		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
	1 00 6 19 301	Bunga yang akan diterima			-
	1 00 6 19 302	Subsidi yang akan diterima		-	-
	1 00 6 19 399	Pendapatan yang akan diterima Lainnya		-	-
		Sub Jumlah.....		**-**	**-**
		Sub Jumlah - Hub. Istimewa		**2.261.822**	**2.261.822**
		- PIHAK KETIGA :			
	1 00 6 07 005	Bea Meterai yang disetor lebih dahulu		-	-
	1 00 6 07 009	Restitusi Pajak tahun lalu (diajukan)		-	-
	1 00 6 09 901	PDP Penarikan kembali		-	-
	1 00 6 29 301	Zakat Dibayar Dimuka		-	-
	1 00 6 26 400	Pembayaran Dimuka Kepada Kontraktor		-	-
	1 00 6 26 700	Pekerjaan Untuk Pihak ketiga		-	-
		Jumlah - Pihak Ketiga		**-**	**-**
		JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	**5.6**	**2.261.822**	**2.261.822**
		BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA :			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	1 00 6 16 301	Gaji Dibayar Dimuka		-	-
	1 00 6 16 302	Sewa Dibayar Dimuka		-	-
	1 00 6 16 304	Manfaat Pekerja Program Pensiun		-	-
	1 00 6 16 399	Biaya Lain-lain Dibayar Dimuka		-	-
	1 00 6 16 900	Pembayaran Dimuka Lainnya	**L4G**	-	-
		Sub Jumlah - Hub. Istimewa		**-**	**-**
		- PIHAK KETIGA :			
	1 00 6 26 100	Pekerjaan oleh Pihak ketiga		-	-
	1 00 6 26 201	Barang - Barang Import		-	-
	1 00 6 26 202	Barang - Barang Lokal		-	-
	1 00 6 26 302	Sewa Dibayar Dimuka		-	11.125.023
	1 00 6 26 303	Premi Asuransi Dibayar Dimuka		41.555.829	37.400.246
	1 00 6 26 399	Biaya Pajak Kendaraan Dibayar Dimuka		2.253.319	6.543.427
	1 00 6 26 900	Pembayaran Dimuka Lainnya	**L4G**	-	-
		Sub Jumlah - Pihak Ketiga		**43.809.148**	**55.068.696**
		JUMLAH PEMBAYARAN DIMUKA DAN UANG MUKA	**5.7**	**43.809.148**	**55.068.696**
		JUMLAH ASSET LANCAR	**5**	**156.460.193.521**	**82.391.860.975**
		JUMLAH ASSET		**372.706.269.052**	**314.310.206.109**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		E K U I T A S			
	2 00 1 01 100	Modal Saham Prioritas yg ditempatkan dan disetor	**6.1**	133.150.000.000	133.150.000.000
	2 00 1 01 200	Modal Saham Biasa yg ditempatkan dan disetor		2.543.000.000	2.543.000.000
	2 00 2 01 100	Agio Saham Prioritas	**6.2**	1.527.764.235	1.527.764.235
	2 00 2 01 200	Saldo Laba Tahun Lalu		56.379.116.178	56.688.173.802
		Cadangan Laba		27.281.132.692	27.281.132.692
		Pendapatan Komprehensif Lain (OCI)		(3.007.980.114)	(3.007.980.114)
	2 00 4 00 200	**Laba (Rugi) Tahun Berjalan**	**6.3**	**(56.794.878.203)**	**(24.903.110.696)**
		Jumlah Ekuitas	**6**	**161.078.154.788**	**193.278.979.919**
	2 00 5 20 100	**HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN**		-	-
		AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI	**L7A**	-	-
	9 00 0 00 000	**AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI**	**7**	-	-
		PENDAPATAN DITANGGUHKAN			
		BIAYA PENYAMBUNGAN :	**L8A, L8B**		
	3 00 1 00 100	BP Tersambung (Bruto)		-	-
	4 00 1 00 150	BP Belum Tersambung		-	-
	3 00 1 00 200	Akumulasi Amortisasi ( )		-	-
		Jumlah Pendapatan BP Ditangguhkan			
	3 00 1 00 500	Keuntungan yang belum direalisasi		-	-
	3 00 2 00 900	Pendapatan Ditangguhkan Lainnya		-	-
		Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	**8**	**-**	**-**
	4 00 1 03 001	**KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN**	**L20**	**1.023.920.104**	**1.197.480.767**
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
		Penerusan Pinjaman :			
	4 00 1 11 100	Pokok Pinjaman	**L9A1,L9A2**	-	-
	4 00 1 11 200	Biaya Pinjaman Dikapitalisir	**L9B**	-	-
		Sub Jumlah		-	-
	4 00 1 18 100	Kewajiban Jk. Panjang Kepada PT. Indonesia Power	**L7B**	2	1.411.123.841
	4 00 1 18 200	Kewajiban Jk. Panjang kepada PT. PJB		-	-
	4 00 1 18 300	Kewajiban Jk. Panjang Kepada PT. PLN Batam		-	-
	4 00 1 18 400	Kewajiban Jk. Panjang Kepada PT. Indonesia Comnet Plus		-	-
	4 00 1 18 600	Kewajiban Jk. Panjang Kepada PT. Prima Layanan Nasional Enjinering		-	-
	4 00 1 18 700	Kewajiban Jk. Panjang Kepada PT. PLN Tarakan		-	-
	4 00 1 18 901	Kewajiban Jk. Panjang Kepada Induk dam Unit2nya		-	-
	4 00 1 18 902	PUMP KPR/BPRP & Lainnya Kpd Induk dan Unit2nya		-	-
		Sub Jumlah - Penerusan Pinjaman.....		**2**	**1.411.123.841**
		Hutang Kepada Pemerintah :			
	4 00 1 19 101	Hutang Deviden		-	1.500.000.000
	4 00 1 11 171	Pokok Pinjaman RDI		-	-
	4 00 1 11 190	Penjadwalan Angsuran Penerusan Pinjaman		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**1.500.000.000**
		Hutang Bank :	**L9C**		
	4 00 1 11 172	Pokok Pinjaman Bank Mandiri		-	-
	4 00 1 11 176	Pokok Pinjaman Bank BNI ***)		-	-
	4 00 1 11 177	Pokok Pinjaman Bank BRI		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Jumlah Pinjaman Jk. Panjang - Hubungan Istimewa	**9.1**	**2**	**2.911.123.841**
		- PIHAK KETIGA :			
	4 00 1 21 000	Hutang Sindikasi Perbankan			
	4 00 1 22 000	Hutang Obligasi		-	-
		Jumlah Pinjaman Jk. Panjang - Pihak Ketiga	**9.2**	**-**	**-**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		HUTANG LAIN-LAIN (Jk. Panjang):			
		- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa :			
	4 00 1 19 201	Kel. Prasejahtera dan Sejahtera I			
	4 00 1 19 202	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK)			
	4 00 1 19 300	Hutang Dana Pensiun PLN (Iuran Normal & Tambahan)			
	4 00 1 19 400	Kredit Listrik Pedesaan			
	4 00 1 19 914	Hutang Pajak Revaluasi			
	4 00 1 19 999	Hutang Lainnya	**L 10 D 1**	493.755.528	614.759.577
		Sub Jumlah		**493.755.528**	**614.759.577**
		- Pihak Ketiga :			
	4 00 1 29 900	Hutang Lain-lain Jk Panjang	**L 10 D 1**	-	-
	4 00 1 29 901	Kewajiban kepada IPP		-	-
		Sub Jumlah		-	-
		Jumlah Utang Lain-Lain	**9.3**	**493.755.528**	**614.759.577**
	4 00 1 x3 000	**UANG JAMINAN LANGGANAN**			
	4 00 1 13 000	- Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
	4 00 1 23 000	- Pihak Ketiga		-	-
		Jumalah Uang Jaminan Langganan	**9.4**	-	-
	4 00 1 01 300	**HUTANG BIAYA PROYEK (Pinjaman Dlm. Proses)**	**9.5 (L9D)**	-	-
	4 00 1 01 115	**HUTANG PROMES (RUF)**	**9.6**	-	-
	4 00 1 19 908	**KEWAJIBAN MANFAAT PEKERJA (Jk. Panjang)**	**9.7**	13.545.003.665	11.974.187.614
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**9**	**15.062.679.299**	**16.697.551.799**
	4 00 2 00 000	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		-	-
	4 00 2 x1 000	**HUTANG USAHA**	**.10A1,10A2,10A3**		
	4 00 2 11 000	**- Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa**			
		Hutang Usaha Invetasi			
	4 00 2 11 010	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi		-	-
	4 00 2 11 015	Hutang Usaha Pengadaan Material PDP		-	-
	4 00 2 11 019	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Lainnya		-	-
		Sub Jumlah Hutang Usaha Investasi Pihak Istimewa		**-**	**-**
		Hutang Usaha Operasi			
	4 00 2 11 020	Hutang Usaha Pekerjaan Borongan		-	-
	4 00 2 11 025	Hutang Usaha Pengadaan Material Pemeliharaan		-	-
	4 00 2 11 030	Hutang Usaha Pengadaan BBM		-	-
	4 00 2 11 040	Hutang Usaha Pembelian Tenaga Listrik		-	-
	4 00 2 11 041	Hutang Usaha Sewa Pembangkit		-	-
	4 00 2 11 990	Hutang Usaha Lainnya		-	-
		Sub Jumlah Hutang Usaha Operasi Pihak Istimewa		**-**	**-**
		Sub Jumlah Hutang Usaha Pihak Istimewa		**-**	**-**
	4 00 2 21 000	**- Pihak Ketiga**			
		Hutang Usaha Investasi			
	4 00 2 21 010	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi		-	-
	4 00 2 21 015	Hutang Usaha Pengadaan Material PDP		-	-
	4 00 2 21 019	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi Lainnya		-	-
		Sub Jumlah Hutang Usaha Investasi Pihak Ketiga		**-**	**-**
		Hutang Usaha Operasi			
	4 00 2 21 020	Hutang Usaha Pekerjaan Borongan		2.810.219.496	4.300.279.336
	4 00 2 21 025	Hutang Usaha Pengadaan Material Pemeliharaan		193.258.000.873	91.106.651.376
	4 00 2 21 030	Hutang Usaha Pengadaan BBM		-	-
	4 00 2 21 040	Hutang Usaha Pembelian Tenaga Listrik		-	-
	4 00 2 21 040	Hutang Usaha Sewa Pembangkit		-	-
				-	-
		Sub Jumlah Hutang Usaha Operasi Pihak Ketiga		**196.068.220.369**	**95.406.930.712**
		Sub Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga		**196.068.220.369**	**95.406.930.712**
		JUMLAH HUTANG USAHA	**10.1**	**196.068.220.369**	**95.406.930.712**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
		HUTANG DANA PENSIUN :			
	4 00 2 19 401	Hutang Yang Ditangguhkan Ke DP		-	-
	4 00 2 19 402	Iuran Peserta	**L10B1**	-	-
	4 00 2 19 403	Iuran Pemberi Kerja/ Iuran Perusahaan	**L10B1**	-	-
	4 00 2 19 404	Hutang Pembayaran Manfaat Pensiun	**L10B2**	-	-
		JUMLAH HUTANG DANA PENSIUN.....	**10.2**	**-**	**-**
	4 00 2 02 000	**HUTANG PAJAK :**	**L10C**		
	4 00 2 02 001	PPh Badan Yg. Terutang (PPh Ps. 29)		(9.250.956.858)	188.243
	4 00 2 02 002	PPh Kary. Ps. 21 YMH disetor (unit)		102.728.027	497.721.673
	4 00 2 02 003	PPh Kary. Ps.21 YMH disetor (Koord)		-	-
	4 00 2 02 004	PPh Kary. Ps.26 YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 005	Bea Materai Terutang		-	-
	4 00 2 02 006	PPN/PPn. BM YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 007	PPN / PPn BM dipungut & YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 008	PPh Pihak Lain Ps.22 YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 008	PPh Pihak Lain Ps.23 YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 009	PPh Ps.23 YMH disetor		37.381.594	22.279.055
	4 00 2 02 011	Pajak Bumi Bangunan Yang Terutang		-	-
	4 00 2 02 012	PPh Pihak Lain Ps.21 YMH disetor		-	-
	4 00 2 02 013	Hutang Pajak Revaluasi AT.		-	-
		Pasal 21 Bukan Pegawai		-	-
		Pasal 22		-	-
		PPh Pasal 4 Ayat (2)		-	-
		Hutang PPN Keluaran 10 %		5.763.603	2.481.459
		JUMLAH HUTANG PAJAK	**10.3**	**(9.105.083.634)**	**522.670.430**
		HUTANG LAIN-LAIN :		-	-
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	4 00 2 12 105	Uang Muka Tenaga Listrik		-	-
	4 00 2 13 202	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan		-	-
	4 00 2 19 201	Simpanan Pegawai		-	-
	4 00 2 19 202	Uang Jaminan Kasir & Penagih		-	-
	4 00 2 19 203	Gaji & Upah Belum Diambil		-	-
	4 00 2 19 204	Simpanan Wajib Pegawai (TASPEN)		-	-
	4 00 2 19 205	Iuran B K K		-	-
	4 00 2 19 206	Iuran Persatua Istri (PI)		-	-
	4 00 2 19 600	Hutang Jasa Produksi		-	-
	4 00 2 19 800	Hutang PFK		-	-
	4 00 2 19 900	Hutang Lainnya	**L 10 D 2**	2.344.905.158	2.892.692.116
		Sub Jumlah		**2.344.905.158**	**2.892.692.116**
	4 00 2 18 000	**Hutang Jk. Pendek Antar Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan :**			
	4 00 2 18 100	Hutang Jangka Pendek Kepada PT. Indonesia Power		-	-
	4 00 2 18 200	Hutang Jangka Pendek Kepada PT. PJB		-	-
	4 00 2 18 300	Hutang Jangka Pendek kepada PT. PLN Batam		-	-
	4 00 2 18 400	Hutang Jangka Pendek kepada PT. Indonesia Comnet Plus		-	-
	4 00 2 18 600	Hutang Jangka Pendek kepada PT. Prima Layanan Nasional Enjinering		-	-
	4 00 2 18 700	Hutang Jangka Pendek kepada PT. PLN Tarakan		-	-
	4 00 2 18 901	Hutang Jangka Pendek Kepada PT.PLN Induk dan Unit-unitnya		-	-
	4 00 2 18 902	PUMP KPR/BPRP & Lainnya Kpd Induk dan Unit2nya		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Sub Jumlah - Hubungan Istimewa		**2.344.905.158**	**2.892.692.116**
		- PIHAK KETIGA :			
	4 00 2 22 100	Uang Muka Tenaga Listrrik		-	-
	4 00 2 27 100	Hutang Liswas (IPP)		-	-
	4 00 2 29 700	Hutang Program Kemitraan		-	-
	4 00 2 29 800	Hutang PFK		-	-
	4 00 2 29 901	Hutang PJU		-	-
	4 00 2 29 902	Penerimaan Dimuka Rekening listrik		-	-
	4 00 2 29 905	Jaminan Tender / Instalatir		-	-
	4 00 2 29 906	Hutang Meterisasi TNI/POLRI		-	-
	4 00 2 29 907	Hutang Iuran Astek		-	-
	4 00 2 29 911	Hutang PJU YMH Disetor		-	-
	4 00 2 29 999	Hutang Lainnya	**L 10 D 2**	-	-
		Sub Jumlah-Pihak Ketiga		**-**	**-**
		JUMLAH HUTANG LAIN-LAIN (JK. PENDEK)	**10.4**	**2.344.905.158**	**2.892.692.116**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

BUKU BESAR POS - POS NERACA

Kode Akun SAP	Kode Akun Baru	U r a i a n	Catatan / Lampiran	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
	4 00 2 xx xxx	**BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
	4 00 2 13 301	Hutang Bonus & Tantiem		5.672.213.104	4.186.623.177
	4 00 2 13 302	Hutang Manajemen Expenses		-	-
	4 00 2 19 914	Bunga Pajak Revaluasi		-	-
	4 00 2 15 100	Biaya Komitmen	**L 10 H**	-	-
	4 00 2 15 200	Biaya Provisi		-	-
	4 00 2 15 300	Bunga Penerusan Pinjaman		-	-
	4 00 2 15 371	Bunga Pinjaman Bank Pemerintah		-	-
	4 00 2 15 372	Bunga Utang kepada Bank Pemerintah (RDI)		-	-
	4 00 2 15 500	Biaya Garansi		-	-
	4 00 2 15 600	Denda Keterlambatan		-	-
	4 00 2 15 xxx	Bunga Kepada Holding (u. Anak Perusahaan)		-	-
	4 00 2 19 100	Hutang Biaya	**L 10 E**		
		Sub Jumlah		**5.672.213.104**	**4.186.623.177**
		- PIHAK KETIGA :			
	4 00 2 25 200	Bunga Liswas (IPP)		-	-
	4 00 2 25 300	Bunga Pinjaman Bank Swasta		-	-
	4 00 2 25 400	Hutang Bunga Obligasi		-	-
	4 00 2 29 100	Hutang Biaya	**L 10 E**	1.585.179.968	1.324.757.956
		Sub Jumlah		**1.585.179.968**	**1.324.757.956**
		Jumlah Biaya YMH Dibayar	**10.5**	**7.257.393.072**	**5.511.381.133**
	4 00 2 xx xxx	**PINJAMAN JK. PANJANG JATUH TEMPO :**			
		- PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA :			
		Penerusan Pinjaman - Jatuh Tempo			
	4 00 2 14 100	Pokok Pinjaman	**L 10 F**	-	-
	4 00 2 14 200	Biaya Pinjaman Dikapitalisir	**L 10 G**	-	-
	4 00 2 14 xxx	Pokok Pinjaman kpd Holding Jatuh Tempo (u. Anak Perusahaan)		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Hutang Kepada Pemerintah - Jatuh Tempo :			
	4 00 2 13 100	Hutang Deviden		-	-
	4 00 2 14 171	Hutang Kepada Pemerintah (RDI)		-	-
	4 00 2 14 190	Penjadwalan Angsuran Penerusan Pinjaman		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Hutang Bank - Jatuh Tempo :			
	4 00 2 14 172	Pokok Pinjaman Bank Mandiri -Ex. BBD		-	-
	4 00 2 14 173	Pokok Pinjaman Bank Mandiri -Ex. BDN		-	-
	4 00 2 14 174	Pokok Pinjaman Promes		-	-
	4 00 2 14 175	Pokok Pinjaman Cofinacing Exim Bank		-	-
	4 00 2 14 176	Pokok Pinjaman Bank BNI		-	-
	4 00 2 14 177	Pokok Pinjaman Bank BRI		-	-
	4 00 2 14 178	Pokok Pinjaman Bank BEII		-	-
		Sub Jumlah		**-**	**-**
		Sub Jml. Pinjaman Jatuh Tempo-Hub. Istimewa.....		**-**	**-**
		- PIHAK KETIGA :			
	4 00 2 25 000	Hutang Bank (Bank Swasta, dll)	**L 9 C**	-	-
	4 00 2 24 300	Hutang Obligasi		-	-
		Sub Jumlah Pinjaman Jatuh Tempo Pihak Ketiga		**-**	**-**
		JUMLAH PINJAMAN JATUH TEMPO	**10.6**	**-**	**-**
	4 00 2 19 908	**KEWAJIBAN MANFAAT PEKERJA (Jk. Pendek)**	**10.7**	-	-
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10**	**196.565.434.965**	**104.333.674.391**
		JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		**372.706.269.052**	**314.310.206.109**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

K E T E R A N G A N	Catatan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
ASSET			
ASSET TETAP (NETTO)	**1**	**195.819.670.666**	**211.401.369.245**
Asset Tetap (Bruto)		374.199.664.586	373.483.717.656
Akumulasi Penyusutan		(178.379.993.920)	(162.082.348.411)
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN	**2**	**871.004.520**	**21.295.989**
PROPERTI INVESTASI		**-**	**-**
P E N Y E R T A A N	**3**	**-**	**-**
ASSET LAIN-LAIN	**4**	**19.555.400.345**	**20.495.679.900**
Asset Tidak Beroperasi	**4.1**	**16.750.551.140**	**17.690.816.064**
Piutang Lain-Lain (Jk. Panjang)	**4.2**	**2.804.849.205**	**2.804.863.836**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
- Pihak Ketiga		2.804.849.205	2.804.863.836
Biaya Yang Ditangguhkan	**4.3**	**-**	**-**
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Panjang)	**4.4**	**-**	**-**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
- Pihak Ketiga		-	-
ASSET PAJAK TANGGUHAN		**-**	**-**
ASSET LANCAR	**5**	**156.460.193.521**	**82.391.860.975**
Kas dan Setara Kas	**5.1**	**8.727.453.466**	**2.346.439.478**
Investasi Sementara	**5.2**	**-**	**-**
Piutang Usaha (Netto)	**5.3**	**132.662.950.010**	**69.611.457.425**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		5.654.679.466	6.042.427.007
Penyisihan (Pihak Hubungan Istimewa) ( )		-	-
		5.654.679.466	**6.042.427.007**
- Pihak Ketiga		127.008.270.544	63.569.030.418
Penyisihan (Pihak Ketiga) ()		-	-
		127.008.270.544	**63.569.030.418**
P e r s e d i a a n (Netto)	**5.4**	**11.763.789.962**	**8.282.109.363**
- P e r s e d i a a n (Bruto)		11.763.789.962	8.282.109.363
P e n y i s i h a n ( )		-	-
Uang Muka Pajak	**5.5**	**3.259.929.113**	**2.094.524.191**
Piutang Lain-Lain (Jangka Pendek)	**5.6**	**2.261.822**	**2.261.822**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2.261.822	2.261.822
- Pihak Ketiga		-	-
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Pendek)	**5.7**	**43.809.148**	**55.068.696**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
- Pihak Ketiga		43.809.148	55.068.696
J U M L A H ASSET		**372.706.269.052**	**314.310.206.109**

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU - LATI

N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

K E T E R A N G A N	Catatan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
EKUITAS DAN KEWAJIBAN			
E K U I T A S	**6**	**161.078.154.788**	**193.278.979.919**
Modal Saham	**6.1**	**133.150.000.000**	**133.150.000.000**
Tambahan Modal	**6.2**	**2.543.000.000**	**2.543.000.000**
Saldo Laba	**6.3**	**25.385.154.788**	**57.585.979.919**
HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN		**-**	**-**
AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI	**7**	**-**	**-**
PENDAPATAN DITANGGUHKAN	**8**	**-**	**-**
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN		**1.023.920.104**	**1.197.480.767**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**9**	**493.755.530**	**3.525.883.418**
Pinjaman Jangka Panjang :			
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	**9.1**	**2**	**2.911.123.841**
Penerusan Pinjaman		2	1.411.123.841
Hutang Kepada Pemerintah		-	1.500.000.000
Hutang Bank		-	-
- Pihak Ketiga	**9.2**	**-**	**-**
Hutang Bank		-	-
Hutang Obligasi		-	-
Hutang Lain-lain (Jk. Panjang)	**9.3**	**493.755.528**	**614.759.577**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		493.755.528	614.759.577
- Pihak Ketiga		-	-
Uang Jaminan Langganan	**9.4**	**-**	**-**
Hutang Biaya Proyek	**9.5**	**-**	**-**
Hutang Promes	**9.6**	**-**	**-**
Kewajiban Manfaat Pekerja (Jangka Panjang)	**9.7**	**13.545.003.665**	**11.974.187.614**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10**	**196.565.434.965**	**104.333.674.391**
Hutang Usaha	**10.1**	**196.068.220.369**	**95.406.930.712**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
- Pihak Ketiga		196.068.220.369	95.406.930.712
Hutang Dana Pensiun	**10.2**	**-**	**-**
Hutang Pajak	**10.3**	**(9.105.083.634)**	**522.670.430**
Hutang Lain-Lain	**10.4**	**2.344.905.158**	**2.892.692.116**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2.344.905.158	2.892.692.116
- Pihak Ketiga		-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	**10.5**	**7.257.393.072**	**5.511.381.133**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		5.672.213.104	4.186.623.177
- Pihak Ketiga		1.585.179.968	1.324.757.956
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo	**10.6**	**-**	**-**
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
Penerusan Pinjaman		-	-
Hutang Kepada Pemerintah		-	-
Hutang Bank		-	-
- Pihak Ketiga		-	-
Hutang Bank		-	-
Hutang Obligasi		-	-
Kewajiban Manfaat Pekerja (Jangka Pendek)	**10,7**	**-**	**-**
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		**372.706.269.052**	**314.310.206.109**
D:\Accounting\ACCOUNTING\DOCUMENT NOVIE\LAPORAN KEUANGAN 2008\LAP_KEU DESEMBER 2008\[format LK BARU DES 2		-	-

Kontrol Neraca	**-**	**-**
Kontrol Neraca (L/R) dengan Laba-Rugi	**24.903.110.696**	**-**
Kontrol L/R Fer Unsur dan Per Fungsi	**-**	**-**

PT INDO PUSAKA BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Unaudited) dan 2023 (Audited)

	Modal saham	Tambahan setoran modal	Agio saham	Saldo Laba		OCI	Total ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo 31 Desember 2021	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**77.555.000.000**	**4.238.448.007**	**(867.147.235)**	**218.147.065.008**
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan umum tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran PPh Pasal 29 tahun 2018	-	-	-	-	(142.549.105)	-	(142.549.105)
Dividen tahun buku 2020 & 2021	-	-	-	-	(9.707.080.715)	-	(9.707.080.715)
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	12.964.787.435	962.705.178	13.927.492.613
Saldo 31 Desember 2022	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**77.555.000.000**	**7.353.605.621**	**95.557.943**	**222.224.927.802**
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-		-	-
Dividen tahun buku 2022	-	-	-	-	(4.042.837.187)	-	(4.042.837.187)
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(25.264.049.469)	360.938.901	(24.903.110.569)
Saldo 31 Desember 2023	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**77.555.000.000**	**(21.953.281.034)**	**456.496.844**	**193.278.980.046**
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	(309.057.622)	-	(309.057.622)
Dividen tahun buku 2023	-	-	-	-	-	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(31.891.767.507)	-	(31.891.767.507)
Saldo 31 Desember 2024	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**77.555.000.000**	**(54.154.106.163)**	**456.496.844**	**161.078.154.917**



LAMPIRAN 8

LAPORAN KEUANGAN PERUMDA BHAKTI PRAJA TAHUN ANGGARAN 2024

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUMDA BHAKTI PRAJA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	1 - 2
Neraca	3
Laporan Laba Rugi	4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 16

PERUMDA BHAKTI PRAJA KABUPATEN BERAU
Jalan HM. Thaib No.151 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tg. Redeb Kabupaten Berau- Kaltim - Email: *perumdabhaktipraja@gmail.com* Telp: 081348280145

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
PERUMDA BHAKTI PRAJA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sultan, S. Pi
Alamat Kantor	: Jl. SM. Aminuddin No. 57, Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep, Berau - Kaltim
Alamat Domisili sesuai KTP	: Jl. HM. Thaib, RT 07 Karang Ambun, Tanjung Redep
Nomor Telepon	: 081348479556
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1) Kami Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Bhakti Praja;

2) Laporan keuangan Perumda Bhakti Praja telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia;

3) a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Bhakti Praja telah dimuat secara lengkap dan benar ;
   b. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar , dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4) Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perumda Bhakti Praja.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redep, 20 Maret 2025



(Sultan, S.Pi)
Direktur

Muhammad Danial

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ijin Usaha KAP No.KEP. 298/KM, 1/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00007/2.0844/AU.2/01/0131-2/1/III/2025

Direksi **Perumda Bhakti Praja**
di -
Tempat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Bhakti Praja**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Perumda Bhakti Praja** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal - hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal - hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan tekait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Muhammad Danial
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ijin Usaha KAP No.KEP. 298/KM, 1/2011

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atasTata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Jl. Melati No. 75 Ragunan Pasar Minggu - Jakarta, Telp. 021 - 7808040, Email : kapmuhdanial@gmail.com

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal - hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap indepedensi kami dan jika relevan pengaman terkait.

Muhammad Danial

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ijin Usaha KAP No.KEP. 298/KM, 1/2011

Dari hal - hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal - hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit Utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang - undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MUHAMMAD DANIAL

00007

M. Danial, SE Ak MM CPA CA
N.R.A.P AP.0131

Jakarta, 26 Maret 2025

Jl. Melati No. 75 Ragunan Pasar Minggu - Jakarta, Telp. 021 - 7808040, Email : kapmuhdanial@gmail.com

PERUMDA BHAKTI PRAJA

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan No.	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	*3*	2.224.866.049	2.000.645.379
Piutang Usaha - bersih	*4*	376.050.108	83.374.200
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	*5*	112.592.368	90.000.000
Jumlah Aset Lancar		**2.713.508.525**	**2.174.019.579**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap Bersih	*6*	34.123.307	45.997.727
Aset Tetap Dalam Pembangunan	*7*	2.143.200.000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.177.323.307**	**45.997.727**
JUMLAH ASET		**4.890.831.832**	**2.220.017.306**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	*8*	-	300.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	*9*	-	34.030.500
Hutang Pengembangan Usaha Jatuh Tempo	*10*	200.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**200.000.000**	**334.030.500**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Hutang Pengembangan Usaha	*11*	800.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**800.000.000**	**-**
Modal Disetor	*12*	4.000.000.000	2.000.000.000
Saldo Laba (Rugi)		(114.013.194)	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		4.845.026	(114.013.194)
Jumlah Ekuitas		**3.890.831.832**	**1.885.986.806**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**4.890.831.832**	**2.220.017.306**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan No.	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan	*13*	6.262.639.455	2.247.662.300
Beban Pokok Pendapatan	*14*	5.248.164.250	2.048.513.200
Laba Bruto		**1.014.475.205**	**199.149.100**
Beban Usaha			
Beban Umum dan Administrasi	*15*	982.464.905	313.430.773
Jumlah Beban Usaha		**982.464.905**	**313.430.773**
Laba (Rugi) Usaha		**32.010.300**	**(114.281.673)**
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan Lain-lain	*16*	8.255.408	341.153
Beban Lain-lain	*17*	(35.420.682)	(72.675)
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Lain		**(27.165.274)**	**268.478**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		**4.845.026**	**(114.013.194)**
Pajak Penghasilan Badan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		**4.845.026**	**(114.013.194)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Modal Disetor	SALDO LABA (RUGI)	JUMLAH
Penambahan Modal Disetor	**2.000.000.000**		**2.000.000.000**
Dalam rangka memenuhi peraturan pe	-	(114.013.194)	(114.013.194)
Saldo per 31 Desember 2023	**2.000.000.000**	**(114.013.194)**	**1.885.986.806**
Penambahan Modal Disetor	**2.000.000.000**	-	2.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	4.845.026	4.845.026
Saldo per 31 Desember 2024	**4.000.000.000**	**(109.168.168)**	**3.890.831.832**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**4.845.026**	**(114.013.194)**
Penyesuian		
Penyusutan dan Amortisasi	11.874.420	1.499.952
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Lancar		
Piutang Usaha - bersih	(292.675.908)	(83.374.200)
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	(22.592.368)	(90.000.000)
Hutang Usaha	(300.000.000)	300.000.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(34.030.500)	34.030.500
Hutang Pengembangan Usaha Jatuh Tempo	200.000.000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**(432.579.330)**	**48.143.058**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI :		
Perolehan Aset Tetap	-	(47.497.679)
Perolehan Aset Tetap Dalam Pembangunan	(2.143.200.000)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(2.143.200.000)**	**(47.497.679)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Hutang Pengembangan Usaha	800.000.000	-
Modal Disetor	2.000.000.000	2.000.000.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**2.800.000.000**	**2.000.000.000**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**224.220.670**	**2.000.645.379**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**2.000.645.379**	**-**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2.224.866.049**	**2.000.645.379**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perumda Bhakti Praja didikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau No. 05 Tahun 1998 (Perda 05/1998) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Kabupaten Berau.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 14 Tahun 2020 (Perda 14/2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 5 Perda 14/2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut :

1. Kehutanan
2. Pertanian tanaman pangan
3. Perkebunan
4. Peternakan
5. Perikanan
6. Pariwisata
7. Pertambangan dan penggalian
8. Minyak dan Gas Bumi
9. Ketenagalistrikan
10. Perhubungan/Kepelabuhanan
11. Industri Pengolahan dan
12. Pergudangan

Di samping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/2020, sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada tahun 2024, yang meliputi :

1. Pengangkutan CPO
2. Perdagangan Karet
3. Peternakan ayam petelur
4. Cold Storage

Di antara bidang usaha yang di inisiasi tersebut, yang telah dijalankan secara operasional pada tahun 2024 adalah Pengakuntan CPO dan Perdagangan Karet.

c. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020 Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp. 2.000.000.000 dan 8 Oktober 2024 menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000. Dengan demikian, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada Perumda Bhakti Praja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000

d. Susunan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2024, susunan pengurus Perumda Bhakti Praja adalah sebagai berikut :

- Direktur : Sultan, S.Pi
- Dewan Pengawas : H. Jaka Siswanta, SH, M.Si

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perumda Bhakti Praja memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis penyusunan dan penyajian laopran keuangan.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Meskipun menggunakan SAK ETAP, Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Periode Pembukuan

Periode pembukuan adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu - waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat pembatasan penggunaannya.

d. Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata - rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir. Piutang yang telah berumur kebih dari dua tahun dibentuk cadangan penyisihan piutang sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan hapus buku.

Penuruan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun berjalan.

e. Persediaan

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap pakai.

Metode pencatatan terhadap persediaan menggunakan metode *"Physial Inventory Method"*.

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya - biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran - pengeluaran untuk pengadaan aset tetap adalah sebagai berikut :

Pengeluaran - pengeluaran untuk pembelian aset berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dicatat sebagai aset tetap apabila aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset tetap selain bangunan menggunakan metode saldo menurun berganda. Tanah tidak disusutkan. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut :

Bangunan	20 tahun
Mesin dan Peralatan	8 tahun
Kendaraan/Alat	8 tahun
Peralatan/Perlengkap	4 tahun
Inventaris Kantor	4 tahun

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan selama umur manfaat aset tetap. Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan, dan dihentikan saat aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tetap tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap dalam menyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahakan ke masing - masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

g. Pencatatan Utang/Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesai nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo dan jumlahnya dapat diikur dengan andal.

h. Pendapatan

Pendapatan Perumda Bhakti Praja terdiri dari pendapatan usaha dan non usaha. Pendapatan usaha meliputi pendapatan jasa pengangkutan CPO dan pendapatan penjualan. Sedangkan pendapatan non usaha (pendapatan lain - lain) meliputi pendapatan bunga deposito, jasa giro, sewa, royalti, dividen, dan lain -

Pendapatan yang berasal dari jasa pengangkutan CPO dan penjualan diakui dengan terbitnya invoice kepada penggunan jasa/pembeli.

Pendapatan non usaha (pendapatan lain - lain) diakui dalam laporan laba rugi jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan tersebut dan dapat diukur nilainya dengan andal.

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain - lain diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

i. Pengunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

3. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas	51.313.568	403.685.557
Jumlah Kas	**51.313.568**	403.685.557
Bank		
BANK IDR		
Bank BPD Kaltim Kaltara	507.687.095	1.452.783.080
Bank Mandiri	-	144.176.742
Bank BNI	665.865.386	
Deposito	1.000.000.000	
Jumlah	**2.173.552.481**	**1.596.959.822**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.224.866.049**	**2.000.645.379**

4. Piutang Usaha - bersih

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Usaha Angkutan CPO	376.050.108	83.374.200
Piutang Usaha Penjualan Karet	-	-
Cadangan Piutang Tak Tertagih	-	-
Jumlah Piutang Usaha - bersih	**376.050.108**	**83.374.200**

5. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sewa Dibayar Dimuka	-	90.000.000
Pph Pasal 23	112.592.368	
Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	**112.592.368**	**90.000.000**

6. Aset Tetap Bersih

	31 Des. 2024	31 Des 2023
Nilai Perolehan Aset Tetap	47.497.679	47.497.679
Akumulasi Penyusutan	13.374.372	1.499.952
Aset Tetap Bersih	**34.123.307**	**45.997.727**

Rincian per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

-

Nama Akun	Saldo Awal 01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Harga Perolehan				
Peralatan Kantor	17.647.679	-	-	17.647.679
Inventaris Kantor	29.850.000	-	-	29.850.000
Jumlah	**47.497.679**	**-**	**-**	**47.497.679**
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	643.702	4.411.920	-	5.055.622
Inventaris Kantor	856.250	7.462.500	-	8.318.750
Jumlah	**1.499.952**	**11.874.420**	**-**	**13.374.372**
Nilai Buku	**45.997.727**	**(11.874.420)**		**34.123.307**

Rincian per 31 Desember 2023 :

-

Nama Akun	Saldo Awal 01 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desemebr 2023
Harga Perolehan				
Peralatan Kantor	-	17.647.679	-	17.647.679
Inventaris Kantor	-	29.850.000	-	29.850.000
Jumlah	**-**	**47.497.679**	**-**	**47.497.679**
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	-	643.702	-	643.702
Inventaris Kantor	-	856.250	-	856.250
Jumlah	**-**	**1.499.952**	**-**	**1.499.952**
Nilai Buku	**-**	**45.997.727**	**-**	**45.997.727**

7. Aset Tetap Dalam Pembangunan

Merupakan akumulasi nilai perolehan kandang ayam yang sedang dibangun yang akan dioperasikan pada awal tahun 2025.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pembelian Tanah dan Bangunan Kandang	1.200.000.000	-
Pembelian Baja ringan dan Lainnya	115.500.000	-
Pembelian/Pembangunan Kandang Batere Thp 1	165.540.000	-
Pembelian/Pembangunan Kandang Batere Thp 2	248.310.000	-
Pembelian/Pembangunan Kandang Batere Thp 3	248.310.000	-
Pembelian/Pembangunan Kandang Batere Thp 4	165.540.000	-
Jumlah Aset Tertap dalam Pembangunan	**2.143.200.000**	-

8. Hutang Usaha

Merupakan saldo hutang usaha untuk menjalankan kegiatan usaha pengangkutan CPO dengan skema bagi hasil.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Hutang Usaha Pengangkutan CPO	-	300.000.000
Jumlah Utang Usaha	**-**	**300.000.000**

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

-

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	34.030.500
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	**-**	**34.030.500**

10. Utang Pengembangan Usaha Jatuh Tempo

Utang Pengembangan Usaha Jatuh Tempo adalah Utang Pembangunan Usaha yang akan jatuh tempo selama 12 bulan setelah tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 200.000.000,00 (10 x Rp 20.000.000)., (lihat catatan 11)

11. Hutang Pengembangan Usaha

Hutang pengembangan usaha adalah hutang Perumda Bhakti Praja yang berkaitan dengan perolehan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang ayam senilai Rp 1.200.000.000 ,- . Dari nilai tersebut, Perumda Bhakti Praja telah membayar DP sebesar Rp 200.000.000 ,-. Sehingga terhutang sebesar Rp 1.000.000.000 ,-

Sesui perjanjian, nilai Rp 1.000.000.000 ,- tersebut diangsur minimal sebesar Rp 20.000.000 ,- per bulan, setelah bisnis ayam petelur menghasilkan (mulai Maret 2025). Dengan demikian, nilai yang akan jatuh tempo dalam tahun 2025 adalah sebesar Rp 200.000.000 ,- (10 x Rp 20.000.000 ,-), dan sebesar Rp 800.000.000 ,- akan jatuh tempo setelah 2025.

12. Modal Disetor

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp 2.000.000.000,-.

Dan pada Oktober 2024 menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000 ,- . Dengan demikian, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada Perumda Bhakti Praja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- .

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyertaan Modal Pemda	**4.000.000.000**	**2.000.000.000**
Jumlah Modal Disetor	**4.000.000.000**	**2.000.000.000**
	-	-

13. Pendapatan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Jasa	5.629.618.400	2.247.662.300
Pendapatan Penjualan	633.021.055	
Jumlah Pendapatan	**6.262.639.455**	**2.247.662.300**

Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh oleh Perumda Bhakti Praja terkait dengan pengangkutan CPO, dan Pendapatan Penjualan adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha penjualan karet.

14 Beban Pokok Pendapatan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pokok Pendapatan Jasa	4.732.491.250	2.048.513.200
Beban Pokok Penjualan	515.673.000	-
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	**5.248.164.250**	**2.048.513.200**

Beban Pokok Pendapatan Jasa adalah beban yang timbul dalam kegiatan pengangkutan CPO, dan Beban Pokok Penjualan adalah beban pokok yang berkaitan dengan kegiatan usaha perdagangan karet.

15 Beban Umum dan Administrasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pegawai	488.874.950	215.580.000
Beban Kantor	12.015.819	1.576.000
Beban Sewa	277.000.000	17.000.000
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas	59.966.216	15.991.863
Beban Jasa Profesional	126.750.000	55.500.000
Beban Pemeliharaan	2.612.000	200.000
Beban Administrasi dan umum Lainnya	3.371.500	6.082.958
Beban Penyusutan	11.874.420	1.499.952
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**982.464.905**	**313.430.773**

16. Pendapatan Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	8.255.408	341.153
Jumlah	**8.255.408**	**341.153**

17. Beban Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Administrasi Bank	407.500	(72.675)
Beban Bagi Hasil	33.949.690	-
Beban Lainnya	1.063.492	-
Jumlah	**35.420.682**	**(72.675)**
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-lain	**(27.165.274)**	**413.828**

18. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Bhakti Praja untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2025.



LAMPIRAN 9

Rincian JJI yang Dimanfaatkan Perumda Batiwakkal
Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2024 dan 2023

RINCIAN JIJ YANG DIMANFAATKAN PERUMDAM BATIWAKKAL TANPA KERJASAMA PEMANFAATAN TAHUN 2024 dan 2023

(Lampiran 9)

NO	ID PEMDA	UPB	TAHUN 2023	KETERANGAN
1	‘05010010014008355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.163.213.002,40	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
2	‘05010010014007851	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.240.272.200,00	Sumur Resapan
3	‘05010010014004898	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.622.918.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
4	‘05010010014008096	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.844.806.652,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
5	‘05010010014007583	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.386.343.000,00	Sumur Resapan
6	‘05010010014006728	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.286.232.200,00	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain
7	‘05010010014004890	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.151.685.000,00	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain
8	‘05010010014007910	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.400.100,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
9	‘05010010014004884	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	934.633.000,00	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain
10	‘05010010014005335	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	899.181.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
11	‘05010010014004681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	884.362.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
12	‘05010010014002343	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	865.659.000,00	Bangunan Buster Pump
13	‘05010010014004882	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	780.775.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
14	‘05010010014002404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	739.250.000,00	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain
15	‘05010010014005044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.797.000,00	Sumur Resapan
16	05010010014009399	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.742.587.214,00	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
17	05010010014009393	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.554.624.101,41	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
18	05010010014009086	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.792.396,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
19	05010010014009132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.577.232.400,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
20	05010010014009186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.930.365.390,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU

21	05010010014009375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.832.307.759,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
NO	**ID PEMDA**	**UPB**	**TAHUN 2024**	**KETERANGAN**
22	05010010014011107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.644.782.570,00	Pembangunan SPAM Singkuang Jl Karang Mulyo 2
23	05010010014011095	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.167.060.800,00	Pembangunan SPAM Labanan Anak1
TOTAL			**304.647.279.784,81**	**TOTAL 2023 DAN 2024**



LAMPIRAN 10

RINCIAN TABEL PROPERTI INVESTASI DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI TAHUN 2024

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI

Lampiran 10

NO		NAMA ASET	HARGA PEROLEHAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024	LOKASI	TERCATAT PADA KIB C
C		GEDUNG DAN BANGUNAN												
	1	GEDUNG OLAH RAGA PEMUDA	3.823.462.841,00	76.469.256,00	815.672.068,00	3.007.790.773,00	892.141.324,00	2.931.321.517,00	968.610.580,00	2.854.852.261,00	1.045.079.836,00	2.778.383.005,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	PUPR
	2	PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS	286.207.413.000,00	5.724.048.260,00	74.537.273.163,00	210.680.239.837,00	80.261.321.423,00	205.946.091.577,00	80.283.821.423,00	205.923.591.577,00	86.007.869.683,00	200.199.543.317,00	Jl. RM Ayoeb Kel Rinding	PUPR
	3	GEDUNG BUSAK MALUR	460.494.000,00	9.209.880,00	106.784.911,00	353.709.089,00	115.994.791,00	344.499.209,00	125.204.671,00	335.289.329,00	134.414.551,00	326.079.449,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	PUPR
	4	STADION MINI OLIMPIC	72.297.466.424,00	1.445.949.328,00	120.495.777,00	72.176.970.647,00	1.566.445.105,00	70.731.021.319,00	3.012.394.433,00	69.285.071.991,00	4.458.343.761,00	67.839.122.663,00	Kel. Teluk Bayur	PUPR
	5	WISMA ATLIT	1.376.396.000,00	27.527.920,00	364.744.940,00	1.011.651.060,00	392.272.860,00	984.123.140,00	419.800.780,00	956.595.220,00	447.328.700,00	929.067.300,00	Kampung Tanjung Batu	PUPR
	6	MESS BERAU SAMARINDA 1	1.197.000.000,00	23.940.000,00	600.495.000,00	596.505.000,00	624.435.000,00	572.565.000,00	648.375.000,00	548.625.000,00	672.315.000,00	524.685.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
	7	MESS BERAU SAMARINDA 2	1.125.000.000,00	22.500.000,00	564.375.000,00	560.625.000,00	586.875.000,00	538.125.000,00	609.375.000,00	515.625.000,00	631.875.000,00	493.125.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
			366.487.232.265,00	**7.329.644.644,00**	**77.109.840.859,00**	**288.387.491.406,00**	**84.439.485.503,00**	**282.047.746.762,00**	**86.067.581.887,00**	**280.419.650.378,00**	**93.397.226.531,00**	**273.090.005.734,00**		

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI

Lampiran 10

NO		NAMA ASET	HARGA PEROLEHAN	LOKASI	TERCATAT PADA KIB A
A		**TANAH**			
	1	TANAH PEMKAB BERAU EX BSC	2.700.000.000,00	Kec. Gunung tabur	BPKAD
	2	TANAH PEMKAB BERAU EX PLTU SAMBAKUNGAN	461.844.520,00	Kampung Sambakungan	BPKAD
			3.161.844.520,00		



LAMPIRAN 11

Rincian Denda Pekerjaan Pihak Ketiga Atas
Kurang Volume Tahun 2024

Lampiran 11

NO	URAIAN	PENYEDIA	Koreksi kurang Volume
	DINAS PERHUBUNGAN		
1	PJU TANJUNG REDEB	CV PRIMA ABYAKTA SENTOSA	76.402.585,53
2	PJU TANJUNG REDEB	CV SOLARINDO JAYA	64.650.752,50
3	PJU TANJUNG REDEB	PT PERLENGKAPAN INDONESIA	4.990.000,00
4	PJU TANJUNG BATU	CV SOLARINDO JAYA	26.022.909,75
5	PJU BUYUNG-BUYUNG	CV SOLARINDO JAYA	17.028.772,56
6	PJU TELUK BAYUR	PT SEVEN ENERGI	4.406.750,40
7	PJU SAMBALIUNG	PT SEVEN ENERGI	4.773.979,60
8	PJU BATU PUTIH	PT SEVEN ENERGI	2.797.937,00
9	PJU GUNUNG TABUR	PT SEVEN ENERGI	7.554.429,60
10	DERMAGA P DERAWAN	CV DELTA PRATAMA	86.463.295,75
	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG		
11	Lanjutan Pembangunan SPAM Sistem Labanan	PT. RIS PUTRA DELTA KSO PT. SENONI KARYA UTAMA (RIS-SKU,KSO)	54.692.196,72
12	Lanjutan Pembangunan Turap Sheet Pile Belakang Kantor Bupati (BANKEU)	PT. Megadarian Multi Perkasa	403.266.382,61
13	Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sulaiman - Teluk sumbang	PT. ERA BANGUN SARANA	149.917.159,71
14	Lanjutan Pembangunan SPAM Singkuang	PT. DHARMA KARYA DHIKA ALAMBHANA	85.050.000,00
15	Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pulau Derawan Kec. Tanjung Redeb	PT. Berkat Indohana Lestari	351.096.298,66
16	Lanjutan Revitalisasi Jalan & Bangunan Pelengkap Kawasan Pangeran Antasari - Sudirman (APBD + Bankeu)	PT. Megadarian Multi Perkasa	210.819.966,18
17	Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan 2 - Prapatan - Sultan Agung - Kedaung Kec. Tanjung Redeb	PT. BUMI LASINDRANG	69.017.583,89
18	Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pemuda (Bankeu)	PT. Hiqmah Aldina Prima	125.763.289,36
19	Lanjutan Pembangunan Turap Sambaliung	PT. Jasin Effrin Jaya	25.190.208,00
20	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Tasuk Kec. Gunung Tabur	PT. DAYA PERKASA	451.810.786,71
21	Lanjutan Pembangunan Turap Gunung Tabur RT.1	PT. Trinanda Karya Utama	82.100.712,99
22	Pembangunan Jalan Kampung Jagung Samburakat Kec. Gn. Tabur	PT Megadarian Multi Perkasa	9.124.876,96
23	Pembangunan Embung Air Baku Maratua	CV. Mojo Joyo	220.335.946,65
24	Pekerjaan Rehab Total Kantor Camat Gunung Tabur	cv. mitra tiga bersaudara	33.126.932,88
25	Pekerjaan Rehab Sedang Kantor Camat Biduk-Biduk T.A. 2024	CV. Maheswara Dewa Perkasa	15.140.418,28
	RSUD Dr ABDUL RIVAI		
26	Konstruksi Pengembangan RSUD (BLUD)	PT Permata Anugerah	1.917.785.119,51
JUMLAH			**4.499.329.291,80**



LAMPIRAN 12

RINCIAN MASING – MASING POS ASET TIDAK BERWUJUD

	REKAP ASET TAK BERWUJUD	NILAI
1	**DPUPR**	
	DED Pengaman Sungai Jalan Bujangga (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	1.376.491.800,00
	Feasibility Study Dan Masterplan Pembangunan Jalan Jalur Utara Maratua (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	1.244.654.100,00
	Reklas Ke ATB upadting survey kondisi jalan pendukung usulan apbn/bankeu (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	991.506.900,00
	DED Pembangunan Jalan Kawasan Dari Rantau Panjang (Samping Pesantren) menuju Poros Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	954.083.296,00
	Reklas Ke ATB DED Pengaman Sungai Jalan Bujangga (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	604.602.600,00
	Reklas Ke ATB penyusunan DED dan FS Pengaman Pantai Pulau Derawan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	581.287.400,00
	Reklas Ke ATB DED pengaman Sungai jalan bujangga (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	495.273.600,00
	Reklas Ke ATB DED Penataan Kawasan Tepian Kecamatan Sambaliung (APBD-P) (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	494.173.110,00
	Reklas Ke ATB DED Penataan Kawasan Tepian Kecamatan Gunung tabur (APBD-P) (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	491.230.500,00
	Reklas Ke ATB penyusunan DED dan FS Pengaman Pantai Pulau Derawan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	387.129.600,00
	Reklas Ke ATB Studi Kajian Air Baku SPAM Tembudan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	370.328.487,00
	Reklas Ke ATB FS peningkatan & perluasan SPAM merancang (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	352.225.200,00
	Reklas Ke ATB DED bangunan Pengaman Sungai Turap gurimbang TA 2024 (APBD-P) (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	299.533.500,00
	Reklas Ke ATB DED bangunan Pengaman Sungai Turap Sambaliung (APBD-P) (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	294.705.000,00
	Reklas Ke ATB penyusunan DED dan FS Pengaman Pantai Pulau derawan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	291.590.600,00
	Reklas Ke ATB Penyusunan DED dan FS Pengaman Pantai Pulau Derawan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	197.961.400,00
	Aplikasi pendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.622.500,00
	FS & DPPT Kolam Detensi Kedaung (APBD-P) (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	98.574.549,00
	Pengadaan Peta Dasar untuk Review Dokumen RTRW Kabupaten Berau (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	97.331.460,00
	Reklas Ke ATB Pelaksanaan E- Paksi dan perencanaan teknis DI tasuk Pandukung DAK TA 2025 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	89.500.000,00
	REklas ke ATB pelaksanaan E-Paksi dan Perencanaan teknis D I R Pilanjau Pendukung DAK TA 2025 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	89.450.000,00
	Reklas Ke ATB Pelaksanaan E-paksi dan Perancaaan teknis DI Pulau besing Pendukung DAK TA 2025 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	89.444.000,00
	Penyusunan Dokumen KLHS	480.900.000,00
	Pengadaan Peta Dasar Untuk Review Dokumen RTRW Kabupaten Berau	97.331.460,00
	Penyusunan Dokumen RTRWK	579.810.000,00
	Aplikasi Pendukung Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan	99.622.500,00
2	**BAPELITBANG**	
	ASET TIDAK BERWUJUD - KAJIAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN REVIU RPKP	49.905.600,00
3	**BAPENDA**	
	Aset Tidak Berwujud Kajian Pemutahiran Nilai Jual Objek Pajak - Pajak PBB-P2.	275.000.000,00
	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi SIMHORE.	50.000.000,00
	Kajian Potensi Pendapatan Tahun 2025-2030	150.000.000,00
4	**BPBD**	180.000.000,00
	Aset Tidak Terwujut-Kajian- Penyusunan kajian risiko Bencana (KRB) Termin Pertama	120.000.000,00
	Aset Tidak Terwujut-Kajian- Penyusunan kajian risiko Bencana (KRB) Termin ke 2	
5	**DISBUDPAR**	
	Integrasi Sistem Jelajah Berau	49.950.000,00
	Aset Tidak Berwujud-Kajian	375.000.000,00

	DBH/DR Pengembangan Sistem Informasi SIDEWI Pariwisata	49.950.000,00
	l Aset Tidak Berwujud-Kajian	149.980.000,00
6	**DISDIK**	
	Aset Tak Berwujud Software Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (05.0004.5.2.06.01) TA. 2024	35.000.000,00
	Aset Tidak Berwujud - Software - Pengadaan E Book Sekolah Penunjang Literasi (02.0027.5.2.06) TA. 2024	486.500.000,00
	Aset Tidak Berwujud - Software, Pengembangan Aplikasi Perencanaan Disdik dan Sekolah (Appendiks) 06.0011.5.2.03.01 TA. 2024	19.950.000,00
7	**DISPORA**	
	Penyusunan Kajian / Road Map Desain Besar Olahraga Daerah Kabupaten Berau	199.472.550,00
	Kajian Akademis Pembentukan UPTD Sarana & Prasarana Pemuda dan Olahraga	49.747.999,00
8	**DTPHP**	
	Aset tidak berujud-Kajian-Kajian rencana penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan komoditas jagung (Road Map)	197.579.000,00
9	**DISDUKCAPIL**	
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	35.000.000,00
10	**DISKOPERINDAG**	
	KAJIAN STUDI KELAYAKAN PE,MBANGUNAN SENTRA KAKAO	99.567.000,00
11	**DISKOMINFO**	
	Aset Tidak Berwujud- Software (Pengembangan Aplikasi -Belanja Pengembangan Portal Data) PPTK Leny Damayanti.Amd.S.Stat Bidang Santik	58.608.000,00
	Aset Tidak Berwujud Software Update Portal Geopasial Bidang Aptika PPTK Syarifuddin Nur,SE	63.381.000,00
	Aset Tidak Berwujud -Software Upgrade System Aplikasi Presensi Kehadiran ASN Pemkab Berau Bidang Aptika PPTK Syarifuddin Nur,SE	99.345.000,00
12	**DISPERKIM**	
	Kajian dan Pendataan Ulang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	99.800.000,00
13	**DPMPTSP**	
	Aset Tak Berwujud- Peningkatan Aplikasi si WALET	34.920.000,00
	Penyusunan Kajian / Road Map Penanaman Modal	296.616.800,00
14	**SETDA**	
	Aset Tidak Berwujud - Software	49.800.000,00
	Aset Tidak Berwujud Software	59.000.000,00
	Aset Tidak Berwujud - Software	49.981.000,00
15	**SETWAN**	
	Belanja Modal Aset Tidak berwujud	35.000.000,00
		14.667.417.511,00